



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2025

BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN /KOTA.

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

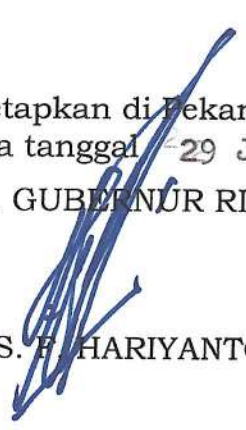
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Juni 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,


S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 22

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-10
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana	II-23
2.1.1.3. Aspek Demografi	II-26
2.1.1.4. Ketenagakerjaan	II-32
2.1.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah	II-34
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-39
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi	II-39
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-62
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-72
2.1.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-72
2.1.3.2. Fokus Infrastruktur Wilayah.....	II-84
2.1.3.3. Fokus Iklim Investasi	II-84
2.1.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-85
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-87
2.1.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-87

2.1.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-165
2.1.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-282
2.1.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-330
2.1.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-335
2.1.4.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-355
2.1.4.7. Unsur Pemerintahan Umum.....	II-358
2.2. Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Riau Tahun 2022	II-366
2.2.1. Capaian Indikator Makro Provinsi Riau Tahun 2023	II-366
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-367
2.2.1.2 Inflasi	II-367
2.2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-368
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-368
2.2.1.5 Kemiskinan	II-369
2.2.1.6 Indeks Gini.....	II-369
2.2.1.7 Indeks Ketimpangan Williamson.....	II-370
2.2.1.8 Emisi Gas Rumah Kaca	II-370
2.2.2. Capaian Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023 .	II-370
2.2.2.1 Kesejahteraan Masyarakat	II-371
2.2.2.2 Pelayanan Publik.....	II-372
2.2.2.3 Daya Saing Daerah	II-372
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-372
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-373
2.3.2. Isu Strategis Daerah	II-379
2.3.3. Aspek Geografi	II-384
2.3.4. Aspek Demografi	II-384
2.3.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-385
2.3.6. Aspek Pelayanan Umum	II-386
2.3.6.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-386
2.3.6.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.	II-388
2.3.6.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-391

2.3.6.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-392
2.3.6.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-392
2.3.6.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-394
2.3.6.7. Unsur Pemerintahan Umum.....	II-394
2.3.7. Aspek Daya Saing.....	II-394
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-3
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi	III-4
3.1.1.1 PDRB menurut Lapangan Usaha	III-4
3.1.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran.....	III-6
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	III-8
3.1.3. Inflasi	III-10
3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-11
3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka	III-13
3.1.6. Kemiskinan	III-14
3.1.7. Gini Rasio	III-16
3.1.8. Indeks Ketimpangan Williamson	III-17
3.1.9. Indikator Makro Lainnya	III-19
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-20
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-26
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-31
3.2.4. Peta Kapasitas Fiskal	III-32
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.....	IV-2
4.1.3. Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025	IV-6

4.2. Prioritas Pembangunan	IV-8
4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-8
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025	IV-9
Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	V-1
5.1 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025	V-1
5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	V-2
5.1.2. Kemiskinan.....	V-3
5.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka	V-4
5.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	V-5
5.1.5. Gini Rasio	V-6
5.2 Prioritas Pembangunan Provinsi yang didukung oleh Kabupaten/Kota	V-7
5.3 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.....	V-111
Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah	VI-1
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VII-1
Bab VIII Penutup	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-3
Tabel 2.2. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.3. Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-8
Tabel 2.4. Jenis Satuan Tanah Provinsi Riau	II-11
Tabel 2.5. Sungai yang Bermuara di Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-12
Tabel 2.6. Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan (mm) per Bulan Provinsi Riau Tahun 2023	II-16
Tabel 2.7. Keadaan Suhu di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Riau Tahun 2023 (°C)	II-17
Tabel 2.8. Kelembaban Udara di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Riau Tahun 2023 (%)	II-18
Tabel 2.9. Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2016.....	II-20
Tabel 2.10. Rekapitulasi Kajian Resiko Bencana di Provinsi Riau	II-24
Tabel 2.11. Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Tahun 2023 di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota	II-25
Tabel 2.12. Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023	II-27
Tabel 2.13. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-28
Tabel 2.14. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Riau Tahun 2023	II-30
Tabel 2.15. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-32
Tabel 2.16. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota, 2023	II-33

Tabel 2.17. Jumlah Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan di Kabupaten/Kota, 2023	II-34
Tabel 2.18. Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2.19. Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektorial Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019- 2023	II-41
Tabel 2.20. Kontribusi Pertumbuhan Sektorial dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019- 2023 (%)	II-43
Tabel 2.21. Kontribusi Pertumbuhan Sektorial dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019- 2023 (%).....	II-43
Tabel 2.22. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dengan Migas Tahun 2019-2023 (Rp. Milyar)	II-46
Tabel 2.23. Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (%)	II-48
Tabel 2.24. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Juta Rp)	II-52
Tabel 2.25. Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-53
Tabel 2.26. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-55
Tabel 2.27. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022 – 2023	II-57
Tabel 2.28. Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2022-2023	II-59
Tabel 2.29. Perkembangan Komponen Indikator IPM Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-64
Tabel 2.30. IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023	II-64
Tabel 2.31. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-73
Tabel 2.32. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023	II-73

Tabel 2.33. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita/Tahun Provinsi Riau Tahun 2019-2022	II-75
Tabel 2.34. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-77
Tabel 2.35. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-78
Tabel 2.36. Neraca Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-79
Tabel 2.37. Perhitungan Nilai Static Location Quotient (SLQ) Sektoral di Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-81
Tabel 2.38. Perhitungan Nilai Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektoral di Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2.39. Angka Kriminalitas di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2022.....	II-84
Tabel 2.40. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Riau, Agustus 2019 – Agustus 2023	II-85
Tabel 2.41. Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2023	II-86
Tabel 2.42. Angka Partisipasi Kasar SD/MI Provinsi Riau	II-87
Tabel 2.43. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Provinsi Riau.....	II-88
Tabel 2.44. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK Provinsi Riau (%).....	II-89
Tabel 2.45. Angka Partisipasi Murni SD/MI Provinsi Riau (%).....	II-90
Tabel 2.46. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Provinsi Riau (%)	II-91
Tabel 2.47. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK Provinsi Riau (%).....	II-92
Tabel 2.48. Angka Partisipasi Sekolah Riau dan Indonesia Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2022 di Provinsi Riau	II-93
Tabel 2.49. Kondisi Ruang Kelas SMA/SMK dalam Kondisi Baik di Provinsi Riau 2018-2022 (%)	II-94
Tabel 2.50. Revitalisasi SMK di Provinsi Riau Tahun 2022.....	II-94
Tabel 2.51. Rasio Guru dengan Murid Sekolah Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022	II-96
Tabel 2.52. Persentase Guru SMA/SMK/SLB yang Berkualifikasi dan Tersertifikasi.....	II-96
Tabel 2.53. Perkembangan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Riau Tahun 2019-2022	II-97

Tabel 2.54. Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023	II-98
Tabel 2.55. Umur Harapan Hidup di Provinsi Riau Tahun 2018-2022	II-101
Tabel 2.56. Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2018- 2022	II-102
Tabel 2.57. Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi di Provinsi Riau Tahun 2023	II-103
Tabel 2.58. Status Balita Wasting berdasarkan BB/TB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022-2023.....	II-105
Tabel 2.59. Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-106
Tabel 2.60. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022	II-110
Tabel 2.61. Panjang Jalan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) Tahun 2023.....	II-111
Tabel 2.62. Rekap Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Perkabupaten/Kota di Provinsi Riau Berdasarkan Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2022 ..	II-112
Tabel 2.63. Rekap Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Per kabupaten/Kota di Provinsi Riau Berdasarkan Panjang Tiap Jenis Permukaan Jalan Tahun 2022.....	II-113
Tabel 2.64. Rekap Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Per kabupaten/Kota di Provinsi Riau Berdasarkan Panjang Tiap Kondisi Tahun 2022	II-114
Tabel 2.65. Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022	II-114
Tabel 2.66. Besaran Parameter Kinerja SPM untuk Indeks Aksesibilitas	II-115
Tabel 2.67. Indeks Aksesibilitas Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022	II-115
Tabel 2.68. Analisa Perbandingan Parameter Kinerja SPM untuk Indeks Aksesibilitas di Provinsi Riau Tahun 2022	II-117
Tabel 2.69. Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Riau.....	II-119
Tabel 2.70. Kondisi Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Riau.....	II-120
Tabel 2.71. Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau Tahun 2020	II-122

Tabel 2.72. Rekapitulasi Pengaman Pantai di Pulau Terluar Provinsi Riau Tahun 2021-2023.....	II-123
Tabel 2.73. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2022.....	II-124
Tabel 2.74. Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Provinsi Riau Tahun 2022.....	II-125
Tabel 2.75. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum di Provinsi Riau Tahun 2018-2022.....	II-126
Tabel 2.76. Rencana Kinerja Layanan SPAM Regional	II-127
Tabel 2.77. Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Fasilitas Buang Air Besar Sendiri atau Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Riau, 2019 - 2023	II-129
Tabel 2.78. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022	II-130
Tabel 2.79. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2.80. Data Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun 2022	II-132
Tabel 2.81. Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023 (Unit)	II-133
Tabel 2.82. Realisasi Rumah Layak Huni Korban Bencana dan Korban Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi Yang Tertangani Tahun 2021-2023	II-134
Tabel 2.83. Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Berdasarkan SK Semula dan SK ter Update	II-135
Tabel 2.84. Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi dari Tahun 2017 s/d 2023	II-137
Tabel 2.85. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023	II-138

Tabel 2.86.	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-139
Tabel 2.87.	Angka Kriminalitas Tahun 2019-2022 di Provinsi Riau	II-140
Tabel 2.88.	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-141
Tabel 2.89.	Rekapitulasi Data PPNS se-Provinsi Riau Tahun 2023	II-142
Tabel 2.90.	Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023.....	II-143
Tabel 2.91.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau Tahun 2023	II-145
Tabel 2.92.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Riau Tahun 2018–2023	II-146
Tabel 2.93.	Persentase Jumlah PPKS yang Tertangani di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-148
Tabel 2.94.	Penguatan Kapasitas PSKS Tahun 2017- 2021.....	II-150
Tabel 2.95.	Data PSKS Sasaran Garapan Dinas Sosial Tahun 2019-2024	II-150
Tabel 2.96.	Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021-2023	II-151
Tabel 2.97.	Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa dari Tahun 2017- 2021	II-153
Tabel 2.98.	Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani Tahun 2022 pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa.....	II-154
Tabel 2.99.	Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Tahun 2022.....	II-154
Tabel 2.100.	Data Penyandang Disabilitas Mental Terlantar yang dilayani pada UPT Bina Laras dari 2017 – 2021	II-156
Tabel 2.101.	Data Warga Binaan Sosial UPT Bina Laras yang dilayani Tahun 2022	II-156
Tabel 2.102.	Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Bina Laras Tahun 2022	II-157
Tabel 2.103.	Data Anak Terlantar yang dilayani pada UPT PSPA dari Tahun 2018 – 2022	II-158
Tabel 2.104.	Data Anak Terlantar yang dilayani UPT PSPA Tahun 2022	II-159
Tabel 2.105.	Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSPA Tahun 2022.....	II-160

Tabel 2.106. Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani pada UPT PSTW Khusnul Khotimah dari Tahun 2017 – 2021.....	II-161
Tabel 2.107. Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani pada UPT PSTW Khusnul Khotimah Tahun 2022	II-162
Tabel 2.108. Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSTW Khusnul Khotimah Tahun 2022.....	II-163
Tabel 2.109. Data Gelandang dan Pengemis yang dilayani pada Dinas Sosial Provinsi Riau dari Tahun 2017 – 2021.....	II-164
Tabel 2.110. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-165
Tabel 2.111. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau Tahun 2018-2023...	II-166
Tabel 2.112. Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Mengurus Izin Kerja di Provinsi Riau Tahun 2013-2023	II-167
Tabel 2.113. Jumlah Peserta Pelatihan dan Penempatan Pelatihan Tahun 2023.....	II-169
Tabel 2.114. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 ...	II-170
Tabel 2.115. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023	II-171
Tabel 2.116. Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-173
Tabel 2.117. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau Tahun 2018-2022.....	II-174
Tabel 2.118. IPM dan IPG Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.	II-175
Tabel 2.119. Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-176
Tabel 2.120. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-177
Tabel 2.121. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023.....	II-179
Tabel 2.122. Perkembangan Rasio Produksi dan Kebutuhan Beras dan Jagung di Provinsi Riau Tahun 2018-2022.....	II-180
Tabel 2.123. Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditi Sayur-sayuran dan Buah-buahan di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-181

Tabel 2.124. Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditi Sayur-sayuran dan Buah-buahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022	II-182
Tabel 2.125. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-183
Tabel 2.126. Konsumsi Energi Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023.....	II-185
Tabel 2.127. Konsumsi Protein Penduduk Provinsi Riau Tahun 2018-2023 Dirinci Menurut Kelompok Bahan Pangan	II-186
Tabel 2.128. Ketersediaan Pangan Utama Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023	II-187
Tabel 2.129. Rekapitulasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (2019 – 2023).....	II-189
Tabel 2.130. Daftar Inventarisasi Konflik dan Sengketa Pertanahan Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022 – 2023	II-192
Tabel 2.131. Indikator dan Parameter IKLH di Provinsi Riau	II-196
Tabel 2.132. IKLH Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023	II-198
Tabel 2.133. Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2018 – 2023	II-199
Tabel 2.134. Jumlah Timbulan Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2018 – 2023.....	II-200
Tabel 2.135. Persentase Perusahaan yang Taat terhadap Izin Lingkungan, PPLH dan PPULH yang Diterbitkan Tahun 2018- 2022	II-201
Tabel 2.136. Kawasan Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan SK Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.....	II-202
Tabel 2.137. Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-203
Tabel 2.138. Data Luas Lahan Kritis di dalam dan luar Kawasan Hutan per Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2018.....	II-203
Tabel 2.139. Rasio Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2018 - 2022.....	II-204
Tabel 2.140. Kebun dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-205
Tabel 2.141. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-207

Tabel 2.142. Jumlah Wajib KTP yang sudah dan belum rekam KTP-el Di Provinsi Riau Tahun 2023	II-208
Tabel 2.143. Jumlah Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota per Jenis Kelamin Tahun 2023	II-209
Tabel 2.144. Jumlah Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023.....	II-209
Tabel 2.145. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-210
Tabel 2.146. Jumlah Kecatatan Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-211
Tabel 2.147. Jumlah Kecatatan Provinsi Riau Berdasarkan Kelompok Umur Sekolah Tahun 2023.....	II-213
Tabel 2.148. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023.....	II-216
Tabel 2.149. Klasifikasi Desa di Provinsi Riau Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023	II-218
Tabel 2.150. Perkembangan BUMDes di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023	II-218
Tabel 2.151. Klasifikasi BUMDes di Provinsi Riau Tahun 2023	II-219
Tabel 2.152. Klasifikasi BUMDES Bersama di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-220
Tabel 2.153. Klasifikasi BUMDES Bersama di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-222
Tabel 2.154. Perkembangan Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-223
Tabel 2.155. Capaian Indikator Kependudukan Provinsi Riau dari Tahun 2018 s/d 2023	II-227
Tabel 2.156. Pergerakan Orang dan Barang pada Beberapa Simpul Transportasi di Provinsi Riau Tahun 2016-2022.....	II-229
Tabel 2.157. Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang Pelabuhan Udara di Provinsi Riau Tahun 2018-2022.....	II-230
Tabel 2.158. Kunjungan Kapal Pada Terminal Port/Pelabuhan di Provinsi Riau Tahun 2017 - 2022.....	II-231
Tabel 2.159. Jumlah Layanan Angkutan Darat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-232

Tabel 2.160. Jumlah Kepemilikan Kir Angkutan Umum Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-232
Tabel 2.161. Jumlah Pemasangan Rambu - Rambu di Provinsi Riau Tahun 2018-2022	II-234
Tabel 2.162. Jumlah Pemasangan Rambu - Rambu di Provinsi Riau Tahun 2018-2022	II-243
Tabel 2.163. Lintasan Penyeberangan Provinsi Riau yang Telah Beroperasi	II-248
Tabel 2.164. Lintasan Penyeberangan Provinsi Riau Rencana Beroperasi	II-248
Tabel 2.165. Sarana Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan pada UPT Pengelola Perhubungan.....	II-249
Tabel 2.166. Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022.....	II-250
Tabel 2.167. Indikator Layanan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-251
Tabel 2.168. Perkembangan Koperasi di Provinsi Riau Tahun 2019– 2023.....	II-253
Tabel 2.169. Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-254
Tabel 2.170. Perkembangan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-255
Tabel 2.171. Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-256
Tabel 2.172. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Se- Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2023	II-258
Tabel 2.173. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Se- Provinsi Riau Tahun 2018 s/d 2023	II-259
Tabel 2.174. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Per Sektor Provinsi Tahun 2019-2023.....	II-260
Tabel 2.175. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Per Sektor Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-262
Tabel 2.176. Jumlah Venue Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	II-264
Tabel 2.177. Perolehan Medali Provinsi Riau Pada Single Event Nasional Tahun 2019-2023.....	II-265
Tabel 2.178. Perolehan Medali Provinsi Riau Pada Multi Event Nasional Tahun 2019-2023.....	II-265

Tabel 2.179. Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional	II-267
Tabel 2.180. Organisasi Pemuda Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	II-268
Tabel 2.181. Persentase Pelayanan Pengamanan Persandian Pada Seluruh Kab/Kota dan OPD di Provinsi Riau dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2023	II-271
Tabel 2.182. Rincian OPD dengan Pelayanan Persandian	II-272
Tabel 2.183. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-272
Tabel 2.184. Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018- 2023 ..	II-274
Tabel 2.185. Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020-2023	II-275
Tabel 2.186. Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020-2023.....	II-275
Tabel 2.187. Data OPK Yang Dimafatkan Tahun 2020 – 2023	II-276
Tabel 2.188. Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan di Provinsi Riau Tahun 2020.....	II-277
Tabel 2.189. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-278
Tabel 2.190. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-279
Tabel 2.191. Rekapitulasi IPLM Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-280
Tabel 2.192. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-281
Tabel 2.193. Nilai Laporan Pengawasan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2022 - 2023	II-282
Tabel 2.194. Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023	II-282
Tabel 2.195. Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-283
Tabel 2.196. Produksi Perikanan Menurut Jenis di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023	II-285

Tabel 2.197. Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-287
Tabel 2.198. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023.....	II-288
Tabel 2.199. Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau Menurut Pintu Masuk Utama Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-289
Tabel 2.200. Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2023	II-290
Tabel 2.201. Rata-rata Lama Menginap Tamu Tahun 2018-2023	II-290
Tabel 2.202. Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-292
Tabel 2.203. Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berdasarkan Sub Sektor di Provinsi Riau Tahun 2023	II-293
Tabel 2.204. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2016-2023.....	II-295
Tabel 2.205. Perkembangan Luas Panen Sayur-Sayuran di Provinsi Riau Tahun 2016 – 2022	II-296
Tabel 2.206. Perkembangan Jumlah Tanaman Menghasilkan dan Produksi Buah-Buahan (Pohon/Rumpun) di Provinsi Riau Tahun 2016-2023.....	II-297
Tabel 2.207. Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-299
Tabel 2.208. Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-299
Tabel 2.209. Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-300
Tabel 2.210. Rasio Produksi dan Konsumsi Telur Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022	II-301
Tabel 2.211. Berdasarkan Laporan iSIKHNAS Petugas Pelayanan Veteriner	II-303
Tabel 2.212. Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-304
Tabel 2.213. Kawasan Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan SK Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021	II-309

Tabel 2.214. Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-310
Tabel 2.215. Data Luas Lahan Kritis di dalam dan luar Kawasan Hutan per Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2018.....	II-310
Tabel 2.216. Rasio Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2018 - 2022.....	II-311
Tabel 2.217. Kebun dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-312
Tabel 2.218. Produksi Hasil Tambang di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2022.....	II-314
Tabel 2.219. Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-315
Tabel 2.220. Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-316
Tabel 2.221. Neraca Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-317
Tabel 2.222. Ekspor Provinsi Riau Golongan Barang HS 2 Digit Tahun 2021 – 2023.....	II-318
Tabel 2.223. Ekspor Provinsi Riau Menurut Kawasan Negara Tujuan Tahun 2021-2022.....	II-319
Tabel 2.224. Ekspor Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota dan Pelabuhan Muat Tahun 2021-2023.....	II-320
Tabel 2.225. Impor Provinsi Riau Golongan Barang HS 2 Digit Tahun 2021 – 2022.....	II-321
Tabel 2.226. Impor Provinsi Riau Menurut Kawasan Negara Asal Tahun 2021-2023.....	II-323
Tabel 2.227. Impor Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota dan Pelabuhan Bongkar Tahun 2021-2023.....	II-323
Tabel 2.228. Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-325
Tabel 2.229. Perkembangan sektor industri di Provinsi Riau Tahun 2018-2021	II-326
Tabel 2.230. Lokasi Kawasan Industri di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-327
Tabel 2.231. Lokasi SIKIM di Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-327
Tabel 2.232. Rencana SIKIM di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-328
Tabel 2.233. Target dan Realisasi Penempatan Transmigran Provinsi Riau Tahun 2016 - 2023.....	II-328

Tabel 2.234. Realisasi Penempatan Transmigran Menurut Daerah Asal Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	II-329
Tabel 2.235. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023	II-330
Tabel 2.236. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-331
Tabel 2.237. Nilai PMPRB Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-332
Tabel 2.238. Rekap Nilai Kabupaten Kota 2019-2023	II-333
Tabel 2.239. Pengesahan Peraturan Daerah Tahun 2019 – 2022	II-334
Tabel 2.240. Jumlah Anggota DPRD Periode 2019 - 2024 perfraksi	II-334
Tabel 2.241. Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-335
Tabel 2.242. Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019-2023 (Ribu-Rupiah).....	II-336
Tabel 2.243. Jumlah ASN di Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-338
Tabel 2.244. Jumlah ASN di Provinsi Riau Yang Terlibat Kasus Korupsi Tahun 2019 -2023.....	II-339
Tabel 2.245. Capaian Sistem Merit Tahun 2019 -2023.....	II-340
Tabel 2.246. Capaian Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Riau 2023.....	II-341
Tabel 2.247. Capaian Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2023	II-341
Tabel 2.248. Pejabat ASN di Provinsi Riau yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2019-2023.....	II-342
Tabel 2.249. ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Fungsional Tahun 2019-2023.....	II-343
Tabel 2.250. Rekapitulasi Penilaian Perangkat Daerah Provinsi Riau dalam Mengukur Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi tahun 2023	II-346
Tabel 2.251. Bidang dan Jumlah Penelitian dan Pengembangan (R&D) Provinsi Riau oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2023	II-352

Tabel 2.252. Jumlah Pagelaran/Event/Acara yang diselenggarakan di Anjungan Riau TMII Jakarta Periode Tahun 2019-2023.....	II-353
Tabel 2.253. Jumlah Layanan Badan Penghubung Terhadap Masyarakat dan Lembaga Periode Tahun 2019-2023	II-355
Tabel 2.254. Rekomendasi Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023	II-356
Tabel 2.255. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023	II-356
Tabel 2.256. Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi Stranas PK Pemerintah Provinsi Riau	II-357
Tabel 2.257. Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi MCP Korsupgah Pemerintah Provinsi Riau	II-358
Tabel 2.258. Rekapitulasi Hasil Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Riau	II-358
Tabel 2.259. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-359
Tabel 2.260. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2017-2020.....	II-359
Tabel 2.261. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2021-2023.....	II-360
Tabel 2.262. Jumlah Ormas/LSM, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2017-2023	II-363
Tabel 2.263. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2023.....	II-363
Tabel 2.264. Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Periode 2019-2023.....	II-364
Tabel 2.265. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-365
Tabel 2.266. Angka Jumlah Konflik Provinsi Riau berdasarkan Jenisnya dari tahun 2018 - 2022	II-365
Tabel 2.267. Perkembangan Indikator Makro Provinsi Riau Tahun 2020-2022 Serta Target dan Capaian Tahun 2022 (persen)	II-366
Tabel 2.268. Tingkat Capaian Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Dalam RKPD Tahun 2023.....	II-371
Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025.....	III-3

Tabel 3.2.	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024-2025 Provinsi Riau.....	III-4
Tabel 3.3.	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024-2025 Provinsi Riau	III-7
Tabel 3.4.	Target Indikator Makro Terkait PDRB Provinsi Riau Tahun 2025	III-8
Tabel 3.5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025 Provinsi Riau	III-9
Tabel 3.6.	Laju Inflasi Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024 – 2025 Provinsi Riau	III-11
Tabel 3.7.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 –2023 dan Target 2024-2025 Provinsi Riau	III-13
Tabel 3.8.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024-2025 Provinsi Riau	III-14
Tabel 3.9.	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024 – 2025 Provinsi Riau	III-16
Tabel 3.10.	Gini Rasio Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024 - 2025 Provinsi Riau	III-17
Tabel 3.11.	Indeks Ketimpangan Williamson tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024 - 2025 Provinsi Riau.....	III-19
Tabel 3.12.	Target Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tahun 2025 Provinsi Riau	III-19
Tabel 3.13.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2022-2026 (dalam juta rupiah)	III-26
Tabel 3.14.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 – 2026 (dalam juta rupiah)	III-30
Tabel 3.15.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Riau 2022 – 2026 (dalam juta rupiah)	III-31
Tabel 3.16.	Realisasi dan Proyeksi/Target Kapasitas Fiskal Provinsi Riau 2022 – 2026 (dalam juta rupiah)	III-33

Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025	IV-3
Tabel 4.2.	Keselarasan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan antara Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2025	IV-6
Tabel 4.3.	Sandingan Indikator Makro RKP Dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025.....	IV-7
Tabel 4.4.	Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2025.....	IV-8
Tabel 4.5.	Daftar Prioritas, Program Prioritas disertai Pagu Pendanaan dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2025.....	IV-11
Tabel 5.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025	V-3
Tabel 5.2.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025	V-4
Tabel 5.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025	V-5
Tabel 5.4.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025	V-6
Tabel 5.5.	Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025	V-7
Tabel 5.6.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Kuansing.....	V-9
Tabel 5.7.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Indragiri Hilir....	V-18
Tabel 5.8.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kota Dumai	V-25
Tabel 5.9.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Siak	V-37
Tabel 5.10.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hilir	V-50
Tabel 5.11.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu	V-59
Tabel 5.12.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Indragiri Hulu ...	V-70
Tabel 5.13.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Kampar	V-78
Tabel 5.14.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Bengkalis	V-87
Tabel 5.15.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Pelalawan.....	V-96
Tabel 5.16.	Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kota Pekanbaru	V-103

Tabel 5.16.	Sinergitas Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	V-112
Tabel 6.1.	Rincian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi Riau..	VI-2
Tabel 6.2.	Rekapitulasi Program, Kegiatan Dan Sub Perangkat Daerah Provinsi Riau.....	VI-1059
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Riau.....	VII-2
Tabel 7.2.	Target Capaian Kinerja Provinsi Riau Tahun 2022-2025	VII-7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya	I-8
Gambar 2.1. Peta Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota	II-2
Gambar 2.2. Peta Jarak Antara Ibukota Kabupaten/Kota dengan Ibukota Provinsi Riau	II-4
Gambar 2.3. Letak Geografis Provinsi Riau	II-5
Gambar 2.4. Daerah Aliran Sungai Provinsi Riau	II-7
Gambar 2.5. Peta Geologi Provinsi Riau	II-9
Gambar 2.6. Kelas Jenis Tanah Provinsi Riau	II-12
Gambar 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai (<i>Sumber : RTRW Provinsi Riau</i>).....	II-15
Gambar 2.8. Penggunaan Lahan Provinsi Riau Menurut Luas Lahan	II-19
Gambar 2.9. Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Tahun 2020	II-21
Gambar 2.10. Tutupan Lahan Provinsi Riau Berdasarkan RTRW 2018-2038	II-21
Gambar 2.11. Luas Lahan Terbakar 2023	II-26
Gambar 2.12. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-29
Gambar 2.13. Piramida Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau, 2023	II-31
Gambar 2.14. Kontribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Dengan Migas Menurut Lapangan Usaha Utama Provinsi Riau 2019-2023	II-45
Gambar 2.15. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2023 (%)	II-47
Gambar 2.16. Perkembangan Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dan Nasional 2019 – 2023 (%).....	II-47
Gambar 2.17. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (%)	II-48
Gambar 2.18. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 (%)	II-50
Gambar 2.19. Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025	xxiv

Gambar 2.20. Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)	II-51
Gambar 2.21. Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2019–2023	II-54
Gambar 2.22. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-58
Gambar 2.23. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-58
Gambar 2.24. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023	II-60
Gambar 2.25. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Riau, Tahun 2023	II-61
Gambar 2.26. IPM Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-63
Gambar 2.27. IPM per Kabupaten/Kota 2023 dan Perkembangan Provinsi Riau 2019 – 2023	II-65
Gambar 2.28. Umur Harapan Hidup per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023	II-66
Gambar 2.29. Angka Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023	II-66
Gambar 2.30. Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023	II-67
Gambar 2.31. Pengeluaran Per Kapita per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023	II-68
Gambar 2.32. Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja Provinsi Riau 2019-2023..	II-69
Gambar 2.33. Laju Pertumbuhan PDRB HK per Pekerja	II-69
Gambar 2.34. Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-70
Gambar 2.35. Perkembangan Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja yang Berkerja pada Sektor Formal dan Non Formal Provinsi Riau Tahun 2019- 2023	II-71
Gambar 2.36. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Riau Tahun 2019- 2023	II-78

Gambar 2.37. Presentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial di Provinsi Riau Tahun 2018-2022	II-104
Gambar 2.38. Status balita berdasarkan <i>indeks</i> BB/TB di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-104
Gambar 2.39. Presentase Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Di Provinsi Riau Tahun 2021-2023.....	II-107
Gambar 2.40. Jumlah Kematian Ibu Menurut Fase di Provinsi Riau Tahun 2018-2023	II-107
Gambar 2.41. Treatment Coverage Provinsi Riau Tahun 2019-2022.....	II-108
Gambar 2.42. Trend Kasus HIV di Provinsi Riau Tahun 2018-2022	II-109
Gambar 2.43. Proporsi Status Jalan di Provinsi Riau Tahun 2022	II-116
Gambar 2.44. Trend Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum di Provinsi Riau Tahun 2018-2022	II-126
Gambar 2.45. Peta Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Provinsi Riau.....	II-243
Gambar 2.46. Peta Pelaksanaan Koridor Kereta Api di Provinsi Riau	II-246
Gambar 2.47. Indeks SPBE Provinsi Riau	II-252
Gambar 2.48. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2019-2020.....	II-269
Gambar 2.49. Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2023....	II-291
Gambar 2.50. Wilayah Pertambangan Provinsi Riau Berdasarkan SK Kepmen ESDM No. 100.K/MB.01/MEM.B/2022	II-313
Gambar 2.51. Peta Kompilasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-314
Gambar 2.52. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	II-316
Gambar 3.1. Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2021- 2025.....	III-9
Gambar 3.2. Grafik Perkembangan dan Target Inflasi Provinsi Riau Tahun 2021-2025.....	III-11
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan dan Target IPM Provinsi Riau Tahun 2021-2025	III-12
Gambar 3.4. Grafik Perkembangan dan Target TPT Provinsi Riau Tahun 2021-2025	III-14

Gambar 3.5.	Grafik Perkembangan dan Target Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2021-2025	III-15
Gambar 3.6.	Grafik Perkembangan dan Target Gini Rasio Provinsi Riau Tahun 2021-2025	III-17
Gambar 3.7.	Grafik Perkembangan dan Target Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Riau Tahun 2021-2025	III-18

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan-peraturan lainnya yang memberi kesempatan dan kewenangan lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dengan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan melalui jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam periode jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran,

lokasi sub kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diamanahkan untuk melakukan Persiapan Penyusunan RKPD. Adapun tahap dalam Persiapan Penyusunan RKPD adalah :
 - a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun Rencana RKPD Provinsi disusun berpedoman kepada RPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan pedoman Penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mencakup :

- a. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- b. Analisis Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
- c. Analisis Kapasitas Riil Keuangan Daerah;
- d. Penelaahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah;
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam Penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan dan sub kegiatan, selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda.

Penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dijadikan awal dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk merealisasikan antara perencanaan strategis jangka menengah kedalam perencanaan dan penganggaran tahunan. Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dimulai dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan perumusan rancangan akhir serta penetapan RKPD.

Selain pendekatan teknokratik dan partisipatif, proses penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ini juga dilakukan dengan pendekatan *bottom up planning* agar kebutuhan pembangunan dapat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang dimasyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai tingkat kabupaten/kota. Sedangkan pendekatan *top down planning* menjadi sangat penting karena RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 tahun

pertama RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Dengan demikian proses penyusunan RKPD ini senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

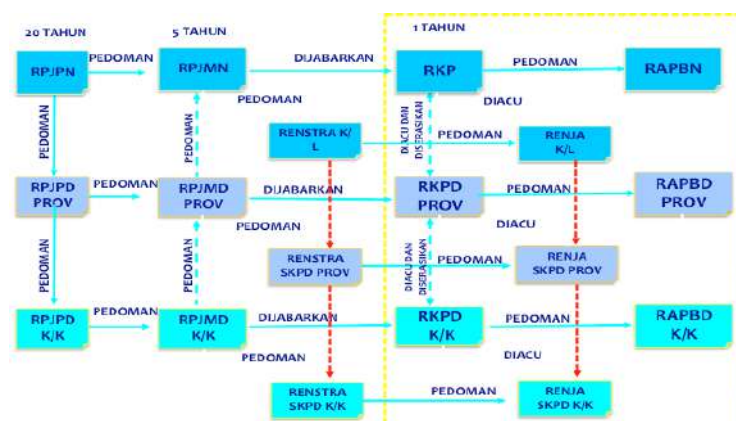
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan rencana pembangunan daerah ini dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan visi misi daerah kedalam rencana pembangunan daerah.

RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. RKPD Provinsi Riau ini merupakan Penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Riau diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Hubungan antar dokumen perencanaan pemerintah Provinsi Riau disajikan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1
Proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya

Hubungan dan hirarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 mempedomani pokok-pokok arah kebijakan dalam Rancangan RKP Tahun 2025.
2. RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahun pertama dari dua tahun perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026.
3. RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
4. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
5. RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dijadikan pedoman bagi daerah kabupaten/kota dan *stakeholder* dalam penyusunan rencana tahunan masing-masing daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Provinsi Riau yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPD. Secara khusus tujuan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis

kedalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Riau;

3. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2025 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan Provinsi Riau;
4. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Tahun 2025;
5. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025;
6. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Penyusunan RKPD Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat :

Bab I. Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika dokumen RKPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat tentang:

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah yang disini tercakup didalamnya adalah Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.
3. Permasalahan pembangunan daerah yang terdiri dari permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat tentang Arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Memuat tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang nantinya akan menjadi panduan bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana atau RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat tentang panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU dan IKK pada tahun perencanaan.

Bab VIII. Penutup

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Riau meliputi kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau beberapa tahun terakhir.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

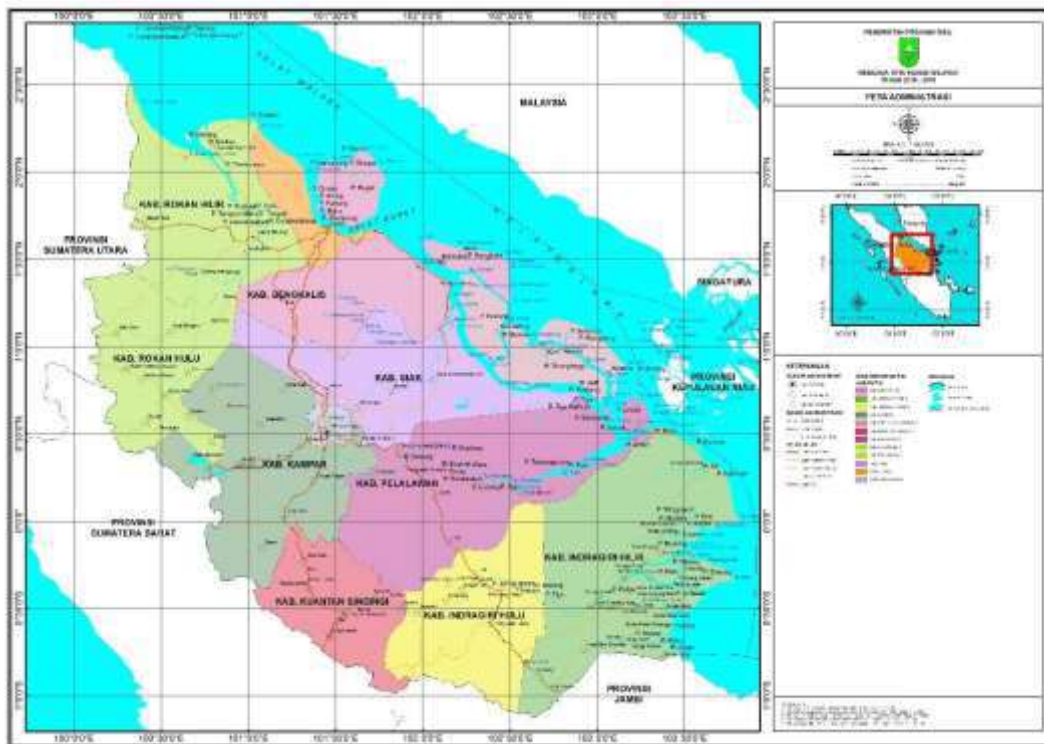
Aspek geografi Provinsi Riau memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana dan luas wilayah berdasarkan administrasi pemerintahan. Sedangkan aspek demografi menggambarkan deskripsi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Riau, merupakan gambaran terhadap luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan memiliki luas wilayah secara keseluruhan adalah 90.128,76 km², terdiri dari 89.083,57 km² luas daratan dan 1.045,19 km² luas lautan atau perairan.



Gambar 2.1.
Peta Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota dengan 169 kecamatan dan 1.609 desa serta 268 kelurahan. Adapun kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti, sedangkan untuk kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Luas wilayah kabupaten/kota ditunjukkan pada tabel dibawah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa wilayah yang paling luas adalah Kabupaten Indragiri Hilir seluas 1.346.589,47 Ha atau 14,94% dari luas Provinsi Riau. Sedangkan wilayah yang kecil adalah Kota Pekanbaru seluas 63.340,30 Ha atau 0,70% dari luas Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah
Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten /Kota	Ibukota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	15	229	5.457,862	6,07
2	Indragiri Hulu	Rengat	14	194	7.871,850	8,75
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	20	236	13.521,263	15,03
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12	118	13.262,113	14,75
5	Siak	Siak Sri Indrapura	14	131	7.805,538	8,68
6	Kampar	Bangkinang	21	250	10.352,803	11,51
7	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	16	145	7.658,149	8,52
8	Bengkalis	Bengkalis	11	155	8.616,358	9,58
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	18	187	9.068,458	10,08
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	9	101	3.623,558	4,03
11	Pekanbaru	Pekanbaru	15	83	638,331	0,71
12	Dumai	Dumai	7	36	2.059,613	2,29
Provinsi Riau		Pekanbaru	172	1.865	89.935,896	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2023)

Jarak ibukota kabupaten dan kota yang terjauh dengan ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) adalah Kota Tembilahan sejauh 293 km dan Kota Bagan Siapi-api sejauh 250 km dan yang paling dekat adalah Kota Bangkinang sejauh 60 km dan Kota Pangkalan Kerinci sejauh 65 km yang dapat ditempuh dengan jalur darat. Sedangkan ibukota kabupaten yang ditempuh dengan kombinasi jalur darat dan melintasi sungai/selat adalah Kota Bengkalis dengan sarana penyeberangan menggunakan kapal Ro-Ro dan Kota Selat Panjang dengan kombinasi angkutan moda darat dan laut. Adapun jarak antar kabupaten/kota dengan ibukota provinsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2023

Gambar 2.2.
Peta Jarak Antara Ibukota Kabupaten/Kota
dengan Ibukota Provinsi Riau

B. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis adalah posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain, ditentukan berdasarkan aspek astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya. Berdasarkan Gambar 2.3 dijelaskan bahwa secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan antara 100°00'00" Bujur Timur hingga 105°05'00" Bujur Timur, yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka.

Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia dan Singapura serta berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.



Gambar 2.3.
Letak Geografis Provinsi Riau

Di Provinsi Riau terdapat 17 Kawasan Perbatasan Negara dilaut yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten/kota yang merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memerlukan penanganan khusus yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Prioritas penanganan secara khusus direncanakan secara simultan dan bertahap mulai dari tahun 2020-2024. Daftar kawasan perbatasan Negara kabupaten/kota sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kawasan Perbatasan Negara di Laut Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Kawasan (Kecamatan)
1	Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas
		Sinaboi
		Bangko
2	Dumai	Dumai Kota
		Medang Kampai
		Sungai Sembilan
3	Bengkalis	Rupat Utara
		Rupat
		Bukit Batu
		Bantan
		Bengkalis
4	Kepulauan Meranti	Rangsang Barat
		Rangsang Pesisir
		Merbau
		Rangsang
		Pulau Merbau
		Tasik Putri Puyu

Sumber: Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024

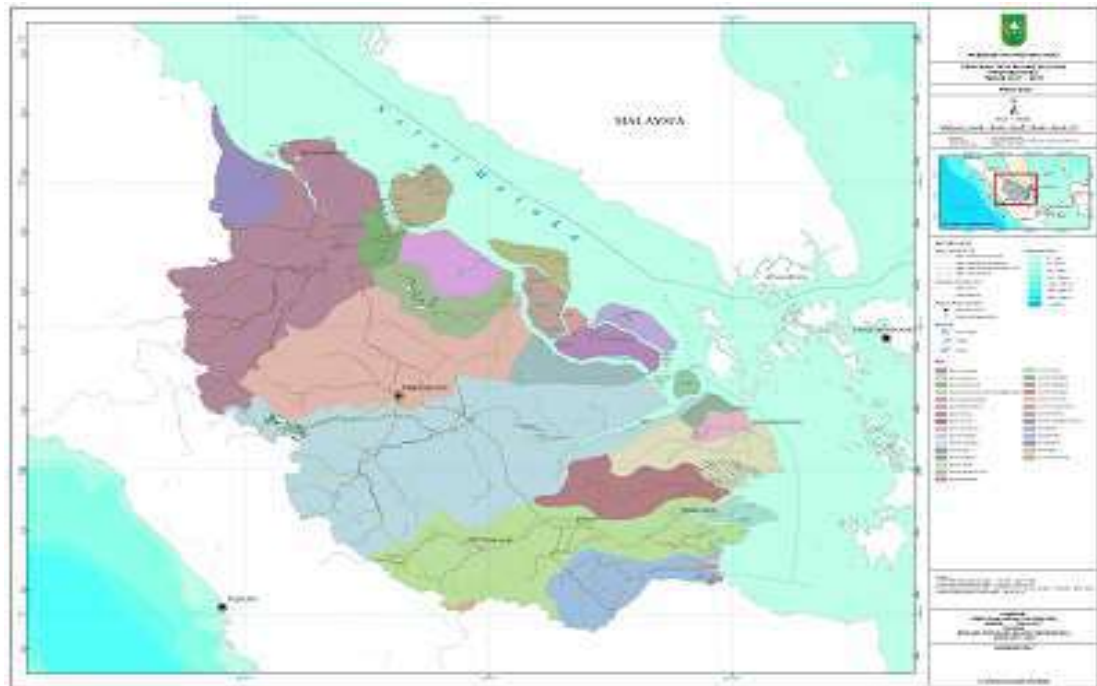
Daratan Riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter dari permukaan laut (dpl); bagian tengah merupakan dataran bergelombang; serta bagian barat yang merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di Pantai Timur.

Secara umum fisiografi pesisir timur dapat dibedakan menjadi tiga bentuk daratan, yaitu daratan aluvial dan gambut, daratan dan teras sungai serta daerah pegunungan. Pantai timur Provinsi Riau didominasi oleh lahan dengan kemiringan lebih kecil dari 2% atau datar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau tidak banyak memiliki morfologi yang curam, dan didominasi datar atau bergelombang. Hanya pada kawasan yang berdekatan dengan Bukit Barisan yang memiliki lereng-lereng yang curam, terutama wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Jenis tanah yang ada di Provinsi Riau didominasi jenis tanah Organosol. Tanah Organosol merupakan tanah organik yang berasal dari gambut dan rawa, sebarannya mencapai 50% dari luas wilayah Riau terutama berada pada dataran rendah dan wilayah pesisir. Sedangkan jenis tanah dominan kedua adalah tanah Podzolik Merah Kuning. Provinsi Riau memiliki 15 (lima belas) sungai, diantaranya terdapat 4 (empat) sungai besar yang mempunyai peranan penting sebagai prasarana perhubungan masyarakat sekitar bantaran sungai, pariwisata dan perikanan. Sungai-sungai tersebut mengalir mulai dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan yang bermuara ke Selat Malaka, keempat sungai tersebut adalah:

- Sungai Siak sepanjang 345 km dengan kedalaman 8-12 meter.
- Sungai Rokan sepanjang 325 km dengan kedalaman 6-8 meter.
- Sungai Kampar sepanjang 580 km dengan kedalaman 6 meter.
- Sungai Indragiri sepanjang 645 km dengan kedalaman 6-8 meter.

Sungai-sungai tersebut memiliki anak-anak sungai yang cukup banyak dan membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar merata di seluruh wilayah daratan Provinsi Riau, penjelasan singkat tentang DAS terdapat pada subbab 2.1.1.5.



Gambar 2.4.
Daerah Aliran Sungai Provinsi Riau

Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Riau yang luas beserta kekayaannya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Riau menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan baik sumber daya alam hayati seperti ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumber daya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi.

Secara geografis Provinsi Riau masih terdapat daerah pedalaman yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota. Daerah pedalaman tersebut berdiam suku pedalaman atau yang biasa disebut dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang hidup di sejumlah wilayah hutan di Provinsi Riau. Menurut Kurtubi (2017), Komunitas Adat Terpencil yang terdapat di Provinsi Riau dikelompokkan dalam 5 suku, yaitu Suku Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, Suku Bonai dan Suku Laut (Duano).

C. Topografi

Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian berkisar 0-5 meter dpl terutama di wilayah pesisir. Walaupun demikian ada beberapa tempat memiliki ketinggian 30–91 meter dpl. Wilayah yang relatif rendah dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (2 meter dpl), Kabupaten Bengkalis (2 meter dpl), Indragiri Hilir (3 meter dpl) dan Indragiri Hulu (4 meter dpl). Wilayah yang cukup tinggi dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (91 meter dpl), Kuantan Singingi (57 meter dpl), dan Kampar (30 meter dpl). Ketinggian tempat sangat mempengaruhi pengembangan komoditas dan penurunan suhu udara rata-rata harian (Griffin et al., 2005). Secara umum dengan ketinggian tempat berkisar antara 2-91 m dpl tersebut dapat dikembangkan beberapa sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya gambaran ketinggian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau

No	Kota/Kabupaten	Ibukota	Dari Permukaan Laut (mdpl)
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	57
2	Indragiri Hulu	Rengat	4
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	3
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	5
5	Siak	Siak Sri Indrapura	5
6	Kampar	Bangkinang	30
7	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	91
8	Bengkalis	Bengkalis	2
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	5
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	2
11	Pekanbaru	Pekanbaru	10
12	Dumai	Dumai	5

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2023)

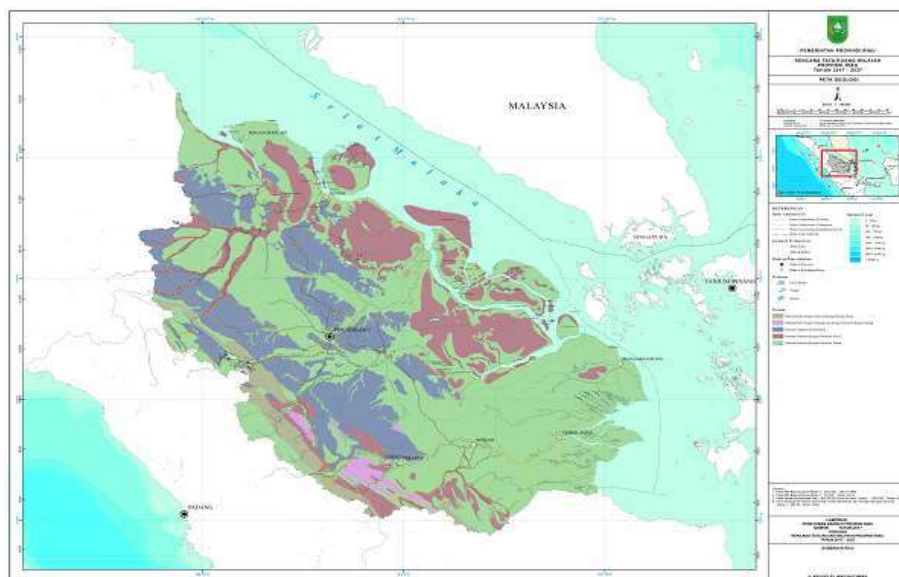
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa wilayah Provinsi Riau didominasi oleh lahan dengan kemiringan < 2% atau datar, hal ini terlihat jelas khususnya pada wilayah pesisir. Pada kawasan pesisir kemiringan lahan 100% datar (kemiringan < 2%) dengan topografi sebagian besar wilayah Provinsi Riau relatif datar dengan ketinggian tempat

bervariasi antara 0 hingga 91 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau tidak banyak memiliki topografi yang curam. Kebanyakan topografi di Provinsi Riau lebih datar atau bergelombang hanya pada kawasan yang berdekatan dengan Bukit Barisan yang memiliki lereng-lereng yang curam, terutama wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

D. Geologi

Faktor pengontrol utama struktur geologi regional di Cekungan Sumatera Tengah adalah adanya sesar Sumatera yang terbentuk pada zaman kapur. Subduksi lempeng yang miring dari arah barat daya Pulau Sumatera mengakibatkan terjadinya *strong dextral wrenching stress* di cekungan Sumatera Tengah (Wibowo, 1995). Hal ini dicerminkan oleh bidang sesar yang curam yang berubah sepanjang jurus perlapisan batuan, struktur sesar naik dan adanya *flower structure* yang terbentuk pada saat inversi tektonik dan pembalikan-pembalikan struktur. Selain itu, terbentuknya sumbu perlipatan yang searah jurus sesar dengan penebalan sedimen terjadi pada bagian yang naik (*inverted*) (Shaw et al., 1999).

Kondisi geologi Provinsi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan. Adapun struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.5.
Peta Geologi Provinsi Riau

Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Berdasarkan interpretasi kawasan gempa berdasarkan pendekatan *hazard* gempa (sejarah bencana gempa atau kejadian gempa wilayah Sumatera), maka Provinsi Riau berada dalam kawasan Zona C dan Zona D atau masih dalam kategori rendah rawan gempa.

Berdasarkan *land unit*, yang disusun pada peta *land system* skala 1:250.000 dan laporan Reppprot (1988), dijelaskan bahwa *land unit* yang terdapat di Provinsi Riau dibedakan atas:

- 1) Kejapah (KJP) merupakan dataran rumput antar pasang surut di bawah bakau dengan batuan alluvium campuran estuarin dan marin yang masih muda termasuk satuan Fisiografi Group Marin. Topografi datar dengan lereng 0-3%, relief < 2 meter jenis tanah entisol dengan tekstur halus.
- 2) Kahayan (KHY) merupakan dataran-dataran pasir pada sungai/muara dengan batuan aluvium campuran estuarin dan marin yang masih muda/aluvium sungai muda, termasuk satuan Fisiografi grup marin/ aluivial. Topografi datar dengan lereng 0-3% relief 2-10 meter. Jenis tanah entisol dengan tekstur halus.
- 3) Sebangau (SBG) merupakan jalur meander sungai-sungai besar dengan tanggul-tanggul yang lebar, batuan aluvium sungai muda, termasuk satuan fisiografi grup aluivial. Topografi datar dengan lereng 0-3% relief < 2 meter, lebar lembah 501-200 meter. Jenis tanah tergolong entisol dengan tekstur tanah halus.
- 4) Klaru (KLR) merupakan dataran banjir tergenang tetap dengan batuan aluvium sungai muda termasuk satuan fisiografi grup aluivial dan topografi datar dengan lereng 0-3% , relief < 2 meter jenis Tanah Entisol dengan tekstur halus.
- 5) Muara Beliti (MBI) merupakan dataran sendimen berbatu tufa yang berombak sampai bergelombang dengan batuan tufit, batuan lumpur, batuan lanau termasuk satuan fisiografi group dataran. Topografi bergelombang dengan lereng 9-15%, relief 11-50 meter, lebar puncak 500-200 meter, lebar lembah 25-200 meter. Jenis Tanah Inseptisol dengan tekstur halus.

- 6) Sungai Aur (SAR) merupakan dataran endapan bertufa yang berbukit dengan batuan lumpur, batuan lanau, termasuk satuan fisiografi grup dataran, topografi berbukit dan lereng 16-25% relief 11-50 meter lebar puncak <50 meter lebar lembah 25-200 meter. Jenis tanah tergolong ultisol dengan tekstur tanah agak halus.

Tabel 2.4.
Jenis Satuan Tanah Provinsi Riau

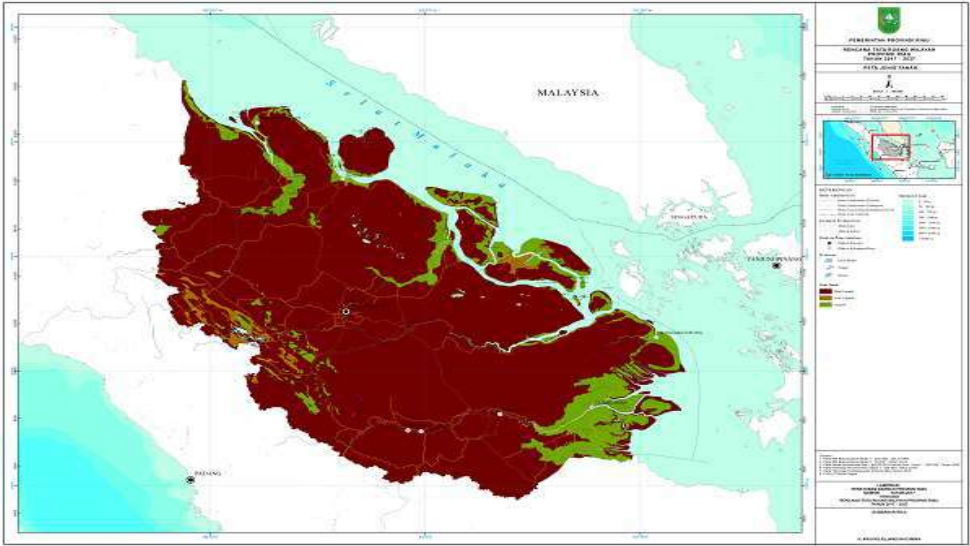
No	Jenis Tanah	Bahan Induk	Fisiografi
1.	Entisols	Aluvium	Datar
2.	Histosols	Organik	Datar
3.	Inceptisols	Aluvium	Berombak-Bergelombang Datar Bergunung Berbukit
		Metamorf Sedimen	Bergunung Berombak-Bergelombang
4.	Mollisols	Batu Gamping	Berbukit
5.	Oxisols	Metamorf Sedimen	Berbukit Berbukit Berombak-Bergelombang Datar-Berombak
		Volkanik	
6.	Ultisols	Metamorf Plutonik Sedimen	Berbukit Berbukit Berbukit Bergunung Berombak-Bergelombang Berbukit
		Volkanik	Bergunung

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015

Sebagian besar tanah daratan di Provinsi Riau terjadi dari formasi *alluvium* (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan *neogen* seperti sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya (Sungai Cinaku) di Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Daerah perbatasan sepanjang Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan *permokarbon*, *paleogen* dan *neogen* dari tanah podsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan. Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, Provinsi Riau terdapat enam jenis tanah utama yakni jenis tanah terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik dan non organik.

Kelas jenis tanah organik umumnya mempunyai fisiografi datar, terutama terdapat di daerah sepanjang pantai sampai dengan pertengahan daratan yang berformasi sebagai dataran muda tidak bergunung-gunung, bahkan beberapa bagian terdiri dari tanah bench

berawa-rawa. Kelas jenis tanah semi organik dengan fisiografis datar hingga bergunung dijumpai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kampar serta Rokan Hulu. Kelas jenis tanah non organik tersebar di seluruh bagian wilayah Provinsi Riau dan merupakan kelas jenis tanah yang terbesar sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.6.
Kelas Jenis Tanah Provinsi Riau

E. Hidrologi

Provinsi Riau memiliki 15 (lima belas) sungai, 4 (empat) diantaranya merupakan sungai utama yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan dan sumber air bagi masyarakat. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi oleh pasang surut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Sungai yang Bermuara di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Nama Sungai	Muara
1	Sungai Kubu	Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
2	Sungai Bangko	Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
3	Sungai Sinaboi	Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
4	Sungai Ala	Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
5	Sungai Bukit Batu	Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
6	Sungai Siak Kecil	Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No	Nama Sungai	Muara
7	Sungai Siak	Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
8	Sungai Penyengat	Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
9	Sungai Rokan	Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
10	Sungai Kampar	Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
11	Sungai Guntung	Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
12	Sungai Gaung	Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
13	Sungai Indragiri	Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
14	Sungai Reteh	Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
15	Sungai Kateman	Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2023)

Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Sungai Kampar dan Sungai Siak merupakan sungai Prioritas Nasional adapun sungai terpanjang adalah Sungai Indragiri dengan panjang mencapai 645 km dan sungai terdalam adalah Sungai Siak dengan kedalaman 8–12 meter. Sementara itu, Sungai Indragiri memiliki luasan *catchment area* sebesar 32.525 Km diikuti Sungai Kampar, Sungai Rokan dan Sungai Siak. Adapun sungai dengan debit terbesar adalah Sungai Indragiri sebesar 2.760 m³/detik pada kondisi maksimal dan 65 m³/detik pada kondisi minimal. Sungai-sungai utama di Provinsi Riau berfungsi sebagai transportasi air dan sumber air baku bagi masyarakat. Empat sungai utama di Provinsi Riau merupakan penyuplai bahan baku sumber air utama.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Provinsi Riau memiliki 4 (empat) DAS, yaitu:

1. DAS Indragiri

DAS Indragiri merupakan salah satu DAS yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan berhilir di pantai timur Sumatera. Luas DAS Indragiri sebesar 2.270.499,04 Ha, yang mana secara administrasi terletak di tiga wilayah provinsi yaitu Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. DAS Indragiri yang terdapat di Provinsi Riau mencapai 66,95% dari luasan DAS Indragiri yang berada di berada 5 (lima) kabupaten yaitu: Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas 616.581,77 Ha, Indragiri Hilir dengan luas

624.347,56 Ha, Kuantan Singingi dengan luas 272.564,00 Ha, Pelalawan dengan luas 4.203,58 Ha, dan Kampar dengan luas 2.321,84 Ha.

2. DAS Terpadu DTA Waduk Koto Panjang

Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Koto Panjang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar yang memiliki peranan yang sangat vital seperti sebagai pengumpul air dan memberikan pasokan air ke dalam Waduk Koto Panjang. Adapun luas DTA Waduk Koto Panjang berdasarkan batas administrasi Provinsi Riau seluas 90.950 Ha.

3. DAS Rokan Terpadu

DAS Rokan merupakan salah satu DAS yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan berhilir di Pantai Timur Sumatera. Secara administrasi DAS Rokan terletak di tiga wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. DAS Rokan yang terletak di wilayah Provinsi Riau melewati lima wilayah administrasi Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bengkalis dengan luas 97.626 Ha, Kampar dengan luas 10.914 Ha, Rokan Hilir dengan luas 609.266 Ha, Rokan Hulu dengan luas 628.087 Ha, Siak dengan luas 34.171 Ha, dan Kota Dumai dengan luas 57.640 Ha.

4. DAS Terpadu Siak

DAS Siak berada di Provinsi Riau, melewati empat wilayah administrasi kabupaten dan satu wilayah administrasi kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu (4 kecamatan) dengan luas 148.033,30 Ha, Bengkalis (2 kecamatan) dengan luas 92.355,42 Ha, Siak (11 kecamatan) dengan luas 496.871,97 Ha, Kampar (8 Kecamatan) dengan luas 329.861,51 Ha dan Kota Pekanbaru (8 kecamatan) dengan luas 65.653,97 Ha. DAS Siak terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai.

a. Bagian Hulu

Bagian hulu dari DAS Siak adalah dari dua sungai yaitu Sungai Tapung Kanan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar; dan Sungai Tapung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar. Kedua sungai menyatu di daerah Palas (Kabupaten Kampar) dan dekat Kota Pekanbaru pada Sungai Siak Besar.

b. Bagian Hilir

Bagian hilir dari DAS Siak adalah pada Sungai Siak Besar yang terletak di desa Palas (Kabupaten Kampar)-Kota Pekanbaru-Kota Perawang (Kabupaten Siak)-Kota Siak Sri Indrapura dan bermuara di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak).

Wilayah Provinsi Riau bagian Timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur, 4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan, yakni Sungai Siak dengan panjang ± 300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ± 400 Km dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ± 6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ± 500 Km dengan kedalaman 6-8 meter.



Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai (Sumber : RTRW Provinsi Riau)

F. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, Provinsi Riau mempunyai tipe iklim berkisar antara A-B-C, yaitu beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1.400-4.000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan

musim hujan yang terjadi dua kali dalam setahun karena secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis khatulistiwa.

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Curah hujan 1 (satu) mm adalah air hujan setinggi 1 (satu) mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang datar seluas 1 (satu) m², mengalir sebagai air permukaan dan meresap ke dalam tanah. Curah hujan ekstrim adalah curah hujan dengan intensitas >50 mm/hari menjadi parameter terjadinya hujan dengan intensitas lebat, sedangkan kriteria curah hujan ekstrim memiliki curah hujan dengan intensitas >100 mm/hari. Adapun kategori curah hujan terdiri dari :

- Curah hujan rendah : <100 mm
- Curah hujan sedang : 100 – 300 mm
- Curah hujan tinggi : >300 mm

Tabel 2.6.
Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan (mm) per Bulan
Provinsi Riau Tahun 2023

No	Bulan	Indragiri Hulu		Pelalawan		Kampar		Pekanbaru		Dumai	
		Stamet Japura Rengat		Bandara RAPP		Staklim Kampar Riau		Stamet SSK II Pekanbaru		Bandara Pinang Kampai	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	291	17	221	18	194	15	184	15	174	12
2	Februari	268	17	212	11	312	13	271	12	107	10
3	Maret	196	10	201	15	220	16	251	12	75	9
4	April	375	21	198	15	203	12	176	15	165	11
5	Mei	308	14	225	12	192	14	193	12	158	12
6	Juni	313	11	154	10	202	11	201	12	189	13
7	Juli	184	10	206	10	126	6	94	8	174	13
8	Agustus	192	13	153	9	130	8	184	12	283	14
9	September	55	7	248	6	114	9	205	7	59	4
10	Oktober	57	8	247	17	176	13	154	12	308	19
11	November	296	14	267	17	264	17	385	19	142	12
12	Desember	320	19	236	24	435	22	508	24	93	17
Jumlah		2.855	161	2.568	164	2.568	156	2.806	160	1.927	146

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 20244

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan per bulan selama tahun 2023 dimana curah hujan tertinggi berada pada bulan Desember sebesar 508 di Stamet SSK II Pekanbaru sedangkan curah hujan terendah pada bulan September sebesar 55 di Stamet Japura Rengat. Kondisi jumlah hari hujan dan curah hujan dapat dijadikan sebagai indikator dalam penentuan pola tanam komoditas pertanian.

Jumlah hari hujan dan curah hujan juga dapat menentukan perkembangan dan pertumbuhan kondisi tanaman baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan budidaya perikanan darat, sehingga kondisi tersebut juga akan menentukan ketersediaan pangan.

Perkembangan jumlah hari hujan dan curah hujan dapat digunakan untuk menggambarkan ketersediaan dan kondisi kekeringan di Wilayah Provinsi Riau. Wilayah yang memiliki jumlah hari dan curah hujan yang rendah akan menimbulkan kekeringan di daerah-daerah tersebut. Hal ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap usaha masyarakat terutama usaha pertanian dan perikanan. Dampak negatif dari rendahnya hari hujan dan curah hujan adalah kekurangan ketersediaan air dan kesulitan dalam penentuan pola tanam komoditas pertanian serta kondisi tersebut sangat menghambat pertumbuhan tanaman dan pengembangan pertanian sehingga akan mempengaruhi rendahnya produktifitas komoditas pertanian, maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur pengairan bidang pertanian di wilayah yang curah hujannya rendah di Provinsi Riau.

Tabel 2.7.
Keadaan Suhu di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Riau Tahun 2023 (°C)

No	Bulan	Indragiri Hulu			Pelalawan			Kampar			Pekanbaru			Dumai		
		Stamet Japura Rengat			Bandara RAPP			Staklim Kampar Riau			Stamet SSK II Pekanbaru			Bandara Pinang Kampai		
		Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak
1	Januari	23,3	27,8	31,0	30,8	26,2	23,0	30,7	26,0	22,6	22,9	25,9	30,7	22,8	25,9	31,1
2	Februari	23,1	28,8	31,5	31,6	26,5	22,9	31,7	26,2	22,5	22,9	26,4	31,7	22,8	25,8	31,0
3	Maret	23,1	28,0	31,6	31,5	26,6	23,2	31,2	26,3	22,7	23,2	26,4	31,3	23,0	20,1	33,2
4	April	23,6	29,2	32,7	33,1	27,6	23,7	32,8	27,1	23,2	23,5	26,2	33,2	23,2	26,8	33,1
5	Mei	23,9	29,5	33,3	34,2	27,8	24,3	33,0	27,5	23,5	23,8	28,0	33,6	23,7	27,7	33,6
6	Juni	23,9	29,5	33,0	33,4	27,7	23,9	32,5	27,2	23,1	23,7	27,7	33,1	23,6	27,3	33,5
7	Juli	24,0	29,7	32,3	32,5	27,1	23,8	32,3	27,1	23,1	23,7	27,5	33,0	NA	NA	NA
8	Agustus	23,5	29,2	32,7	32,5	27,1	23,8	32,1	26,7	22,0	23,5	27,1	41,0	NA	NA	NA
9	September	23,7	29,4	32,9	33,5	27,7	23,6	33,0	26,9	22,5	23,7	27,6	33,0	NA	NA	NA
10	Oktober	23,9	29,3	33,7	32,9	27,1	23,9	33,0	26,8	22,9	23,7	27,3	32,7	23,3	27,2	33,2
11	November	23,8	27,8	32,9	32,6	27,2	23,9	32,8	26,9	23,2	23,6	27,0	32,3	NA	NA	NA
12	Desember	24,2	28,1	31,8	31,2	26,8	24,1	31,7	26,4	23,3	23,9	31,3	26,5	23,8	26,3	31,4
Range		23,1 – 33,7			34,2 - 22,9			33,0 – 22,0			22,9 – 41,0			22,8 – 33,6		

Sumber: Stasiun Klimatologi Riau dan Provinsi Riau Dalam Angka 2024

Keterangan: MAK = Maksimum; MIN = Minimum

Keadaan suhu Provinsi Riau diukur pada 4 (empat) stasiun pengamatan, yakni di Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Kampar, Kota Pekanbaru serta Dumai. Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa suhu tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 33,7°C sedangkan suhu terendah terdapat di Kabupaten Kampar sebesar 22 °C. rendahnya suhu di Kabupaten Kampar karena daerah tersebut masih banyaknya perbukitan dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat yang terkenal dengan kota-kota bersuhu dingin. Suhu tertinggi di Kota Pekanbaru mencapai 41°C dan suhu terendah mencapai 22,9°C untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel diatas.

Berikut ini disajikan kelembaban udara yang didapatkan berdasarkan stasiun pengamatan BMKG yang ada di Provinsi Riau selama tahun 2023.

Tabel 2.8.
Kelembaban Udara di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Riau Tahun 2023 (%)

No	Bulan	Indragiri Hulu			Pelalawan			Kampar			Pekanbaru			Dumai		
		Stamet Japura Rengat			Bandara RAPP			Staklim Kampar Riau			Stamet SSK II Pekanbaru			Bandara Pinang Kampai		
		Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak	Min	Rata-Rata	Mak
1	Januari	57	83	98	57	87	100	58	85	99	59	88	100	61	91	100
2	Februari	52	80	98	50	85	100	51	84	98	54	85	100	57	87	98
3	Maret	64	85	100	55	85	100	56	85	98	54	87	100	55	64	100
4	April	65	86	99	52	85	100	55	84	98	55	86	100	62	74	100
5	Mei	55	86	100	54	83	98	58	83	98	54	84	100	58	89	100
6	Juni	62	85	99	50	84	100	49	83	99	41	82	100	66	88	100
7	Juli	56	84	100	46	83	99	51	83	99	47	79	98	NA	NA	NA
8	Agustus	54	81	100	46	83	99	55	84	99	50	83	100	NA	NA	NA
9	September	42	79	98	48	81	100	48	83	99	45	82	100	NA	NA	NA
10	Oktober	54	83	99	51	84	98	57	85	99	55	86	100	56	85	98
11	November	63	87	100	55	84	99	57	86	98	59	88	100	NA	NA	NA
12	Desember	63	88	99	56	87	99	62	88	99	57	91	100	75	90	100
Range		42 – 100			46 – 100			48 – 100			41 – 100			55 – 100		

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau dan Riau Dalam Angka 2024

Keterangan: MAK = Maksimum; MIN = Minimum

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kelembaban dari terendah ke tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru yang berkisar antara 41-100% kondisi demikian tergolong lembab atau basah sehingga berdampak terhadap berkurangnya kebakaran lahan dan hutan. Manfaat kelembaban udara bagi kehidupan yaitu menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan tanaman, menjaga kestabilan kesehatan tubuh, dan menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas atau terjadi pemanasan global.

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Riau terdiri dari Savana/Padang Rumput, Bandara, Tambak, Transmigrasi, Hutan Mangrove Primer, Rawa, Pertambangan, Semak Belukar, Hutan Rawa Primer, Tubuh Air, Permukiman, Hutan Lahan Kering Primer, Sawah, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Sekunder, Pertanian Lahan Kering, Tanah Terbuka, Hutan Tanaman, Semak Belukar Rawa, Hutan Rawa Sekunder, Pertanian Lahan Kering Campur, dan Perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038

Gambar 2.8.
Penggunaan Lahan Provinsi Riau Menurut Luas Lahan

Berdasarkan data RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038, terlihat bahwa penggunaan lahan terluas digunakan untuk sub sektor perkebunan sebesar 30,34% atau 2.734.636,81 hektar dan paling sempit adalah savana/padang rumput seluas 80,85 hektar atau 0,001% dari total penggunaan lahan seluas 9.012.875,96 hektar di provinsi Riau Tahun 2016. Data tutupan lahan ini dapat digunakan untuk memperkirakan berapa potensi pemanfaatan ruang terutama untuk penggunaan sumber-sumber pengembangan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan peruntukan ruang.

1. Potensi Sumberdaya

Provinsi Riau memiliki potensi untuk pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan), pesisir dan laut, pertambangan, industri dan pariwisata. Dalam rangka percepatan akses untuk mendorong pengembangan

potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di Provinsi Riau perlu strategi diantaranya pemekaran wilayah kabupaten/kota, dan sebagainya.

Sesuai dengan sistem informasi geografis berupa kondisi lahan (peta kesuburan fisik dan kimia tanah serta kelerengan lahan) dan kesesuaian iklim, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan disamping secara terbatas diusahakan untuk tanaman pangan.

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa jenis penggunaan lahan yang dimanfaatkan dari seluas 9,01 juta hektar dimana porsi terbesar adalah untuk penggunaan lainnya seluas 4,39 juta hektar (48,80%) dan porsi terkecil dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perikanan (tambak) dengan luas 0,002 juta hektar (0,02%).

Tabel 2.9.
Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah	Perkebunan	Tambak	Lainnya	Total Penggunaan Lahan
Kuantan Singingi	21.685,26	81.364,36	10.120,08	225.191,20	-	188.939,89	527.300,79
Indragiri Hulu	58.628,01	213.567,08	85,59	185.677,37	-	339.858,79	797.816,84
Indragiri Hilir	43.230,50	87.838,63	114.037,73	586.276,39	1.865,87	513.340,35	1.346.589,47
Pelalawan	23.164,50	71.705,33	6.042,15	323.493,32	-	877.613,35	1.302.018,65
Siak	24.261,55	54.566,38	15.228,28	234.319,15	38,44	455.983,17	784.396,97
Kampar	13.113,87	270.704,04	-	383.890,49	-	422.013,26	1.089.721,66
Rokan Hulu	86.198,14	249.733,66	684,89	191.128,62	-	224.997,97	752.743,28
Bengkalis	16.192,60	66.408,88	16.051,48	237.878,53	215,21	515.296,93	852.043,63
Rokan Hilir	45.320,39	163.160,47	3.994,66	273.938,91	12,27	429.045,75	915.472,45
Kep.Meranti	1.773,23	61.639,89	680,99	53.619,68	-	245.965,40	363.679,19
Pekanbaru	1.237,20	8.170,72	-	17.167,89	-	36.764,49	63.340,30
Dumai	777,44	45.729,68	609,49	22.055,25	-	148.607,98	217.779,84
Provinsi Riau	335.582,69	1.374.589,12	167.535,34	2.734.636,80	2.131,79	4.398.427,33	9.012.903,07

Sumber: RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038

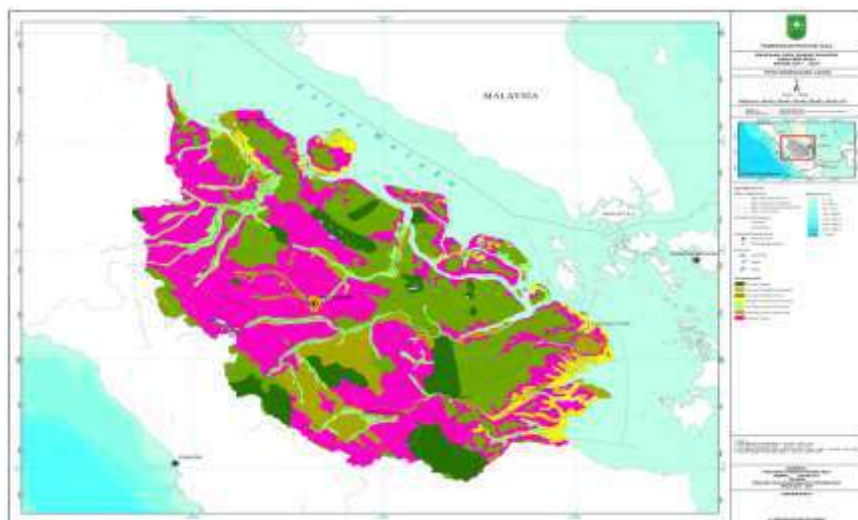
Persentase distribusi penggunaan luas lahan menurut kabupaten/kota luas lahan menurut jenis, terluas dari total luasan Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,346 juta hektar (14,94%) dan tersempit di Kota Pekanbaru sebanyak 0,063 juta hektar (0,70%).



Sumber: RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038

Gambar 2.9.
Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Tahun 2020

Data tutupan lahan dapat digunakan untuk memperkirakan berapa potensi pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan peruntukan ruang. Pengembangan sektor-sektor potensi baik pertanian dan non pertanian sudah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Provinsi Riau 2018-2038. RTRW Provinsi Riau menunjukkan bahwa pada luas penggunaan lahan eksisting tahun 2017 menurut tutupan lahan, terdapat dua sub sektor yang mendominasi penggunaan lahan yaitu perkebunan dan kehutanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.10.
Tutupan Lahan Provinsi Riau Berdasarkan RTRW 2018-2038

2. Pertanian Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Perikanan (Pesisir dan Laut)

Pada tahun 2021 sektor pertanian memberikan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) Provinsi Riau terhadap harga konstan sebesar 26,83% menempati urutan kedua dari 17 sektor lapangan usaha dalam perekonomian setelah industri pengolahan sebesar 28,08%.

Kontribusi yang besar tersebut terutama disumbangkan oleh sub sektor perkebunan dengan empat komoditas utama yaitu Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet serta Sagu.

Berdasarkan data Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dinyatakan bahwa luas kawasan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian lahan kering secara rinci di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Perkebunan seluas 2.734.637 ha;
2. Pertanian lahan kering campur seluas 1.374.58 ha;
3. Hutan rawa sekunder seluas 973.927 ha;
4. Semak belukar rawa seluas 928.248 ha;
5. Hutan tanaman seluas 861.617 ha;
6. Tanah terbuka seluas 546.670 ha;
7. Pertanian lahan kering seluas 335.566 ha;
8. Hutan sekunder seluas 321.074 ha;
9. Penggunaan lahan lainnya seluas 936.558 ha.

Lahan perkebunan didominasi oleh perkebunan rakyat dimana produktivitasnya lebih rendah dari perkebunan yang dikelola oleh pemerintah (BUMN) dan swasta. Hal ini mengindikasikan bahwa perkebunan rakyat secara umum belum mampu mensejahterakan masyarakat Provinsi Riau hal ini terlihat dari masih terdapat 48,16% dari angka kemiskinan pada sektor pertanian terjadi pada masyarakat yang bekerja pada lapangan usaha perkebunan (BDT, 2015). Oleh karena itu, diperlukan program upaya peningkatan produktivitas perkebunan rakyat pada semua komoditas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada lapangan usaha sub sektor perkebunan.

3. Wilayah Pesisir dan Laut

Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Riau yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Riau menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumber daya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumber daya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan

seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, yakni:

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan untuk berlokasi di:
 1. Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;
 2. Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;
 3. Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting.
- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:
 1. Budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Mayoritas kawasan ini terdapat di sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai;
 2. Budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di Kabupaten Bengkalis, di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang. Di Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut dangkal Selat Malaka.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Kejadian banjir di Provinsi Riau dipicu oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu serta berkurangnya daerah resapan air akibat dari penebangan hutan. Dampak dari bencana ini tidaklah sedikit, seperti korban jiwa, kerugian harta benda serta lingkungan atau lahan yang rusak. Sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) berakibat kepada menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau sehingga berdampak langsung kepada kesehatan, serta mengganggu aktivitas penerbangan serta hubungan baik dengan negara tetangga.

Berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas serta risiko yang telah dilakukan dalam Kajian Risiko Bencana Provinsi Riau Tahun 2021, maka dihasilkan rekapitulasi seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Riau. Hasil rekapitulasi bahaya ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh dari nilai indeks bahaya serta luas

bahaya yang terdapat di Provinsi Riau. Uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah berikut.

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Kajian Resiko Bencana di Provinsi Riau

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya				Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total Luas (Ha)	
1	Banjir	172.066,12	2.406.343,79	2.149.744,03	4.728.153,85	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	3.071.704,62	4.439.092,84	877.415,16	8.388.212,62	Sedang
3	Gelombang ekstrem dan Abrasi	70.106,71	874.065,41	802.269,62	1.746.441,74	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	440.963,63	2.603.264,74	4.714.154,55	7.758.382,92	Tinggi
5	Kekeringan	8.351.939,87	350.426,13	-	8.702.366,00	Tinggi
6	Tanah Longsor	70.521,04	317.807,34	383.683,53	772.011,91	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Riau, 2021

Tabel berikut diatas memperlihatkan luas bahaya serta kelas bahaya yang berada di Provinsi Riau. Pada tabel tersebut terdapat enam jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya dari sedang hingga tinggi. Bahaya dengan kelas tinggi yaitu gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Adapun jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya sedang adalah banjir dan cuaca ekstrem.

Hasil rekapitulasi risiko bencana yang berada di Provinsi Riau menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki risiko bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor dengan sebaran kelas dari sedang hingga tinggi. Banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan memiliki kelas risiko tinggi. Adapun gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan dan tanah longsor memiliki kelas risiko sedang.

Upaya pengurangan risiko bencana terutama bahaya dengan kelas risiko tinggi di Provinsi Riau dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas daerah dapat ditingkatkan dengan ketahanan daerah. Ketahanan daerah dapat ditingkatkan dengan program pemerintah daerah yang berbasis pada pengurangan risiko bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan

manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Berdasarkan laporan melalui data dan informasi BPBD Provinsi Riau, pada tahun 2023 telah terjadi 285 kejadian bencana alam pada 246 titik lokasi yang tersebar di 173 desa pada 73 Kecamatan. Bencana Banjir dan longsor menjadi bencana paling banyak terjadi seperti tahun tahun sebelumnya. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum pada tabel bawah ini.

Tabel 2.11.
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Tahun 2023
di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Jenis Bencana			Kecamatan	Desa
		Banjir	Longsor	APB		
1	Pekanbaru	43	2	6	10	15
2	Dumai	3	-	1	4	7
3	Inhil	47	11	1	10	23
4	Inhu	25	-	1	10	19
5	Rohul	8	-	1	4	9
6	Rohil	13	-	1	4	11
7	Pelalawan	-	-	-	-	-
8	Kampar	9	5	8	7	19
9	Siak	19	-	3	7	15
10	Bengkalis	59	3	2	10	44
11	Meranti	6	-	2	3	6
12	Kuansing	1	1	4	4	5
Total		233	22	30	73	173

Sumber : BPBD Provinsi Riau Tahun 2023

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah kejadian berulang setiap tahun yang pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat, Selama kurun tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah yang memiliki luas lahan terbakar terbesar di Provinsi Riau dengan luas lahan tercvbakar mencapai 578,14 Ha.



Sumber : Data dan Informasi BPBD Provinsi Riau Tahun 2023

Gambar 2.11.
Luas Lahan Terbakar 2023

2.1.1.3 Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

a) Perkembangan Jumlah dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Riau terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Provinsi Riau sebanyak 6,39 juta jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk 1971 hingga sensus penduduk 2020, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau selalu berada diatas laju pertumbuhan penduduk nasional. Secara nasional jumlah penduduk Provinsi Riau berkontribusi 2,37% setelah Lampung (3,33%) dan Sumatera Selatan (3,13%) di Sumatera.

Berdasarkan Proyeksi Interim Penduduk tahun 2023, penduduk Provinsi Riau berjumlah 6.735.329 orang terdiri dari laki-laki 3.442.499 orang dan perempuan 3.292.830 orang. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Riau selama periode 2019-2023 mengalami penurunan sebanyak 236.416 jiwa atau sebesar 0,76%. Hal ini disebabkan pada tahun 2019-2020 menggunakan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020. Sedangkan tahun 2021-2023 menggunakan hasil proyeksi sementara (interim) penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan dan penyebaran penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12.
Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

Kabupaten/ Kota	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kuantan Singingi	327.316	334.943	339.894	345.850	351.786	1,82
Indragiri Hulu	441.789	444.548	453.241	464.076	475.002	1,83
Indragiri Hilir	740.598	654.909	658.025	660.747	663.248	-2,58
Pelalawan	483.622	390.046	399.264	410.988	422.907	-2,79
Siak	489.996	457.940	466.683	477.550	488.497	0,00
Kampar	871.117	841.332	857.752	878.210	898.840	0,82
Rokan Hulu	692.120	561.385	570.952	582.679	594.438	-3,28
Bengkalis	573.003	565.569	573.504	582.973	592.390	0,84
Rokan Hilir	714.497	637.161	646.791	658.407	669.996	-1,44
Kep.Meranti	185.516	206.116	209.460	213.532	217.607	4,14
Pekanbaru	1.143.359	983.356	994.585	1.007.540	1.020.308	-2,57
Dumai	308.812	316.782	323.452	331.832	340.310	2,46
Provinsi Riau	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.735.329	-0,76

Sumber: Sensus Penduduk 2020 dan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 BPS Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2023 Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang mempunyai penduduk terbanyak di Provinsi Riau sebanyak 1.020.308 jiwa, sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 217.607 jiwa. Pada periode 2019 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kepulauan Meranti sebesar 4,14% hal ini disebabkan adanya peningkatan kelahiran bayi. Kabupaten Rokan Hulu terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 3,28% yang merupakan terendah di Provinsi Riau.

b) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di kabupaten/kota sangat terkait terhadap pembangunan suatu daerah. Penduduk yang terdistribusi tidak merata dan terpusat di wilayah-wilayah tertentu akan menimbulkan permasalahan kepadatan jika wilayah tersebut relatif kecil menampung peningkatan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2023 mencapai 74,73 jiwa per km² meningkat 2,68 jiwa per km² dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,05 jiwa per km². Kepadatan penduduk Provinsi Riau termasuk kategori penduduk sangat jarang

yang mana dapat berdampak pada ketersediaan pangan, kebutuhan lahan tempat tinggal, ketersediaan air bersih, faktor lingkungan, dan sebagainya.

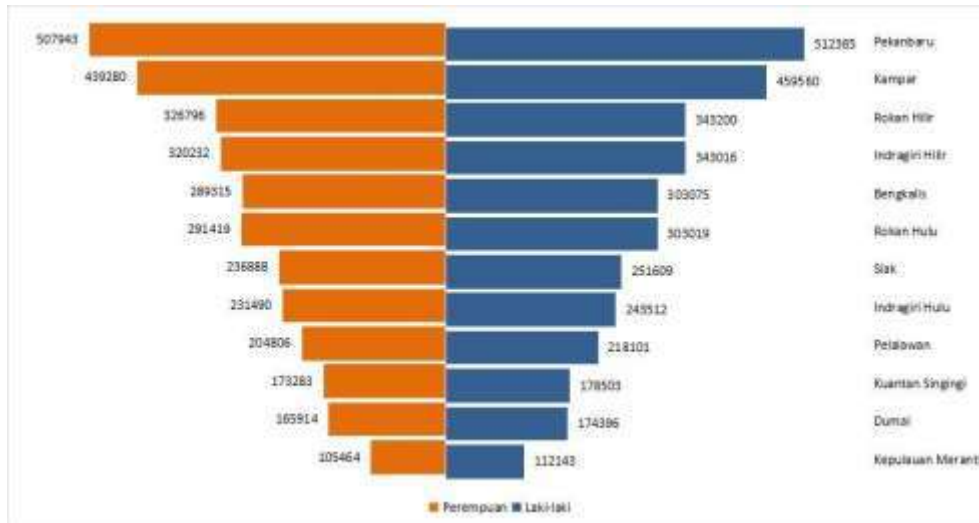
Tabel 2.13.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Uraian		
		Jumlah (Jiwa)	Share terhadap Provinsi (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Kuantan Singingi	5.272,74	351.786	5,22	66,72
Indragiri Hulu	7.978,17	475.002	7,05	59,54
Indragiri Hilir	13.465,89	663.248	9,85	49,25
Pelalawan	13.020,19	422.907	6,28	32,48
Siak	7.843,97	488.497	7,25	62,28
Kampar	10.897,22	898.840	13,35	82,48
Rokan Hulu	7.527,43	594.438	8,83	78,97
Bengkalis	8.520,44	592.390	8,80	69,53
Rokan Hilir	9.154,72	669.996	9,95	73,19
Kep.Meranti	3.636,79	217.607	3,23	59,83
Pekanbaru	633,40	1.020.308	15,15	1.610,84
Dumai	2.177,79	340.310	5,05	156,26
Riau	90.128,76	6.735.329	100,00	74,73

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 BPS Provinsi Riau

Kepadatan penduduk terbesar di Riau terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 1.610,84 jiwa/km² yang mana jauh diatas kabupaten/kota lainnya. Kecilnya luas wilayah Kota Pekanbaru menjadi penyebab tingginya kepadatan di kota tersebut. Selain itu, banyaknya kesempatan kerja di Kota Pekanbaru berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi. Sedangkan kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 32,48 jiwa/km². Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persoalan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

Sementara itu penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan baik di wilayah kabupaten maupun kota. Distribusi penduduk dirinci menurut kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.12.
Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

c) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi Riau digolongkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua.

Fertilitas Provinsi Riau cenderung menurun dalam lima dekade terakhir. Penurunan fertilitas dapat menurunkan rasio ketergantungan dan berpeluang terciptanya bonus demografi dimana usia produktif mendominasi komposisi penduduk. Terkendalanya tingkat kelahiran juga dapat mendukung tercapainya pelayanan Kesehatan Dasar bagi ibu dan bayi.

Tabel 2.14.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Riau Tahun 2023

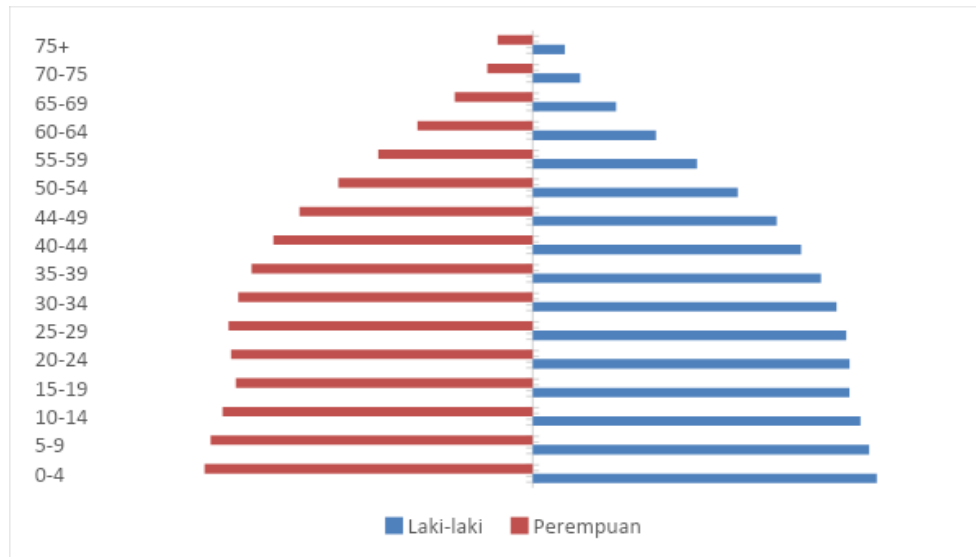
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	318.806	304.059	622.865	9,25
5-9	311.729	298.453	610.182	9,06
10-14	303.698	287.383	591.081	8,78
15-19	293.483	275.089	568.572	8,44
20-24	293.570	279.526	573.096	8,51
25-29	290.498	281.806	572.304	8,50
30-34	281.507	272.862	554.369	8,23
35-39	267.099	260.499	527.598	7,83
40-44	248.680	240.255	488.935	7,26
45-49	226.091	216.079	442.170	6,56
50-54	189.994	180.058	370.052	5,49
55-59	152.166	143.125	295.291	4,38
60-64	114.200	106.788	220.988	3,28
65-69	77.279	72.266	149.545	2,22
70-74	43.958	42.062	86.020	1,28
75+	29.741	32.520	62.261	0,92
Total	3.442.499	3.292.830	6.735.329	100,00

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 BPS Provinsi Riau

Penduduk Provinsi Riau tahun 2023 didominasi kelompok umur 0-4 tahun (9,25%), diikuti kelompok umur 5-9 tahun (9,06%) dan kelompok umur lainnya kurang dari 10%. Jika dilihat dari kelompok umur sekolah mulai dari TK hingga sekolah menengah atas atau kisaran umur 5-19 tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 1.769.835 jiwa atau 26,28% dari total penduduk pada tahun 2023. Dengan tingginya usia sekolah maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan harus dipersiapkan.

Adapun penduduk usia 15-64 tahun sejumlah 4.613.375 jiwa atau sebesar 68,49% dari total penduduk Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan pentingnya penduduk usia kerja yang nantinya akan meningkatkan produksi dan dengan bekerja akan meningkatkan pendapatan serta dalam rumah tangga akan mengkonsumsi produk lebih banyak. Rumah tangga ini juga akan menabung lebih banyak yang berdampak pada kenaikan investasi, peningkatan modal, dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian.

Untuk penduduk yang berumur antara 65 hingga di atas 75 tahun sebanyak 297.826 jiwa atau 4,42% dan pertambahan kelompok umur ini menunjukkan terjadinya perbaikan dari aspek kesehatan masyarakat, namun tetap memperhatikan kelompok ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.



Gambar 2.13.
Piramida Menurut Kelompok Umur Penduduk
Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan gambar diatas, dijelaskan bahwa kelompok umur terbesar adalah kelompok umur 0-4 tahun sedangkan kelompok umur terkecil adalah 75+. Besarnya komposisi umur 0-4 tahun disebabkan oleh tingginya angka balita di Provinsi Riau adapun model piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dibidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif.

d) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian

Penduduk Provinsi Riau yang bekerja menurut mata pencarian bertujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja minimal 1 jam secara terus menerus dalam seminggu. Dalam hal ini yakni tahun 2019-2023 menggunakan komposisi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan

klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 17 kategori lapangan usaha.

Sektor pertanian masih mendominasi pada perekonomian Provinsi Riau hal ini berdampak pada banyaknya penduduk Provinsi Riau yang berusaha dan bekerja pada sektor pertanian. Penduduk Provinsi Riau yang bekerja di usia 15 tahun ke atas sebesar 38,20% pada tahun 2023. Namun jika dilihat pada rata-rata pertumbuhan per tahun diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi ada pada sektor Jasa Lainnya sebesar 4,37% diikuti dengan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,57%. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dikategori jasa-jasa perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Riau.

Tabel 2.15.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Lapangan Usaha	Persentase (%)					Pertumbuhan (±/ %)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,08	39,17	38,59	39,96	38,20	0,13
2	Pertambangan dan Penggalian	0,99	1,12	1,12	1,10	1,43	10,34
3	Industri Pengolahan	7,68	7,61	8,18	7,26	7,89	1,00
4	Pengadaan Listrik Air dan Gas	0,36	0,18	0,21	0,21	0,19	-10,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,49	0,33	0,30	0,59	0,51	10,34
6	Bangunan	5,02	4,78	4,93	5,21	5,97	4,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,88	17,50	18,61	17,94	17,43	-0,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3,82	3,55	3,40	2,94	3,43	-2,04
9	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	6,70	6,20	5,92	5,67	6,91	1,42
10	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,71	0,51	0,59	0,84	11,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,01	0,85	0,98	0,90	-5,41
12	Jasa Persewaan Bangunan/Real Estate	0,21	0,16	0,19	0,30	0,17	2,38
13	Jasa Perusahaan	1,44	1,38	1,29	1,86	1,62	5,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	4,75	4,34	4,43	4,10	3,90	-4,72
15	Jasa Pendidikan	5,93	5,78	6,22	6,05	5,52	-1,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,63	1,78	1,72	1,44	-0,98
17	Jasa Lainnya	3,35	4,55	3,47	3,53	3,66	4,37

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Riau, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Agustus 2024

2.1.1.4.Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan

kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Berdasarkan Tabel 2.16 dibawah, terlihat bahwa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau terdapat TPT tertinggi sebesar 7,09 % di Kabupaten Bengkalis adapun TPT terendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,71 %. TPAK tertinggi di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Pelalawan sebesar 68,83 % dan TPAK terendah terdapat di Kabupaten Kampar sebesar 59,63 %.

Tabel 2.16.
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota, 2023

No	Kabupaten/Kota	TPT (%)	TPAK (%)
1	Kuantan Singingi	2,49	63,95
2	Indragiri Hulu	2,47	67,56
3	Indragiri Hilir	1,71	60,72
4	Pelalawan	2,26	68,83
5	Siak	5,82	65,72
6	Kampar	3,38	59,63
7	Rokan Hulu	3,45	66,73
8	Bengkalis	7,09	61,76
9	Rokan Hilir	4,42	65,99
10	Kepulauan Meranti	5,17	65,76
11	Pekanbaru	6,20	66,04
12	Dumai	5,15	66,07
Total		4,23	64,45

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2024 - BPS Provinsi Riau

Jika dilihat dari jumlah pengangguran pada tahun 2023 berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 30.661 orang dan terendah terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 4.108 orang. Sedangkan pencari kerja terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 4.675 orang dan terendah terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 239 orang dari 12.615 pencari kerja di Provinsi Riau. Adapun pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2.900 orang atau sebesar 22,99% dari total pencari kerja di Provinsi Riau dan kabupaten yang tidak ada penempatan pencari kerja terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, Siak, Kampar, Rokan Hilir serta Kota Dumai.

Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengurangi pengangguran dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan pencari kerja lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja dan kompetensi pekerja. Selain itu, pemerintah berupaya mengembangkan sektor informal dan juga meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Tabel 2.17.
Jumlah Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan di Kabupaten/Kota, 2023

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2023 (Orang)					Rasio Penempatan (%)
		Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Pencari Kerja	Ditempatkan	
1	Kuantan Singingi	160.561	4.108	164.669	239	-	0,00
2	Indragiri Hulu	222.608	5.632	228.240	359	31	8,64
3	Indragiri Hilir	302.469	5.271	307.740	264	9	3,41
4	Pelalawan	194.393	4.497	198.890	636	188	29,56
5	Siak	214.555	13.253	227.808	473	-	0,00
6	Kampar	369.628	12.923	382.551	842	-	0,00
7	Rokan Hulu	277.332	9.899	287.231	1.043	97	9,30
8	Bengkalis	244.037	18.620	262.657	1.505	99	6,58
9	Rokan Hilir	304.322	14.073	318.395	484	-	0,00
10	Kepulauan Meranti	99.652	5.437	105.089	263	6	2,28
11	Pekanbaru	464.067	30.661	494.728	4.675	2.470	52,83
12	Dumai	148.710	8.080	156.790	1.832	-	0,00
Provinsi Riau		3.002.334	132.454	3.134.788	12.615	2.900	22,99

Sumber: Riau Dalam Angka dan Daerah Dalam Angka – BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota

2.1.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Tujuan utama pengembangan wilayah adalah pemerataan pengembangan antar wilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Percepatan pembangunan sangat tergantung dari kondisi kewilayahan, potensi wilayah infrastruktur, luas wilayah serta kelancaran urusan administratif. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam melakukan percepatan dan pemerataan pengembangan wilayah. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan diseluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan berhasil diturunkan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau akan meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berbagai program dan kebijakan dilaksanakan dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat guna mengurangi berbagai ketimpangan. Pemerataan kesejahteraan rakyat perlu dipercepat dengan memperhatikan pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapannya. Pembangunan infrastruktur akan terus diupayakan untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi rakyat serta menjamin perbaikan konektivitas dan sistem logistik.

Pengembangan wilayah dalam beberapa sektor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi harus sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, hal ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau penggunaan lahan, menjaga keseimbangan dan keserasian dalam peruntukan ruang, sehingga mencegah dampak pengembangan wilayah yang akan merugikan.

Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, potensi yang dapat dikembangkan pada Kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi :

a. Kawasan Lindung;

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan kawasan lainnya. Perwujudan kawasan lindung terdiri atas pemantapan kawasan lindung, evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung, pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan lainnya.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri atas :

1) Pengembangan kawasan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Riau meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan meliputi kawasan tanaman pangan beririgasi, rawa pasang surut dan serta sawah non irigasi, termasuk lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

Kawasan hortikultura meliputi kawasan perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura tersebar di Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan Pelalawan. Adapun pengembangan kawasan perkebunan meliputi perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Kopi dan Tembakau yang didukung dengan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

Kawasan pertanian diarahkan untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Riau. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

2) Pengembangan kawasan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan minapolitan berbasis masyarakat. Rencana pengembangan berada di Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat dengan potensi perikanan dari jenis Ikan Pelagis kecil, Udang Dan Kepiting. Perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir terdapat potensi perikanan dengan jenis Ikan Pelagis kecil, Udang Dan Kepiting. Perairan Indragiri Hilir memiliki potensi perikanan dari jenis Ikan Pelagis kecil, Udang Dan Kepiting.

3) Pengembangan kawasan pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata disebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi:

- Kawasan pertambangan mineral tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau.
- Kawasan pertambangan batubara tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan.
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berada dalam Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau.
- Kawasan pertambangan panas bumi tersebar di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.

4) Pengembangan kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri meliputi industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, industri pengolahan limbah, serta industri biodiesel yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau antara lain di Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.

5) Pengembangan kawasan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, antara lain meliputi:

- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) meliputi Rupert dan sekitarnya,
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Muara Takus – Kampar dan sekitarnya, Pekanbaru Kota dan sekitarnya, Pulau Jemur – Rokan Hilir dan sekitarnya, Siak Sri Indrapura dan sekitarnya, Bukit Tiga Puluh – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Bono – Pelalawan dan sekitarnya, Islamic Center - Rokan Hulu dan sekitarnya, Pantai Solop – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Pantai Puak – Dumai dan sekitarnya, Bokor – Tasik Nambus – Kepulauan Meranti dan sekitarnya, Air Terjun Guruh Gemurai – Kuantan Singingi dan sekitarnya.

6) Pengembangan kawasan permukiman;

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui pengembangan kota kecil dan kawasan pusat pertumbuhan, pengembangan sarana dan prasarana desa tertinggal, pembangunan rumah layak huni dan pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kawasan perdesaan. Adapun pengembangan permukiman kawasan perkotaan, terdiri dari percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya; penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; dan peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

c. Kawasan Strategis

Kawasan strategis Provinsi Riau merupakan penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperhatikan aspek sosial budaya serta pelestarian lingkungan. Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan.

Perwujudan kawasan strategis Provinsi Riau terdiri atas pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan kawasan, penyusunan program aksi pengelolaan kawasan, penyusunan program aksi pengelolaan kawasan, penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

A. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalan; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Kontribusi Provinsi Riau terhadap perekonomian nasional pada tahun 2023 sebesar 4,21 persen sehingga Provinsi Riau menjadi provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar di luar Pulau Jawa. Nilai PDRB harga berlaku Provinsi Riau periode 2019-2023 mengalami peningkatan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 8,18% per tahun. Sektor yang memberikan nilai produksi barang dan jasa tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor pertambangan dan penggalan senilai Rp. 184.47 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi Rp. 203 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 6,11% per tahun. Pada tahun 2023 terjadi perubahan dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan nilai produksi barang dan jasa tertinggi sebesar Rp. 282.78 triliun dengan pertumbuhan 9,93% per tahun. Sedangkan sektor yang memberikan nilai terendah pada tahun 2019 adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar Rp. 46,39 milyar dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp. 47,19 milyar dengan pertumbuhan 1,62% per tahun.

Nilai PDRB harga berlaku pada setiap sektor produksi tahun 2023 di Provinsi Riau rata-rata mengalami kenaikan namun, jika berdasarkan harga konstan terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan per tahunnya, contohnya sektor Pertambangan dan Penggalan. Adapun sektor yang memberikan nilai produksi barang dan jasa tertinggi pada

tahun 2019 adalah sektor industri pengolahan senilai Rp. 194.25 triliun dan meningkat menjadi Rp. 282.78 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 9,93% per tahun. Sedangkan sektor yang memberikan nilai terendah adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar Rp. 46,39 milyar pada tahun 2019 kemudian naik menjadi menjadi Rp 47,19 milyar pada tahun 2023 dengan kontraksi sebesar 1,62% per tahun.

Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan nilai PDRB dapat dilakukan dengan membangun semua sektor dengan baik terutama dengan memperdalam struktur sektor sehingga menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut lapangan usaha Provinsi Riau dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.18 sampai 2.22 dibawah ini.

Tabel 2.18.
Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

Kategori PDRB	PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	174.297,88	194.660,94	225.489,33	253.079,27	269.938,04	11,60
B. Pertambangan dan Penggalian	184.471,87	129.020,59	165.084,24	225.118,96	203.007,68	6,11
C. Industri Pengolahan	194.254,53	207.301,21	235.379,36	270.307,27	282.789,05	9,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	546,30	628,11	655,96	776,41	830,00	11,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83,23	84,01	88,36	93,72	102,47	5,38
F. Konstruksi	72.673,62	70.553,91	75.516,71	84.970,04	99.415,70	8,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	81.728,71	74.931,46	82.995,89	97.084,95	105.304,32	6,97
H. Transportasi dan Pergudangan	6.905,12	5.304,76	5.670,42	7.343,71	8.544,10	7,39

Kategori PDRB	PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.196,30	3.333,29	3.978,27	4.521,22	4.823,51	4,78
J. Informasi dan Komunikasi	5.710,94	6.420,32	6.915,27	7.530,84	8.192,72	9,46
K. Jasa Keuangan dan Asurans	6.915,54	7.170,82	7.954,98	9.144,24	9.692,46	8,89
L. Real Estate	6.866,31	7.025,35	7.321,90	7.992,86	8.531,36	5,61
M,N. Jasa Perusahaan	46,39	35,99	36,55	42,82	47,19	1,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.402,50	11.375,33	11.562,58	12.379,51	13.223,71	3,82
P. Jasa Pendidikan	4.223,00	4.406,44	4.585,18	4.832,17	5.077,05	4,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	1.636,75	1.941,49	2.188,00	2.287,70	2.514,01	11,44
R, S, T, U. Jasa lainnya	4.288,54	3.405,44	3.579,44	4.109,70	4.438,68	1,83
Jumlah	760.247,51	727.599,47	839.002,42	991.615,38	1.026.472,05	8,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2024

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.19.
Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektoral
Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

Kategori PDRB	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	129.690,41	135.124,21	140.717,73	144.691,04	149.361,11	3,60
B. Pertambangan dan Penggalan	85.631,56	80.190,79	77.687,79	78.744,07	80.730,23	-1,40
C. Industri Pengolahan	153.155,80	156.073,85	162.436,92	170.116,90	176.290,06	3,58
D. Pengadaan Listrik dan Gas	323,17	370,41	385,54	440,82	447,20	8,62
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,47	66,95	70,26	73,41	77,47	3,92

Kategori PDRB	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
F. Konstruksi	42.898,58	41.491,52	42.630,30	44.659,75	48.756,79	3,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	48.418,47	42.612,68	46.853,89	52.427,97	55.636,27	3,99
H. Transportasi dan Pergudangan	4.240,48	3.204,23	3.347,98	3.969,95	4.300,02	1,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.335,94	1.841,07	2.162,17	2.397,73	2.498,89	2,84
J. Informasi dan Komunikasi	4.725,66	5.317,97	5.704,89	6.094,46	6.561,69	8,58
K. Jasa Keuangan dan Asurans	4.591,23	4.781,68	5.028,14	5.277,31	5.491,87	4,58
L. Real Estate	4.606,62	4.695,02	4.840,83	5.106,22	5.307,41	3,61
M,N. Jasa Perusahaan	29,98	22,59	22,93	25,87	27,58	-0,93
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.597,34	8.309,17	8.374,82	8.875,52	9.354,72	2,20
P. Jasa Pendidikan	2.533,15	2.586,21	2.672,26	2.777,13	2.881,48	3,28
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.020,00	1.182,51	1.318,95	1.351,71	1.445,97	9,23
R, S, T, U. Jasa lainnya	2.742,11	2.124,82	2.216,44	2.503,04	2.659,74	0,25
Jumlah	495.607,05	489.995,75	506.471,90	529.532,97	551.828,49	2,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2024

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.20.
Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 (%)

No	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2019	2020*	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,93	26,75	26,88	25,52	26,30
B	Pertambangan dan Penggalian	24,26	17,73	19,68	22,70	19,78
C	Industri Pengolahan	25,55	28,49	28,05	27,26	27,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,56	9,70	9,00	8,57	9,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,75	10,30	9,89	9,79	10,26
H	Transportasi dan Pergudangan	0,91	0,73	0,68	0,74	0,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,46	0,47	0,46	0,47
J	Informasi dan Komunikasi	0,75	0,88	0,82	0,76	0,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,99	0,95	0,92	0,94
L	Real Estate	0,90	0,97	0,87	0,81	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,50	1,56	1,38	1,25	1,29
P	Jasa Pendidikan	0,56	0,61	0,55	0,49	0,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,22	0,27	0,26	0,23	0,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,56	0,47	0,43	0,41	0,43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2024

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.21.
Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 (%)

No	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,17	27,58	27,78	27,32	27,07
B	Pertambangan dan Penggalian	17,28	16,37	15,34	14,87	14,63
C	Industri Pengolahan	30,90	31,85	32,07	32,13	31,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,66	8,47	8,42	8,43	8,84

No	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,77	8,70	9,25	9,90	10,08
H	Transportasi dan Pergudangan	0,86	0,65	0,66	0,75	0,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,47	0,38	0,43	0,45	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	0,95	1,09	1,13	1,15	1,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	0,98	0,99	1,00	1,00
L	Real Estate	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	1,70	1,65	1,68	1,70
P	Jasa Pendidikan	0,51	0,53	0,53	0,52	0,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,24	0,26	0,26	0,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,55	0,43	0,44	0,47	0,48
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2024

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

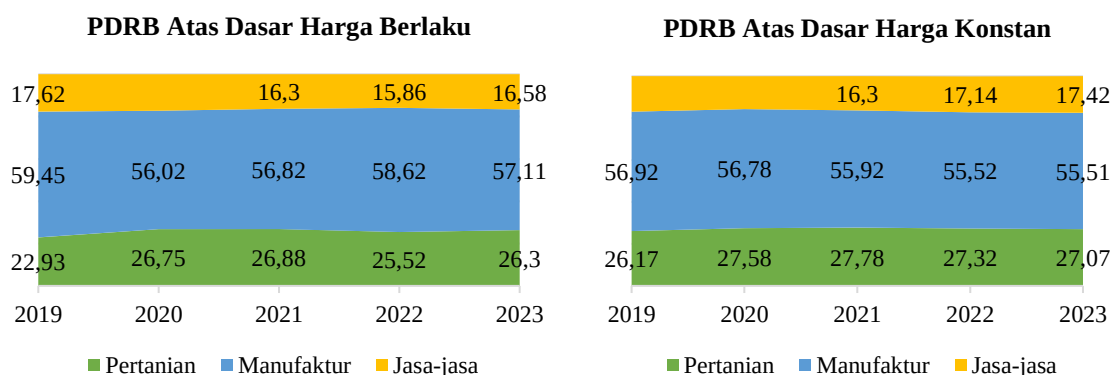
Berdasarkan Tabel 2.21 terlihat bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa pada PDRB ADHB dengan migas pada tahun 2019 adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 25,55% namun, pada tahun 2023 sektor sektor Industri Pengolahan meningkat menjadi 27,55%. Berdasarkan Tabel 2.22 terlihat bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa PDRB ADHK dengan migas pada tahun 2019 adalah industri pengolahan sebesar 30,90%, namun pada tahun 2023 industri pengolahan ini meningkat menjadi 31,95%.

Dilihat dari kontribusi terbesar pada PDRB baik harga berlaku maupun harga konstan diketahui bahwa manufaktur memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ekonomi Provinsi Riau. Berdasarkan *International Standard Industrial Classification (ISIC)*, manufaktur ini merupakan gabungan dari beberapa sektor yakni Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, serta Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi.

Dalam memperkuat perekonomian Provinsi Riau diperlukan adanya transformasi ekonomi yang merupakan titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari produktivitas rendah ke produktivitas tinggi. Transformasi ini menjadikan sektor jasa lebih banyak dibandingkan sektor industri. Provinsi Riau masih

didominasi oleh sektor manufaktur/industri sedangkan sektor jasa belum terlalu berkembang di Provinsi Riau. Untuk menjadikan Provinsi Riau daerah maju diperlukan penguasaan teknologi, modal, dan skill serta menciptakan lebih banyak *entrepreneur* selain itu diperlukan juga kebijakan pemerintah dalam mengubah perekonomian lebih baik.

Berdasarkan Gambar 2.14 dibawah menunjukkan bahwa kontribusi PDRB dengan migas ADHB dan ADHK untuk tiga lapangan usaha utama dari tahun 2019 hingga 2023. Kontribusi lapangan usaha pertanian pada PDRB ADHB tahun 2019 sebesar 22,93% kemudian Tahun 2023 meningkat menjadi 26,3 %. Kontribusi PDRB ADHK lapangan usaha pertanian juga mengalami peningkatan dari 26,17 % pada tahun 2019 kemudian Tahun 2023 meningkat menjadi 27,07 %. Peningkatan tersebut masih dapat dilakukan jika lapangan usaha pertanian dan manufaktur menjadi pendukung utama lapangan usaha jasa-jasa. Secara umum ketiga lapangan usaha utama tersebut akan meningkatkan lapangan usaha lainnya.



Gambar 2.14.
Kontribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Dengan Migas Menurut Lapangan Usaha Utama Provinsi Riau 2019-2023

Berdasarkan Tabel 2.22 dibawah rata-rata pertumbuhan per tahun PDRB harga konstan pada kabupaten/kota terlihat bahwa Kota Dumai memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yakni 4,34 % per tahun sementara itu rata-rata pertumbuhan terendah terlihat Kabupaten Bengkalis yakni 0,55 %. Walaupun Kabupaten Bengkalis memiliki rata-rata pertumbuhan terendah Tahun 2023 namun yang memiliki kontribusi PDRB kedua tertinggi bagi Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru dengan nilai PDRB sebesar Rp. 77.977,09 triliun.

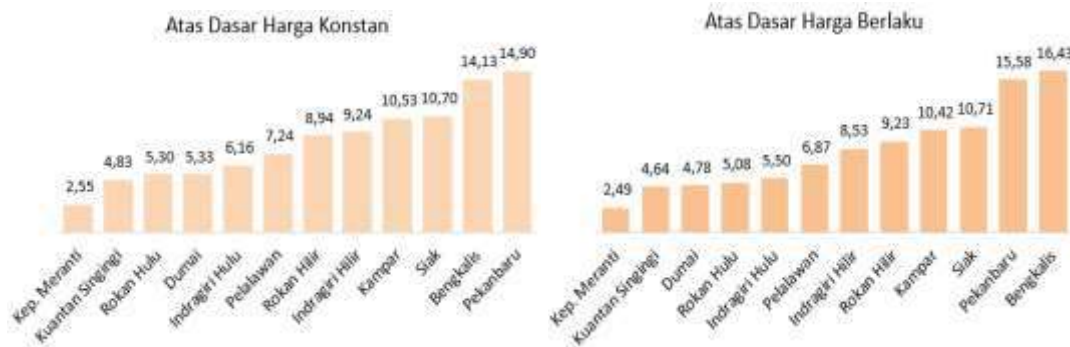
Tabel 2.22.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Dengan Migas Tahun 2019 - 2023 (Rp. Milyar)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kuantan Singingi	23.613,56	23.853,04	24.747,63	25.923,73	26.667,59	3,10
2	Indragiri Hulu	29.866,43	29.831,96	31.102,98	32.543,67	33.971,01	3,29
3	Indragiri Hilir	44.774,87	44.967,54	46.950,37	49.416,95	50.985,02	3,32
4	Pelalawan	34.338,55	35.110,42	36.538,81	38.141,09	39.930,86	3,85
5	Siak	53.366,53	53.311,01	54.543,29	56.605,99	59.070,04	2,59
6	Kampar	51.888,83	51.419,30	53.193,86	55.765,14	58.116,51	2,90
7	Rokan Hulu	25.101,66	25.482,41	26.750,94	28.093,71	29.250,58	3,91
8	Bengkalis	76.377,29	73.856,68	74.229,92	75.878,58	77.977,09	0,55
9	Rokan Hilir	46.437,61	45.978,06	46.726,02	47.961,77	49.319,96	1,53
10	Kep. Meranti	12.629,43	12.683,87	13.008,81	13.421,78	14.067,69	2,74
11	Pekanbaru	72.183,56	69.000,14	72.619,08	77.539,10	82.235,28	3,42
12	Dumai	24.856,90	24.597,99	26.068,28	27.725,87	29.402,61	4,34
Riau		495.607,05	489.995,75	506.471,91	529.532,98	551.828,49	2,75

Sumber: BPS Provinsi Riau

Perkembangan PDRB ADHK terjadi akibat perubahan harga produksi atau indikator produksi sehingga berdampak pada sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak Proporsional misalnya beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, maka dalam jangka panjang akan terjadi perubahan secara nyata sumbangan di setiap sektor yang dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi.

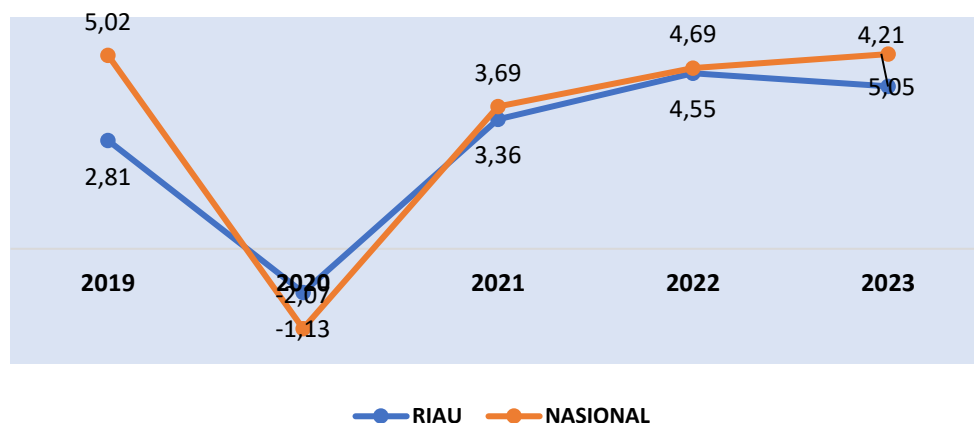
Berdasarkan Gambar 2.15 dibawah, menggambarkan bahwa kabupaten/kota yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHK pada tahun 2023 adalah Kota Pekanbaru sebesar 14,90% sedangkan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2,55% dan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB pada tahun 2023 adalah Kabupaten Bengkalis sebesar 16,43% sedangkan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2,49%.



Gambar 2.15.
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2023 (%)

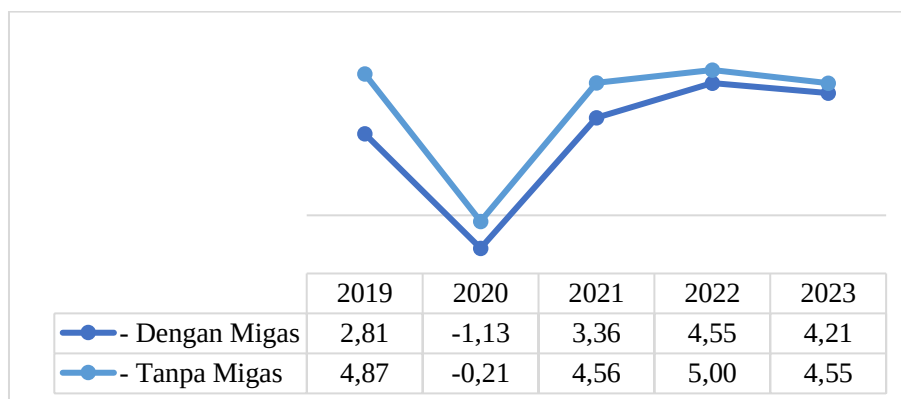
B. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Gambar 2.16 di bawah, menunjukkan Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau sangat berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2010 hingga 2020. Tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,69 %. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih dibawah pertumbuhan nasional, namun perekonomian Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,00% terhadap perekonomian nasional sehingga Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa.



Gambar 2.16.
Perkembangan Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dan Nasional 2019 – 2023 (%)

Berdasarkan Gambar 2.17 dibawah, menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan Migas Tahun 2023 tumbuh positif namun melambat dibanding Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ini meningkat pada semua lapangan usaha namun peningkatan hanya terjadi di sebagian komponen pengeluaran.



Gambar 2.17.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau
Tahun 2019-2023 (%)

Struktur perekonomian Provinsi Riau Tahun 2019 hingga 2023 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Berdasarkan Tabel 2.23 terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Riau Tahun 2023 adalah lapangan usaha industri pengolahan mencapai 27,55 % diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,30 %, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,78 %. Sementara itu, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor kontribusinya sebesar 10,26 % serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,69 %.

Tabel 2.23.
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (%)

No	LAPANGAN USAHA (ADHB)	Kontribusi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	22,93	26,75	26,88	25,52	26,30
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	24,26	17,73	19,68	22,70	19,78
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	25,55	28,49	28,05	27,26	27,55
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	KONSTRUKSI	9,56	9,70	9,00	8,57	9,69
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN MOTOR	10,75	10,30	9,89	9,79	10,26
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	0,91	0,73	0,68	0,74	0,83
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	0,55	0,46	0,47	0,46	0,47
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0,75	0,88	0,82	0,76	0,80
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	0,91	0,99	0,95	0,92	0,94
12	REAL ESTATE	0,90	0,97	0,87	0,81	0,83

No	LAPANGAN USAHA (ADHB)	Kontribusi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
13	JASA PERUSAHAAN	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	1,50	1,56	1,38	1,25	1,29
15	JASA PENDIDIKAN	0,56	0,61	0,55	0,49	0,49
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN LAINNYA	0,22	0,27	0,26	0,23	0,24
17	JASA LAINNYA	0,56	0,47	0,43	0,41	0,43

Sumber : BPS Provinsi Riau

Keterangan Warna :

5	Tertinggi / Paling Banyak
4	
3	
2	
1	Terendah / Paling Sedikit

Provinsi Riau mempunyai 3 lapangan usaha basis yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; serta Industri Pengolahan hal ini tidak terlepas dari besarnya sumbangan tiga lapangan usaha tersebut terhadap perekonomian Provinsi Riau pada Tahun 2023 mencapai 73,63 persen. Sementara itu Potensi Provinsi Riau pada ketiga lapangan usaha tersebut sangat besar misalnya terbesarnya luas lahan dan hasil produksi Kelapa Sawit di Indonesia.

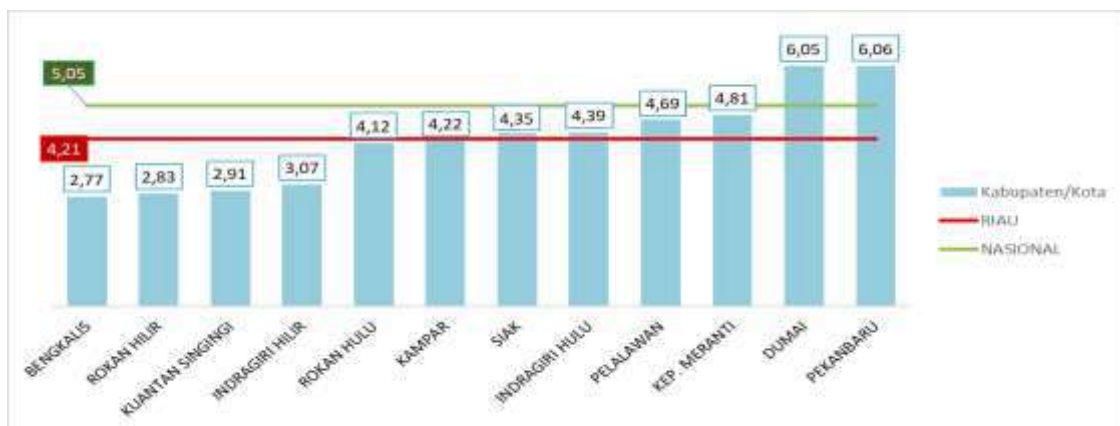
Sub kategori yang menjadi basis disektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu Tanaman Perkebunan; Jasa Pertanian dan Perburuan; Kehutanan dan Penebangan Kayu. Sub kategori ini juga menjadi unggulan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2023 dimana aktivitas lapangan usaha tersebut yang rendah resiko terhadap penularan *Covid-19*. Untuk diketahui permintaan akan komoditas ini tercatat masih tumbuh positif di Tahun 2023.

Sub kategori yang menjadi basis disektor Pertambangan dan Penggalan adalah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pertambangan dan Penggalan Lainnya. Kontribusi kedua lapangan usaha ini cukup besar dalam perekonomian Provinsi Riau. Nilai produksi minyak bumi Provinsi Riau masuk 5 besar di Indonesia. Namun seiring banyaknya sumur tua yang sudah tidak beroperasi, produksi minyak di Provinsi Riau semakin terus berkurang. Namun diprediksi produksi migas kedepannya akan kembali membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas pengeboran sumur minyak mentah baru dan pengembangan di Blok Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kategori Industri Pengolahan yang menjadi basis ekonomi Provinsi Riau adalah sub kategori Industri Batubara dan Pengilangan Minyak; Industri Makanan dan Minuman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Sub

kategori industri pengolahan yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau erat hubungannya dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar berskala nasional.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 tergolong positif dibanding tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 6,06% dan terendah Kabupaten Bengkalis sebesar 2,77%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan di Kabupaten Bengkalis sektor pertambangan dan penggalian. Untuk lebih jelasnya apat dilihat pada gambar dibawah.

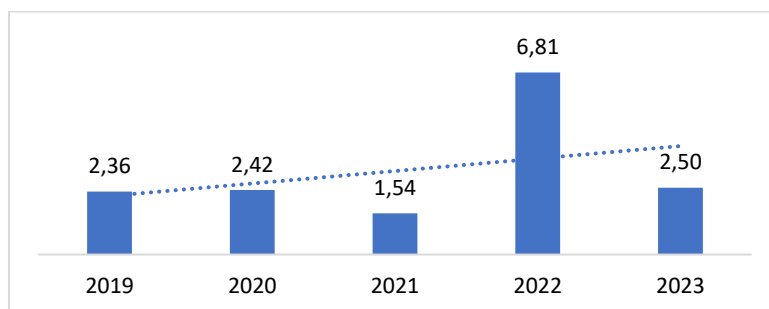


Gambar 2.18.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 (%)

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 (satu) tahun. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) inflasi ringan: di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang: antara 10 - 30% setahun; (iii) inflasi berat: antara 30 - 100% setahun; dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.19.

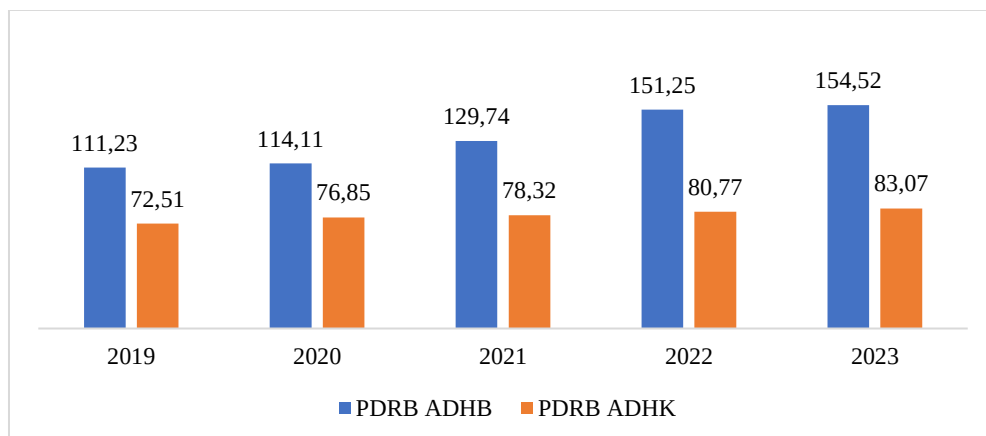
Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Gambar 2.19 diatas terlihat bahwa selama periode 2019-2023 trend inflasi di Provinsi Riau cenderung menurun dari 6,81 % Tahun 2022 menjadi 2,50 % Tahun 2023. Namun Tahun 2022 terjadi peningkatan inflasi menjadi 6,81 %, peningkatan inflasi ini terjadi karena kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kontribusi terbesar yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah transportasi dimana disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.

D. PDRB Perkapita

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan PDRB per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari besarnya kenaikan PDRB per kapita penduduk. Struktur perekonomian Provinsi Riau telah bergeser sejak tahun 2014 dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor industri pengolahan.

Pergeseran kontribusi tersebut mempengaruhi penurunan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian, namun tidak mempengaruhi terhadap nilai PDRB ADHB dan ADHK yang tetap mengalami kenaikan hal yang sama juga terhadap PDRB ADHB dan ADHK per kapita penduduk Provinsi Riau. PDRB ADHB per kapita meningkat dari tahun 2019-2023 yaitu Rp. 111,23 juta per kapita tahun 2019 kemudian meningkat menjadi Rp. 154,52 juta per kapita tahun 2023. Sementara PDRB ADHK per kapita per tahun selama periode 2019-2023, naik dari Rp. 72,51 juta tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 83,07 juta per kapita tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar 2.20 dibawah ini.



Gambar 2.20.
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)

Periode Tahun 2019-2023, PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,33% per tahun sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar -1,16% per tahun. Periode yang sama, PDRB ADHB per kapita dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 16,14% dan terendah terjadi di Kabupaten Bengkalis sebesar 5,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum perkembangan PRDB per kapita Provinsi Riau mengalami kenaikan, sehingga dapat diindikasikan bahwa tingkat pembangunan dan kemakmuran di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.24 dibawah ini.

Tabel 2.24.
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun										Pertumbuhan/ tahun (%)	
		2019		2020		2021		2022		2023			
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Kuantan Singingi	72,14	97,37	71,22	100,57	72,81	114,02	74,93	129,85	75,81	135,45	1,26	8,71
2	Indragiri Hulu	67,60	94,15	67,11	95,49	68,62	105,32	70,13	116,76	71,52	118,91	1,43	6,11
3	Indragiri Hilir	60,46	84,66	68,66	99,32	71,38	111,47	74,87	125,86	76,87	132,00	6,27	11,83
4	Pelalawan	71,00	98,7	90,02	129,94	91,52	144,31	92,8	159,50	94,42	166,75	7,90	14,45
5	Siak	108,91	167,56	116,41	168,16	116,87	192,07	118,53	224,05	120,92	225,02	2,68	7,91
6	Kampar	59,57	88,7	61,12	86,77	62,02	100,79	63,50	117,91	64,66	118,96	2,07	7,96
7	Rokan Hulu	36,27	48,95	45,39	64,28	46,85	73,87	48,21	85,15	49,21	87,74	8,33	16,14
8	Bengkalis	133,29	244,99	130,59	202,6	129,43	243,44	130,16	301,85	131,63	284,67	-0,31	5,29
9	Rokan Hilir	64,99	104,39	72,16	106,55	72,24	123,85	72,85	145,93	73,61	141,40	3,26	8,26
10	Kep. Meranti	68,08	99,15	61,54	87,65	62,11	100,70	62,86	116,59	64,65	117,68	-1,16	5,00
11	Pekanbaru	63,13	103,87	70,17	117,44	73,01	127,21	76,96	143,48	80,60	156,78	6,33	10,86
12	Dumai	80,49	117,05	77,65	114,63	80,59	123,50	83,55	135,77	86,40	144,09	1,84	5,43
	RIAU	71,06	109,05	76,65	113,79	78,00	129,21	79,99	149,91	81,81	152,40	3,61	8,89

Sumber: BPS Provinsi Riau

E. Perkembangan Indeks Gini

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini terletak antara 0,36

sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika angka indeks gini antara 0,20 sampai 0,35.

Selama periode 2019-2023, angka Indeks Gini berkisar antara 0,321 – 0,331 dengan trend fluktuatif menurun. Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan relatif merata. Klasifikasi kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

Tabel 2.25.
Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

Wilayah	Tahun					Rata-rata (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Gini Ratio Provinsi Riau	0,331	0,321	0,327	0,323	0,324 (Maret)	0,325
Pertumbuhan	-4,61	-3,02	1,87	-1,22	0,31	-1,33

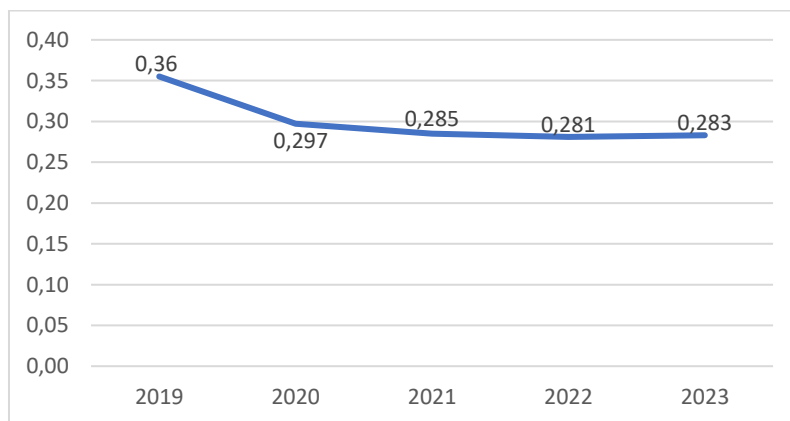
Sumber: BPS Provinsi Riau

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 0,324 sudah termasuk kategori relatif merata dengan penurunan pertumbuhan 0,31 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (*self services development*). Dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Riau memiliki angka yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan secara nasional lebih tinggi dibanding Provinsi Riau.

F. Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi (Williamson dalam Akita and Kataoka, 2003): Indeks Williamson digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kabupaten dan kota. Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

Jika indeks Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata, sehingga dapat dikelompokkan pada: a) Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$; b) Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$; dan c) Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$.



Gambar 2.21.
Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2019–2023

Bila indeks ketimpangan Williamson diukur dari PDRB per kapita dengan migas, menunjukan trend berfluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2019 indeks ketimpangannya sebesar 0,36 kemudian menurun menjadi 0,283 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau mulai merata dimana disebabkan karena kabupaten penghasil migas semakin menurun PDRB nya, sedangkan kabupaten/kota yang lain yang bukan penghasil migas cenderung meningkat PDRB nya.

G. Kemiskinan

Pada September 2000, Pemerintah Indonesia bersama 189 negara lainnya telah menandatangani Deklarasi Millenium yang dikenal dengan Millenium Development Goals (MDG's). Saat ini konsep MDG's sudah diperluas menjadi *Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan 17 tujuan utama. Salah satu tujuan utama tersebut adalah penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan. Koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diperlukan untuk mendukung sinergi dan harmonisasi kebijakan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan yang dicapai Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan capaian SDG's, dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan. Meski pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan dalam satu dekade terakhir, namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga memperhatikan indikator kemiskinan lainnya. Perkembangan indikator kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.26.
Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Tahun	Kondisi Kemiskinan				
	Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp. /Kapita/Bln)	Indek Keparahan Kemiskinan	Indek Kedalaman Kemiskinan
2018	500.440	7,39	479.944	0,30	1,20
2019	490.720	7,08	500.612	0,27	1,13
2020	483.390	6,82	544.057	0,28	1,14
2021	500.810	7,12	565.937	0,24	1,06
2022	485.030	6,78	605.912	0,27	1,10
2023	485.660	6,68	658,611	0,24	1,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*-P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*-P2). Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan lebih menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Riau Tahun 2023, yakni sebesar 1,00 mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 1,10. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan cenderung mendekati garis kemiskinan. Untuk indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*-P2) juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,27 pada tahun 2022 menjadi 0,24 pada tahun 2023.

Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangannya antara kota dan pedesaan. Sejalan dengan perkembangan capaian penurunan indikator kemiskinan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh capaian penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau.

Garis Kemiskinan (GK) adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Perkembangan GK Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kebutuhan minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih lambat perkembangannya. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi, seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangannya antara kota dan pedesaan. Sejalan dengan perkembangan capaian penurunan indikator kemiskinan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh capaian penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau. Berikut disajikan data indikator kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Riau.

Tabel 2.27.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2022 – 2023

Kabupaten / Kota	Indikator Kemiskinan									
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indek Keparahan Kemiskinan (P2)		Garis Kemiskinan (Rp. /Kap/ Bulan)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kuantan Singingi	26,61	26,10	8,24	8,07	1,18	1,17	0,26	0,25	638.678	693.493
Indragiri Hulu	27,46	27,40	6,14	6,06	1,01	1,14	0,29	0,33	584.910	626.671
Indragiri Hilir	43,22	40,86	5,98	5,64	0,73	0,68	0,13	0,13	568.879	597.122
Pelalawan	47,84	45,30	8,97	8,15	1,23	1,05	0,28	0,28	655.641	689.786
Siak	25,71	26,99	5,07	5,23	0,77	0,66	0,18	0,14	518.768	558.867
Kampar	63,55	63,84	7,12	7,04	1,10	0,72	0,29	0,14	502.670	547.696
Rokan Hulu	73,81	74,38	9,95	9,72	1,51	1,54	0,34	0,38	585.225	647.599
Bengkalis	36,03	36,10	6,32	6,31	0,81	1,03	0,15	0,23	648.933	713.826
Rokan Hilir	49,59	53,04	6,73	7,07	1,34	1,22	0,36	0,29	465.614	511.610
Kep. Meranti	45,25	43,82	23,84	22,98	3,54	3,86	0,87	1,06	568.639	623.576
Pekanbaru	35,96	37,67	3,06	3,16	0,33	0,38	0,07	0,09	655.389	712.000
Dumai	10,00	10,15	3,20	3,21	0,36	0,36	0,06	0,06	543.182	601.348
Provinsi Riau	485,03	485,66	6,78	6,68	1,10	1,00	0,27	0,24	605.912	658.611

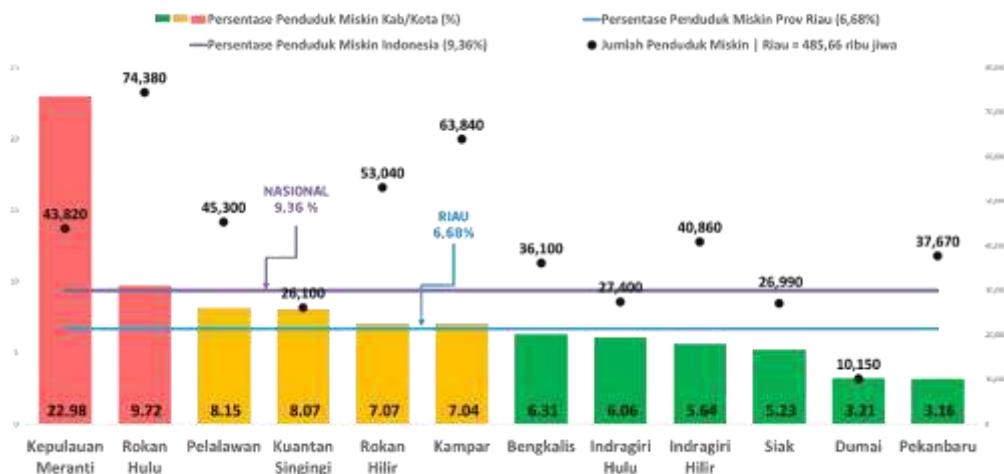
Sumber: Berita Resmi Statistik, Riau Dalam Angka 2023 – BPS Provinsi Riau

Bila dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan antara kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin, persentase tingkat kemiskinan, angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dan garis kemiskinan di Provinsi Riau berbeda cukup signifikan antar wilayah pada tahun 2023, secara umum jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di kota, yang memberi arti bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibanding miskin perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya pedesaan wilayah pesisir. Perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Riau tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.22.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 22,98%. Terdapat 6 (enam) kabupaten dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Riau antara lain Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Kampar. Perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Riau dan kabupaten/kota tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.23.
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023

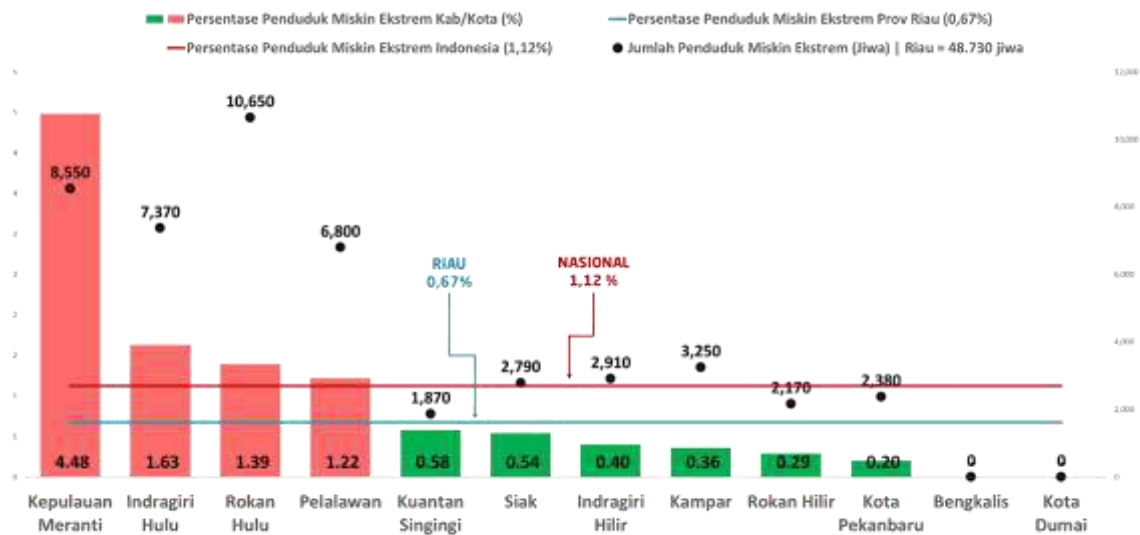
Di dalam masyarakat miskin tersebut terdapat masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan yang diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu setara dengan US\$ 1,9 PPP per hari (World Bank). Jika dikonversi ke dalam Rupiah pada tahun 2023 setara dengan Rp. 11.571,21 per kapita per hari atau Rp. 351.957,40 per kapita per bulan. Tingkat kemiskinan ekstrem nasional tahun 2023 adalah sebesar 1,12% dan Provinsi Riau 0,67%. Dari garis kemiskinan ekstrem tersebut, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau pada Maret 2022 sebesar 1,4% (100.333 jiwa), turun menjadi 0,67% (48.730 jiwa) pada maret tahun 2023. Angka kemiskinan ekstrem pada tingkat kabupaten/kota yang secara reguler dirilis oleh Badan Pusat Statistik, untuk Maret 2023 diestimasi dan dirilis oleh Satgas Data P3KE di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tabel 2.28.
Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2022-2023

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (persen)		Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
		2022	2023	2022	2023
14	Provinsi Riau	1.40	0.67	100.33	48.73
1401	Kuantan Singingi	1.51	0.58	4.88	1.87
1402	Indragiri Hulu	2.49	1.63	11.15	7.37
1403	Indragiri Hilir	0.69	0.40	5.02	2.91
1404	Pelalawan	1.81	1.22	9.65	6.80
1405	Siak	1.27	0.54	6.42	2.79
1406	Kampar	1.73	0.36	15.45	3.25
1407	Rokan Hulu	1.90	1.39	14.08	10.65
1408	Bengkalis	0.60	0.00	3.40	0.00
1409	Rokan Hilir	2.06	0.29	15.16	2.17
1410	Kepulauan Meranti	5.53	4.48	10.50	8.55
1471	Kota Pekanbaru	0.34	0.20	4.01	2.38
1473	Kota Dumai	0.20	0.00	0.62	0.00

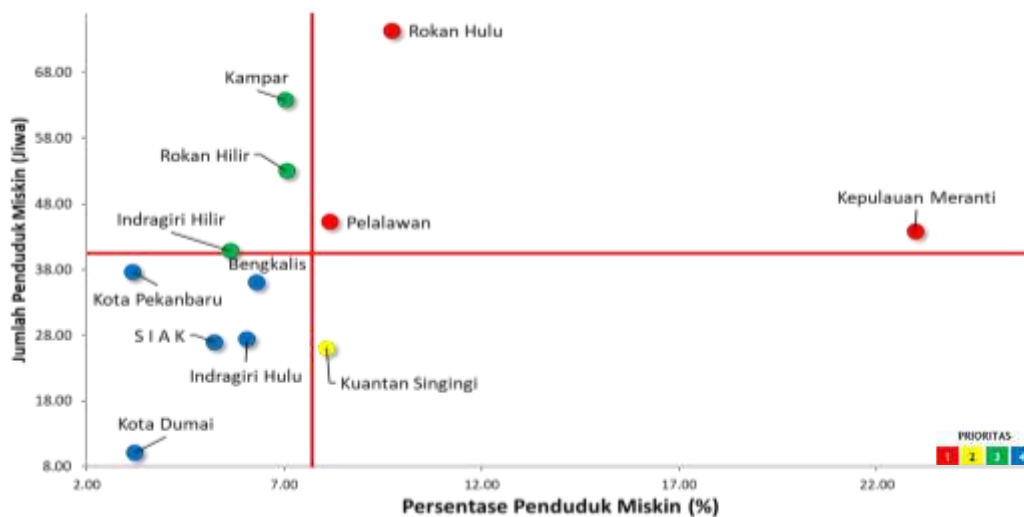
Posisi relatif capaian angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau yakni terdapat empat Kabupaten dengan capaian persentase kemiskinan ekstrem di atas capaian Provinsi dan Nasional yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Pelalawan. Delapan Kabupaten/Kota memiliki capaian angka kemiskinan ekstrem di bawah

nasional dan provinsi yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai.. Posisi relatif capaian persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau pada tiap Kabupaten/Kota sebagaimana tergambar pada grafik berikut.



Gambar 2.24.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023

Mengacu pada capaian angka kemiskinan pada tiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan di atas, maka terhadap angka kemiskinan dari sisi bentuk maupun bobot dari akar masalah kemiskinan sangat mungkin berbeda antar daerah. Peta sebaran masalah antar wilayah dapat berupa grafik empat kuadran, dimana setiap kuadran akan meunjukkan posisi relatif wilayah dalam suatu konstalasi masalah yang dibentuk oleh pasangan indikator yang menjadi tujuan. Sebagai gambaran masalah tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, wilayah-wilayah yang berada pada kuadran yang dimana capaian kedua indikator tersebut relatif buruk harus menjadi wilayah prioritas. Pengelompokan wilayah berdasarkan empat kuadran ini dapat pula diterapkan pada determinan kemiskinan pada dimensi lain seperti dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pembangunan desa, sosial, serta sektor lain yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.



Gambar 2.25.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Riau, Tahun 2023

Pencapaian kesejahteraan penduduk terutama di Provinsi Riau secara makro salah satunya tergambar dari penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,68 persen (Maret 2023). Meski penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan, di lain kondisi masih terdapat penduduk yang memiliki tingkat kerentanan untuk jatuh miskin. Kondisi kerentanan dapat menjadi buruk dengan adanya pengucilan sosial (*social exclusion*) sebagai akibat distribusi pendapatan dan akses layanan dasar yang belum dapat dijangkau oleh seluruh penduduk. Salah satu kelompok rentan yang mengalami marginalisasi dan eksklusivitas adalah Penyandang Disabilitas.

Menurut catatan Dinas Sosial Provinsi Riau, data penyandang disabilitas di Provinsi Riau Tahun 2022 sebanyak 10.174 jiwa. Berdasarkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Riau tahun 2023, dari total penduduk Provinsi Riau yang tercatat sebanyak 6.794.944 jiwa, terdapat 8.890 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik terdapat 1.065 jiwa, disabilitas netra sebanyak 705 jiwa, disabilitas wicara 1.545 jiwa, disabilitas mental 3.851 jiwa, disabilitas fisik dan mental 182 jiwa, dan disabilitas lainnya sebanyak 1.542 jiwa. Sementara, data terakhir hasil pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk disabilitas (sedang dan berat) di Provinsi Riau total berjumlah 85.953 jiwa.

Penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-

undangan. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak penyandang disabilitas, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi pondasi yang menggeser paradigma penyandang disabilitas, dari hanya sekedar objek, sekarang menjadi subjek pembangunan. Dari yang hanya menerima bantuan (*charity based*) menjadi pemenuhan hak (*human right based*), dari yang hanya sektor sosial menjadi multisektor. Untuk itu, kebijakan terkait kelompok rentan tidak hanya dibentuk oleh instansi tertentu, namun dilaksanakan oleh seluruh elemen terutama di lingkup pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, IPM dan indikator pembentuknya yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan rasio penduduk yang bekerja.

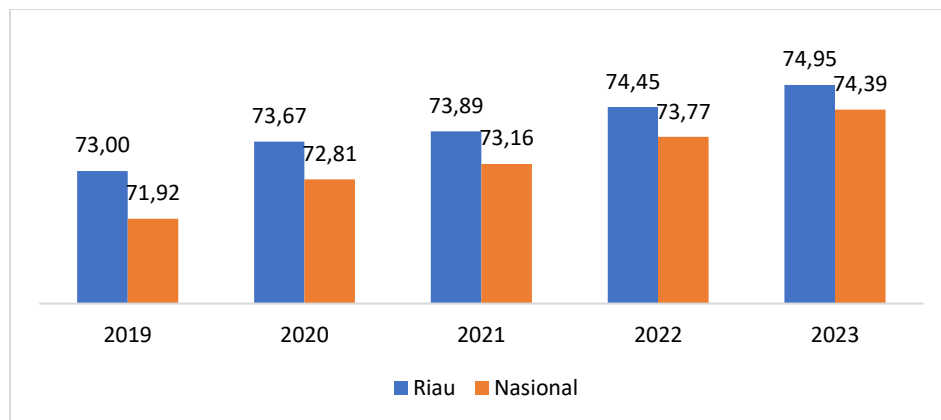
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari data indeks pembangunan manusia diatas dapat terlihat bahwa pembangunan kualitas hidup masyarakat Provinsi Riau meningkat dari tahun ke tahun. Analisis kinerja terhadap IPM dilakukan dengan memperhatikan indikator pembentuk IPM antara lain angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil oleh karena itu upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran per kapita riil melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.

IPM Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun pada 2020 terjadi penurunan IPM akibat pandemi *Covid-19* dimana penurunan ini diakibatkan menurunnya pengeluaran per kapita penduduk. Jika dibandingkan dengan IPM nasional,

IPM Riau rata-rata lebih tinggi 0,8 poin dan IPM Riau termasuk wilayah dengan kategori IPM yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Dimana Riau menempati peringkat ke tujuh dari 34 provinsi serta peringkat kedua dari 10 provinsi di Sumatera setelah Kepulauan Riau.

Analisis kinerja terhadap IPM dilakukan dengan memperhatikan indikator pembentuk IPM antara lain angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil. Perkembangan IPM Provinsi Riau dan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawah berikut.



Gambar 2.26.
IPM Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Dari komponen IPM juga dapat diketahui peningkatan pada masing-masing komponennya. Umur Harapan Hidup mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,94%, harapan lama sekolah tumbuh sebesar 0,30 Oleh karena itu program perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama dalam rangka peningkatan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 0,48% per tahun. Salah satu faktor pendukung peningkatan IPM adalah dengan terjadinya perbaikan kinerja ekonomi Riau dan terus menguatnya perekonomian yang berdampak positif terhadap komponen pengeluaran per kapita. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka pengangguran dan juga angka kemiskinan di Provinsi Riau.

Tabel 2.29.
Perkembangan Komponen Indikator IPM Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
UHH (Tahun)	71,48	73,66	73,72	73,95	74,18	0,94
HLS (Tahun)	13,14	13,20	13,28	13,29	13,30	0,30
RLS (Tahun)	9,03	9,14	9,19	9,22	9,32	0,79
PP (Rp. , 000)	11.255	10.675	10.738	11.158	11.448	0,49
IPM	73,00	73,67	73,89	74,45	74,95	0,66

Sumber: BPS Provinsi Riau

Terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih tinggi dari IPM Provinsi Riau, yakni Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis dan Kampar. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.27 dan Tabel 2.30. Sedangkan IPM paling rendah adalah Kabupaten Kep. Meranti diikuti Indragiri Hilir, yang masih dibawah 70 poin. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesenjangan yang cukup tinggi, maka kebijakan dan program yang terkait dengan peningkatan IPM lebih diprioritaskan pada kedua kabupaten yang memiliki IPM terendah ini dengan memperhatikan atau fokus pada komponen pembentukan IPM, yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup dan pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, pada level kabupaten/kota berkisar antara 68,96 – 83,67. Yang berkategori IPM Sangat Tinggi adalah Kota Pekanbaru, dan terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang tergolong kategori Tinggi, yakni Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Untuk melihat tabel secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30.
IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indikator IPM				
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp/Orang/T ahun)	IPM
Kuantan Singingi	69,13	13,37	8,90	10.945	73,35
Indragiri Hulu	70,69	12,59	8,42	10.957	72,28
Indragiri Hilir	68,62	12,20	7,31	10.659	69,64
Pelalawan	72,00	12,90	8,73	12.399	74,69
Siak	71,64	12,86	9,88	12.637	75,97
Kampar	71,42	13,60	9,40	11.662	75,59

Kabupaten/Kota	Indikator IPM				
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rp/Orang/Tahun)	IPM
Rokan Hulu	70,84	12,88	8,81	10.055	72,28
Bengkalis	71,79	13,34	9,73	12.153	75,96
Rokan Hilir	70,99	12,88	8,52	10.097	71,98
Kep. Meranti	68,41	12,86	7,99	8.613	68,96
Pekanbaru	73,02	15,58	11,94	14.983	83,67
Dumai	71,67	13,33	10,16	12.457	76,45
Provinsi Riau	72,24	13,30	9,32	11.448	74,95

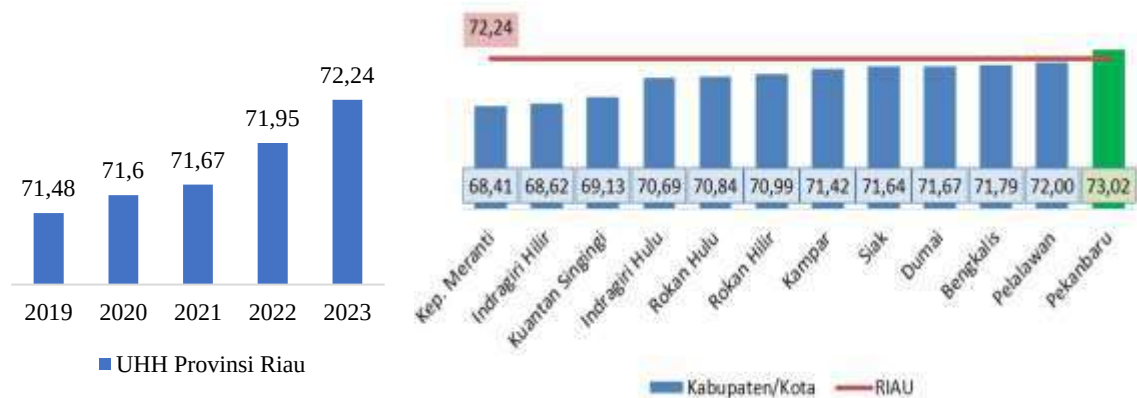
Sumber: BPS Provinsi Riau

Untuk harapan lama sekolah yang perlu prioritas pembangunan adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak dan Kep. Meranti. Sedangkan untuk angka harapan hidup yang perlu prioritas utama adalah Kabupaten Kep. Meranti, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu. Jika dilihat berdasarkan pengeluaran per kapita, yang menjadi prioritas untuk diperhatikan yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi.



Gambar 2.27.
IPM per Kabupaten/Kota 2023 dan
Perkembangan Provinsi Riau 2019 – 2023

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

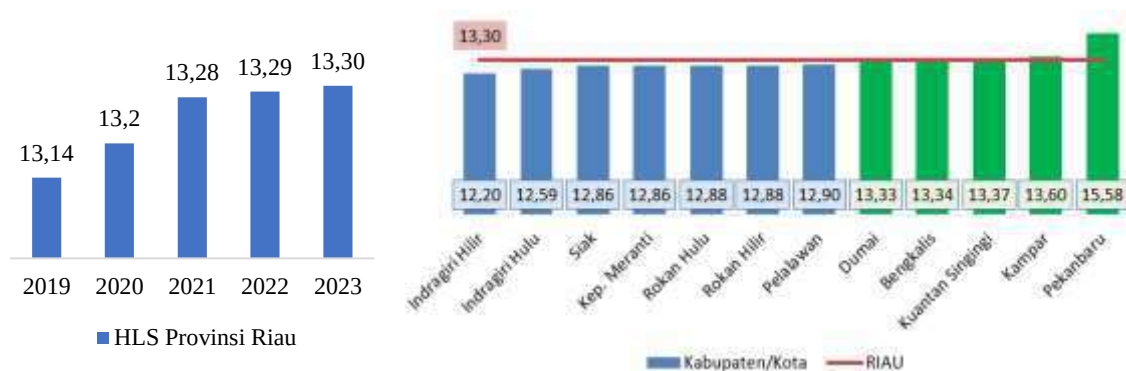


Gambar 2.28.

Umur Harapan Hidup per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka harapan lama sekolah tahun 2019-2023 Provinsi Riau memiliki trend meningkat. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2023 yaitu 13,30 tahun sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan Gambar 2.29 menunjukkan bahwa terdapat empat wilayah yang memiliki HLS lebih tinggi dari rata-rata HLS Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru (15,58 tahun), Kabupaten Kampar (13,60 tahun), Kabupaten Kuantan Singingi (13,37 tahun), Bengkalis (13,34) dan Kota Dumai (13,33 tahun). Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk berumur 19-24 tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi dimana kabupaten/kota tersebut menjadi kabupaten/kota dengan urutan tertinggi dari jumlah penduduknya yang masuk perguruan tinggi.

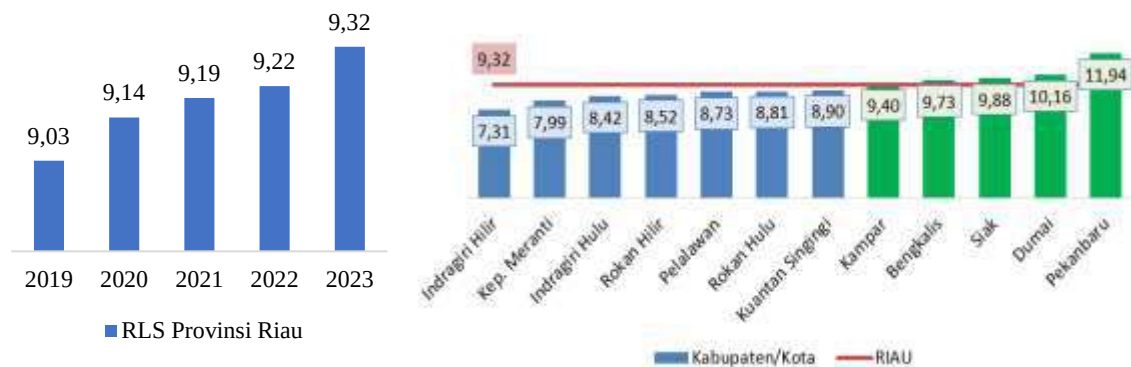


Gambar 2.29.

Angka Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

3) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023 Provinsi Riau memiliki trend meningkat, Pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2023 yaitu 9,32 tahun sudah diatas wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun tetap menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Riau ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 15 tahun dan didukung pendidikan universal. Terdapat 7 kabupaten yang perlu mendapatkan perioritas utama dalam peningkatan RLS karena berada di bawah rata-rata RLS Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kuantan Singingi, lengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah.



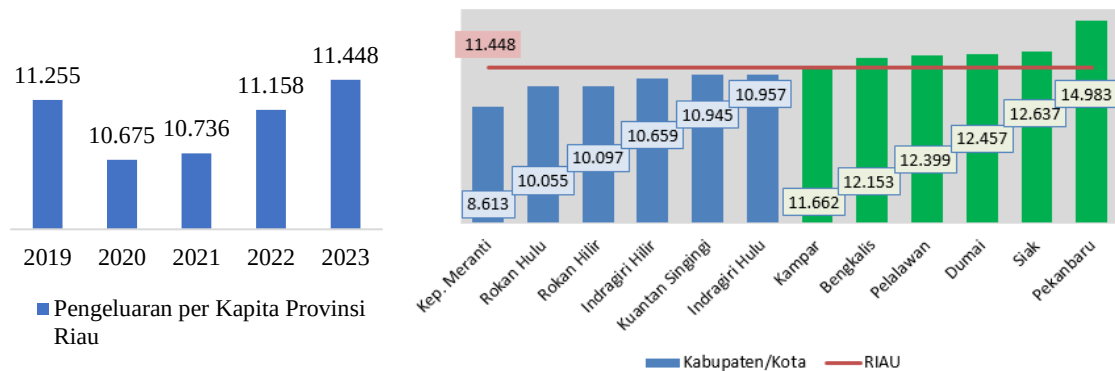
Gambar 2.30.
Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2023

4) Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari Rp. 11,255 juta per tahun pada 2019 menjadi Rp. 11,448 per tahun pada 2023. Dari tiga komponen pembentuk IPM, pengeluaran per kapita riil merupakan komponen dengan pertumbuhan yang tertinggi nomor dua per tahun sebesar 0,49% dari tiga komponen pembentukan IPM. Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Provinsi Riau karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran per kapita riil.

Peningkatan pengeluaran per kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita di samping berkontribusi pada peningkatan PDRB

Provinsi Riau. Terdapat 6 kabupaten yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan pengeluaran per kapita yakni Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.35. Pencapaian pengeluaran per kapita riil Provinsi Riau ini lebih rendah dibanding pencapaian pengeluaran riil Nasional Rp. 11,448 juta per tahun.



Gambar 2.31.

Pengeluaran Per Kapita per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

B. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio Penduduk Bekerja menggambarkan tentang jumlah penduduk yang bekerja dari jumlah penduduk yang terdapat pada tahun yang bersangkutan. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Berdasarkan gambar dibawah menunjukkan terjadinya trend penurunan rasio jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2019-2023. Selama periode tersebut pertumbuhan rasio penduduk bekerja menurun sebesar – 6,07% per tahun. Rendahnya pertumbuhan rasio tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang secara relatif dengan trend peningkatan sementara laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dengan trend fluktuatif dengan elastisitas pergerakan laju pertumbuhan rasio penduduk bekerja hanya 0,05 dari tahun 2019-2023. Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja yang cenderung fluktuatif tersebut disebabkan oleh laju peningkatan lapangan pekerjaan yang juga berfluktuatif.



Gambar 2.32.
Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja
Provinsi Riau 2019-2023

C. Laju Pertumbuhan PDRB Per Pekerja

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja dari tahun ke tahun selama periode 2019-2023. Gambar dibawah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB-HK per pekerja Provinsi Riau mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dan cenderung menurun, dimana selama periode 2019-2023 hanya pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan tahun selainnya dengan laju pertumbuhan negatif dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu - 2,01%. Pada tahun 2023 berdasarkan Triwulan III pertumbuhan juga mengalami penurunan sebesar - 18,09%. Dikarenakan data PDRB hanya sampai pada triwulan III 2023 sehingga terjadi penurunan pertumbuhan PDRB per pekerja dari tahun 2022.



Gambar 2.33.
Laju Pertumbuhan PDRB HK per Pekerja

D. Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demand side* (pengangguran).

Berdasarkan Gambar 2.34 dibawah ini, terlihat bahwa rasio kesempatan kerja menunjukkan terjadinya peningkatan yang berfluktuatif dari tahun 2019 sebesar 61,21 % ke 2023 sebesar 61,73 % dengan pertumbuhan 0.21 % per tahun. Tingginya peningkatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih tinggi dari yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk bekerja sebesar 0,05% dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. - 0.16 % atau penurunan. Kondisi demikian diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam setiap sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja.



Gambar 2.34.
Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

E. Perkembangan Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga

Jumlah pekerja formal selama periode Tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2019 sebesar 48,12 % turun tahun 2023 menjadi 47,87%. Namun pada pekerja non formal mengalami peningkatan dari 51,88 % pada tahun 2019 naik menjadi 52,13 % tahun 2023. Pekerja non formal yaitu berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Kondisi ini menggambarkan penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan non pertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Data tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kemampuan sektor formal dalam penyerapan pekerja dimana selama tahun 2019-2023 hanya tumbuh - 0,13 % per tahun. Sementara pertumbuhan pekerja sektor non formal mengalami peningkatan sebesar 0,12 % per tahun. Kondisi sudah dapat mengkonfirmasi kenapa terjadi penurunan PDRB HK per kapita karena penurunan daya serap tenaga kerja sektor formal sedangkan sektor non formal yang digeluti pekerja sebagian besar memiliki nilai tambah yang rendah.



Gambar 2.35.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja yang Berkerja pada Sektor Formal dan Non Formal Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Meningkatnya proporsi pekerja formal pada tahun 2023 disebabkan meningkatnya pekerja buruh/karyawan/pegawai sebesar 41,12% yang memiliki jam kerja minimal 35 jam per minggu. Penduduk yang bekerja pada sektor formal ini lebih banyak dengan pendidikan SMP, SMA/SMK, dan Universitas. Distribusi penduduk bekerja masih didominasi pada lapangan pekerjaan di sektor pertanian kemudian diikuti oleh sektor perdagangan

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah membahas beberapa indikator terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus infrastruktur wilayah, fokus iklim investasi dan Fokus SDM.

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menguraikan tentang kinerja indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani, produktivitas total daerah, rasio perdagangan terhadap PDRB, rasio LDR.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita

Tabel dibawah memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2019 – 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2019, rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku sebesar Rp170,21 juta/RT, meningkat menjadi Rp222,03 juta/RT pada tahun 2023. Selama periode ini, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran RT sebesar 6,90% per tahun. Sedangkan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp41,69 juta/kapita dan meningkat menjadi Rp53,99 juta/kapita pada tahun 2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6,70% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi pada harga konstan juga memiliki tren serupa dengan pengeluaran konsumsi pada harga berlaku. Pada tahun 2019, rasio pengeluaran konsumsi harga konstan terhadap jumlah rumah tangga sebesar Rp103,28 juta/RT dan meningkat menjadi Rp118,08 juta/RT pada tahun 2023. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi di Provinsi Riau meningkat sebesar 3,43% per tahun. Sedangkan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada harga konstan pada tahun 2019 sebesar Rp25,30 juta/kapita dan mengalami peningkatan menjadi Rp28,72 juta/kapita pada tahun 2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,23% per tahun.

Tabel 2.31.
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga (RT)
Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Harga Berlaku (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT	284.942.517	284.376.493	299.409.663	331.127.024	358.680.236	6,00
2	Jumlah RT	1.674.068	1.528.621	1.557.545	1.586.498	1.615.494	-0,78
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	6.835.098	6.376.110	6.466.780	6.555.770	6.642.874	-0,65
4	Rasio (Juta Rp/RT)	170,21	186,03	192,23	208,72	222,03	6,90
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	41,69	44,60	46,30	50,51	53,99	6,70
B	Harga Konstan (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT	172.897.764	169.242.657	174.653.231	182.881.169	190.751.015	2,52
2	Jumlah RT	1.674.068	1.528.621	1.557.545	1.586.498	1.615.494	-0,78
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	6.835.098	6.376.110	6.466.780	6.555.770	6.642.874	-0,65
4	Rasio (Juta Rp/RT)	103,28	110,72	112,13	115,27	118,08	3,43
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	25,30	26,54	27,01	27,90	28,72	3,23

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Olahan

Sementara itu pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan harga konstan per kabupaten/kota tahun 2023 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru masih merupakan wilayah dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi di Provinsi Riau sebesar Rp160,69 juta/RT/tahun dan Rp38,42 juta/kapita/tahun, hal ini lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi RT/tahun Provinsi Riau sebesar Rp118,08 juta/RT/tahun. Disamping itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga terendah pada harga konstan per kabupaten/kota tahun 2023 adalah Kabupaten Pelalawan dengan pengeluaran konsumsi sebesar Rp94,10 juta/RT/tahun, sedangkan untuk pengeluaran konsumsi per kapita terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp23,71 juta/kapita/tahun.

Tabel 2.32.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah RT	PDRB Harga Berlaku (Rupiah)			PDRB Harga Konstan (Rupiah)		
		Total Pengeluaran RT (Juta)	Rp/RT (Juta)	Rp/ Kapita (Juta)	Total Pengeluaran RT (Juta)	Rp/RT (Juta)	Rp/ Kapita (Juta)
Kuantan Singingi	88.203	18.626.020	211,172	53,89	9.864.470	111,84	28,54
Indragiri Hulu	115.173	21.583.880	187,404	46,70	12.138.920	105,40	26,26
Indragiri Hilir	162.121	35.852.527	221,147	52,94	19.839.249	122,37	29,29

Kabupaten/ Kota	Jumlah RT	PDRB Harga Berlaku (Rupiah)			PDRB Harga Konstan (Rupiah)		
		Total Pengeluaran RT (Juta)	Rp/RT (Juta)	Rp/Kapita (Juta)	Total Pengeluaran RT (Juta)	Rp/RT (Juta)	Rp/Kapita (Juta)
Pelalawan	107.139	18.649.610	174,069	45,65	10.081.790	94,10	24,68
Siak	117.834	26.092.570	221,435	54,69	12.792.340	108,56	26,81
Kampar	215.681	46.122.930	213,848	52,35	24.651.790	114,30	27,98
Rokan Hulu	145.812	30.319.680	207,937	51,81	15.814.020	108,45	27,02
Bengkalis	138.446	35.779.430	258,436	61,17	18.063.480	130,47	30,88
Rokan Hilir	154.073	30.647.300	198,914	46,16	15.932.220	103,41	24,00
Kep. Meranti	48.872	9.345.320	191,220	44,13	5.022.140	102,76	23,71
Pekanbaru	242.989	77.846.670	320,371	76,59	39.045.700	160,69	38,42
Dumai	79.151	15.567.630	196,683	47,33	8.566.290	108,23	26,04
Riau	1.615.494	358.680.240	222,025	53,99	190.751.010	118,08	28,72

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Daerah Dalam Angka Kabupaten/Kota 2024 serta Olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga kabupaten/kota yang pengeluaran konsumsi RT/kapita/tahun menurut PDRB-HB tahun 2023 lebih tinggi dari Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, Bengkalis dan Siak kemudian 9 Kabupaten Kota yang pengeluaran konsumsi RT/Kapita/tahun lebih rendah dari Provinsi Riau.

Sementara itu pengeluaran konsumsi RT menurut PDRB-HK tahun 2023 kabupaten kota yang lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi RT menurut PDRB-HK Provinsi Riau tahun 2023 adalah Pekanbaru, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

Terjadinya perbedaan antara jumlah kabupaten kota yang pengeluaran konsumsi RT/kapita/tahun menurut PDRB-HB dan PDRB-HK berada di atas rata-rata provinsi Riau disebabkan oleh karean adanya perbedaan jumlah anggota keluarga setiap RT yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi RT Kabupaten Kota tertinggi per bulan menurut PDRB-HB terdapat di Kota Pekanbaru sebesar Rp 6,38 juta/kapita/bulan dan terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp3,67 juta/kapita/bulan. Sedangkan Pengeluaran konsumsi RT Kabupaten Kota tertinggi per bulan menurut PDRB-HK terdapat di Kota Pekanbaru sebesar Rp3,20 juta/kapita/bulan dan terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp1,97 juta/kapita/bulan. Terjadinya perbedaan pengeluaran konsumsi RT antara PDRB-HB dengan PDRB-HK karena adanya pengaruh inflasi terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh RT dan individu tiap bulan selama tahun 2023.

B. Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita

Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka semakin rendah proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan pokok (pangan) atau semakin tinggi proporsi pendapatan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan bukan pokok (non pangan). Berdasarkan tabel dibawah, dapat dilihat bahwa selama periode 2019-2023, rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT pada harga berlaku sebesar 3,18% per tahun, sementara rata-rata pertumbuhan Rasio Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita adalah 3,83% atau naik dari Rp22,11 juta/kapita tahun 2018 menjadi Rp25,66 juta/kapita tahun 2022.

Tabel 2.33.
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita/Tahun
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
A	Harga Berlaku (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT	150.700.075	156.267.101	47.507.126	153.239.370	169.700.763	3,18
2	Jumlah RT	1.636.197	1.674.068	1.528.621	1.557.545	1.586.498	-0,66
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	6.814.909	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	-0,64
4	Rasio (Juta Rp/RT)	92,10	93,35	96,50	98,39	106,97	3,85
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	22,11	22,41	23,07	23,60	25,66	3,83
6	Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi RT	55,21	54,84	51,87	51,18	51,25	-1,82
B	Harga Konstan (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT	94.595.920	95.927.883	89.450.548	92.173.595	97.973.930	1,00
2	Jumlah RT	1.636.197	1.674.068	1.528.621	1.557.545	1.586.498	-0,66
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	6.814.909	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	-0,64
4	Rasio (Juta Rp/RT)	57,81	57,30	58,52	59,18	61,75	1,68
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	13,88	13,76	13,99	14,19	14,81	1,65
6	Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi RT	55,83	55,48	52,85	52,78	53,57	-1,00

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Pertumbuhan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran konsumsi RT di Provinsi Riau selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan

pada PDRB harga berlaku sebesar -1,82% atau turun dari 55,21% pada tahun 2018 menjadi 51,25% pada tahun 2022. Sementara pertumbuhan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran konsumsi RT di Provinsi Riau selama tahun 2018-2022 pada PDRB harga konstan turun sebesar -1,00% atau turun dari 55,83% pada tahun 2018 menjadi 53,57% pada tahun 2022.

C. Nilai Tukar Petani (NTP)

Harga yang diterima petani merupakan harga tertimbang dari harga setiap komoditas pertanian yang diproduksi/dijual petani. Penimbang yang digunakan adalah nilai produksi yang dijual petani dari setiap komoditas. Harga komoditas pertanian merupakan harga rata-rata yang diterima petani atau *farm gate*. Harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang dari harga/biaya konsumsi makanan, konsumsi non makanan dan biaya produksi dan penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani. Komoditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang dibayar petani.

Konsep NTP dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani, dimana NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP diperoleh dari persentase rasio indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 1993. $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$

menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Nilai tukar petani selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani (IT) sangat berfluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.34. Pada tahun 2019 indek harga yang diterima petani (IT) 129,81 naik menjadi 183,09 pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,32% per tahun. Kenaikan ini disebabkan naiknya harga komoditi pertanian khususnya kelapa sawit. Dan indeks yang dibayar petani (IB) mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar 135,81 turun menjadi 117,15 pada tahun 2023 dengan rata-rata penurunan sebesar -2,88 per tahun. Secara keseluruhan rasio nilai tukar petani dari tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami peningkatan 13,35% per tahun. Hal ini didorong oleh peningkatan harga jual komoditas pertanian terutama sub sektor perkebunan.

Upaya peningkatan NTP dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur pada sektor pertanian secara umum, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun. Sementara dari aspek yang diterima petani perlu dilakukan peningkatan produktivitas produk pertanian dan kebijakan harga yang menguntungkan pihak petani produsen.

Tabel 2.34.
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023*	
1.	Indeks yang diterima petani (It)	129,81	124,78	149,01	162,29	183,09	9,32
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	135,81	105,05	107,42	112,55	117,15	-2,88
3.	NTP	95,58	118,78	138,68	144,19	156,29	13,35

Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani - BPS Provinsi Riau
Ket : * Desember 2023

Selanjutnya, Nilai Tukar Petani per sektor yang diambil bulan Desember tahun berkenaan. Pada tahun 2023, NTP tertinggi di Provinsi Riau berada pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 168,55 naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit. Selanjutnya, data secara rinci per sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35.
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

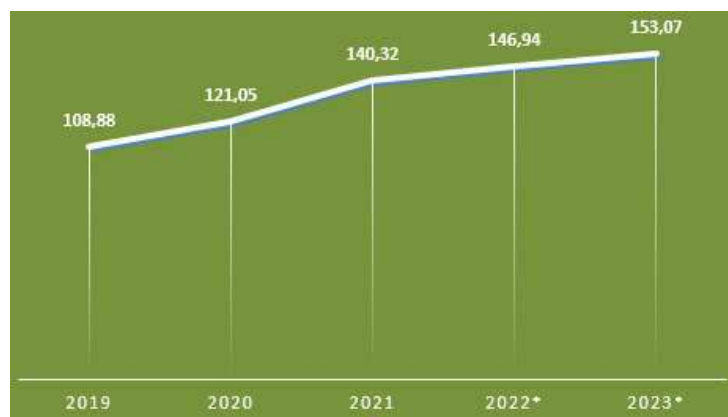
No.	Uraian Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Tanaman Pangan	96,13	92,94	90,40	90,60	98,54
2.	Holtikultura	98,74	95,13	94,41	100,37	104,04
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	121,57	137,84	164,16	164,96	168,55
4.	Peternakan	99,05	97,51	100,62	97,00	93,56
5.	Perikanan	98,92	99,11	103,75	102,94	103,58

D. Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani - BPS Provinsi Riau

E. Ket : * Desember 2023

F. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani untuk produksi pertaniannya (Ibup) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTUP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk produksi dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTUP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi (profitabilitas).



Sumber : BPS Provinsi Riau

Ket. : * Desember 2023

Gambar 2.36.
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Riau Tahun 2019-2023

G. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan di Provinsi Riau mengalami surplus sebesar 11,96% yang didukung oleh peningkatan pada sektor nonmigas sebesar 14,34%. Pada nilai ekspor mengalami surplus sebesar 12,39% dimana industri pengolahan dengan golongan barang lemak dan minyak hewan/nabati menjadi penyumbang terbesar pada peningkatan ekspor di Provinsi Riau. Negara Tiongkok, India, dan Malaysia menjadi negara tujuan terbesar untuk ekspor di Provinsi Riau. Jika dilihat dari nilai impor juga mengalami surplus sebesar 15,09% yang didominasi oleh sektor non migas yakni kelompok golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik. Peningkatan impor ini terutama berasal dari negara Tiongkok, Kanada, dan Finlandia.

Tabel 2.36.
Neraca Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Uraian	Nilai Ekspor dan Impor (Juta US\$)					Trend (%) 2018-2022	Jan-Feb		Perub (%) 2023/2022
	2018	2019	2020	2021	2022		2022	2023	
EKSPOR	15.993,4	12.412,5	13.763,8	19.969,9	22.610,1	12,39	3.377,3	3.271,9	-3,12
a. MIGAS	2.693,0	818,2	573,2	1.730,4	1.515,7	-3,93	235,7	225	-4,51
b. NON MIGAS	13.300,3	11.594,3	13.190,6	18.239,5	21.094,4	14,75	3.141,6	3.046,9	-3,02
IMPOR	1.567,8	1.438,0	1.318,0	1.622,3	2.980,2	15,09	401	513,2	27,99
a. MIGAS	237,9	159,4	121,1	119,1	254,6	-1,54	11	19,8	78,85
a. NON MIGAS	1.329,9	1.278,6	1.196,9	1.503,2	2.725,6	17,32	390	493,5	26,54
TOTAL PERDAGANGAN	17.561,1	13.850,5	15.081,8	21.592,2	25.590,3	12,72	3.778,3	3.785,1	0,18
a. MIGAS	2.930,9	977,6	694,2	1.849,5	1.770,3	-3,64	246,7	244,8	-0,78
b. NON MIGAS	14.630,3	12.872,9	14.387,5	19.742,7	23.820,0	15,06	3.531,5	3.540,3	0,25
NERACA PERDAGANGAN	14.425,6	10.974,5	12.445,9	18.347,6	19.629,9	11,96	2.976,3	2.758,7	-7,31
a. MIGAS	2.455,1	658,8	452,1	1.611,2	1.261,1	-4,29	224,6	205,3	-8,61
b. NON MIGAS	11.970,4	10.315,7	11.993,8	16.736,3	18.368,8	14,34	2.751,6	2.553,4	-7,2

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2023

H. Sektor Unggulan

Secara teoritis yang disebut dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi tidak selalu ditandai dengan besarnya peran suatu sektor dalam perekonomian, tetapi secara riil memang telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi di suatu sektor tertentu yang ditandai dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang mendukung sektor bersangkutan.

Perubahan struktur ekonomi ini menarik untuk dianalisis karena akan mempengaruhi faktor penentu dalam penilaian prestasi ekonomi suatu daerah.

Lebih jauh, jika perubahan ini terjadi secara berarti akan dapat merubah arah kebijaksanaan ekonomi masa depan. Potensi ekonomi satu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lainnya, karena masing-masing daerah mempunyai ciri khas dan karakteristik yang menempel sesuai dengan sumberdaya manusia, struktur alam, dan letak geografisnya. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB dan kemampuan masing-masing sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar dan sekaligus juga sebagai sektor yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja tertinggi, akan menjadi potensi sebagai sektor ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut.

Tabel 2.37.
Perhitungan Nilai *Static Location Quotient* (SLQ) Sektoral di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Kategori PDRB	2019			2020			2021			2022			2023		
	PDRB RIAU (Juta Rp)	PDB (Juta Rp)	SLQ	PDRB RIAU (Juta Rp)	PDB (Juta Rp)	SLQ	PDRB RIAU (Juta Rp)	PDB (Juta Rp)	SLQ	PDRB RIAU (Juta Rp)	PDB (Juta Rp)	SLQ	PDRB RIAU (Juta Rp)	PDB (Juta Rp)	SLQ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	129.690.413	1.354.399.100	2,12	135.124.212	1.378.398.900	2,15	140.717.739	1.404.190.900	2,20	144.691.042	1.435.853.300	2,23	149.361.107	1.454.586.900	2,29
B. Pertambangan dan Penggalian	85.631.560	806.206.200	2,35	80.190.793	790.475.200	2,22	77.687.796	822.099.500	2,07	78.744.076	858.146.600	2,03	80.730.225	910.679.400	1,98
C. Industri Pengolahan	153.155.807	2.276.667.800	1,49	156.073.852	2.209.920.300	1,55	162.436.922	2.284.821.700	1,56	170.116.902	2.396.603.000	1,57	176.290.055	2.507.799.800	1,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	323.175	111.436.700	0,06	370.417	108.826.400	0,07	385.540	114.861.100	0,07	440.826	122.451.900	0,08	447.197	128.460.500	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66.479	9.004.900	0,16	66.950	9.449.300	0,16	70.263	9.919.300	0,16	73.418	10.240.100	0,16	77.474	10.741.400	0,16
F. Konstruksi	42.898.586	1.108.425.000	0,86	41.491.525	1.072.334.800	0,85	42.630.306	1.102.517.700	0,85	44.659.759	1.124.725.200	0,87	48.756.790	1.179.989.300	0,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	48.418.478	1.440.185.700	0,74	42.612.682	1.385.651.200	0,67	46.853.897	1.449.831.400	0,71	52.427.970	1.529.885.600	0,75	55.636.273	1.604.114.000	0,77
H. Transportasi dan Pergudangan	4.240.489	463.125.900	0,20	3.204.231	393.418.900	0,18	3.347.983	406.169.300	0,18	3.969.952	486.874.900	0,18	4.300.024	554.854.900	0,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.335.943	333.304.600	0,15	1.841.076	299.122.400	0,13	2.162.172	310.748.600	0,15	2.397.738	347.943.800	0,15	2.498.894	382.674.500	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	4.725.660	589.536.100	0,18	5.317.978	652.062.900	0,18	5.704.892	696.506.100	0,18	6.094.466	750.389.200	0,18	6.561.685	807.304.600	0,18
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.591.235	443.093.100	0,23	4.781.681	457.486.500	0,23	5.028.141	464.637.700	0,24	5.277.311	473.615.000	0,24	5.491.872	496.236.800	0,25
L. Real Estate	4.606.629	316.901.100	0,32	4.695.024	324.259.400	0,32	4.840.830	333.282.900	0,32	5.106.220	339.014.900	0,33	5.307.413	343.864.800	0,34
M, N. Jasa Perusahaan	29.989	206.936.200	0,00	22.598	195.671.100	0,00	22.937	197.106.700	0,00	25.873	214.399.000	0,00	27.576	232.076.100	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.597.340	365.538.800	0,52	8.309.172	365.446.000	0,50	8.374.822	364.251.400	0,50	8.875.529	373.439.100	0,52	9.354.724	378.989.100	0,55
P. Jasa Pendidikan	2.533.151	341.349.900	0,16	2.586.217	350.272.800	0,16	2.672.262	350.662.600	0,17	2.777.136	352.716.200	0,17	2.881.478	358.952.100	0,18
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.020.003	127.487.900	0,18	1.182.516	142.227.300	0,18	1.318.956	157.085.300	0,18	1.351.714	161.384.900	0,18	1.445.969	168.926.200	0,19
R, S, T, U. Jasa lainnya	2.742.118	205.011.400	0,30	2.124.828	196.608.900	0,24	2.216.448	200.773.200	0,24	2.503.046	219.777.800	0,25	2.659.736	242.891.700	0,24
PDRB	495.607.055	10.949.155.400		489.995.750	10.722.999.300		506.471.907	11.120.077.900		529.532.979	11.710.397.800		551.828.492	12.301.393.600	

Sumber : BPS dan Olahan

Analisis *Static Location Quotient* (SLQ) merupakan suatu indeks yang mengukur apakah suatu sektor merupakan sektor unggulan atau tidak dalam suatu daerah. Analisis ini diidentifikasi dari nilai PDRB dan PDB sisi lapangan usaha. Pada tabel 2.38. diketahui bahwa nilai SLQ Provinsi Riau selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023, sektor unggulan dalam perekonomian Provinsi Riau adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan, meskipun secara nilai mengalami fluktuasi setiap tahunnya sehingga ketiga sektor ini menjadi sektor basis dalam perekonomian Riau. Mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, terjadi pergeseran sektor unggulan tertinggi dari sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi Sektor Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini merupakan akibat dari menurunnya hasil produksi dan turunnya harga minyak dunia.

Selain analisis SLQ, dilakukan juga analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi sektor-sektor lain untuk menjadi sektor unggulan. Analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*) merupakan modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai sektor atau sub sektor dari waktu ke waktu. Nilai $DLQ > 1$ maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sebaliknya jika $DLQ < 1$ maka potensi perkembangan sektor i di daerah lebih rendah dibandingkan nasional secara keseluruhan.

Pada tabel dibawah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki nilai DLQ 1,08. Hal ini berarti bahwa sektor tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan nasional. Dan sektor ini merupakan sektor andalan pada tahun 2022 dalam perekonomian Provinsi Riau. Jika ketiga sektor unggulan berdasarkan hasil SLQ sebelumnya diturunkan menggunakan analisis DLQ maka ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang prospektif dalam peningkatan perekonomian Provinsi Riau. Nilai DLQ dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38.
Perhitungan Nilai *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Sektoral di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Kategori PDRB	2019			2020			2021			2022			2023		
	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDB	DLQ	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDB	DLQ	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDB	DLQ	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDB	DLQ	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDB	DLQ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,13	3,61	0,37	4,19	1,77	0,63	4,14	1,87	0,60	2,82	2,25	0,40	3,23	1,30	0,62
B. Pertambangan dan Penggalian	-6,98	1,22	2,37	-6,35	(1,95)	-4,95	-3,12	4,00	0,37	1,36	4,38	-0,39	2,52	6,12	-0,43
C. Industri Pengolahan	5,82	3,80	0,38	1,91	(2,93)	-0,40	4,08	3,39	0,31	4,73	4,89	0,26	3,63	4,64	0,22
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,58	4,04	0,29	14,62	(2,34)	-1,15	4,08	5,55	0,08	14,34	6,61	0,20	1,45	4,91	0,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	1,94	6,83	0,07	0,71	4,94	0,05	4,95	4,97	0,18	4,49	3,23	0,24	5,52	4,90	0,20
F. Konstruksi	6,27	5,76	0,32	-3,28	(3,26)	0,30	2,74	2,81	0,29	4,76	2,01	0,56	9,17	4,91	0,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Repa	5,16	4,60	0,25	-11,99	(3,79)	0,91	9,95	4,63	0,45	11,90	5,52	0,45	6,12	4,85	0,28
H. Transportasi dan Pergudangan	0,94	6,38	0,08	-24,44	(15,05)	0,48	4,49	3,24	0,38	18,58	19,87	0,27	8,31	13,96	0,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan M	2,46	5,79	0,13	-21,18	(10,26)	0,55	17,44	3,89	0,95	10,89	11,97	0,23	4,22	9,98	0,12
J. Informasi dan Komunikasi	9,30	9,42	0,05	12,53	10,61	0,06	7,28	6,82	0,06	6,83	7,74	0,05	7,67	7,58	0,06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	6,61	0,03	4,15	3,25	0,28	5,15	1,56	0,55	4,96	1,93	0,47	4,07	4,78	0,20
L. Real Estate	5,29	5,76	0,25	1,92	2,32	0,23	3,11	2,78	0,29	5,48	1,72	0,63	3,94	1,43	0,54
M, N. Jasa Perusahaan	6,54	10,25	0,39	-24,65	(5,44)	3,10	1,50	0,73	0,84	12,80	8,77	0,82	6,58	8,24	0,48
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahan	2,79	4,66	0,38	-3,35	(0,03)	-1,36	0,79	(0,33)	1,50	5,98	2,52	1,12	5,40	1,49	1,46
P. Jasa Pendidikan	6,60	6,30	0,32	2,09	2,61	0,26	3,33	0,11	1,20	3,92	0,59	0,96	3,76	1,77	0,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,69	8,66	0,07	15,93	11,56	0,07	11,54	10,45	0,06	2,48	2,74	0,05	6,97	4,67	0,08
R, S, T, U. Jasa lainnya	8,75	10,57	0,21	-22,51	(4,10)	1,75	4,31	2,12	0,43	12,93	9,47	0,34	6,26	10,52	0,16
PDRB	2,81	5,02	0,19	-1,13	(2,07)	0,04	3,36	3,70	0,28	4,55	5,31	0,27	4,21	5,05	0,26

Sumber : BPS, Data diolah

2.1.3.2 Fokus Infrastruktur Wilayah

Fokus infrastruktur wilayah menguraikan tentang kinerja indikator Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan; Ketaatan Terhadap RTRW; Luas Wilayah Produktif; Luas Wilayah Industri; Penginapan dan Hotel; Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; Jumlah RT Mendapatkan Air Minum; Rasio Elektrifikasi

2.1.3.3 Fokus Iklim Investasi

Fokus iklim investasi menguraikan tentang kinerja indikator terhadap kenyamanan dalam berinvestasi antara lain angka kriminalitas dan jumlah demonstrasi.

a) Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah terutama dalam meningkatkan pembangunan yang sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Peran aktif dan dukungan pemerintah serta masyarakat akan optimal jika angka kriminalitas dapat ditekan serendah-rendahnya. Dampak dari tingginya angka kriminalitas menyebabkan banyaknya kerugian yang ditimbulkan baik itu kerugian ekonomi/materil, fisik, moral dan psikologis. Upaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan perwujudan stabilitas pembangunan.

Tabel 2.39.
Angka Kriminalitas di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023

No	Kriminalitas	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Kasus	9.285	7.992	8.444	8.338	9.072	9.083	-0,12
2	Jumlah Penduduk	6.814.900	6.971.700	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.642.874	-0,42
3	Angka Kriminalitas (1) / (2)	0,0013	0,0011	0,0013	0,0012	0,0013	0,0013	0,68

Sumber: BPS, Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2020 – 2024

Pada umumnya jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Riau berfluktuatif namun cenderung menurun dari tahun 2018-2023 dengan rata-rata penurunan 0,12% per tahun. Dengan total tahanan dan narapidana pada tahun 2023 sebanyak 12.227 orang dan kapasitas ruang tahanan 2.740 unit maka terdapat over kapasitas sebesar 4.554 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat besarnya over kapasitas lapas, rutan, cabang rumah tahanan yang ada di Provinsi Riau.

2.1.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia menguraikan tentang kinerja indikator ketenagakerjaan dengan indikator rasio lulusan S1-S3 terhadap jumlah angkatan kerja dan rasio ketergantungan.

a) Ketenagakerjaan (Rasio lulusan S1-S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan Diploma, S1, S2 dan S3. Berdasarkan tabel dibawah ini, persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi per Agustus tahun 2023 penduduk bekerja tertinggi sebesar 28,08 persen untuk tingkat pendidikan angkatan kerja SMA. Untuk Angkatan kerja terendah sebesar 2,36 persen untuk Angkatan diploma II/III.

Tabel 2.40.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Riau, Agustus 2019 – Agustus 2023

No.	Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	≤ SD	33,32	32,99	32,31	34,08	30,18
2	SMP	19,29	19,78	18,86	17,69	18,05
3	SMA	23,38	23,53	23,79	25,86	28,08
4	SMK	10,26	10,07	11,02	9,13	10,38
5	DIPLOMA II/III	3,24	3,21	2,84	2,62	2,36
6	UNIVERSITAS	10,51	10,42	11,18	10,61	10,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

b) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif

lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Distribusi (%)
0 – 4	318.806	304.059	622.865	9,25
5 – 9	311.729	298.453	610.182	9,06
10 – 14	303.698	287.383	591.081	8,78
15 – 19	293.483	275.089	568.572	8,44
20 – 24	293.570	279.526	573.096	8,51
25 – 29	290.498	281.806	572.304	8,50
30 – 34	281.507	272.862	554.369	8,23
35 – 39	267.099	260.499	527.598	7,83
40 – 44	248.680	240.255	488.935	7,26
45 – 49	226.091	216.079	442.170	6,56
50 – 54	189.994	180.058	370.052	5,49
55 – 59	152.166	143.125	295.291	4,38
60 – 64	114.200	106.788	220.988	3,28
65-69	77.279	72.266	149.545	2,22
70-74	43.958	42.062	86.020	1,28
75+	29.741	32.520	62.261	0,92
Jumlah Penduduk	3.442.499	3.292.830	6.735.329	100,00
Usia Produktif	2.357.288	2.170.210	4.527.498	67,22
Usia Belum Produktif	934.233	874.644	1.808.877	26,86
Usia Tidak Produktif	150.978	124.012	274.990	4,08
Usia Non Produktif (BP+TP)	1.085.211	998.656	2.083.867	30,94
Persentase Usia Produktif	68,48	65,91	67,22	0,00
Persentase Usia Belum Produktif	27,14	26,56	26,86	0,00
Persentase Usia Tidak Produktif	4,39	3,77	4,08	0,00
Rasio Ketergantungan	46,04	46,02	46,03	0,00

Sumber: BPS Provinsi Riau, Tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk provinsi Riau tahun 2023 sebesar 46,03% artinya setiap 100 jiwa usia produktif menanggung 46,03 jiwa usia non produktif.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Provinsi Riau, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.1.4.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Tujuan pengukuran APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan APK tingkat pendidikan SD/MI Provinsi Riau seperti tabel berikut:

Tabel 2.42.
Angka Partisipasi Kasar SD/MI Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Kasar SD/MI					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
1	Kuantan Singingi	100,2	106,99	106,13	104,59	104,66	1,15
2	Indragiri Hulu	107,2	110,23	108,8	108,55	105,87	-0,29
3	Indragiri Hilir	78,03	108,87	106,78	104,98	103,48	8,62
4	Pelalawan	113,4	104,18	102,66	103,63	105,08	-1,81
5	Siak	101,6	106,88	106,8	106,57	106,36	1,18
6	Kampar	106,6	109,05	105,78	105,39	106,67	0,04
7	Rokan Hulu	106,5	103,62	102,13	102,25	105,41	-0,23

No	Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Kasar SD/MI					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
8	Bengkalis	105,7	108,27	109,09	107,93	105,66	0,01
9	Rokan Hilir	99,1	109,8	107,46	106,13	105,5	1,71
10	Kep. Meranti	87,6	101,44	104,12	103	102,5	4,22
11	Pekanbaru	106,9	109,74	106,92	105,24	106,07	-0,17
12	Dumai	110	104,08	105,87	107,48	106,43	-0,78
Riau		101,7	107,68	106,24	105,53	105,52	0,97

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan 2019-2023

Selama kurun waktu 2018/2019 sampai dengan 2022/2023 terjadi kenaikan APK SD/MI Provinsi Riau dari 101,7 naik menjadi 105,53 pada tahun 2022/2023 atau terjadi kenaikan rata-rata sebesar 0,97 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan anak belum cukup umur atau melebihi umur yang seharusnya yakni 7-12 tahun yang bersekolah SD dan MI. Walaupun demikian capaian APK SD/MI Provinsi Riau tahun 2022/2023 masih lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional sebesar 100,34. Jika dilihat sebarannya pada kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau capaian APK SD/MI pada tahun 2022/2023 telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.43.
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
1	Kuantan Singingi	67,3	92,95	96,61	96,92	95,1	2,47
2	Indragiri Hulu	77,08	98,87	97,09	100,3	104,63	3,13
3	Indragiri Hilir	54,49	96,31	97,11	96,27	96,47	7,87
4	Pelalawan	80,59	97,16	96,61	96,76	101,71	2,27
5	Siak	77,93	92,59	93,97	96,59	99,56	0,59
6	Kampar	76,92	95,37	96,68	98,45	106,43	1,21
7	Rokan Hulu	76,92	98,7	99,37	101,63	103,96	2,95
8	Bengkalis	75,55	96,69	97,32	97,52	100,11	1,69
9	Rokan Hilir	64,08	96,92	101,03	101,12	104,12	4,35
10	Kep. Meranti	54,83	90,22	90,81	91,73	95,91	5,97
11	Pekanbaru	86,39	100,45	99,92	102,77	107,43	1,33
12	Dumai	85,23	100,23	98,33	100,17	106,94	1,07
Riau		72,8	96,87	97,68	99,06	102,75	2,43

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan 2019-2023

Perkembangan APK SMP/MTs Provinsi Riau selama kurun waktu 2018/2019 sampai dengan 2022/2023 meningkat dari 72,8 persen tahun 2018/2019 menjadi 102,75 persen tahun 2012/2023 atau meningkat rata-rata sebesar 2,43 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah tingkat SMP/MTS di Provinsi Riau. Namun demikian dibandingkan dengan APK SMP/MTs Nasional capaian Provinsi Riau pada tahun 2022/2023 masih dibawah nasional yang capaian APK nya sebesar 104,51. Dilihat dari sebaran pada kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis dan Kepulauan Meranti) yang capaian APK pada tahun 2022/2023 masih dibawah capaian Provinsi Riau.

Perkembangan APK SMA/SMK/MA Provinsi Riau selama kurun waktu 2018/2019 sampai dengan 2022/2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK Provinsi Riau (%)

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA					Pertumbuhan / Tahun
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
1	Kuantan Singingi	86,21	94,62	96,58	96,58	85,41	0,07
2	Indragiri Hulu	79,67	91,74	94,53	94,53	94,67	4,58
3	Indragiri Hilir	47,15	66,68	69,67	69,67	70,86	11,90
4	Pelalawan	85,91	88,32	94,06	94,06	91,81	1,73
5	Siak	87,4	93,81	96,91	96,91	98,35	3,03
6	Kampar	62,12	75,53	82,92	82,92	85,41	8,59
7	Rokan Hulu	86,64	91,7	96,74	96,74	97,84	3,12
8	Bengkalis	79,43	87,73	88,35	88,35	86,78	2,34
9	Rokan Hilir	68,8	76,43	77,03	77,03	76,88	2,92
10	Kep. Meranti	69,23	86,59	76,83	76,83	76,48	3,34
11	Pekanbaru	94,13	98,78	107,82	107,82	108,57	3,70
12	Dumai	93,82	102,78	107,10	107,10	103,38	2,57
Riau		76,65	86,65	90,11	90,11	90,44	4,35

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan 2018-2023

Selama kurun waktu 2018/2019 hingga 2022/2023 terjadi peningkatan APK jenjang Sekolah Menengah sederajat Provinsi Riau dari 76,65 % menjadi 90,44 % dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,35 persen. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan partisipasi

sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Sederajat selama kurun waktu 5 tahun. Bila dilihat sebarannya pada masing-masing kabupaten/kota dalam Provinsi Riau terdapat 6 Kabupaten yang APK Sekolah Menengah Sederajat di bawah capaian Provinsi Riau yaitu : Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti.

b) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Perkembangan APM SD/MI Provinsi Riau tahun 2018/2019 sampai dengan 2022/2023 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.45.
Angka Partisipasi Murni SD/MI Provinsi Riau (%)

No	Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Murni SD/MI					Pertumbuhan /Tahun
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
1	Kuantan Singingi	89,54	95,71	95,28	94,44	94,56	1,42
2	Indragiri Hulu	94,1	98,26	96,01	96,35	94,56	0,16
3	Indragiri Hilir	68,91	95,29	95,3	94,02	92,88	8,93
4	Pelalawan	102,56	92,56	93,41	94,77	96,45	-1,40
5	Siak	90,94	95,7	95,93	95,88	95,85	1,35
6	Kampar	95,97	97,2	95,55	95,74	97,12	0,31
7	Rokan Hulu	95,55	91,47	92,23	92,43	95,64	0,06
8	Bengkalis	93,4	98,85	96,44	96,46	94,76	0,41
9	Rokan Hilir	87,78	99,12	95,75	94,98	95,18	2,23
10	Kep. Meranti	76,99	91,08	92,25	92,33	91,63	4,73
11	Pekanbaru	96,86	98,25	97,22	96,71	97,2	0,09
12	Dumai	99,14	94,77	95,56	97,23	96,85	-0,55
Riau		92,72	96,27	95,38	95,28	95,54	0,77

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2018-2022

APM SD/MI Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir 2018/2019 sampai dengan 2022/2023 menunjukkan peningkatan dari 92,72 menjadi 95,54 atau rata-rata pertumbuhan naik sebesar 0,77 persen. Pada tahun 2022/2023 APM SD/MI Provinsi Riau sebesar 95,54. Ini berarti bahwa 95,54 persen penduduk usia sekolah SD/MI dapat memanfaatkan fasilitas

pendidikan sekolah dasar. Capaian APM SD/MI Provinsi Riau jika dibandingkan dengan APM SD/MI nasional berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 91,81 pada Tahun Ajaran 2022/2023. Bila dicermati masih terdapat tujuh kabupaten, yaitu Kuansing, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti yang capaian APM SD/MI di bawah rata-rata Provinsi Riau. Keadaan ini menunjukkan penduduk usia Sekolah Dasar (7-12) di tujuh kabupaten tersebut masih banyak yang belum dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dasar dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Berbeda dengan APM SD/MI, adapun perkembangan APM SMP/MTs Provinsi Riau dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.46.
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Provinsi Riau (%)

No	Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs					Pertumbuhan / Tahun
		2018/ 2019	2019/ 2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
1	Kuantan Singingi	50,67	68,39	72,22	72,88	74,54	10,94
2	Indragiri Hulu	56,88	74,08	71,54	74,71	80,25	9,66
3	Indragiri Hilir	40,39	66,25	71,33	71,51	73,38	18,64
4	Pelalawan	61,37	72,25	73,04	74,79	80,57	7,24
5	Siak	59,54	71,41	71,33	72,88	77,91	7,22
6	Kampar	53,01	69,8	74,54	75,95	84,19	12,80
7	Rokan Hulu	57,94	71,33	74,67	77,54	80,94	9,01
8	Bengkalis	54,87	74,96	70,97	71,82	76	9,58
9	Rokan Hilir	46,85	74,45	75,06	73,5	77,8	15,88
10	Kep. Meranti	37,99	64,23	64,48	67,16	71,74	20,11
11	Pekanbaru	66,45	78,64	77,98	79,72	84,7	6,50
12	Dumai	65,76	78,75	74,63	75,87	83,74	6,64
Riau		54,82	72,63	73,53	74,8	79,62	10,47

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2019-2023

Bila dicermati tabel di atas APM SMP/MTs 2022/2023 Provinsi Riau sebesar 79,62 persen. Ini berarti, 79,62 persen penduduk usia sekolah SMP/MTs (13-15 tahun) dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan SMP/MTs, sementara 20,38 persen tidak dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan berbagai alasan. Pada tahun 2022/2023 APM SMP/MTs meningkat drastis menjadi 79,62 persen. Capaian APM SMP/MTs pada tahun 2022/2023 sebesar 79,62 persen di atas APM SMP/MTs secara nasional sebesar 79,35

persen. Selanjutnya perkembangan APM SMA/MA/SMK Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.47.
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK Provinsi Riau (%)

No	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK					Pertumbuhan /Tahun
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
1	Kuantan Singingi	72,49	63,44	73,01	74,52	70,78	-0,09
2	Indragiri Hulu	64,42	55,73	69,39	67,58	67,73	2,16
3	Indragiri Hilir	47,54	33,9	49,72	51,58	50,41	4,86
4	Pelalawan	65,67	63,51	66,53	66,22	67,98	0,91
5	Siak	71,82	65,67	73,05	72,41	72,82	0,59
6	Kampar	58,27	47,43	57,5	61,75	64,08	3,45
7	Rokan Hulu	70,10	64,02	65,41	69,67	72,59	1,05
8	Bengkalis	62,68	56,59	69,24	64,42	62,41	0,64
9	Rokan Hilir	54,32	48,78	59,85	54,51	54,57	0,92
10	Kep. Meranti	60,07	48,33	67,16	59,50	53,32	-0,59
11	Pekanbaru	76,51	71,57	80,67	80,35	81,77	1,91
12	Dumai	71,56	68,83	81,53	74,68	72,92	0,97
	Riau	63,8	56,36	66,90	66,02	66,43	1,59

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2018-2022

APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018/2019 sampai dengan tahun 2022/2023 capaian APM sebesar 63,8 persen menjadi 66,43 persen atau pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Kecuali pada tahun 2019/2020 terjadi penurunan terjadi sebesar 56,36 persen. Jika dilihat sebaran Sekolah Menengah Sederajat pada masing-masing kabupaten/kota terdapat 5 kabupaten/kota yang capaian APM dibawah rata-rata provinsi pada tahun 2022 antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kep. Meranti. Keadaan ini patut menjadi perhatian serius mengingat kewenangan pendidikan Sekolah Menengah Sederajat sudah menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun 2020-2022. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional, khususnya pada jenjang SD/ sederajat, SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Nilai tertinggi Angka

Pertisipasi sekolah berada pada jenjang umur 7-12 tahun atau tingkat SD/Sederajat. Angka partisipasi sekolah terendah berada pada jenjang umur 19-24 tahun atau tingkat pendidikan tinggi, yang mengindikasikan bahwa hanya 28,35-28,65 % yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Secara rinci angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48.
Angka Partisipasi Sekolah Riau dan Indonesia
Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2022 di Provinsi Riau

Angka Partisipasi Sekolah	Usia (Tahun)											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
RIAU	99,53	99,65	99,61	95,51	95,64	95,72	77,13	73,71	77,32	28,35	28,79	28,65
INDONESIA	99,26	99,19	99,10	95,74	95,99	95,92	72,72	73,09	73,15	25,56	26,01	25,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat pada tabel diatas, bahwa tahun 2022 kelompok umur SLTA (umur 16-18 tahun), APS lebih kecil dibandingkan usia SMP, yaitu sebesar 77,32 persen. Dengan kata lain terdapat sekitar 22,68 persen penduduk usia SLTA (16-18 tahun) yang seharusnya bersekolah di jenjang SLTA sudah berhenti bersekolah atau putus sekolah. Hal tersebut kemungkinan besar karena anak di usia tersebut sudah dapat bekerja membantu pendapatan rumah tangga utamanya di sektor yang tidak membutuhkan persyaratan pendidikan tinggi, menikah pada usia sekolah atau tidak adanya sekolah menengah yang dapat diakses

c) Sekolah Kondisi Bangunan Baik

Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting untuk kelancaran proses pendidikan. Bangunan gedung sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar, karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

Sebaran kondisi ruang kelas SMA/SMK di Provinsi Riau pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah, dimana sebagian besar ruang kelas SMA/SMK dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2018 persentase SMA/SMK bangunan baik sebesar 51,42 % dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan persentase bangunan baik SMA/SMK sebesar 79,43%. Pertumbuhan kondisi ruang kelas SMA/SMK dalam kondisi bangunan baik per tahun sebesar 24,50 persen dan pertumbuhan kondisi ruang kelas SMA/SMK baik untuk

seluruh jumlah sekolah SMA/SMK sebesar 5,53 persen. Sedangkan persentase pertumbuhan kondisi ruang kelas SMA/SMK dalam kondisi baik untuk bangunan sebesar 17,83 persen.

Adapun besaran persentase bangunan ruang kelas baik pada tingkat SMA/SMK selama kurun tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.49.
Kondisi Ruang Kelas SMA/SMK dalam Kondisi Baik
di Provinsi Riau 2018-2022 (%)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan/ Tahun
1	SMA/SMK						
1.1.	Sekolah pendidikan SMA /SMK kondisi bangunan baik	4.563	4.659	3.345	5.975	8.693	24,50
1.2.	Jumlah seluruh sekolah SMA/SMK	8.874	8.877	9.669	10.909	10.944	5,53
1.3.	Persentase SMA/SMK bangunan baik	51,42	52,48	34,60	54,77	79,43	17,83

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023

d) Revitalisasi SMK

Ingpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia mengamanatkan bahwa ruang lingkup Revitalisasi SMK dalam bentuk bantuan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan, pemagangan di industri dan penyelarasan kurikulum untuk disesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri disamping juga diperlukan penataan kelembagaan meliputi program kejuruan yang dibuka dan penentuan lokasi.

Tabel 2.50.
Revitalisasi SMK di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	SMK		Siswa SMK	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Kuantan Singingi	12	1	4600	286
2	Indragiri Hulu	12	5	6729	1054
3	Indragiri Hilir	8	11	3594	1324
4	Pelalawan	8	10	5126	1247
5	Siak	12	14	4604	2163

No	Kabupaten / Kota	SMK		Siswa SMK	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
6	Kampar	13	18	5741	2081
7	Rokan Hulu	23	16	8054	3176
8	Bengkalis	15	11	6026	1495
9	Rokan Hilir	6	21	1779	4847
10	Kepulauan Meranti	2	5	869	662
11	Pekanbaru	10	52	13116	17620
12	Dumai	7	10	6151	1691
Jumlah		128	175	66.398	37.646
Total		303		104.035	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara legalitas belum terdapat regulasi khusus terkait pendidikan vokasi di Provinsi Riau, namun telah disusun dokumen Peta Jalan (*Road Map*) Pengembangan SMK yang memberi arah pengembangan SMK di Provinsi Riau Tahun 2020-2027.

.Revitalisasi SMK di Provinsi Riau dalam bentuk bantuan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan, pemagangan di industri dan penyelarasan kurikulum untuk disesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri serta diberikan pendampingan oleh perguruan tinggi vokasi, hal ini sesuai dengan Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Selanjutnya sebagai upaya penguatan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi sedangkan di daerah telah diterbitkan pula Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan Dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja

e) Rasio Guru dengan Murid

Secara kewilayahan, rasio guru dan murid pendidikan menengah berkisar antara 6,89 poin sampai dengan 10,00 poin. Dimana rasio terendah pada Kota Dumai dan yang tertinggi pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada Kabupaten Kep. Meranti terdapat jumlah guru yang terkecil sebesar 6.217 orang guru dengan rasio guru dan murid juga termasuk yang terbesar yakni sebesar 10,00 poin.

Tabel 2.51.
Rasio Guru dengan Murid Sekolah Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Sekolah Menengah		
		Jumlah Guru (SMA dan SMK)	Jumlah Murid (SMA dan SMK)	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Menengah
1	Kuantan Singingi	1.206	13.220	9,12
2	Indragiri Hulu	1.317	17.791	7,40
3	Indragiri Hilir	1.427	19.007	7,51
4	Pelalawan	1.184	16.130	7,34
5	Siak	1.543	20.838	7,40
6	Kampar	2.267	29.107	8,13
7	Rokan Hulu	1.800	23.104	7,79
8	Bengkalis	2.195	28.021	7,83
9	Rokan Hilir	1.922	27.124	7,09
10	Kep. Meranti	622	6.217	10,00
11	Pekanbaru	3.998	55.967	7,14
12	Dumai	978	14.199	6,89
	Provinsi Riau	20.559	270.725	7,59

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganji/Ministry of Educations and Culture, Odd Semester Data

f) Guru Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Terkait dengan kualifikasi dan sertifikasi guru yang menggambarkan kualitas tenaga kependidikan disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 2.52.
Persentase Guru SMA/SMK/SLB yang Berkualifikasi dan Tersertifikasi

Kualifikasi/Sertifikasi	SMA	SMK	SLB
Kualifikasi $\geq$ D4/S1	98,1	96,2	91,0
Sertifikasi $\geq$ D4/S1	39,7	29,7	24,9

g) Sekolah Luar Biasa

Pendidikan Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Perkembangan sekolah luar biasa di Provinsi Riau dari tahun 2016 – 2020, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53.
Perkembangan Sekolah Luar Biasa di
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah SLB	47	47	47	47	0,00
2	Jumlah Siswa SLB	3.375	3.301	3.380	3.435	0,61
3	Jumlah Guru SLB	598	618	542	572	-1,14
4	Jumlah Ruang Kelas SLB	624	663	673	673	2,59
5	Jumlah Rombel SLB	683	611	755	755	4,34

Sumber : Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB)

Perkembangan jumlah sekolah luar biasa di Provinsi Riau tidak mengalami peningkatan dari 47 sekolah tahun 2019 masih sama 47 sekolah tahun 2022. Tetapi dengan penambahan jumlah siswa, guru, ruang kelas dan rombongan belajar, dimana jumlah siswa tahun 2019 sebanyak 3.375 siswa menjadi 3.435 siswa dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,61 persen. Sedangkan guru SLB tahun 2019 sebanyak 598 guru berkurang menjadi 572 guru pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -1,14 persen. Terhadap jumlah ruang kelas dan jumlah rombongan belajar juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 2,59 persen dan 4,34 persen.

2.1.4.1.1.1. Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan

Berdasarkan pasal 3 Permendagri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk daerah Provinsi terdiri atas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Indikator SPM Pendidikan Menengah adalah jumlah warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah, rata- rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional, sedangkan untuk pendidikan khusus adalah jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus dan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional. Sesuai surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023 tentang indikator kinerja urusan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota agar dapat digunakan sebagai acuan perencanaan

di daerah mendorong perencanaan yang lebih berkualitas dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di Indonesia. Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54.
Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan
Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023

No	Kelompok Indikator	Indikator	Capaian		
			2021	2022	2023
I	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun				
1.		Jumlah anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	77,81	77,32	78,15
II	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas				
2.		Jumlah anak usia 4-18 tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	23,98	20,35	56,76
III	Kemampuan Literasi				
3.		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	62,84	63,27	69,23
4.		Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	60,71	60,41	65,94
5.		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	57,63	57,48	64,80
6.		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,68	69,58	65,96
7.		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	57,43	57,09	69,45
IV	Kemampuan Numerasi				
8.		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	50,47	52,89	58,64

No	Kelompok Indikator	Indikator	Capaian		
			2021	2022	2023
9.		Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	49,64	50,94	55,81
10.		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	58,30	54,86	59,56
11.		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	55,38	60,26	65,75
12.		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	48,15	52,70	58,90
V	Penyerapan Lulusan SMK				
13.		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	49,55	88,26	87,89
VI	Kepuasan Dunia Kerja pada Budaya Kerja Lulusan SMK				
14.		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	76,90	76,90	80,98
VII	Iklim Keamanan				
15.		Indeks Iklim Keamanan SMA	75,27	69,26	73,46
16.		Indeks Iklim Keamanan SMK	72,54	67,00	70,50
17.		Indeks Iklim Keamanan SDLB	79,84	74,88	71,97
18.		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	80,48	74,22	74,03
19.		Indeks Iklim Keamanan SMALB	80,85	69,79	70,74
VIII	Iklim Kebhinekaan				
20.		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	61,44	67,53	74,10
21.		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	60,42	65,60	71,51
22.		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	60,20	69,15	65,82
23.		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	60,70	65,58	66,10
24.		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	60,20	65,03	64,80

No	Kelompok Indikator	Indikator	Capaian		
			2021	2022	2023
IX	Iklm Inklusivitas				
25.		Indeks Inklusivitas SMA	53,28	56,28	60,15
26.		Indeks Inklusivitas SMK	52,96	55,25	57,14
27.		Indeks Inklusivitas SDLB	55,29	59,13	58,64
28.		Indeks Inklusivitas SMPLB	60,00	60,82	67,67
29.		Indeks Inklusivitas SMALB	58,43	59,56	60,04

Sumber: Kemendikbud Tahun 2024

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum urusan Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023 rata-rata meningkat dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing capaian indikatornya. Untuk capaian 2021 dan 2022 sesuai dengan surat Kemendikbudristek terdapat penyesuaian (*adjusted*) perhitungan capaian masing masing indikator sehingga terjadi penyesuaian kembali perhitungan capaian.

2.1.4.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Secara umum pembangunan kesehatan telah mengalami terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Perkembangan umur harapan hidup penduduk Provinsi Riau terus mengalami kenaikan mengikuti tren kenaikan UHH nasional, dari 71,19 tahun pada tahun 2018 menjadi 71,95 tahun pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,293% per tahun. Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau tahun 2018-2023, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55.
Umur Harapan Hidup di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kuantan Singingi	68,17	68,44	68,55	68,60	68,87	69.13	0,280
2	Indragiri Hulu	69,97	70,20	70,25	70,26	70,48	70.69	0,205
3	Indragiri Hilir	67,32	67,66	67,85	67,98	68,31	68.62	0,383
4	Pelalawan	70,74	71,03	71,16	71,24	71,53	72.00	0,354
5	Siak	70,79	71,03	71,11	71,13	71,37	71.64	0,239
6	Kampar	70,35	70,64	70,76	70,83	71,12	71.42	0,302
7	Rokan Hulu	69,55	69,89	70,06	70,18	70,51	70.84	0,368
8	Bengkalis	70,85	71,11	71,2	71,24	71,50	71.79	0,264
9	Rokan Hilir	69,87	70,17	70,3	70,39	70,69	70.99	0,319
10	Kepulauan Meranti	67,21	67,53	67,68	67,78	68,09	68.41	0,355
11	Pekanbaru	71,94	72,22	72,34	72,41	72,70	73.02	0,299
12	Dumai	70,55	70,82	70,93	70,98	71,25	71.67	0,316
	Riau	71,19	71,48	71,6	71,67	71,95	72.24	0,293

Sumber: BPS Provinsi Riau

Capaian UHH kabupaten/kota tahun 2023, hanya Kota Pekanbaru yang memiliki UHH diatas UHH Provinsi Riau, yakni sebesar 73,02. Hal ini dapat dilihat banyaknya pelayanan kesehatan yang terpusat di Kota Pekanbaru sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Selanjutnya 11 kabupaten/kota lainnya perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan UHH.

b. Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah meningkatkan pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan itu pembangunan bidang kesehatan menjadi prioritas baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, artinya wajib diselenggarakan oleh provinsi, kabupaten/kota dan harus menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang indikatornya adalah semakin baiknya rasio antara sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk. Perkembangan

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan rasio pelayanan kesehatan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.56.
Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan
di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	6.814.909	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.642.874
2	Jumlah Balita (jiwa)	739.071	743.920	748.154	640.238	640.001	641.043
3	Jumlah Puskesmas (Unit)	216	228	228	234	238	239
4	Jumlah Puskesmas Pembantu (Unit)	999	981	981	1000	1069	1069
5	Jumlah Rumah Sakit (Unit)	69	74	74	75	76	79
6	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit (Unit)	5.778	6.790	6.847	7.960	8.144	9205
7	Bed Occupation Rate / BOR (%)	54	46	44	29	51	34,4
8	Rasio Puskesmas (per 30.000 Penduduk)	0,95	0,98	0,96	0,99	0,99	1,08
9	Rasio Tempat Tidur RS (per 1.000 Penduduk)	0,94	0,97	0,96	1,13	1,15	1,39

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024

Bila dicermati data tabel diatas, prasarana kesehatan dalam kurun waktu pada tahun 2018-2023 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, jumlah puskesmas pembantu, jumlah rumah sakit serta pemanfaatan tempat tidur/BOR.

c. Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit). Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas dan rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi puskesmas dan rumah sakit diharapkan dapat membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan melalui perbaikan tata kelola:

1. Manajemen secara institusi,
2. Manajemen Program,
3. Manajemen Risiko,
4. Manajemen mutu. Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan rumah sakit secara berkala setiap 4 (empat) tahun.

Persentase puskesmas dan rumah sakit terakreditasi di Provinsi Riau Tahun 2023, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

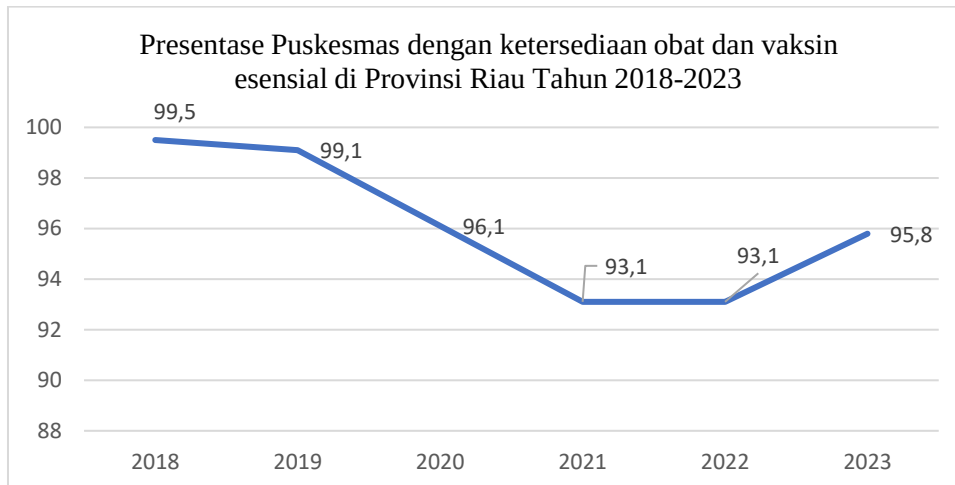
Tabel 2.57.
Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi di
Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit			Puskesmas		
		Jumlah Rumah Sakit	Terakreditasi	%	Jumlah Puskesmas	Terakreditasi	%
1	Kuantan Singingi	2	2	100,0	25	19	76
2	Indragiri Hulu	4	4	100,0	20	18	90
3	Indragiri Hilir	4	4	100,0	30	26	87
4	Pelalawan	4	4	100,0	14	14	100
5	Siak	2	2	100,0	15	15	100
6	Kampar	8	8	100,0	31	31	100
7	Rokan Hulu	6	5	83,3	23	21	91
8	Bengkalis	6	6	100,0	19	18	95
9	Rokan Hilir	6	6	100,0	21	20	95
10	Kep. Meranti	1	1	100,0	10	9	90
11	Pekanbaru	31	29	93,5	21	21	100
12	Dumai	5	4	80,0	10	10	100
Jumlah		79	75	82,3	239	222	93

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024

d. Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial

Pemantauan ketersediaan obat di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat pemantauan sudah mencapai 95 persen, capaian tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



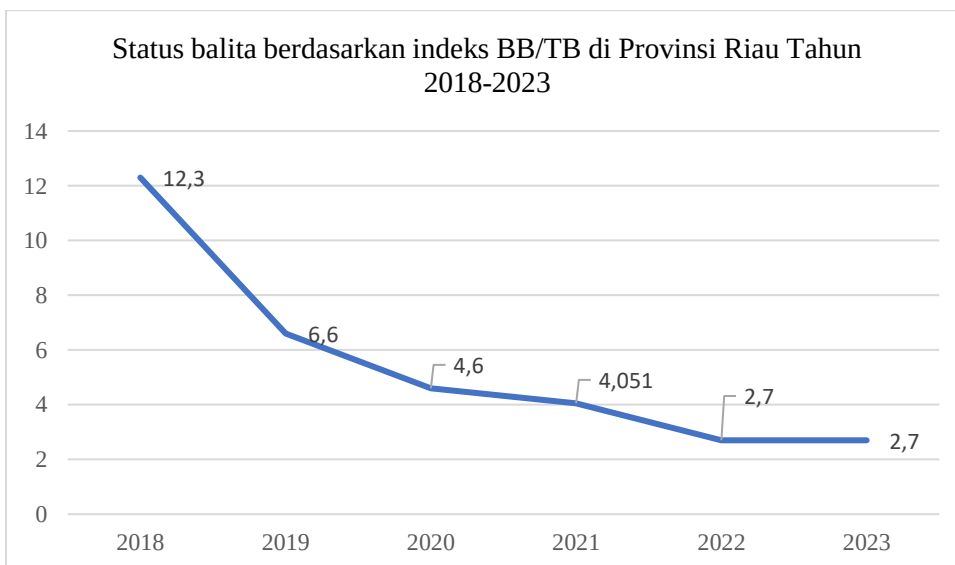
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024

Gambar 2.37.

Presentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

e. Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang (Wasting)

Persentase balita wasting adalah gambaran balita dengan pengukuran berat badan dibanding dengan tinggi badan (indeks BB/TB) dan merupakan gabungan status gizi buruk dan gizi kurang. Status balita gizi wasting berdasarkan indeks BB/TB di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 menunjukkan penurunan di tahun 2022 dan 2023 sebesar 2,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024

Gambar 2.38.

Status balita berdasarkan indeks BB/TB di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Persentase status gizi (wasting) di Kabupaten/kota terlihat bahwa Kabupaten Siak dan Bengkalis menunjukkan persentase wasting cukup tinggi di tahun 2023. Ke 2 (dua) kabupaten ini masih berada di atas target nasional dan termasuk kategori sedang (menurut WHO (5 - <10%). Masalah wasting merupakan masalah gizi akut yang apabila tidak ditangani dengan tepat bisa mengakibatkan peningkatan kasus stunting di Provinsi Riau. Status balita wasting di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.58.
Status Balita Wasting berdasarkan BB/TB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/Kota	2022	2023
1	Kuantan Singingi	4,7	2,98
2	Indragiri Hulu	3,8	4,03
3	Indragiri Hilir	2,9	2.99
4	Pelalawan	2,1	1.21
5	Siak	6,3	5.58
6	Kampar	1,2	2.00
7	Rokan Hulu	2,4	3.61
8	Bengkalis	10,1	6.95
9	Rokan Hilir	2,2	1.92
10	Kepulauan Meranti	0,1	4.18
11	Pekanbaru	0,8	1.33
12	Dumai	0,8	0.56
	Riau	2,7	2,73

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024

f. Prevalensi Balita Stunting (TB/U)

Prevalensi stunting di Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebesar 13,6 %. Penurunan prevalensi balita stunting tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan penurunan stunting tertinggi kabupaten/kota dari tahun 2023 adalah Kuntan Singingi dengan nilai prevalensi balita 23 sedangkan yang terendah oleh Kabupaten Kampar 7,6. Secara rinci perkembangan prevalensi balita stunting per kabupaten/kota se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

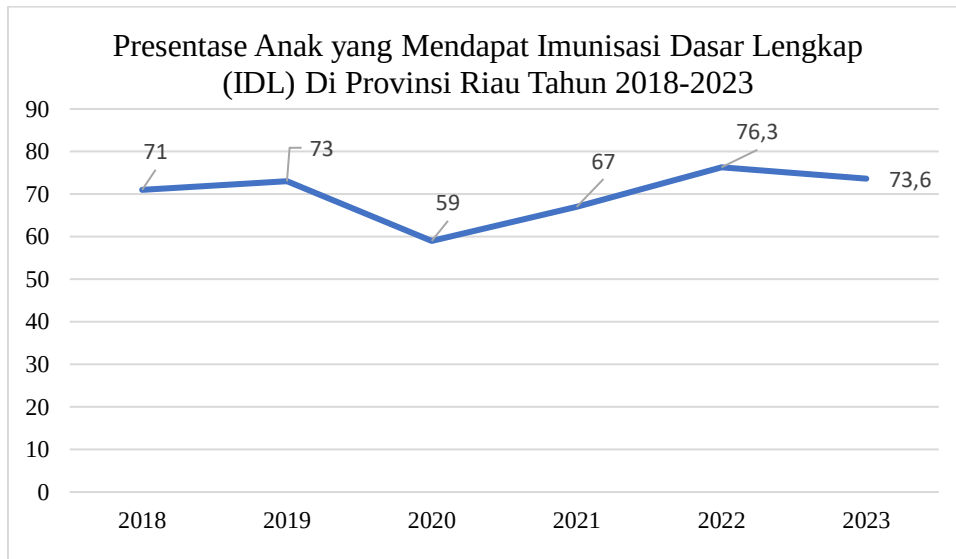
Tabel 2.59.
Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2021	2022	2023
	Provinsi Riau	27,4	23,95	22,3	17	13,6
1	Kuantan Singingi	24,6	29,55	22,4	17,8	23
2	Indragiri Hulu	32,2	29,67	23,6	16,7	12,7
3	Indragiri Hilir	32,2	27,43	28,4	28,5	18,8
4	Pelalawan	25,5	22,97	21,2	11,2	10,1
5	Siak	21	27,43	19	22	10,4
6	Kampar	32,1	23,07	25,7	14,5	7,6
7	Rokan Hulu	27,3	24,37	25,8	22	15,9
8	Bengkalis	32,3	21,07	21,9	8,4	17,9
9	Rokan Hilir	38,1	28,87	29,7	14,7	16,6
10	Kepulauan Meranti	29,9	25,1	23,3	17,5	19,6
11	Kota Pekanbaru	16	18,58	11,4	16,8	8,7
12	Kota Dumai	17,3	11,59	23	12,8	14,9

Sumber: Tahun 2013-2018 RISKESDAS, Tahun 2019-2023 : SSGBI,
Catatan : 2020 tidak ada dilakukan SSGBI (Covid-19)

g. Persentase Anak mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan indikator dalam program imunisasi, dimana setiap bayi usia 0-11 bulan sudah mendapatkan imunisasi hepatitis 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Bib 3 kali, Polio 4 kali, IPV 1 kali dan Campak/Measles Rubella (MR) satu kali. Persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) tahun 2023 sebesar 73,6% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 (76,3%). Persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) di Provinsi Riau Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

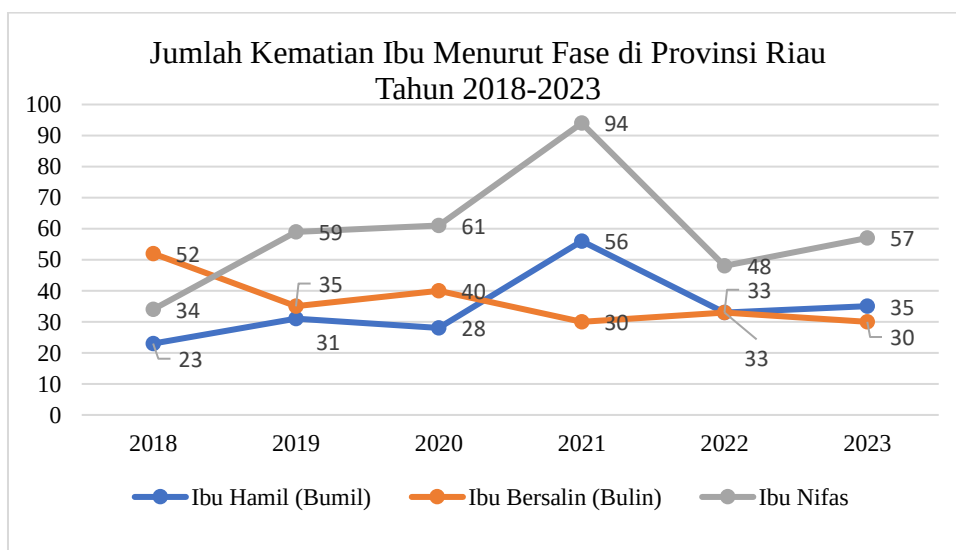


Gambar 2.39.

**Presentase Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
Di Provinsi Riau Tahun 2021-2023**

h. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu adalah jumlah kematian ibu yang terjadi pada saat ibu hamil, ibu bersalin atau pada saat ibu nifas (sampai dengan 42 hari pasca persalinan) diluar kejadian karena kecelakaan. Jumlah kematian ibu pada tahun 2023 mencapai 122 orang, dimana jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kasus kematian tahun 2022 yaitu 114 orang. Untuk Jumlah Kematian Ibu Menurut Fase di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

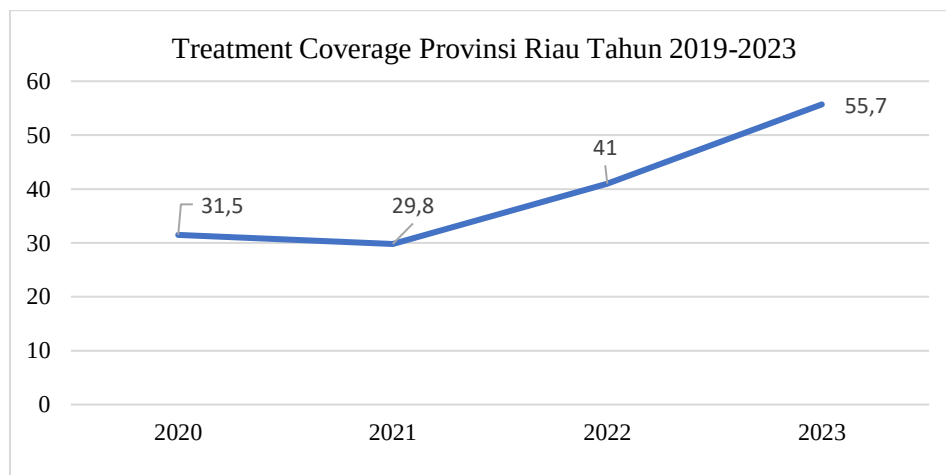


Gambar 2.40.

Jumlah Kematian Ibu Menurut Fase di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

i. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage/TC*)

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* dan merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Treatment Coverage (TC) adalah jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TB pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. TC menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program. Capaian Treatment Coverage di Provinsi meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2023, namun belum mencapai target nasional yaitu sebesar 80%, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.41.
Treatment Coverage Provinsi Riau Tahun 2019-2023

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Sesuai Standar

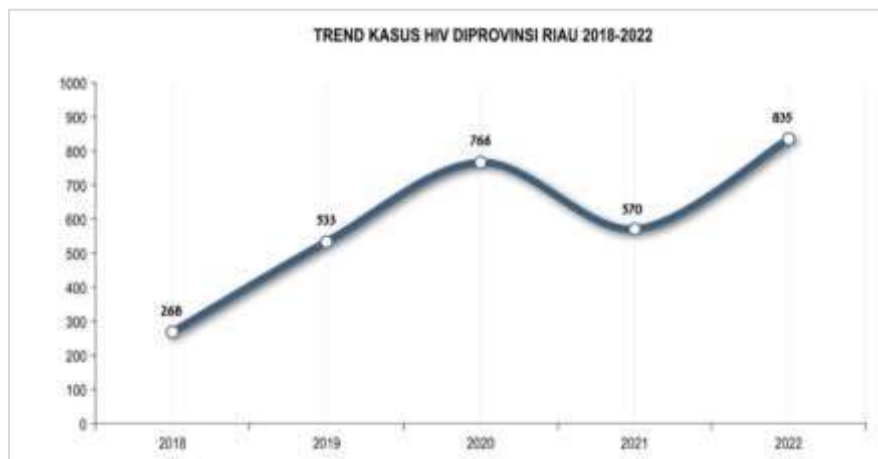
Tuberkulosis saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut menyebar dari penderita TBC melalui udara. Kuman TBC ini biasanya menyerang organ paru bisa juga diluar paru (extra paru). Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium*

tuberculosis, sekitar 89% TBC diderita oleh orang dewasa, dan 11% diderita oleh anak-anak.

Treatment coverage adalah penjumlahan dari semua kasus tuberculosis ditambahkan tuberculosis pada anak dibagi dengan perkiraan insiden rate yg ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk Provinsi Riau sebesar 31.899 jiwa. Maka untuk tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 41% dari tahun sebelumnya 29,8%. Namun demikian belum mencapai target nasional sebesar 80%.

k. Persentase Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Penemuan kasus HIV di Provinsi Riau terus meningkat setiap tahun, hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah:



Gambar 2.42.
Trend Kasus HIV di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

2.1.4.1.2.1. Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan

Dasar hukum Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang Kesehatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu

100%. Secara rinci capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60.
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan
Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022

NO	JENIS SPM KESEHATAN	INDIKATOR	CAPAIAN	
			2021	2022
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (Provinsi)	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (Provinsi)	100	55,75
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (Provinsi)	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (Provinsi)	100	98,20

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum bidang Kesehatan Provinsi Riau jenis SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (Provinsi) pada Tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Riau masih kesulitan dalam menetapkan data sasaran atau data *baseline* indikator SPM (Bencana/Krisis Kesehatan) Provinsi. Oleh karena itu diperlukan adanya pemetaan terjadinya bencana/krisis yang biasa terjadi di Provinsi Riau selain urusan kesehatan (seperti banjir, asap akibat kebakaran hutan) yang terkait dengan Perangkat Daerah lainnya (BPBD Provinsi Riau) serta regulasi surat edaran dari Gubernur tentang prediksi jumlah penduduk yang akan digunakan sebagai perhitungan data sasaran dengan satu data kependudukan guna keseragaman di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Riau.

2.1.4.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Total panjang jalan di Provinsi Riau sepanjang 24.614,13 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut :

Kewenangan Provinsi sepanjang 2.693,87 km (Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 7464/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023);

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang 20.477,69 km;
2. Kewenangan Nasional sepanjang 1.336,63 km.

Tabel 2.61.
Panjang Jalan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan
Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tahun 2023			
	Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
Dumai	72,45	122,04	1.198,24	1.410,81
Kepulauan Meranti	0	156,30	929,42	1.060,66
Rokan Hilir	193,78	226,12	1.961,53	2.373,29
Bengkalis	103,16	157,95	1.257,11	1.442,87
Siak	128,13	110,34	2.880,19	3.163,32
Kuantan Singingi	123,42	137,44	1.989,85	2.302,97
Indragiri Hulu	193,33	241,63	1.593,61	2.126,32
Indragiri Hilir	163,32	373,81	1.190,59	1.634,06
Pelalawan	114,33	218,17	1.985,80	2,333,72
Kampar	161,26	349,84	2.073,10	2.633,32
Rokan Hulu	0	438,66	2.140,36	2.643,94
Pekanbaru	65,25	161,57	1.277,90	1.488,86
Jumlah	1.336,63	2.693,87	20.477,69	24.614,13

Data belum termasuk jalan tol
Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Secara umum kondisi kemantapan jalan kewenangan Provinsi Riau dalam keadaan mantap, dapat dilihat pada Tabel dibawah. Tingkat kemantapan Jalan Provinsi tahun 2022 baru mencapai 64,94% (berdasarkan data IRMS 2022). Secara rinci ruas jalan kewenangan Provinsi Riau tahun 2022, jalan Kabupaten Rokan Hulu memiliki ruas jalan terpanjang

kewenangan provinsi dengan panjang jalan 438,66 km. Adapun kabupaten yang memiliki Panjang ruas jalan kecil, yaitu Kabupaten Siak sepanjang 110,34 km.

Tabel 2.62.

**Rekap Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Perkabupaten/Kota
di Provinsi Riau Berdasarkan Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2022**

Kabupaten/Kota	Tahun 2022					
	Panjang Ruas	Lebar Ruas	Mantap		Tidak Mantap	
	km	m	%	km	%	km
Dumai	140,12	7,00	55,34	77,54	44,66	62,58
Kepulauan Meranti	131,24	6,00	39,68	52,08	60,32	79,16
Rokan Hilir	217,98	6,38	51,78	112,86	48,22	105,12
Bengkalis	82,60	6,00	100	82,60	0	0
Siak	155,00	6,80	96,50	149,57	3,50	5,43
Kuantan Singingi	189,70	5,13	69,17	131,22	30,83	58,48
Indragiri Hulu	339,38	6,10	190,19	190,19	46,53	157,92
Indragiri Hilir	280,15	6,36	32,48	90,99	67,52	189,16
Pelalawan	233,59	7,00	29,37	68,60	70,63	164,99
Kampar	398,96	5,67	86,00	343,12	14,00	55,84
Rokan Hulu	503,58	5,42	80,94	407,61	19,06	95,97
Pekanbaru	127,51	7,80	87,66	111,78	12,34	15,73
Jumlah			64,94	1818,153	35,06	981,66

Sumber: Bidang Bina Marga Survei IRMS 2022 Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Adapun kondisi rusak ringan dan rusak berat pada tahun 2022 sebesar 2,16% dan 32,90%. Kondisi jalan rusak yang mencapai 18,61% ini memerlukan perhatian serius, mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan jalan kewenangan Provinsi Riau dapat dibagi menjadi dua yaitu kondisi jalan dan panjang tiap jenis permukaan jalan. Dimana panjang tiap jenis permukaan jalan terdiri atas aspal, beton, kerikil dan tanah atau belum tembus. Sedangkan kondisi jalan terdiri atas kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat.

Perbaikan dan pembangunan jalan dilaksanakan setiap tahunnya sehingga kondisi panjang jalan daerah sering terjadi perubahan.

Tabel 2.63.

Rekap Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Per kabupaten/Kota di Provinsi Riau Berdasarkan Panjang Tiap Jenis Permukaan Jalan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas	Aspal (AC, HRS, ATB)		Perkerasan Beton		Kerikil/ Telford/Urpil		Tanah/ Belum Tembus	
	km	%	(Km)	%	km	%	km	%	km
Rokan Hilir	217,98	72,93	33,46	46,84	21,49	62,44	28,64	35,77	16,41
Kota Dumai	140,12	20,14	14,37	57,67	41,16	11,90	8,49	50,41	35,98
Bengkalis	82,60	57,06	69,08	25,54	30,92	0	0	0	0
Kepulauan Meranti	131,24	16,89	12,87	41,28	31,45	54,26	41,34	17,52	40,82
Siak	55,00	116,02	74,85	33,45	21,58	5,53	3,57	0	0
Pelalawan	233,59	68,90	29,50	24,32	10,41	63,89	27,35	76,48	32,74
Indragiri Hilir	280,15	43,19	15,42	95,81	34,20	56,47	20,16	84,69	30,23
Indragiri Hulu	339,38	171,96	50,67	38,91	11,47	98,75	29,10	29,76	8,77
Kuantan Singingi	89,70	92,09	48,54	43,00	22,67	45,20	23,83	9,41	4,96
Pekanbaru	127,51	101,66	79,73	3,06	2,40	0	0	0	0
Kampar	398,96	306,839	76,80	43,43	10,89	34,20	8,57	14,94	3,74
Rokan Hulu	503,58	349,16	69,34	81,35	16,15	72,37	14,37	0,70	0,14

Sumber: Bidang Bina Marga Survei IRMS 2022 Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Dapat kita lihat jenis permukaan jalan beraspal tertinggi adalah Kota Pekanbaru yaitu sebesar 79,73%. Sama halnya dengan 2 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak yaitu sebesar 76,80 % dan 74,85 % . Kondisi berbeda pada Kabupaten Indragiri Hilir dimana kondisi permukaan jalan tanah atau belum tembus tertinggi yaitu berkisar 84,69% dan diikuti Kabupaten Pelalawan yaitu 76,48% dan Kota Dumai yaitu 50,49%.

Tabel 2.64.
Rekap Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Per kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Berdasarkan Panjang Tiap Kondisi Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km
Rokan Hilir	217,98	40,11	87,43	11,46	25,43	2,78	5,88	45,53	99,24
Kota Dumai	140,12	51,58	72,28	3,73	5,26	0,19	0,27	44,47	62,31
Bengkalis	82,60	77,24	63,80	22,76	18,80	0	0	0	0
Kepulauan Meranti	131,24	12,91	16,95	26,77	35,14	1,87	2,46	58,44	76,70
Siak	55,00	78,79	122,12	17,71	27,45	0	0	3,50	5,43
Pelalawan	233,59	28,13	65,70	1,24	2,90	0,13	0,30	70,50	164,69
Indragiri Hilir	280,15	27,27	76,41	5,20	14,58	3,91	10,97	63,61	178,20
Indragiri Hulu	339,38	39,52	134,12	16,52	56,07	3,05	10,34	40,91	138,86
Kuantan Singingi	89,70	54,39	14,78	14,78	28,05	1,93	3,67	28,89	54,81
Pekanbaru	127,51	75,70	96,53	11,96	15,25	0	0	12,34	15,73
Kampar	398,96	64,93	259,03	21,08	84,09	1,50	6,00	12,49	49,84
Rokan Hulu	503,58	69,55	350,26	11,39	57,35	4,11	20,70	14,95	75,27

Sumber: Bidang Bina Marga Survei IRMS 2022 Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Dapat kita lihat pada tabel diatas kondisi jalan baik tertinggi adalah Kabupaten Siak yaitu sebesar 78,79%. Sama halnya dengan 2 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru yaitu sebesar 77,28% dan 75,70% . Kondisi berbeda pada Kabupaten Pelalawan dimana kondisi jalan rusak berat tertinggi yaitu berkisar 70,50% dan diikuti Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 63,61% dan Kabupaten Kepulauan Meranti 58,44%.

Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2022, Panjang Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.65.
Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022

Jumlah Jembatan	Jumlah Ruas	Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
891	899	615	168	107	1

Sumber: Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Pengukuran jaringan jalan dapat dilakukan melalui Indeks Aksesibilitas yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan aksesibilitas itu juga untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu lokasi dimana yang menjadi ukuran adalah jarak tempuh, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia.

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana jalan atau indeks aksesibilitas, dapat dianalisis melalui rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (km²). Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula daerah yang dilayani. Selain tingkat provinsi, indeks aksesibilitas ini juga dapat dilihat pada tingkat kabupaten/kota. Berikut besaran parameter kinerja SPM untuk indeks aksesibilitas jalan.

Tabel 2.66.
Besaran Parameter Kinerja SPM untuk Indeks Aksesibilitas

No	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		Nilai Indeks Aksesibilitas
	Kategori	Besaran	
1	Sangat Tinggi	> 5.000	> 5,00
2	Tinggi	> 1.000	> 1,50
3	Sedang	> 500	> 0,50
4	Rendah	> 100	> 0,15
5	Sangat Rendah	> 100	> 0,05

Sumber: Kepmenkimpraswil No. 534/KPTS/M/2001

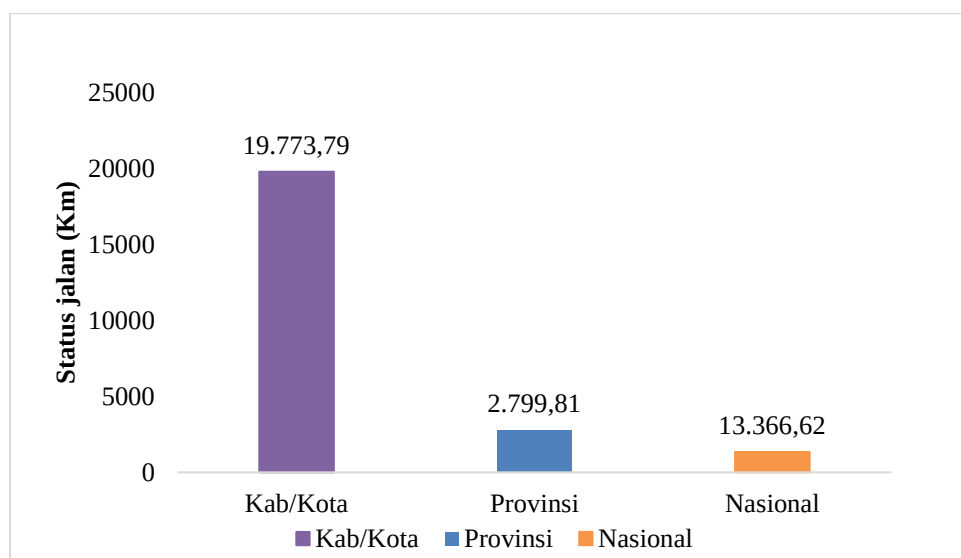
Tabel 2.67.
Indeks Aksesibilitas Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten /Kota	Status Jalan (km)				Luas Wilayah (km ²)	Rasio Panjang Jalan thp Luas Wilayah	Indek Aksesibilitas
		Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Jumlah			
1	Kuantan Singingi	1.989,85	189,70	123,42	2.302,97	5.272,74	0,44	Rendah
2	Indragiri Hulu	1.737,05	339,38	155,53	2.231,96	7.978,17	0,28	Rendah
3	Indragiri Hilir	1.190,59	378,27	163,32	1.732,18	13.465,89	0,13	Sangat Rendah
4	Pelalawan	1.138,47	135,47	127,73	1.401,67	13.020,19	0,11	Sangat Rendah
5	Siak	2.880,19	155,00	152,53	3.187,72	7.843,97	0,41	Rendah
6	Kampar	2.073,10	383,86	179,44	2.636,40	10.897,22	0,24	Rendah
7	Rokan Hulu	2.140,37	503,58	-	2.643,95	7.527,43	0,35	Rendah
8	Bengkalis	1.257,11	82,60	59,06	1.398,77	8.520,44	0,16	Rendah

No	Kabupaten /Kota	Status Jalan (km)				Luas Wilayah (km ²)	Rasio Panjang Jalan thp Luas Wilayah	Indek Aksesibilitas
		Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Jumlah			
9	Rokan Hilir	1.961,53	217,98	193,78	2.373,29	9.154,72	0,26	Rendah
10	Kep. Meranti	929,41	131,24	-	1.060,65	3.636,79	0,29	Rendah
11	Pekanbaru	1.277,90	142,61	65,25	1.485,76	633,40	2,35	Tinggi
12	Dumai	1.198,23	140,12	116,56	1.454,91	2.177,80	0,67	Sedang
Riau		19.773,79	2.799,81	1.336,62	23.910,22	90.128,76	0,47	Rendah

Sumber: Informasi Statistik Infrastruktur 2022

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau



Gambar 2.43.
Proporsi Status Jalan di Provinsi Riau Tahun 2022

Jika ditinjau dari aspek rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dapat diketahui bahwa indeks aksesibilitas Provinsi Riau masih dalam kategori rendah. Indeks aksesibilitas tinggi hanya dimiliki oleh Kota Pekanbaru, dan indeks aksesibilitas sedang terdapat di Kota Dumai. Sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti memiliki indeks aksesibilitas rendah. Aksesibilitas sangat rendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui tingkat kecukupan ketersediaan infrastruktur jalan di Provinsi Riau, maka perlu analisis komparatif antara indeks aksesibilitas eksisting dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Tabel 2.68.
Analisa Perbandingan Parameter Kinerja SPM untuk Indeks Aksesibilitas di
Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	SPM	Indeks Aksesibilitas	Analisis
1	Kuantan Singingi	345.850	63,69	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
2	Indragiri Hulu	464.076	57,56	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
3	Indragiri Hilir	660.747	51,92	> 0.05	Sangat Rendah	Memenuhi Syarat SPM
4	Pelalawan	410.988	30,57	> 0.05	Sangat Rendah	Memenuhi Syarat SPM
5	Siak	477.550	55,34	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
6	Kampar	878.210	76,60	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
7	Rokan Hulu	582.679	73,98	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
8	Bengkalis	582.973	81,08	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
9	Rokan Hilir	658.407	71,74	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
10	Kepulauan Meranti	213.532	55,59	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM
11	Pekanbaru	1.007.540	1.555,28	> 1.50	Tinggi	Memenuhi Syarat SPM
12	Dumai	331.832	195,14	> 0.50	Sedang	Memenuhi Syarat SPM
	Riau	6.614.384	73,48	> 0.15	Rendah	Memenuhi Syarat SPM

Sumber: Informasi Statistik Infrastruktur 2020
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Tabel di atas membandingkan antara indeks aksesibilitas eksisting tahun 2020 dengan standar pelayanan minimal (SPM). Dengan melakukan komparasi antara indeks aksesibilitas eksisting tahun 2020 dengan standar pelayanan minimal (SPM), maka dapat diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur jalan guna aksesibilitas penduduk di Provinsi Riau dinilai sudah mencukupi standar SPM, kecuali untuk wilayah Indragiri Hilir dan Pelalawan. Pada kedua daerah tersebut, indeks aksesibilitas sangat rendah untuk kepadatan penduduk yang tergolong rendah. Oleh sebab itu perlu pembangunan jalan pada kedua daerah tersebut. Sedangkan Pekanbaru teridentifikasi memiliki kepadatan penduduk yang sedang, namun indeks aksesibilitas Kota Pekanbaru tahun 2020 sudah mencapai kategori tinggi.

b. Infrastruktur Sumber Daya Air

Infrastruktur sumber daya air dengan segala manfaatnya menjadi masa depan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan air terpadu oleh infrastruktur sumber daya air memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, mengingat peran penting air di setiap sektor kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga industri. Manfaat-manfaat infrastruktur sumber daya air antara lain adalah penyedia air baku atau air minum, irigasi, pembangkit listrik, dan pengendali banjir. Tak hanya itu, infrastruktur sumber daya air, seperti waduk dan bendungan, juga bisa dimanfaatkan dalam sektor perikanan dengan menjadi nelayan tangkap dan pengembangan wisata dengan dijadikan tempat berwisata.

Jenis tanah di Provinsi Riau didominasi oleh jenis podzolik merah kuning, dimana jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang memerlukan penanganan khusus untuk pengembangan tanaman pangan antara lain pemenuhan kebutuhan air melalui pembangunan jaringan irigasi.

1. Jaringan Irigasi

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder, termasuk bangunan utama dan pelengkap, saluran pembawa dan saluran pembuang. Daerah irigasi kewenangan Provinsi Riau sebanyak 8 daerah irigasi permukaan dan 50 daerah irigasi rawa. Total luas daerah irigasi permukaan kewenangan provinsi yaitu 10.035 ha serta luas daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi Riau yaitu 106.936 ha. Daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau terdapat di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu. Dimana ada 6 daerah irigasi di Kabupaten Kampar, 1 daerah irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi serta 1 daerah irigasi di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau terdapat 6 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak. Dimana ada 6 daerah irigasi rawa di Kabupaten Kepulauan Meranti, 3 daerah irigasi rawa di Kabupaten Bengkalis, 3 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hulu, 31 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hilir, 6 daerah irigasi rawa di Kabupaten Rokan Hilir, dan 1 daerah irigasi rawa di Kabupaten Siak.

Tabel 2.69.
Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Riau

No	Kabupaten /Kota	Bidang Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 14/PRT/M/2015					
		Nama Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Riau	Luas Baku (Ha)	Panjang Saluran (Km)	Kondisi Eksisting Kinerja		
					Baik	Sedang	Rusak
1	Kabupaten Kuantan Singingi	D.I. Seberang Gunung Paing	1293	25			√
Jumlah			1293	25			
2	Kabupaten Kampar	D.I. Bancah Labi Sei Silam	1063	32			√
		D.I. Muara Jalai Sei Tanang Sawah	1065	9,6			√
		D.I. Ranah Singkuang Sei Sirah Penyasawan	1203	23			√
		D.I. Sei Paku	1123	21			√
		D.I. Sei Tibun Petapahan	1105	22			√
		D.I. Uwai Pangoan	1029	31,5			√
Jumlah			6588	139,1			
3	Kabupaten Rokan Hulu	D.I. Kaiti Samo	2154	25,55			√
Jumlah			2154	25,55			

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 2020

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu Daerah Irigasi Kaiti Samo di Kabupaten Rokan Hulu. Apa bila dilihat berdasarkan kondisi eksisting kinerja Daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi dapat disimpulkan dalam kondisi buruk. Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu daerah irigasi rawa Tanjung Lajau dengan luas 2.918 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi eksisting kinerja Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau sebagian besar dalam kondisi sedang dan rusak.

Tabel 2.70.
Kondisi Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Riau

No	Kabupaten /Kota	Bidang Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 14/PRT/M/2015					
		Nama Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Riau	Luas Baku (Ha)	Panjang Saluran (Km)	Kondisi Eksisting Kinerja		
					Baik	Sedang	Rusak
1	Kabupaten Rokan Hilir	D.I.R. Lenggadai Mukti Jaya (N.4)	1.750	40,36		√	
		D.I.R. Padamaran (N.17, N.18)	2.082	151,79			√
		D.I.R. Parit Aman	2.015	88,17			√
		D.I.R. Pekaitan	2.500	58,08			√
		D.I.R. Teluk Bano II (N.15, N.16)	1.876	87,18			√
		D.I.R. Teluk Pulau	2.785	52,77		√	
Jumlah			13.008	478,35			
2	Kabupaten Bengkalis	D.I.R. Siak Kecil A',B',C'	1.341	5,3		√	
		D.I.R. Siak Kecil Blok A,B,C,D	1.262	7,5		√	
		D.I.R. Siak Kecil Blok E,F,H,I,J,K	1.890	14,5		√	
Jumlah			4.493	27,3			
3	Kabupaten Kepulauan Meranti	D.I.R. Anak Setatah	1.235	15,47		√	
		D.I.R. Centai / Semukut	1.010	14,75		√	
		D.I.R. Kedabu Rapat	2.400	21,08		√	
		D.I.R. Melai	2.900	53,38		√	
		D.I.R. Sei Cina	1.450	20			√
		D.I.R. Sei Tohor	1.500	8,22			√
Jumlah			10.495	132,9			
4	Kabupaten Siak	D.I.R. Siak Kiri Paket A, (Langsat Permai, Jati Baru dan Dayang Suri)	2.870	92,45			√
Jumlah			2.870	92,45			
5	Kabupaten Indragiri Hulu	D.I.R Dagang	2.902	30,2		√	
		D.I.R. Kuala Mulya / Rawa Sekip	2.793	13,41		√	
		D.I.R. Rengat	1.507	20,05		√	
Jumlah			7.202	63,66			
6		D.I.R. Belantaraya	2.100	1,54			√
		D.I.R. Belaras	2.670	40,6		√	

No	Kabupaten /Kota	Bidang Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 14/PRT/M/2015					
		Nama Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Riau	Luas Baku (Ha)	Panjang Saluran (Km)	Kondisi Eksisting Kinerja		
					Baik	Sedang	Rusak
	Kabupaten Indragiri Hilir	D.I.R. Kampung Baru	1.200	2,91			√
		D.I.R. Mumpa	1.454	25,26			√
		D.I.R. Pekan Arba	1.243	23,51			√
		D.I.R. Pulau Burung	2.500	3			√
		D.I.R. Pulau Palas	2.032	26,92			√
		D.I.R. Reteh Lokal (Sei Mumpa, Sei Gantang)	1.207	10,2			√
		D.I.R. Sanglar	2.908	21,1			√
		D.I.R. Sei Salak	2.073	27,79			√
		D.I.R. Sei Dusun	2.097	4,92			√
		D.I.R. Sei Perak	1.007	28,05			√
		D.I.R. Sei Piyai	1.905	23,37			√
		D.I.R. Sei Teritip	1.750	69,95		√	
		D.I.R. Simpang Kateman	2.240	140,55		√	
		D.I.R. Tanjung Lajau	2.918	27,51			√
		D.I.R. Teluk Dalam	2.054	8,61			√
		D.I.R. Teluk Kiambang	2.054	24,28			√
		D.I.R. Teluk Sungka	2.769	2,44			√
		D.I.R. Terusan Kempas	2.703	3,56			√
		D.I.R. Togaraja	1.683	1,5		√	
		D.I.R Benteng / Pesanggrahan	1.794	21			√
		D.I.R. Kempas	2.900	14,05			√
		D.I.R. Kota baru Reteh	2.769	70,44			√
		D.I.R. Kuala Cinaku II / Harapan dan Bayas Jaya	2.892	9,12			√
		D.I.R. Kuala Lemang	2.873	35,2			√
		D.I.R. Pabenaan	2.891	24			√
		D.I.R. Pulau Kecil	1.900	66,76			√
		D.I.R. Pulau Kijang	2.706	25,42			√
		D.I.R. Sei Piring / Tasik Raya	2.792	1,97			√
		D.I.R. Teluk Kelasa	2.784	29,36			√
		Jumlah			68.868	814,89	

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKP Provinsi Riau

Lahan sawah sangat membutuhkan jaringan irigasi untuk kebutuhan tanaman baik padi maupun komoditi lainnya, sawah dapat diartikan sebagai usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air irigasi. Sedangkan irigasi adalah usaha penyediaan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Luas lahan sawah yang teraliri irigasi di Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71.
Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Realisasi Dalam Satu Tahun (Ha)					Jumlah	Luas Lahan SK. BPN /ATR 2019
	Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
	Satu kali	Dua kali	≥ Tiga kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
Kuantan Singingi	4.515,1	898,4	50,0	236,5	919,2	6.619,2	6.212,58
Indragiri Hulu	1.211,0	957,0	0,0	33,0	1.235,0	3.436,0	2.667,29
Indragiri Hilir	14.292,1	5.026,9	270,0	1,0	1.339,0	20.929,0	19.020,55
Pelalawan	5.980,0	653,0	0,0	167,0	746,0	7.546,0	6.718,24
S I A K	290,0	4.501,0	0,0	161,0	123,0	5.075,0	4.331,71
Kampar	1.871,0	1.621,0	54,0	561,0	700,0	4.807,0	3.220,42
Rokan Hulu	274,3	1.618,5	0,0	88,5	587,0	2.568,3	1.683,64
Bengkalis	2.002,9	885,5	0,0	104,0	0,0	2.992,4	2.992,42
Rokan Hilir	12.459,0	1.042,0	0,0	53,0	19,0	13.573,0	12.185,64
Kep. Meranti	2.902,0	17,0	0,0	1.039,0	401,0	4.359,0	3.436,23
Pekanbaru	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,27
D U M A I	178,0	55,0	0,0	15,0	0,0	248,0	217,36
JUMLAH	45.975,4	17.275,3	374,0	2.459,0	6.069,2	72.152,9	62.689,40

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2020

Lahan sawah yang ditanami padi dua kali setahun seluas 17.275,3 Ha (27,55%) dari jumlah total luas pemanfaatan sawah Provinsi Riau 62.689,4 Ha. Untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan beras Provinsi Riau, peran irigasi dan benih unggul sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas, baik untuk meningkatkan indeks pertanaman maupun perluasan areal sawah beririgasi.

2. Penanganan Abrasi

Terjadinya abrasi yang ada di Provinsi Riau saat ini sudah cukup memprihatinkan, Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau saat ini terus berupaya mengatasi abrasi tersebut dan terus meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk mengatasi abrasi.

Tabel 2.72.
Rekapitulasi Pengaman Pantai di Pulau Terluar Provinsi Riau Tahun 2021-2023

URAIAN KEGIATAN	KAB	PANJANG ABRASI PANTAI (KM)	LOKASI	PENANGANAN ABRASI TAHUN			TOTAL PENANGANAN (KM)	SISA PENANGANAN (KM)
				2021	2022	2023		
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	BENGKALIS	95,17	Pulau Rupat	Pantai Tanjung Lapin Kec. Rupat Utara (62,2 m)	Pantai Ketapang Pulau Rupat (7 m)	Pantai Ketapang Pulau Rupat (86 m)	0,16	95,01
		95,34	Pulau Bengkalis		Pantai Sekodi (33,85 m)	Pantai Sekodi (185,19 m)	0,22	95,12
	KEP. MERANTI	96,64	Pulau Rangsang			Pantai Pulau Rangsang Kec. Rangsang Barat (470,33 m)	0,47	96,17

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2023

C. Infrastruktur Air bersih dan Air Minum

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan air minum bersih yang dapat dimanfaatkan untuk air minum maupun memasak. Hal ini menjadi penting karena sumber air baku yang ada sudah tidak layak, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Untuk itulah diperlukan peran perusahaan air minum dalam menangani hajat hidup orang banyak tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Tabel 2.73.
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Bersih
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kuantan Singingi	70,54	71,34	73,49	74,56	68,10
2	Indragiri Hulu	77,61	78,39	76,66	79,78	79,39
3	Indragiri Hilir	20,00	25,15	30,44	29,11	30,41
4	Pelalawan	78,48	86,63	85,78	80,33	81,45
5	Siak	83,95	85,95	83,11	86,98	85,29
6	Kampar	69,66	67,51	71,73	73,85	69,90
7	Rokan Hulu	76,39	66,59	74,81	77,84	80,30
8	Bengkalis	61,70	61,35	67,69	60,40	55,57
9	Rokan Hilir	57,21	61,10	63,73	63,94	63,86
10	Kep. Meranti	9,77	7,79	12,06	7,71	5,54
11	Pekanbaru	93,56	96,48	94,16	93,86	89,99
12	Dumai	86,74	87,90	90,70	90,39	94,05
	Provinsi Riau	68,43	69,56	71,68	71,56	70,15

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2018 - 2022

Persentase rumah tangga menurut sumber air minum bersih pada tahun 2022 terendah adalah di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 5,54%, dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 30,41%. Kondisi ini mengalami peningkatan dari kondisi awal RPJMD dimana lebih banyak kabupaten/kota yang memiliki sumber air minum yang rendah. Namun, secara keseluruhan pemenuhan air minum bersih Provinsi Riau baru mencapai 70,15%, sehingga diperlukan peningkatan sebesar 29,85% untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan dari segi kesehatan adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap air hujan, air permukaan dan lainnya dalam memenuhi kebutuhan air minumnya yang mencapai 7,56 persen. Sedangkan untuk kebutuhan lain selain air minum tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk
Memasak/Mandi/Cuci/dll di Provinsi Riau Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Sumber Air Memasak/Mandi/Cuci/dll					Jumlah
		Leding	Sumur Bor / Pompa	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya	
1	Kuantan Singingi	1,84	26,51	56,57	5,17	9,44	100
2	Indragiri Hulu	8,77	32,76	47,03	1,86	8,94	100
3	Indragiri Hilir	4,77	46,26	24,06	2,49	22,43	100
4	Pelalawan	0,36	63,36	24,05	1,60	10,07	100
5	Siak	14,60	61,17	17,73	0,57	5,64	100
6	Kampar	1,39	55,64	32,44	4,55	4,46	100
7	Rokan Hulu	0,00	37,62	53,87	2,07	3,87	100
8	Bengkalis	2,02	53,31	34,69	2,35	5,30	100
9	Rokan Hilir	0,16	48,63	38,39	2,41	9,08	100
10	Kep. Meranti	1,83	24,57	48,17	6,62	17,61	100
11	Pekanbaru	0,75	89,82	7,87	1,35	0,11	100
12	Dumai	0,55	57,20	30,69	1,02	6,24	100
	Riau	2,72	54,95	31,21	2,42	7,56	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam melakukan aktivitas memasak, mandi, cuci dan sebagainya di luar untuk air minum di tahun 2022, rumah tangga pada umumnya memanfaatkan air sumur, baik sumur bor maupun sumur terlindungi/tak terlindungi yang mencapai 86,16 persen. Selain itu, perhatian juga harus diberikan kepada rumah tangga yang masih bergantung kepada air permukaan dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan selain untuk air minum yang mencapai 7,56 persen.

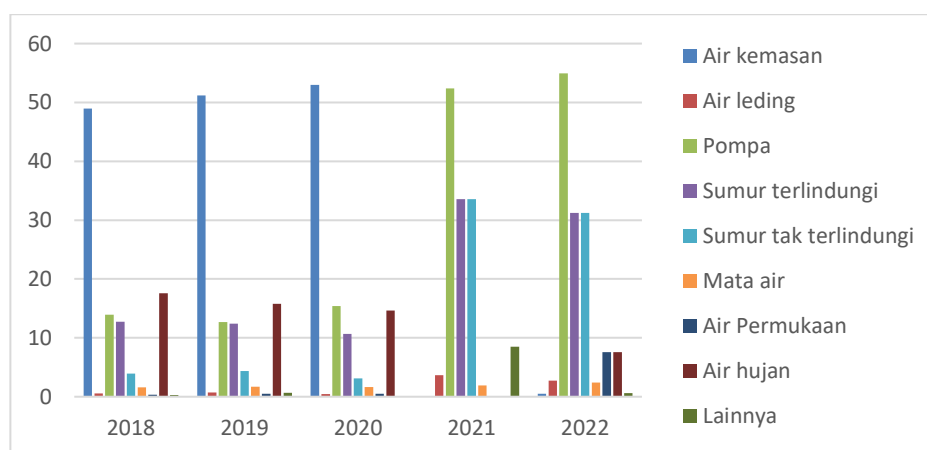
Tabel 2.75.
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum di Provinsi
Riau Tahun 2018-2022

Tahun	Sumber Air Minum								
	Air Kemasan	Air Leding	Pompa	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Mata Air	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya
2018	48,93	0,58	13,96	12,74	3,93	1,61	0,36	17,60	0,29
2019	51,20	0,71	12,70	12,39	4,34	1,68	0,52	15,80	0,66
2020	53,00	0,46	15,41	10,67	3,13	1,64	0,51	14,66	0,04
2021	0	3,66	52,36	33,54	33,54	1,92	0,00	0,00	8,52
2022	0,53	2,72	54,95	31,21	31,21	2,42	7,56	7,56	0,60

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2018-2022

Dari rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 persentase rumah tangga yang menggunakan air leding cenderung berfluktuatif. Namun pemakaian air kemasan sebagai sumber air minum rumah tangga mengalami penurunan sampai di angka 0,53% di tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.75 terlihat bahwa sumber air minum yang berasal dari air leding meteran (pipa) tahun 2022 hanya sebesar 2,72%. Penggunaan air untuk minum berasal dari sumur bor/pompa menjadi yang paling mencolok dari pada sumber air minum yang lain yaitu 54,95 %. Sumber air minum yang paling banyak dipakai kedua adalah dari sumur terlindungi/tak terlindungi sebesar 31,21%. Sedangkan sumber air minum rumah tangga yang lain adalah dari air hujan sebesar 7,56%, mata air sebesar 2,42%, air permukaan 7,56% dan sumber air minum lainnya sebesar 0,60%.



Gambar 2.44.
Trend Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum di
Provinsi Riau Tahun 2018-2022

Potensi sumber baku air bersih di Provinsi Riau pada dasarnya sangat besar karena dialiri oleh empat sungai besar, yaitu Sungai Indragiri, Kampar, Rokan dan Siak yang dapat dilihat pada kondisi tutupan lahan dari vegetasi yang bersifat permanen yang diharapkan dapat berfungsi sebagai daerah resapan serta Indeks Penggunaan Air di masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi kinerja DAS yang telah dilakukan oleh Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Indragiri Rokan.

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi adalah pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76.
Rencana Kinerja Layanan SPAM Regional

No.	SPAM	Kapasitas layanan (lt/dtk)	Jumlah (SR)	Jumlah (Orang)
1	SPAM Durolis	100	6.270	31.350
2	SPAM Pekanbaru – Kampar	40	3.200	16.000
3	SPAM Inhu – Inhil*	-	-	-
	Total	140	9.470	47.350

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

*= masih progress
catt : 1 SR = 5 orang
Rohil : 2018 = 1800 SR
2020 = 2370 SR
Dumai : 2018 = 900 SR
2019 = 1200 SR
1 liter/detik = 80 SR

Pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Riau, dilakukan melalui kerjasama SPAM Regional, terdiri dari 3 lokasi kegiatan yaitu (1) DUROLIS (Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis) dengan target 100 lt/dt untuk 6.270 Sambungan Rumah yang mampu memenuhi kebutuhan untuk 31.350 warga; (2) Pekanbaru – Kampar target 40 lt/dt untuk 3.200 Sambungan Rumah yang mampu memenuhi kebutuhan untuk 16.000 warga; dan (3) Indragiri Hilir – Indragiri Hulu masih progress. Total target keseluruhan layanan air minum sebanyak 47.350 warga, dengan asumsi 1 sambungan rumah melayani 5 orang warga.

Untuk SPAM Durolis, dengan kapasitas 100 lt/dtk, seharusnya bisa untuk memenuhi kebutuhan minimal 14.000 SR (60.000 jiwa). Karena itu, dengan 6.270 SR yang tersambungkan, berarti kapasitas yang terpakai baru sekitar 44,8%. Masih ada sekitar 55,2% lagi dari potensi SPAM Durolis yang belum tersambungkan. Demikian pula untuk SPAM Pekanbaru-Kampar, untuk kapasitas 40 lt/dtk, seharusnya bisa untuk memenuhi kebutuhan 5.600 SR. Karena itu, dengan 3.200 SR yang baru tersambungkan, berarti kapasitas yang terpakai baru sekitar 57,1%. Masih ada sekitar 43,9% lagi dari SPAM Pekanbaru-Kampar yang belum tersambungkan. Karena itu, permasalahan saat ini adalah pada pembangunan saluran transmisi dari lokasi SPAM ke kabupaten/kota, dilanjutkan ke saluran distribusi ke rumah-rumah.

D. Air Limbah

SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, fokus pada penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, dimana air limbah domestik berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan produksi air limbah. Perhitungan air limbah menggunakan asumsi *degradable organic component* (BOD) sebesar 14,6 kg BOD/cap.year (default IPCC, 2006). BOD adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menggambarkan komponen organik yang dapat didegradasi dalam air limbah. Semakin besar nilai BOD, maka kualitas air akan semakin buruk dan sebaliknya. Air limbah domestik masih menjadi persoalan di Provinsi Riau karena belum optimalnya upaya pengolahan air limbah tersebut, seperti IPAL komunal dan IPAL kawasan yang dilengkapi

dengan biodigester, dan lain sebagainya. Ke depannya, mitigasi yang dilakukan harus mempertimbangkan derajat penggunaan pengelolaan air limbah rumah tangga seperti *septic tank*, *latrine*, dan *sewer*. Mitigasi ini sangat penting untuk mengurangi tingkat pencemaran air sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau.

Tabel 2.77.
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Fasilitas Buang Air Besar Sendiri atau Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Riau, 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	51,54	82,06	84,44	84,34	84,50
2	Indragiri Hulu	60,53	74,64	64,73	82,72	76,89
3	Indragiri Hilir	27,93	39,97	42,20	35,47	51,31
4	Pelalawan	57,30	68,86	75,54	69,76	86,20
5	Siak	76,79	92,40	91,63	93,34	90,12
6	Kampar	82,19	88,50	88,31	86,71	87,55
7	Rokan Hulu	48,29	61,86	69,85	71,56	72,46
8	Bengkalis	57,65	83,71	71,96	86,15	91,36
9	Rokan Hilir	52,19	63,23	69,37	56,71	68,39
10	Kep. Meranti	24,08	32,37	51,53	50,28	53,26
11	Pekanbaru	95,83	97,48	96,10	95,30	97,23
12	Dumai	83,05	91,93	92,99	94,93	94,64
	Riau	64,24	76,65	77,17	76,98	81,31

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

*Tahun 2016 data interpolasi

Persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan tempat pembuangan akhir tinja di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 81,31%. Masih terdapat 5 kabupaten yang capaiannya lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 51,31%, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 53,26%, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 76,89%, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 68,39%, dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 72,46%, sehingga diperlukan peningkatan pembangunan sarana prasarana air limbah sebesar 18,69% untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

2.1.4.1.4. Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum

Dasar hukum Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100%. Secara rinci capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78.
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022

NO	JENIS SPM PEKERJAAN UMUM	INDIKATOR	CAPAIAN	
			2021	2022
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	100	79,04
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	-	88,41

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Riau Tahun 2022 untuk jenis SPM Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota telah mencapai 79,04% di atas target yang ditetapkan oleh Provinsi Riau yaitu sebesar 54,66%. Untuk jenis SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 mencapai 88,41% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini mengalami penurunan karena masih dalam proses penyusunan Studi Kelayakan (FS). Untuk itu perlu percepatan penentuan lokasi dan pengadaan lokasi untuk SPALD Regional dari lokasi terpilih dalam Studi Kelayakan (FS) dan percepatan penyusunan dokumen DED dan AMDAL SPALD Regional.

2.1.4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Rumah Layak Huni

Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan tingginya angka capaian pada indikator "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan indikator yang telah ditetapkan secara Nasional, dengan perhitungan angka yang dikeluarkan oleh BPS. Angka ini diperoleh dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria yaitu : Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita; Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan Ketahanan bangunan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk disewa. Pada tabel berikut ini akan disajikan data Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau tahun 2019-2023.

Tabel 2.79.

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	62,81	72,35	74,71	68,53	68,96
2	Indragiri Hulu	53,94	60,74	54,71	57,67	61,83
3	Indragiri Hilir	35,57	46,71	38,82	39,58	46,93
4	Pelalawan	59,47	68,13	66,71	62,01	67,64
5	Siak	60,30	66,26	72,76	78,25	75,19
6	Kampar	70,93	72,89	75,03	69,69	73,80
7	Rokan Hulu	57,09	63,33	77,76	75,92	74,40
8	Bengkalis	70,63	80,49	78,99	77,66	81,43
9	Rokan Hilir	54,77	53,61	62,07	62,94	62,78
10	Kepulauan Meranti	45,87	51,60	48,77	48,95	52,22
11	Pekanbaru	83,70	86,88	89,70	90,25	90,17
12	Dumai	78,61	82,31	84,76	75,63	81,30
-	Provinsi Riau	62,94	68,44	70,63	69,43	71,53

Sumber : Susenas Maret Provinsi Riau 2015-2022 (diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian terendah untuk indikator ini kebanyakan berada pada Kabupaten yang terletak di daerah pesisir seperti Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian tahun 2023 naik sebesar 3,02% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Namun jika melihat data P3KE Tahun 2022 yang merujuk pada 4 kriteria pembentuk indikator di atas, maka masih terdapat 40.055 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 12 kabupaten/Kota. Hal tersebut merupakan tugas bersama (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk dituntaskan. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada dasarnya juga mendapatkan dukungan dari stakeholder lainnya di luar Pemerintah seperti Basnaz dan CSR, namun hal tersebut tidak terdata secara time series. Pada tabel berikut akan dipaparkan data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 berdasarkan data olahan P3KE.

Tabel 2.80.
Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)						Total
		ATAP BAMBU/JERAMI	DINDING ASBES/SENG	LANTAI TANAH/BAMBU	TANPA SEPTIC TANK	JAMBAN UMUM	AIR MINUM TIDAK LAYAK	
1	Kuantan Singingi	18	35	68	735	1.299	1.547	3.702
2	Indragiri Hulu	140	22	137	907	882	1.660	3.748
3	Indragiri Hilir	1.012	174	36	4.589	1.726	145	7.682
4	Pelelawan	48	39	56	1.051	275	557	2.026
5	Siak	24	42	90	655	152	184	1.147
6	Kampar	9	42	102	747	915	1.303	3.118
7	Rokan Hulu	2	70	105	805	1.277	1.674	3.933
8	Bengkalis	584	35	107	1.730	333	424	3.213
9	Rokan Hilir	54	5	476	61	833	756	2.185
10	Kepulauan Meranti	1.193	94	16	5.809	432	1.011	8.555
11	Kota Pekanbaru	1	13	38	112	35	173	372
12	Kota Dumai	18	7	42	160	26	121	374
Total		3.103	578	1.273	17.361	8.185	9.555	40.055

Sumber : Data Olahan P3KE, Tahun 2022

Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Rumah Layak Huni bagi

masyarakat miskin. Pada tahun 2021, bantuan rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Riau dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke 12 Kabupaten/Kota. Dari tahun 2017-2022 telah dilaksanakan pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 8.000 unit dan pada tahun 2023 berdasarkan SK Bantuan Keuangan Provinsi Nomor : Kpts.1/I/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa Pembangunan RLH sebanyak 707 unit. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81.
Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023 (Unit)

No.	Kabupaten/ Kota	TAHUN						Total	Pembangunan RLH TA. 2023
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Kuantan Singingi	167	161	112	16	-	24	480	74
2	Indragiri Hulu	167	172	180	17	-	90	626	50
3	Indragiri Hilir	167	218	160	26	132	70	773	67
4	Pelalawan	166	167	128	16	-	20	497	50
5	Siak	166	154	172	17	-	75	584	50
6	Kampar	165	226	189	16	224	144	964	96
7	Rokan Hulu	165	155	137	18	266	157	898	70
8	Bengkalis	172	180	153	17	139	77	738	54
9	Rokan Hilir	166	170	185	15	113	60	709	50
10	Kep. Meranti	167	144	173	15	49	20	568	46
11	Pekanbaru	179	164	104	18	147	90	702	50
12	Dumai	167	150	90	16	-	38	461	50
Jumlah		2.014	2.061	1.783	207	1.070	865	8.000	707

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2023

Selain Pembangunan RLH melalui mekanisme BKK, Provinsi Riau juga melaksanakan Pembangunan RLH yang menjadi kewenangannya, dimana hal tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan SPM Perumahan yaitu pembangunan RLH untuk korban bencana dan korban relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi. Mulai dari tahun 2021-2023 telah terlaksana pembangunan RLH untuk korban bencana sebanyak 119 unit dan pembangunan RLH untuk korban relokasi Program Pemerintah Provinsi sebanyak 21 unit. Untuk data detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82.
Realisasi Rumah Layak Huni Korban Bencana dan Korban Relokasi Akibat
Program Pemerintah Provinsi Yang Tertangani Tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/Kota	Unit	Keterangan
TAHUN 2021			
1	Kab. Indragiri Hilir	10	- Lokasi : Kel. Tanjung Baru Kec. Tanah Merah. - Bencana : Longsor
		10	- Lokasi : Kel. Enok Kec. Tanah Merah - Bencana : Longsor
2	Kab. Kampar	21	- Lokasi : Desa Gobah Kec. Tambang. - Relokasi Program Pemerintah
3	Kab. Rokan Hilir	5	- Lokasi : Kel. Bangko Kec. Bagan Kunak. - Bencana : Kebakaran
TAHUN 2022			
1	Kab. Indragiri Hilir	11	- Bencana : Longsor
TAHUN 2023			
1	Kab. Indragiri Hilir	28	- Lokasi : Desa Simpang 3 Kecamatan Enok dan Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra - Bencana : Abrasi Sungai
2	Kab. Rokan Hilir	54	- Lokasi : Kepenghuluan Jumrah dan Desa Teluk Pulau Hulu - Bencana : Abrasi Sungai
3	Kota Pekanbaru	1	- Lokasi : Tenayan Raya - Bencana : Longsor

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2023

Meskipun Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Stakeholder telah berupaya untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni sebagai kebutuhan dasar masyarakat, namun upaya tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu : Masih terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah; Program Kegiatan Pemerintah belum melayani seluruh segmentasi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal; Kurangnya pengawasan untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang; Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana prasarana khususnya di perkotaan; Pasar pembiayaan primer dan skunder perumahan yang belum mapan; serta manajemen dan pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif (ketersediaan lahan, urban sprawl/tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur, dan keamanan bermukim).

b) Kawasan Kumuh

Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan oleh 12 Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Riau, diketahui bahwa adanya 3 katagori luas kawasan yang harus ditangani yaitu : Kawasan Kumuh dengan luas 0-10 Ha yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, Kawasan Kumuh dengan luas 10-15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kawasan Kumuh dengan luas diatas 15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Namun pada SK yang telah ditetapkan tersebut tidak satupun SK yang menampilkan Kondisi kekumuhan tiap kawasan dan pola penanganan berdasarkan 7 kriteria yang telah disebutkan.

Berdasarkan SK Awal yang menjadi data dasar di tahun 2020 (Penggalian 5 tahun terakhir periode RPJP 2005-2025), diketahui bahwa luasan kawasan kumuh yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau seluas 249,27 Ha, luasan tersebutlah yang menjadi pedoman dalam melakukan intervensi penanganan kawasan kumuh. Mulai dari tahun 2017-2023 telah dicapai penanganan kawasan kumuh seluas 103,07 Ha (lihat data pada tabel 2.83) sehingga sisa luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan seluas 146,20 Ha. Seiring berjalannya waktu, masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mengupdate SK Kawasan Kumuhnya yang mengakibatkan perubahan luasan dan lokasi kawasan kumuh yang menjadi Kewenangan Provinsi dengan besaran seluas 385,22 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83.
Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)
Berdasarkan SK Semula dan SK ter Update

No	Kabupaten/ Kota	SK Semula		SK Update	
		Luas 10-15 (Ha)	Jumlah Kawasan	Luas 10-15 (Ha)	Jumlah Kawasan
1	Kabupaten Kuantan Singingi - SK Semula : Kpts.421/XI/2014 tgl 19 September 2014 - SK Update : Kpts.78/II/2020 Tgl 3 Februari 2020	11,30	1	37,27	3
2	Kabupaten Indragiri Hulu - SK Semula : 167/III/2017 tgl 3 Maret 2017 - SK Update : Kpts.481/XII/2021 Tgl 20 Desember 2021	42,15	3	12,94	1

No	Kabupaten/ Kota	SK Semula		SK Update	
		Luas 10-15 (Ha)	Jumlah Kawasan	Luas 10-15 (Ha)	Jumlah Kawasan
3	Kabupaten Indragiri Hilir - SK : Kpts.133/II/HK-2017 tgl 23 Feb 2017 - Update SK direncanakan di Tahun 2023	24,94	2	24,94	2
4	Kabupaten Pelalawan - SK Semula : KPTS.050/BAPPEDA/757/2014 tgl 25 Agustus 2014 - SK Update : KPTS.050/BAPPEDA/2020/839 Tgl 04 Desember 2020	0	0	0	0
5	Kabupaten Siak - SK Semula : 303/HK/KPTS/2017 tgl 23 Februari 2017 - SK Update : 579/HK/KPTS/2020 Tgl 16 Desember 2020	12,04	1	0	0
6	Kabupaten Kampar - SK Semula : 650/bappeda-kimp/2016/100 tgl 3 Oktober 2016 - SK Update : 817/PERKIM-SET/2021/1232 Tgl 30 Desember 2021	0	0	107,12	9
7	Kab. Rokan Hulu - SK Semula : Kpts.050.13/BAPPEDA/49/2017 tgl 31 Januari 2017 - SK Update : Kpts.050/BAPPEDA/792/2020 Tgl 16 September 2020	33,05	3	47,61	4
8	Kabupaten Bengkalis - SK Semula : 341/KPTS/X/2014 tgl 15 Oktober 2014 - SK Update : 236/KPTS/III/2021 Tgl 22 Maret 2021	36,15	3	65,10	5
9	Kabupaten Rokan Hilir - SK : 658 tahun 2014 tgl 21 Juli 2014 - SK Update : 164/PERKIM/2023 Tgl 6 Februari 2023	0	0	40,95	3
10	Kabupaten Kepulauan Meranti - SK Semula : 322/HK/KPTS/II/2019 tgl 21 Okt 2019 - SK Update : 263.1/HK/KPTS/III/2020 Tgl. 9 Maret 2020	39,80	3	13,50	1
11	Kota Pekanbaru - SK Semula : 878 Tahun 2017 tgl 29 Desember 2017 - SK Update : 664 Tahun 2023 Tgl 22 September 2023	27,60	2	22,81	2
12	Kota Dumai - SK Semula : 448/BAPPEDA/2015 tgl 22 November 2015 - SK Update : 922 Tahun 2021 Tgl 28 Desember 2021	22,24	2	12,98	1
TOTAL		249,27	20	385,22	31

Sumber : SK Kumuh Bupati/Walikota pada 12 Kabupaten/Kota

Dari tabel 2.84 diketahui bahwa terdapat 3 Kabupaten yang tidak di intervensi penanganan kawasan kumuhnya oleh Pemerintah Provinsi karena pada Kabupaten tersebut tidak terdapat Kawasan Kumuh dengan Luasan 10-15 Ha untuk periode penanganan dari tahun 2017 s/d 2023. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 2.84.
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi dari
Tahun 2017 s/d 2023

No.	KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (HA)	CAPAIA N LUAS KAWASAN KUMUH TERTANGAN I (HA)	CAPAIA N PENURUNA N LUAS KAWASAN KUMUH (HA)
1	2	3	4	9	10
1.	PEKANBARU	Rumbai Pesisir	14,60	0	14,60
		Lembah Damai	13,00	13,00	0,00
2.	DUMAI	Pangkalan Sesai	11,30	1,28	10,02
		Dumai Selatan	10,94	0,91	10,03
3.	KAMPAR				
4.	BENGKALIS	Perkotaan Bengkalis- Cik Mas Ayu	11,23	6,13	5,10
		Perkotaan Duri - Batang Serosa	13,11	0	13,11
		Permukiman Nelayan Tanjung Medang	11,81	2,03	9,78
5	KUANTAN SINGINGI	Sawah Taluk	11,30	11,30	0
6.	PELALAWAN				
7.	SIAK	Kampung Tualang	12,04	12,04	0
8.	INDRAGIRI HULU	Sekip Hulu	13,58	10,99	2,59
		Kampung Dagang	14,89	14,89	0
		Air Molek 1	13,68	1,02	12,66
9.	INDRAGIRI HILIR	Pulau Kijang	13,09	13,09	0
		Teluk Pinang	11,85	2,04	9,81
10.	ROKAN HULU	Dusun 1	11,87	2,40	9,47
		Tulang Gajah	10,22	0	10,22
		Petakur Bawah	10,96	10,96	0
11.	ROKAN HILIR				
12.	KEPULAUAN MERANTI	Kawasan Kota Lama Selat Panjang	11,80	0,24	11,56
		Kawasan Kota Lama Selat Panjang I	14,80	0	14,80
		Kawasan Kota Lama Selat Panjang II	13,20	0,75	12,45
JUMLAH TOTAL		20 KAWASAN	249,27	52,32	196,95

Masih banyaknya luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan diakibatkan oleh Pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh belum dilakukan secara terpadu. Artinya setelah dilakukan penanganan, kekumuhan kawasan tersebut akan muncul ditahun-tahun berikutnya karena penanganannya tidak meliputi 7 aspek, hanya menangani sebahagian kecil saja. Selain itu, Pembagian anggaran untuk penanganan kawasan kumuh masih berdasarkan asas sama rata antar Kabupaten/Kota, sehingga penanganan tidak dapat dilakukan secara tuntas serta Pola penanganan kawasan kumuh masih diseragamkan untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, belum berdasarkan tingkat kekumuhannya.

2.1.4.1.4.6. Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat

Dasar hukum Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100%. Secara rinci capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85.
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN			REALISASI								
				SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI			PERSENTASE CAPAIAN		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	25	11	83	25	11	83	0	0	0	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	21	3	0	21	3	0	0	0	0	100%	100%	100%

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 94,81%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Surat Keputusan penetapan bencana Provinsi sehingga yang dilaksanakan adalah usulan bantuan dari kabupaten/kota yang terkena bencana. Selain itu tidak adanya bencana alam provinsi (yang harus terjadi lebih dari 2 wilayah) maka yang ditangani adalah bencana yang terjadi di kabupaten/kota. Untuk itu perlu diadakan pendataan dan identifikasi ke kabupaten/kota bekerja sama dengan pihak BPBD untuk mengetahui bencana alam yang terjadi di kabupaten/kota.

2.1.4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Kejadian Unjuk Rasa

Secara umum Provinsi Riau selama Tahun 2018-2024 relatif kondusif. Meskipun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain terjadi unjuk rasa dan kriminalitas di Provinsi Riau dalam kurun tahun tersebut. Banyaknya unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan materi unjuk rasa selama kurun Tahun 2018-2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86.
Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Materi Unjuk Rasa	Kasus Unjuk Rasa							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah	Persentase
1	Masalah pendidikan	1	0	1	0	0	3	5	1,82
2	Pemerintah Pusat dan Daerah	12	3	4	0	19	10	48	17,45
3	Terkait dengan politik dan hukum	5	14	28	19	23	27	116	42,18
4	Masalah lainnya	5	6	1	2	1	0	15	5,45
5	Masalah lahan	5	33	6	8	5	8	65	23,64
6	Masalah tenaga kerja	8	1	7	4	6	0	26	9,45
Jumlah		36	57	47	33	54	48	275	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, Tahun 2023

Selama Tahun 2018-2023 kejadian unjuk rasa di Provinsi Riau fluktuatif cenderung menurun dengan 48 kasus pada Tahun 2023. Jika dilihat dari aspirasi/materi yang dominan disampaikan, masalah terkait dengan politik dan hukum merupakan yang paling banyak disampaikan sebanyak 27 kasus, disusul oleh masalah Pemerintah Pusat dan Daerah dengan 10 kasus pada Tahun 2023. Meskipun masalah lahan mengalami penurunan, patut diwaspadai karena masih banyak persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan yang sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya.

b. Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah jumlah tindak kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah. Tindak kejahatan tentunya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu penekanan angka kriminalitas menjadi penting untuk mewujudkan rasa aman dan tentram masyarakat. Tingkat kriminalitas yang terjadi di Provinsi Riau Tahun 2019-2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87.
Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 di Provinsi Riau

Kasus	ANGKA KRIMINALITAS				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kejadian Kriminilitas	10.192	6.526	7.512	5.258	3.861
Jumlah Penduduk	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.642.874
Rasio	0,0015	0,0010	0,0012	0,0008	0,00058

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Tahun 2023

Selama kurun 5 tahun terakhir angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan turun dari 10.192 kasus tahun 2019 menjadi 6.526 kasus pada tahun 2020, selanjutnya tahun 2021 kasus yang terjadi sebesar 7.512, tahun 2022 kasus yang terjadi sebesar 5.258 dan terakhir pada tahun 2023 angka kriminalitas di Provinsi Riau menjadi 3.861 kasus, Sementara rasio kasus kriminalitas terhadap jumlah penduduk juga cenderung naik turun. Kejadian kriminalitas ini tidak bisa dilepaskan dari adanya ketimpangan pendapatan penduduk, perkembangan kota yang semakin pesat. Oleh sebab itu upaya-upaya untuk menekan angka kriminalitas terutama upaya preventif haruslah menjadi kebijakan ke depannya, karena angka kriminalitas yang tinggi tidak hanya

mengganggu ketenteraman masyarakat tetapi juga akan berdampak pada kurang kondusifnya iklim investasi.

c. Penegakan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Secara fungsi, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di daerah untuk menaati dan mematuhi, meskipun masih ada sebagian pihak yang tidak tunduk dan patuh terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88.
Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penetapan Perda	41	41	42	4	6	3
2	Jumlah Penegakan Perda	1	5	6	6	7	8

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Penegakan Perda Provinsi Riau yang mengandung sanksi hukum dan/atau administrasi yang harus ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dalam kurun waktu 2018-2024 telah melaksanakan penegakan sebanyak 8 Peraturan Daerah. Salah satu contoh peraturan yang ditegakkan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memiliki dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Peraturan mengenai PPNS di Provinsi Riau Diatur dalam Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu,

instansi atau perangkat daerah memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Adapun Rekapitulasi Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada organisasi perangkat daerah se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89.
Rekapitulasi Data PPNS se-Provinsi Riau Tahun 2023

No	Prov/ Kab/ Kota	Jumlah PPNS	Rincian PPNS					
			Satpol PP	OPD lainnya	KTP aktif	KTP nonaktif	UU	PERDA
1	Provinsi Riau	108	16	92	23	85	62	46
2	Kuantan Singingi	19	4	15	3	16	13	6
3	Indragiri Hulu	10	4	6	7	3	3	7
4	Indragiri Hilir	10	3	7	4	6	-	10
5	Pelalawan	33	11	22	6	27	8	25
6	Siak	23	4	19	6	17	10	13
7	Kampar	15	5	10	10	5	6	9
8	Rokan Hulu	3	3	-	2	1	-	3
9	Bengkalis	2	2	-	-	2	-	2
10	Rokan Hilir	4	2	2	4	-	2	2
11	Kep. Meranti	5	4	1	5	-	1	4
12	Pekanbaru	7	7	-	5	2	-	7
13	Dumai	23	5	18	3	20	11	12
Total		262	70	192	78	184	116	146

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Untuk memenuhi kualifikasi dan persyaratan menjadi PPNS, sebelum diangkat pejabat pegawai negeri sipil harus mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan PNS agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan optimal. Pengembangan kapasitas pelatihan lanjutan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan karier PPNS dalam peningkatan kinerja.

2.5.5 Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Dasar hukum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100%. Secara rinci capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90.
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Provinsi Riau Tahun 2021-2023

NO	JENIS SPM TRANTIBUMLINMAS	INDIKATOR	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	100	100	100

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2023 telah mencapai hasil yang maksimal.

2.1.4.1.8 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan pemerintahan bidang sosial merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar. Artinya setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar khususnya rehabilitasi sosial maka pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut. Pelayanan dasar tersebut untuk di bidang sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial. Untuk rehabilitasi sosial sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjutan. Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam memberikan layanan rehabilitasi

sosial dasar bagi setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan anak terlantar di dalam panti.

Kebutuhan Keberadaan sarana rehabilitasi sosial seperti panti bagi lanjut usia terlantar, panti asuhan bagi anak-anak terlantar, dan tempat-tempat rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menangani masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Oleh sebab itu sebagai bagian dari pelayanan dasar, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan, memberikan dan melakukan pembinaan sarana pelayanan tersebut.

Sarana pelayanan sosial cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Hal ini dijelaskan sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sarana pelayanan sosial ini dapat berupa Lembaga, kelompok, dan juga perorangan yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan adanya sarana pelayanan sosial ini dirasakan sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada PPKS, karena program dan kegiatan dari pemerintah saja memang belum cukup untuk dapat menampung dan memberikan pelayanan kepada seluruh PPKS yang ada. Salah satu sarana pelayanan sosial yang banyak memberikan layanan sosial terhadap PPKS adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial berbentuk Panti di Provinsi Riau tahun 2023 khususnya yang berbadan hukum milik masyarakat secara keseluruhan berjumlah 98 Panti, terdiri dari panti yang menangani anak terlantar sebanyak 94 panti, panti yang melaksanakan pelayanan bagi disabilitas sebanyak 3 panti, dan yang melayani lanjut usia terlantar milik masyarakat sebanyak 1 panti. Adapun sebarannya seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.91.
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Klien
1	Kuantan Singingi	2	55
2	Indragiri Hulu	5	234
3	Indragiri Hilir	3	51
4	Pelalawan	2	78
5	Siak	5	149
6	Kampar	25	864
7	Rokan Hulu	6	151
8	Rokan Hilir	7	329
9	Bengkalis	10	459
10	Kep. Meranti	1	40
11	Pekanbaru	21	698
12	Dumai	11	430
13	Provinsi Riau	4	259
Jumlah		102	3.797

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2023

Keberadaan Panti Sosial yang tersedia bila dibanding dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, dan lanjut usia terlantar yang memerlukan panti, masih jauh dari mencukupi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan panti sosial belum dapat sepenuhnya menampung PPKS yang memerlukan layanan di dalam panti. Adapun jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.92.
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Provinsi Riau Tahun 2018–2023

No	Jenis PPKS	Tahun					
		2018 (Jiwa)	2019 (Jiwa)	2020 (Jiwa)	2021 (Jiwa)	2022 (Jiwa)	2023 (Jiwa)
1	Anak Nakal	262	379	297	297	456	330
2	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	142	4	154	154	91	99
3	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	118	1	58	58	80	22
4	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	11.156	2	-	-	37	49
5	Korban Tindak Kekerasan	84	4	9	9	63	55
6	Korban Trafficking	43	43	29	29	1	13
7	Kelompok Minoritas	59	59	8	8	20	5
8	Anak Jalanan	96	91	142	142	125	43
9	Pengemis	104	316	153	153	132	145
10	Gelandangan	678	316	263	263	186	250
11	Pemulung	429	429	160	160	6	352
12	Bekas BWBLP	400	497	91	91	15	380
13	Orang Dengan HIV/AIDS (OD HA)	233	611	555	555	158	892
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	999	648	83	83	90	418
15	Korban Bencana Sosial	357	774	817	2.419	1.156	579
16	Tuna Susila	269	1.019	211	211	43	104
17	Komonitas Adat Terpencil	8.646	2.405	5.914	5.914	20.775	1.198
18	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	1.309	2.706	1.477	1.477	1.001	1.970
19	Anak Balita Terlantar	4.563	4.441	14	14	32	6.190
20	Penyandang Cacat (Disabilitas)	8.731	7.829	10.561	10.561	11.275	7.659
21	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	10.992	10.992	-	-	43	2.665
22	Korban Bencana Alam	8.034	33.807	4.520	27.458	32.933	17.728
23	Anak Terlantar	37.869	36.152	751	751	4.977	35.047
24	Lanjut Usia Terlantar	27.722	59.523	33.895	33.895	5.710	32.253
25	Fakir Miskin *)	500.440	490.720	483.390	500.810	485.030	485.660
26	Keluarga Rentan	-	-	-	-	37	49
TOTAL POPULASI PPKS		623.735	653.768	543.552	585.512	564.472	594.155

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2023

*) BPS Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PPKS di provinsi Riau tahun 2023 adalah sebanyak 594.115 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 29.683 jiwa atau sekitar 5 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sejumlah PPKS ini ada yang diberikan layanan di dalam panti dan di luar panti. Pelayanan di dalam panti khususnya untuk rehabilitasi sosial dasar sesuai kewenangannya menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk din luar panti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk PPKS yang dilayani di dalam panti adalah anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis. Sedangkan PPKS lainnya dilayani di luar panti.

Disamping perlunya penyediaan panti untuk pemerlu pelayanan sosial tertentu, kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi pemerlu pelayanan sosial lainnya perlu terus dioptimalkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan sosial dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jumlah PPKS yang terbesar terlihat dari jenis PPKS Fakir Miskin. Data Fakir Miskin yang ada di Provinsi Riau merupakan data yang berasal dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sejumlah warga masyarakat yang masuk dalam database tersebut ada yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa bansos PKH dan Bantuan Sembako ataupun bantuan lainnya, namun ada juga yang belum tersentuh sama sekali dari bantuan manapun, dalam hal ini statusnya masih berupa daftar tunggu atau bahkan tidak masuk dalam DTKS yang artinya tidak terjangkau sama sekali dengan informasi dan pendataan. Hal ini dikarenakan kuota bantuan sosial tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di dalam DTKS. Selain hal tersebut permasalahan *inclusion error* dan *exclusion error* masih menjadi isu utama dalam penerimaan bantuan sosial di berbagai daerah sehingga pemerataan bantuan yang tepat sasaran masih belum dapat dicapai.

Angka PPKS yang begitu besar selain dari faktor jumlah masyarakat miskin sebagaimana disebutkan di atas juga disebabkan akibat kebencanaan. Provinsi Riau merupakan daerah yang rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan sehingga masyarakat mudah terpapar bencana dan menjadi korban bencana. Selain itu tingginya angka migrasi yang masuk ke Riau berpotensi meningkatkan angka pemerlu pelayanan

social, hal ini patut menjadi pertimbangan kebijakan dalam penanganan masalah sosial ini kedepan.

Indikator dalam menangani PPKS adalah dengan melihat jumlah PPKS yang terlayani dengan membandingkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang dilayani melalui rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberian modal kerja dan pelatihan pengembangan keterampilan usaha dengan jumlah masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah keseluruhan PPKS yang ada. Jumlah PPKS yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93.
Persentase Jumlah PPKS yang Tertangani di
Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS yang tertangani *)	-	-	-	205.524	199.820	208.388
2	Jumlah PPKS yang ada	623.735	653.768	543.552	585.512	564.472	594.155
3	Persentase PPKS yang tertangani	-	-	-	35,10	35.39	35.07

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2023

*)Tahun 2021 dan 2023, termasuk bantuan PKH dari Pemerintah Pusat), tahun 2018 – 2020 hanya bantuan Pemda

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PPKS yang tertangani bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan jumlah PPKS tergantung dari jumlah jenis PPKS yang tidak semuanya bersifat tetap. Untuk jenis PPKS seperti fakir miskin, korban bencana, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandang pengemis jumlahnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Hal ini tidak dapat diprediksi karena permasalahan sosial yang terjadi dan dialami masyarakat tidak dapat dikendalikan. Namun yang menjadi fokus pelayanan adalah bagaimana seharusnya kualitas pelayanan tersebut semakin meningkat dan pemerintah selalu ada memberikan pelayanan Ketika dibutuhkan. Upaya ini salah satunya adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, standar pelayanan pada SPM Bidang Sosial di daerah provinsi yaitu :

1. Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial.

2. Rehabilitas sosial anak telantar di dalam panti sosial.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar dan lanjut usia telantar di dalam panti sosial, dengan berbagai permasalahan antara lain: a) tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus; b) rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; c) masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Sedangkan rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial antara lain : a) Kepala keluarga berusia 19 tahun sampai dengan 60 tahun; b) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus; c) tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan d) tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan masyarakat yang peduli. Selanjutnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi untuk persatu kali kejadian bencana dengan kriteria a) jumlah pengungsi sebanyak 51 orang sampai dengan 100 orang; b) dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah; dan c) adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap PPKS, maka sumber utama selain pemerintah adalah dengan mengikutsertakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan kesejahteraan sosial PPKS berperan melalui penguatan kapasitas dan motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS. Adapun data pemberdayaan PSKS oleh Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.94
Penguatan Kapasitas PSKS Tahun 2017 – 2021

Tahun 2017	Populasi PSKS	4573
	PSKS diberdayakan	PSM = 96 ; TSKK = 158 KT = 60
Tahun 2018	Populasi PSKS	5181
	PSKS diberdayakan	PSM = 36 ; TSKK = 166 ; KT = 60
Tahun 2019	Populasi PSKS	4573
	PSKS diberdayakan	PSM = 96 ; TSKK = 158 KT = 60
Tahun 2020	Populasi PSKS	4573
	PSKS diberdayakan	PSM = 96 ; TSKK = 158 KT = 60
Tahun 2021	Populasi PSKS	5181
	PSKS diberdayakan	PSM = 36 ; TSKK = 166 ; KT = 60

Adapun Kondisi PSKS yang menjadi sasaran garapan Dinas Sosial tahun 2019 – 2024 terdiri atas:

Tabel 2.95
Data PSKS Sasaran Garapan Dinas Sosial Tahun 2019 – 2024

No	Jenis PSKS	Jumlah
1.	Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	167 Lembaga
2.	Karang Taruna	1.153 Lembaga
3.	Pekerja Sosial Masyarakat	1140 Orang
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	166 Orang
5.	Dunia Usaha	433 Perusahaan

Dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana keberperananan PSKS di dalam upaya kesejahteraan sosial tersebut, program unggulan yang bernilai ungu kit baik dalam memau upaya kesejahteraan sosial ini terus dicanangkan. Salah satunya adalah dengan membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS SLRT) di tingkat Kabupaten Kota hingga tingkat desa/kelurahan.

Dari data yang dihimpun melalui Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, Jumlah PUSKESOS SLRT yang ada di Provinsi Riau pada Tahun 2019 hanya sebanyak 6 PUSKESOS Desa/Kelurahan dan 3 PUSKESOS Kabupaten/Kota (Siak, Kampar, dan

Pekanbaru) yang masing-masing memiliki 2 PUSKESOS Desa/Kelurahan. Pada tahun 2019 pula Kabupaten Siak berhasil menambah pendirian PUSKESOS Desa/Kelurahan menjadi 131 PUSKESOS SLRT.

Penambahan Jumlah PUSKESOS SLRT kembali terjadi pada Tahun 2021 setelah pada tahun sebelumnya (2020) tidak ada penambahan pendirian PUSKESOS SLRT. Penambahan tersebut adalah penambahan 18 Pukesos Desa/Kelurahan dan 9 Puskesmas Kab/Kota (Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti, Kuansing, Inhil, Inhu, Rohil, Rohul, Pelalawan), masing-masing 1 Puskesmas Kab/Kota dan 2 Puskesmas Desa/Kelurahan.

2.5.6 Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial

Dasar hukum Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100%. Secara rinci capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96.
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial
Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2023

No	Jenis SPM Sosial	Indikator	Capaian			Capaian Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana
			2021	2022	2023	2023
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	100	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	100	100	100	100

No	Jenis SPM Sosial	Indikator	Capaian			Capaian Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana
			2021	2022	2023	2023
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	100	100	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100	100	100	100

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2023 telah mencapai hasil maksimal. Hal ini bisa dilihat dari masing- masing capaian indikatornya.

Untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pada bagian ketujuh pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah Provinsi terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti khususnya bagi disabilitas daksa terlantar dilaksanakan melalui UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa. UPT ini beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 57 KM 9 Rumbai Pekanbaru. UPT yang berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 ini memiliki kapasitas sebanyak 30 orang.

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal berupa :

- a) Penyediaan Permakanan
- b) Penyediaan Sandang
- c) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- d) Penyediaan Alat Bantu
- e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
- f) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- g) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- h) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
- i) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- j) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- k) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Adapun jumlah pemerlu pelayanan khususnya disabilitas yang sudah dilayani dalam kurun 5 tahun ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.97
Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani pada
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa dari Tahun 2017-2021

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	0	0	7	0	6
2	Perempuan	0	0	12	0	9
	Jumlah	0	0	19	0	15

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah yang disabilitas terlantar yang dilayani berkisar di bawah angka 20 orang. Pada tahun 2017 dan 2018 pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa belum memiliki klien yang dilayani. Sedangkan untuk tahun 2020 UPT juga tidak menyelenggarakan pelayanan dikarenakan puncak pandemic *Covid-19* sehingga kegiatan mengumpulkan orang banyak tidak dilaksanakan dengan menimbang protokol Kesehatan.

Untuk data klien di dalam panti pada pelayanan di Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.98
Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani
Tahun 2022 pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa

Jenis Kelamin		Asal		Tahun Masuk	
Laki-laki	Perempuan	Provinsi /Kab/Kota	Jumlah	Tahun	Jumlah
9	5	Pekanbaru	7	2022	14
		Indragiri Hilir	5		
		Rokan Hilir	2		

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah yang disabilitas terlantar yang dilayani pada tahun 2022 berjumlah 14 orang. Dari jumlah ini terdapat sebanyak 9 orang yang merupakan jenis kelamin laki-laki sedangkan 5 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Disabilitas terlantar ini berasal dari Pekanbaru sebanyak 7 orang, Indragiri Hilir sebanyak 5 orang, dan Rokan Hilir sebanyak 2 orang. Klien yang dilayani ini merupakan yang masuk pada tahun 2022. Jadi proses pelayanan di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa merupakan pelayanan satu tahun dengan proses terminasi akhir di akhir tahun pelayanan.

Sebagai salah satu panti yang bergerak dalam pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas daksa terlantar, UPT ini memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.99
Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Tahun 2022

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Kantor	1	Cukup baik
2	Asrama	6	Belum sesuai standar
3	Ruang Kelas / Teori	4	Belum sesuai standar
4	Ruang Praktek Keterampilan	3	Belum sesuai standar
5	Rumah Jaga	1	Cukup
6	Rumah Petugas	4	Cukup
7	Ruang Pamer	1	Cukup
8	Gudang dan Garase	1	Cukup

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
9	Lapangan Upacara	1	Cukup
10	Water Supply	1	Cukup
11	Sarpras Olahraga (Futsal, Sepak Takraw, Volley Ball, tenis Meja, Fitness Center)	4	Belum sesuai standar
12	Pagar	2	Cukup
13	Alat Kesenian /Band	1	Belum sesuai standar
14	Mobil Operasional	1	Belum sesuai standar

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, 2022

Dari beberapa sarana prasarana yang ada masih terdapat permasalahan sehingga belum sesuai dengan standar pelayanan. Bangunan Gedung UPT belum memiliki aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas yang dibutuhkan seperti *handrail*, *ramp* atau bidang miring, kloset duduk di asrama, dan kelengkapan lainnya untuk penyandang disabilitas daksa. Selain permasalahan tersebut, kondisi di beberapa bangunan Gedung UPT sudah mengalami kerusakan mulai dari skala ringan hingga berat dikarenakan faktor usia bangunan yang memang sudah lama.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, standar asrama yang diperlukan adalah :

- Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran 4,5 m² per orang;
- Kamar mandi yang akses terhadap penyandang disabilitas dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 penerima layanan;
- Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;
- Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya.

Selain pelayanan bagi penyandang disabilitas daksa, terdapat juga layanan bagi penyandang disabilitas mental. Layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas mental dilaksanakan melalui UPT Bina Laras. UPT Bina Laras berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 139 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pelaksana Teknis "Bina Laras". UPT yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.20 Muara Fajar Rumbai Pekanbaru ini memiliki kapasitas sebanyak 30 orang, dan direncanakan akan dilakukan penambahan kapasitas pada tahun 2023 menjadi 50 orang.

Data jumlah WBS dari 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.100
Data Penyandang Disabilitas Mental Terlantar yang dilayani pada
UPT Bina Laras dari 2017 - 2021

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	30	30	30	30	30
2	Perempuan	-	-	-	-	-
	Jumlah	30	30	30	30	30

Sumber : UPT Bina Laras, 2022

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah Warga Binaan Sosial (WBS) pada UPT Bina Laras sebanyak 30 orang (sesuai kapasitas). Jumlah WBS pun seluruhnya laki-laki. Hal ini dikarenakan sarana prasarana yang tersedia belum mendukung untuk dilaksanakan pelayanan bagi WBS dengan gender perempuan.

Untuk pelayanan pada UPT Bina Laras adalah sebagai berikut :

Tabel 2.101
Data Warga Binaan Sosial UPT Bina Laras yang dilayani Tahun 2022

Jenis Kelamin		Asal		Tahun Masuk	
Laki-laki	Perempuan	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah	Tahun	Jumlah
30	0	Kota Pekanbaru	10	2015	6
		Kabupaten Kampar	8	2016	6
		Kabupaten Siak	3	2017	1
		Kabupaten Indragiri Hilir	1	2018	7
		Kabupaten Pelalawan	1	2019	5
		Kabupaten Rokan Hulu	1	2020	3
		Kabupaten Kepulauan Meranti	1	2022	2
		Kepulauan Riau	1		
		Sumatera Barat	1		
		Lampung	1		
		Sulawesi Tenggara	1		
		Malaysia	1		

Sumber : UPT Bina Laras, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa WBS yang dialayani berasal dari berbagai daerah mulai dari dalam Provinsi Riau sendiri seperti Kabupaten Kampar, kepulauan Meranti, Pekanbaru, Siak, Indragiri Hilir, dan Pelalawan, juga ada yang dari Provinsi lain seperti Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, dan yang terjauh Sulawesi Tenggara, dan satu orang dari Malaysia.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa WBS yang dilayani mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2022. WBS yang telah lama berada di UPT Bina Laras merupakan WBS yang memang sudah tidak memiliki keluarga lagi di daerah asal dan tidak dapat dilakukan penelusuran keluarga.

Kondisi sarana prasarana UPT Bina Laras dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.102
Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Bina Laras Tahun 2022

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Asrama	4	Perawatan ringan, perlu penambahan
3	Gedung Tempat Makan	1	Perawatan ringan
4	Gedung Keterampilan	1	Perawatan ringan
5	Ruang Isolasi	1	Perlu penambahan
6	Gedung Tempat Belajar	1	Perlu penambahan
7	Rumah Petugas	1	Perlu penambahan
8	Pos Jaga	1	Perlu penambahan
9	Musholla	1	Perawatan ringan
10	Lavangan Volley / Badminton	1	Perawatan ringan
11	Taman	1	Perawatan
12	Kebun dan Kolam	1	Perlu penataan

Sumber : UPT Bina Laras, 2022

2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;

UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak merupakan panti yang didirikan guna melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Layanan yang diberikan adalah :

- a) Pengasuhan
- b) Penyediaan Makanan
- c) Penyediaan Sandang
- d) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
- f) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- g) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
- h) Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, NIK, dan KIA
- i) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- j) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- k) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- l) Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti

Kapasitas panti ini adalah 50 anak. Adapun data anak yang telah dilayani 5 tahun terakhir ini jika dilihat berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut.

Tabel 2.103
Data Anak Terlantar yang dilayani pada UPT PSPA dari Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laki-laki	26	17	16	20	19
2	Perempuan	21	17	15	17	17
	Jumlah	47	44	31	37	36

Sumber : UPT PSPA, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan pada UPT PSPA berkisar di bawah kapasitas 50 anak. Jumlah anak terlantar laki-laki pun dominan dibandingkan anak terlantar perempuan. Fasilitas pelayanan yang perlu untuk dilengkapi lagi antara lain bangunan asrama yang perlu direhab dan keperluan keseharian anak di dalam panti yang menjadi prioritas di tahun-tahun kedepannya.

Untuk pelayanan di tahun 2022 pada UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.104
Data Anak Terlantar yang dilayani UPT PSPA Tahun 2022

Jenis Kelamin		Asal		Tahun Masuk	
Laki-laki	Perempuan	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah	Tahun	Jumlah
19	18	Pekanbaru	23	2016	15
		Kampar	8	2018	2
		Rokan Hulu	5	2020	2
		Siak	1	2021	11
				2022	7

Sumber : UPT PSPA, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah klien yang ada di tahun 2022 adalah sebanyak 37 orang anak. Dari jumlah tersebut Sebagian berasal dari Kota Pekanbaru sebanyak 23 orang. Selebihnya berasal dari Kampar 8 orang, Rokan Hulu 5 orang, dan Siak 1 Orang. Anak yang dilayani di dalam panti ada yang telah menetap sejak tahun 2016 sebanyak 15 orang, dari tahun 2018 sebanyak 2 orang, dari tahun 2020 sebanyak 2 orang, tahun 2021 sebanyak 11 orang, dan yang baru masuk di tahun 2022 sebanyak 7 orang.

Sarana prasarana UPT PSPA merupakan salah satu perhatian yang diperlukan dalam pembanguna di tahun-tahun selanjutnya. Menurut standar pelayanan minimal, standar asrama yang perlu dipersiapkan adalah :

- Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m2 per orang;
- Kamar mandi yang mudah diakses anak dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 penerima layanan;
- Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;
- Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
- Memiliki tempat bermain anak.

Adapun kondisi sarana prasarana pada UPT Panti Sosial pengasuhan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.105
Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSPA Tahun 2022

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Aula / Ruang Pertemuan	4	Perawatan ringan, perlu penambahan
3	Poliklinik	1	Perawatan ringan
4	Perpustakaan	1	Perawatan ringan
5	Asrama Putra	1	Perlu Rehab
6	Asrama Putri	1	Perlu Rehab
7	Mushalla	1	Perawatan Ringan
8	Ruang konseling Psikolog dan Pekerja Sosial	1	Perawatan Ringan
9	Ruang Bimbingan Sosial	1	Perawatan ringan
10	Arena Olahraga dan permainan Anak	1	Perawatan ringan
11	Ruang keterampilan	1	Perawatan Ringan
12	Kebun	1	Perlu Pengelolaan

Sumber : UPT PSPA, 2022

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam panti;

Untuk melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dilakukan pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werddha Khusnul Khotimah dengan pelayanan yang diberikan sebagai berikut :

- a) Penyediaan Permakanan
- b) Penyediaan Sandang
- c) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- d) Penyediaan Alat Bantu
- e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
- f) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- g) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- h) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan
- i) Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- j) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- k) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

l) Pemulasaraan

Adapun data lansia terlantar yang telah dilayani dalam kurun 5 tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.106
Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani pada
UPT PSTW Khusnul Khotimah dari Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	35	35	38	41	41
2	Perempuan	45	45	42	39	32
	Jumlah	80	80	80	80	73

Sumber : UPT PSTW Khusnul Khotimah, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan yang dilaksanakan bagi lansia terlantar dari 2017 hingga 2020 mencapai 80 orang per tahunnya. Sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 73 orang. Lansia terlantar yang dilayani di dalam panti ini mendapatkan layanan kebutuhan dasar (sandang, pangan, tempat tinggal, keterampilan) serta pemulasaraan bagi lansia yang meninggal dunia. Sebagian besar lansia terlantar yang dilayani berjenis kelamin laki-laki.

Selain mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui anggaran kegiatan, bantuan dari masyarakat dan kelompok/Lembaga lainnya juga sering disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung ke panti. Hingga saat ini guna peningkatan pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal, Dinas Sosial Provinsi Riau terus berbenah dengan melengkapi setiap sarana prasarana yang dibutuhkan bagi lasia terlantar yang tinggal di Panti.

Data klien lansia terlantar yang dilayani pada tahun 2022 pada UPT PSTW Khusnul Khotimah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.107
Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani pada
UPT PSTW Khusnul Khotimah Tahun 2022

Jenis Kelamin		Asal		Tahun Masuk	
Laki-laki	Perempuan	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah	Tahun	Jumlah
41	32	Pekanbaru	41	2002	1
		Kampar	9	2007	1
		Siak	1	2008	2
		Pelalawan	1	2010	3
		Bengkalis	4	2012	2
		Inhil	5	2013	4
		Kuansing	1	2014	4
		Kep. Meranti	1	2015	4
		Rohul	1	2016	7
		Dumai	5	2017	8
		Batam	1	2018	2
		Sumatera Barat	1	2019	2
		Jambi	1	2020	12
		Kalimantan Barat	1	2021	14
				2022	7

Sumber : UPT PSTW Khusnul Khotimah, 2022

Sarana prasarana yang tersedia pada UPT PSTW Khusnul Khotimah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar. Adapun standar asrama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 adalah:

- a. Ramah terhadap lanjut usia;
- b. Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m² per orang;
- c. Kamar mandi yang akses terhadap lanjut usia dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 penerima layanan;
- d. Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;
- e. Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
- f. Menyediakan alat bantu kursi roda, kacamata, pemeriksaan dan pengukuran serta penyediaan alat bantu dengar, kruk, lansia walker, tripod, dan tongkat.

Adapun kondisi sarana prasarana pada UPT PSTW Khusnul Khotimah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.108
Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSTW Khusnul Khotimah
Tahun 2022

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Rumah Petugas	5	Perawatan ringan
3	Wisma	13	Perlu Rehab
4	Gedung Serba Guna	1	Perlu Rehab
5	Aula Keterampilan	1	Perlu Rehab
6	Mushalla	1	Perlu Rehab
7	Poliklinik	1	Perawatan Ringan
8	Dapur Umum	1	Perawatan Ringan
9	Tempat Pemandian Jenazah	1	Perlu Rehab
10	Gudang	1	Perlu Rehab
11	Ambulance	1	
12	Mobil Operasional L300	1	
13	Tempat Pemakaman Lansia	1000 m ²	Perlu perbaikan akses jalan

Sumber : UPT PSPA, 2022

- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;

Jenis pelayanan sosial ini diperuntukkan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis. Pemberian pelayanan dilakukan berbasis panti. Dinas Sosial Provinsi Riau belum memiliki panti khusus untuk melaksanakan pelayanan dalam panti termasuk struktur organisasi dan tupoksi dari Panti. Untuk itu agar pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis dapat tetap berjalan, selama ini dilakukan pelayanan menggunakan panti yang ada yaitu UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk.

Bentuk pelayanan yang diberikan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2018 adalah :

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemulangan ke Daerah Asal

Adapun data pelayanan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2.109
Data Gelandang dan Pengemis yang dilayani pada Dinas Sosial Provinsi Riau dari Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	-	-	-	10	-
2	Perempuan	-	-	-	10	-
	Jumlah	-	-	-	20	-

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan terhadap gelandang pengemis baru dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 20 orang gelandang pengemis. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan ini adalah bahwa Dinas Sosial Provinsi Riau hingga Tahun 2022 belum memiliki UPT khusus yang dapat melaksanakan pelayanan rehabilitasi dasar terhadap gelandang dan pengemis. Untuk pelayanan di Tahun 2020 dilaksanakan pada UPT PSMP Tengku Yuk yang merupakan panti sosial pelayanan terhadap anak nakal/anak berhadapan hukum.

2.1.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengukur TPAK adalah dengan membandingkan penduduk usia kerja dengan angkatan kerja pada tahun yang sama. Provinsi Riau pada tahun 2018 memiliki jumlah angkatan kerja 3.108.400 orang meningkat menjadi 3.314.790 orang pada tahun 2023 atau naik rata-rata 0,41 persen pada periode 2018-2023. Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja berjumlah 3.134,79 orang turun sebanyak 179,30 orang jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 3.3113,82 orang. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 mengalami kenaikan 0,59 poin yaitu sebesar 64,45 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 63,86 persen.

Sedangkan jumlah penduduk usia kerja juga meningkat dari 4.765.440 pada tahun 2018 menjadi 4.863.740 pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan selama periode 2018 sd 2023 sebesar 0,41 persen per tahun. Perkembangan TPAK Provinsi Riau selama tahun 2018 sampai dengan 2023 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.110.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Penduduk Usia Kerja	4.765.440	4.894.400	4.946.110	5.066.690	5.189.240	4.863.740	0,41
Angkatan Kerja	3.108.400	3.186.220	3.226.830	3.294.616	3.313.820	3.134.790	0,17
TPAK	65,23	65,1	65,24	65,03	63,86	64,45	-0,24

Sumber: BPS Provinsi Riau, Data diolah

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja, kegunaannya adalah sebagai kebijakan pemerintah untuk perluasan kesempatan kerja serta lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.111.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angkatan Kerja	3.108.398	3.186.222	3.226.825	3.294.616	3.313.818	3.134.790	0,17
Angkatan Kerja yang tidak bekerja.	192.801	190.143	203.837	145.669	144.890	132.454	-7,23
TPT (%)	6,20	5,97	6,32	4,42	4,37	4,23	-7,39

Sumber: BPS Provinsi Riau

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau disebut pengangguran selama kurun-waktu 6 tahun (2018-2023) di Provinsi Riau mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan terjadi penurunan yaitu -7,23 persen per tahun. Sementara jumlah angkatan kerja meningkat dengan rata-rata 0,17 persen per tahun. Jumlah pengangguran tercatat meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 203.837 jika dibandingkan dengan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 190.143 orang, hal ini disebabkan oleh keadaan pandemi *Covid-19*, yang berakibat banyak lapangan kerja yang mengurangi kapasitas pekerja, akan tetapi pada kuartal ke II tahun 2021 penyerapan tenaga kerja mulai menunjukkan trend membaik, sebagian pekerja yang terkena dampak pandemi pun mulai diserap industri.

c. Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tiap orang bukan warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna

menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada 2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam mempekerjakan TKA di Indonesia, yaitu :

- a. Aspek manfaat (*prosperity*) : mempekerjakan TKA harus membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi dan alih keahlian, mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
- b. Aspek keamanan (*security*): kebijakan penggunaan TKA terkait kebijakan lalu lintas orang asing. Masuknya tenaga kerja asing harus selektif dan dilaksanakan melalui kebijakan satu pintu dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan Negara.

Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjuk TKI sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Jumlah TKA yang mengurus izin bekerja di Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2013 - 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.112.
Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Mengurus Izin Kerja
di Provinsi Riau Tahun 2013-2023

No	Tahun	Jumlah TKA (orang)
1	2013	506
2	2014	406
3	2015	317
4	2016	291
5	2017	240
6	2018	121
7	2019	549
8	2020	391
9	2021	222
10	2022	230
11	2023	204

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja asing yang mengurus izin kerja di Provinsi Riau mengalami penurunan dari 506 orang pada tahun 2013 menjadi 204 orang pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan investasi yang membutuhkan tenaga kerja asing semakin berkurang dan masih terdapat perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja asingnya.

d. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Pengembangan kualitas sumber manusia manusia (SDM) menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah karena percepatan pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan SDM yang kompeten, produktif, unggul dan berdaya saing tinggi, dimana pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja diantaranya melalui reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi balai latihan kerja (BLK). Arah pengembangan kebijakan tersebut melalui *triple skilling* pelatihan vokasi, diawali dengan mencari pekerjaan: pekerja masa depan/pencari kerja membutuhkan pelayanan dan informasi, peningkatan dan pengakuan kompetensi, dan pasar kerja luar negeri. Kemudian, meningkatkan daya saing: (1) bagi pekerja diberikan *life-long learning*, *advanced skills*, pengakuan kompetensi di tempat kerja; (2) bagi perusahaan (BUMN, UMKM, dan *start-up*) melakukan peningkatan daya saing produk. Strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan cara penguatan kelembagaan, regulasi, SDM, kerjasama, sistem dan penguatan metode produktivitas, promosi produktivitas, penguatan pengukuran dan analisis produktivitas, dan *platform* digital produktivitas.

Impelementasi program peningkatan produktivitas untuk memudahkan anak muda usia produktif atau masyarakat mengakses layanan peningkatan produktivitas, membangun dan melatih para kader produktivitas yang nanti berkontribusi untuk peningkatan produktivitas di segala sektor, penguatan kolaborasi dengan para *stakeholder* produktivitas dalam pengembangan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas,

memperkuat fungsi hubungan industrial melalui pengembangan *collective bargaining for productivity* di semua perusahaan, membangun masyarakat produktif di setiap elemen masyarakat, dan mengembangkan layanan peningkatan produktivitas melalui digitalisasi sistem layanan agar program peningkatan produktivitas.

Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan, salah satu usaha yang dapat dilakukan Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau adalah melalui kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah. Konsultasi Produktivitas adalah proses peningkatan produktivitas melalui pendampingan penerapan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas oleh tenaga ahli bidang produktivitas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh instruktur produktivitas yang telah memiliki bekal teknis peningkatan produktivitas melalui pendidikan dasar instruktur produktivitas.

Dari hasil pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dari total 6.492 orang yang lulus pelatihan 2.868 terserap di industri yang ada atau sebesar 44.17 persen. Untuk produktivitas tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2023 paling besar penduduk bekerja di sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1.146.960 orang

Tabel 2.113.
Jumlah Peserta Pelatihan dan Penempatan Pelatihan Tahun 2023

No	Nama Lembaga	Alamat (Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Lulus Tahun 2023 (Orang)	Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terserap Industri Tahun 2023 (Orang)
1.	Balai Pelatihan dan Vokasi (BPVP) Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0	0
2.	BLK Industri Dumai	Kota Dumai	288	161
3.	BLK Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu	1.200	610
4.	BLK Indragiri Hulu	Kab. Indragiri Hulu	96	70
5.	BLK Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hilir	0	0
6.	BLK Bengkalis	Kab. Bengkalis	80	28
7.	BLK Siak	Kab. Siak	90	60
8.	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Seluruh Kab/Kota	3.306	1338
9.	Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)	Seluruh Kab/Kota	1.720	762
	Jumlah		6.492	2.868

Tabel 2.114.
Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah)	Penduduk Yang Bekerja (orang)	PDRB / Tenaga Kerja (Juta Rupiah)
	2023	2023	2023
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	149.361.107	1.146.960	13.022,35
B, Pertambangan dan Penggalian	80.730.224	43.021	187.653,06
C, Industri Pengolahan	176.290.055	236.877	
D, Pengadaan Listrik dan Gas	447.197	5.638	7.931,84
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	77.473	15.181	510,33
F, Konstruksi	48.756.790	179.126	27.219,27
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	55.636.273	523.429	10.629,19
H, Transportasi dan Pergudangan	4.300.023	102.891	4.179,20
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.498.894	207.327	1.205,29
J, Informasi dan Komunikasi	6.561.685	25.171	26.068,43
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	5.491.872	27.018	20.326,72
L, Real Estate	5.307.413	5.176	102.538,89
M, N, Jasa Perusahaan	27.576	48.681	56,65
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.354.724	117.133	7.986,41
P, Jasa Pendidikan	2.881.477	165.758	1.738,36
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.445.969	43.194	3.347,62
R, S, T, U, Jasa lainnya	2.659.736	109.753	2.423,38
PDRB ADHK	551.828.488	3.002.334	18.379,98

e. Pencari Kerja

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Persaingan dalam mencari kerja semakin ketat seiring menipisnya lowongan kerja akibat ketidakpastian ekonomi global. Oleh sebab itu para pencari kerja selalu dituntut untuk memiliki kemampuan atau hard skill tertentu agar dapat diterima perusahaan. Salah satu kuncinya adalah melatih skill atau kemampuan yang paling banyak dibutuhkan oleh berbagai industri.

Tabel 2.115.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023

No	Kabupaten Kota	2020		2021		2022		2023	
		Pencari Kerja	Ditempatkan	Pencari Kerja	Ditempatkan	Pencari Kerja	Ditempatkan	Pencari Kerja	Ditempatkan
1	Kuantan Singingi	327	0	244	-	42	-	239	0
2	Indragiri Hulu	924	0	847	30	1.189	394	359	31
3	Indragiri Hilir	386	0	289	-	195	-	264	9
4	Pelalawan	341	0	976	-	47	-	636	188
5	Siak	821	0	1.402	-	1.035	-	473	0
6	Kampar	1.443	0	740	-	1.550	-	842	0
7	Rokan Hulu	812	0	744	-	1.207	-	1.043	97
8	Bengkalis	1.163	761	1.449	2.665	1.568	26	1.505	99
9	Rokan Hilir	698	30	383	-	599	342	484	0
10	Kepulauan Meranti	588	0	732	244	942	427	263	6
11	Pekanbaru	5.062	3.048	3.625	1.214	2.968	2.547	4.675	2.470
12	Dumai	4.649	7	1.924	102	1.505	-	1.832	0
Provinsi Riau		17.214	3.846	13.355	4.255	12.847	3.736	12.615	2.900

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Perkembangan pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berfluktuatif. Dimana pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 409 orang, tahun 2022 turun sebanyak 519 orang, tahun 2023 turun sebanyak 836. Jika di bandingkan pada tahun 2020 jumlah pencari kerja mengalami penurunan sebanyak 4.599 hingga tahun 2023. Sedangkan pekerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 14.737 orang atau 26,30% dari total pencari kerja yaitu sebanyak 56.031 orang hingga tahun 2023. Hal ini masih dikategorikan rendah dari jumlah pencari kerja. Salah satu penyebab rendahnya pekerja yang ditempatkan karena banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi *Covid-19*, sehingga mereka mencari kerja kembali. Seiring melandainya pandemi *Covid-19* mendorong pulihnya ekonomi dan bisnis di dalam negeri. Hal itu pun membuat banyak orang yang telah kembali mendapatkan pekerjaan. Secara otomatis, jumlah pencari kerja mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

f. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja. Bentuk – bentuk Perlindungan pekerja sebagai berikut :

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarganya; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

Pemberian perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja dan mudah diakses bagi seluruh pekerja Indonesia, terlepas apakah mereka bekerja di sektor formal maupun informal. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa untuk adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, yang mempengaruhi

ekosistem industri dan ketidakpastian pasar dan secara langsung berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan kerja.

Mengambil hikmah dampak pandemi *Covid-19* yang mengancam jiwa pekerja dan menghantam ekonomi pekerja, peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terbukti memberikan perlindungan kepada pekerja dengan nilai manfaat yang diterima dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan pekerja ataupun keluarganya, Berikut ini jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2023.

Tabel 2.116.
Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten Kota	Tahun 2023		
		Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jumlah
1	Kampar	66.439	20.858	87.297
2	Indragiri Hulu	43.105	19.862	62.967
3	Bengkalis	75.880	50.218	126.098
4	Indragiri Hilir	50.466	15.624	66.090
5	Pelalawan	44.839	11.145	55.984
6	Rokan Hulu	42.580	18.379	60.959
7	Rokan Hilir	45.425	15.970	61.395
8	Siak	50.518	14.487	65.005
9	Kuantan Sengingi	26.387	10.560	36.947
10	Kepulauan Meranti	1.645	1.228	2.873
11	Pekanbaru	119.654	53.953	173.607
12	Dumai	37.525	14.459	51.984
Provinsi Riau		604.463	246.743	851.206

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Dari jumlah angkatan kerja Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 3.134.790 orang yang mempunyai Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau sebesar 27,15%.

2.1.4.2.2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau.

Tabel 2.117.
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	90,06	90,57	90,16	90,06	90,48	90,47
2	Indragiri Hulu	86,61	87,33	86,94	86,69	86,73	87,07
3	Indragiri Hilir	82,37	82,57	82,34	82,37	82,74	83,20
4	Pelalawan	88,50	88,51	88,06	88,73	88,94	89,37
5	Siak	88,52	88,58	88,62	88,69	88,79	88,93
6	Kampar	89,29	89,83	89,52	89,79	89,81	89,87
7	Rokan Hulu	81,85	82,13	81,88	82,12	82,44	82,72
8	Bengkalis	89,96	90,08	90,07	90,10	90,11	89,94
9	Rokan Hilir	84,86	85,22	84,91	84,65	85,13	85,38
10	Kepulauan Meranti	85,90	86,2	86,30	86,45	86,97	87,35
11	Kota Pekanbaru	92,97	93,12	93,01	93,27	93,63	93,89
12	Kota Dumai	90,82	90,86	90,66	90,72	90,74	90,92
Riau		88,37	88,43	88,14	88,38	88,71	88,98

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Ukuran dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sama dengan IPM, merupakan indikator yang berdampak dalam pembangunan serta memiliki kesetaraan harus diwujudkan bersama. Pada tabel berikutnya, digambarkan IPM Provinsi Riau berdasarkan data pilah laki-laki dan perempuan Tahun 2023.

Tabel 2.118.
IPM dan IPG Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2023

	Kabupaten / Kota	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita		IPM		IPG
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kuantan Singingi	67,19	71,16	13,15	13,70	9,16	8,63	16.169	8.282	75,76	68,54	90,47
2	Indragiri Hulu	68,77	72,71	12,52	12,90	8,64	8,19	16.940	6.836	75,62	65,84	87,07
3	Indragiri Hilir	66,68	70,65	12,16	12,62	7,55	7,23	17.352	5.345	72,93	60,68	83,20
4	Pelalawan	70,05	74,05	12,56	13,06	8,96	8,54	19.678	8.761	78,05	69,75	89,37
5	Siak	69,69	73,68	13,01	12,86	10,09	9,83	19.352	8.726	79,68	70,86	88,93
6	Kampar	69,49	73,46	13,55	13,90	9,69	9,11	17.432	8.568	78,69	70,72	89,87
7	Rokan Hulu	68,91	72,86	13,41	12,87	8,93	8,68	17.819	5.623	77,49	64,10	82,72
8	Bengkalis	69,84	73,83	13,30	13,97	10,01	9,43	18.376	8.694	79,49	71,49	89,94
9	Rokan Hilir	69,07	73,02	12,73	13,41	8,87	8,21	15.788	5.838	75,66	64,60	85,38
10	Kep. Meranti	66,47	70,45	12,85	13,01	8,14	7,87	13.084	5.844	71,85	62,76	87,35
11	Pekanbaru	71,02	75,13	15,61	15,57	11,97	11,93	21.403	13.287	86,19	80,92	93,89
12	Dumai	69,73	73,71	13,24	13,51	10,38	10,12	17.991	9.207	79,64	72,41	90,92
13	RIAU	70,28	74,29	13,22	13,58	9,47	9,20	17.130	7.681	78,30	69,67	88,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau pada tahun 2023 dengan partisipasi laki-laki sebesar 78,30% sedangkan partisipasi perempuan sebesar 69,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Provinsi Riau menunjukkan masih di bawah laki-laki dan perlu upaya peningkatan. Namun bila dibandingkan dengan komponen pembentuk IPM, keterlibatan perempuan pada angka harapan hidup sebesar 74,29 yang lebih tinggi dari pada laki-laki sebesar 70,28 dan keterlibatan perempuan pada harapan lama sekolah sebesar 13,58 lebih tinggi daripada laki-laki sebesar 13,22. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki peranan dalam pembentukan IPM maupun IPG itu sendiri.

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Semakin tinggi tingkat keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan politik semakin berdaya perempuan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.119.
Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	61,63	57,64	57,12	56,32	57,75	61,81
2	Indragiri Hulu	59,00	52,62	51,71	51,46	51,32	56,27
3	Indragiri Hilir	59,59	64,83	64,45	64,50	65,33	65,47
4	Pelalawan	54,59	47,45	49,99	49,48	51,39	54,51
5	Siak	45,58	42,77	42,38	42,19	43,03	42,46
6	Kampar	61,18	54,51	54,95	53,62	55,56	55,48
7	Rokan Hulu	62,48	52,81	52,08	51,71	52,40	52,15
8	Bengkalis	53,53	54,27	54,10	53,50	54,23	54,01
9	Rokan Hilir	49,99	62,23	62,59	61,94	59,51	59,18
10	Kepulauan Meranti	64,86	62,57	62,06	61,88	61,72	63,19
11	Kota Pekanbaru	61,05	67,79	69,23	68,63	68,00	68,04
12	Kota Dumai	59,90	56,58	52,97	52,54	52,58	52,93
13	Provinsi Riau	75,73	69,17	68,70	70,59	71,16	72,29

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Capaian IDG Provinsi Riau selama kurun tahun 2018-2023 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari 75,73 pada tahun 2018 menurun menjadi 72,29 pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan -3,97 persen per tahun.

Tabel 2.120.
Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Tenaga Profesional dan
Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)
1	Kuantan Singingi	5,88	48,29	36,34
2	Indragiri Hulu	5,00	51,13	29,02
3	Indragiri Hilir	13,33	44,16	29,93
4	Pelalawan	5,71	55,32	27,98
5	Siak	2,50	54,40	19,98
6	Kampar	8,89	49,39	23,59
7	Rokan Hulu	4,44	45,31	26,33
8	Bengkalis	8,89	50,41	22,98
9	Rokan Hilir	15,56	59,64	23,04
10	Kep. Meranti	13,33	48,60	27,62
11	Pekanbaru	20,00	46,76	27,19
12	Dumai	6,67	49,48	23,48
13	Provinsi Riau	23,08	49,41	27,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menyumbang persentase tertinggi adalah keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 49,41 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar perempuan berprofesi sebagai tenaga profesional dalam berbagai bidang pekerjaan yang ada di Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagai penyumbang besar partisipasi perempuan dalam pembangunan sebesar 59,64 persen. Selanjutnya penyumbang IDG terendah adalah Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 23,08 persen, hal ini masih dibawah batas persyaratan keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 30%.

2.1.4.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat ukur untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator ketersediaan pangan mengukur seberapa baik suatu wilayah dalam menyediakan bahan pangan pokok bagi penduduknya yang meliputi produksi pangan lokal dan ketersediaan stok pangan. Indikator keterjangkauan menunjukkan kemampuan penduduk dalam mendapatkan pangan yang mencakup aspek ekonomi seperti pendapatan, harga pangan dan distribusi pangan. Sedangkan indikator pemanfaatan pangan menunjukkan bagaimana penduduk memanfaatkan pangan yang tersedia, meliputi kualitas gizi, kebiasaan makan dan keamanan pangan yang dikonsumsi. Di samping tiga aspek utama tersebut, terdapat indikator stabilitas pangan untuk menilai keberlanjutan ketersediaan dan akses pangan di suatu wilayah yang mencakup aspek ketahanan terhadap gangguan seperti bencana alam, perubahan iklim dan fluktuasi ekonomi. Selanjutnya skor IKP Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.121.

Tabel 2.121.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
Tahun 2018 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	70,08	76,48	67,85	72,64	70,70	68,94
2	Indragiri Hulu	53,79	60,14	66,58	64,66	57,96	59,35
3	Indragiri Hilir	66,21	67,08	67,48	69,15	68,38	69,29
4	Pelalawan	66,87	68,62	60,51	66,16	69,68	69,49
5	Siak	70,78	76,60	77,12	76,84	76,87	74,74
6	Kampar	52,74	63,97	55,51	61,78	56,28	57,59
7	Rokan Hulu	57,76	54,25	53,24	54,92	54,91	56,76
8	Bengkalis	58,18	60,36	65,95	61,15	62,61	61,68
9	Rokan Hilir	59,73	71,42	66,63	67,48	66,46	67,45
10	Kepulauan Meranti	48,94	52,07	37,58	38,12	68,06	70,47
11	Pekanbaru	81,15	85,38	82,85	90,56	86,56	89,81
12	Dumai	63,67	69,95	68,15	78,64	72,63	78,61
RIAU		-	63,37	64,12	66,84	67,59	68,68

Sumber : Badan Pangan Nasional 2024

Berdasarkan tabel 2.121, skor atau nilai IKP Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau umumnya mengalami peningkatan pada tahun 2023, kecuali beberapa kabupaten seperti Indragiri Hulu, Siak dan Bengkalis yang mengalami penurunan satu sampai dua poin. IKP Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 68,68 atau mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2019. Kabupaten/Kota dengan skor IKP tertinggi tahun 2023 adalah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, sedangkan nilai IKP terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kondisi ketahanan pangan di wilayah tertentu sehingga dapat merekomendasikan intervensi yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Kondisi eksisting ketersediaan beras dari sisi produksi lokal Provinsi Riau saat ini baru dapat memenuhi 25% total kebutuhan. Demikian juga dengan jagung yang bukan merupakan makanan utama penduduk Riau, juga mengalami penurunan baik secara produksi maupun konsumsi. Perkembangan rasio produksi dan konsumsi beras dan jagung dapat dilihat pada tabel 2.122.

Tabel 2.122.
Perkembangan Rasio Produksi dan Kebutuhan Beras dan Jagung
di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

Komoditas	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi (ton)						
1. Beras	208.565	131.816,96	139.851,83	124.800,58	122.561	118.209
2. Jagung	37.910	56.373	155.252	21.898	9.098	8.984,60
Konsumsi (ton)						
1. Beras	676.039	573.077	637.270	525.214	478.449	87.100*
2. Jagung	45.658	46.710	47.031	47.760	48.644	6.000*
Perimbangan (ton)						
1. Beras	-467.474	-441.260	-497.418	-400.414	-355.888	31.109*
2. Jagung	-7.748	9.663	108.221	- 25.862	-39.546	2.984,60*
Rasio						
1. Beras	0,31	0,23	0,22	0,24	0,26	1,36*
2. Jagung	0,83	1,21	3,30	0,46	0,19	1,50*

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2023

*Angka sementara

Berdasarkan tabel 2.122, produksi beras Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai dengan 2023 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dimana produksi beras tahun 2023 sebesar 118.209 ton atau menurun sebesar 43% dibanding tahun 2018. Sedangkan produksi jagung mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam periode enam tahun terakhir, dimana produksi tahun 2023 sebesar 8.984 ton atau menurun sebesar 76% dibanding tahun 2018. Terjadinya penurunan produksi beras selama beberapa tahun terakhir ini disebabkan karena luas tanam semakin menurun akibat konversi lahan sawah menjadi non sawah, menurunnya daya dukung lingkungan, perubahan iklim yang menyebabkan perubahan masa tanam dan munculnya hama baru, kondisi pengairan yang belum optimal, namun yang tidak kalah penting adalah budaya petani Riau yang subsisten. Petani merasa cukup dengan hasil yang diperoleh dari masa tanam satu kali, di samping itu juga bertani padi bukan merupakan mata pencaharian utama petani. Sedangkan penurunan produksi jagung disebabkan disebabkan karena petani Riau bukan merupakan petani jagung, sehingga penanaman hanya akan dilakukan jika ada program dari Pemerintah.

Selanjutnya kebutuhan konsumsi beras penduduk Riau masih menggunakan angka tahun 2022, karena angka tahun 2023 masih bersifat sementara. Konsumsi beras sangat berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2022 sebesar 478.449 ton atau menurun sebesar 29% dari tahun 2018. Perubahan konsumsi beras dapat disebabkan oleh perubahan pola makan, harga beras serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Pemerintah telah mendorong program diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber utama karbohidrat. Alternatif pangan pengganti beras berbasis sumber daya lokal di Provinsi Riau adalah sagu. Saat ini sudah banyak dikembangkan dalam berbagai bentuk olahan dan cukup disukai oleh masyarakat Riau. Peningkatan produksi dan produktivitas sayuran dan buah-buahan harus terus diupayakan karena merupakan bagian penting dalam pembangunan pangan dalam rangka pemenuhan pola gizi seimbang masyarakat. Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditi Sayur-sayuran dan Buah-buahan di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.123.

Tabel 2.123.
Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditi Sayur-sayuran dan Buah-buahan di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Komoditas	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi (ton)						
1. Sayuran	106.035	81.893	106.680	94.484	94.108	77.843,45
2. Buah-Buahan	347.473	646.358	680.396	717.846	589.139	699.343,79
Konsumsi (ton)						
1. Sayuran	280.093	332.552	340.020	326.308	332.602	45.500*
2. Buah-Buahan	176.506	186.843	191.039	202.353	206.107	28.500*
Perimbangan (ton)						
1. Sayuran	(174.058)	(250.659)	(233.340)	(231.824)	(238.494)	28.248*
2. Buah-Buahan	170.967	459.515	489.357	515.493	383.032	583.626*
Rasio						
1. Sayuran	0,38	0,25	0,31	0,29	0,28	1,62*
2. Buah-Buahan	1,97	3,46	3,56	3,55	2,86	21,48*

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2023

*Angka sementara

Berdasarkan tabel, jumlah produksi tanaman sayuran dari tahun 2018-2023 mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2023 sebesar 77.843,45 ton atau menurun sebesar 27% dari tahun 2018. Sebaliknya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap produksi buah-buahan di Provinsi Riau selama enam tahun terakhir. Produksi buah-buahan pada tahun 2023 sebesar 699.343,79 ton atau meningkat 100% dibanding tahun 2018. Produksi buah-buahan Provinsi Riau sudah surplus jika dilihat dari kebutuhan konsumsi buah-buahan penduduk Riau sesuai anjuran FAO sebesar 73 kg/kapita/tahun.

Seperti halnya beras, penurunan produksi sayur dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau kegiatan non-pertanian lainnya. Ketidakstabilan pasar dan harga berpengaruh pada pendapatan petani sayur. Demikian juga keterbatasan atau tidak meratanya alat mesin pertanian pasca panen menyebabkan turunnya animo petani untuk memproduksi sayuran lebih banyak. Sementara peningkatan produksi buah-buahan selaras dengan kebijakan pemerintah Gerakan Menanam Buah. Beberapa komoditas unggulan buah Provinsi Riau antara lain jeruk, lengkeng dan durian. Selanjutnya konsumsi masih menggunakan angka tahun 2022. dimana pada tahun 2018 jumlah konsumsi sayuran di Provinsi Riau sebesar 280.093 ton dan terus menaik sehingga pada tahun 2022 sebesar 332.602 ton atau rata-rata kenaikan sebesar 4,72%. Sedangkan pada komoditi buah-buahan kenaikan konsumsi cenderung stabil dimana pada tahun 2018 sebesar 176.506 ton dan naik menjadi sebesar 206.107 ton pada tahun 2022 atau rata-rata kenaikan sebesar 3,97%.

Tabel 2.124.
Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditi Sayur-sayuran dan Buah-buahan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)		Konsumsi (Ton)		Rasio	
	Sayuran	Buah-Buahan	Sayuran	Buah-Buahan	Sayuran	Buah-Buahan
Kuantan Singingi	661,4	14.196,1	16.947	10.375	0,04	1,37
Indragiri Hulu	8.450,9	68.398,6	21.904	11.323	0,39	6,04
Indragiri Hilir	2.028,7	22.002,9	25.174	19.161	0,08	1,15
Pelalawan	1.206,6	3.305,2	22.892	13.727	0,05	0,24
Siak	12.562,9	111.420,3	27.268	15.281	0,46	7,29
Kampar	36.098,5	176.583,5	53.834	27.839	0,67	6,34
Rokan Hulu	11.220,1	92,356,5	31.873	16.955	0,35	5,45

Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)		Konsumsi (Ton)		Rasio	
	Sayuran	Buah-Buahan	Sayuran	Buah-Buahan	Sayuran	Buah-Buahan
Bengkalis	1.025,1	17.266,1	27.750	16.906	0,04	1,02
Rokan Hilir	6.014,6	24.763,7	35.818	23.110	0,17	1,07
Kep.Meranti	1.173,9	4.183,6	8.242	4.206	0,14	0,99
Pekanbaru	11.891,5	14.957,3	45.138	36.473	0,26	0,41
Dumai	1.773,9	39.705,3	15.762	10.751	0,11	3,69
Provinsi Riau	94.108,0	589.139,2	332.602	206.107	0,28	2,86

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kabupaten/kota yang menghasilkan produksi terbesar untuk komoditi sayuran adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Selain itu kabupaten/kota yang menghasilkan produksi terbesar untuk komoditi buah-buahan adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk Riau. Dimana semakin beragam konsumsi penduduk menunjukkan terpenuhinya kebutuhan zat gizi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesehatan penduduk. Skor PPH Provinsi Riau dan Kab./Kota se-Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.125

Tabel 2.125.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	81,20	84,90	84,9	84,10	90,70	89,40
2	Indragiri Hulu	86,00	88,70	87	84,20	82,70	92,70
3	Indragiri Hilir	81,50	86,40	85	81,00	81,90	85,30
4	Pelalawan	86,20	87,80	86	84,60	92,10	90,70
5	Siak	87,50	90,50	90,5	85,40	91,80	93,80
6	Kampar	85,50	86,10	86,1	86,20	91,90	90,40
7	Rohul	91,30	94,70	90,5	81,90	88,80	91,80
8	Bengkalis	79,70	82,40	82,5	83,00	88,30	89,70

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Rohil	86,60	87,40	86	85,20	92,70	81,40
10	Kep. Meranti	83,50	77,20	80	77,70	81,30	86,00
11	Pekanbaru	85,00	87,20	85	81,80	85,60	83,10
12	Dumai	81,90	82,40	82,5	82,90	88,60	87,90
Provinsi Riau		84,66	86,31	85,50	84,10	89,40	88,90

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Tahun 2024

Berdasarkan tabel skor Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk Riau tahun 2018 – 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 skor PPH Provinsi Riau adalah sebesar 88,90 atau meningkat 5% dari tahun 2018. Kab./Kota dengan skor PPH tertinggi adalah Kabupaten Siak dan Indragiri Hulu dengan skor 93,80 dan 92,70. Sedangkan Kab./Kota dengan skor PPH terendah adalah Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru dengan skor 81,40 dan 83,10. Beberapa hal yang mendukung peningkatan keragaman konsumsi pangan secara umum adalah: (1) Penyediaan pangan di tingkat pasar dan rumah tangga sudah merata; (2) Kesadaran konsumsi rumah tangga untuk mengkonsumsi makanan beragam, seimbang dan aman semakin tinggi; (3) Pendapatan penduduk untuk menjangkau komoditas pangan meningkat; (5) Kemampuan ibu rumah tangga dalam menyediakan makanan beragam, bergizi seimbang dan aman meningkat; (6) pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sudah mulai membudaya di tengah masyarakat. Tingkat konsumsi energi penduduk Provinsi Riau tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.126

Hal yang sangat penting dalam konsumsi pangan adalah konsumsi kalori/kapita/hari dari setiap penduduk karena konsumsi kalori juga menggambarkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk terutama dari sisi kecukupan gizi, khususnya kecukupan kalori dan protein. Tingkat konsumsi energi penduduk Provinsi Riau tahun 2018-2022, dijelaskan pada tabel dibawah.

Tabel 2.126
Konsumsi Energi Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Kkal/Kap/Hari					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	1.162	1.152	1.162	1.127	1.058,6	1.081
2	Umbi-Umbian	40	42	42	45	45,5	45
3	Pangan Hewani	263	245	268	266	285,5	298
4	Minyak dan Lemak	311	305	311	339	312,1	316
5	Buah Biji Berminyak	41	42	40	41	35,5	35
6	Kacang-Kacangan	39	45	39	38	51,9	52
7	Gula	90	91	93	93	85,6	73
8	Sayur dan Buah	91	93	91	93	111,1	110
9	Lain-Lain	0	0	26	36	36,5	38
Total Energi		2.081	2.039	2.015	2.072	2.022	2.048

Sumber Data: Survey Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan data diolah Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk total energi rata-rata mengalami fluktuatif. Konsumsi energi penduduk Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 2.048 kkal/kap/hari atau menurun sebesar 1,5% dari tahun 2018. Konsumsi energi terbesar berada kelompok pangan padi-padian sebesar 1.081 kkal/kap/hari, disusul kemudian minyak dan lemak sebesar 316 kkal/kap/hari, pangan hewani sebesar 298 kkal/kap/hari serta sayur dan buah sebesar 110 kkal/kap/hari. Idealnya untuk konsumsi energi pada sumber karbohidrat 50% dari total energi. Sedangkan dari tabel di atas padi dan umbi-umbian yang merupakan sumber karbohidrat berjumlah 1.126 Kkal/Kap/Hari, atau 55% dari total energi. Artinya pola konsumsi masyarakat Riau lebih dominan pada kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian. Selain kebutuhan karbohidrat pemenuhan protein juga harus di penuhi melalui sumber pangan utama. Konsumsi protein berdasarkan sumber pangan utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127.
Konsumsi Protein Penduduk Provinsi Riau Tahun 2018-2023
Dirinci Menurut Kelompok Bahan Pangan

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein (Gram/Kap/Hari)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	26,5	24,75	26,5	25,8	24,2	24,3
2	Umbi-Umbian	0,5	1,68	0,5	0,6	0,6	0,6
3	Pangan Hewani	21,6	16,3	22,8	23,0	25,4	25,3
4	Minyak dan Lemak	0	1,87	1,87	0	0	0,0
5	Buah Biji Berminyak	0,5	0,34	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Kacang-Kacangan	3,9	3,2	3,8	3,8	4,3	4,3
7	Gula	0	0,03	0	0	0	0,0
8	Sayur dan Buah	3,2	3,1	3,2	3,3	3,8	3,8
9	Lain-Lain	0	0	1,2	1,1	1,2	1,2
Total Protein		56,2	51,27	60,27	58,10	59,70	60,0

Sumber: Survey Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan dan data diolah Tahun 2023

Konsumsi protein penduduk Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 60,0 gram/kap/hari atau menurun sebesar 6,8% dari tahun 2018. Konsumsi protein terbesar berada kelompok pangan hewani sebesar 25,3 gram/kap/hari, disusul kemudian padi-padian sebesar 24,3 gram/kap/hari, kacang-kacangan sebesar 4,3 gram/kap/hari serta sayur dan buah sebesar 3,8 gram/kap/hari. Selama ini di Provinsi Riau ketersediaan pangan utama beras belum ada persoalan sekalipun jumlah produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan distribusi dari daerah lain berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme pasar. Gambaran ketersediaan beras di Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada tabel dibawah.

Tabel 2.128.
Ketersediaan Pangan Utama Beras Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023

No.	Kabupaten /Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	40.862	40.870	32.248	32.232	36.546	54.353
2	Indragiri Hulu	54.179	54.190	46.120	43.174	34.760	64.876
3	Indragiri Hilir	91.875	91.894	81.373	72.044	40.680	67.050
4	Pelalawan	55.818	55.830	50.963	56.258	34.268	95.719
5	Siak	59.205	59.217	47.592	52.349	43.465	74.948
6	Kampar	105.888	105.910	85.534	86.905	72.463	96.729
7	Rokan Hulu	81.568	81.585	74.154	87.501	76.222	79.553
8	Bengkalis	71.121	71.135	52.702	67.858	87.900	96.885
9	Rokan Hilir	86.460	86.478	75.374	83.693	11.640	78.339
10	Kep. Meranti	23.318	23.323	21.226	21.549	19.980	63.984
11	Pekanbaru	138.798	138.826	128.776	91.683	48.360	91.019
12	Dumai	37.862	37.870	33.082	50.207	44.400	53.475
	Jumlah	846.954	847.128	729.143	745.455	655.443	918.953

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Tahun 2023

*Angka Sementara

Ketersediaan beras di Provinsi Riau pada tahu 2023 sebesar 918.953 ton atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun 2018. Ketersediaan beras tertinggi berada di Kabupaten Bengkalis dan Kampar, sedangkan yang terendah berada di Kota Dumai dan Kab. Kuantan Singingi. Ketersediaan pangan utama beras di Provinsi Riau dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk produksi lokal, distribusi, dan konsumsi. Analisis empiris ketersediaan beras di Provinsi Riau dari tahun 2018 hingga 2023 dapat memberikan wawasan berharga untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

2.1.4.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang

pertanahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Penggunaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan dengan mekanismen Penetapan Lokasi yang dilakukan oleh Gubernur. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kewenangan lain berdasarkan lampiran pembagian urusan Pemerintahan bidang pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa terdapat penyebutan secara lebih konkrit mengenai kewenangan penyelesaian sengketa tanah, yaitu (1) penyelesaian sengketa tanah garapan, (2) penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, dan (3) penyelesaian masalah tanah kosong. Penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan ada pada semua level pemerintahan, sedangkan kewenangan penyelesaian masalah tanah kosong hanya ada pada level Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

a. Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat beberapa PSN di Provinsi Riau, antara lain pembangunan jalan tol Pekanbaru – Kandis - Dumai, pembangunan jalan tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi, pembangunan jalan tol Rengat - Pekanbaru, pembangunan jalan tol Jambi – Rengat, pembangunan jalan tol Dumai - Sp. Sigambal – Rantau Prapat, Kereta Api Rantau Prapat- Duri - Pekanbaru, dan Upgrading kilang minyak Dumai.

Dalam mendukung kegiatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi membentuk tim persiapan pengadaan tanah dengan keluaran ditetapkan surat keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Gubernur. Penetapan lokasi bertujuan agar tanah/lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga mendapat ganti kerugian yang layak dari Pemerintah.

Berikut merupakan capaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Provinsi Riau pada kurun tahun 2019-2023.

Tabel 2.129.
Rekapitulasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (2019 – 2023)

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	SK Penetapan Lokasi
1	2019	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis	Pekanbaru, Siak,Kampar, Bengkalis, Dumai	Keputusan Gubernur Riau Tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai Nomor : Kpts.750/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019;
		Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru – Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru - Kampar No Kpts.1076/IX/2019 17 September 2019
		Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis	Siak Bengkalis, Dumai	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai Nomor : Kpts.1177/XI/2019 Tanggal 5 November 2019;
		Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang Provinsi Riau	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang Provinsi Riau No Kpts.1247/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	SK Penetapan Lokasi
		Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru – Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru - Kampar No Kpts.1076/IX/2019 17 September 2019
2	2020	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Bangkinang – Pangkalan Tahap I	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bangkinang – Pangkalan Tahap I No Kpts.1289/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020
		Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Jambi - Rengat	Indragiri Hulu Indragiri Hilir	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Jambi - Rengat No Kpts.1488/X/2020 tanggal Oktober 2020
3	2021	Perpanjangan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai	Pekanbaru Siak Bengkalis Dumai	Keputusan Gubernur Riau Tentang Perpanjangan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis – Dumai. No. Kpts. 490/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021
4	2022	Perpanjangan Penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bangkinang – Pangkalan Tahap I STA. 40+000 – STA. 64+700 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Perpanjangan Penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bangkinang – Pangkalan Tahap I STA. 40+000 – STA. 64+700 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. No. Kpts. 1329/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022
		Perpanjangan Kedua Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.	Pekanbaru Siak Bengkalis Dumai	Keputusan Gubernur Riau Tentang Perpanjangan Kedua Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai. No. Kpts. 1330/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022
		Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Rengat –	Pekanbaru	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	SK Penetapan Lokasi
		Pekanbaru Seksi Siak – IC Bypass Pekanbaru STA. 193+500 – STA. 206+926 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.		Seksi Seksi Siak – IC Bypass Pekanbaru STA. 193+500 – STA. 206+926. No. Kpts. 1452/IX/2022 Tanggal 29 September 2022
		Perpanjangan Perubahan Penetapan Lokasi pemanangunan jalan Tol Pekanbaru – bangkinang Provinsi Riau	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Perpanjangan Perubahan Penetapan Lokasi pemanangunan jalan Tol Pekanbaru – bangkinang Provinsi Riau. No. Kpts. 1829/XII/2022 Tanggal 21 Desember 2022.
5	2023	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Penamabahan Lahan Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap I STA. 40+000 – STA. 64+700 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap I Sta. 40+000 – Sta. 64+700. No. Kpts. 492/III/2023. Tanggal 24 Maret 2023.
		Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Rengat – Pekanbaru Seksi JC Pekanbaru – IC Siak STA. 176+000 – STA. 193+500 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Kampar	Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru Seksi Jc Pekanbaru – Ic Siak Sta. 176+000 – Sta. 193+500. No. Kpts. 548/IV/2023.

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2023

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pembangunan dan ketersediaan tanah membawa dampak terciptanya konflik dan sengketa, baik antara Pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam rangka mengatasi masalah sengketa dan konflik pertanahan yang dihadapi saat ini, Pemerintah Daerah memandang perlu membangun suatu kerangka kebijakan pertanahan yang mampu memberikan rujukan (pedoman/acuan) untuk pengelolaan pertanahan bagi semua pihak (pemerintah,

perusahaan dan masyarakat) yang berkepentingan dengan masalah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, mengurangi secara signifikan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru melalui pembenahan kegiatan dan pelayanan pertanahan.

Berikut daftar inventarisasi konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi berdasarkan tipologi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Tabel 2.130.
Daftar Inventarisasi Konflik dan Sengketa Pertanahan
Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022 – 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Konflik/ Sengketa			
	Sengketa dan Konflik Antara Masyarakat dengan Barang Milik Negara (BMN)	Sengketa dan Konflik Batas Wilayah	Sengketa dan Konflik Lahan Kepemilikan Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan (HGU)	Sengketa dan Konflik Lahan Kepemilikan Masyarakat dalam Kawasan Hutan
Pekanbaru	1			
Dumai	1		1	1
Bengkalis	1	1		
Indragiri Hulu			2	
Indragiri Hilir				
Kuantan Singingi			2	
Rokan Hulu				
Rokan Hilir			1	
Kepulauan Meranti				
Kampar				1
Pelalawan			2	
Siak	1	1	2	

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2023

2.1.4.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Status mutu air dipantau dari kualitas lingkungan baku mutu air sungai Provinsi Riau yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan sasaran industri yang membuang air limbah ke badan air. Kualitas air dari empat sungai besar di Provinsi Riau, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Rokan, Sungai Siak, dan Sungai Kampar dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan kualitas mutu air. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan industri, masih ada perusahaan yang membuang limbahnya ke badan air melebihi baku mutu yang telah ditetapkan sesuai izin yang dimiliki. Di samping itu, penurunan kualitas mutu air disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, dimana masyarakat pinggiran sungai umumnya membuang limbah domestik ke Sungai.

Hasil pemantauan kualitas air Sungai di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sungai Siak
 - a) Bagian Hulu mewakili ruas sungai kelas 2 (Pergub No.12 Tahun 2003 Tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak Provinsi Riau) dengan lokasi titik pantau Tapung Kiri Tandun, Tapung Kiri Petapahan, Tapung Kanan, Desa Pelambayan, Kuala Tapung, Muara Sungai Takuana, Perbatasan Kampar-Pekanbaru. Sedangkan bagian hilir mewakili ruas sungai kelas 3 dengan lokasi titik pantau Jembatan Siak II, Muara Sungai Senapelan, Pelabuhan Sungai Duku, Muara Sungai Sail, Perbatasan Kota Pekanbaru-Kab. Siak, Ferry Penyeberangan Perawang, Muara Sei Gasib, Hulu Sei Pandau, Muara Sei Mandau dan Teluk Salak Mempura.
 - b) Kegiatan pencemar di DAS bagian hulu (Kelas 2) dijumpai industri sektor agro dan perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan di bagian hilir (kelas 3) dijumpai pemukiman, industri sektor agro, perkebunan (kelapa sawit dan karet), pertanian serta aktivitas sungai sebagai transportasi air.
 - c) Parameter pencemar dari setiap pemantauan yaitu TSS, DO, BOD, COD, Fe, NH₃, H₂S, T. Phospat, *fecal coli* dan *total coliform*.
 - d) Sumber pencemar utama adalah limbah domestik (limbah pemukiman, MCK, rumah sakit, hotel, pasar, rumah makan, bengkel dan lain-lain), industri sektor

agro (pabrik kelapa sawit maupun pabrik karet, plywood, pulp dan kertas), industri sektor migas (terminal bahan bakar minyak), pertanian, perkebunan, transportasi air dan erosi di bantaran sungai akibat alih fungsi lahan.

2. Sungai Rokan

- a) Bagian Hulu mewakili ruas sungai kelas 1 (Pergub No.6 Tahun 2005 Tentang Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Rokan Provinsi Riau) dengan lokasi titik pantau Tangun, Hulu Batang Sosa, Kota Tengah, Hulu Rokan IV Koto, Ujung Batu, Kota lama, Batang Kumu, Siarang-arang, Kuala Sako. Sedangkan bagian hilir mewakili ruas sungai kelas 2 dengan lokasi titik pantau Sungai Rangau, Desa Sedinginan, Ujung Tanjung dan Jembatan Jumrah.
- b) Kegiatan pencemar di DAS di bagian hulu (kelas 1) maupun bagian hilir (kelas 2) umumnya dijumpai di daerah pemukiman, industri sektor agro, galian C, dan perkebunan.
- c) Parameter pencemar dari setiap pemantauan yaitu parameter TSS, DO, BOD, COD, Fe, NH₃, H₂S, T. Phospat, *fecal coli* dan *total coliform*.
- d) Sumber pencemar utama adalah limbah domestik (limbah pemukiman, MCK, rumah sakit, hotel, pasar, rumah makan, bengkel dan lain-lain), pabrik kelapa sawit pertanian, perkebunan, dan erosi di bantaran sungai akibat alih fungsi lahan.

3. Sungai Indragiri

- a) Bagian Hulu mewakili ruas sungai kelas 1 (Pergub No. 24 Tahun 2003 Tentang Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Indragiri Provinsi Riau) dengan lokasi titik pantau Hulu Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Hilir Pasar Taluk Kuantan, Hilir Pasar Usang Baserah, Batang Peranap Desa Pematang, Hilir Pasar Peranap, Desa Gading Air Molek, Desa Pasir Ringgit, Pasir Kemilu Rengat, Dermaga Kuala Cinaku sedangkan bagian hilir mewakili ruas sungai kelas 2 dengan lokasi titik pantau Pelabuhan Riau Baraharum Mumpa, Pasar Pulau Palas dan Tembilahan Kota.
- b) Kegiatan pencemar di DAS di bagian hulu (kelas 1) dijumpai di daerah pemukiman, industri sektor agro, PETI, perkebunan, sedangkan di bagian hilir

- (kelas 2) dijumpai pemukiman, pabrik sektor agroindustri, perkebunan (kelapa dan sawit) dan pertanian (sawah) serta aktivitas sungai sebagai transportasi air.
- c) Parameter pencemar dari setiap pemantauan yaitu parameter TSS, DO, BOD, COD, Fe, NH₃, H₂S, T. Phospat, *fecal coli* dan *total coliform*.
 - d) Sumber pencemar utama adalah limbah domestik (limbah pemukiman, MCK, rumah sakit, hotel, pasar, rumah makan, bengkel dan lain-lain), industri dan pabrik kelapa sawit maupun pabrik karet, pertanian, perkebunan, tambang batubara, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan erosi di bantaran sungai akibat alih fungsi lahan.

4. Sungai Kampar

- a) Bagian Hulu mewakili ruas sungai kelas 1 (Pergub No. 23 Tahun 2003 Tentang Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Kampar Provinsi Riau) dengan lokasi titik pantau Siberuang, Jembatan Rantau Berangin, Air Tiris, Desa Danau Bengkuang, Desa Teratak Buluh, Buluh Cina, Muara Lembu, Sungai Paku Singingi, Desa Lipat Kain, Sitingkai, Kualo Sako, sedangkan bagian hilir mewakili ruas sungai kelas 2 dengan lokasi titik pantau Langgam, Kuala Kerinci, Muara Sei Nilo, Jembatan Pangkalan Kerinci, Hilir Outlet PT. RAPP dan Desa Sering.
- b) Kegiatan pencemar di bagian hulu (kelas 2) dijumpai, industri sektor agro, Galian C, PETI sektor migas dan perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan di bagian hilir (kelas 3) dijumpai pemukiman, industri sektor agro, perkebunan (kelapa sawit dan karet) dan pertanian, erosi di bantaran sungai akibat alih fungsi lahan serta aktivitas sungai sebagai transportasi air.
- c) Parameter pencemar di DAS adalah parameter TSS, DO, BOD, COD, Fe, NH₃, H₂S, T. Phospat, *fecal coli* dan *total coliform*.
- d) Sumber pencemar utama adalah limbah domestik (limbah pemukiman, MCK, rumah sakit, hotel, pasar, rumah makan, bengkel dan lain-lain), industri sektor agroindustri, sektor migas, pertanian, perkebunan, transportasi air (bagian hilir) dan erosi di bantaran sungai akibat perubahan fungsi lahan.

Tabel 2.131.
Indikator dan Parameter IKLH di Provinsi Riau

Indikator	Parameter	Bobot (%)	Keterangan
Kualitas Udara	SO ₂	42,8	
	NO ₂		
Kualitas Air	TSS	34	Dihitung berdasarkan Indek Pencemaran Air (IPA)
	BO		
	BOD		
	COD		
	Total Fosfat		
	Fecal-Coli		
	Total Coliform		
Kualitas Tutupan Lahan	Luas Hutan	13,3	
Kualitas Ar Laut	pH	9,9	
	Salinitas		
	DO		
	BOD5		
	Amoniak bebas		
	Fosfat		
	Nitrat		
	Sulfida		
	Senyawa fenol		
	PAH		
	PCB		
	Surfaktan		
	Minyak dan lemak		
	Pestisida		

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. IKLH diukur dari 4 anasir yaitu indeks kualitas udara (42,8%), indeks kualitas air (34%), indeks kualitas tutupan lahan (13,3%) dan indeks kualitas air laut (9,9%). IKLH akan diukur di setiap provinsi dan akan dijadikan ukuran dalam IKLH nasional. Formula penghitungan IKLH Provinsi:

$$\text{IKLH Provinsi} = (\text{IKU} \times 42,8\%) + (\text{IKA} \times 34\%) + (\text{IKL} \times 13,3\%) + (\text{IKAL} \times 9,9\%)$$

Dimana IKU adalah indeks kualitas udara, IKA adalah indeks kualitas air, IKL adalah indeks kualitas tutupan lahan, dan IKAL adalah indeks kualitas air laut. Rentang nilai IKLH: Unggul $X > 90$; Sangat baik $82 < X \leq 90$; Baik $74 < X \leq 82$; Cukup $66 \leq X \leq 74$; Kurang $58 \leq X < 66$; Sangat kurang $50 \leq X < 58$; Waspada $X < 50$.

a. Indikator Kualitas Udara

Sumber data adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda *passive sampler*. Pemantauan dilakukan di 4 (empat) area per kabupaten/kota yaitu area transportasi, area industri, area perkantoran/komersil dan area pemukiman dengan frekuensi pemantauan 2 (dua) kali per tahun yang mewakili musim panas dan musim hujan. Dari keseluruhan parameter kualitas udara ambien, untuk keperluan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya memantau 2 (dua) parameter yaitu Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Kriteria Indeks Kualitas Udara: Unggul $X > 90$; Sangat baik $82 < X \leq 90$; Baik $74 < X \leq 82$; Cukup $66 \leq X \leq 74$; Kurang $58 \leq X < 66$; Sangat kurang $50 \leq X < 58$; Waspada $X < 50$.

b. Indikator Kualitas Air

Sumber data Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Riau hingga tahun 2014 adalah data hasil pemantauan kualitas air 2 sungai besar di Riau yaitu Kampar dan Siak. Sejak tahun 2015 sumber data menjadi 4 sungai besar yaitu Kampar, Siak, Rokan dan Indragiri. Parameter yang dijadikan dasar acuan perhitungan IKA yaitu zat padat tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS), oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), kandungan fosfat (Total Phosphat), Fecal Coliform, dan Total Coliform. Hasil perhitungan indeks pencemaran air dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan: $0,0 \leq PI \leq 1,0 \rightarrow$ memenuhi baku mutu (kondisi baik); $1,0 \leq PI \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan; $5,0 \leq PI \leq 10 \rightarrow$ cemar sedang; $PI > 10 \rightarrow$ cemar berat. Transformasi nilai indeks pencemaran air dalam IKA dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat.

c. Indikator Kualitas Tutupan Lahan

Luas tutupan hutan yang dihitung adalah seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis citra landsat, dibandingkan dengan luas

wilayah kabupaten/kota. Angka luas tutupan lahan dikonversi ke dalam bentuk indeks tutupan hutan (ITH).

d. Indikator Kualitas Air Laut

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, integrasi perencanaan pembangunan daerah berwawasan lingkungan sebagai muatan RPJMD disesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 dengan memasukkan indeks kualitas air laut kedalam komponen penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sumber data pengukuran Indeks kualitas air laut Provinsi Riau adalah data hasil pemantauan yang titik nya tersebar di perairan laut Provinsi Riau. Hasil perhitungan indeks pencemaran air laut di narasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan dan kriteria sebagai berikut: $0,0 \leq PI \leq 1,0$ memenuhi baku mutu; $1,0 \leq PI \leq 5,0$ cemar ringan; $5,0 \leq PI \leq 10$ cemar sedang; $PI > 10$ cemar berat.

Dengan menggunakan formula dan kondisi di atas, maka perubahan IKLH Provinsi Riau dari Tahun 2018 sampai dengan 2022, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.132.
IKLH Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

Indeks	Tahun						Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Udara (IKU)	89,91	90,40	90,42	90,13	90,69	90,89	0,22
Air (IKA)	73,68	53,55	50,24	52,25	53,88	50,84	-6,59
Tutupan Lahan (IKTL)	48,37	48,15	41,24	50,22	50,00	51,69	1,48
Air Laut	-	-	71,97	77,73	83,95	74,39	
IKLH	68,43	62,47	69,41	70,72	72,10	70,42	1,55

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pasal 5 ayat (1) menegaskan, bahwa Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas provinsi dan / atau lintas batas negara. Sedangkan ayat (2) menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas kabupaten / kota.

Hasil yang disampaikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 terdapat 2 hasil perhitungan yang berbeda, yaitu: (1) Hasil dengan formulasi perhitungan lama

dengan menggunakan Parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Phospat, Fecal Coliform dan Total Coliform (7 Parameter) dengan hasil IKA =73,68; (2) Hasil dengan formulasi perhitungan baru Parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Phospat, Fecal Coliform, pH, NH3-N, NO3-N dan TDS (10 Parameter) dengan hasil IKA = 57,50.

Untuk pemenuhan data IKLH Provinsi Riau Tahun 2018 yang disampaikan ialah hasil IKA dengan formulasi perhitungan lama, yaitu 7 parameter dengan hasil IKA = 73,68, sedangkan hasil perhitungan dengan formulasi baru dengan 10 parameter belum selesai dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat permintaan data dari Bappeda Provinsi Riau.

Selanjutnya, penanganan persampahan di Provinsi Riau untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2.133.
Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2018 – 2023

No.	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	37,64	37,64	37,01	60	60	60,00
2	Indragiri Hulu	56,02	56,02	56,02	42,86	42,86	42,86
3	Indragiri Hilir	21,32	21,32	21,99	10	10	10,00
4	Pelalawan	26,89	32,42	29,40	41,7	41,7	41,67
5	Siak	70,08	70,08	73,53	78,57	78,57	78,57
6	Kampar	21,39	17,98	17,63	30	30	33,33
7	Rokan Hulu	40	19,54	19,15	25	25	25,00
8	Bengkalis	73,07	65,06	68,12	90,9	90,9	90,91
9	Rokan Hilir	51,2	29,4	29,66	33,3	33,3	33,33
10	Kepulauan Meranti	15	15	15	15	15	22,22
11	Pekanbaru	70	71,64	67,77	100	100	100,00
12	Dumai	82,29	82,29	90,32	83,1	83,1	57,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2024

Dari tabel di atas, cakupan area pelayanan persampahan pada tahun 2023 Kota Pekanbaru mencapai seratus persen. Untuk kabupaten/kota yang cakupan pelayanannya masih rendah perlu program peningkatan kinerja dinas terkait dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah.

Tabel 2.134.
Jumlah Timbulan Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2018 – 2023

No.	Kabupaten / Kota	Tahun 2018 (ton)			Tahun 2019 (ton)			Tahun 2020 (ton)			Tahun 2021 (ton)			Tahun 2022 (ton)			Tahun 2023 (ton)		
		Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah
1	Bengkalis	106.296,58	18.768,83	77.675,28	84.923,51	13.048,01	60.107,11	94.115,74	13.822,24	59.430,46	94.536,90	16.946,73	64.422,26	95.585,50	9.164,13	67.626,59	95.114,96	9.352,89	62.893,86
2	Dumai	44.324,25	-	-	46.210,74	6.040,54	37.280,92	58.368,43	1.777,80	36.135,00	59.029,99	7.874,73	49.051,99	60.559,34	3.395,43	40.880,00	62.106,58	1.301,79	41.770,60
3	Indragiri Hilir	107.555,09	3.175,20	12.877,20	109.706,19	2.446,52	18.708,88	109.472,79	9.545,47	19.115,05	168.125,39	4.068,95	19.345,00	168.820,86	-	20.184,50	168.820,86	2.792,10	20.184,50
4	Indragiri Hulu	63.424,58	-	278,64	64.693,07	2.113,00	114.026,00	1.612.499,04	2.522,82	7.665,00	1.654.328,00	2,27	24.090,00	66.173,18	879,21	8.030,00	67.755,68	879,21	62.893,86
5	Kampar	123.488,11	21.225,44	26.409,10	125.917,07	25.340,63	22.645,51	128.435,47	24.699,75	22.630,00	125.231,79	29.866,88	22.714,68	128.218,66	26.822,06	21.648,88	128.218,66	26.822,06	21.648,88
6	Kepulauan Meranti	27.296,59	-	2.323,00	27.842,52	1.744,70	9.744,88	27.842,52	1.744,70	9.744,88	30.581,16	792,00	10.950,00	31.282,11	166,08	10.950,00	31.770,62	8.578,93	-
7	Kuantan Singingi	48.603,11	8.416,90	35.332,00	49.166,90	491,67	18.122,25	48.784,73	1.291,32	7.300,00	49.503,05	2.570,85	7.227,00	50.800,55	2.792,10	8.030,00	38.520,57	-	-
8	Pekanbaru	162.484,82	24.453,00	113.793,32	165.734,52	74.547,44	295.942,00	400.461,54	8.770,56	283.178,68	353.133,89	63.523,07	222.700,37	356.503,31	21.876,37	243.954,15	356.503,31	16.072,70	256.478,20
9	Pelalawan	64.063,05	3.854,84	14.902,59	68.547,46	8.423,14	18.216,79	55.158,80	9.856,34	19.738,30	58.292,54	10.612,30	20.526,97	61.744,42	11.259,87	21.649,02	61.772,89	11.271,80	20.553,13
10	Rokan Hilir	92.908,00	11.728,80	47.566,80	103.239,72	30.430,41	53.731,65	187.355,08	24.759,47	55.560,30	165.255,10	30.673,95	53.290,00	170.212,82	4.740,95	25.276,25	168.820,86	2.792,10	20.184,50
11	Rokan Hulu	118.844,79	2.773,00	47.756,69	123.919,46	1.557,32	24.039,69	127.685,15	17.835,36	24.042,60	127.685,15	18.206,93	24.039,69	132.613,76	25.055,16	21.640,85	137.732,69	23.478,34	22.024,50
12	Siak	67.950,44	7.060,00	22.630,00	69.805,49	1.544,05	4.465,78	69.739,82	14.332,18	285.915,46	69.739,82	13.573,25	40.365,00	68.135,72	7.348,88	41.990,27	69.722,30	8.724,62	27.982,72
Jumlah		1.027.239,41	101.456,01	401.544,62	1.038.706,65	167.727,43	677.031,46	2.919.919,02	130.958,01	830.455,73	2.955.442,78	198.711,91	558.726,96	1.390.650,23	113.500,24	531.860,51	1.386.859,98	112.066,54	555.614,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2024

Jumlah timbunan sampah kabupaten/kota di Provinsi Riau Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.386.859,98 ton sampah. Dimana pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan sebanyak 2.955.442,78 ton sampah pada tahun 2021. Penanganan sampah tahun 2023 Provinsi Riau sebesar 555.614,75 ton.

Selain itu, dalam pengelolaan lingkungan hidup juga dilakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan. Di Provinsi Riau, pada tahun 2022 terdapat 80 persen perusahaan perusahaan yang taat terhadap Izin Lingkungan, PPLH dan PPULH yang Diterbitkan.

Tabel 2.135.
Persentase Perusahaan yang Taat terhadap Izin Lingkungan, PPLH dan PPULH yang Diterbitkan Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Ijin Lingkungan / PPLH / PPULH	Pengawasan	Taat	Tidak Taat	Persentase Ketaatan
1	2018	1	1	1	-	100,00
2	2019	40	8	8	-	100,00
3	2020	60	15	10	5	66,67
4	2021	96	14	9	5	64,29
5	2022	107	25	20	5	80,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2023

2.1.4.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, fungsi pokok hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan saat ini cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu hutan harus dipertahankan secara optimal dengan menjaga daya dukung secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan.

Luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 sebesar ± 5.352.503 ha dengan rincian fungsi sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.136.
**Kawasan Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan SK Nomor SK.6612/MENLHK-
 PKTL/KUH/PLA.2/10/2021**

No	Fungsi	Distribusi	
		Luas (Ha)	%
1	Hutan Konservasi	630.622,00	11,78
2	Hutan Lindung	229.776,00	4,29
3	Hutan Produksi	3.343.070,00	62,46
	- Tetap	2.329.904,00	43,53
	- Terbatas	1.013.166,00	18,93
4	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	1.149.035,00	21,47
Jumlah		5.352.503,00	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2023

Kawasan Hutan produksi tetap (HP) merupakan yang terluas yaitu sebesar $\pm$ 2.329.904,00 ha atau 43,53% dari luas kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau. Selanjutnya Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas $\pm$ 1.149.035,00 ha atau 21,47%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm$ 1.013.166,00 ha atau 18,93%, Hutan Konservasi seluas $\pm$ 630.622,00 ha atau seluas 11,78% dan Hutan Lindung seluas $\pm$ 229.776,00 ha atau 4,29% dari total luas Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Selanjutnya, kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dirilis setiap tiga tahun relatif tetap pada tahun 2018-2021. Namun dengan adanya perubahan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan oleh KLHK, luas kerusakan kawasan hutan dan lahan pada tahun 2022 menjadi sebesar 221.828 ha, dimana 86.5% merupakan kategori sangat kritis. Tingginya kategori kerusakan sangat kritis ini memerlukan upaya rehabilitasi kolaboratif dan masif dari berbagai pihak terkait. Dalam lima tahun terakhir, rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung meningkat, namun belum dapat menyelesaikan kerusakan kawasan hutan dan lahan secara menyeluruh di Provinsi Riau.

Tabel 2.137.
Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

No	Keterangan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan	701.607,00	701.607,00*	701.607,00*	701.607,00*	221.828,00	221.828,00
	b. Sangat Kritis	261.139,00	261.139,00*	261.139,00*	261.139,00*	191.877,00	191.877,00
	c. Agak Kritis	-	-	-	-	-	-
	d. Kritis	440.468,00	440.468,00*	440.468,00*	440.468,00*	29.951,00	29.951,00
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	1.887,59	14.786,00	2.196,54	8.547,00	3.055,50	1.775,20

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau dalam Angka Tahun 2018 – 2023
Keterangan: * Berdasarkan data tahun 2018 karena rilis per lima tahun

Tabel 2.138.
Data Luas Lahan Kritis di dalam dan luar Kawasan Hutan per Kabupaten / Kota
Provinsi Riau Tahun 2018

No.	Kabupaten / Kota	Tingkat Kekritisan Lahan					
		Dalam Kawasan Hutan (Ha)			Luar Kawasan Hutan (Ha)		
		Kritis	Sangat Kritis	Total	Kritis	Sangat Kritis	Total
1	Kuatan Singingi	52.410	29.586	81.996	6.295	4.991	11.286
2	Indragiri Hulu	120.604	31.686	152.290	18.321	3.194	21.515
3	Indragiri Hilir	24.116	31.229	55.345	-	2.670	2.670
4	Pelalawan	55.814	20.727	76.541	2.298	202	2.500
5	Siak	12.851	2.194	15.045	4.691	583	5.274
6	Kampar	51.272	58.486	109.758	10.648	6.772	17.420
7	Rokan Hulu	55.048	83.235	138.283	4.662	9.813	14.475
8	Bengkalis	28.117	3.840	31.957	148	-	148
9	Rokan Hilir	35.792	113	35.905	589	-	589
10	Kepulauan Meranti	57	-	57	-	-	-
11	Pekanbaru	4.386	43	4.429	1.134	-	1.134
	Jumlah	440.467	261.139	701.607	48.786	28.225	51.608

Sumber: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Noor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, data diolah

Tabel 2.138 menunjukkan peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.887,59 hektar (2018) menjadi 3.055,50 hektar (2022). Jika dilihat dari tabel 2.138, kerusakan hutan dan lahan dalam kawasan hutan terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu seluas 21.515 Ha, selanjutnya berada di Kabupaten Kampar yaitu seluas 17.420 ha, Kabupaten Rokan Hulu 14.475 ha. Sedangkan total luas lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan sebesar 51.608 ha, dimana 54.7% termasuk kategori sangat kritis dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

Rasio kawasan lindung terhadap total kawasan hutan di Provinsi Riau dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan relatif tetap, namun terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0.56% (Tabel 2.139). Rasio ini ke depannya diharapkan meningkat atau minimal dapat dipertahankan, tentunya melalui alokasi peruntukkan yang sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Tabel 2.139.
Rasio Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Kawasan Lindung (Ha)			Kawasan Hutan (Ha)	Rasio Kawasan Lindung terhadap Kawasan Hutan (%)
		Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah		
1	2018	233.910,00	630.753,00	864.663,00	5.406.992,00	15,99
2	2019	233.910,00	630.753,00	864.663,00	5.406.992,00	15,99
3	2020	233.910,00	630.753,00	864.663,00	5.406.992,00	15,99
4	2021	229.776,00	630.622,00	860.398,00	5.352.503,00	16,08
5	2022	229.776,00	630.622,00	860.398,00	5.352.503,00	16,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2023

Selanjutnya kebun dalam kawasan hutan merupakan isu yang sangat krusial di Provinsi Riau, karena hal ini menjadi kendala dalam program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Provinsi Riau dan menyebabkan kerugian negara dari sisi hilangnya pendapatan sektor perkebunan. Tabel 2.140 menunjukkan total luas kebun dalam kawasan hutan di Provinsi Riau sebesar 1,9 juta ha, dimana luasan terbesar kebun dalam kawasan hutan berada pada hutan produksi konversi sebesar 36% dan hutan produksi sebesar 31%. Kebun dalam kawasan hutan terluas berada di Kabupaten Rokan

Hilir sebesar 396.125,16 Ha, Bengkalis sebesar 233.604,84 Ha dan Indragiri Hulu sebesar 227.455,09 Ha. Luas kebun dalam kawasan hutan berdasarkan fungsi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.140.
Kebun dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)					Jumlah
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	
1	Bengkalis	25.796,57	-	60.793,58	107.806,85	39.207,83	233.604,84
2	Indragiri Hilir	174,57	416,43	43.696,34	3.656,09	89.657,25	139.600,67
3	Indragiri Hulu	393,98	7.375,76	45.252,34	40.971,71	133.461,30	227.455,09
4	Kampar	3.698,28	2.219,28	31.892,05	60.533,89	77.918,75	176.262,25
5	Kuantan Singingi	270,64	22.264,03	28.699,05	15.933,76	50.073,14	117.240,63
6	Pelalawan	59.609,98	10,60	54.217,98	52.820,06	36.714,93	203.373,55
7	Rokan Hilir	-	8.955,95	120.479,11	139.612,42	127.077,68	396.125,16
8	Rokan Hulu	-	26.179,19	35.347,71	24.419,99	79.646,31	165.593,21
9	Siak	1.737,02	-	4.388,96	72.909,07	5.587,68	84.622,73
10	Dumai	3.479,49	-	2.939,53	59.733,36	19.638,92	85.791,29
11	Pekanbaru	22,89	-	449,06	1.206,35	946,15	2.624,46
12	Kepulauan Meranti	-	46,89	4.325,65	478,93	3.288,44	8.140,99
	Jumlah	95.190,39	75.525,82	453.118,27	588.821,55	689.102,47	1.901.759,58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2023

Penyelesaian kebun dalam kawasan hutan ini merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak terkait. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi solusi dengan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

2.2.1.1. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca (GgCO₂-e) Provinsi Riau Tahun 2022 berhasil diturunkan dengan total capaian nilai emisi sebesar 177.671,83 GgCO₂e atau tercapai sebesar 100,17%, artinya telah mencapai target yang telah ditetapkan (177.978,04 GgCO₂e). Emisi gas rumah kaca tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 3.500,83 GgCO₂e. Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi dan segera dapat diatasi, rehabilitasi hutan dan lahan juga mempunyai kontribusi terhadap kinerja penurunan emisi gas rumah kaca. Jika dibandingkan dengan

target akhir RPJMD tahun 2024, capaian tahun 2022 baru mencapai 97,98% dari target 174.084,05 GgCO₂e.

2.1.4.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kependudukan

Secara ekonomi, Provinsi Riau saat ini sedang mengalami perkembangan pesat, baik itu sektor perkebunan maupun industri. Dampak dari berkembangnya perekonomian di Provinsi Riau, salah satunya adalah tingginya angka migrasi masuk yang dapat menyumbangkan pertambahan penduduk selain angka kelahiran.

Adapun dampak dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Riau pada kabupaten/kota yakni meningkatnya beban anggaran dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai amanat peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya pengendalian penduduk terutama migrasi masuk menjadi isu penting dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.

b. Catatan Sipil

Catatan sipil merupakan catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Peristiwa yang dimaksud dapat berupa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, penggantian nama, dan lainnya yang bermanfaat dalam penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan yang merupakan bagian dari administrasi kependudukan.

Pelaksanaan administrasi kependudukan mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan pembangunan kependudukan. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil daerah yang meliputi pendaftaran/pencatatan kependudukan dan pelayanan umum.

Salah satu pelaksanaan administrasi kependudukan adalah pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP sebagai identitas/tanda pengenal dapat menciptakan keakuratan data penduduk dan mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mendukung program pembangunan. Penduduk yang memiliki KTP pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2023 terlihat pada table dibawah.

Tabel 2.141.
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk usia> 17 yang ber KTP	Jumlah penduduk wajib KTP	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk
1	Kab. Kampar	582.024	586.621	0,99
2	Kab. Indragiri Hulu	317.274	321.025	0,99
3	Kab. Bengkalis	446.506	450.331	0,99
4	Kab. Indragiri Hilir	495.330	500.297	0,99
5	Kab. Pelalawan	274.874	274.917	1,00
6	Kab. Rokan Hulu	378.619	388.210	0,98
7	Kab. Rokan Hilir	442.309	450.973	0,98
8	Kab. Siak	321.111	324.782	0,99
9	Kab. Kuantan Singingi	247.139	248.372	1,00
10	Kab. Kepulauan Meranti	146.601	154.116	0,95
11	Kota Pekanbaru	779.309	784.958	0,99
12	Kota Dumai	228.907	230.922	0,99
	Jumlah	4.660.003	4.715.524	0,99

Sumber: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP pada tahun 2023 di Provinsi Riau adalah sebanyak 4.660.003 jiwa. Sementara itu dalam waktu yang sama jumlah penduduk yang wajib KTP adalah sebanyak 4.715.524 jiwa. Keadaan ini menunjukkan besaran persentase penduduk yang memiliki KTP di Provinsi Riau sebesar 99 persen. Ini berarti masih terdapat sebanyak 1 persen penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP

Dapat dipastikan kepemilikan KTP tidak hanya berdampak sosial tetapi juga berdampak ekonomi. Hal ini karena berbagai persyaratan izin, pembukaan rekening perbankan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan bantuan pemerintah lainnya harus menggunakan KTP. Oleh sebab pelayanan pembuatan KTP harus senantiasa ditingkatkan yang tentunya dengan berbagai persyaratan wajib yang harus dipenuhi.

Rasio Kepemilikan KTP-el di Provinsi Riau berdasarkan data konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri pada semester I tahun 2023 yakni sebesar 98,85 %. Target Nasional Rasio Kepemilikan KTP-El per 31 Desember adalah sebesar 100%. Artinya masih terdapat sebanyak 1.15 % penduduk yang belum memiliki KTP-El yang akan dicapai pada semester kedua tahun 2013. Secara detil dapat dilihat pada tabel 2.142 berikut:

Tabel 2.142.
Jumlah Wajib KTP yang sudah dan belum rekam KTP-el Di Provinsi Riau Tahun 2023

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	SUDAH REKAM			BELUM REKAM			WAJIB KTP		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1401	KAMPAR	295.042	286.985	582.027	2.345	2.249	4.594	297.387	289.234	586.621
1402	INDRAGIRI HULU	161.788	155.502	317.290	1.962	1.773	3.735	163.750	157.275	321.025
1403	BENGKALIS	227.275	219.399	446.674	1.841	1.816	3.657	229.116	221.215	450.331
1404	INDRAGIRI HILIR	255.531	240.012	495.543	2.462	2.292	4.754	257.993	242.304	500.297
1405	PELALAWAN	141.483	133.391	274.874	20	23	43	141.503	133.414	274.917
1406	ROKAN HULU	191.272	187.625	378.897	4.737	4.576	9.313	196.009	192.201	388.210
1407	ROKAN HILIR	225.318	217.224	442.542	4.350	4.081	8.431	229.668	221.305	450.973
1408	SIAK	164.445	156.690	321.135	1.902	1.745	3.647	166.347	158.435	324.782
1409	KUANTAN SINGINGI	124.184	122.961	247.145	653	574	1.227	124.837	123.535	248.372
1410	KEPULAUAN MERANTI	75.454	71.436	146.890	4.015	3.211	7.226	79.469	74.647	154.116
1471	KOTA PEKANBARU	386.572	392.846	779.418	2.967	2.573	5.540	389.539	395.419	784.958
1472	KOTA DUMAI	117.047	111.864	228.911	1.026	985	2.011	118.073	112.849	230.922
14	RIAU	2.365.411	2.295.935	4.661.346	28.280	25.898	54.178	2.393.691	2.321.833	4.715.524

Sumber : Data Konsolidasi Semester I Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel 2.143.
Jumlah Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan
Kabupaten/Kota per Jenis Kelamin Tahun 2023

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1401	KAMPAR	436.325	6,42	418.413	6,16	854.738	12,58
1402	INDRAGIRI HULU	238.974	3,52	227.462	3,35	466.436	6,86
1403	BENGKALIS	333.228	4,90	318.607	4,69	651.835	9,59
1404	INDRAGIRI HILIR	356.213	5,24	334.023	4,92	690.236	10,16
1405	PELALAWAN	214.338	3,15	201.131	2,96	415.469	6,11
1406	ROKAN HULU	288.500	4,25	279.504	4,11	568.004	8,36
1407	ROKAN HILIR	335.983	4,94	320.922	4,72	656.905	9,67
1408	SIAK	243.766	3,59	230.859	3,40	474.625	6,98
1409	KUANTAN SINGINGI	178.136	2,62	172.839	2,54	350.975	5,17
1410	KEPULAUAN MERANTI	108.900	1,60	102.615	1,51	211.515	3,11
1471	PEKANBARU	561.263	8,26	554.879	8,17	1.116.142	16,43
1472	DUMAI	173.758	2,56	164.306	2,42	338.064	4,98
14	RIAU	3.469.384	51,06	3.325.560	48,94	6.794.944	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Semester I Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel 2.144.
Jumlah Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

NO URUT	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	SEX RATIO
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	
1	00-04	224.699	3,31	209.980	3,09	434.679	107
2	05-09	344.059	5,06	320.474	4,72	664.533	107
3	10-14	364.371	5,36	340.159	5,01	704.530	107
4	15-19	278.896	4,10	266.247	3,92	545.143	105
5	20-24	308.504	4,54	295.619	4,35	604.123	104
6	25-29	283.255	4,17	272.583	4,01	555.838	104
7	30-34	268.535	3,95	269.432	3,97	537.967	100
8	35-39	273.903	4,03	277.624	4,09	551.527	99
9	40-44	278.594	4,10	272.070	4,00	550.664	102
10	45-49	235.543	3,47	224.831	3,31	460.374	105
11	50-54	201.739	2,97	187.514	2,76	389.253	108
12	55-59	149.423	2,20	140.327	2,07	289.750	106
13	60-64	108.168	1,59	102.859	1,51	211.027	105
14	65-69	71.917	1,06	68.243	1,00	140.160	105

NO URUT	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	SEX RATIO
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	
15	70-74	41.061	0,60	38.635	0,57	79.696	106
16	>=75	36.717	0,54	38.963	0,57	75.680	94
Jumlah		3.469.384	51,06	3.325.560	48,94	6.794.944	104

Sumber : Data Konsolidasi Semester I Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau per semester 1 Tahun 2023 sebanyak 6.794.944 Jiwa dengan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan yakni 3.469.384 jiwa (51,06%) dibanding perempuan dengan 3.325.560 jiwa (48,94%), sedangkan kelompok umur terbanyak pada 10-14 tahun dan terkecil pada kelompok umur >=75 tahun.

Disamping itu masalah krusial lainnya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau yakni rata-rata 1,94 %/tahun, Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi adalah Bengkalis sebesar 3,31 % dan Pekanbaru sebesar 3,06 %. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.145.
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1401	KAMPAR	754.629	790.313	816.566	847.236	854.738	2,52
1402	INDRAGIRI HULU	430.230	432.581	448.439	462.303	466.436	1,63
1403	BENGKALIS	553.938	593.397	624.231	646.716	651.835	3,31
1404	INDRAGIRI HILIR	629.841	645.686	667.672	683.962	690.236	1,85
1405	PELALAWAN	371.220	377.800	395.647	411.926	415.469	2,28
1406	ROKAN HULU	557.726	560.230	560.747	564.419	568.004	0,37
1407	ROKAN HILIR	640.492	644.236	649.212	654.286	656.905	0,51
1408	SIAK	430.092	447.563	459.311	470.485	474.625	1,99
1409	KUANTAN SINGINGI	333.143	334.475	339.333	347.949	350.975	1,05
1410	KEPULAUAN MERANTI	209.358	210.149	210.407	211.187	211.515	0,21
1471	KOTA PEKANBARU	959.830	1.028.237	1.074.989	1.107.327	1.116.142	3,06
1472	KOTA DUMAI	302.070	319.827	328.378	335.303	338.064	2,28
14	PROVINSI RIAU	6.172.569	.384.494	6.574.932	6.743.099	6.794.944	1,94

Sumber : Data Konsolidasi Semester I Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel 2.146.
Jumlah Kecatatan Provinsi Riau Berdasarkan
Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	JENIS DISABILITAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DISABILITAS FISIK	167	40	207
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	46	46	92
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	135	187	322
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	416	261	677
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	8	5	13
6	DISABILITAS LAINNYA	158	136	294
	Kab. Kampar	930	675	1.605
1	DISABILITAS FISIK	36	23	59
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	23	19	42
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	35	47	82
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	103	43	146
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	6	6	12
6	DISABILITAS LAINNYA	18	20	38
	Kab. Indragiri Hulu	221	158	379
1	DISABILITAS FISIK	108	88	196
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	30	26	56
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	75	64	139
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	256	132	388
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	15	12	27
6	DISABILITAS LAINNYA	33	27	60
	Kab. Bengkalis	517	349	866
1	DISABILITAS FISIK	39	9	48
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	14	16	30
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	33	33	66
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	62	37	99
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	1	2	3
6	DISABILITAS LAINNYA	9	8	17
	Kab. Indragiri Hilir	158	105	263
1	DISABILITAS FISIK	22	8	30
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	24	16	40
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	43	41	84
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	88	51	139
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	9	3	12
6	DISABILITAS LAINNYA	20	12	32
	Kab. Pelalawan	206	131	337
1	DISABILITAS FISIK	38	34	72
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	26	27	53

NO	JENIS DISABILITAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	66	50	116
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	143	58	201
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	11	10	21
6	DISABILITAS LAINNYA	19	17	36
	Kab. Rokan Hulu	303	196	499
1	DISABILITAS FISIK	28	11	39
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	40	56	96
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	37	38	75
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	195	138	333
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	4	6	10
6	DISABILITAS LAINNYA	19	36	55
	Kab. Rokan Hilir	323	285	608
1	DISABILITAS FISIK	45	28	73
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	18	14	32
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	53	38	91
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	182	111	293
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	8	13	21
6	DISABILITAS LAINNYA	32	22	54
	Kab. Siak	338	226	564
1	DISABILITAS FISIK	17	11	28
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	14	11	25
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	23	19	42
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	68	27	95
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	2	-	2
6	DISABILITAS LAINNYA	11	8	19
	Kab. Kuantan Singingi	135	76	211
1	DISABILITAS FISIK	17	9	26
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	18	12	30
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	27	22	49
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	131	57	188
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	6	7	13
6	DISABILITAS LAINNYA	380	385	765
	Kab. Kepulauan Meranti	579	492	1.071
1	DISABILITAS FISIK	125	101	226
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	92	67	159
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	218	150	368
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	653	310	963
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	24	13	37
6	DISABILITAS LAINNYA	67	44	111
	Kota Pekanbaru	1.179	685	1.864

NO	JENIS DISABILITAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DISABILITAS FISIK	38	23	61
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	29	21	50
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	65	46	111
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	239	90	329
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	7	4	11
6	DISABILITAS LAINNYA	44	17	61
	Kota Dumai	422	201	623
1	DISABILITAS FISIK	680	385	1.065
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	101	81	182
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	374	331	705
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	2.536	1.315	3.851
5	DISABILITAS RUNGU/WICARA	810	735	1.545
6	DISABILITAS LAINNYA	810	732	1.542
	Provinsi Riau	5.311	3.579	8.890

Sumber : Data Konsolidasi Semester I Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel 2.147.
Jumlah Kecatatan Provinsi Riau Berdasarkan Kelompok Umur Sekolah
Tahun 2023

KODE WIL	WILAYAH	DISABILITAS FISIK			
		UMUR 4 – 6 TH	UMUR 7 – 12 TH	UMUR 13 – 15 TH	UMUR 16 – 18 TH
1401	KAB. KAMPAR	2	7	12	11
1402	KAB. INDRAGIRI HULU	-	7	8	2
1403	KAB. BENGKALIS	-	4	7	13
1404	KAB. INDRAGIRI HILIR	-	4	3	2
1405	KAB. PELALAWAN	1	2	6	-
1406	KAB. ROKAN HULU	-	4	1	7
1407	KAB. ROKAN HILIR	-	4	5	-
1408	KAB. SIAK	-	8	11	8
1409	KAB. KUANTAN SINGINGI	-	4	2	2
1410	KAB. KEPULAUAN MERANTI	-	3	4	3
1471	KOTA PEKANBARU	8	33	27	18
1472	KOTA DUMAI	1	6	5	2
14	PROV. RIAU	12	86	91	68
KODE WIL	WILAYAH	DISABILITAS FISIK			
		UMUR 4 – 6 TH	UMUR 7 – 12 TH	UMUR 13 – 15 TH	UMUR 4 – 6 TH
1401	KAB. KAMPAR	-	-	1	-
1402	KAB. INDRAGIRI HULU	-	1	-	1

1403	KAB. BENGKALIS	-	-	1	-
1404	KAB. INDRAGIRI HILIR	-	-	-	-
1405	KAB. PELALAWAN	-	-	1	1
1406	KAB. ROKAN HULU	-	1	-	-
1407	KAB. ROKAN HILIR	-	1	1	-
1408	KAB. SIAK	-	-	-	-
1409	KAB. KUANTAN SINGINGI	-	-	-	-
1410	KAB. KEPULAUAN MERANTI	-	-	-	-
1471	KOTA PEKANBARU	-	1	1	1
1472	KOTA DUMAI	-	1	-	-
14	PROV. RIAU	0	5	5	3
KODE WIL	WILAYAH	DISABILITAS NETRA/BUTA			
		UMUR 4 – 6 TH	UMUR 7 – 12 TH	UMUR 13 – 15 TH	UMUR 16 – 18 TH
1401	KAB. KAMPAR	1	41	13	3
1402	KAB. INDRAGIRI HULU	-	5	7	1
1403	KAB. BENGKALIS	1	7	8	2
1404	KAB. INDRAGIRI HILIR	1	10	5	2
1405	KAB. PELALAWAN	-	8	4	5
1406	KAB. ROKAN HULU	-	14	4	1
1407	KAB. ROKAN HILIR	-	68	8	3
1408	KAB. SIAK	1	6	4	3
1409	KAB. KUANTAN SINGINGI	-	5	1	2
1410	KAB. KEPULAUAN MERANTI	-	2	-	7
1471	KOTA PEKANBARU	-	42	9	6
1472	KOTA DUMAI	3	27	4	-
14	PROV. RIAU	7	235	67	35
KODE WIL	WILAYAH	DISABILITAS MENTAL DAN JIWA			
		UMUR 4 – 6 TH	UMUR 7 – 12 TH	UMUR 13 – 15 TH	UMUR 16 – 18 TH
1401	KAB. KAMPAR	46	253	114	62
1402	KAB. INDRAGIRI HULU	1	40	46	20
1403	KAB. BENGKALIS	2	101	100	53
1404	KAB. INDRAGIRI HILIR	1	26	35	9
1405	KAB. PELALAWAN	1	43	46	16
1406	KAB. ROKAN HULU	3	53	53	37
1407	KAB. ROKAN HILIR	52	124	80	32
1408	KAB. SIAK	1	102	100	28
1409	KAB. KUANTAN SINGINGI	3	30	40	12

1410	KAB. KEPULAUAN MERANTI	2	43	36	25
1471	KOTA PEKANBARU	33	350	228	99
1472	KOTA DUMAI	36	109	102	29
14	PROV. RIAU	181	1.274	980	422
KODE WIL	WILAYAH	DISABILITAS RUNGU/WICARA			
		UMUR 4 – 6 TH	UMUR 7 – 12 TH	UMUR 13 – 15 TH	UMUR 16 – 18 TH
1401	KAB. KAMPAR	17	81	38	16
1402	KAB. INDRAGIRI HULU	1	10	2	8
1403	KAB. BENGKALIS	1	31	27	13
1404	KAB. INDRAGIRI HILIR	-	17	11	12
1405	KAB. PELALAWAN	-	25	17	5
1406	KAB. ROKAN HULU	1	16	19	11
1407	KAB. ROKAN HILIR	2	16	13	10
1408	KAB. SIAK	-	22	20	9
1409	KAB. KUANTAN SINGINGI	-	13	11	3
1410	KAB. KEPULAUAN MERANTI	-	9	7	5
1471	KOTA PEKANBARU	25	113	54	24
1472	KOTA DUMAI	16	23	16	10
14	PROV. RIAU	63	376	235	126
KODE WIL	WILAYAH	DISABILITAS LAINNYA			
		UMUR 4 – 6 TH	UMUR 7 – 12 TH	UMUR 13 – 15 TH	UMUR 16 – 18 TH
1401	KAB. KAMPAR	-	229	7	4
1402	KAB. INDRAGIRI HULU	1	4	5	-
1403	KAB. BENGKALIS	3	9	8	2
1404	KAB. INDRAGIRI HILIR	-	4	4	2
1405	KAB. PELALAWAN	1	1	2	-
1406	KAB. ROKAN HULU	5	5	1	4
1407	KAB. ROKAN HILIR	14	7	2	1
1408	KAB. SIAK	4	4	2	5
1409	KAB. KUANTAN SINGINGI	1	5	1	-
1410	KAB. KEPULAUAN MERANTI	3	8	6	10
1471	KOTA PEKANBARU	2	16	5	12
1472	KOTA DUMAI	-	21	15	6
14	PROV. RIAU	34	313	58	46

Sumber : Data Konsolidasi Semester I Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

2.1.4.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa, diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat desa. Diantara komponen yang penting tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh sebab pembangunan kelembagaan penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.148.
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kuantan Singingi	229	229	229	229	229	0,00
2	Indragiri Hulu	194	194	194	194	194	0,00
3	Indragiri Hilir	236	236	236	236	236	0,00
4	Pelalawan	118	118	118	118	118	0,00
5	Siak	131	131	131	131	131	0,00
6	Kampar	250	250	250	250	250	0,00
7	Rokan Hulu	145	145	145	145	145	0,00
8	Rokan Hilir	198	198	198	184	184	(1,77)
9	Bengkalis	155	155	155	155	155	0,00
10	Kep. Meranti	103	103	103	101	101	(0,49)
11	Pekanbaru	83	83	83	83	83	0,00
12	Dumai	33	33	33	36	36	2,27
Jumlah		1.875	1.875	1.875	1.862	1.862	(0,17)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah LPM di Provinsi Riau yakni sebanyak 13 LPM, hal tersebut terjadi karena adanya 13 Desa Persiapan wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tidak jadi dimekarkan menjadi desa definitif. Rata-rata LPM yang ada saat ini relatif masih lemah dan memerlukan penguatan

kapasitas kelembagaannya. Oleh sebab pemberdayaan kelembagaan desa menjadi penting, apalagi semakin besarnya dana yang mengalir ke desa.

Pembangunan desa sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian desa, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengembangkan Indeks Desa Membangun yang didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas nasional sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sebanyak 10.000 desa, sehingga sampai tahun 2024 diperkirakan jumlah desa tertinggal sebanyak 3.232 desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sekitar 10.559 desa pada tahun 2024.

Pada tahun 2023 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Riau telah menyelesaikan pengukuran IDM terhadap 1.591 desa di Provinsi Riau. Dari hasil pengukuran serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 dapat diketahui bahwa 600 desa yang mampu mencapai kriteria Desa Mandiri serta Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sudah tidak ada lagi di Provinsi Riau. Selengkapnya mengenai klasifikasi desa hasil pengukuran IDM Provinsi Riau Tahun 2023 dapat merujuk pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.149.
Klasifikasi Desa di Provinsi Riau
Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023

No.	Klasifikasi Desa	Jumlah
1	Desa Mandiri	600
2	Desa Maju	585
3	Desa Berkembang	406
4	Desa Tertinggal	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0
Jumlah		1.591

Sumber: Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, 2023

Dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, maka didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BUMDes merupakan suatu lembaga/badan perekonomian yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa yang dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dengan pengelolaan BUMDes ini, diharapkan desa mendapatkan keuntungan dan selanjutnya dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Di Provinsi Riau terdapat total 1.591 BUMDes yang tersebar di masing-masing kabupaten, yang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.150.
Perkembangan BUMDes di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Desa 2023	Jumlah BUMDES					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	218	76	217	218	218	218	218
2	Indragiri Hulu	178	162	178	178	178	178	178
3	Indragiri Hilir	197	77	197	197	197	197	197
4	Pelalawan	104	104	104	104	104	104	104
5	Siak	122	122	122	122	122	122	122

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Desa 2023	Jumlah BUMDES					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Kampar	242	237	242	242	242	242	242
7	Rokan Hulu	139	139	139	139	139	139	139
8	Bengkalis	136	136	136	136	136	136	136
9	Rokan Hilir	159	136	159	159	159	159	159
10	Kepulauan Meranti	96	46	96	96	96	96	96
11	Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0
12	Dumai	0	0	0	0	0	0	0
Riau		1.591	1.235	1.590	1.591	1.591	1.591	1.591

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau 2023

Dari data jumlah BUMDes di desa-desa yang ada di Provinsi Riau, untuk tahun 2023 dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi, yakni klasifikasi dasar, tumbuh, berkembang dan maju. Terdapat 25,6% BUMDes yang terklasifikasi Dasar, 33,3% klasifikasi Tumbuh, 21,4% klasifikasi Berkembang dan 19,8% BUMDes dengan klasifikasi Maju. Data rinci klasifikasi BUMDes pada tiap kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151.
Klasifikasi BUMDes di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Desa	Jumlah Data Masuk	Klasifikasi BUMDes			
				Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Kuantan Singingi	218	218	87	86	27	18
2	Indragiri Hulu	178	178	49	76	32	21
3	Indragiri Hilir	197	197	28	79	64	26
4	Pelalawan	104	104	30	36	23	15
5	Siak	122	122	8	26	42	46
6	Kampar	242	242	83	105	39	15
7	Rokan Hulu	139	139	3	36	43	57
8	Bengkalis	136	136	0	2	31	103
9	Rokan Hilir	159	159	116	30	8	5
10	Kep. Meranti	96	96	3	54	30	9
TOTAL		1.591	1.591	407	530	339	315

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau

Tabel 2.152.
Klasifikasi BUMDES Bersama di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten	Nama BUMDESA bersama	Kecamatan	Status
1.	Kampar	1. Tambang Mandiri Maju 2. Jaya Bersama 3. Maju Bersama	Tambang Kampar Kiri Hulu Kampa	Berkembang Dasar/Perintis Dasar/Perintis
2.	Indragiri Hulu	4. Bersama Barokah	Lirik	Tumbuh/Pemula
3.	Bengkalis	5. Cahaya Perdana 6. Mandiri Sejahtera 7. Mekar Bersama 8. Tenggayun Sejahtera 9. Air Kulim Betuah	Bukit Batu Siak Kecil Pinggir Bandar Laksamana Bathin Solapan	Dasar/Perintis Dasar/Perintis Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula
4.	Indragiri Hilir	10. Andesa Raya 11. Saka Rotan	Enok Teluk Belekong	Berkembang Berkembang
5.	Pelalawan	12. Seiya Sekata LKD 13. Sarimadu 14. Srikandi Pangkalan Kuras 15. Lesung Bertuah 16. Bahtera Negeri 17. Dayung Serempak 18. Lubuk Mas Lestari 19. Siago Mandiri	Pangkalan Kerinci Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras Pangkalan Lesung Langgam Kerumutan Bunut Bandar Petalangan	Berkembang Tumbuh/Pemula Maju Berkembang Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Dasar/Perintis Dasar/Perintis
6.	Rokan Hulu	20. Maju Bersama 21. Selimang Karang 22. Berkah Maju Bersama 23. Jaya Maju Mandiri 24. Sumber Makmur 25. Bangun Sahata 26. Pagaran Tapah Darussalam	Rambah Tambusai Rambah Samo Rambah Hilir Tambusai Utara Bangun Purba Pagaran Tapah Darusslam	Maju Tumbuh/Pemula Berkembang Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis
7.	Rokan Hilir	27. Maju Jaya 28. Panipahan Laut Sejahtera 29. Pasir Limau Kapas 30. Sialang Bersama 31. Tuah Besamo	Bangko Rimba Melintang Pasir Limau Kapas Batu Hampar Kubu Babussalam	Dasar/Perintis Dasar/Perintis Dasar/Perintis Berkembang Dasar/Perintis
8.	Siak	32. Siak 33. Bina Sejahtera Mandiri 34. Bina Sejahtera	Siak Dayun Kerinci Kanan	Dasar/Perintis Maju Berkembang
9.	Kep. Meranti	35. Rumbio Nusa Mandiri 36. Rangsang Pesisir	Merbau Rangsang Pesisir	Berkembang Dasar/Perintis

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari 10 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau sudah 9 Kabupaten yang telah melakukan pengembangan BUMdesa dengan membentuk BUMDesa Bersama kecuali di Kabupaten Kuantan Singingi, namun itu tidak menutup kemungkinan seluruh Kabupaten di Provinsi Riau sudah memiliki BUMDesa Bersama.

Selain itu dari 36 (tiga puluh enam) BUMDesa Bersama yang ada terdapat 3 (tiga) BUMDesa Bersama Maju, 9 (Sembilan) BUMDesa Bersama Berkembang, 8 (delapan) BUMDesa Bersama Tumbuh/Pemula dan 16 (enam belas) BUMDesa Bersama Dasar/Perintis. Masih banyaknya BUMDesa Bersama dengan status Dasar/Perintis disebabkan pembentukan BUMDesa Bersama masih baru dan perlu pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, keberhasilan dalam pemberdayaan desa ini dapat dilihat dari perubahan status desa. Perubahan status desa dari swadaya menjadi swakarya dan dari swakarya menjadi swasembada menunjukkan telah terjadi kemajuan desa. Swasembada merupakan status desa yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh desa. Desa yang sudah mencapai swasembada berarti desa tersebut sudah dianggap mandiri. Pembangunan desa di Provinsi Riau pada dasarnya adalah untuk mencapai predikat swasembada.

Berdasarkan tabel dibawah ini, Provinsi Riau pada tahun 2022 secara keseluruhan desa/kelurahan yang klasifikasi swadaya (40,8%), swakarya (46,7%) dan swasembada (12,4%). Dari 12 kabupaten/kota hanya Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang belum 100% desa/kelurahan selesai menginput profil desa dan kelurahan.

Selanjutnya, keberhasilan dalam pemberdayaan desa ini dapat dilihat dari perubahan status desa. Perubahan status desa dari swadaya menjadi swakarya dan dari swakarya menjadi swasembada menunjukkan telah terjadi kemajuan desa. Swasembada merupakan status desa yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh desa. Desa yang sudah mencapai swasembada berarti desa tersebut sudah dianggap mandiri. Pembangunan desa di Provinsi Riau pada dasarnya adalah untuk mencapai predikat swasembada.

Berdasarkan tabel dibawah ini, Provinsi Riau pada tahun 2022 secara keseluruhan desa/kelurahan yang klasifikasi swadaya (40,8%), swakarya (46,7%) dan swasembada (12,4%). Dari 12 kabupaten/kota hanya Kabupaten Indragiri Hilir , Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang belum 100% desa/kelurahan selesai menginput profil desa dan kelurahan.

Tabel 2.153.
Data Klasifikasi Desa dan Kelurahan Menurut Perkembangan Profil Desa dan
Kelurahan (PRODESKEL) Se-Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Desa/Kel Thn 2019				Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Kecamatan	Total Desa/ Kelurahan	Desa	Kelurahan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Kuansing	15	229	218	11	133	3	0	136	1	0	135	35	0	130	17	2	88	121	14
2	Indragiri Hulu	14	194	178	16	73	80	40	88	71	35	72	90	32	39	112	43	22	127	45
3	Indragiri Hilir	20	236	197	39	191	0	0	193	0	0	196	0	0	170	26	5	141	79	7
4	Pelalawan	12	118	104	14	53	54	9	51	49	16	51	48	17	32	61	25	22	68	28
5	Siak	14	131	122	9	69	47	6	66	54	3	32	88	9	29	91	10	20	99	12
6	Kampar	21	250	242	8	98	93	39	57	136	45	40	155	47	32	163	46	21	170	53
7	Rokan Hulu	16	145	139	6	37	77	28	49	67	26	49	68	25	9	100	33	17	98	28
8	Bengkalis	11	155	136	19	30	98	27	34	96	25	38	97	20	17	110	28	23	101	31
9	Rokan Hilir	18	198	159	25	83	0	0	84	1	0	89	4	1	82	21	0	84	84	4
10	Kep. Meranti	9	103	96	5	37	9	2	42	12	2	45	15	1	40	25	4	37	59	2
11	Pekanbaru	12	83	0	83	32	0	0	32	0	0	32	0	0	47	1	0	51	2	0
12	Dumai	7	33	0	33	19	8	0	23	5	1	22	8	0	20	13	1	21	15	0
Jumlah		169	1.875	1.591	268	855	469	151	855	492	153	801	608	94	647	740	197	547	1023	224

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Perkembangan desa dari tahun 2019 sampai 2023, status desa banyak yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019, desa swadaya dari 855 desa/kelurahan berkurang menjadi 547 pada tahun 2023, dan desa swakarya pada tahun 2019 berjumlah 469 desa/kelurahan menjadi 1023 desa/kelurahan pada tahun 2023 sedangkan pada desa swasembada pada tahun 2019 berjumlah 151 desa/kelurahan menjadi 224 desa/kelurahan pada tahun 2023.

Dalam menjalankan amanat dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Permendesa 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dapat disampaikan perkembangan pembentukan Kawasan Pedesaan di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2.154.
Perkembangan Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Perkembangan capaian penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan			
	Pengusulan Kawasan Pedesaan	Penetapan dan Perencanaan Kawasan Pedesaan	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
Kab Kampar	Pengusulan Kawsan di Kecamatan XIII Koto Kampar terdiri dari : - Desa Tanjung Alai, - Desa Pulau Gadang dan - Desa Koto Mesjid do Kecamatan XIII Koto Kampar.	Penetapan Kawasan Perdesaan dengan karakteristik Potensi Pariwisata, lingkup Desa Tanjung Alai, Pulau Gadang dan Koto Mesjid di Kecamatan XIII Koto Kampar. (Peraturan Bupati Kampar nomor 46 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022)		
Kab. Rokan hilir	Tahap koordinasi dengan pihak Bappeda Rokan hilir tindaklanjuti hasil Rakor percepatan PKP di Prov. Riau.	-	-	-
Kab. Indragiri Hilir	TKPKP baru terbentuk dan Dalam tahap rencana kajian pengusulan Kawasan Perdesaan.			
Kab. Kepulauan Meranti	Pengusulan Kawasan Di Kecamatan Merbau, terdiri dari : - Desa Bagan Melibur - Desa Mekar Sari - Desa Mayang Sari - Desa Sungai Anak kamal - Desa Lukit	Penetapan Kawasan Agrominapolitan Berbasis Ekosistem Gambut dan Mangrove di Kecamatan Merbau. - Desa Bagan Melibur - Desa Mekar Sari - Desa Mayang Sari		

Kabupaten / Kota	Perkembangan capaian penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan			
	Pengusulan Kawasan Pedesaan	Penetapan dan Perencanaan Kawasan Pedesaan	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
		- Desa Sungai Anak kamal - Desa Lukit (Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 49/HK/KPTS/V/2022)		
Kab. Siak	Lokasi Kawasan Perkampungan Agrowisata Berbasis Ekosistem Gambut, meliputi : Kampung Temusai, Kampung Suak Merambai, Kampung Dayang Suri, Kampung Langsung Permai, Kampung Bunga Raya, Kampung kemuning Muda, Kampung Jati Baru, Kampung Jaya Pura, Kampung Tuah Indrapura dan Kampung buantan Lestari. Kecamatan : Bungaraya	Lokasi Kawasan Perkampungan Agrowisata Berbasis Ekosistem Gambut di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ditetapkan sebagai Lokasi Pembangunan Kawasan Perkampungan. (keputusan Bupati Siak nomor 373/hk/kpts/2019)		
Kab. Bengkalis	Kecamatan Bengkalis terdiri dari 19 (Sembilan belas) Desa, antara lain : Desa Sekodi, Desa Palkun, Desa Kelemantan, Desa Kelemantan Barat, Desa Sungai Batang, Desa Ketam Putih, Desa Pematang Duku timur, Desa Pematang Duku, Desa Penampi, Desa Kelebuk, Desa Damai, Desa Temeran, Desa Penebal, Desa Kuala Alam, Desa Sungai Alam, Desa Air Putih, Desa Senggoro, Desa Wonosari, Desa Pedekik. Nama Usulan Kawasan : Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Bengkalis Terbilang. 1. Sentra Pengembangan Konomi Mangrove - Kawasan ekowisata mangrove - Pengolahan Hasil Perikanan. - Pusat rehabilitas dan Pembibitan mangrove. 2. Sentra Pengolahan Hasil pertanian - Pengolahan hasil pertanian nenas - Pengolahan hasil pertanian sagu - Pengolahan Hasil limbah pertanian	1. Penetapan kawasan Perdesaan Agrominapolitan Di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 810/KPTS/XII/2022)		

Kabupaten / Kota	Perkembangan capaian penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan			
	Pengusulan Kawasan Pedesaan	Penetapan dan Perencanaan Kawasan Pedesaan	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
	3. Sentra Budidaya pertanian - Budidaya pertanian nenas - Budidaya pertanian sagu. Kecamatan siak kecil terdiri dari 6 (enam) desa antara lain : 1. Desa sumber jaya 2. Desa tanjung damai 3. Desa Sungai Linau 4. Desa Bandar Jaya 5. Desa Sadar Jaya 6. Desa Muara Dua Nama kawasan : Kawasan Perdesaan Bandar Agro Siak kecil 1. Desa Sumber Jaya menjadi pusat pengolahan produk turunan daging sapi. 2. Desa Tanjung Damai menjadi pusat produksi pakan modern untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi. 3. Desa Sungai Limau menjadi pusat peternakan sapi dengan potensi awal luas lahan 200 Ha dan masih bsa ditambah sesuai kebutuhan (lahan Pemda) 4. Desa Bandar Jaya berperan dalam Pengolahan limbah menjadi pupuk Organik yang bernilai komersial tinggi. 5. Desa Sadar jaya menjadi pusat pemasaran dari semua bisnis kawasan. 6. Desa Muara Dua berperan pusat rumah potong sapi.	2. Penetapan Kawasan Perdesaan Agrosilvopastura Bumi Terpadu Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 809/KPTS/XII/2022)		
Kab. Rokan Hulu	Dalam tahap konsultasi (Bersama dengan BAPPEDA dan Bagian Hukum) dan Koordinasi terkait kajian penetapan kawasan Perdesaan.			
Kab. Indragiri Hulu	-			
Kab. Pelalawan	-			
Kab. Kuantan Singingi	Pemerintah kab. Kuantan Singingi belum melakukan pemetaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana diatur dalam Permendes PDPT No. 5 tahun 2016.			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Dari tabel diatas tergambar bahwa perkembangan penetapan kawasan perdesaan di 10 kabupaten, hanya 4 Kabupaten yang sudah pada tahapan penetapan dan perencanaan yaitu Kab. Bengkalis, Kab. Kampar, Kab Kepulauan Meranti dan Kab. Kampar, sedangkan masih terdapat 6 Kabupaten yang masih pada tahapan pengusulan kawasan perdesaan.

2.1.4.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan indikator kontrasepsi dan meningkatkan kematangan usia kawin pertama. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) didefinisikan sebagai nilai tengah atau median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang berstatus kawin atau pernah kawin. Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang pada saat pengumpulan data sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua peserta KB modern. Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya.

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana. Sasaran dan capaian pembangunan bidang kependudukan dan KB. Capaian indikator pembangunan kependudukan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.155.
Capaian Indikator Kependudukan Provinsi Riau
dari Tahun 2018 s/d 2023

No	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
1	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	52.2	64.14	45	45.6	55,9	55.80
2	Age Specifik Fertility Rate (ASFR)	22	15	8	15.1	18,9	15.00
3	Unmet Need	16.20	24.09	16.2	25.6	31,26	13.85
4	Total Fertility Rate (TFR)	2,71	2,67	2,5	2,5	2,28	2.26

Sumber Data: BKKBN

2.1.4.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. Pergerakan Orang dan Barang

Transportasi adalah usaha untuk memindahkan, menggerakkan, atau mengangkut orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain objek tersebut lebih berguna atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Transportasi dikatakan baik jika dari segi keselamatan, aksesibilitas yang tinggi, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, tepat waktu, nyaman, ekonomis, aman, tertib, rendah polusi, dan beban masyarakat rendah.

Dalam hidupnya manusia melakukan kegiatan menuju lokasi yang terpisah-pisah, sehingga perlu adanya pergerakan yang kemudian menciptakan lalu lintas. Dalam berlalu lintas manusia melakukan pergerakan dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan dengan menggunakan sarana (kendaraan), sehingga terjadilah perangkutan (transportasi). Perhitungan orang dan barang dilakukan dengan cara mendata orang dan barang yang naik dan turun dari berbagai simpul transportasi baik domestik maupun internasional. Jumlah pergerakan orang dan barang di Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini.

Jumlah pergerakan orang tahun 2016 sebanyak 7.642.281 dan barang sebanyak 1.152.925.078,50 Ton, di tiga simpul transportasi yang ada di Provinsi Riau, sedangkan tahun 2022 pergerakan orang mengalami penurunan sebesar 7,01 persen menjadi 7.107.002 orang dan pergerakan barang mengalami penurunan sebesar 88,50 persen menjadi 132.617.845 ton. Penurunan pergerakan orang dan barang pada tahun 2022 diakibatkan terjadinya wabah *Covid-19* dan hingga saat ini baru bergerak naik lagi setelah pandemi berlalu.

Tabel 2.156.
Pergerakan Orang dan Barang pada Beberapa Simpul Transportasi di Provinsi Riau Tahun 2016-2022

No.	Simpul Transportasi	Domestik				Internasional			
		Jumlah Penumpang Naik	Jumlah Penumpang Turun	Jumlah Barang Muat	Jumlah Barang Bongkar	Jumlah Penumpang Naik	Jumlah Penumpang Turun	Jumlah Barang Muat	Jumlah Barang Bongkar
		(Orang)	(Orang)	(Ton)	(Ton)	(Orang)	(Orang)	(Ton)	(Ton)
1	Pelabuhan	1.205.345	1.147.636	45.959.319	45.005.038	153.018	102.691	23.148.175	4.357.693
2	Bandara	1.110.535	1.090.453	4.636.086	9.511.405	21.890	20.503	0	129
3	Terminal	1.475.491	779.440	-	-	-	-	-	-
Total Tahun 2022		3.791.371	3.017.529	50.595.405	54.516.443	174.908	123.194	23.148.175	4.357.822
Total Tahun 2021		2.889.972	2.220.079	73.255.388	187.042.910	109	22	25.585.781	37.153.889
Total Tahun 2020		1.956.727	1.534.286	1.202.325.460	704.180.503	77.693	83.141	61.195.132	31.937.909
Total Tahun 2019		3.827.848	3.613.856	246.813.429	153.830.905	383.270	262.543	33.911.645	10.802.891
Total Tahun 2018		4.160.154	5.469.430	1.314.458.151	164.794.162	312.784	1.580.782	42.327.331	20.818.891
Total Tahun 2017		3.564.441	3.458.856	1.033.335.921	62.961.687	283.994	360.433	41.645.068	24.123.087
Total Tahun 2016		3.559.443	3.439.397	1.024.285.701	62.985.864	283.994	359.447	41.626.058	24.027.455

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023 (data pelabuhan : Penjumlahan data angkutan laut dan data angkutan penyebrangan)

b. Perhubungan Udara

Transportasi Udara yaitu bandar udara yang terdapat di Provinsi Riau. Terdapat tujuh bandar udara yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Tuanku Tambusai di Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Bukit Batu di Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99 persen penerbangan domestik dan internasional. Pelayanan transportasi udara perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan bandar udara, pembangunan bandar udara baru, peningkatan keselamatan penerbangan, dan integrasi dengan sistem moda transportasi darat, laut, sungai, dan penyeberangan. Untuk itu diperlukan pembangunan bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer; peningkatan fungsi Bandara Pinang Kampai-Dumai sebagai Pusat Penyebaran Tersier yang dapat ditingkatkan melayani penerbangan internasional untuk mendukung peran kota Dumai sebagai PKN; dan perlu dilakukan peningkatan pelayanan Bandara Japura, Tuanku Tambusai di Pasir Pangaraian, Bukit Batu di Sei Pakning, SSH Setia Negara-Pelalawan, dan Tempuling di Indragiri Hilir.

Tabel 2.157.
Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang Pelabuhan Udara di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Perkiraan)	
1	Pesawat Datang	20.025	17.298	8.324	6.619	9.253	10.161	-10,51
2	Pesawat Berangkat	19.998	17.303	8.334	6.612	9.250	10.175	-10,52
3	Penumpang Datang	4.814.340	1.788.251	739.407	597.828	1.110.956	1.222.052	-2,33
4	Penumpang Berangkat	2.257.556	1.762.646	703.189	605.225	1.132.425	1.245.668	-1,41
5	Penumpang Transit	34.077	15.591	7.521	3.137	3.032	3.336	25,84

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023 (Bandara SSK II, Pinang Kampai, Japura, Tuanku Tambusai, Tempuling)

Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dari dan ke Provinsi Riau selama periode 2018-2023 secara umum mengalami penurunan. Keberangkatan dan kedatangan pesawat tertinggi terjadi pada tahun 2018 sedangkan terendah pada tahun 2021. Pergerakan penumpang di tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan karena pandemi *Covid-19*,

dimana terjadi pembatasan perjalanan secara nasional dan global sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Tahun 2022 pergerakan penumpang mulai mengalami peningkatan lagi lebih dari 80% meskipun masih masa pandemi *Covid-19* dikarenakan masyarakat sudah boleh melakukan perjalanan dengan persyaratan telah mendapatkan vaksinasi atau menunjukkan hasil negatif tes rapid test antigen atau rapid test PCR.

b. Perhubungan Laut

Untuk jumlah keberangkatan dan kedatangan kapal angkutan dalam dan luar negeri, arus dan jumlah penumpang tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 2.158.
Kunjungan Kapal Pada Terminal Port/Pelabuhan
di Provinsi Riau Tahun 2017-2022

No	Tahun	Kunjungan Kapal	Penumpang Naik	Penumpang Turun	Bongkar	Muat
1	2017	87.552	1.679.574	1.611.705	32.855.931	1.018.003.003
2	2018	92.826	1.539.583	1.614.682	168.713.868	1.350.911.285
3	2019	89.862	1.739.037	1.447.570	151.481.120	275.183.712
4	2020	95.918	454.394	429.354	722.830.761	1.258.767.616
5	2021	96.329	843.088	823.497	215.066.319	93.520.572
6	2022	91.112	928.845	820.809	49.362.731	69.107.494

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023 (data 13 pelabuhan laut)

Untuk kunjungan kapal baik dalam maupun luar negeri yang masuk ke Provinsi Riau tahun 2017-2022 berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2021 merupakan titik tertinggi untuk tahun kunjungan kapal ke Provinsi Riau dengan jumlah total kunjungan sebanyak 96.329 kunjungan baik domestik maupun internasional. Namun demikian sejak tahun 2020 pergerakan penumpang naik dan turun di Terminal Port/Pelabuhan mengalami penurunan yang signifikan dibanding sepanjang 5 tahun terakhir dengan rata-rata penurunan -72,1 % dibanding dengan tahun 2017.

c. Perhubungan Darat

Transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Dalam konteks pemenuhan pengangkutan barang produk perekonomian, jaringan prasarana jalan memiliki fleksibilitas dan daya angkut yang besar di samping biaya ekonominya yang

terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2023, jumlah layanan angkutan darat di Provinsi Riau sejumlah 939 layanan.

Tabel 2.159.
Jumlah Layanan Angkutan Darat Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2023

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah layanan
1	Kuantan Singingi	12
2	Indragiri Hulu	88
3	Indragiri Hilir	102
4	Pelalawan	17
5	Siak	77
6	Kampar	18
7	Rokan Hulu	133
8	Rokan Hilir	138
9	Bengkalis	63
10	Kep. Meranti	0
11	Pekanbaru	82
12	Dumai	209
Jumlah		939

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023

Pada kepemilikan kendaraan diperlukan adanya kepemilikan KIR yang merupakan pengujian kendaraan untuk mengetahui apakah memenuhi spesifikasi teknis atau tidak serta memenuhi layak jalan atau tidak, baik untuk angkutan umum maupun angkutan pribadi. Adapun jumlah kepemilikan KIR angkutan umum di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.160 dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.160.
Jumlah Kepemilikan Kir Angkutan Umum Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kuantan Singingi	6704	6808	6.944	49	0
2	Indragiri Hulu	9936	9925	10.415	2.429	2.437
3	Indragiri Hilir	0	-	-	-	-
4	Pelalawan	7880	8041	2.814	2.330	141

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Siak	6905	7263	7.482	4.400	4.679
6	Kampar	16022	16535	11.518	6.856	6.861
7	Rokan Hulu	13929	14352	14.820	14.937	896
8	Rokan Hilir	5047	5169	4.365	442	359
9	Bengkalis	20619	16398	14.893	3.366	3.675
10	Kep. Meranti	0	0	0	0	0
11	Pekanbaru	95.955	98.933	90.390	104.657	106.975
12	Dumai	0	-	9643	9.308	1.512
Jumlah		182.997	183.424	173.284	148.774	127.535

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023

Dibandingkan tahun 2018, jumlah kepemilikan kir angkutan umum di Provinsi Riau tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 45.475 unit. Selanjutnya, kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang telah dilaksanakan. Perlengkapan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pada pasal 25 yaitu berikut merupakan alat perlengkapan Jalan :

- a. Rambu Lalu lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan luar badan jalan.

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi di Provinsi Riau ini dimaksudkan untuk keselamatan berlalu lintas, juga terhadap kebutuhan fasilitas LLAJ guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama pada

jalan-jalan provinsi yang berada di wilayah Provinsi Riau. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pengamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- Menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/kendaraan bermotor
- Menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ.

Tabel 2.161.
Jumlah Pemasangan Rambu - Rambu di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
ROKAN HILIR	Rambu Lalu Lintas (TF)			40				40	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu PPJ (TF)							-	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator		200					200	Buah
	Marka Jalan		10.000					10.000	M'
	Paku Marka		250					250	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30					30	Unit
	Warning Light							-	Unit
PEKANBARU	Rambu Lalu Lintas (TF)					8		8	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit

KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Rambu PPJ (TF)							-	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator							-	Buah
	Marka Jalan	8.880	20.000	5.700		12.612	12.000	59.192	M'
	Paku Marka		1.000					1.000	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell							-	Unit
	Warning Light							-	Unit
SIAK	Rambu Lalu Lintas (TF)		30			75	10	115	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu Chevrons						34	34	Unit
	Rambu PPJ (TF)					4		4	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator		300		30	315	200	845	Buah
	Marka Jalan		15000					15.000	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit

KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	LPJU Solar Sell		30		6		26	62	Unit
	Warning Light							-	Unit
INDRAGIRI HILIR	Rambu Lalu Lintas (TF)		40					40	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu PPJ (TF)		4					4	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator		300					300	Buah
	Marka Jalan		10.000					10.000	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30		5			35	Unit
	Warning Light							-	Unit
KAMPAR	Rambu Lalu Lintas (TF)	23	30			36	30	119	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu Chevrons						124	124	Unit
	Rambu PPJ (TF)		8			4	12	24	unit
	Rambu PPJ (Portal)	4						4	Unit
	Guardrail							-	m'

KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Delineator		300					300	Buah
	Marka Jalan	2.810	10.000					12.810	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)		1			1	1	3	Lokasi
	Cermin Tikungan						2	2	Unit
	LPJU Solar Sell		30		11			41	Unit
	Warning Light							-	Unit
KUANSING	Rambu Lalu Lintas (TF)		30				14	44	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu Chevrons						34	34	Unit
	Rambu PPJ (TF)							-	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator		250					250	Buah
	Marka Jalan	13.073	10.000					23.073	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)		2					2	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30					30	Unit
	Warning Light							-	Unit

KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
ROKAN HULU	Rambu Lalu Lintas (TF)	77	40			42	8	167	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)					16		16	Unit
	Rambu Chevrons						32	32	Unit
	Rambu PPJ (TF)		8		5	6		19	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail	500						500	m'
	Delineator		300					300	Buah
	Marka Jalan	3.331	10.000					13.331	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)				1	1	1	3	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		60		10		29	99	Unit
	Warning Light							-	Unit
DUMAI	Rambu Lalu Lintas (TF)	34	30				10	74	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu PPJ (TF)		4					4	unit
	Rambu PPJ (Portal)	1						1	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator		300					300	Buah
	Marka Jalan		10.000					10.000	M'
	Paku Marka		400					400	Buah

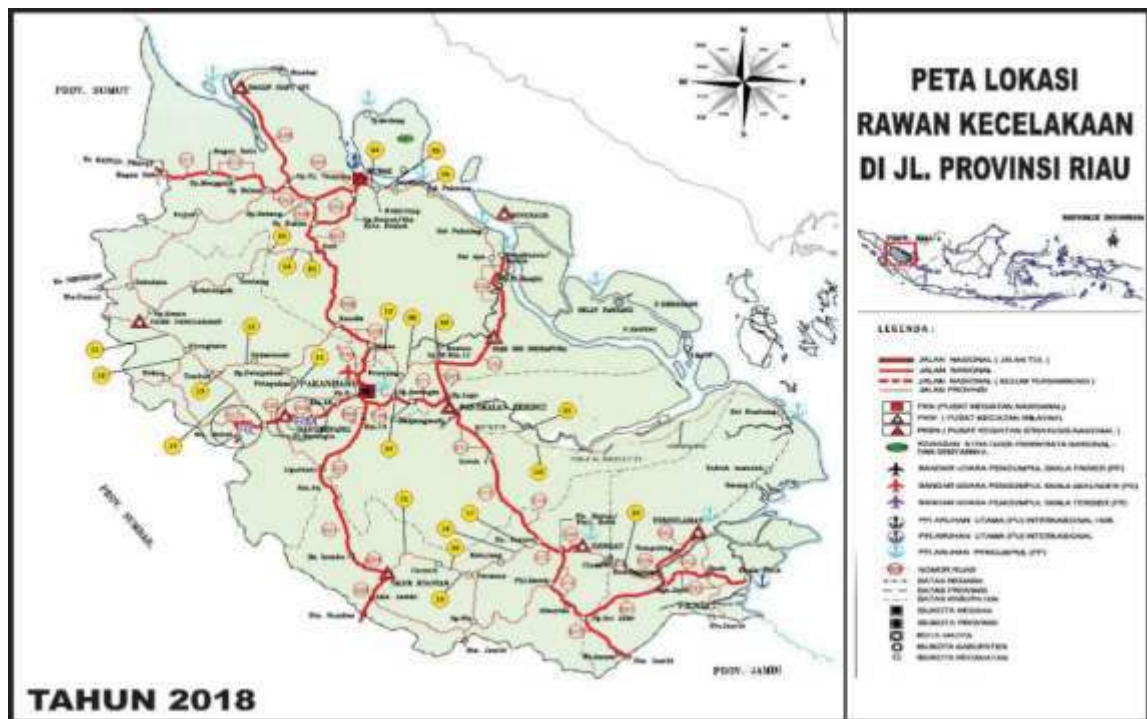
KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30		6			36	Unit
	Warning Light							-	Unit
BENGKALIS	Rambu Lalu Lintas (TF)	66	50				8	124	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu PPJ (TF)		6					6	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail	500						500	m'
	Delineator		400					400	Buah
	Marka Jalan							-	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30				5	35	Unit
	Warning Light							-	Unit
INDRAGIRI HULU	Rambu Lalu Lintas (TF)		40					40	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu PPJ (TF)		4					4	unit

KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Rambu PPJ (Portal)	1						1	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator		250					250	Buah
	Marka Jalan	2.500	10.000					12.500	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30		5		5	40	Unit
	Warning Light							-	Unit
PELALAWAN	Rambu Lalu Lintas (TF)		40			25		65	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	Unit
	Rambu PPJ (TF)		6					6	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator		250				200	450	Buah
	Marka Jalan	20.583	10.000					30.583	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30					30	Unit
	Warning Light							-	Unit

KABUPATEN / KOTA	JENIS DATA	TAHUN						TOTAL	SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
KEP. MERANTI	Rambu Lalu Lintas (TF)		40					40	Unit
	Rambu lalu Lintas (Tunggal)							-	unit
	Rambu PPJ (TF)							-	unit
	Rambu PPJ (Portal)							-	Unit
	Guardrail							-	m'
	Delineator							-	Buah
	Marka Jalan		10.000					10.000	M'
	Paku Marka							-	Buah
	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							-	Lokasi
	Cermin Tikungan							-	Unit
	LPJU Solar Sell		30					30	Unit
	Warning Light							-	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2023

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda. Sedangkan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi, resiko dan kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan.



Gambar 2.45.
Peta Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Provinsi Riau

Berikut merupakan data terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas, termasuk data korban meninggal, luka berat, luka ringan serta kerugian material.

Tabel 2.162.
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Kerugian Materil Menurut POLRES di Provinsi Riau 2023

Polres	Jumlah Kecelakaan	Korban			Kerugian Material
		Meninggal	Luka Berat	Luka Ringa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dit. Lantas	-	-	-	-	-
POLRESTA PEKANBARU	193	57	45	178	528.500.000
POLRES DUMAI	81	34	8	99	101.900.000
POLRES INHU	153	73	9	132	929.550.000
POLRES KAMPAR	255	58	32	325	1.289.800.000
POLRES INHIL	50	31	11	55	230.200.000
POLRES PELALAWAN	265	96	86	268	1.589.200.000
POLRES KUANSING	93	23	1	123	447.600.000
POLRES ROHIL	87	72	50	67	803.900.000
POLRES ROHUL	112	56	82	94	416.900.000
POLRES SIAK	245	85	10	318	1.304.000.000
POLRES BENGKALIS	98	68	26	79	1.280.100.000
POLRES MERANTI	6	3	2	12	16.500.000

Polres		Jumlah Kecelakaan	Korban			Kerugian Material
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringa	
Jumlah/Total	2022	1.638	656	362	1.750	8.938.150.000
	2021	1.337	669	320	1.229	6.218.400.000
	2020	1.279	602	355	1.167	5.073.350.000
	2019	1206	605	651	1292	5.275.194.500
	2018	1.675	796	583	1.694	5.190.180.000
	2017	1,206	605	651	1,292	5.275.194.500
	2016	1,339	626	857	1,129	6.196.675.000

Sumber : DITLANTAS POLDA RIAU Tahun 2023

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Riau cenderung menurun dari tahun 2016 sebanyak 1.339 kecelakaan menjadi 1.279 pada tahun 2020 namun kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022. Dilihat dari jumlah korban kecelakaan, didominasi oleh kecelakaan luka ringan sebanyak 1.750 orang pada tahun 2022 sedangkan kecelakaan luka berat sebanyak 362 orang dan kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia sebanyak 656 jiwa.

Selanjutnya, terminal wilayah terdiri dari **Terminal Penumpang** dan **Terminal Barang**. Terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya dibedakan atas:

1. **Terminal Penumpang Tipe A**, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara (bagi wilayah yang memiliki batas darat dengan negara tetangga), angkutan antar perkotaan antar provinsi, angkutan antar perkotaan di provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang klasifikasi terminal masuk dalam klasifikasi ini adalah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu.
2. **Terminal Penumpang Tipe B**, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar perkotaan di provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang masuk dalam klasifikasi terminal type B adalah Kabupaten Kampar;
3. **Terminal Penumpang Tipe C**, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam perkotaan dan angkutan perdesaan. Terminal tipe ini tersebar di kota-kota kecamatan;

4. **Terminal barang** menurut fungsi pelayanan penyebaran atau distribusinya dibedakan atas:

- **Terminal Utama**, berfungsi melayani penyebaran antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bagi wilayah yang memiliki PKN didalamnya, dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta angkutan barang perpindahan antar moda di simpul-simpul utama kegiatan transportasi terutama pelabuhan laut dan penyeberangan. Direncanakan di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai;
- **Terminal Pengumpan**, berfungsi melayani penyebaran dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ke Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Lokasi tersebar di pusat kegiatan wilayah;
- **Terminal Lokal**, berfungsi melayani penyebaran dari Pusat Kegiatan Lokal 1 ke Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang lainnya, dan ke kawasan-kawasan produksi di dalam wilayah kabupaten/kota. Lokasi terminal penumpang dan barang sebagian besar menjadi satu (dalam satu kawasan) untuk efisiensi pengembangan. Lokasi tersebar di pusat-pusat kegiatan lokal.

Hierarki terminal penumpang tipe A setara dengan terminal utama, terminal penumpang tipe B setara dengan terminal pengumpan, dan terminal penumpang tipe C setara dengan terminal lokal.

d. Perhubungan Perkeretaapian

Provinsi Riau termasuk salah satu agenda penting dalam kegiatan pembangunan nasional terutama dalam rencana Pembangunan Jaringan Perkeretaapian (*Trans Sumatera Railway*), dalam Rencana Program Strategis Pembangunan Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Sebagai langkah awal dalam memulai rencana Pembangunan Perkeretaapian di Pulau Sumatera telah dilakukan penandatanganan kesepakatan/MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Perhubungan dengan 5 (lima) Gubernur se-Sumatera di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2015 tentang Pembangunan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Pulau Sumatera (Trans Sumatera).

Rencana induk perkeretaapian nasional telah membuat rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah Sumatera yang secara hirarki wilayah Provinsi Riau

juga termasuk didalam rencana pembangunan jaringan tersebut. Potensi Riau sebagai lumbung energi dan industri nasional menjadikan kawasan ini menjadi pusat kegiatan strategis nasional (PKN).

Potensi Riau yang begitu besar tentunya harus dikelola dan didukung dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini kegiatan pengangkutan hasil alam/pertambangan sebagian besar diangkut melalui jalur darat atau angkutan jalan yang secara kuantitas dan kualitas tentunya sangat terbatas. Tingginya kerusakan jalan dan faktor keselamatan menjadi isu penting yang saat ini sedang dibicarakan. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merencanakan sistem transportasi yang paling handal dan ekonomis dari sisi biaya. Pengembangan sistem transportasi massal menjadi jawaban permasalahan tersebut. Salah satu sistem angkutan massal yang saat ini sedang dikembangkan adalah sistem angkutan dengan menggunakan kereta api.

Pembangunan transportasi perkeretaapian nasional diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian nasional di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian nasional.



Gambar 2.46.
Peta Pelaksanaan Koridor Kereta Api di Provinsi Riau

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah:

1. Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 360/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Perkeretaapian di Provinsi Riau (SK ini berfungsi untuk mendukung percepatan pembangunan jalur KA Trans Sumatera di Provinsi Riau dan pengembangan jaringan KA di Provinsi Riau).
2. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api di Provinsi Riau.
3. Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun Feasibility Study Perkeretaapian Provinsi Riau pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Riau menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Riau.

e. Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Jika pada masa lalu peran sungai sangat menonjol bagi pergerakan barang dan orang, pada saat ini cenderung menurun dengan semakin luasnya sarana jalan dan adanya pendangkalan sungai yang menghambat alur pelayaran. Peran angkutan sungai pada dasarnya diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan DAS dan pedesaan yang belum terlayani jaringan jalan. Dalam rangka memantapkan sistem transportasi terpadu, maka dibutuhkan revitalisasi angkutan sungai melalui pengelolaan DAS untuk memulihkan kondisi alur pelayaran, pembangunan dermaga sungai, dan penyediaan prasarana kapal dan perahu.

Integrasi sistem transportasi juga perlu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana penyeberangan antar provinsi dan antar negara, oleh karena Provinsi Riau memiliki sejumlah besar pulau-pulau kecil dan berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga.

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan. Angkutan penyeberangan merupakan salah satu moda yang memiliki peranan penting di Provinsi Riau dalam meningkatkan mobilitas ekonomi di Provinsi Riau baik dalam kabupaten, antar kabupaten dan antar provinsi. Adapun lintasan penyeberangan yang ada di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.163.
Lintasan Penyeberangan Provinsi Riau yang Telah Beroperasi

No	Lintasan Penyeberangan	Trayek Penyeberangan	Keterangan
1	Pelabuhan Penyeberangan Dumai (Kota Dumai) -Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal Rupert (Kab. Bengkalis)	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Beroperasi
2	Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak (Kab. Kep. Meranti) - Pelabuhan Penyeberangan Sei Selari(Kab. Bengkalis)	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Beroperasi
3	Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit - PelabuhanPenyeberangan Kampung Balak	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Beroperasi
4	Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung (Kab. Kep. Meranti) - Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Kab. Kep. Meranti)	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Beroperasi
5	Pelabuhan Penyeberangan Dumai (Kota Dumai) -Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Kab. Kep. Meranti)	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Beroperasi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2018

Adapun data dibawah merupakan lintasan penyebrangan yang ada di Provinsi Riau yang akan berencana beroperasi.

Tabel 2.164.
Lintasan Penyeberangan Provinsi Riau Rencana Beroperasi

No	Lintasan Penyeberangan	Trayek Penyeberangan	Keterangan
1	Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan - Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	Antar Provinsi (Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau)	Rencana Operasi
2	Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan - Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Balai Karimun	Antar Provinsi (Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau)	Rencana Operasi
3	Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan (Kab. Siak) - Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Kab. Kep. Meranti)	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Rencana Operasi
4	Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan (Kab. Siak) - Pelabuhan Penyeberangan Sagu Lukit (Kab. Kep. Meranti)	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Rencana Operasi
5	Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan (Kab. Siak) - Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak (Kab. Kep. Meranti)	Antar Kabupaten Dalam Provinsi	Rencana Operasi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 70 tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan telah dibentuk UPT Tipe A pada Dinas Perhubungan, yaitu

- a. UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kota Dumai, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, berkedudukan di Kota Dumai.
- b. UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Mengkapan Buton.

Tabel 2.165.
Sarana Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan pada UPT Pengelola Perhubungan

No.	NAMA KAPAL	MILIK	GRT	KAPASITAS		LINTASAN YANG DILAYANI	Keterangan
				Penumpang (Orang)	Kendaraan Campuran (Unit)		
1	KMP. MURIA	PT. ASDP Indonesia ferry (Persero)	419	256	16	Dumai (Kota Dumai) - Tanjung Kapal (Kab. Bengkalis)	Komersil
2	KMP.KAKAP	PT. ASDP Indonesia ferry (Persero)	250	85	12	Dumai (Kota Dumai) - Tanjung Kapal (Kab. Bengkalis)	Komersil
3	KMP. SWARNA DHARMA	PT. Jembatan Nusantara	213	170	31	Dumai (Kota Dumai) - Tanjung Kapal (Kab. Bengkalis)	Komersil
4	KMP. BAREMBANG	PT. Pengembangan Investasi Riau	746	95	19	Alai Insit - Kampung Balak- Sei Selari	Komersil
5	KMP. TIRUS MERANTI	PT. ASDP Indonesia ferry (Persero)	444	180	40	Dumai (Kota Dumai) - Ala Insit (Kab. Kepulauan Meranti)	Subsidi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023

Untuk menunjang kelancaran aktifitas di pelabuhan penyeberangan pada UPT PPLLAJSDP dibutuhkan prasarana yang baik. Dinas Perhubungan Provinsi Riau berperan dalam memelihara fasilitas di pelabuhan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya dengan secara rutin mengajukan usulan kegiatan pemeliharaan dan operasional sesuai dengan kewenangannya dalam menunjang kinerja pelabuhan penyeberangan Dumai-Tanjung Kapal dan Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan-Kampung Balak.

2.1.4.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada kebutuhan sambungan rumah, sambungan untuk fasilitas, serta kebutuhan untuk telepon umum. Karena perkembangan kota yang relatif pesat dari tahun ke tahun maka kebutuhan akan jaringan komunikasi akan terus meningkat. Selain itu, untuk memperluas cakupan layanan informasi, maka perlu dilakukan pembangunan *Base Transceiver Station (BTS)* yang merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Berdasarkan hasil dari koordinasi bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sampai dengan tahun 2022 dari 398 desa/kelurahan yang masih terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data desa/kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses seluler dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.166.
Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Kelurahan/Desa		
		Jumlah Kelurahan/Desa	Data Low Signal dan Blankspot	Persentase Kel/Desa Data Low Signal dan Blankspot (%)
1.	Kuantan Singingi	229	27	11.79
2.	Indragiri Hulu	194	39	20.10
3.	Indragiri Hilir	236	101	42.79
4.	Pelalawan	118	26	22.03
5.	Siak	131	17	12.97
6.	Kampar	250	47	18.8
7.	Rokan Hulu	145	22	15.17
8.	Bengkalis	155	27	17.41
9.	Rokan Hilir	184	35	19.02
10.	Kepulauan Meranti	101	34	33.66
11.	Kota Pekanbaru	83	3	3.61
12.	Kota Dumai	36	4	11.11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Kementerian Kominfo RI

Dari data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data low signal dan blankspot adalah

Kabupaten Indragiri Hilir (42.79). Selain itu Kabupaten/Kota lainnya dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data low signal dan blankspot adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (33.66) dan Kabupaten Pelalawan (22.03).

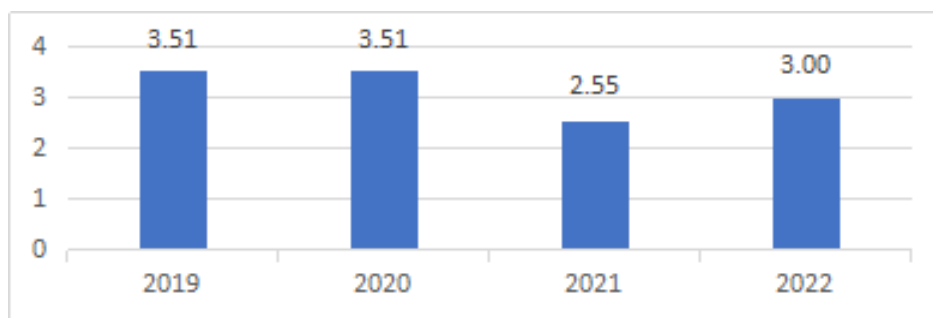
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, maka dibutuhkan adanya perubahan karakter, mentalitas atau pola pikir dikalangan pemerintahan dan badan publik serta membutuhkan reformasi sistem. Untuk itu diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Indeks SPBE merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Riau.

Tabel 2.167.
Indikator Layanan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika di
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE	Indeks	3.51	3.51	2.55	3.00	3.00
2	Keterbukaan Informasi Publik	-	Informatif	89,86	95,81	95,97	95,98
3	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Kab/Kota	12 kab/kota	-	-	-	-
4	Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasus	38	30	25	30	30
5	Hasil Peliputan Pemerintah Provinsi Riau	Kali	550	1174	1682	1612	1520
6	Layanan Media Cetak	Jumlah	14	32	32	34	34
7	Kerjasama Media Cetak	Jumlah	200	457	333	385	415
8	Layanan Media online	Jumlah	59	75	75	85	85
9	Kerjasama Media Online	Jumlah	826	1452	1043	1109	1141
10	Layanan Media Televisi	Jumlah	4	4	4	4	4
11	Kerjasama Media Televisi	Jumlah	32	141	92	92	55
12	Layanan Media Radio	Jumlah	2	3	3	3	2
13	Kerjasama Media Radio	Jumlah	2	4	2	2	2
14	Pembinaan OPD	Jumlah	44	34	35	44	44
15	Server	Unit	11	11	11	11	11
16	Bandwidth	Mbps	1500	1400	1000	1200	1200

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Prov. Riau, Tahun 2023

Berikut merupakan data terhadap nilai indeks SPBE Provinsi Riau dimulai dari tahun 2019 – 2022.



Gambar 2.47.
Indeks SPBE Provinsi Riau

Pemantauan dan evaluasi berpedoman pada Permenpan RI Nomor 59 Tahun 2020 terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator. Indeks SPBE di Provinsi Riau mengalami peningkatan sekitar 0,45 dari Tahun 2021, hal ini menunjukkan Pemprov Riau berkomitmen dalam peningkatan SPBE. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, aspek perencanaan strategis SPBE, aspek penyelenggara SPBE, aspek penerapan manajemen SPBE, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, aspek layanan publik berbasis elektronik. Secara keseluruhan 4 domain mengalami peningkatan namun perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

2.1.4.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Untuk melihat aktivitas koperasi dapat dilihat dari koperasi aktif, yaitu koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan koperasi di Provinsi Riau dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.168.
Perkembangan Koperasi di Provinsi Riau Tahun 2019– 2023

No	Investasi	Perkembangan					Rata-rata pertumbuhan per tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Koperasi	5.227	5.385	5.630	5.871	6.013	4,04
2	Koperasi Aktif	2.946	3.130	3.248	3.186	3.220	3,41
3	Anggota	342.198	246.072	313.939	308.159	341.622	3,01
4	Modal Sendiri (Rp. Juta)	5.383.714,37	1.249.202,63	1.558.690,60	2.162.747,43	2.586.908,11	1,69
5	Modal Luar (Rp. Juta)	1.438.191,34	1.464.123,39	1.779.978,99	2.444.445,95	3.007.038,22	18,57
6	Volume Usaha (Rp. Juta)	3.113.316,84	1.882.987,75	1.931.247,89	2.119.578,08	3.281.777,84	8,25
7	Sisa Hasil Usaha (SHU) (Rp. Juta)	200.779,40	114.635,42	157.600,61	256.579,33	323.014,20	20,51

Sumber : Online Data System (ODS) Kemenkop UKM RI Tahun, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,04% per tahun dengan perkembangan koperasi aktif juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,41% per tahun, dengan jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 888 koperasi atau 27,87% (sumber : kementerian koperasi) yang menjalankan manajemen perkoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dilihat dari dua tahun terakhir peningkatan jumlah koperasi tidak diikuti dengan peningkatan jumlah koperasi aktif atau terjadi peningkatan terhadap koperasi tidak aktif sebesar 13,56%.

Terhadap modal sendiri terjadi penurunan sebesar 1,69% per tahun, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 diindikasi karena dampak dari pandemi *Covid-19*. Namun terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) berfluktuatif dengan persentase peningkatan per tahun sebesar 20,51%.

Melihat perkembangan koperasi di Provinsi Riau saat ini dan potensi sumber daya alam yang mendukung aktivitas perkoperasian, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kelompok komoditi unggulan Provinsi Riau menjadi tantangan dan potensi sendiri untuk ditingkatkan.

.Tabel 2.169.
Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Kinerja Koperasi						
	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Anggota	Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
Kuantan Singingi	233	119	25.427	143.869.147.354	165.973.267.376	206.616.652.648	23.765.359.762
Indragiri Hulu	286	151	40.609	726.900.331.372	519.069.025.367	300.372.666.468	63.266.058.258
Indragiri Hilir	385	249	6.776	154.209.895.012	58.202.482.608	791.481.790.894	21.938.848.792
Pelalawan	269	179	27.923	126.923.120.952	354.004.450.296	149.755.495.191	15.878.365.992
Siak	334	174	18.403	234.824.953.532	86.140.963.378	334.649.930.492	36.979.676.973
Kampar	572	328	54.148	304.156.951.169	155.370.583.307	493.624.880.442	23.785.303.915
Rokan Hulu	323	159	12.819	63.767.873.978	72.407.252.519	67.803.131.688	7.384.558.618
Bengkalis	1.012	329	25.277	30.518.594.354	351.376.226.894	21.112.560.288	3.420.474.902
Rokan Hilir	458	408	37.308	90.740.578.252	147.703.884.025	196.972.229.941	16.123.035.794
Kepulauan Meranti	299	73	1.015	3.249.084.605	4.619.635.480	31.747.792.266	4.460.979.335
Pekanbaru	1.163	534	32.465	302.890.626.619	884.123.153.760	245.224.340.725	42.475.995.703
Dumai	301	193	10.409	78.563.182.805	45.985.753.501	201.728.910.650	15.665.935.157
Binaan Provinsi	243	194	43.140	282.556.103.090	151.550.560.336	216.361.658.705	46.281.080.046
Binaan Nasional	133	130	6.903	43.737.673.576	10.510.983.637	24.325.804.025	1.588.528.370
Jumlah	6.013	3.220	341.622	2,586,908,116,670	3,007,038,222,484	3,281,777,844,423	323,014,201,617

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten/Kota dengan jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Riau terdapat di kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.163 koperasi, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.012 koperasi, sedangkan koperasi aktif terbanyak di Kota Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hilir. Volume usaha terbesar yang menandakan aktivitas koperasi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kampar dengan jumlah koperasi aktif masing-masing sebanyak 249 dan 328 koperasi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan tersendiri berdasarkan modal usaha sesuai dengan Pasal 35 (ayat 3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, dimana usaha mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorang yang memiliki modal usaha sampai dengan 1 milyar, sedangkan

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha 1 milyar sampai 5 milyar. Selanjutnya usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadibagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha 5 milyar sampai 10 milyar. Perkembangan UMKM di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.170.
Perkembangan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Investasi	Perkembangan					Rata-rata pertumbuhan per tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Usaha Mikro	104.774	133.684	137.128	247.507	306.460	27,93
2	Usaha Kecil	24.660	3.257	2.565	93	509	48,97
3	Usaha Menengah	2.321	132	560	21	72	75,46

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2023

Data UMKM Tahun 2019 bersumber dari akumulasi Kabupaten/Kota yang dilakukan pencatatan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, data tahun 2020-2021 merupakan data yang dibangun melalui aplikasi mataumkm.riau.go.id dan untuk tahun 2022-2023 merujuk pada peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 melalui Sisten Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian Koperasi dan UKM RI yang akan digunakan selanjutnya.

Perkembangan UMKM di Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Usaha Menengah (75,46%), Usaha mikro (27,93%) dan Usaha kecil (48,77%). Jika dibandingkan dengan perkembangan UMKM 2 tahun terakhir di semua kelompok jenis usaha mengalami peningkatan, baik peningkatan kelas jenis usaha maupun penambahan usaha baru.

Sedangkan terhadap usaha yang telah difasilitasi legalitas usahanya melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Riau diantaranya sertifikasi halal sebanyak 77 unit usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 4.603 unit usaha dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 59 unit usaha. Legalitas usaha ini dibutuhkan oleh UKM untuk bermitra dengan pengusaha menengah dan besar

2.1.4.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Untuk melihat perkembangan investasi di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.171.
Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Investasi	Perkembangan					Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	PMDN						
	Proyek (Unit)	1.002	3.617	5.526	4.793	7.788	80,28
	Nilai (Rp. Milyar)	26.292,18	34.117,80	24.997,7	43.061,13	48.243,30	55,54
	Penyerapan TK	55.352	91.010	40.003	45.003	50.830	16,88
2	PMA						
	Proyek (Unit)	578	903	809	731	880	14,43
	Nilai (US\$. Juta)	1.034,03	1.077,99	1.921,41	2.748,69	2.042,26	19,99
	Penyerapan TK	6.103	32.178	21.385	5.918	14.395	91,78

Sumber: Buku Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau

Nilai investasi PMDN Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 55,54% per tahun dengan jumlah proyek tumbuh sebesar 80,28% dan penyerapan tenaga kerja rata-rata tumbuh sebesar 16,88% per tahun. Peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi pertahun tidak diikuti dengan

peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia, disamping itu realisasi investasi yang tercatat melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga berasal dari perluasan proyek yang sudah ada dan bukan berasal dari proyek investasi baru.

Nilai investasi PMDN tertinggi pada tahun 2023 dengan sektor terbesar yaitu : listrik, gas dan air bersih (28%), industri makanan (16%) dan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (15%).

Rata-rata peningkatan nilai investasi PMA Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir sebesar 12,94%, dengan rata-rata peningkatan jumlah proyek sebesar 32,82% dan rata-rata peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 78,92%. Investasi PMA berbanding terbalik dengan investasi PMDN, dimana rata-rata penyerapan tenaga kerja lebih tinggi daripada peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi.

Nilai investasi PMA tertinggi pada tahun 2022 dengan sektor terbesar adalah industri kertas dan percetakan (29%), listrik, gas dan air (22%) dan industri kimia dan farmasi (16%).

Tabel 2.172.
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Se-Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2023

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Kuantan Sengingi	25.541.800.000	214.201.800.000	617.652.300.000	564.136.200.000	561.391.000.000	173,26
2	Indragiri Hulu	2.575.528.800.000	3.913.819.100.000	1.282.484.600.000	3.156.037.700.000	1.028.586.200.000	35,82
3	Indragiri Hilir	385.228.100.000	448.596.800.000	1.855.341.500.000	8.013.011.600.000	5.495.248.800.000	107,61
4	Pelalawan	10.612.220.300.000	2.347.537.300.000	1.698.549.200.000	2.005.961.100.000	5.523.038.600.000	1.309,66
5	Siak	1.902.008.600.000	3.495.746.500.000	4.094.599.800.000	8.706.499.000.000	10.098.297.900.000	173,08
6	Kampar	1.798.778.300.000	7.341.372.100.000	4.966.374.500.000	3.371.308.700.000	9.809.035.700.000	168,05
7	Rokan Hulu	943.566.700.000	901.595.100.000	1.263.663.400.000	2.461.251.700.000	1.222.871.100.000	22,70
8	Bengkalis	4.401.854.200.000	5.208.743.200.000	5.319.269.200.000	2.542.549.300.000	5.296.219.300.000	204,75
9	Rokan Hilir	339.493.000.000	580.777.900.000	235.501.100.000	1.627.786.400.000	1.411.079.400.000	159,40
10	Pekanbaru	1.052.873.700.000	2.534.744.000.000	2.208.048.100.000	3.983.436.500.000	5.898.237.700.000	107,27
11	Dumai	2.237.451.800.000	7.117.105.500.000	1.444.720.200.000	6.411.175.100.000	1.789.228.800.000	182,54
12	Kep. Meranti	17.630.700.000	13.569.700.000	11.592.500.000	217.982.400.000	110.023.300.000	330,57
JUMLAH	26.292.176.000.000	34.117.809.000.000	24.997.796.400.000	43.061.135.700.000	48.243.257.800.000		

Sumber : Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau 2023

Rata-rata pertumbuhan tertinggi nilai investasi PMDN dalam 5 tahun terakhir terdapat di Kabupaten Pelalawan (1.593,24%), Kabupaten Kepulauan Meranti (425,41%) dan Kota Dumai (246,19%). Sedangkan pada tahun 2022 nilai investasi tertinggi terdapat di Kabupaten Siak (20,22%) pada, Kabupaten Indragiri Hilir (18,61%) dan Kota Dumai (14,89%). Nilai investasi PMDN Provinsi Riau tahun 2022 merupakan tertinggi keempat di Indonesia dan yang tertinggi se-Sumatera.

Tabel 2.173.
Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi
Se-Provinsi Riau Tahun 2018 s/d 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan %
		(Juta US \$)					
1	Kuantan Singingi	6,76	0,95	0,72	7,52	25,23	175,49
2	Indragiri Hulu	1,10	1,89	1,37	3,17	3,07	2.815,25
3	Indragiri Hilir	1,92	274,38	2,32	327,04	482,37	5.615,20
4	Pelalawan	562,19	166,38	868,65	1.627,70	1.095,36	187,40
5	Siak	9,42	17,71	37,26	90,41	33,57	32,18
6	Kampar	12,31	16,66	201,95	23,89	70,57	199,51
7	Rokan Hulu	1,66	0,71	50,08	50,43	43,81	1.411,20
8	Bengkalis	152,80	3,88	30,25	107,94	20,48	359,35
9	Rokan Hilir	2,13	5,05	2,33	23,84	41,12	175,09
10	Pekanbaru	37,09	184,53	129,98	23,52	40,95	58,86
11	Dumai	246,66	405,85	596,51	463,25	185,19	38,26
12	Kep. Meranti	0	0	0	0	0,52	0
	JUMLAH	1.034,04	1.077,99	1.921,42	2.748,71	2.042,24	

Sumber : Buku Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau 2023

Rata-rata pertumbuhan tertinggi nilai investasi PMA dalam 5 tahun terakhir terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (6.997,15%), Kabupaten Rokan Hulu (1.699,79%) dan Kabupaten Kampar (249,21%). Sedangkan pada tahun 2022 nilai investasi PMA tertinggi terdapat di Kabupaten Pelalawan (59,22%), Kota Dumai (16,85%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (11,90%). Nilai investasi PMA Provinsi Riau tahun 2022 merupakan peringkat ketujuh tertinggi di Indonesia dan peringkat pertama di Sumatera.

Tabel 2.174.
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Per Sektor Provinsi Tahun 2019 – 2023

NO	BIDANG USAHA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	Rata-rata pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4.157.444.100.000	6.976.845.700.000	4.161.535.500.000	6.369.829.600.000	6.827.589.100.000	26,49
2	Perikanan	250.000.000	892.500.000	577.400.000	1.511.900.000	4.808.600.000	68,92
3	Kehutanan	7.116.010.800.000	7.934.900.000	5.692.310.900.000	5.804.664.700.000	20.220.839.1000.000	14.357,62
4	Pertambangan	78.728.000.000	3.910.200.000	15.012.900.000	1.221.260.200.000	471.989.900.000	1.632,46
5	Industri Kayu	-	13.000.000.000	17.200.000.000	1.150.000.000	117.060.800.000	1.983,64
6	Industri Tekstil	-	125.000.000	-	176.000.000	224.900.000	5,56
7	Industri Makanan	4.205.169.100.000	6.121.002.700.000	4.008.559.200.000	6.908.487.800.000	6.161.406.500.0000	12,43
8	Industri Kimia dan Farmasi	599.458.300.000	2.934.485.500.000	205.685.400.000	1.098.847.400.000	279.508.400.000	187,85
9	Industri Mineral Non Logam	274.596.400.000	125.669.600.000	178.724.200.000	180.833.900.000	66.264.100.000	-3,99
10	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	55.663.700.000	24.871.200.000	40.520.700.000	32.684.100.000	94.549.300.000	35,51
11	Industri Kertas dan Percetakan	203.304.600.000	13.064.500.000	233.156.700.000	1.943.624.000.000	86.741.500.000	440,45
12	Industri Karet dan Plastik	3.105.100.000	28.854.300.000	57.457.500.000	165.231.100.000	18.675.300.0000	185,97
13	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	500.000.000	25.080.000.000	178.586.8000.000	1.085,61
14	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	0,00

NO	BIDANG USAHA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	Rata-rata pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2.779.100.000	1.680.400.000	-	668.400.000	405.000.000	-15,79
16	Industri Lainnya	451.600.700.000	224.426.900.000	39.857.500.000	542.709.100.000	34.269.900.000	543,88
17	Konstruksi	6.918.291.300.000	13.549.843.600.000	5.092.413.700.000	723.073.100.000	3.522.103.000.000	2.080,50
18	Hotel dan Restoran	134.011.800.000	994.963.300.000	285.109.300.000	91.202.600.000	465.286.600.000	234,13
19	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	100.581.800.000	137.434.100.000	26.192.400.000	554.642.800.000	241.000.100.000	378,42
20	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.237.312.200.000	177.278.300.000	1.076.747.900.000	3.707.472.200.000	1.511.274.500.000	486,38
21	Listrik, Gas dan Air	326.340.400.000	1.311.728.600.000	2.716.263.000.000	12.194.420.300.000	5.017.750.300.000	139,09
22	Perdagangan dan Reparasi	403.161.500.000	732.894.800.000	683.286.700.000	1.304.430.100.000	1.620.028.200.000	197,42
23	Jasa Lainnya	24.367.100.000	736.902.900.000	464.685.500.000	189.136.400.000	1.302.895.900.000	688,29
	JUMLAH	26.292.176.000.000	34.117.809.000.000	24.997.796.400.000	43.061.135.700.000	48.243.257.800.000	

Rata-rata pertumbuhan tertinggi realisasi investasi PMDN Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir adalah sektor kehutanan (17.884,93%), sektor konstruksi (2.503,85%) dan sektor pertambangan (2.055,91%). Pada tahun 2022 realisasi investasi sektor yang paling tinggi adalah listrik, gas dan air (28,32%), industri makanan (16,04%), dan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (14,79%).

Tabel 2.175.
Perkembangan Realisasi Investasi PMA Per Sektor Provinsi Riau
Tahun 2018 – 2023

NO	BIDANG USAHA	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Juta US \$)					
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	8,34	286,65	298,51	378,97	418,32	656,08
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-
3	Kehutanan	-	-	-	-	0,52	-
4	Pertambangan	0,20	-	-	-	8,17	-
5	Industri Kayu	-	-	0,01	-	-	-
6	Industri Tekstil	1,64	4,18	0,45	1,05	0,75	34,08
7	Industri Makanan	83,00	92,10	389,32	391,44	453,25	59,90
8	Industri Kimia dan Farmasi	445,16	356,38	215,26	427,30	45,53	14,89
9	Industri Mineral Non Logam	15,27	10,21	3,81	26,96	0,07	121,25
10	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	-	-	-	-	0,17	-
11	Industri Kertas dan Percetakan	297,06	141,23	741,79	811,36	835,19	675,25
12	Industri Karet dan Plastik	2,50	0,002	2,170	0,10	7,77	23.204,94
13	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	-	-	-
14	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik,	-	-	-	-	-	-

NO	BIDANG USAHA	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Juta US \$)					
	Presisi, Optik dan Jam						
16	Industri Lainnya	-	-	25,49	0,01	0,68	1.320,01
17	Konstruksi	2,15	0,14	-	5,92	-	(57,54)
18	Hotel dan Restoran	0,65	0,07	2,74	4,44	3,95	1.168,55
19	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	11,41	4,08	1,84	47,76	5,68	446,70
20	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	22,88	0,03	59,05	18,57	36,63	39.360,15
21	Listrik, Gas dan Air	136,69	181,22	168,57	602,83	218,46	48,00
22	Perdagangan dan Reparasi	2,03	0,83	11,07	29,68	6,62	246,86
23	Jasa Lainnya	5,05	0,86	1,34	2,32	0,49	73,42
	JUMLAH	1.034,03	1.077,98	1.921,42	2.748,71	2.042,25	

Rata-rata pertumbuhan tertinggi realisasi investasi PMA Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir adalah sektor Transportasi, gudang dan telekomunikasi (49.175,87%), sektor industri karet dan plastik (27.088,67%) dan sektor hotel dan restoran (1.463,44%). Pada tahun 2022 realisasi investasi sektor yang paling tinggi adalah industri kertas dan percetakan (29,52%), listrik, gas dan air (21,93%), dan industri kimia dan farmasi (15,55%).

2.1.4.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga

a. Fasilitas Olahraga

Untuk mendukung aktifitas keolahragaan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas kepemudaan dan Olahraga mengelola beberapa sarana prasarana olahraga yaitu :

Tabel 2.176.
Jumlah Venue Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Jenis	Volume	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Stadion Utama Riau	75.543	M2	Baik
2	Kawasan Sport Centre Rumbai	313.400	M2	Baik
3	Gelanggang Remaja	34.978,4	M2	Baik
4	Kolam Renang Sport Centre Rumbai	29.120	M2	Baik
5	Hall Basket Sport Centre Rumbai	7.500	M2	Baik
6	Hall Senam Sport Centre Rumbai	5.500	M2	Baik
7	Stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai	10.543	M2	Baik
8	Stadion Atletik Sport Centre Rumbai	7.000	M2	Baik
9	Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai	5.600	M2	Baik
10	Hall Sepak Takraw	3.750	M2	Baik
11	Asrama Atlit Sport Centre Rumbai	9.690,76	M2	Baik
12	Stadion Base Ball	23.549	M2	Baik
13	Hall Menembak	5.561	M2	Rusak Berat
14	GOR Tribuana	12.903	M2	Baik

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana tahun 2020

1. Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Wilayah Nasional

Berikut ini prestasi-prestasi olahraga dalam kurun waktu 2019-2023 yang telah diraih atlet-atlet Provinsi Riau pada ajang multi event dan single event tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Prestasi merupakan hasil pembinaan olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) serta hasil pembinaan dari Organisasi Keolahragaan yakni KONI Riau, NPC Riau dan SOIna Riau yang memperoleh dana hibah dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Berikut hasil perolehan medali atlet PPLP Riau yang mengikuti ajang single event Nasional.

Tabel 2.177.
Perolehan Medali Provinsi Riau Pada Single Event Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Nama Kejuaraan	Perolehan Medali (jumlah atlet orang)					
			Emas		Perak		Perunggu	
			Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi
1	Tahun 2019	Kejuaraan Antar PPLP	8	3	3	4	9	13
2	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Sepak Bola	-	-	18	-	-	-
3	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Dayung	5	-	2	-	5	-
4	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Panahan	-	-	-	2	-	-
5	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Angkat Besi	-	-	-	-	2	-

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Ajang Kejurnas antar PPLP/D dan SKO merupakan event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengetahui capaian pembinaan atlet PPLP/D/SKO di Daerah. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 event Kejurnas antar PPLP/D dan SKO tidak dilaksanakan karena adanya pandemic *Covid-19*.

Tabel 2.178.
Perolehan Medali Provinsi Riau Pada Multi Event Nasional Tahun 2019-2023

No	Kegiatan	Tahun	Lokasi	Jumlah Prestasi Atlet (Orang)					
				EMAS		PERAK		PERUNGGU	
				Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi
1.	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	2019	Jakarta	5	9	26	3	14	4
2	Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	2019	Jakarta	3	2	6	4	3	3

No	Kegiatan	Tahun	Lokasi	Jumlah Prestasi Atlet (Orang)					
				EMAS		PERAK		PERUNGGU	
				Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi
3.	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	2019	Jawa Barat	1	-	-	-	3	2
4.	Pekan Olahraga Nasional (PON)	2021	Papua	19	11	16	13	25	8
5.	Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS)	2021	Papua	15	11	22	11	30	16
6.	Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PraPOPNAS)	2022	Jakarta	8	3	6	4	4	5
7.	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	2022	Solo	-	-	1	-	3	1
8.	Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS)	2022	Malang	-	-	-	-	46	-
9.	Pekan Special Olympic Nasional (PESONAS)	2022	Semarang	33	17	20	10	9	17
10.	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	2023	Palembang	4	5	11	4	23	4
11.	Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	2023	Palembang	-	1	2	2	1	-
12.	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas)	2023	Kalimantan Selatan, Banjarmasin	-	6	3	-	3	2

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Disini dapat dijelaskan juga, prestasi atlet pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2019, Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) 2019 dan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) 2019. Sedangkan event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2021 dan Pekan Paralympic Pelajar

Nasional (PEPARPENAS) 2021 batal dilaksanakan karena pandemic *Covid-19*. Namun pelaksanaan event Nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) tetap diselenggarakan pada tahun 2021 mengingat sudah diadakan penundaan dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2022 event yang diikuti adalah Pra POPNAS, POSPENAS dan PORWANAS melalui Dispora Provinsi Riau dan event PESONAS yang diikuti oleh SOIna Riau pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sesuai dengan agenda event di Tingkat Nasional mengirimkan atlet pada event POPNAS, PEPARPENAS dan POMNas.

2. Jumlah Atlet yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional

Dibawah ini jumlah atlet yang mengikuti Event Wilayah dan Nasional dari 2019-2023. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 batal dilaksanakan karena pandemi *Covid-19*.

Tabel 2.179.
Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional

No	Tahun	KEJURNAS		POPNAS		PEPARPENAS		POMNAS		PRA POPNAS		POSPENAS		PORWANAS		Jumlah
		Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	
1	2019	53	32	61	26	8	8					23	22			243
2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	39	18	27	27	48	2	161
3	2023	32	3	108	75	3	4	28	17	-	-	-	-	-	-	270

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa jumlah atlet yang dikirim untuk mengikuti event Tingkat Nasional menyesuaikan sesuai dengan event yang diselenggarakan pada tahun berkenaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

d. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi Pemuda merupakan wadah bagi pemuda untuk melatih kepemimpinan. Keberadaan organisasi Pemuda bernilai strategis dalam pembangunan bangsa karena diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap organisasi pemuda harus senantiasa dilakukan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

Tabel 2.180.
Organisasi Pemuda Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

No	Organisasi Pemuda Binaan Dispora	Jumlah Pengurus		
		2019	2020	2021
1	Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Riau	700	700	746
2	Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Provinsi Riau	25	20	20
3	Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Provinsi Riau	20	15	15
4	Korsp Alumni Kapal Pemuda Nusantara (KA KPN) Provinsi Riau	25	25	25
5	Forum kewirausahaan Pemuda (FKP) Provinsi Riau	40	20	10
6	Forum Pemuda Pelopor Provinsi Riau	20	50	100
7	Relawan Muda Riau (RMR)	50	50	320
8	Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (PEPELINGASIH)	0	24	145
9	Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Riau	0	26	500

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

e. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda

Pada tahun 2020, Provinsi Riau yang memiliki 1,8 juta pemuda (Statistik Pemuda, 2020) mengalami penurunan nilai IPP sebesar 2 poin dari 52,67 pada 2019 menjadi 50,67 pada 2020. Nilai ini berada sedikit di bawah IPP nasional (51,00). Penurunan nilai IPP Provinsi Riau disebabkan oleh berkurangnya capaian domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain lapangan dan kesempatan kerja yang masing-masing menurun 5 poin. Sedangkan nilai domain pendidikan, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi (Gambar 2.50, panel a). Jika dibandingkan dengan nilai nasional (Gambar 2.50, panel b), hanya domain gender dan diskriminasi yang memiliki nilai yang relatif lebih baik, yaitu 6,67 poin di atas rata-rata nilai nasional. Selain itu, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan ternyata masih relatif rendah (50,00) dibandingkan dengan nilai nasional (55,00). Hal yang sama juga terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang baru mencapai 43,33, lebih rendah dari nilai nasional 46,67. Sedangkan capaian domain pendidikan (70) serta domain lapangan dan kesempatan kerja (40) setara dengan capaian nasional. Perbandingan nilai transformasi indikator pembentuk IPP Provinsi Riau dengan nilai nasional (Gambar 2.50, panel c),

memperlihatkan tiga indikator yang nilainya di bawah nilai transformasi nasional, tujuh indikator yang nilainya sama dengan nilai transformasi nasional, dan lima indikator yang nilai transformasinya di atas nilai transformasi nasional. Kelima indikator tersebut yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang merokok, TPT pemuda, angka perkawinan usia anak, dan persentase pemuda perempuan yang menempuh Pendidikan SMA keatas. Provinsi Riau menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan pemudanya, khususnya pada indikator persentase remaja hamil yang melonjak dari 22,08 persen pada 2019 menjadi 37,02 persen pada 2020. Kondisi ini bersamaan dengan meningkatnya angka perkawinan usia anak dari 8,3 persen pada 2019 menjadi 9,19 persen pada 2020. Selanjutnya Provinsi Riau juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,56 persen pada 2019 menjadi 0,35 persen pada 2020, atau di bawah capaian nasional yang sebesar 0,44 persen. Seiring dengan ini, Provinsi Riau juga mengalami tantangan pada pencapaian indeks domain gender dan diskriminasi, khususnya karena masih rendahnya persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (20,39 persen) atau 1,92 poin di bawah rata-rata nasional. Tantangan lainnya yang dialami oleh Provinsi Riau ialah pada domain partisipasi dan kepemimpinan, di mana dua indikatornya mempunyai kinerja yang lebih rendah dari capaian nasional, yaitu indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.



Gambar 2.50.

Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2019-2020

2.1.4.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Persandian

Pembangunan daerah tidak lepas dari tersedianya data yang *up to date* sebagai landasan perencanaan. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau selaku walidata tingkat daerah Provinsi Riau memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola data statistik sektoral Provinsi Riau sesuai dengan amanat perpres 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia dan peraturan gubernur no 23 tahun 2021 tentang satu data provinsi riau. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan forum data provinsi riau dimana telah dirumuskan berita acara antara bappedalitbang provinsi riau, bps riau dan diskominfo provinsi riau terkait kesepakatan data-data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah provinsi riau. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022 telah terkumpul data sebanyak 10.163 data dan pada tahun 2023 bidang statistik diskominfo provinsi riau menargetkan 3.600 data statistik sektoral provinsi riau.

Pada tahun 2019 terdapat 97,73% perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan tidak adanya perubahan dari tahun sebelumnya. pada 2020 dan 2021 terdapat 97,73% perangkat Daerah yang telah menerima layanan Persandian. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan 100 %. Pada tingkat pengamanan Indeks KAMI terjadi kenaikan Penilaian pada tahun 2022 sebesar 57% .pada layanan KSI perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian. Pada Layanan email sanapati sudah 100% perangkat Daerah yang mendapatkan Layanan Persandian termasuk dengan Kab/Kota. Pada tahun 2022 terdapat 2,27% yang telah mengikuti Diklat Sandi, dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 6,82 % Penerima Layanan Sertifikat Elektronik pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 100% perangkat daerah yang telah menerima layanan persandian. seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Disamping itu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 3,00 tergolong predikat indeks baik (2,6 - < 3,5), seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.181.
Persentase Pelayanan Pengamanan Persandian Pada Seluruh Kab/Kota dan OPD
di Provinsi Riau dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah OPD	Tingkat Pengamanan Informasi Publik						Tingkat Pengamanan informasi pemerintah										Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Persandian di Provinsi Riau
		Index KAMI		KSI (Keamanan Sistem Informasi)		Surat Elektronik (mail sanapati)		Diklat Sandi		KP (Kontra Penginderaan)		Sertifikat Elektronik		(Op. Komunikasi sandi, enkripsi email, e- Office)		Tata Kelola Informasi Cadangan			
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	12
		jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%		
2019	44	10	22,73%	4	9,09%	12	21,43%	1	2,27%	4	9,09%	43	97,73%	44	100%	0	-	43	97,73%
2020	44	-	-	-	-	56	100%	-	-	7	15,90%	43	97,73%	44	100%	0	-	43	97,73%
2021	44	1	2,27%	6	100%	56	100%	-	-	4	9,09%	43	97,73%	44	100%	0		43	97,73%
2022	44	1	2,27%	6	100%	56	100%	1	2,27%	3	6,82%	44	100 %	44	100%	0		44	100%
2023	44	1	2,27%	6	100%	56	100%	3	6,82	-	-	44	100 %	44	100%	0		44	100%

Sumber: Arsip Persandian

Tabel 2.182.
Rincian OPD dengan Pelayanan Persandian

No.	OPD	Jenis Pelayanan Persandian
1	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	KSI , KP
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	KSI , KP
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)	KSI , S.E , KP
4	Sekretariat Daerah (Asisten I,II,III, VVIP Lancang Kuning dan Biro)	KSI , S.E , KP
5	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)	KSI , S.E
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang)	KP
7	DPRD Provinsi Riau	KP

Sumber: Arsip Persandian

2.1.4.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Peran kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu lima tahun terakhir. IPK dibentuk melalui tujuh dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.183.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2018–2022

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
D1	Ekonomi Budaya	0.10	45.76	48.32	42.45	26.35	39.34	N/A
D2	Pendidikan	0.20	72.63	77.23	75.29	74.27	76.22	N/A
D3	Ketahanan Sosial Budaya	0.20	74.84	75.41	75.64	70.07	73.88	N/A

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
D4	Warisan Budaya	0.25	44.03	45.91	48.00	47.47	51.75	N/A
D5	Ekspresi Budaya	0.10	35.10	36.13	36.05	22.31	25.39	N/A
D6	Budaya Literasi	0.10	58.20	61.90	65.25	56.39	61.92	N/A
D7	Gender	0.05	61.14	60.24	58.82	59.20	57.91	N/A
IPK Provinsi Riau			57.47	59.65	59.50	54.20	58.52	N/A
IPK Nasional			53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	N/A

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudriek RI

IPK Riau periode sebelum pandemi *Covid-19* meningkat dari 57,47 pada 2018 menjadi 59,65 pada 2019. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan hampir di seluruh dimensi pembentuknya, kecuali Dimensi Gender. Dimensi Pendidikan tumbuh paling tinggi sebesar 6,34% menjadi 77,23 pada periode yang sama. Sementara itu, Dimensi Gender mengalami penurunan sebesar 1,47% menjadi 60,24

Pada tahun pertama Pandemi *Covid-19*, skor IPK Riau cenderung stabil meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 0,25%. Peringkatnya meningkat ke posisi 4. Namun, pada tahun kedua pandemi skor IPK Riau menurun cukup tajam, yakni sebesar 8,91% menjadi 54,20. Pada tahun ini peringkatnya turun ke posisi 8. Hampir seluruh dimensi pembentuknya menurun, kecuali Dimensi Gender. Dimensi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Budaya Literasi.

Memasuki periode Pasca Pandemi, skor IPK Riau mengalami perbaikan. Skor IPK berhasil meningkat sebanyak 4 poin menjadi 58,52, diiringi dengan meningkatnya hampir seluruh dimensi pembentuk, kecuali Dimensi Gender yang mengalami sedikit penurunan. Dimensi yang mengalami peningkatan paling besar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya. Perbaikan skor IPK pada periode ini juga ditunjukkan dengan peningkatan peringkat Riau, yakni menduduki peringkat 4 secara nasional

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan provinsi berpedoman pada Pokok

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi. Dokumen Pokok- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 856/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, dimana secara ringkas data OPK dan perkembangannya sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.184.
Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018- 2023

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tradisi Lisan	158	158	160	305	240	429
2	Manuskrip	41	41	43	73	94	94
3	Adat Istiadat	65	65	65	146	191	212
4	Ritus	273	273	273	385	431	431
5	Pengetahuan Tradisional	385	385	385	844	995	996
6	Teknologi Tradisional	189	189	189	403	506	507
7	Seni	370	370	370	538	588	600
8	Bahasa	74	74	74	74	128	128
9	Permainan Rakyat	219	219	219	255	273	283
10	Olahraga Tradisional	44	44	44	68	86	88
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1.452	1.482	1.988	1988	2424	2489
Jumlah		3.270	3.300	3.810	5.079	6.136	6.257

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Unsur pemajuan kebudayaan terklasifikasi ke dalam 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan ditambah 1 (satu) obyek berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara keseluruhan upaya pemajuan kebudayaan meliputi 11 OPK yang terdiri atas (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) kesenian, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya, terkait ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan yang datanya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.185.
Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pelindungan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	112	119	122	125	0,037
2	Manuskrip	30	32	33	34	0,043
3	Adat Istiadat	46	48	50	51	0,035
4	Ritus	191	202	208	214	0,025
5	Pengetahuan Tradisional	270	285	293	302	0,038
6	Teknologi Tradisional	132	140	144	148	0,039
7	Seni	259	274	282	290	0,038
8	Bahasa	52	55	56	58	0,037
9	Permainan Rakyat	153	162	167	172	0,040
10	Olahraga Tradisional	31	33	34	34	0,048
11	Cagar Budaya/warisan budaya bendawi	1392	1474	1515	1557	0,038
	Jumlah	2667	2824	2904	3038	0,047

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2022

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan 2023 dari 3810 Data OPK telah Dilindungi sebanyak 3038 Data OPK atau 79,74 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,047 persen.

Tabel 2.186.
Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pengembangan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	3	6	10	13	0,66
2	Manuskrip	1	2	3	3	0,75
3	Adat Istiadat	1	3	4	5	0,86
4	Ritus	5	11	16	22	0,68
5	Pengetahuan Tradisional	8	16	23	31	0,60
6	Teknologi Tradisional	4	8	11	15	0,58
7	Seni	7	15	22	30	0,66
8	Bahasa	1	3	4	6	0,94
9	Permainan Rakyat	4	9	13	18	0,69

No	OPK	Pengembangan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
10	Olahraga Tradisional	1	2	3	4	0,61
11	Cagar Budaya/warisan budaya bendawi	40	80	119	95	0,43
	Jumlah	76	153	229	242	0,52

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan 2023 dari 3810 Data OPK telah dikembangkan sebanyak 242 Data OPK atau 6,35 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,52 persen.

Tabel 2.187.
Data OPK Yang Dimafaatkan Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pemanfaatan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	3	5	6	8	0,40
2	Manuskrip	1	1	2	2	1,00
3	Adat Istiadat	1	2	3	4	0,61
4	Ritus	5	8	11	15	0,45
5	Pengetahuan Tradisional	8	12	16	20	0,36
6	Teknologi Tradisional	4	6	8	11	0,30
7	Seni	7	11	15	20	0,42
8	Bahasa	1	2	3	5	0,72
9	Permainan Rakyat	4	7	9	12	0,46
10	Olahraga Tradisional	1	1	2	3	0,75
11	Cagar Budaya/warisan budaya bendawi	40	60	80	100	0,36
	Jumlah	76	115	153	200	0,38

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan 2023 dari 3810 Data OPK telah dimanfaatkan sebanyak 200 Data OPK atau 5,25 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,38 persen.

Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK, juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/

pemerhati kebudayaan. Sebaran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.188.
Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan
di Provinsi Riau Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	SDM	Lembaga	Sarana Prasarana
1.	Kuantan Singingi	4	72	N/A
2.	Indragiri Hulu	77	110	N/A
3.	Indragiri Hilir	5	77	1
4.	Pelalawan	2	47	N/A
5.	Siak	11	32	3
6.	Kampar	3	51	1
7.	Rokan Hulu	3	15	5
8.	Rokan Hilir	1	20	4
9.	Bengkalis	14	94	1
10.	Kep. Meranti	4	76	5
11.	Pekanbaru	5	59	10
12.	Dumai	N/A	42	3
Jumlah		129	695	33

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang telah diidentifikasi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 129 orang. Namun hingga saat ini dari sejumlah SDM tersebut, belum dapat diidentifikasi jumlah orang yang telah mendapat sertifikasi keahlian dan diakui kompetensinya. Untuk jumlah lembaga kebudayaan yang terdiri atas Lembaga Adat Melayu, Dewan Kesenian, dan sanggar/komunitas/organisasi kebudayaan berjumlah 695 lembaga kebudayaan. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdiri atas museum, taman budaya, gedung balai kerapatan adat, gedung atau panggung seni, perpustakaan, dan bioskop berjumlah 33 sarana dan lembaga pengelolanya. Upaya pemajuan terhadap keberadaan SDM, lembaga dan sarana prasarana dalam bidang kebudayaan perlu menjadi perhatian khusus. Upaya sertifikasi, workshop, seminar, fasilitasi program dan operasional, serta upaya optimalisasi dan pembangunan sarana prasarana baru perlu menjadi prioritas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya perlindungan status OPK sebagai bagian dari kebudayaan Melayu Riau. Dari tahun 2013 hingga tahun 2022 Provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan nasional terhadap 64 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan 95 Cagar Budaya/OPK Bendawi. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya selama kurun waktu 2019-2022 serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah OPK yang ada, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.189.
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	OPK Non Bendawi	1822 OPK				
	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	6	10	5	8	2
	• Persentase	0,33	0,55	0,27	0,44	0,11
2	OPK Bendawi	1.988 OPK				
	• Penetapan Cagar Budaya	19	-	-	25	12
	• Persentase	0,96	-	-	1,26	0.60

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2023

Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya. Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

2.1.4.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab fasilitas perpustakaan terutama buku, baik menyangkut keragaman koleksi maupun jumlah koleksi buku yang tersedia harus menjadi perhatian di samping fasilitas lainnya. Hal ini karena masing-masing pengunjung mempunyai kepentingan

referensi yang berbeda dengan buku yang ingin dicari dan memanfaatkan fasilitas peminjaman buku. Adapun jumlah pengunjung di Perpustakaan Soeman HS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.190.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah pengunjung (orang)	416.277	114.075	97.031	144.184	220.614	0,035
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	6.971.745	6.394.087	6.574.932	6.614.380	6.861.237	-0,003
3	Rasio	0,06	0,02	0,01	0,02	0,03	0,110

Sumber: Dispersip Provinsi Riau 2024

Jumlah pengunjung di Perpustakaan Soeman HS setelah *Covid-19* meningkat sejak tahun 2021, sampai pada Tahun 2023 Meningkat menjadi 220.614 pengunjung atau rata rata pertumbuhan sejak tahun 2019-2023 sebesar 0,035 persen. Jika dibandingkan dengan populasi orang yang harus dilayani, rasionya juga mengalami Peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,110 persen.

Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 66,88 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Lima Kabupaten/Kota dengan pencapaian IPLM diatas nilai Provinsi yaitu Kota Pekanbaru 70.77, Kabupaten Siak 70.06, Kota Dumai 68.42, dan Kabupaten Pelalawan 66.96. Sedangkan, dua Kabupaten/kota yang terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 48.99 dan Kabupaten Rokan Hilir 50.36.

Tabel 2.191.
Rekapitulasi IPLM Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2023

NO	PROVINSI/ KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPML3	UPML4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
1	PROVINSI RIAU	0,3518	0,2753	1,0000	0,0543	1,0000	1,0000	1,0000	66.88
2	Kab. Bengkalis	0,2976	0,1213	0,3045	0,0467	1,0000	1,0000	1,0000	53.86
3	Kab. Indragiri Hilir	0,1832	0,0766	0,8929	0,0370	0,2396	1,0000	1,0000	48,99
4	Kab. Indragiri Hulu	0,2912	0,2510	1,0000	0,0524	0,6669	1,0000	1,0000	60,88
5	Kab. Kampar	0,3344	0,2978	1,0000	0,0199	0,3168	1,0000	1,0000	56,70
6	Kab. Kepulauan Meranti	0,2323	0,3011	1,0000	0,0632	0,8271	1,0000	1,0000	63,19
7	Kab. Kuantan Singingi	0,4915	0,2810	1,0000	0,0328	0,7294	1,0000	1,0000	64,78
8	Kab. Pelalawan	0,3252	0,5023	1,0000	0,0915	0,7684	1,0000	1,0000	66,96
9	Kab. Rokan Hilir	0,1416	0,2422	0,1063	0,0349	1,0000	1,0000	1,0000	50,36
10	Kab. Rokan Hulu	0,2608	0,2457	0,1416	0,0402	1,0000	1,0000	1,0000	52,69
11	Kab. Siak	0,6055	0,2804	1,0000	0,0871	0,9314	1,0000	1,0000	70,06
12	Kota Dumai	0,5065	0,2299	1,0000	0,0533	1,0000	1,0000	1,0000	68,42
13	Kota Pekanbaru	0,7958	0,4211	1,0000	0,0856	0,6515	1,0000	1,0000	70,77

Sumber : Perpustakaan Nasional RI Tahun 2023

Berdasarkan data IPLM Tahun 2023 diatas, dari ketujuh Unsur Penilaian Literasi Masyarakat (UPLM), nilai terendah pada unsur UPLM 4 (Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari) dengan nilai 0,0543, UPLM 2 (Ketercukupan Koleksi Perpustakaan) dengan nilai 0,2753 dan UPLM 1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan) dengan nilai 0,3518.

2.1.4.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada akan menghadirkan kemanfaatan besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada lembaga pemerintahan akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi

utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan indikator bukti bagi kepentingan lain.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan tertatanya kearsipan. Sumberdaya yang mengelola arsip secara baku di Provinsi Riau selama kurun tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.192.
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip
Secara Baku di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	28	31	36	36	36
2	Jumlah Perangkat Daerah	36	36	36	36	36
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	77,78	86,11	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dari 28 OPD tahun 2019 meningkat menjadi 36 OPD pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah dari tahun 2019 - 2023 tidak ada penambahan jumlah perangkat daerah di provinsi riau, tetapi untuk peningkatan persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku pada tahun 2019 sebesar 77,78 persen meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan instrument baru dalam rangka penguatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah. Nilai Laporan Pengawasan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023 berdasarkan penilaian ANRI RI sebagai berikut :

Tabel 2.193.
Nilai Laporan Pengawasan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2022 - 2023

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2022	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot Tahun 2022	NHP x Bobot Tahun 2023
Eksternal	81,61	89,04	60%	48,97	53,42
Internal	95,02	91,53	40%	38,00	36,61
Akumulasi				86,97	90,04

Sumber : ANRI RI Tahun 2024

Berdasarkan nilai laporan pada tabel diatas, terjadi peningkatan terhadap nilai eksternal (penilaian kearsipan tingkat kabupaten/kota) dari tahun sebelumnya sebesar 4,45 poin sedangkan nilai internal (penilaian kearsipan tingkat provinsi) turun 1,39 poin, meskipun secara akumulasi terjadi kenaikan 3,07 poin.

2.1.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.4.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Sumatera yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar yang menjadi sumber perekonomian bagi masyarakatnya. Secara umum Provinsi Riau memiliki aktivitas kegiatan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya air tawar, serta budidaya perikanan laut dan payau.

Selama periode 2019-2023 produksi perikanan Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 246.222,59 ton pada tahun 2019 meningkat menjadi 260.506,98 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.194.
Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

Komoditas	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023*	
Produksi (Ton)	246.222,59	234.126,93	244.789,84	259.629,13	260.506,98	1,51
Konsumsi (Ton)	295.971,50	289.524,26	294.087,41	290.952,15	333.339,03	3,22
Perimbangan (Ton)	(49.728,94)	(55.397,33)	(49.297,5)	(31.323,02)	(72.832,05)	24,11
Rasio	0,83	0,81	0,83	0,89	0,78	1,27

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2023

*Angka sementara

Bila dilihat dari perkembangan produksi perikanan Provinsi Riau sejak Tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,51 %, sedangkan kebutuhan konsumsi dari tahun 2019 – 2023 meningkat (3,22 %). Bila dilihat kemampuan produksi terhadap kebutuhan konsumsi hasil perikanan penduduk di Provinsi Riau masih belum dapat mencukupinya, namun untuk memenuhi kekurangan kebutuhan konsumsi ini didatangkan dari Provinsi lain. Adapun rasio produksi dan konsumsi ikan di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.195.
Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2023

	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=3/4)
1	Kuantan Singingi	5.836,94	13.948,80	- 8.111,86	0,42
2	Indragiri Hulu	12.539,24	18.565,56	- 6.026,32	0,68
3	Indragiri Hilir	57.416,11	31.885,01	25.531,10	1,80
4	Pelalawan	13.372,53	27.863,46	- 14.490,93	0,48
5	Siak	3.396,22	23.930,29	-20.534,07	0,14
6	Kampar	70.574,93	36.795,98	33.778,95	1,92
7	Rokan Hulu	9.306,700	32.239,90	- 22.933,20	0,29
8	Bengkalis	6.033,59	27.320,75	- 21.287,16	0,22
9	Rokan Hilir	66.833,50	38.987,89	27.845,61	1,71
10	Kep. Meranti	3.481,70	10.287,40	- 6.805,70	0,34
11	Pekanbaru	10.004,57	53.375,82	- 43.371,25	0,19
12	Dumai	1.710,95	14.163,46	- 12.452,51	0,12
Provinsi Riau		260.506,98	333.339,03	- 72.832,05	0,78

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2023

*Angka sementara

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan produksi perikanan sebesar 260.506,98 ton di Provinsi Riau Tahun 2023 dibandingkan kebutuhan konsumsi 333.339,03 ton maka Provinsi Riau masih kekurangan sebesar -72.832,05 ton. Kekurangan ini dipenuhi dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Kepulauan Riau

dan Sumatera Utara, namun dalam pemenuhan akan sumber perikanan di beberapa daerah di Kabupaten/Kota, apabila dilihat dari produksi perikanan per kabupaten/kota dimana beberapa kabupaten/kota sebahagian masih belum mampu mencukupi kebutuhan kecuali Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, dan Rokan Hilir dimana produksi perikanan telah melebihi kebutuhan. Belum terpenuhinya akan kebutuhan produksi dari sumber perikanan ini salah satu hal ini disebabkan antara lain yaitu lajunya pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau lebih tinggi daripada laju pertumbuhan produksi hasil perikanan di beberapa Kabupaten/Kota selain itu terdapat di beberapa Kabupaten/Kota peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2023.

Provinsi Riau memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun Angka Konsumsi Ikannya masih rendah (45,87 kg/kapita), Jika dibandingkan dengan pusat sebesar (61,02 kg/kapita). Ini artinya Provinsi Riau masih menghadapi berbagai masalah dan rintangan, beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat konsumsi ikan di Provinsi Riau antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan; Tidak memenuhinya kebutuhan ikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Riau dan belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen.

Sarana prasarana dan distribusi yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Produksi ikan di Provinsi Riau diperoleh dari berbagai jenis usaha antara lain usaha perikanan tangkap di laut, perikanan tangkap di perairan umum, budidaya di tambak di kolam dan keramba, budidaya jaring apung tawar, tancap tawar dan apung di laut serta budidaya di laut. Jumlah produksi dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menurut jenis usaha dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.196.
Produksi Perikanan Menurut Jenis di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

Jenis Usaha Perikanan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Perikanan Tangkap di Laut	114.497,14	111.533,62	113.825,37	114.612,25	112.078,18	0,13
Perikanan Tangkap di Perairan Umum	24.034,20	23.439,14	24.398,79	24.697,38	23.695,24	0,32
Budidaya di Tambak	2.694,97	2.237,22	3.655,39	7.863,35	6.939,97	41,69
Budidaya di Kolam	65.831,22	74.263,51	78.397,62	81.449,54	85.412,38	3,58
Budidaya di Keramba	17.216,04	7.444,31	8.023,76	11.974,75	13.033,47	16,47
Budidaya Jaring Apung Tawar	12.836,40	7.510,69	9.190,94	11.101,67	11.337,51	11,32
Budidaya Jaring Tancap Tawar	71,17	65,98	92,18	97,84	83,59	7,82
Budidaya Jaring Apung di Laut	32,36	38,16	55,09	115,45	198,30	56,42
Budidaya Laut	9.009,34	7.594,30	7.662,81	7.716,90	7.728,32	0,44
Jumlah	246.222,84	234.126,93	245.301,95	259.629,13	260.506,98	2,74

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2023

Dari data Tabel diatas dapat dilihat Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun untuk Perikanan Tangkap di Laut sebesar 0,13 % dan 0,32 % pada Perikanan Tangkap di Perairan Umum. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 114.612,25 Ton pada produksi perikanan tangkap laut, sedangkan untuk perikanan tangkap di perairan umum sebesar 24.697,38 Ton, namun 2023 terjadi penurunan produksi yang selain diakibatkan oleh Jumlah trip/hari melaut nelayan berkurang, jumlah RTP dan armada pada perairan laut dan Perairan Umum Daratan mengalami penurunan, faktor cuaca dan iklim, serta armada yang tidak mampu menjangkau wilayah yang lebih jauh.

Produksi untuk Jenis Usaha Perikanan Budidaya pada Jaring Apung Tawar dan Jaring Tancap Tawar tahun 2019 ke tahun 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan produksi yang signifikan karena kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih

dalam skala kecil, tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan, kurangnya benih bermutu serta keterbatasan sarana dan prasarana usaha budidaya ikan menyebabkan usaha perikanan budidaya yang dilakukan pembudidaya tidak optimal sehingga pembudidaya belum maksimal melakukan usaha budidayanya. Di samping itu, kurangnya intervensi pemerintah provinsi khususnya dinas kelautan dan perikanan Provinsi Riau untuk perikanan budidaya darat karena dibatasi kewenangan dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sementara sumbangan produksi perikanan budidaya lebih banyak dari perikanan budidaya air tawar.

Selanjutnya, produksi untuk Jenis Usaha Budidaya Tambak mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 disebabkan adanya kasus kematian udang di Kabupaten Bengkalis, sedangkan untuk produksi untuk Jenis Usaha Perikanan Pembesaran Budidaya di Kolam dan Keramba mengalami kenaikan produksi tahun 2019 s/d 2023 disebabkan adanya jaminan pemasaran (perlu lebih diperhatikan dalam sektor hilir), penambahan Rumah Tangga Perikanan Budidaya serta penambahan jumlah pembudidaya. kualitas benih ikan yg bermutu dan peningkatan SDM pembudidaya melalui pelatihan teknis serta adanya kerjasama antara pembudidaya ikan dan efishery dalam penyediaan pakan dan pemasaran ikan sehingga meningkatkan minat pembudidaya ikan untuk berproduksi.

Produksi Untuk Jenis Usaha Perikanan Pembesaran Budidaya di Jaring Apung Laut mengalami kenaikan produksi tahun 2019 s/d 2022 disebabkan peningkatan sarana dan prasarana berupa bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau kepada pelaku usaha budidaya khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu juga untuk pengembangan usaha budidaya dilakukan pengetahuan pembudidaya tentang berbudidaya (penyuluhan) kepada pelaku usaha, pengelolaan hama penyakit, pengolahan air media pemeliharaan, ketersediaan benih unggul, induk unggul, keterampilan berbudidaya termasuk manajemen keuangan/analisa usaha serta bantuan dan dukungan/intervensi dari pemerintah pemda, provinsi dan pusat untuk masyarakat pembudidaya.

Tabel 2.197.
Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jenis Usaha Perikanan										Kontribusi (%)
		Perikanan Tangkap di Laut	Perairan Tangkap di Perairan Umum	Budidaya di Tambak	Budi daya di Kolam	Budidaya di Keramba	Budidaya Jaring Apung di Perairan Umum	Keramba Jaring Tancap di Perairan Umum	Budidaya Jaring Apung di Laut	Budidaya Laut	Jumlah	
1	Kuantan Singingi	-	467,49	-	5.281,30	88,15	-	-	-	-	5.836,94	2,24
2	Indragiri Hulu	-	5.940,34	-	6.374,65	224,25	-	-	-	-	12.539,24	4,81
3	Indragiri Hilir	49.414,45	4.194,81	3.349,78	452,19	-	4,87	-	-	-	57.416,11	22,04
4	Pelalawan	2.689,45	4.037,98	20,50	4.934,51	776,60	913,50	-	-	-	13.372,53	5,13
5	Siak	961,40	1.130,15	342,84	905,75	-	15,55	40,53	-	-	3.396,22	1,30
6	Kampar	-	2.455,66	-	46.048,18	11.941,27	10.129,82	-	-	-	70.574,93	27,09
7	Rokan Hulu	-	1.964,86	-	7.143,96	-	197,88	-	-	-	9.306,700	3,57
8	Bengkalis	2.458,60	309,23	3.149,69	116,06	-	-	-	-	-	6.033,59	2,32
9	Rokan Hilir	52.006,44	3.094,78	-	3.934,02	-	69,94	-	-	7.728,32	66.833,50	25,66
10	Kep. Meranti	3.153,68	-	5,025	124,70	-	-	-	198,30	-	3.481,70	1,34
11	Pekanbaru	-	99,94	-	9.898,68	-	5,95	-	-	-	10.004,57	3,84
12	Dumai	1.394,16	-	72,13	198,39	3,20	-	43,06	-	-	1.710,95	0,66
Riau		112.078,18	23.695,24	6.939,97	85.412,38	13.033,47	11.337,51	83,59	198,30	7.728,32	260.506,98	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat dua Kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir dan Indragiri Hilir dengan produksi perikanan tangkap terbesar. Dari total produksi perikanan tangkap sebesar 135.773,42 ton, 25,66 % berasal dari Kabupaten Rokan Hilir dan 22,04 % berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana untuk Kabupaten Rokan Hilir produksi perikanan sebesar 66.833,50 ton dengan rincian perikanan laut sebesar 52.006,44 dan perikanan perairan umum sebesar 3.094,78 ton dan untuk Kabupaten Indragiri Hilir produksi perikanan sebesar 57.416,11 ton dengan rincian 49.414,45 ton dari perikanan laut sedangkan 4.194,81 ton dari perikanan perairan. Untuk Perikanan Budidaya penyumbang produksi terbesar budidaya air tawar yaitu Kabupaten Kampar (68.119,27 ton) karena telah ditetapkan sebagai sentra perikanan air tawar, untuk usaha budidaya air payau yang terbesar hasil produksinya yaitu Kabupaten Indragiri Hili dan Bengkalis, sedangkan untuk budidaya perikanan laut pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara / daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tabel 2.198.
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Riau	2,87%	3,13%	3,03 %	2,61 %	2,68

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 2,68%. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,13%.

2.1.4.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat diluar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi, bisnis atau profesional, yang disebut dengan wisatawan. Wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam, tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, di tempat yang dikunjungi, yang dihitung berdasarkan pintu masuk ke Provinsi Riau dan melalui *Mobile Positioning Data* (MPD) yang merupakan pengumpulan data lokasi berdasarkan layanan yang ada pada telepon seluler dengan melihat pergerakan atau mobilitas dari tamu asing (Kabupaten Bengkalis). Perkembangan wisatawan yang digambarkan melalui tamu asing yang datang ke Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.199.
Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau
Menurut Pintu Masuk Utama Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Pintu Masuk	Tahun (Jiwa)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dumai	12.909	11.091	6.165	8	18.080	15.019
2	Pekanbaru	127.639	33.466	6.797	101	3.985	27.621
3	Bengkalis	5.225	4.445	809	0	1.733	5.818
4	Selat Panjang	1.162	1.127	0	0	0	1.463
Jumlah		146.935	50.129	13.771	109	23.798	49.921

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2023

Jumlah kunjungan wisatawan yang dihitung melalui 4 pintu masuk dalam 6 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2018 – 2021, meskipun mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023 namun masih dibawah jumlah kunjungan tahun 2018 dan 2019. Peningkatan jumlah kunjungan tahun 2022 terjadi karena pemerintah kembali membuka pelabuhan internasional Dumai - Malaka dan mulai membuka pintu masuk bandara Sultan Syarif Kasim II yang selama 2 tahun terakhir tidak beroperasi karena pandemi *Covid-19*.

Tabel 2.200.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2023

No	Jumlah Kunjungan	Tahun (Jiwa)						Rata-Rata Pertumbuhan Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wisatawan Mancanegara berdasarkan Pintu Masuk	146.935	50.129	13.771	109	23.798	49.921	4321,04
2	Wisatawan Mancanegara berdasarkan MPD	127.639	94.436	54.062	44.237	209.165	352.942	70,93
3	Wisatawan Nusantara	3.149.026	6.198.390	2.384.032	4.736.018	8.534.835	11.246.862	49,19

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2023 *September

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan pintu masuk terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 hingga tahun 2023, namun dibandingkan 2019 terjadi penurunan yang signifikan dikarenakan dampak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dan 2021. Jika dibandingkan terhadap rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 4.321,04% yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2023 sebesar 55.538,28% terhadap tahun 2022. Wisatawan mancanegara berdasarkan perhitungan Mobile Positioning Data (MPD) dalam enam tahun terakhir meningkat sebesar 70,93% per tahun. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang dihitung melalui MPD dibanding dengan wisatawan dari 4 pintu masuk dikarenakan oleh pendeteksian perangkat komunikasi wisatawan yang bisa terhitung lebih dari satu kali. Sedangkan wisatawan nusantara mengalami peningkatan yang fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 49,19%, hal ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pemulihan ekonomi dan menggalakkan wisata dalam negeri.

Tabel 2.201.
Rata-rata Lama Menginap Tamu Tahun 2018 - 2023

No	Rata-Rata Lama Menginap	Tahun (Hari)						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tamu Asing	2,39	3,46	4,13	4,34	3,63	3,04	7,32
2	Tamu Domestik	1,53	1,46	1,75	1,59	1,37	1,2	-4,02

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2023 *September

Rata-rata lama menginap tamu asing di Provinsi Riau tumbuh sebesar 7,32% per tahun, sedangkan tamu domestik terjadi penurunan rata-rata lama menginap sebesar - 4,02%. Untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal dibutuhkan pengembangan destinasi dan event pariwisata untuk menumbuhkan minat dan kenyamanan wisatawan di Provinsi Riau.



Gambar 2.49.
Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2023

Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dari tahun 2018 s/d 2023 mengalami peningkatan secara fluktuatif, dengan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, serta dibuka kembali destinasi dan event pariwisata yang berskala nasional dan internasional.

Tabel 2.202.
Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Wisata		
	Alam	Budaya	Buatan
Kuantan Singingi	67	40	5
Indragiri Hulu	32	11	-
Indragiri Hilir	3	2	3
Pelalawan	6	2	1
Siak	21	45	12
Kampar	33	29	16
Rokan Hulu	42	36	9
Bengkalis	22	21	6
Rokan Hilir	6	6	4
Kepulauan Meranti	22	-	2
Pekanbaru	3	5	4
Dumai	5	3	1
Provinsi Riau	262	200	63

Sumber : Dinas Pariwisata

Jumlah objek wisata di Provinsi Riau terbanyak terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebesar 21,33% dari jumlah objek wisata yang didominasi oleh wisata alam dan budaya, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 16,57% dan diikuti oleh Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak sebesar 14,86%.

2.1.4.3.2.1 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Di Indonesia, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yang berkembang. Untuk menjaring ekonomi kreatif dilakukan melalui BISMA (BEKRAF *Information System in Mobile Application*). Adapun jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.203.
Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berdasarkan Sub Sektor di
Provinsi Riau Tahun 2023

No	Sub Sektor	Jumlah Pelaku Usaha
1	Kuliner	798
2	Kriya	241
3	Fashion	163
4	TV & Radio	54
5	Penerbitan	24
6	Musik	136
7	Arsitektur	19
8	App & Game	10
9	Peiklanan	51
10	Fotografi	65
11	DKV	4
12	Seni Pertunjukan	89
13	Desaian Produk	12
14	Seni Rupa	6
15	Film Animasi & Video	32
16	Desain Interior	28
17	Desain Komunikasi Visual	5
Jumlah Pelaku Usaha		1733

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2023

Jumlah usaha ekonomi kreatif tahun 2023 di Provinsi Riau sebanyak 1733 dengan bidang tersebar pada sub-sektor yang ada. Subsektor yang paling banyak terdapat pada sub sektor Kuliner 798 pelaku usaha. Berkembangnya sektor kuliner di Provinsi Riau sejalan dengan gaya hidup saat ini yang memerlukan wadah untuk berkomunikasi dan sosialisasi ditempat fasilitas umum yang dilengkapi dengan kuliner yang cukup mumpuni dan menjadi data tarik masyarakat. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni:

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Riau mengalami penurunan dalam kurun waktu enam tahun terakhir dampak pandemi *Covid-19* dimana tahun

2018 sebanyak 146.935 jiwa sedangkan pada tahun 2023 hanya sebanyak 37.015 jiwa.

2. Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (domestik) sebesar -4,02 % pertahun dalam kurun waktu enam tahun terakhir, hal ini menandakan bahwa destinasi, objek dan event wisata belum memberikan kenyamanan untuk berwisata.
3. Objek wisata di Kabupaten/Kota terdiri dari objek wisata alam, budaya dan buatan yang masih dibutuhkan peningkatan akses dan prasarana wisata.

Isu Strategis Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan.

2.1.4.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kondisi perkembangan tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau dapat dilihat dari perkembangan luas panen beberapa komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura, seperti padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran. Memperhatikan data luas panen tahun 2016-2023, maka dilihat penurunan pertumbuhan luas panen pada hampir semua komoditas tanaman pangan termasuk palawija. Penurunan luas panen terbesar terdapat pada komoditi kacang kedelai sebesar 33,86% diikuti kacang hijau sebesar 31,82%. Sedangkan tanaman padi mengalami penurunan sebesar 7,11%. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan luas panen antara lain adanya anomali iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan. Menurunnya luas panen tanaman pangan berdampak terhadap penurunan produksi. Namun demikian, beberapa komoditas lain mengalami pertumbuhan produksi dalam tujuh tahun terakhir. Komoditas ubi kayu mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi diikuti ubi jalar kemudian padi ladang. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2016–2023 dapat dilihat pada tabel 2.204.

Tabel 2.204.
Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2016-2023

Komoditas	Tahun								Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Luas Panen (ha)								
1. Padi Sawah	79.475,5	80.680,1	71.448,10	60.738,60	71.632,36	53.062,4	51.054	52.913,00	-7,11%
. Padi Ladang	19.955,0	12.004,0	2.226,00	2.403,40	12.857,30	-	-	-	-10,41%
3. Jagung	13.205,4	12.231,4	15.656,30	15.967,30	9.591,40	6.530,0	2.797	2.330,68	-22,79%
4. Ubi Kayu	2.207,3	966,0	3.329,8	4.314,7	3.741,9	3.427,6	2.320	2.270,84	0,83%
. Kacang Tanah	960	802,2	821,9	544,7	502,9	585,4	456	405,38	-11,67%
6. Ubi Jalar	599	416,9	490,2	430,7	354	363,1	323	295,99	-9,78%
. Kacang Kedelai	3.536	3.573,9	5.400,90	582,40	1.823,00	666,1	296	448,06	-33,86%
. Kacang Hijau	597,1	568,0	333,6	221,9	159,1	151,0	60	80,37	-31,82%
	Produksi (ton)								
1. Padi Sawah	325.826	337.421	260.607	222.832	269.344	217.458,9	213.557	205.973,00	-6,80%
. Padi Ladang	47.710	28.323	5.768	8.042	43.021	-	-	-	-2,55%
3. Jagung	32.850	30.768	29.704	56.372	30.884	22.987,3	9.845	8.984,60	-18,19%
4. Ubi Kayu	2.654	1.119	100.363	125.633	108.953	108.474,0	73.424,7	58.469,54	73,91%
. Kacang Tanah	913	798	884,4	520,7	480,77	649,7	504,7	587,09	-9,41%
6. Ubi Jalar	650	448	6121,1	5620,6	4602	7.168,8	6.373,2	6.434,22	46,30%
. Kacang Kedelai	105.992	124.509	7.853	584	1.827	390	325	634,93	-61,88%
. Kacang Hijau	4.904,0	4.802,0	207,50	155,50	111,37	104	50	424,20	-53,43%
	Produktivitas (Kw/ha)								
1. Padi Sawah	41,00	41,82	38,3	36,69	37,60	40,98	41,83	38,93	0,33%
. Padi Ladang	23,90	23,59	25,91	33,46	33,46	-	-	-	8,78%
3. Jagung	24,90	25,15	18,97	35,3	32,2	3,17	3,76	38,55	-27,52%
4. Ubi Kayu	12,00	11,58	301,41	291,17	291,17	30,05	31,61	257,48	17,52%
. Kacang Tanah	9,50	9,95	10,76	9,56	9,56	1,00	1,14	14,48	-29,77%
6. Ubi Jalar	10,90	10,75	124,87	130,5	130	13,92	19,79	217,38	10,45%
. Kacang Kedelai	299,80	348,38	14,54	10,02	10,02	0,84	1,09	14,17	-60,79%
. Kacang Hijau	82,10	83,54	6,22	7	7	0,73	0,83	52,78	-53,50%

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Secara umum tanaman pangan khususnya padi dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui pemanfaatan lahan yang ada. Untuk itu masih diperlukan program peningkatan produktivitas tanaman padi melalui penggunaan teknologi input berupa benih unggul,

pupuk berimbang yang cepat direspon oleh tanaman, kombinasi optimal dalam penggunaan teknologi input, penggunaan indikator tepat guna dan peningkatan infrastruktur pengairan serta perbaikan manajemen usaha tani.

Sayuran yang dikembangkan di Provinsi Riau meliputi sayuran daun (bayam, kangkung dan aneka sawi), sayuran buah (cabe, cabe rawit, terung, kacang panjang, gambas, mentimun dan pare) dan akhirnya berkembang penanaman sayuran umbi yaitu bawang merah. Pengembangan bawang merah ini awalnya karena campur tangan pemerintah untuk memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk kepada kelompok tani-kelompok tani. Perkembangan luas panen sayur-sayuran di Provinsi Riau selama tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.205.
Perkembangan Luas Panen Sayur-Sayuran di Provinsi Riau Tahun 2016 – 2023

Komoditas	Tahun							2023	Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Luas Panen (ha)									
1. Cabe	2.954	3.859	3923	3.415	3.375	2.874	2.815	2.317,24	-0,80%
2. Bawang Merah	75	85	41	92	63	67	34	73,76	-12,35%
2. Ketimun	1.685	1.729	1800	1.511	1.597	1.368	1.317	1.270,83	-4,02%
3. Terong	1.277	1.337	1417	1.138	1.202	1.048	878	855,19	-6,05%
4. Kacang Panjang	2.241	2.234	2219	1.898	2.005	1.685	1.515	1.387	-6,32%
5. Bayam	2.183	2.310	2328	2.077	2.195	2.367	2.615	2.630,33	3,06%
6. Kangkung	2.252	2.355	2361	2.170	2.293	2.492	2.699	2.801,24	3,06%
7. Petsai dan Sawi	596	527	504	472	499	514	640	688,69	1,19%
8. Labu	34	22	20	21	22	27	31	28,60	-1,53%
9. Sayuran Lainnya	103	119	118	81	0	0	0	26.280,01	
Jumlah	13.400	14.577	14.731	12.875	13.518	13.061	11.356	38.332.89	-2,72%
Produksi (ton)									
1. Cabe	18.644	26.715	30015	25.633	26.915	20.791	20.534	13.213,54	1,62%
2. Bawang merah	303	263	187	506,7	263	329	195	322,74	-7,06%
2. Ketimun	1.740	22.078	22631	16.461,70	17.284,79	16.808	15.547	14.149,16	44,05%
3. Terong	1.422	15.512	14154	10.224,60	10.735,83	10.168	9.195	7.367,90	36,49%
4. Kacang Panjang	1.253	11.182	12082	9.210,50	9.671,03	9.163	8.962	8.213,39	36,81%
5. Bayam	8.734	9.125	11182	8.554,10	8.981,81	8.378	10.586	10.094,03	3,26%
6. Kangkung	9.298	10.418	13833	9.924,10	10.420,31	10.646	12.498	13.463,63	5,05%
7. Petsai dan Sawi	2.547	2.615	1968	1.339,20	1.406,16	1.673	2.249	3.061,69	-2,05%
8. Labu	300	175	87	157	22,05	577	426	100,15	6,02%
9. Sayuran Lainnya	503	718	7715	51.943	0	0	0	7.857,22	

Komoditas	Tahun							2023	Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jumlah	44.744	98.801	113854	133.954	85.969	71.839	80.191	77.843,45	10,21%
Produktivitas (ton/ha)									
1. Cabe	6,31	6,92	4,55	7,51	7,97	7,23	7,29	5,70	2,44%
2. Bawang Merah	4,04	3,09	12,57	5,51	4,17	4,91	5,71	4,38	6,04
2. Ketimun	10,30	12,77	9,99	10,89	10,83	12,28	11,80	11,13	50,09%
3. Terong	11,10	11,60	5,44	8,98	8,93	9,70	10,47	8,62	45,29%
4. Kacang Panjang	5,59	5,01	4,8	4,85	4,82	5,43	5,91	5,92	48,17%
5. Bayam	4,00	3,95	5,86	4,12	4,09	3,53	4,04	3,84	0,20%
6. Kangkung	4,13	4,42	3	4,57	4,54	4,27	4,63	4,81	1,93%
7. Petsai dan Sawi	4,27	4,96	3,9	2,84	2,82	3,25	3,51	4,45	-3,21%
8. Labu	8,82	7,91	4,33	7,48	0,99	21,37	13,74	3,50	7,66%
9. Sayuran Lainnya	4,88	7,17	65,66	64,27	0	0	0	0,30	

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Potensi tanaman buah-buahan cukup tinggi dengan dukungan kondisi lahan. Komoditas manggis Tembilahan sudah dikukuhkan oleh Kementerian Pertanian menjadi Manggis Ratu Tembilahan. Selain itu juga durian Omeh Kampar, Jeruk Kuok dan Rokan Hulu, Nenas Kampar, Siak dan Dumai serta Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir (sesuai jenis dan varietas daerahnya).

Tabel 2.206.
Perkembangan Jumlah Tanaman Menghasilkan dan
Produksi Buah-Buahan (Pohon/Rumpun) di Provinsi Riau Tahun 2016-2023

Komoditas	Tahun								Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Luas Panen (Pohon/Rumpun)									
1. Pisang	786.746	698.792	838.863	736.742	659.576	958.586	1.013.116	1.007.416	5,24
2. Durian	210.829	145.809	202.984	179.455	98.901	202.807	157.384	216.367	3,32
3. Duku	48.525	28.227	80.972	77.939	68.446	82.174	33.543	73.051	50,99
4. Mangga	132.706	101.726	145.697	132.081	119.768	176.108	123.501	140.718	3,88
5. Jeruk	232.529	189.547	155.490	392.134	435.957	560.919	410.929	389.351	36,74
6. Rambutan	200.322	282.638	245.205	275.590	176.311	292.550	217.345	222.257	1,50
7. Pepaya	223.952	198.262	206.325	182.967	191.978	262.778	210.486	192.750	0,66
8. Nenas	33.446.594	23.441.345	31.399.551	47.102.778	53.158.424	52.801.596	57.339.473	62.087.281	23,80
9. Jambu	108.383	118.083	128.413	131.730	156.762	173.289	183.729	189.355	9,25
10. Buah Lainnya	461.689	374.317	575.660	528.305	410.450	551.375	497.175	551.932	4,91
Jumlah	35.852.275	25.578.746	33.979.160	49.739.721	55.476.573	56.062.182	60.186.681	65.070.478	22,22
Produksi (ton)									

Komoditas	Tahun								Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Pisang	25.165	38.810	46.587	43.436	37.457	48.901	55.207	27.766,32	21,39
2. Durian	6.913	12.370	27443	23.010	15.168	30.114	30.039	22.659,72	35,13
3. Duku	2.013	2.555	4786	7.055	10.303	7.595	3.970	3.475,43	52,17
4. Mangga	9.947	15.266	19743	17.908	18.946	19.737	15.241	14.092,61	17,64
5. Jeruk	10.704	21.250	36151	5.341	151.626	60.352	49.727	22.707,91	20,86
6. Rambutan	6.279	16760	21903	28.910	21.973	40.510	26.866	17.013,53	48,16
7. Pepaya	12.158	14.164	19.783	13.604	21.016	22.470	24.403	18.546,80	24,42
8. Nenas	94.129	83.325	95.018	132.583	214.277	354.878	261.769	379.024,96	17,16
9. Jambu	5.389	8.573	10.055	10.613	21.774	19.274	20.862	152.855,11	25,27
10. Buah Lainnya	23.279	33.426	53202	50.980	68.811	68.698	68.668	41.201,41	24,67
Jumlah	195.976	246.499	334.671	333.439	581.351	672.530	556.752	699.343,79	18,26

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kurun 8 tahun terakhir jumlah tanaman menghasilkan pada komoditi buah-buahan (pohon/rumpun) mengalami peningkatan sebesar 22,22%. Peningkatan rata-rata jumlah tanaman paling tertinggi berdasarkan masing-masing komoditinya adalah duku sebesar 50,99% per tahun, diikuti oleh 36,74% dan nenas 23,80%. Sedangkan produksi juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,26%, dengan jumlah terbesar nenas dan jeruk dikarenakan banyaknya permintaan akan buah duku dan rambutan.

2. Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah populasi dan produksi komoditas peternakan berfluktuasi dari tahun 2018 sampai 2023, namun bila dilihat rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan atau pertumbuhan positif, hanya pada komoditas Kerbau, Ayam Kampung dan Itik yang populasi dan produksinya menurun. Pertumbuhan populasi tertinggi adalah domba sebesar 19,91% dengan pertumbuhan produksi sebesar 22,14%. Perkembangan populasi ternak dan produksi daging Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.207.
Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

No	Ternak	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*	
1	Populasi (Ekor)							
	Sapi	163.047	198.296	204.433	209.661	210.784	178.552	2,50
	Kerbau	23.213	27.167	29.309	31.991	27.499	14.938	-5,13
	Kambing	212.848	233.675	235.858	252.432	236.228	244.906	3,00
	Domba	16.167	28.974	27.640	31.084	35.058	34.942	19,91
	Ayam Broiler	49.111.339	29.050.347	29.631.354	45.490.839	54.706.154	57.396.720	7,97
	Ayam Kampung	7.345.052	6.897.680	6.284.335	6.882.281	6.426.495	6.392.362	-2,52
	Itik	247.533	227.957	232.517	218.142	209.016	223.033	-1,91
2	Produksi (Ton)							
	Sapi	9.792,53	8.379,10	8.737,30	8.948,70	10.759,38	11.200.636	3,32
	Kerbau	1.868,53	1.689,40	1.631,06	1.978,72	2.135,77	2.212.144	3,96
	Kambing	826,61	685,16	578,58	741,40	1.232,93	1.363.032	14,46
	Domba	23,88	27,08	19,88	15,58	33,33	43.862	22,14
	Ayam Broiler	59.368,15	61.281,13	44.915,11	52.242,14	61.214,93	58.292.037	1,05
	Ayam Kampung	2.975,46	3.051,95	2.869,21	1.481,14	2.353,33	1.296.519	(7,56)
	Itik	262,87	223,39	176,66	144,92	158,92	165.365	(8,04)

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024

*Angka Sementara

Tabel 2.208.
Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=3/4)
1	Kuantan Singingi	532	1.161	-6.28	0,46
2	Indragiri Hulu	930	1.568	-638	0,59
3	Indragiri Hilir	630	2.189	-1.559	0,29
4	Pelalawan	587	1.396	-808	0,42
5	Siak	1.341	1.612	-271	0,83
6	Kampar	2.373	2.966	-593	0,80
7	Rokan Hulu	1.605	1.962	-357	0,82

No.	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=3/4)
8	Bengkalis	832	1.955	-1.123	0,43
9	Rokan Hilir	1.349	2.211	-862	0,61
10	Kep. Meranti	46	718	-672	0,06
11	Pekanbaru	4.120	3.367	753	1,22
12	Dumai	474	1.123	-649	0,42
	Provinsi Riau	14.819	22.227	-7.407	0,67

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023

*Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.208, produksi daging ruminansia Provinsi Riau sebesar 14.819 ton, sementara konsumsi sebesar 22.227 ton, sehingga rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia sebesar 0.79%. Dengan pola konsumsi daging ruminansia 3,3 kg/kap/tahun, pemenuhan kebutuhan daging dari produksi daerah hanya bisa terpenuhi 67%, dari 12 kab./kota se-Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang surplus daging. Sedangkan pemenuhan kebutuhan daging unggas dengan pola konsumsi 11,2 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan daging unggas sebesar 79%. Untuk telur dengan pola konsumsi 9.2 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan dari produksi local baru sebesar 21%. Rasio produksi unggas dan telur per kabupaten/kota se-Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.209 dan 2.210.

Tabel 2.209.
Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=3/4)
1	Kuantan Singingi	2.343	3.940	-1.597	0,59
2	Indragiri Hulu	4.993	5.320	-327	0,94
3	Indragiri Hilir	2.388	7.428	-5.040	0,32
4	Pelalawan	6.459	4.737	1.722	1,36
5	Siak	3.744	5.471	-1.727	0,68
6	Kampar	9.479	10.067	-587	0,94

No.	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=3/4)
7	Rokan Hulu	7.601	6.658	944	1,14
8	Bengkalis	1.503	6.635	-5.131	0,23
9	Rokan Hilir	823	7.504	-6.680	0,11
10	Kep. Meranti	165	2.437	-2.272	0,07
11	Pekanbaru	17.791	11.427	6.364	1,56
12	Dumai	2.299	3.811	-1.512	0,60
	Provinsi Riau	59.589	75.436	-15.847	0,79

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023

*Angka Sementara

Tabel 2.210.
Rasio Produksi dan Konsumsi Telur Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=3/4)
1	Kuantan Singingi	318,30	2.974,31	-2.656	0,11
2	Indragiri Hulu	419,75	3.991,05	-3.571	0,11
3	Indragiri Hilir	5.334,20	5.682,42	-348	0,94
4	Pelalawan	308,45	3.534,50	-3.226	0,09
5	Siak	1.025,36	4.106,93	-3.082	0,25
6	Kampar	1.683,49	7.552,61	-5.869	0,22
7	Rokan Hulu	1.666,91	5.011,04	-3.344	0,33
8	Bengkalis	290,49	5.013,57	-4.723	0,06
9	Rokan Hilir	271,10	5.662,30	-5.391	0,05
10	Kep. Meranti	268,22	1.836,38	-1.568	0,15
11	Pekanbaru	429,29	8.664,84	-8.236	0,05
12	Dumai	75,72	2.853,76	-2.778	0,03
	Provinsi Riau	12.091,27	56.883,70	-44.792,43	0,21

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023

Rasio produksi dan konsumsi unggas Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 0.79%, dimana Kab./Kota yang mengalami surplus daging unggas adalah Pelalawan, Rokan Hulu dan Pekanbaru. Selanjutnya rasio produksi dan konsumsi telur Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 0.18%, dimana seluruh Kab./Kota mengalami defisit telur. Sehingga penting untuk menjaga ketersediaan pangan tidak hanya dari sisi produksi akan tetapi stock pangan dengan menjaga kelancaran distribusi logistik dari provinsi tetangga.

Selanjutnya, upaya peningkatan produksi ternak tidak terlepas dari sisi kesehatan hewan ternak. Tabel 2.211 menunjukkan penyakit hewan menular strategis (PHMS) di Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berangsur stabil tidak ada kenaikan signifikan, tapi kelonjakan kasus drastis terjadi di tahun 2022 dan 2023 dengan persentase kenaikan mencapai 170 persen di banding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan kasus yang terlalu tinggi terjadi karena mewabahnya penyakit eksotik LSD (Lumpy Skin Disease) dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan juga kembali merebaknya Outbreak kasus Avian Influenza, SE dan ASF di beberapa Kabupaten/Kota yang terjadi di pertengahan Januari hingga awal Juni. Di tahun 2024 persentase kasus kembali mengalami penurunan sebesar 220 persen. Kasus tertinggi penyakit hewan terjadi pada kasus penyakit hewan Helminthiasis atau disebut juga dengan cacingan dengan jumlah kejadian penyakit 2217 hewan dan yang terjangkit sejumlah 4359 ekor, Untuk kasus terendah terjadi pada penyakit Brucellosis dan IBR sebanyak 1 kejadian dengan jumlah kasus sakit masing-masing 1 ekor. Penurunan kasus ini tidak terlepas dari program vaksinasi, pengobatan pemberian multivitamin yang dilakukan secara berkesinambungan oleh petugas lapangan yang di support baik oleh Pemerintah Pusat (Kementan), Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kab/Kota.

Tabel 2.211.
Berdasarkan Laporan iSIKHNAS Petugas Pelayanan Veteriner

No	JENIS PENYAKIT	Jumlah Kejadian Penyakit dan Jumlah Kasus Hewan Sakit											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024*	
		Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus
1	PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
2	PMK							746	5228	118	485	24	324
3	LSD	-	-	2	7	-	-	351	732	40	89	-	-
4	ASF	-	-	3	94	1	12	-	-	6	407	2	120
5	CSF	-	-	3	41	-	-	-	-	1	18	1	5
6	IBR	21	21	4	13	-	-	1	1	3	8	1	1
7	Br	1	1	3	9	2	2	-	-	10	10	1	1
8	JD	11	32	34	103	49	115	28	60	26	106	4	5
9	Ra	267	268	180	180	309	316	263	263	754	26	362	22
10	QF	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	-	-
11	SE	1	4	-	-	-	-	13	434	29	1025	15	279
12	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sal	-	-	-	-	-	-	5	6	9	13	-	-
14	Lep	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-
15	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2261	-	-
16	Surra	4	9	10	26	12	17	10	11	-	-	5	5
17	Hel	1325	6032	2103	4985	4558	6431	4819	9428	16142	33850	2217	4359
Jumlah		1630	6367	2343	5459	4932	6894	6242	16169	17151	38307	2632	5121

Sumber : iSIKHNAS tahun per 31 Juni 2024 (*Data per 31 Juni 2024)

Keterangan :

IBR : Infectious Bovine Rhinotracheitis

TB : Tuberculosis

Br : Brucellosis

JD : Jembrana

Ra : Rabies

QF : Q Fever

SE : Septicaemia Epizootica

ASF : Africa Swine Fever

CSF : Classical Swine Fever

LSD : Lumpy Skin Disease

AI : Avian Influenza

Sal : Salmonellosis

Lep : Leptospirosis

Hel : Helminthiasis

PPR : Peste De Petits Ruminants

PMK : Penyakit Mulut dan Kuku

3. Perkebunan

Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan ekonomi; mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, memunculkan daerah pusat-pusat pertumbuhan baru di desa-desa pelosok, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan dan perkembangan pertanian khususnya sub sektor perkebunan di Provinsi Riau berjalan dengan cukup pesat.

Perkembangan Luas lahan, produksi dan produktivitas capaian selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.212.

Tabel 2.212.
Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Komoditas	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Luas Lahan (Ha)							
1. Kelapa Sawit	2.489.957	2.594.228	2.695.680	2.710.014	2.902.608	3.394.525	0.06
2. Kelapa	422.594	422.109	426.579	420.736	438.392	438.558	0.01
3. Karet	487.736	519.355	511.952	479.781	342.247	421.359	-0.03
4. Pinang	19.521	21.173	22.150	22.521	22.829	22.599	0.03
5. Kakao	6.324	6.282	3.662	3.732	3.611	3.468	-0.11
6. Gambir	4.680	4.676	2.070	1.887	1.672	1.672	0.29
7. Kopi	4.769	5.062	4.213	4.382	4.279	4.328	-0.02
8. Enau	217	240	297	85	85	79	-0.18
9. Sagu	74.157	61.689	64.580	64.735	64.500	78.271	0.01
Jumlah	3.509.956	3.634.815	3.731.183	3.707.873	3.780.223	4.364.859	0.04
Produksi (ton)							
1. Kelapa Sawit	7.683.535	7.731.097	8.305.837	7.846.071	7.737.099	9.181.199	0.04
2. Kelapa	392.701	390.216	396.170	392.433	387.625	415.464	0.01
3. Karet	373.749	633.314	443.104	409.918	323.639	336.892	-0.02

Komoditas	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4. Pinang	10.536	11.735	12.192	12.295	11.257	30.040	-0.22
5. Kakao	2.906	1.690	967	992	992	845	-0.22
6. Gambir	2.772	3.394	1.169	1.293	1.293	1.203	-0.15
7. Kopi	3.029	2.587	2.423	2.417	1.865	1.795	-0.10
8. Enau	21	25	23	24	24	14	-0.08
9. Sagu	364.233	260.902	262.549	265.754	265.299	305.861	-0.03
Jumlah	8.833.482	9.034.960	9.424.434	8.931.197	8.729.093	10.246.277	0.03
Produktivitas (ton/ha)							
1. Kelapa Sawit	3.556	3.451	3.626	3.721	3.526	3.695	0.01
2. Kelapa	2.609	2.586	1.192	1.203	1.020	1.298	-0.13
3. Karet	1.126	1.798	1.224	1.231	1.299	1.418	0.05
4. Pinang	825	856	860	862	781	2.124	0.21
5. Kakao	662	381	452	453	457	454	-0.07
6. Gambir	733	899	684	837	855	795	0.02
7. Kopi	945	951	1.173	1.185	904	993	0.01
8. Enau	1.398	1.695	1.740	1.878	1.878	1.430	-0.37
9. Sagu	7.273	6.762	6.316	6.345	6.390	6.413	-0.02

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023

Kementerian Pertanian telah menetapkan luas tutupan lahan perkebunan sawit termutakhir (tahun 2023) sebesar 16,381 juta hektare (ha) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia, dimana Provinsi Riau tercatat memiliki area terluas yakni sebesar 3,38 juta ha atau 20,6% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. Perkembangan luas lahan kelapa sawit Provinsi Riau cenderung meningkat selama enam tahun terakhir. Namun demikian, masih terdapat kendala perbedaan luas lahan kelapa sawit Provinsi Riau yang diterbitkan antar lembaga. Luas Perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan telah di validasi oleh Pusdatin Kementerian Pertanian sebesar 3.926.621,89 ha (termasuk kebun sawit dalam kawasan hutan). Sedangkan data dari Statistik Perkebunan BPS hasil validasi Pusdatin seluas 2.828.758 ha (data kebun tidak termasuk dalam kawasan hutan) sehingga terjadi selisih sebesar 1.097.863,89 yang harus divalidasi lebih lanjut,

Rata-rata pertumbuhan luas lahan komoditas sawit sangat tinggi yaitu mencapai 0,06% per tahun dengan pertumbuhan produksi sebesar 0,04% per tahun. Peningkatan luas areal komoditas sawit disebabkan oleh tingginya animo masyarakat untuk menanam

sawit sebagai sumber pendapatan yang dipicu perbaikan harga tandan buah segar (TBS). Berdasarkan Buku Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023, rata-rata harga TBS untuk umur tanaman kelapa sawit 9 tahun adalah Rp. 2.438,48 /kg/tahun. Adapun untuk umur tanaman kelapa sawit 10 tahun rata-rata harga TBS berkisar Rp. 2.407,38/kg/tahun. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan produksi/produktivitas kelapa sawit juga disebabkan karena mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan praktek budidaya tanaman kelapa sawit yang baik dan benar, seperti menggunakan bibit unggul dan melakukan pemupukan sesuai rekomendasi. Capaian realisasi produktivitas kelapa sawit dalam 5 tahun terakhir berfluktuatif, namun rata-rata pertumbuhan produktivitas sawit sebesar 0,01% per tahunnya. Permasalahan yang dihadapi pada produktivitas kelapa sawit rakyat antara lain hal ini disebabkan karena mahalnya harga saprodi (pupuk, bibit, insektisida) sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknisnya dan banyaknya kebun kelapa sawit yang kurang produktif lagi karena tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau banyak yang sudah tua dan perlu adanya peremajaan.

Selanjutnya, Perkebunan kelapa di Provinsi Riau merupakan nomor satu terluas di Indonesia dan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah kelapa sawit, tersebar pada 3 kabupaten (Inhil - Meranti – Pelalawan) yang secara geografis berhadapan dengan Selat Melaka sebagai lintas perdagangan dunia. Perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir nomor satu terluas di Indonesia, Kepemilikan komoditi kelapa dominan dimiliki oleh rakyat (97,08%) yang melibatkan lebih 170 ribu Petani atau sekitar 680 ribu jiwa penduduk.

Perkembangan luas lahan kelapa Provinsi Riau dalam enam tahun terakhir berfluktuatif cenderung menurun. Permasalahan yang dihadapi antara lain laju tanaman tua rusak (TTR) yang tidak sebanding dengan pelaksanaan peremajaan kelapa. Selain itu terjadinya degradasi areal kelapa mencapai 30% selama periode 2002-2020, adanya perkebunan kelapa dalam kawasan hutan, seperti perkebunan kelapa rakyat di Kab. Indragiri Hilir berada pada kawasan hutan sebesar 32,76%, ancaman abrasi dan intrusi air laut pada areal perkebunan kelapa rakyat di pesisir pantai Pulau Sumatera sehingga merusak trio tata air (Tanggul – Tali Air (saluran) – Pintu Klep) serta kemampuan daerah untuk rehabilitasi masih terbatas.

Rata-rata pertumbuhan produksi komoditi kelapa di Provinsi Riau adalah sebesar 0,20% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan luas lahan komoditi kelapa hanya sebesar 0,08% per tahun. Sedangkan capaian produktivitas kelapa cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas kelapa sebesar -0,13% per tahun. Hal ini disebabkan tanaman kelapa dalam kondisi tua dan rusak yang mencapai luas 72.451 Ha dan peremajaan yang terkendala status perkebunan dalam kawasan hutan. Akibatnya tanaman kelapa tidak lagi menjanjikan sehingga sebagian ada yang beralih komoditi menjadi tanaman kelapa sawit sebesar 439 Ha dan sebagian kecil beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, yaitu di Kabupaten Siak, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

Selain kelapa sawit dan kelapa, karet merupakan komoditas Perkebunan unggulan di Provinsi Riau. Perkembangan luas lahan karet dalam enam tahun terakhir berfluktuatif cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan luas lahan karet -0,03%. Permasalahan utama yang dihadapi pada adalah laju tanaman tua rusak (TTR) yang tidak sebanding dengan pelaksanaan peremajaan karet, kurang pengetahuan dan teknologi, kurangnya pengetahuan dan kesiapan petani, alih fungsi karet menjadi kelapa sawit karena harga karet di tingkat petani yang rendah serta terbatasnya akses pembiayaan. Namun demikian, peremajaan atau perluasan tanaman karet masih perlu dilakukan karena agroklimat di Riau sangat cocok untuk pengembangan karet dan prospek karet kedepan masih sangat menjanjikan terutama didorong oleh kenaikan segmentasi pasar yang cukup baik.

Rata-rata pertumbuhan produksi komoditi karet di Provinsi Riau dari tahun 2017 - 2023 cenderung mengalami penurunan sebesar -0,02% pertahun. Kecenderungan ini disebabkan sebagian besar lahan komoditi karet beralih komoditi menjadi tanaman kelapa sawit. Di Tahun 2023 sekitar 7.594 Ha Tanaman Menghasilkan (TM) Karet beralih komoditi menjadi tanaman kelapa sawit. Meningkatnya harga TBS kelapa sawit cukup menggiurkan bagi petani untuk mengalihkan lahannya menjadi komoditi kelapa sawit, sementara harga karet di tingkat petani cenderung stagnan bahkan cenderung turun dengan resiko produksi yang lebih tinggi. Selain itu tanaman karet di Provinsi Riau sudah harus diremajakan sebanyak 84.826 Ha. Sedangkan capaian produktivitas karet dalam 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,05% per tahun.

Selanjutnya, perkembangan luas sagu dalam enam tahun terakhir cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan luas lahan komoditas sagu berkurang yaitu sebesar 0,01% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan produksi menurun sebesar - 0,03% per tahun serta rata-rata pertumbuhan produktivitas sagu juga turun sebesar -0,02 % per tahun. Peningkatan produksi sagu tahun 2023 sebesar 152.758 ton terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan meningkatnya produktivitas tanaman menghasilkan yaitu sebesar 9.105 kg/ha.

Penyebaran areal sagu di Provinsi Riau terdapat di 5 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki luas areal tanaman sagu terluas di Riau. Sagu selain sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat pengganti beras dalam penganekaragaman pangan lokal guna mendukung ketahanan pangan, juga merupakan sumber pangan yang baik untuk menjaga kesehatan, khususnya kadar gula darah dan menjaga tubuh tetap ideal dengan berat badan dan tinggi seimbang. Sehingga kedepannya diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap budidaya sagu dan pengembangan sagu ke arah industri hilir guna pemanfaatan yang lebih optimal.

2.4.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, fungsi pokok hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan saat ini cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu hutan harus dipertahankan secara optimal dengan menjaga daya dukung secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan.

Luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 sebesar $\pm$ 5.352.503 ha dengan rincian fungsi sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.213.
**Kawasan Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan SK Nomor SK.6612/MENLHK-
 PKTL/KUH/PLA.2/10/2021**

No	Fungsi	Distribusi	
		Luas (Ha)	%
1	Hutan Konservasi	630.622,00	11,78
2	Hutan Lindung	229.776,00	4,29
3	Hutan Produksi	3.343.070,00	62,46
	- Tetap	2.329.904,00	43,53
	- Terbatas	1.013.166,00	18,93
4	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	1.149.035,00	21,47
Jumlah		5.352.503,00	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2023

Kawasan Hutan produksi tetap (HP) merupakan yang terluas yaitu sebesar $\pm$ 2.329.904,00 ha atau 43,53% dari luas kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau. Selanjutnya Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas $\pm$ 1.149.035,00 ha atau 21,47%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm$ 1.013.166,00 ha atau 18,93%, Hutan Konservasi seluas $\pm$ 630.622,00 ha atau seluas 11,78% dan Hutan Lindung seluas $\pm$ 229.776,00 ha atau 4,29% dari total luas Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Selanjutnya, kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dirilis setiap tiga tahun relatif tetap pada tahun 2018-2021. Namun dengan adanya perubahan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan oleh KLHK, luas kerusakan kawasan hutan dan lahan pada tahun 2022 menjadi sebesar 221.828 ha, dimana 86.5% merupakan kategori sangat kritis. Tingginya kategori kerusakan sangat kritis ini memerlukan upaya rehabilitasi kolaboratif dan masif dari berbagai pihak terkait. Dalam lima tahun terakhir, rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung meningkat, namun belum dapat menyelesaikan kerusakan kawasan hutan dan lahan secara menyeluruh di Provinsi Riau.

Tabel 2.214.
Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

No	Keterangan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan	701.607,00	701.607,00*	701.607,00*	701.607,00*	221.828,00	221.828,00
	e. Sangat Kritis	261.139,00	261.139,00*	261.139,00*	261.139,00*	191.877,00	191.877,00
	f. Agak Kritis	-	-	-	-	-	-
	g. Kritis	440.468,00	440.468,00*	440.468,00*	440.468,00*	29.951,00	29.951,00
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	1.887,59	14.786,00	2.196,54	8.547,00	3.055,50	1.775,20

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau dalam Angka Tahun 2018 – 2023

Keterangan: * Berdasarkan data tahun 2018 karena rilis per lima tahun

Tabel 2.215.
Data Luas Lahan Kritis di dalam dan luar Kawasan Hutan per Kabupaten / Kota
Provinsi Riau Tahun 2018

No.	Kabupaten / Kota	Tingkat Kekritisan Lahan					
		Dalam Kawasan Hutan (Ha)				Luar Kawasan Hutan (Ha)	
		Kritis	Sangat Kritis	Total	Kritis	Sangat Kritis	Total
1	Kuatan Singingi	52.410	29.586	81.996	6.295	4.991	11.286
2	Indragiri Hulu	120.604	31.686	152.290	18.321	3.194	21.515
3	Indragiri Hilir	24.116	31.229	55.345	-	2.670	2.670
4	Pelalawan	55.814	20.727	76.541	2.298	202	2.500
5	Siak	12.851	2.194	15.045	4.691	583	5.274
6	Kampar	51.272	58.486	109.758	10.648	6.772	17.420
7	Rokan Hulu	55.048	83.235	138.283	4.662	9.813	14.475
8	Bengkalis	28.117	3.840	31.957	148	-	148
9	Rokan Hilir	35.792	113	35.905	589	-	589
10	Kepulauan Meranti	57	-	57	-	-	-
11	Pekanbaru	4.386	43	4.429	1.134	-	1.134
Jumlah		440.467	261.139	701.607	48.786	28.225	51.608

Sumber: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Noor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, data diolah

Tabel 2.215 menunjukkan peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.887,59 hektar (2018) menjadi 3.055,50 hektar (2022). Jika dilihat dari tabel 2.215, kerusakan hutan dan lahan dalam kawasan hutan terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu seluas 21.515 Ha, selanjutnya berada di Kabupaten Kampar yaitu seluas 17.420 ha, Kabupaten Rokan Hulu 14.475 ha. Sedangkan total luas lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan sebesar 51.608 ha, dimana 54.7% termasuk kategori sangat kritis dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

Rasio kawasan lindung terhadap total kawasan hutan di Provinsi Riau dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan relatif tetap, namun terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0.56% (Tabel 2.178). Rasio ini ke depannya diharapkan meningkat atau minimal dapat dipertahankan, tentunya melalui alokasi peruntukkan yang sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Tabel 2.216.
Rasio Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Kawasan Lindung (Ha)			Kawasan Hutan (Ha)	Rasio Kawasan Lindung terhadap Kawasan Hutan (%)
		Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah		
1	2018	233.910,00	630.753,00	864.663,00	5.406.992,00	15,99
2	2019	233.910,00	630.753,00	864.663,00	5.406.992,00	15,99
3	2020	233.910,00	630.753,00	864.663,00	5.406.992,00	15,99
4	2021	229.776,00	630.622,00	860.398,00	5.352.503,00	16,08
5	2022	229.776,00	630.622,00	860.398,00	5.352.503,00	16,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2023

Selanjutnya kebun dalam kawasan hutan merupakan isu yang sangat krusial di Provinsi Riau, karena hal ini menjadi kendala dalam program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Provinsi Riau dan menyebabkan kerugian negara dari sisi hilangnya pendapatan sektor perkebunan. Tabel 2.217 menunjukkan total luas kebun dalam kawasan hutan di Provinsi Riau sebesar 1,9 juta ha, dimana luasan terbesar kebun dalam kawasan hutan berada pada hutan produksi konversi sebesar 36% dan hutan produksi sebesar 31%. Kebun dalam kawasan hutan terluas berada di Kabupaten Rokan

Hilir sebesar 396.125,16 Ha, Bengkalis sebesar 233.604,84 Ha dan Indragiri Hulu sebesar 227.455,09 Ha. Luas kebun dalam kawasan hutan berdasarkan fungsi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.217.
Kebun dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)					Jumlah
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	
1	Bengkalis	25.796,57	-	60.793,58	107.806,85	39.207,83	233.604,84
2	Indragiri Hilir	174,57	416,43	43.696,34	3.656,09	89.657,25	139.600,67
3	Indragiri Hulu	393,98	7.375,76	45.252,34	40.971,71	133.461,30	227.455,09
4	Kampar	3.698,28	2.219,28	31.892,05	60.533,89	77.918,75	176.262,25
5	Kuantan Singingi	270,64	22.264,03	28.699,05	15.933,76	50.073,14	117.240,63
6	Pelalawan	59.609,98	10,60	54.217,98	52.820,06	36.714,93	203.373,55
7	Rokan Hilir	-	8.955,95	120.479,11	139.612,42	127.077,68	396.125,16
8	Rokan Hulu	-	26.179,19	35.347,71	24.419,99	79.646,31	165.593,21
9	Siak	1.737,02	-	4.388,96	72.909,07	5.587,68	84.622,73
10	Dumai	3.479,49	-	2.939,53	59.733,36	19.638,92	85.791,29
11	Pekanbaru	22,89	-	449,06	1.206,35	946,15	2.624,46
12	Kepulauan Meranti	-	46,89	4.325,65	478,93	3.288,44	8.140,99
	Jumlah	95.190,39	75.525,82	453.118,27	588.821,55	689.102,47	1.901.759,58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2023

Penyelesaian kebun dalam kawasan hutan ini merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak terkait. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi solusi dengan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

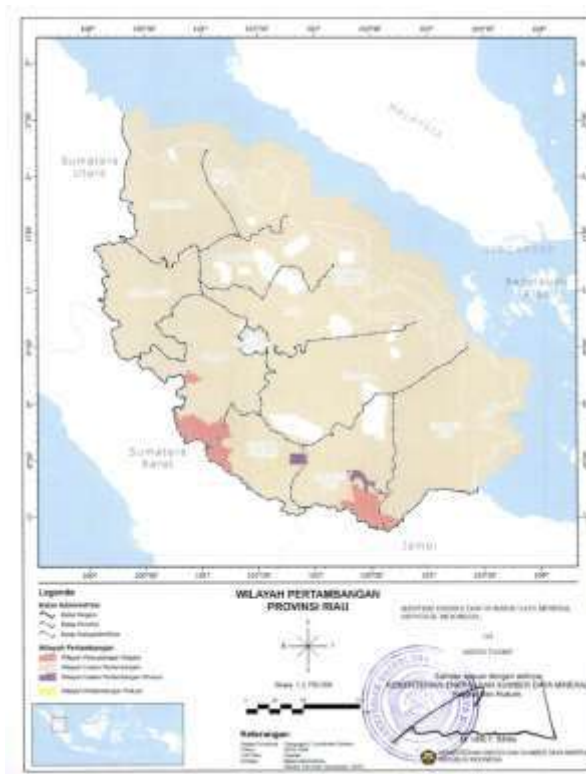
1. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca (GgCO₂-e) Provinsi Riau Tahun 2022 berhasil diturunkan dengan total capaian nilai emisi sebesar 177.671,83 GgCO₂e atau tercapai sebesar 100,17%, artinya telah mencapai target yang telah ditetapkan (177.978,04 GgCO₂e). Emisi gas rumah kaca tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 3.500,83 GgCO₂e. Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi dan segera dapat diatasi, rehabilitasi hutan dan lahan juga mempunyai kontribusi terhadap kinerja penurunan emisi gas rumah kaca. Jika dibandingkan dengan

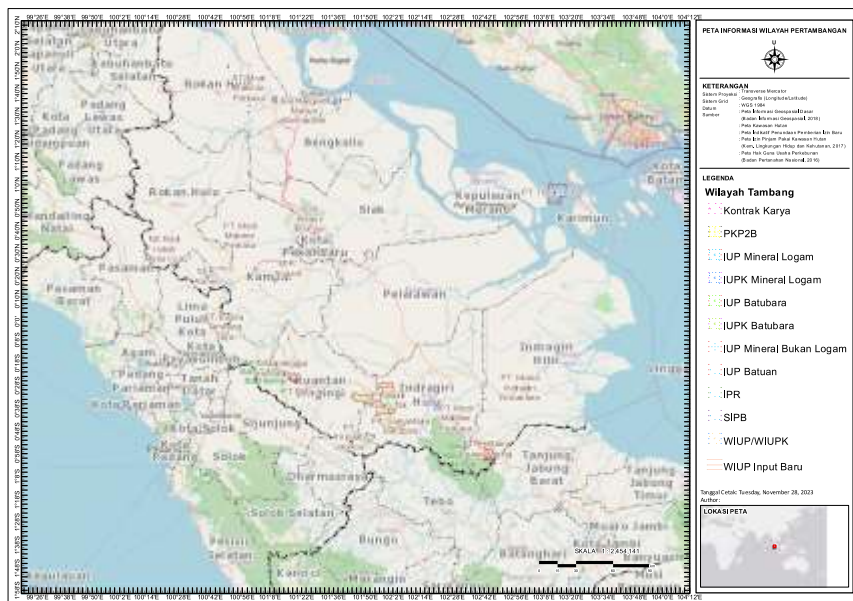
target akhir RPJMD tahun 2024, capaian tahun 2022 baru mencapai 97,98% dari target 174.084,05 GgCO₂e.

2.4.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Riau memiliki potensi/cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau yaitu minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut. Cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*million metric stock tanks barrels*) yang terdapat Kabupaten Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Potensi/cadangan gas bumi sebesar 7,75 triliun *standart cubic feet* (TSCF) terdapat di Kabupaten Pelalawan, Siak, Pekanbaru dan Bengkalis. Potensi/cadangan batubara sebesar 2,37 milyar ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar. Potensi/cadangan bitumin (*oil shale*) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Potensi/cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir.



Gambar 2.52.
Wilayah Pertambangan Provinsi Riau
Berdasarkan SK Kepmen ESDM No. 100.K/MB.01/MEM.B/2022



Gambar 2.51.
Peta Kompilasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Riau Tahun 2023

Tabel 2.218.
Produksi Hasil Tambang di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2022

Jenis Tambang	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Minyak Bumi (Barrel)	83.306.071,20	76.019.547,25	52.823.408,97	66.157.529,65	66.134.034,68	-3,98%
Gas Bumi (MMBTU)	14.553.786,86	23.529.989,64	21.987.128,47	29.381.352,43	31.078.620,04	17,03%
Batubara	1.484.246,64	1.845.379,64	1.918.034,86	2.224.927,33	2.823.670,66	20,69%

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

Kondisi pertambangan di Provinsi Riau berdasarkan temuan di lapangan tentang keberadaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, serta data dinas teknis di daerah dan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh kabupaten/kota, bahwa saat ini masih banyak terdapat aktivitas PETI. Persentase pertambangan tanpa izin dihitung dengan rumus luas penambangan liar yang ditertibkan dibagi dengan luas PETI tahun sebelumnya.

Temuan di lapangan merupakan spot-spot PETI, diasumsikan setiap spot memiliki luas 1 hingga 2 ha. Data Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dijadikan perkiraan akan adanya kegiatan PETI. Data untuk Kabupaten Kuantan Singingi dihitung oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dengan asumsi memiliki

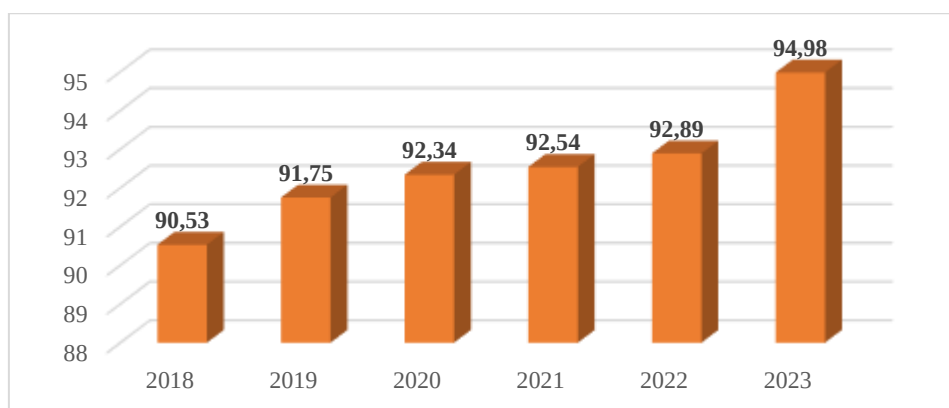
luasan hingga daerah yang terpengaruh kegiatan PETI. Data PETI merupakan kompilasi kegiatan dari APBD kabupaten, laporan masyarakat, maupun media internet. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir tidak tersedia data PETI. Persentase pertambangan tanpa izin bisa dihitung untuk yang memiliki data dan dilakukan penertiban. Mungkin terjadi suatu daerah memiliki PETI tetapi tidak dilakukan penertiban atau tidak ada informasi mengenai penertiban yang dilaporkan ke Pemda setempat, sehingga persentasenya tidak dapat dihitung. Sektor listrik di Provinsi Riau secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Rasio elektrifikasi di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.219.
Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2018 – 2023

No	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	89,39	94,04	95,34	94,04	94,04	99,57
2	Indragiri Hulu	95,10	96,12	89,21	96,22	96,22	90,47
3	Indragiri Hilir	62,99	71,93	77,96	77,40	77,41	97,87
4	Pelalawan	86,15	84,31	89,53	85,47	88,24	83,14
5	Siak	90,62	95,33	88,14	95,34	95,34	99,99
6	Kampar	93,92	99,36	96,22	95,71	94,71	99,66
7	Rokan Hulu	82,64	86,71	75,87	88,27	88,43	91,41
8	Bengkalis	87,33	89,21	84,95	91,65	93,73	90,62
9	Rokan Hilir	91,93	89,53	94,71	90,05	90,12	86,95
10	Kepulauan Meranti	97,06	76,29	94,04	80,34	80,39	88,12
11	Pekanbaru	108,97	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99
12	Dumai	96,94	100,00	100,00	99,60	99,96	99,99
Provinsi Riau		90,53	91,75	92,34	92,54	92,89	94,98

Sumber: PLN dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, 2024

Secara keseluruhan selama periode 2018 – 2023, Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau mengalami kenaikan dan pada Tahun 2023 rasio elektrifikasi Provinsi Riau sebesar 94,98% dengan rasio elektrifikasi terendah berada di Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 83,14% dan rasio elektrifikasi tertinggi berada di beberapa Kabupaten / Kota antara lain yaitu Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yaitu sebesar 99,99%. Berikut ini gambaran kenaikan Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.52.
Rasio Elektrifikasi di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Rasio elektrifikasi Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Perhitungan rasio elektrifikasi di Provinsi Riau ini dilakukan dengan memperhitungkan rumah tangga yang penerangannya bersumber dari PLN.

Tabel 2.220.
Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (PLN) %	Rasio Desa Berlistrik (Non PLN) %	Rasio Desa Berlistrik (PLN + Non PLN) %
			PLN	Non-PLN	Total			
1	Bengkalis	155	155	0	155	100	0	100
2	Indragiri Hilir	236	236	0	236	100	0	100
3	Indragiri Hulu	194	194	0	194	100	0	100
4	Kampar	250	250	0	250	100	0	100
5	Kepulauan Meranti	101	101	0	101	100	0	100
6	Kuantan Singingi	229	229	0	229	100	0	100
7	Pelalawan	118	118	0	118	100	0	100
8	Rokan Hilir	184	184	0	184	100	0	100
9	Rokan Hulu	145	145	0	145	100	0	100
10	Siak	131	131	0	131	100	0	100
11	Dumai	36	36	0	36	100	0	100
12	Pekanbaru	83	83	0	83	100	0	100
	TOTAL	1862	1862	0	1862	100	0	100

Sumber: Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, 2024

Sedangkan jumlah desa yang sudah terlayani listrik di Provinsi Riau hingga tahun 2023 sudah mencapai 100%.

2.4.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui *sales contract process*, dalam hal ini adalah pihak Eksportir dan Importir. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Perkembangan ekspor impor Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.221.
Neraca Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Uraian	Nilai Ekspor dan Impor (Juta US\$)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Total Perdagangan	13,850.5	15,081.8	21,592.2	25,576.2	21,292.7	14.89
Migas	977.6	694.2	1,849.5	1,783.1	1,989.2	26.67
Non Migas	12,872.9	14,387.5	19,742.7	23,793.0	19,303.5	14.03
Ekspor	12,412.5	13,763.8	19,969.9	22,596.0	18,956.8	14.37
Migas	818.2	573.2	1,730.4	1,528.5	1,758.4	28.54
Non Migas	11,594.3	13,190.6	18,239.5	21,067.4	17,198.4	13.39
Impor	1,438.0	1,318.0	1,622.3	2,980.2	2,335.9	19.56
Migas	159.4	121.1	119.1	254.6	230.8	16
Non Migas	1,278.6	1,196.9	1,503.2	2,725.6	2,105.1	19.96
Neraca Perdagangan	10,974.5	12,445.9	18,347.6	19,614.3	16,620.9	13.71
Migas	658.8	452.1	1,611.2	1,274.0	1,527.6	31.23
Non Migas	10,315.7	11,993.8	16,736.3	18,341.8	15,093.3	12.59

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan RI

Selama Januari-Desember 2022, nilai ekspor Riau mengalami kenaikan sebesar 13,15 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan oleh naiknya ekspor nonmigas sebesar 15,50 persen, meskipun ekspor migas mengalami penurunan sebesar 11,67 persen. Penurunan ekspor migas disebabkan oleh turunnya ekspor minyak mentah sebesar 90,66 persen, meskipun ekspor industri pengolahan hasil minyak mengalami kenaikan sebesar 140,34 persen

Sementara impor Riau selama tahun 2022 berdasarkan harga Cost Insurance And Freight (CIF) mencapai US\$ 2,98 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 83,70 persen dibanding impor tahun 2021 sebesar US\$ 1,62 miliar, dengan peran migas sebesar 8,39 persen dan non migas 91,61 persen. Impor non migas tahun 2022 mencapai US\$ 2,73 miliar atau naik 81,32 persen dibanding impor non migas tahun 2021 yang nilainya sebesar US\$ 1,50 miliar. Demikian juga impor migas tahun 2022 dengan nilai sebesar US\$ 0,25 miliar atau naik 113,77 persen dibanding impor migas tahun 2021 dengan nilai US\$ 0,12 miliar.

Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir sebesar 11,68% dimana pertumbuhan ekspor non migas sebesar 13,68% dan ekspor migas 22,66%, Sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai impor Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir sebesar 22,54% dimana pertumbuhan impor non migas 24,17% dan impor migas 13,77%.

Tabel 2.222.
Ekspor Provinsi Riau Golongan Barang HS 2 Digit Tahun 2021 – 2023

Golongan Barang	2021		2022		2023	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
Migas	3.408.013,90	1.730.375,99	1.845.535,22	1.528.536,48	-	-
Minyak Mentah	2.537.958,00	1.144.179,52	142.490,00	108.308,30	-	-
Bahan Bakar Mineral (27)	2.537.958,00	1.144.179,52	142.490,00	108.308,30	-	-
Hasil Minyak	870.055,90	586.196,47	1.703.045,22	1.420.228,18	-	-
Bahan Bakar Mineral (27)	870.055,90	586.196,47	1.703.045,22	1.420.228,18	-	-
Non Migas	22.525.729,31	18.232.736,17	23.676.810,43	20.954.579,29	-	-
Hasil Pertanian	1.769.666,21	205.455,06	2.188.876,45	259.029,40	-	-
Bahan-bahan Nabati (14)	1.525.515,08	148.339,69	1.949.208,62	204.940,77	-	-
Buah-buahan (08)	232.847,23	51.645,25	255.974,56	65.730,48	-	-
Ikan dan Udang (03)	6.424,15	3.511,96	8.705,86	7.343,60	-	-
Sayuran (07)	3.926,52	1.465,59	7.799,65	750,9	-	-
Biji-bijian Berminyak (12)	8,7	318,06	316,06	540,93	-	-
Kopi, Teh, Rempah-rempahan (09)	319,69	86,68	284,82	289,48	-	-
Susu, Mentega, Telur (04)	57,45	46,22	33,87	31,26	-	-
Lak, Getah dan Damar (13)	212,4	26,51	169,13	19,25	-	-
Pohon Hidup, dan Bunga Potong (06)	355	15,11	321	51,01	-	-
Non Migas	23.545.863,88	13.236.995,62	23.676.810,43	20.954.579,29	-	-
Hasil Industri	21.818.811,55	13.034.943,90	21.487.933,98	20.695.549,89	-	-
Lemak & Minyak Hewan/Nabati (15)	12.601.588,38	8.315.591,01	11.068.941,93	12.236.798,87	11.068.942	9.460.844.160

Golongan Barang	2021		2022		2023	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
Berbagai Produk Kimia (38)	1.367.850,77	951.092,26	2.066.162,84	2.668.325,87	1.865.948	1.677.116.216
Bubur Kayu (Pulp)	2.877.950,99	1.189.738,65	3.088.474,08	1.952.492,53	3.775.224	1.945.377.362
Kertas dan Karton (48)	2.561.941,21	1.629.836,64	2.429.490,46	2.028.787,55	2.568.284	2.119.203.458
Bahan Kimia Organik (29)	355.540,76	254.827,72	430.06,54	550.833,62	431.088	304.407.616
Ampas dan Sisa Industri Makanan (23)	1.661.525,62	220.059,64	1.987.326,77	628.976,21	2.257.480	739.052.818
Serat Stapel Buatan (55)	134.489,60	138.399,03	160.458,43	268.267,87	163.186	240.601.323
Berbagai Makanan Olahan (21)	111.160,12	168.175,26	126.367,67	203.990,84	130.560	191.229.981
Tembakau (24)	1.900,52	69.895,39	2.888,72	83.300,62	3.716	88.028.801
Kayu, Barang dari Kayu (44)	42.325,85	16.491,08	36.066,12	16.982,40	42.255	15.124.957
Buah-buahan (08)	31.842,95	19.919,09	29.711,64	18.784,47	271.070	61.230.604
Minuman (22)	10.644,71	9.029,55	6.543,23	5.090,79		
Hasil Penggilingan (11)	11.260,99	10.627,86	13.190,70	8.326,62	11.232	13.748.049
Olahan dari Buah-buahan/Sayuran (20)	7.332,31	7.155,93	11.843,79	17.977,04	12.569	21.348.654
Bahan Kimia Anorganik (28)	27.471,00	1.413,81	24.423,00	1.961,88		
Hasil Industri Lainnya	1.434,82	3.299,34	912,58	2768,9	57.402	31.189.438
Riau	25.373.018,67	13.810.161,14	25.522.345,65	22.483.115,77	27.950.515	18.866.710.862

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022

Selama tahun 2022, ekspor Riau menurut golongan barang utama (HS 2 digit) terbesar antara lain terjadi pada Lemak & Minyak Hewan/Nabati US\$ 12,24 miliar (54,42 persen), Berbagai Produk Kimia US\$ 2,67 miliar (11,87 persen), Kertas dan Karton US\$ 2,03 miliar (9,02 persen), Bubur Kayu (Pulp) US\$ 1,95 miliar (8,68 persen), Ampas dan Sisa Makanan Industri US\$ 628,98 juta (2,80 persen), Bahan Kimia Organik US\$ 550,83 juta (2,45 persen) dan jenis golongan barang utama lainnya.

Tabel 2.223.
Ekspor Provinsi Riau Menurut Kawasan Negara Tujuan Tahun 2021 – 2022

Kawasan	2021		2022	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Asia	19.132.457,88	13.714.921,32	18.822.734,03	15.734.843,00
Eropa	3.903.884,96	3.364.121,31	3.557.615,16	3.342.321,05
Amerika	1.485.017,16	1.586.964,88	1.813.518,10	2.106.313,25
Afrika	1.208.945,96	1.231.498,39	1.142.183,18	1.232.777,43
Australia & Oceania	203.437,25	65.624,26	166.295,19	66.861,04
Jumlah	25.933.743,21	19.963.112,16	25.522.345,65	22.483.115,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022

Tujuan ekspor Provinsi Riau tahun 2022 sebagian besar masih ke negara-negara di kawasan Asia (69,99 persen) seperti negara Tiongkok, India, Malaysia, Pakistan, Singapura, dan lain lain dengan komoditi utama fraksi cair dari minyak sawit, bubur kayu kimia, bubur kayu kimiawi, asam lemak monokarboksilat industri, minyak sawit mentah dan bahan bakar minyak. Kemudian ke negara-negara di kawasan Eropa (13,35 %) seperti negara Belanda, Spanyol, Italia, Rusia, Estonia, dan lain lain. Selanjutnya ke negara-negara kawasan Amerika (9,37 persen), seperti negara Amerika Serikat, Brazil, Colombia, Meksiko, Haiti, Peru, dan lain lain, Kawasan Afrika (5,48 persen), seperti negara Mesir, Kenya, Aljazair, Afrika Selatan, dan lain lain, sisanya ke negara-negara di kawasan Oceania dan Australia (0,30 persen).

Tabel 2.224.
Ekspor Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota dan
Pelabuhan Muat Tahun 2021 – 2023

Kabupaten/Kota Pelabuhan Muat	2021		2022		2023	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indragiri Hulu	3.0001,46	2.071,01	131.072,78	56.527,31	162.868	79.886.15
Rengat	3.0001,46	2.071,01	131.072,78	56.527,31	162.868	79.886.15
Indragiri Hilir	465.77,78	345.453,86	476.989,52	367.851,98	684.829	326.515.382
Sungai Guntung	259.469,80	276.475,29	249.111,74	276.250,81	276.577	267.554.934
Kuala Gaung	104.761,71	23.662,87	111.206,49	22.948,38	111.708	20.326.526
Kuala Enok	62.285,36	33.761,79	81.653,60	60.594,66	276.652	34.117.281
Tembilahan	37.767,75	8.196,61	34.824,07	7.670,30	19.892	4.516.641
Pulau Kijang	1.495,15	3.357,31	193,62	387,83	-	-
Siak Sri Indrapura	5.333.772,29	3.084.149,68	5.560.097,26	3.795.384,80	6.451.426	3.897.434.579
Buatan	2.936.489,99	1.795.776,70	3.100.499,45	2.138.958,47	2.814.948	1.702.194.331
Perawang	1.641.869,67	1.151.446,89	1.539.033,76	1.356.135,45	2.083.770	1.706.714.589
Siak Sri Indrapura	612.231,63	65.231,96	778.074,05	191.982,58	866.295	120.848.126
Lalang Terminal, ST	143.181,00	71.694,12	142.490,00	108.308,30	193.541	113.945.373
Futong Terminal	-	-	-	-	492.552	253.676.444
Siak Kecil	-	-	-	-	320	55.716
Bengkalis	1.592.248,34	862.188,45	1.598.321,64	1.117.113,61	1.951.826	1.142.082.878
Sungai Pakning	1.583.907,14	860.721,14	1.588.527,53	1.112.053,26	1.864.427	1.099.770.651
Tanjung Medang	6.208,17	900,2	5.321,82	728,55	4.503	1.026.156
Bengkalis	2.133,02	567,1	4.472,29	4.331,80	82.896	41.286.071
Rokan Hilir	3.052,64	2.099,21	3.483,2	1.897,07	59.769	13.259.166
Panipahan	2.809,91	1.908,17	2.145,05	1.000,50	17.772	10.980.549
Bagan Siapi api	242,73	191,04	1.338,15	896,57	41.997	2.278.617
Kepulauan Meranti	37.132,97	7.118,65	35.968,26	7.893,10	45.549	10.178.056
Selat Panjang	37.132,97	7.118,65	35.968,26	7.893,10	45.529	10.063.732

Kabupaten/Kota Pelabuhan Muat	2021		2022		2023	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanjung Kelabu	-	-	-	-	20	114.324
Pekanbaru	37.774,27	6.252,95	8.913,56	9.423,62	305.782,03	160.833.812
Pekanbaru (Rumbai)	33.452,93	2.845,69	-	-	877	548.337
Pekanbaru	4.321,34	3.407,26	8.896,45	7.687,64	305.782	160.833.712
Simpang Tiga (U)	-	-	17,11	1.735,98	0,03	100
Dumai	18.460.981,47	15.653.778,35	17.707.499,45	17.127.024,28	18.287.589	13.235.972.517
Dumai	18.460.981,47	15.653.778,35	17.707.499,45	17.127.024,28	18.287.589	13.235.972.517
Jumlah	25.933.743,21	19.963.112,16	25.522.345,65	22.483.115,77	27.950.515	18.886.710.862

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023.

Dilihat dari sebaran ekspor menurut kabupaten/kota tahun 2022, Kota Dumai masih mendominasi dengan nilai ekspor sebesar US\$ 17,13 miliar (76,17 %) dari total nilai ekspor Provinsi Riau, disusul Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar US\$ 3,80 miliar (16,88 %), Kabupaten Bengkalis US\$ 1,12 miliar (4,32 %), dan lima kabupaten/ kota lainnya sebesar US\$ 0,43 miliar (2,63%).

Tabel 2.225.
Impor Provinsi Riau Golongan Barang HS 2 Digit Tahun 2021 – 2022

Golongan Barang	2021		2022	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Migas	216.674,11	119.135,34	281.564,75	254.569,74
Hasil Minyak	216.674,11	119.135,34	281.564,75	254.569,74
Bahan Bakar Mineral (27)	216.674,11	119.135,34	281.564,75	254.569,74
Non Migas	3.464.992,94	1.503.192,71	3.881.299,72	2.725.618,87
Hasil Pertanian	51,70	51,75	46.754,27	13.717,04
Sayuran (07)	51,25	43,27	697,38	570,28
Lak, Getah dan Damar (13)	0,45	8,48	27,37	122,40
Kayu, Barang dari Kayu (44)	-	-	679.580,04	86.274,35
Biji-bijian Berminyak (12)	-	-	771,31	822,89
Gandum-gandum (10)	-	-	27.293,14	11.656,97
Hasil Industri	3.218.005,50	1.488.214,44	3.593.871,68	2.697.945,86
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	26.442,17	419.141,13	74.278,48	1.026.117,19
Pupuk (31)	1.630.409,06	413.568,42	1.186.885,19	623.680,29
Bahan Kimia Organik (29)	275.776,07	110.866,34	297.872,48	127.297,48
Bubur Pulp Kayu (47)	102.545,96	84.952,73	96075,72	95.171,18
Bahan Kimia Anorganik(28)	313.697,97	59.212,80	385.058,36	131.552,49

Golongan Barang	2021		2022	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	14.817,96	49.562,54	22.909,17	84.858,43
Kertas dan Karton (48)	13.890,37	44.468,53	18.259,94	46.861,21
Garam, Belerang, Kapur (25)	380.226,15	39.262,18	709.004,67	68.443,20
Besi dan Baja (72)	26.033,87	32.826,17	43.458,33	58.289,46
Lemak & Minyak Hewan/Nabati (15)	18.924,75	30.491,63	20.009,43	42.119,58
Perekat, Enzim (35)	46.401,59	26.663,13	41.703,41	27.995,03
Berbagai Produk Kimia (38)	35.608,29	22.766,29	23.994,22	24.242,67
Benda-benda dari Batu, Gips, dan Semen (68)	216.001,14	21.014,48	117.861,74	15.213,20
Plastik dan Barang dari Plastik (39)	8.401,36	20.840,29	9.339,47	26.406,22
Mesin/Peralatan Listrik (85)	1.057,44	16.084,90	13.829,85	103.078,44
Kapal Terbang dan Bagianya	10,32	14.492,33	-	-
Kain Tenun Berlapis (59)	284,59	13.987,30	307,92	15.283,87
Hasil Penggilingan (11)	24.102,95	11.019,80	46.978,65	23.268,28
Sabun dan Preparat Pembersih (34)	4.065,50	8.903,87	4.251,90	9.210,16
Produk Keramik (69)	29.015,56	7.220,55	30.370,54	8.820,92
Hasil Industri Lainnya	50.292,43	40.869,05	451.422,20	140.054,56
Hasil Tambang	246.935,74	14.926,53	240.673,77	13.955,97
Garam, Belerang, Kapur (25)	246.695,74	14.808,93	240.611,68	13.818,12
Bahan Bakar Mineral (27)	240	117,6	62,09	137,85
Riau	3.681.667,05	1.622.328,05	4.162.864,47	2.980.188,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022

Impor nonmigas selama Januari-Desember 2022 didominasi oleh Mesin-mesin/Pesawat Mekanik US\$ 1,03 miliar (37,65 %), kemudian Pupuk sebesar US\$ 623,68 juta (22,88 %), Bahan Kimia Anorganik US\$ 131,55 juta (4,83 %), serta Bahan Kimia Organik US\$ 127,30 juta (4,67 %) dengan kontribusi keempatnya mencapai 70,03 %. Secara keseluruhan, impor 10 golongan barang utama non migas (HS 2 digit) pada periode Januari-Desember 2022 memberikan kontribusi sebesar 88,23 % terhadap total impor nonmigas Riau. Sementara itu, kontribusi impor nonmigas di luar 10 golongan barang utama sebesar 11,77 %. Dari sisi pertumbuhan, impor 10 golongan barang utama pada Januari-Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 93,34 % terhadap periode yang sama tahun 2021.

Tabel 2.226.
Impor Provinsi Riau Menurut Kawasan Negara Asal Tahun 2021 – 2023

Kawasan	2021		2022		2023	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asia	1.995.579,33	958.276,39	2.743.725,27	1.897.971,85	3.293.906	1.357.192.696
Eropa	23.036,10	106.376,85	141.023,73	433.709,61	108.495	442.305.223
Amerika	842.004,73	313.163,52	731.272,31	572.441,10	270.570	185.480.212
Afrika	282.281,09	23.988,79	333.482,51	46.465,61	-	-
Oceania	3.857,93	3.533,45	528,85	859,32	1.189.800	368.482.541
Jumlah	3.681.667,05	1.622.328,05	3.681.667,05	1.622.328,05	4.862.771	2.353.460.672

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022

Menurut negara asal, impor Riau terutama dipasok dari negara-negara di kawasan Asia seperti Tiongkok, Singapura, Malaysia, Oman, Thailand, dan lain lain sebesar US\$ 1,89 miliar. Diikuti oleh negara-negara di kawasan Amerika yaitu Kanada, Amerika Serikat, Peru, dan lain lain sebesar US\$ 572,44 juta. Selanjutnya negara-negara di Eropa yaitu Finlandia, Rusia, Jerman, Swedia, dan lain lain sebesar US\$ 433,71 juta. Kemudian benua Australia US\$ 28,74 juta, kawasan Afrika US\$ 46,47 juta, dan kawasan Oceania US\$ 0,86 juta.

Tabel 2.227.
Impor Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota dan Pelabuhan Bongkar Tahun 2021 – 2023

Kabupaten/Kota Pelabuhan Muat	2021		2022		2023	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indragiri Hulu	23,75	182,60	-	-	64	874.625
Rengat	23,75	182,60	-	-	64	874,63
Indragiri Hilir	20.733,43	71.969,32	20.827,95	73.143,63	26.588	91.988,66
Sungai Guntung	20.465,69	71.048,96	13.086,20	43.274,71	179	622,99
Tembilahan	240,43	746,35	7.722,25	29.791,37	26.391	91.093,18
Kuala Enok	27,31	174,02	19,50	77,55	18	272,49
Siak Sri Indrapura	1.581.786,98	868.441,28	1.613.711,70	618.913,33	1.262.436	328.251,37
Buatan	20.465,69	71.048,96	13.086,20	207.533,51	25.463	13.036,82
Perawang	721.256,56	252.603,58	1.054.199,76	295.456,10	1.162.346	316.342,78
Futong Terminal	293.951,01	133.316,59	276.545,70	115.850,94	73.896	50.840,76
Siak Sri Indrapura	24,91	139,72	7,75	72,78	731	2.031,01
Bengkalis	1.998,99	1.740,91	6.665,66	9.654,64	1.735	1.832,44

Kabupaten/Kota Pelabuhan Muat	2021		2022		2023	
	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bengkalis	1.998,99	1.740,91	3.171,66	2.023,74	1.735	1.832,44
Sungai Pakning	-	-	3.494,00	7.630,90	-	-
Rokan Hilir	32,07	29,70	76,82	86,10	101	90,25
Panipahan	32,07	29,70	76,82	86,10	101	90,29
Kepulauan Meranti	1.540,17	1.331,49	1.580,42	1.186,91	1.517	980,94
Selat Panjang	1.540,17	1.331,49	1.580,42	1.186,91	1.517	980,94
Pekanbaru	58.544,96	64.409,19	747.682,82	1.213.364,71	1.934.430	1.060.844,14
Pekanbaru	55.367,83	48.056,76	653.030,58	1.146.433,77	1.934.374	1.056.044,30
Simpang Tiga (U)	109,83	15.103,28	92.911,46	62.108,92	56	4.799,84
Pekanbaru (Rumbai)	3.067,30	1.249,15	1.740,78	4.822,02	-	-
Dumai	2.017.006,71	614.223,57	1.772.881,75	1.070.707,11	1.635.900	814.598,21
Dumai	2.017.006,71	614.223,57	1.772.881,75	1.070.707,11	1.635.900	814.598,21
Jumlah	3.681.667,05	1.622.328,05	4.162.864,47	2.980.188,60	4.862.771	3.173.121,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024

Menurut kabupaten/kota tahun 2022, impor Kota Pekanbaru berada di urutan teratas dengan nilai impor sebesar US\$ 1,21 miliar atau 40,71 persen, diikuti oleh Kota Dumai sebesar US\$ 1,07 miliar (35,93 persen), Kabupaten Siak sebesar US\$ 0,62 miliar (20,76 persen), dan lima Kabupaten/Kota lainnya sebesar US\$ 0,08 miliar (2,60%).

Neraca Perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca Perdagangan Riau tahun 2022 surplus sebesar US\$ 19,50 miliar.

2.4.3.7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk

dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Perkembangan industri di Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.228.
Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang di
Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Industri				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	22	21	21	21	22
2	Indragiri Hulu	21	23	23	25	26
3	Indragiri Hilir	19	20	20	21	22
4	Pelalawan	34	34	34	35	41
5	Siak	24	24	24	24	26
6	Kampar	69	68	62	60	62
7	Rokan Hulu	36	36	36	35	36
8	Bengkalis	15	15	15	15	18
9	Rokan Hilir	30	32	32	31	33
10	Pekanbaru	18	25	37	38	48
11	Dumai	51	36	26	28	29
12	Kep. Meranti	27	26	25	26	29
	JUMLAH	366	360	355	359	389

Sumber : Direktori Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Riau, BPS 2023

Pada tahun 2022, dari jumlah 359 perusahaan dikelompokkan ke dalam skala industri besar dan sedang, dimana jumlah industri besar sebanyak 220 perusahaan dan industri sedang sebanyak 139 perusahaan dengan klasifikasi industri terdiri dari industri makanan 266 perusahaan, industri barang galian bukan logam sebanyak 17 perusahaan, industri karet, barang dari karet dan plastik sebanyak 11 perusahaan, industri kertas dan barang dari kertas sebanyak 11 perusahaan dan industri lainnya 54 perusahaan.

Tabel 2.229.
Perkembangan sektor industri di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2021

No	URAIAN	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Skala Besar (unit)	230	228	222	217
	Tenaga Kerja (Org)	85.320	81.773	76.115	72.160
	Nilai Output (Rp.000)	394.050.759.269	360.466.770.970	343.111.801.422	488.207.007.95
	Nilai Tambah (Rp.000)	136.286.833.957	101.886.369.569	112.737.832.247	147.218.660.49
	NO/Tenaga Kerja	4.618.503	4.948.642	5.369.451	6.765.618
	NT/Tenaga Kerja	1.597.360	1.493.479	1.624.475	2.040.169
2	Skala Sedang (Unit)	121	138	138	138
	Tenaga Kerja (Org)	6.681	7.689	7.642	7.823
	Nilai Output (Rp.000)	25.125.807.014	44.198.519.337	41.544.661.559	44.539.775.765
	Nilai Tambah (Rp.000)	7.533.897.233	20.241.333.212	11.880.514.409	14.626.560.007
	NO/Tenaga Kerja	3.760.785	5.748.279	5.436.359	5.693.439
	NT/Tenaga Kerja	1.127.660	2.632.505	1.554.634	1.869.686
3	Skala Kecil dan Mikro (Unit)	77.876	59.837	50.702	45.795
	Tenaga Kerja (Org)	161.034	119.415	106.646	94.748
	Nilai Output (Rp.000)	11.464.255.092	6.706.657.458	6.783.193.037	5.878.900.475
	NO/Tenaga Kerja	71.192	56.162	63.604	62.047

Sumber: Statistik Industri Manufaktur Indonesia, BPS RI & Profil Industri Mikro dan Kecil, BPS RI

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri, dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri yang diimplementasikan melalui Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM). Beberapa Kawasan Industri telah beroperasi, beberapa KI dalam persiapan dan beberapa KI masih dalam tahap pengusulan/perencanaan oleh Kabupaten/Kota.

Tabel 2.230.
Lokasi Kawasan Industri di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Wilayah Industri	Luas (ha)	Lokasi	Keterangan
1	Kawasan Industri Dumai - Pelintung - Lubuk Gaung - Dock Yard - Pelindo (BK)	1.731 Ha	Kota Dumai	Sudah memiliki Pengelola Pengelola : PT. Kawasan Industri Dumai
2	Kawasan Industri Tanjung Buton	600 Ha	Kab. Siak	Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Kawasan Industri Tanjung Buton
3	Kawasan Industri Tenayan Raya	1.550 Ha	Kota Pekanbaru	Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui Kawasan Industri), pembangunan industri daerah harus memperhatikan industri kecil dan menengah melalui fasilitasi pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM). Beberapa SIKIM telah berkembang di Provinsi Riau berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.231.
Lokasi SIKIM di Provinsi Riau Tahun 2023

No	NAMA	Lokasi	Jumlah IKM	Investasi	Keterangan
1	SIKIM Pandai Besi Rumbio Jaya Steel	Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kampar	6 IKM	1.400.000.000	Beroperasi
2	SIKIM Pengolahan Sagu Terpadu Sei Tohor	Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti	14 IKM	3.000.000.000	Beroperasi
3	SIKIM Pengolahan Kopi Liberika	Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti	12 IKM	35.000.000.000	Beroperasi
4	SIKIM Nenas	Kabupaten Siak	-	47.000.000.000	DED SIKIM
5	SIKIM Pandai Besi	Kabupaten Rohul	30 IKM	11.000.000.000	Kajian Masterplan /Business Plan

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023

Pada Tahun 2022 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan kajian Masterplan dan Business Plan untuk pandai besi di Kabupaten Rokan Hilir dan di Tahun 2024 telah direncanakan dianggarkan untuk kajian SIKM di beberapa Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 2.232.
Rencana SIKIM di Provinsi Riau Tahun 2024

No	NAMA	Lokasi	Keterangan
1	SIKIM Pandai Besi	Kabupaten Siak	Kajian FS/MasterPlan/Busines Plan
2	SIKIM Pengolahan Kelapa	Kabupaten Inhil	Kajian FS/MasterPlan/Busines Plan
3	DED SIKIM Pandai Besi	Kabupaten Rohul	DED SIKIM

Pada Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah akan melaksanakan kajian Masterplan dan Business Plan dan DED di beberapa Kabupaten/Kota guna untuk meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan di Provinsi Riau.

2.1.4.3.8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi bertujuan untuk pemerataan pembangunan di bidang kependudukan di samping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang tidak memiliki lahan sebagai aset produksi. Pembangunan transmigrasi sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan melakukan sinkronisasi pembangunan melalui pengembangan usaha yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pendapatan petani di lokasi transmigrasi.

Tabel 2.233.
Target dan Realisasi Penempatan Transmigran Provinsi Riau Tahun 2016 - 2023

Tahun	Target (KK)	Realisasi		% Target thd Realisasi
		Kepala keluarga	Jiwa	
2016	175	175	700	100
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penerima transmigran terbesar di Indonesia, namun mulai tahun 2000-an jumlah penempatan transmigran di Provinsi Riau menurun drastis. Selama periode 2016-2023, antara target dan realisasi penempatan transmigran mencapai 100%, kecuali pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penempatan transmigrasi.

Daerah asal transmigran di Provinsi Riau, hanya terdapat pada APPDT (alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi) tahun 2016 sebanyak 175 KK dengan 700 jiwa. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penempatan transmigran.

Tabel 2.234.
Realisasi Penempatan Transmigran Menurut Daerah Asal
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

No	Daerah Asal	2016		2017		2018		2019		2020	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengungsi Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	APPDT	175	700	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	175	700	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Namun Provinsi Riau masih memiliki kawasan transmigrasi yang termasuk kedalam 100 kawasan Prioritas Kementerian, yaitu kawasan Pulau Rupat di Kab. Bengkalis. Dalam pencapaian rata rata IPKT yang ditargetkan oleh Kementerian pada tahun 2023 sebesar 35.25 persen baru tercapai 31.72 persen, dimana capaian yang rendah ada pada dimensi lingkungan, jejaring prasarana dan kelembagaan sehingga perlu diberikan intervensi lebih.

Disamping terkait dalam penyelesaian kawasan transmigrasi yang ada Pemerintah Provinsi Riau masih harus menyelesaikan beberapa lahan transmigrasi yang bermasalah terkait SHM sebanyak 1.053 bidang di 4 Kabupaten yaitu Kab. Pelalawan (Desa Kuala Tolam I dan II, Desa Pekan Tua), Kab. Rokan Hulu (Desa Sukamaju, Desa Tanjung

Medan), Kab. Kuantan Singingi (Desa Beringin Jaya), dan Kab. Rokan Hilir (Desa Rokan Baru dan Desa Pedamaran).

2.1.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.4.4.1. Sekretariat Daerah

2.1.4.4.1.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diukur dengan 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja, capain kinerja SAKIP Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.235.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

KOMPONEN	BOBOT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	22,58	22,61	22,86	23,25	23,78
Pengukuran Kinerja	25	14,11	14,15	14,41	20,51	20,91
Pelaporan Kinerja	15	11,03	11,08	11,22	10,31	10,60
Evaluasi Internal	10	6,85	6,90	7,05	15,10	15,22
Capaian Kinerja	20	12,97	13,08	13,13	-	-
Nilai SAKIP (Predikat)	100	67,54	67,82	68,67	69,17	70,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Nilai akuntabilitas Provinsi Riau tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 70,51 dengan predikat BB dibandingkan tahun 2022 sebesar 69,17 dengan predikat B. Nilai 70,51 tahun 2023 ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerinatahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan.

2.4.4.1.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.236.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2019-2023

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks reformasi birokrasi (indeks)	61.49	67.11	67.45	67.63	74.63

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2019 dengan nilai 61,49 dan pada tahun 2023 dengan nilai 74.63. Hal ini menunjukkan bahwa untuk usaha yang dilakukan pemerintah daerah telah dapat meningkatkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, namun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk kedepannya agar dapat menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Tabel 2.237.
Nilai PMPRB Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI PMPRB				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	13.82	24.19	27.47	30.86	-
2.	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	11.68	13.46	27.12	30.58	-
3.	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	17.92	21.87	26.18	21.20	-
4.	RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	17.22	19.88	25.22	26.13	-
5.	RSJ Tampan Provinsi Riau	19.57	27.46	23.43	0.00	-
6.	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	18.69	15.34	22.98	21.34	-
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	11.02	19.17	17.26	13.10	-
8.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau	16.59	28.65	13.9	17.89	-
9.	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	14.06	31.05	12.23	15.29	-
10.	BPSDM Provinsi Riau	8.19	26.91	8.63	11.97	-
11.	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	-	-	25.7	25.29	-
12.	Bappeda Provinsi Riau	-	-	25.65	27.88	-
13.	Dinas P3AP2 dan KB Provinsi Riau	-	-	24.54	28.35	-
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	-	-	22.9	25.57	-
15.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	-	-	21.08	21.81	-
16.	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	-	-	17.38	20.58	-
17.	Dinas ESDM Provinsi Riau	-	-	16.89	21.64	-
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	-	-	16.56	22.92	-
19.	Disperindagkop dan UKM Provinsi Riau	-	-	14.81	15.10	-
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	-	-	14.55	22.35	-
21.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau	-	-	13.23	21.59	-
22.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	-	-	13.01	18.35	-
23.	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	-	-	12.55	4.95	-
24.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	-	-	11.95	13.61	-
25.	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	-	-	11.84	15.75	-

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI PMPRB				
		2019	2020	2021	2022	2023
26.	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	-	11.84	21.47	-
27.	Dinas Pariwisata Provinsi Riau	-	-	11.77	17.37	-
28.	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	-	-	11.46	10.27	-
29.	DPMPTSP Provinsi Riau	-	-	11.34	19.70	-
30.	Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	-	-	11.31	13.20	-
31.	Satpol PP Provinsi Riau	-	-	11.09	19.92	-
32.	Dinas Sosial Provinsi Riau	-	-	10.99	13.83	-
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau	-	-	10.45	9.43	-
34.	Badan Kesbangpol Provinsi Riau	-	-	8.48	16.23	-
35.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	-	-	0.00	17.66	-
36.	Badan Penghubung	-	-	-	-	-

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Pada tabel 2.237 untuk data penilaian PMPRB terakhir tahun 2022 dan sejak 2023 tidak dilakukan penilaian lagi.

Tabel 2.238.
Rekap Nilai Kabupaten Kota 2019-2023

No.	Kabupaten /Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pekanbaru	-	61,92	62,30	64,10	71,78
2.	Indragiri Hulu	-	62,03	62,10	62,87	62,48
3.	Indragiri Hilir	60.05	60,37	60,42	62,14	71,79
4.	Kampar	-	52,43	55,37	57,52	62,95
5.	Siak	-	-	54,98	56,77	63,11
6.	Rokan Hilir	-	53,41	54,37	57,87	56,95
7.	Kuantan Singingi	-	51,13	51,01	55,85	64,81
8.	Dumai	-	48,36	50,66	52,47	66,59
9.	Pelalawan	38.47	40,05	49,62	56,65	67,44
10.	Rokan Hulu	47.48	48,06	48,73	52,44	53,99
11.	Bengkalis	-	-	48.62	52,74	61,07
12.	Kab. Kepulauan Meranti	-	46,97	47,00	50,63	53,71

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

2.1.4.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau tahun 2019 hingga tahun 2023 sejumlah 23 perda. Dimana tahun 2023 terdapat 5 perda yang telah disusun dan ditetapkan

Tabel 2.239.
Pengesahan Peraturan Daerah Tahun 2019 – 2023

Tahun	Peraturan Daerah
2019	8
2020	3
2021	1
2022	6
2023	5
Jumlah	23

Jumlah anggota DPRD periode tahun 2019 hingga 2024 sejumlah 65 anggota DPRD. Berdasarkan jenis kelamin anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2019 hingga 2023 lebih di dominasi oleh laki-laki dimana berjumlah 48 anggota DPRD. Anggota DPRD laki laki terbanyak pada fraksi PDIP dengan jumlah anggota 8 orang.

Tabel 2.240.
Jumlah Anggota DPRD Periode 2019 - 2024 perfraksi

FRAKSI	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
FRAKSI GOLKAR	6	5
FRAKSI PDIP	8	2
FRAKSI DEMOKRAT	7	2
FRAKSI GERINDRA	5	3
FRAKSI PKS	5	2
FRAKSI PAN	5	2
FRAKSI PKB	6	0
FRAKSI GABUNGAN (PPP - NASDEM - HANURA)	6	1
TOTAL	48	17
	65	

2.1.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.4.5.1. Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD Provinsi Riau disusun untuk jangka waktu tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD tahap keempat. Setiap tahun RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD. Semua dokumen perencanaan ini disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 369 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka indikator yang dapat dilihat adalah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Jika dilihat dari Tabel dibawah ini, provinsi/kabupaten/kota telah memiliki Perda RPJPD dan RPJMD. Sementara dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sudah semua kabupaten/kota dan provinsi yang mempunyai Perkada RKPD.

Tabel 2.241.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Kabupaten /Kota	RPJPD	Periode RPJMD	RKPD				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	☐	2021-2026	☐	☐	☐	☐	☐
2	Indragiri Hulu	☐	2021-2026	☐	☐	☐	☐	☐
3	Indragiri Hilir	☐	2013-2018	☐	☐	☐	☐	☐
4	Pelalawan	☐	2021-2026	☐	☐	☐	☐	☐
5	Siak	☐	2021-2026	☐	☐	☐	☐	☐
6	Kampar	☐	2023-2026	☐	☐	☐	☐	☐
7	Rokan Hulu	☐	2021-2026	☐	☐	☐	☐	☐
8	Rokan Hilir	☐	2021-2026	☐	☐	☐	☐	☐
9	Bengkalis	☐	2021-2026	☐	☐	☐	☐	☐

No	Kabupaten /Kota	RPJPD	Periode RPJMD	RKPD				
				2019	2020	2021	2022	2023
10	Kepulauan Meranti	□	2021-2026	-	□	□	□	□
11	Pekanbaru	□	2023-2026	□	□	□	□	□
12	Dumai	□	2021-2026	□	□	□	□	□
Provinsi Riau		2005-2025	2019-2024	□	□	□	□	□

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Riau, 2023

2.1.4.5.2. Keuangan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang merupakan unsur penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat realisasi pendapatan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.242.
Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019-2023 (Ribu-Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pendapatan Asli Daerah	3.558.210.585.339,97	3.332.148.976.452,57	4.050.486.932.385,44	4.696.769.079.910,17	5.891.605.742.972,21	14,15
A	Pajak Daerah	2.989.749.791.033,00	2.783.416.736.343,00	3.327.500.336.694,85	4.054.918.904.730,36	4.412.361.453.766,84	10,83
	Pajak Kendaraan Bermotor	1.129.336.200.214,00	1.109.848.684.824,00	1.224.094.546.237,00	1.317.737.567.028,00	1.592.655.758.668,00	9,27
	Pajak Kendaraan Di Atas Air	13.374.300,00	0	0	9.730.650,00	10.024.950,00	
	Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan di Atas Air	802.194.810.924,00	558.925.504.891,00	887.056.639.195,00	1.145.692.491.863,00	1.119.636.295.006,00	13,82
	Pajak Bahan Bakar KB	713.227.575.843,00	645.163.654.363,00	764.782.831.375,85	1.045.239.690.323,36	1.158.048.093.972,84	14,12
	Pajak Air Permukaan	32.089.318.423,00	34.691.079.876,00	45.830.123.643,00	45.714.182.867,00	48.945.378.190,00	11,76
	Pajak Rokok	312.888.511.329,00	434.787.812.389,00	405.736.196.244,00	500.534.972.649,00	493.075.927.930,00	13,54
B	Retribusi Daerah	15.741.302.452,00	12.474.391.250,00	13.790.515.597,00	16.684.961.995,00	17.145.487.538,50	3,39
	Retribusi jasa umum	1.852.280.000,00	1.864.294.150,00	2.312.141.000,00	2.453.392.000,00	2.618.462.500,00	9,38
	Retribusi jasa usaha	13.566.150.452,00	10.102.787.100,00	11.023.990.297,00	13.999.536.345,00	13.984.066.788,50	2,62
	Retribusi perizinan tertentu	322.872.000,00	507.310.000,00	454.384.300,00	232.033.650,00	542.958.250,00	32,94

No	Jenis Penerimaan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	118.530.642.555,72	88.442.501.751,00	117.417.430.069,00	101.607.146.246,00	948.660.382.439,65	206,89
D	Lain-Lain PAD yang Sah	434.188.849.299,25	447.815.347.108,57	591.778.650.024,59	523.558.066.938,81	513.438.419.227,22	5,46
2	Dana Perimbangan	5.136.706.027.820,00	5.286.397.816.405,00	3.451.144.289.446,00	4.113.106.484.205,00	4.109.295.808.506,00	-3,18
A	Dana Bagi Hasil Pajak/SDA			-	1.664.531.062.715,00	1.536.866.672.146,00	
	DBH Pajak				1.664.531.062.715,00	1.536.866.672.146,00	
	DBH Bukan Pajak/SDA						
B	Dana Alokasi Umum			1.455.383.959.000,00	1.452.245.879.000,00	1.506.286.541.167,00	
C	Dana Alokasi Khusus			1.995.760.330.446,00	956.328.413.490,00	1.044.594.949.193,00	
D	DANA INSENTIF DAERAH (DID)				40.001.129.000,00	21.547.646.000,00	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.315.997.000,00	3.251.000.000,00	7.422.160.004,00	8.794.200.000,00	9.078.040.000,00	22,28
	PENDAPATAN HIBAH			7.422.160.004,00	8.794.200.000,00	9.078.040.000,00	
	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT				2.780.040.000,00	2.857.140.000,00	
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA / SEJENIS	-	-		6.014.160.000,00	6.220.900.000,00	
Total Pendapatan Daerah		8.703.232.610.159,97	8.621.797.792.857,57	7.509.053.381.835,44	8.818.669.764.115,17	10.009.979.591.478,20	4,28

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 – 2023 tumbuh sebesar 14,15% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 206,89% per tahun, tingginya rata-rata pertumbuhan ini merupakan kontribusi dari Participating Interest yang direalisasikan tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi kedua pada kelompok pajak daerah sebesar 10,83% terhadap total pendapatan asli daerah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer mengalami penurunan sebesar 3,18% per tahun. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan tahun 2023 sebesar 58,39%, lebih tinggi dari proporsi dana transfer.

2.1.4.5.3. Kepegawaian

Kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap organisasi pemerintah sangat menentukan dan dibutuhkan karena merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan. Oleh sebab itu keberadaan ASN di Provinsi Riau menjadi penting baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Banyaknya jumlah ASN di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.243.
Jumlah ASN di Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kabupaten/Kota	PNS		Rasio (Pr/Lk)
	Perempuan	Laki-Laki	
Pemerintah Provinsi Riau	8.489	6.712	1,25
Kuantan Singingi	3.084	1.937	1,59
Indragiri Hulu	3.201	2.020	1,58
Indragiri Hilir	3.975	2.737	1,45
Pelalawan	1.925	1.925	1
Siak	3.363	2.206	1,52
Kampar	4.580	2.921	1,56
Rokan Hulu	3.333	2.136	1,56
Bengkalis	4.166	2.409	1,72
Rokan Hilir	3.671	2.347	1,54
Kep. Meranti	1.624	1.237	1,31
Pekanbaru	4.737	2.020	2,34
Dumai	2.681	1.269	2,11
TOTAL	48.775	31.876	1.52

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2023

Jumlah PNS di instansi kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2023 terbanyak adalah Kabupaten Kampar yakni 7.501 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.921 orang dan perempuan sebanyak 4.580 orang. Sedangkan jumlah PNS pada instansi Pemerintah Provinsi Riau secara keseluruhan berjumlah 80.301 orang yang terdiri dari 48.524 perempuan dan 31.759 laki-laki dengan rasio 1,56.

Integritas secara nasional diartikan suatu kondisi ketika seluruh komponen bangsa melakukan tindakan sesuai dengan nilai, aturan, budaya dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan nasional. Disamping itu pengertian integritas secara individu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan

kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Konsep kadar integritas terdiri dari 3 tingkatan yaitu:

- a. Rendah : Jujur mengikuti nurani, yang selalu pasti mengarahkan pada kebaikan dan kebenaran (nilai-nilai universal).
- b. Sedang : Konsisten untuk jujur mengikuti nurani walaupun datang godaan.
- c. Tinggi : Berani untuk konsisten jujur mengikuti nurani walaupun harus menanggung resiko.

Kinerja integritas Provinsi Riau dapat digambarkan dari perilaku individu terhadap aktivitas sehari-hari dalam menjalankan kewajiban baik sebagai pengambil kebijakan maupun pelaksana. Berikut dapat disajikan koruptor berstatus ASN peringkat berdasarkan daerah di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan Korsupgah KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan telah melakukan beberapa rencana aksi dalam setiap kegiatan untuk mewujudkan pemerintahan yang handal, transparan dan bebas dari praktek korupsi di bumi Melayu ini.

Tabel 2.244.
Jumlah ASN di Provinsi Riau Yang Terlibat Kasus Korupsi Tahun 2019 -2023

NO	TAHUN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2019	13	0	13
2	2020	5	0	5
3	2021	2	0	2
4	2022	7	0	7
5	2023	9	0	9
TOTAL		36	0	36

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2023

Sistem Merit dalam manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

Sistem Merit terdiri dari 8 (delapan) aspek pendukung yang bertujuan untuk melakukan penataan dan pelaksanaan sistem manajemen dibidang kepegawaian. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya sistem merit dapat memberikan kontribusi pelayanan terhadap kebutuhan, pengembangan, penghargaan dan perlindungan yang baik kepada setiap ASN.

Komponen Sistem merit yakni, Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN sesuai kebutuhan, Perlindungan dan Pelayanan ASN, Sistem Informasi Kepegawaian, Promosi dan Mutasi, Pengembangan Karir ASN, Manajemen Kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Displin ASN. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah menerapkan system merit sebagai indicator kinerja utama perangkat daerah untuk tahun 2020-2024, dengan menetapkan target dan indikator kinerja yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dalam melaksanakan system merit tersebut,

Dari data capaian awal pelaksanaan system merit pada tahun 2020 hingga 2023 dari target yang ditetapkan setiap tahunnya terealisasi melebihi dari perkiraan rencana yang ditetapkan dimana di tahun 2020 target 236.60 terealisasi 293.5 dan pada tahun 2023 target 308 dan relisasi 318, dimana kenaikan realisasi terhadap target ini sangat signifikan setiap tahunnya

Tabel. 2.245.
Capaian Sistem Merit Tahun 2019 -2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Merit	236.60	246.06	255.91	308	293.5	297.5	300.5	318

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2023

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan data dari BKN untuk pengukuran 13.866 PNS Pemerintah Provinsi Riau nilai Indeks ASN Provinsi Riau 49.67 dengan kategori Sangat Rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan Indeks Profesionalisme ASN dalam kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin. Untuk bobot perkomponen sebagai berikut : Kualifikasi 25 %, Kompetensi 40 %, Kinerja 30 % dan Disiplin 5 %. Dari capaian komponen yang ada untuk kompetensi 15.86 dan

kinerja 7.18 masih jauh dari total bobot yang harus dicapai. Dan ini menjadi perhatian untuk peningkatan kompetensi dan kinerja kedepannya.

Tabel. 2.246.
Capaian Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Riau 2023

Provinsi	Jumlah PNS yang diukur	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
Riau	13.866	21.64	15.86	7.18	5	49.67	Sangat rendah

Sumber BKN Regional XII 2023

Untuk capaian Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten/Kota terdapat 1 Kota yang masuk kategori sedang yaitu Kota Pekanbaru dan 2 Kabupaten kategori rendah dan sisanya kategori sangat rendah.

Tabel. 2.247.
Capaian Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2023

Kab/Kota	Jumlah PNS yang diukur	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
Pekanbaru	6.080	21.21	29.08	23.09	5	78.38	sedang
Inhil	6.365	21.16	14.73	23.42	5	64.31	rendah
Pelalawan	4.409	21.22	12.07	24.88	5	63.17	rendah
Dumai	3.710	21.33	11.25	24.55	5	62.13	rendah
Inhu	4.697	21.14	9.73	24.16	5	60.03	sangat rendah
Rohil	5.747	21.16	9.65	18.84	5	54.65	sangat rendah
Kampar	7.258	21.36	11.22	17.02	5	54.60	sangat rendah
Kuansing	4.675	21.18	10.07	9.99	5	46.24	sangat rendah
Meranti	2.697	21.12	6.98	12.41	5	45.51	sangat rendah
Rohul	5.155	21.04	9.64	6.83	5	42.51	sangat rendah
Bengkalis	6.381	21.23	8.39	6.60	5	41.22	sangat rendah
Siak	5.383	20.76	8.51	5.12	5	39.39	sangat rendah

Sumber: BKN Regional XII 2023

2.1.4.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai alat untuk melaksanakan tugas secara professional. Dibawah ini dapat dilihat tabel pejabat ASN Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.248.
Pejabat ASN di Provinsi Riau yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
PIM I	1		1		
PIM II	1		5	5	4
PIM III		30	30	30	40
PIM IV	30	40	150	60	40
Jumlah pejabat PNS yang telah mengikuti diklat struktural bagi Pejabat Administrator dan Pengawas	32	70	186	95	84
Jumlah total jabatan	1.201	1.101	1.178	1.189	712
Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	2.6 %	6.3 %	15.7 %	7.98 %	11.79 %

Sumber : BPSDM dan BKD Provinsi Riau

Persentase pejabat ASN di Instansi Pemerintah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural meningkat dari 2.6 % pada tahun 2019 menjadi 11.79 % pada tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pejabat PNS sehingga dapat meningkatkan kinerja di instansi pemerintah Provinsi Riau ini.

Pengembangan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja pelayanan pemerintah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 70 ayat (4) antara lain menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Lebih lanjut Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN menyatakan bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pembelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 2.249.
ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Fungsional
Tahun 2019 - 2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Administrator Kesehatan	2	-	-	2	-
2	Analisis Kepegawaian	20	12	3	-	34
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	-	-	-	-	-
4	Analisis Akuakultur					1
5	Analisis Kebijakan					8
6	Apoteker	-	-	-	-	-
7	Arsiparis	4	5	3	27	7
8	Asisten Apoteker	-	-	-	-	-
9	Assessor SDM Aparatur	-	-	-	-	-
10	Auditor	1	2	5	11	29
11	Auditor Kepegawaian	-	-	-	-	-
12	Bidan	-	-	2	-	-
13	Dokter	-	-	-	-	-
14	Dokter Gigi	-	-	-	-	-
15	Dokter Pendidik Klinis	-	-	-	-	-
16	Fisikawan Medis	-	-	-	-	-
17	Fisioterapis	-	-	-	-	-
18	Guru	170	174	205	170	174
19	Inspektur Ketenagalistrikan	-	3	-	1	1
20	Instruktur	-	-	-	-	-
21	Mediator Hubungan Industrial	-	-	-	-	-
22	Medik Veteriner	-	-	-	-	3
23	Nutrisionis	-	-	-	-	-
24	Pamong Budaya	-	-	-	-	-
25	Paramedik Veteriner	-	-	-	-	-
26	Pekerja Sosial	1	-	-	1	-
27	Peneliti	-	-	2	-	9
28	Penera	-	-	-	-	-
29	Pengantar Kerja	-	-	-	-	-
30	Pengawas Benih Tanaman	-	-	1	-	-
31	Pengawas Bibit Ternak	-	-	1	-	-
32	Pengawas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	30
33	Pengawas Mutu Pakan	-	-	-	1	-

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
34	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	-	-	2	-	7
	Pengendali Ekosistem Hutan	-	-	-	-	-
35	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	-	-	-	-	-
36	Pengendalian Dampak Lingkungan (Pedal)					15
37	Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
	Penguji Mutu Barang	-	-	-	-	-
38	Penyuluh Kehutanan	3	1	-	3	1
39	Penyuluh Lingkungan Hidup					30
40	Penyuluh Perikanan	-	-	-	1	-
41	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1	-	-	1	-
42	Penyuluh Pertanian	-	-	-	-	-
43	Penyuluh Sosial	-	-	-	-	-
44	Perawat	-	-	-	-	-
45	Perawat Gigi	-	-	-	-	-
46	Perekam Medis	2	2	3	2	2
47	Perekayasa	5	3	1	-	9
48	Perencana	27	21	10	7	30
49	Polisi Kehutanan	2	-	4	3	-
50	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	-	1	-
51	Pranata Komputer	-	3	-	-	-
52	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	-
53	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	-
54	Pustakawan	-	-	-	-	-
55	Radiografer	-	-	-	-	-
56	Statistisi	-	-	-	-	-
57	Teknik Elektromedis	-	-	-	-	-
58	Widyaiswara	-	4	1	-	3
59	Empidemiologi	-	1	-	-	-
	Pengelola PBj	-	5	-	-	53
60	Penata Ruang	2	-	-	-	-
61	Surveyor Pemetaan				1	
62	Substantif Pengawas Pemerintah	2	-	-	-	-
63	Sanitarian	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	242	236	243	232	446
	Jumlah Total ASN	15.455	15.415	15.090	14.989	14.851
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal fungsional	1.57%	1.53%	1,61%	1,55%	3.00%

Sumber : BKD Provinsi Riau, 2023

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal fungsional di Provinsi Riau meningkat dari 242 orang pada tahun 2019 menjadi 446 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan antusiasme PNS untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing sehingga dapat meningkatkan kinerja di Instansi Pemerintah Provinsi Riau ini. Persentase tertinggi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal fungsional di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 1.57% dan pada tahun 2023 menjadi 3.00%. Hal ini disebabkan oleh ASN yang berubah statusnya dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti pada Guru, Pengawasa Ketenagakerjaan dan lainnya. Berdasarkan penilaian terhadap kondisi kompetensi di perangkat daerah yang ada di Provinsi Riau dari 44 Perangkat Daerah yang ada terdapat 30 Perangkat Daerah yang kategori Rendah untuk Dimensi Kompetensi.

Tabel 2.250.
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU
DALAM PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIMENSI KOMPETENSI TAHUN 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TOTAL PNS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PEMENUHAN 20JP/ORANG/ TAHUN T.A 2023		JUMLAH PNS YANG BELUM MEMENUHI 20JP/ORANG/ TAHUN		JUMLAH PNS YANG TIDAK MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		NILAI AKUMULATIF	NILAI IP ASN PERANGKAT DAERAH	KETT
		ORANG	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD			
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10
1	DINAS PENDIDIKAN	7552		0,00		0,00	7552	100,00	7552	100,00		0,00	
2	DINAS KESEHATAN	291	55	18,90	5	1,72	286	98,28	236	81,10	950	3,26	25/03/2024
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	509		0,00		0,00	509	100,00	509	100,00		0,00	
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	180		0,00		0,00	180	100,00	180	100,00		0,00	
5	DINAS SOSIAL	147		0,00		0,00	147	100,00	147	100,00		0,00	
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	139	131	94,24	66	47,48	73	52,52	8	5,76	2986	21,48	05/03/24
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN BIDANG KB	101	92	91,09	45	44,55	56	55,45	9	8,91	2383	23,60	05/03/24
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	636	218	34,28		0,00	636	100,00	418	65,72		0,00	28/11/23
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	99		0,00		0,00	99	100,00	99	100,00		0,00	
10	DINAS PERHUBUNGAN	126		0,00		0,00	126	100,00	126	100,00		0,00	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TOTAL PNS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PEMENUHAN 20JP/ORANG/ TAHUN T.A 2023		JUMLAH PNS YANG BELUM MEMENUHI 20JP/ORANG/ TAHUN		JUMLAH PNS YANG TIDAK MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		NILAI AKUMULATIF	NILAI IP ASN PERANGKAT DAERAH	KETT
		ORANG	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD			
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	100		0,00		0,00	100	100,00	100	100,00		0,00	
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	107		0,00		0,00	107	100,00	107	100,00		0,00	
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	85		0,00		0,00	85	100,00	85	100,00		0,00	
14	DINAS KEBUDAYAAN	76	29	38,16		0,00	76	100,00	47	61,84	487,5	6,41	07/03/24
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100		0,00		0,00	100	100,00	100	100,00		0,00	
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	131		0,00		0,00	131	100,00	131	100,00		0	
17	DINAS PARIWISATA	102		0,00		0,00	102	100,00	102	100,00		0,00	
18	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	275		0,00		0,00	275	100,00	275	100,00		0,00	
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	115		0,00		0,00	115	100,00	115	100,00		0	
20	DINAS PERKEBUNAN	107		0,00		0,00	107	100,00	107	100,00		0	
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	167		0,00		0,00	167	100,00	167	100,00		0,00	
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	213		0,00		0,00	213	100,00	213	100,00		0,00	
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	210	210	100,00		0,00	210	100,00	0	0,00	1809	8,61	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TOTAL PNS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PEMENUHAN 20JP/ORANG/ TAHUN T.A 2023		JUMLAH PNS YANG BELUM MEMENUHI 20JP/ORANG/ TAHUN		JUMLAH PNS YANG TIDAK MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		NILAI AKUMULATIF	NILAI IP ASN PERANGKAT DAERAH	KETT
		ORANG	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD			
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	460		0,00		0,00	460	100,00	460	100,00		0,00	
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	136		0,00		0,00	136	100,00	136	100,00		0,00	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	114		0,00		0,00	114	100,00	114	100,00		0,00	
27	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	106	106	100,00	96	90,57	10	9,43	0	0,00	3440	32,45	
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60	45	75,00		0,00	60	100,00	15	25,00	575	9,58	28/11/23
29	BADAN PENGHUBUNG	62		0,00		0,00	62	100,00	62	100,00		0,00	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67		0,00		0,00	67	100,00	67	100,00		0,00	
31	BIRO UMUM	83	12	14,46	0	0,00	83	100,00	71	85,54	190	2,29	29/02/2024
32	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	58	21	36,21	2	3,45	56	96,55	37	63,79	333,5	5,75	28/02/2024
33	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	55		0,00		0,00	55	100,00	55	100,00		0,00	
34	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	29		0,00		0,00	29	100,00	29	100,00		0,00	
35	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	35	5	14,29	1	2,86	34	97,14	30	85,71	87,5	2,50	28/02/2024
36	BIRO HUKUM	41	4	9,76	0	0,00	41	100,00	37	90,24	85	2,07	29/02/2024
37	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	49	49	100,00	17	34,69	32	65,31	0	0,00	862,5	17,60	28/02/2024
38	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	38		0,00		0,00	38	100,00	38	100,00		0	
39	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	39		0,00		0,00	39	100,00	39	100,00		0,00	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TOTAL PNS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PEMENUHAN 20JP/ORANG/ TAHUN T.A 2023		JUMLAH PNS YANG BELUM MEMENUHI 20JP/ORANG/ TAHUN		JUMLAH PNS YANG TIDAK MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		NILAI AKUMULATIF	NILAI IP ASN PERANGKAT DAERAH	KETT
		ORANG	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD			
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	195		0,00		0,00	195	100,00	195	100,00		0,00	
41	INSPEKTORAT	144		0,00		0,00	144	100,00	144	100,00		0,00	
42	RSUD ARIFIN ACHMAD	916		0,00		0,00	916	100,00	916	100,00		0,00	
43	RSUD PETALA BUMI	252	79	31,35		0,00	252	100,00	173	68,65		0	28/11/23
44	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	268		0,00		0,00	268	100,00	268	100,00		0,00	
TOTAL		14.775	1056	7,14	232	1,57	14.543	98,38	13719	92,81	14.188	0,96	

Perkembangan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Riau dalam 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2023) telah menunjukkan Grafik Perkembangan Peningkatan yang cukup Signifikan, salah satu faktor penting meningkatnya IP ASN Pemerintah Provinsi Riau Dimensi Kompetensi yaitu telah dipusatkannya Urusan Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur di BPSDM Provinsi Riau. Capaian Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi telah tertuang Melalui Surat Edaran Gubernur Riau No 900/BPSDM/6783 Tanggal 24 November Dimana telah di tentukan bahwa BPSDM Provinsi Selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pengembangan Kompetensi Aparatur berperan terhadap pengukuran dan Pelaporan Data Perkembangan Kompetensi Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dari Hasil Pengukuran yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Persoalan Utama terkait Pengembangan Kompetensi yaitu Bergesernya Paradigma Kompetensi Bagi Aparatur yg semula Hak telah berubah menjadi sebuah Kewajiban. Momentum ini merupakan Kesempatan BPSDM Bersama BKD didalam Upaya Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi. Persoalan Data Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi diantaranya yaitu Masih Rendahnya Partisipasi Pelaporan Aparatur pada Tiap Perangkat Daerah dalam mengikuti Pengembangan Kompetensi, Belum ada nya Regulasi yang mengatur terkait Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau juga menjadi Faktor Utama didalam Upaya peningkatan Nilai IP ASN.

Periode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Tahun 2020 telah diperoleh Hasil Pengukuran Indeks Profesioanlitas ASN Dimensi Kompetensi Pemerintah Provinsi Riau Sebesar 7.24 dengan Total Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Riau Sebanyak 6.590. Selanjutnya Periode Pengukuran IP ASN Dimensi Kompetensi Tahun 2021 Telah diperoleh Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Pemerintah Provinsi Riau sebesar 6,08. Penurunan Nilai Hasil Pengukuran dipengaruhi oleh bergesernya Formulasi Perhitungan yang semula di hitung berdasarkan Jumlah ASN yang melaporkan diubah menjadi Jumlah seluruh ASN Pemerintah Provinsi Riau.

Pada Periode Pengukuran Tahun 2022 telah diperoleh Hasil Pengukuran Indeks Profesioanlitas ASN Dimensi Kompetensi Pemerintah Provinsi Riau Sebesar 15.17

dengan Total Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Riau Sebanyak 14.749. Meningkatnya Capaian Pengukuran IP ASN Dimensi Kompetensi ini dipengaruhi Tingginya Tingkat Keikutsertaan dan Pelaporan Data Pengembangan Kompetensi Aparatur. Selanjutnya Periode Pengukuran Tahun 2023 saat ini Pengumpulan dan perhitungan Data Capaian Indeks Profesionalitas ASN masih berproses.

2.1.4.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimanfaatkan untuk landasan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa/ daerah tidak bisa dilepaskan dari peran penelitian dan pengembangan. Beberapa negara maju di dunia dewasa ini merupakan negara-negara maju di dalam penelitian dan pengembangan. Sebagai contoh negara yang mengembangkan kemajuan IPTEK yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan meskipun miskin sumber daya alam adalah Jepang, Singapura dan Skandinavia, tetapi menjadi negara paling makmur dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia. Sebaliknya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi masih berkategori pendapatan rendah karena masih rendahnya penelitian dan pengembangan IPTEK, demikian halnya dengan Provinsi Riau.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau dalam bidang penelitian dan pengembangan berupa penelitian dan penyusunan policy brief menunjukkan perkembangan baik dari aspek jumlah dan bidang keilmuan. Selama periode 2019-2023 penelitian yang telah dilakukan sebanyak 15 bidang keilmuan. Jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan terbanyak dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 14 judul dan terendah tahun 2020 karena tidak ada melakukan aktivitas litbang. Dari hasil penelitian dan pengembangan tersebut, hal yang dapat dicermati adalah penelitian dan pengembangan dilakukan secara konsisten dengan melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan sumberdaya serta prospek yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari penelitian dan pengembangan ini adalah seberapa banyak dari jumlah penelitian dan pengembangan tersebut yang sudah diterapkan/ dimanfaatkan oleh perangkat daerah, masyarakat atau dunia usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Tabel 2.251.
Bidang dan Jumlah Penelitian dan Pengembangan (R&D)
Provinsi Riau oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau Tahun 2020 – 2023

No.	Penelitian dan Pengembangan	2020	2021	2022	2023	Satuan
1	Ekonomi	0	0		1	Penelitian
			1		2	Policy Brief
				1		Penelitian Mandiri
2	Hukum	0	0	0	0	Penelitian
3	Industri	0	0	0	1	Policy Brief
4	Kebijakan & Perpolitikan	0	0	0		Penelitian
					1	Policy Brief
5	Kebudayaan	0	0	0	0	Penelitian
6	Kehutanan	0	0	0	0	Penelitian
7	Kesehatan	0	0	0	1	Policy Brief
8	Parawisata	0	0	0	0	Penelitian
9	Pendidikan	0	1		2	Policy Brief
				2		Penelitian Mandiri
10	Perikanan	0	0			Penelitian
				3		Penelitian Mandiri
					1	Policy Brief
11	Pertanian	0	0	0	1	Pertanian
					2	Policy Brief
12	Peternakan	0	0	0	0	Penelitian
13	Religi	0	0	0	0	Penelitian
14	Sumberdaya Manusia	0	0	0	0	Penelitian
15	Teknologi	0	0	0	2	Penelitian
					1	Policy Brief
Jumlah		0	2	6	14	

Sumber: Bappedalitbang, 2024

2.1.4.5.6 Penghubung

2.1.4.5.6.1 Data Jumlah Pagelaran/Event/Acara Yang di Fasilitas di Anjungan Riau TMII Jakarta Tahun 2019 – 2023

Badan Penghubung Provinsi Riau melalui Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Riau setiap tahun menyelenggarakan pagelaran/event/acara seni dan budaya baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan (melestarikan) kesenian dan kebudayaan Melayu Riau. Adapun jumlah pagelaran/event/acara yang diselenggarakan di Anjungan Riau TMII Jakarta selama periode tahun 2019 - 2023 yaitu :

Tabel 2.252.

Jumlah Pagelaran/Event/Acara yang diselenggarakan di Anjungan Riau TMII Jakarta Periode Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN					TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Event/Acara/Pagelaran	5	5	26	7	12	55

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Riau

Adapun rincian Pagelaran/Event/Acara yang diselenggarakan di Anjungan Riau TMII Jakarta selama periode Tahun 2019 – 2022 yaitu :

- Tahun 2019 secara umum Anjungan Riau TMII Jakarta menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya sekaligus *event* rutin yang diadakan di Anjungan TMII oleh pihak manajemen seperti pekan seni budaya bulanan dan *event* pada hari-hari besar.
- Tahun 2020 terdapat acara yaitu Pagelaran Seni Budaya Hari Jadi Provinsi Riau ke 63, Pekan Agustus, Pagelaran Seni Budaya Pekan Oktober, Pagelaran Seni Budaya Melayu Riau dalam Tari, Musik, Lagu dan Teater, Pembinaan Diklat Tari Sanggar Serindit Anjungan Riau TMII (bersifat rutin sebanyak 2 kali dalam seminggu).
- Tahun 2021 terdapat 26 *event* yakni Fun Aero Zumba Party dan Talkshow Pariwisata, Dendang Melayu, Teater Drama Tari, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Januari, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Februari, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Maret, Pelantikan Kepengurusan LBM, Santunan Anak Yatim bersama Dang Merdu, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit

Bulan April, Jalan Sehat Bersama Keluarga Keluarga Besar Anjungan Riau, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Mei, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Juni, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Juli, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Agustus, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan September, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Oktober, Malam Melayu Berdendang, Sertifikat CHSE, Pesta Panggung Budaya, Festival Pantun Nasional, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan November, Rutin Diklat Tari Sanggar Serindit Bulan Desember, Fashion Show “Tenun Batin Siak”, Fasilitasi Pelepasan Purnabakti Badan Penghubung Provinsi Riau, Melayu Night dan Rapat Teknis dan Fungsi Anjungan.

- d. Tahun 2022 terdapat 7 *event* yakni Melayu Night, Indonesia International Culture Festival, Festival Tari Kreasi Nusantara 2022, Yogya Trade Expo, Pemilihan Putra Putri Songket Nasional, Festival Budaya Promosi Riau 2022 dan Melayu Berdendang.
- e. Tahun 2023 Terdapat event yaitu : Pagelaran Kesenian Budaya Melayu Riau, Pagelaran Budaya Melayu, Pagelaran Seni Budaya – Pekan Lebaran 2023, Pekan Kenduri Budaya Riau, Pekan Budaya Riau, Promosi Potensi Daerah, Festival Tari Tenun Songket 2023 dan Kilau Nusantara Budi Luhur, Kolaborasi Promosi Budaya Melayu Riau dan Pagelaran Seni Budaya Indramayu, Harmoni Indonesia 2nd IICF, Paket Indonesia Tourism & trade Investment Expo 2023, Melayu Berdendang dan Festival Makan Durian

2.1.4.5.6.2 Data Jumlah Layanan Badan Penghubung Terhadap Masyarakat dan Lembaga Tahun 2019-2023

Badan Penghubung melakukan kegiatan fasilitasi layanan terhadap 2 (dua) urusan yaitu Kemasyarakatan dan Kelembagaan, yang datanya diperoleh dari Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga. Fasilitasi urusan kemasyarakatan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Fasilitasi organisasi masyarakat Riau (PMRJ & FPK) dengan bentuk fasilitasi Pertemuan/diskusi antara Gubernur Riau/DPR-RI/DPD- RI/DPRD dengan PMRJ, FPK & Badan Penghubung dan Pertemuan/diskusi PMRJ & FPK dengan Badan Penghubung;

2. Fasilitas organisasi mahasiswa Riau (8 organisasi) dengan bentuk fasilitas diskusi/dialog interaktif, pembinaan mental & spiritual serta pelantikan pengurus organisasi;
3. Fasilitas masyarakat Riau dengan bentuk fasilitas bantuan sewa kamar pendamping pasien rujukan peserta BPJS Mandiri/Non PBI.

Sedangkan fasilitas Kelembagaan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Fasilitas Instansi/Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat/Kementerian/Instansi dengan bentuk fasilitas berupa fasilitas urusan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) ke Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga/Instansi, Pertemuan Gubernur Riau dengan Lembaga/ Instansi (Duta Besar), koordinasi dan fasilitas pengumpulan data dan informasi sinergi pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program daerah;
2. Fasilitas Pengurusan dan Pengambilan Dokumen Penting Pemerintah Daerah Provinsi Riau ke Kementerian dengan bentuk fasilitas berupa pengurusan dan pengambilan dokumen penting Pemerintah Daerah ke Kementerian;

Tabel 2.253.
Jumlah Layanan Badan Penghubung Terhadap Masyarakat dan Lembaga
Periode Tahun 2019 – 2023

NO	LAYANAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kemasyarakatan	10 Urusan	18 Urusan	18 Urusan	556 Orang	1430 orang
2	Kelembagaan	83 Urusan	30 Urusan	50 Urusan	133 Urusan	9 urusan

2.1.4.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.1.4.6.1. Inspektorat Daerah

Pelaksanaan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal maupun eksternal secara berkala pada beberapa Objek Pemeriksaan (Obrik) meliputi seluruh instansi/unit di jajaran pemerintah provinsi. Temuan atas pengawasan atau pemeriksaan dijabarkan dalam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti baik yang dilakukan oleh BPK RI, Inspektorat Daerah dan Itjen Kementerian selama kurun tahun 2018 sampai dengan 2023 seperti terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.254.
Rekomendasi Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

Pengawas/Pemeriksa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BPK RI	111	111	195	181	284	70
Inspektorat	678	737	1.149	235	630	462
Itjend Kementerian Dalam Negeri	26	16	-	27	15	24
Jumlah	815	864	1344	443	929	556

Sumber: Inspektorat Provinsi Riau Tahun 2023

Jumlah rekomendasi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka rekomendasi yang bervariasi tergantung jumlah pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pengawas/pemeriksa. Jika dilihat dari rekomendasi berdasarkan instansi pengawas/pemeriksa maka jumlah rekomendasi terbanyak ditemukan oleh Inspektorat Provinsi kemudian diikuti oleh BPK RI dan Itjen Kementerian.

Selanjutnya rekomendasi yang ditemukan oleh ketiga instansi pengawas/pemeriksa tersebut ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti selama kurun tahun 2018 sampai dengan 2023 terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.255.
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
di Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

Pengawas/ Pemeriksa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BPK RI	64,78%	82,30%	79,64%	85,25%	81,98%	81,71% (semester I)
Inspektorat	69,17%	65,26%	70,10%	72,30%	78,79%	78,09% (semester I)
Itjen Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	-	100	100	Verifikasi Itjend

Sumber: Inspektorat Provinsi Riau Tahun 2023

Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi diperoleh dari nilai akumulatif beberapa tahun berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut persemester. Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Inspektorat Daerah yang sudah ditindaklanjuti tertuang pada Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tiap Tahunnya, Persentase tindak lanjut hasil

rekomendasi BPK RI yang sudah ditindaklanjuti tertuang pada Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tiap Tahunnya dan Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Itjend Kemendagri yang sudah ditindaklanjuti tertuang pada Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Tiap Tahun.

Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Itjend Kemendagri selama kurun Tahun 2018 – 2023 memperoleh angka 100 %. Sedangkan temuan dari BPK RI dan Inspektorat Daerah relatif bervariasi. Keadaan ini menunjukkan perlunya kesadaran dan komitmen Objek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi. Selain beberapa capaian kinerja terkait pengawasan di atas inspektorat juga melaksanakan Beberapa kegiatan yang merupakan mandatory dari KPK yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau antara lain adalah: MCP Korsupgah, Stranas PK, Survey Penilaian Integritas.

Capaian Stranas PK untuk Pemerintah Provinsi Riau merupakan hasil penilaian stranas PK tiap 2 tahunan. Fokus capaian pada Tahun 2019-2020 adalah pada :1. Perizinan tata niaga 2. Keuangan negara dan 3. Hukum dan reformasi birokrasi. Dengan total capaian pada tahun 2019-2022 sebesar 22.% (B3 s.d B24) sementara untuk di Tahun 2021-2022 hanya fokus pada Perizinan tata niaga dan Keuangan dengan total capaian sebesar 61,60% (untuk periode ini tahapan penilaian baru sampai pada B3 s.d B18). Evaluasi stranas PK Pemerintah Provinsi Riau dapat di lihat Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.256.
Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi Stranas PK Pemerintah Provinsi Riau

No	Uraian	Nilai			Ket
		2019-2020	2021-2022	2023-2024	
1.	Perizinan Tata Niaga	85%	40,00 %	-	
2.	Keuangan Negara	30 %	86,00%	-	
3.	Hukum dan Reformasi Birokrasi	33,3 %	-	-	

Capaian MCP Korsupgah untuk Pemerintah Riau pada tahun 2023 adalah masih sebesar 90,94%, capaian ini belum final dikarenakan ada beberapa sub unsur yang masih menunggu verifikasi KPK sehingga bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Data ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.257.**Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi MCP Korsupgah Pemerintah Provinsi Riau**

No	Uraian	Nilai			Ket
		2021	2022	2023	
1.	Perencanaan dan Penganggaran	100 %	91,25	94,80	
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	88,49 %	95,01	100%	
3.	Perizinan	95,71 %	100,00	87%	
4.	Pengawasan APIP	92,45 %	95,07	88,53%	
5.	Manajemen ASN	92,65 %	96,65	85,22%	
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	89,16 %	81,90	92,83%	
7.	Manajemen Aset Daerah	82,31 %	-	-	
8.	Pengelolaan BMD	-	91,00	87,26%	
9.	Tata Kelola Dana Desa	-	-	-	
	NILAI MCP KORSUPGAH	91,85	93,25	90,94	

Capaian Survey Penilaian Integritas untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebesar **68,81** nilai ini bila dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar **4,45**. Tujuan dari pelaksanaan survey penilaian integritas ini adalah meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistim anti-korupsi yang mana hasil survey tersebut akan menjadi rekomendasi perbaikan system pencegahan korupsi. Indikator pengukuran survey penilaian integritas ini adalah : 8 Menu MCP, Sosialisasi/ Kampanye, Stranas PK, Reformasi Birokrasi, ZI,WBK, WBBM dan Audit % TLHP BPK

Tabel 2.258.**Rekapitulasi Hasil Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Riau**

Uraian	Nilai			Ket
	2021	2022	2023	
Nilai Integritas	66,10	64,16	68,81	

2.1.4.7. Unsur Pemerintahan Umum**2.1.4.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

Indeks ketahanan nasional (IKN) Provinsi Riau mengalami fluktuatif pada tahun 2019 hingga 2023. Status kondisi IKN pada tahun 2023 mengalami peningkatan yakni cukup tangguh dengan skor 3,08 dimana pada tahun 2021 dengan skor 2,26 dengan kondisi kurang tangguh. IKN Provinsi Riau tahun 2022 dengan skor tertinggi sebesar 3,36 pada gatra pertahanan dan keamanan dan skor terendah sebesar 2,36 pada gatra sumber kekayaan alam.

Tabel 2.259.
Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Gatra	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	3,19	Cukup Tangguh	3,15	Cukup Tangguh	3,48	Tangguh	3,35	Cukup Tangguh	3,35	Cukup Tangguh
2	Demografi	2,98	Cukup Tangguh	2,82	Cukup Tangguh	3,54	Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,29	Kurang Tangguh	2,37	Kurang Tangguh	1,44	Rawan	2,36	Kurang Tangguh	2,35	Kurang Tangguh
4	Ideologi	2,89	Cukup Tangguh	3,09	Cukup Tangguh	2,21	Kurang Tangguh	2,93	Cukup Tangguh	3,00	Cukup Tangguh
5	Politik	3,22	Cukup Tangguh	3,20	Cukup Tangguh	1,54	Rawan	3,24	Cukup Tangguh	3,29	Cukup Tangguh
6	Ekonomi	2,98	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh	2,67	Cukup Tangguh	3,11	Cukup Tangguh	3,16	Cukup Tangguh
7	Sosial dan Budaya	2,59	Kurang Tangguh	2,88	Cukup Tangguh	2,18	Kurang Tangguh	2,86	Cukup Tangguh	2,93	Cukup Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	3,15	Cukup Tangguh	3,36	Cukup Tangguh	1,78	Rawan	3,36	Cukup Tangguh	3,36	Cukup Tangguh
Skor IKN		2,92	Cukup Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	2,26	Kurang Tangguh	3,05	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh

Sumber : Labkurtannas Lemhannas RI

Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 76,86 dibandingkan tahun 2019 sebesar 75,21. IDI terbesar pada aspek kebebasan sipil terbesar pada tahun 2018 sebesar 86,88. Untuk aspek hak politik skor IDI tertinggi pada tahun 2017 sebesar 66,57 dan aspek lembaga demokrasi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 89,47.

Tabel 2.260.
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2017 – 2020

No	Aspek / Variabel	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
I.	Kebebasan Sipil	82,03	86,88	85,15	86,08
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	79,16	97,66	100,00	97,66
	2. Kebebasan Berpendapat	65,97	83,30	60,41	55,53
	3. Kebebasan Berkeyakinan	84,28	83,20	83,55	90,77
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	90,74	93,47	93,47	82,47
II.	Hak-Hak Politik	66,57	62,77	61,68	65,40
	1. Hak Memilih dan Dipilih	75,55	75,53	70,65	71,56

No	Aspek / Variabel	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	56,16	50,00	52,72	59,24
III.	Lembaga Demokrasi	73,41	89,47	84,19	83,48
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	91,14	78,77	78,77
	2. Peran DPRD	59,78	87,36	73,55	68,54
	3. Peran Partai Politik	71,64	100,00	100,00	99,93
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	56,26	70,50	67,53	68,73
	5. Peran Peradilan yang Independen	86,31	100,00	100,00	100,00
Skor IDI		73,41	77,59	75,21	76,86

Sumber : BPS Provinsi Riau

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dengan IDI Komposit pada tahun 2022 sebesar 73,64 dengan kategori sedang dan tahun 2023 dengan capaian IDI Komposit sebesar 75,55 dengan kategori sedang. Aspek dengan kategori tinggi dan mengalami kenaikan terdapat dalam aspek kesetaraan dengan capaian tahun 2022 sebesar 70,53 dan 2023 sebesar 80,13. Untuk aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi mengalami penurunan.

Tabel 2.261.
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2021 – 2023

Deskripsi		Tahun					
		2021		2022		2023	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
IDI Komposit		75,66	SEDANG	73,64	SEDANG	75,55	SEDANG
Aspek1	Kebebasan	88,40	TINGGI	84,46	TINGGI	79,39	SEDANG
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	95,53	-	95,59	-	95,67	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100	-	88,98	-	89,19	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	-	77,97	-	63,95	-

Deskripsi		Tahun					
		2021		2022		2023	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	76,92	-	76,92	-	76,92	-
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	91,76	-	91,76	-	91,76	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	74,77	-	79,03	-	64,83	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	76,42	-	82,01	-	74,79	-
Aspek 2	Kesetaraan	75,88	SEDAN G	70,53	SEDAN G	80,13	TINGGI
8	Kesetaraan Gender	93,09	-	93,84	-	95,33	-
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	-	46,15	-	100	-
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	59,33	-	60,83	-	63,17	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	54,70	-	56,24	-	65,34	-
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,58	-	95,63	-	95,77	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,22	-	79,59	-	84,87	-
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar Provinsi	72,92	-	72,80	-	72,64	-
Aspek 3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	62,83	SEDAN G	66,69	SEDAN G	66,30	SEDAN G
15	Kinerja Lembaga Legislatif	14,29	-	33,33	-	31,82	-
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	88,90	-	85,04	-	87,55	-
17	Netralitas Penyelenggara	30,77	-	30,77	-	30,77	-

Deskripsi		Tahun					
		2021		2022		2023	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
	Pemilu						
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0,00	-	23,08	-	7,69	-
19	Jaminan Pemerintah /pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	70,72	-	72,10	-	70,42	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	-	100	-	100	-
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	73,60	-	74,20	-	80,80	-
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100	-	100	-	100	-

Sumber : BPS Provinsi Riau

Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan yang terdaftar pada tahun 2017 hingga 2023 berjumlah 304. Dimana jumlah ormas tertinggi pada tahun 2023 sebesar 43 sedangkan LSM di tahun 2020 sebesar 11 dan untuk jumlah Yayasan pada tahun 2022 sebanyak 14 yayasan. Hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 8 yayasan.

Tabel 2.262.
Jumlah Ormas/LSM, Yayasan yang Terdaftar pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023

No	Tahun	Ormas	LSM	Yayasan	Jumlah
1	2017	23	5	12	40
2	2018	20	1	6	27
3	2019	34	4	7	45
4	2020	33	11	4	48
5	2021	29	5	5	39
6	2022	33	8	14	55
7	2023	43	4	3	50
Total		215	38	51	304

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2023 dalam pemilihan kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau rata-rata memperoleh nilai stabil tahun 2020 hingga 2023 di peroleh target sebesar 77,5 dan realisasi 69,54.

Tabel 2.263.
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019-2023

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-rata)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pilkada Kabupaten/ Kota	77,5	-	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	69,54
2	Pilgub dan Wagub		-		-		-		-		
3	Pileg DPR RI		84,17		-		-		-		
4	Pileg DPRD Provinsi		84,43		-		-		-		
5	Pileg DPD RI		84,38		-		-		-		
6	Pilpres dan Wapres		84,68		-		-		-		

Sumber : KPU Provinsi Riau

Jumlah Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsis setiap tahunnya sejumlah 65 kursi dimana terdapat 10 partai politik antara lain partai kebangkitan bangsa sejumlah 6 kursi, partai Gerakan Indonesia raya sebesar 8 kursi, Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan sebesar 10 kursi, Partai Golongan Karya 11 kursi, Partai Nasional Demokrat sebesar 2 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 7 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebesar 4 kursi, Partai Amanat Nasional 7 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat 1 kursi dan Partai Demokrat sebesar 9 kursi. Distribusi perolehan kursi DPRD Provinsi Riau dapat dilihat pada table di bawah :

Tabel 2.264.
Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Periode 2019 – 2023

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD RIAU	TAHUN DAN JENIS KELAMIN									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10	9	1	9	1	8	2	8	2	8	2
4	Partai Golongan Karya	11	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5
5	Partai Nasional Demokrat	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	7	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2
7	Partai Persatuan Pembangunan	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
8	Partai Amanat Nasional	7	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
10	Partai Demokrat	9	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1
JUMLAH		65	52	13	52	13	51	14	51	14	51	14

Sumber : Sekretariat Dewan Riau

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2023 mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 71,60 dengan status kondisi rukun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 66,67 dengan status kondisi rukun. Dimana pada tahun 2022 skor IKUB Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan skor nasional sebesar 73,09. Tahun 2022 Provinsi Riau mendapatkan peringkat 16.

Tabel 2.265.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Indeks	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi
1	Kesetaraan	68,30	Rukun	68,30	Rukun	69,20	Rukun	75,32	Rukun	77,61	Rukun
2	Toleransi	68,30	Rukun	68,30	Rukun	60,80	Rukun	70,39	Rukun	74,46	Rukun
3	Kerjasama	71,18	Rukun	71,18	Rukun	70,00	Rukun	73,65	Rukun	75,59	Rukun
Skor Nasional		73,83	Rukun	67,46	Rukun	72,39	Rukun	73,09	Rukun	76,02	Rukun
Skor IKUB Riau		69,26	Rukun	69,26	Rukun	66,67	Rukun	74,32	Rukun	71,60	Rukun
Peringkat		31		31		31		16		31	

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi Riau

Berdasarkan data jumlah konflik yang ada dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kejadian konflik di Provinsi Riau menurun dari 145 kejadian konflik menjadi 90 kejadian konflik. Namun dari jenis konflik yang ada jenis konflik Sosial Budaya dan Wilayah yang masih tinggi dan mengalami peningkatan

Tabel 2.266.
Angka Jumlah Konflik Provinsi Riau berdasarkan Jenisnya dari tahun 2018 - 2022

No	Jenis Konflik	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sosial Budaya (Sosbud)	96	106	102	28	35
2	Wilayah	16	17	15	54	51
3	SARA	10	10	11	8	4
4	Sumber Daya Alam (SDA)	23	25	26	-	-
Jumlah		145	158	154	90	90

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2. Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Riau Tahun 2022

2.2.1 Capaian Indikator Makro Provinsi Riau Tahun 2023

Pemulihan perekonomian riau terus membaik dimana pada tahun 2019 sebelum pandemi *Covid-19* pertumbuhan ekonomi riau 2,81 persen, namun berkontraksi -1,13 persen akibat *Covid-19* di tahun 2020. kemudian mengalami perbaikan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,36 persen dan tahun 2022 sebesar 4,55 persen. Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah provinsi riau mendorong pengembangan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, kemudahan berusaha. Nilai investasi riau meningkat tiga tahun terakhir, pada tahun 2022 realisasi investasi di riau mencapai 82,5 triliun rupiah atau 135,65 persen dari target 60,82 triliun rupiah yang ditetapkan.

Disamping itu struktur PDRB Riau yang menunjukkan trend penurunan sektor migas, perlu adanya transformasi ekonomi dengan mendorong sektor-sektor diluar migas yaitu pertanian, industri dan pariwisata. Dari struktur PDRB Riau sepuluh tahun terakhir terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penggalian dan pertambangan dengan total kontribusi sebesar lebih kurang 75 persen. secara spasial PDRB Riau merupakan peringkat kelima secara nasional dan peringkat pertama diluar pulau jawa.

Perumusan target indikator makro pada RKPD Provinsi Riau tahun 2022 berdasarkan kondisi perekonomian Riau terkini, dimana perhitungan dilakukan setiap triwulan. Perkembangan indikator makro Provinsi Riau tahun 2020-2021, target dan capaian tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.267.
Perkembangan Indikator Makro Provinsi Riau Tahun 2020-2022
Serta Terget dan Capaian Tahun 2022 (persen)

No	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		
			RKPD 2022	P-RKPD 2022	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,06-2,71	2,69-3,04	-1,13	3,36	4,55
2.	Inflasi	Persen	2,6-2,8	2,0	2,40	2,0	6,81
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,75-74,14	73,21-73,44	72,71	72,94	73,52
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,80	71,73-71,75	71,60	71,67	71,95
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,37	9,24-9,30	9,14	9,19	4,22

No	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		
			RKPD 2022	P-RKPD 2022	2020	2021	2022
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,30	13,37-13,47	13,20	13,28	13,29
	Pengeluaran per Kapita	Sebesar Rp.000	-	10.817-10.894	10.675	10.736	11.158
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,11-5,18	4,30-4,12	6,32	4,42	4,37
5.	Persentase Kemiskinan	Persen	7,14	6,87-6,52	7,04	7,00	6,84
6.	Indeks Gini	Indeks	0,319-0,317	0,322-0,333	0,321	0,327	0,323
7.	Indeks Ketimpangan Williamson	Indeks	-	0,276	0,297	0,285	-
8.	Emisi Gas Rumah Kaca (GgCO ₂ -e)		297.322,00	180.342,67	225.518	183.477,25	180.342,67

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan capaian terhadap indikator makro daerah sebagai berikut:

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2020-2022 menunjukkan tren peningkatan, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup tajam yaitu mencapai (1,13)% hal ini disebabkan karena wabah *Covid-19* yang melanda Riau bahkan belahan dunia, dan tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,36% dan terus meningkat tahun 2022 sebesar 4,55%. Hal ini karena aktifitas ekonomi sudah berjalan yang ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor antardaerah. akselerasi ekonomi Riau juga bersumber dari kinerja investasi, terutama investasi non-bangunan, dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Lebih lanjut, kinerja ekspor antardaerah juga tumbuh tinggi sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang mulai pulih sehingga turut menopang perbaikan ekonomi Riau.

2.2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila

kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10%—30% setahun, berat antara 30%-100% setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi di Provinsi Riau Dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan trend fluktuasi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,40%. Dan naik tajam pada tahun 2022 sebesar 6,81% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,0%. Komoditas yang memberi andil inflasi di Riau selama 2022 antara lain Bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan harga, minyak Goreng, Nasi dengan Lauk, Sewa Rumah, Besi Beton, Rokok Kretek Filter, Ikan Serai.

2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kinerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan dengan memperhatikan indikator pembentuk IPM antara lain angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil. IPM digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di provinsi Riau terus mengalami kemajuan. IPM provinsi Riau rata-rata tumbuh sebesar 0,57% pertahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi sejak tahun 2014. Namun, pandemi *Covid-19* telah membawa perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia provinsi Riau. IPM Provinsi Riau selama tahun 2020-2022 mengalami tren peningkatan. Tahun 2022 meningkat sebesar 0,58 poin bila dibandingkan dengan tahun 2021.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Provinsi Riau telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Perkembangan TPT Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami perbaikan dimana capaian mengalami penurunan. Pada tahun 2021 TPT Provinsi Riau sebesar 4,42% mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,9% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,32% dan pada

tahun 2022 TPT Provinsi Riau sebesar 4,37% mengalami penurunan sebesar 0,05% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena berkurangnya penduduk Riau berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 mencapai 6,39 juta jiwa sedangkan proyeksinya sebesar 6,93 juta jiwa, disamping itu banyaknya investasi yang masuk ke Riau sehingga berdampak kepada peluang kerja.

2.2.1.5. Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau dari Tahun 2020 hingga 2022 juga mengalami perbaikan dimana capaiannya menurun setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 6,48% mengalami penurunan sebesar 0,16% dari tahun 2021 sebesar 7,00%. Demikian juga pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,04% dari tahun 2020 sebesar 7,04%. Faktor yang menyebabkan terjadi penurunan ini karena diprediksi akan kembali membaik sudah akibat mulai pulihnya perekonomian. Kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya pedesaan wilayah pesisir.

2.2.1.6. Indeks Gini

Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Selama periode 2020-2022, angka indeks gini berkisar antara 0,33-0,327 dengan berfluktuatif menurun, dimana tahun 2020 menurun dan meningkat kembali tahun 2021, artinya bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata. Pergerakan kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi yang padat karya dan pembangunan infrastruktur. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di

Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (self services development).

2.2.1.7. Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi (Williamson dalam Akita and Kataoka, 2003): Indeks Williamson digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kabupaten dan Indeks Ketimpangan Williamson kota. Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Perkembangan Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga tahun 2021 cenderung menurun dari level sedang menuju level rendah, hal ini diindikasikan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau mulai merata.

2.2.1.8. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca (GgCO₂-e) Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 180.342,67 GgCO₂e dengan capaian 98,67%, artinya belum mencapai target yang telah ditetapkan (177.978,04 GgCO₂e). Emisi gas rumah kaca tahun 2022 membaik dari tahun 2021 yaitu sebesar 3.134 GgCO₂e. Hal ini disebabkan oleh telah terkendalinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), rehabilitasi hutan dan lahan yang mempunyai kontribusi terhadap kinerja penurunan emisi gas rumah kaca. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian tahun 2022 baru mencapai 96,33% dari target 174.084,05 GgCO₂e.

2.2.2. Capaian Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan arah kebijakan RPJMD tahun ke 4 (emapt), dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan maka tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 adalah Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif. Untuk mendukung pencapaian tema dimaksud maka telah disepakati prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2023 yaitu:

1. Kesejahteraan Masyarakat
2. Pelayanan Publik
3. Daya Saing Daerah

Tingkat capaian prioritas pembangunan Provinsi Riau berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dijelaskan pada Tabel 2.268 dengan rincian capaian kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan prioritas sebagaimana pada lampiran 1.

Tabel 2.268.
Tingkat Capaian Prioritas Pembangunan Provinsi Riau
Dalam RKPD Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%)			
		KINERJA(%)	PREDIKAT	Rp (%)	PREDIKAT
1.	Kesejahteraan Masyarakat	96,22	Sangat Tinggi	82,91	Tinggi
2.	Pelayanan Publik	97,75	Sangat Tinggi	86,52	Tinggi
3.	Daya Saing Daerah	99,58	Sangat Tinggi	87,39	Sangat Tinggi

2.2.2.1 Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas pembangunan kesejahteraan masyarakat di dukung oleh 30 program dan Perangkat daerah penanggungjawab terdiri dari 15 (lima belas) perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretariat Daerah.

Tingkat capaian kinerja pada Prioritas Kesejahteraan Masyarakat dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 mencapai 96,22% dengan predikat sangat tinggi dan realisasi anggaran sebesar 82,91% dengan predikat tinggi.

2.2.2.2. Pelayanan Publik

Prioritas Pelayanan Publik didukung oleh 18 program dan Perangkat daerah penanggungjawab Prioritas Pelayanan Publik terdiri dari 10 (sepuluh) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Tingkat capaian kinerja pada Prioritas Pelayanan Publik dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 97,75% dengan predikat sangat tinggi dan realisasi anggaran sebesar 86,52% dengan predikta tinggi.

2.2.2.3. Daya Saing Daerah

Prioritas Daya Saing Daerah didukung oleh 24 program dan Perangkat daerah penanggungjawab Prioritas Daya Saing Daerah terdiri dari 7 (tujuh) perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pangan, Tanaman Pangan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tingkat capaian kinerja pada Prioritas Daya Saing Daerah dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 99,58% dengan predikat sangat tinggi dan realisasi anggaran sebesar 87,39% dengan tinggi.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan Pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2024 terdiri atas:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM

1.1. Pemenuhan Prasarana Dasar

- Belum berfungsinya secara optimal SPAM Regional durolis (44,8% dari target sambungan rumah tangga) dan SPAM regional Pekanbaru - Kampar (57,1% dari target sambungan rumah tangga)
- Pemenuhan akses air minum layak masih rendah tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hulu (73,31), Pelalawan (82,81), Kuantan Singingi (83,02) , Rokan Hilir (86,56), Indragiri Hilir (88,76)
- Keluarga beresiko stunting yang tidak mempunyai sumber air minum layak 140.744 KK (PK 2023)
- Masih rendahnya sarana prasarana permukiman bagi disabilitas
- Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dan tempat pembuangan akhir tinja, pada tahun 2023 di bawah 60% adalah Kabupaten Indragiri Hilir 51,31% dan Kabupaten Meranti 53,26%,
- Keluarga beresiko stunting yang tidak mempunyai jamban yang layak 137.069 KK (PK 2023)
- Rasio elektrifikasi tahun 2023 di Kabupaten Pelalawan (83,14), Rokan Hilir(86,95), Kepulauan Meranti (88,12)

1.2. Pendidikan

- Rata-rata APK SMA/MA terendah pada Indragiri Hilir (70,86 poin), Kepulauan Meranti (76,48 poin), dan Rokan Hilir (76,88 poin)
- APS usia 4-18 tahun penyandang disabilitas (56,75 poin realisasi tahun 2023)
- Persentase sertifikasi guru SMA (39,7%), SMK (29,7%) dan SLB (24,9%) masih rendah
- Literasi SMA (69,23), SMK (65,94) dan numerasi SMA (58,64), SMK (55,81) .

- Minat baca masyarakat yang diukur dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Riau 2023 sebesar 66,88 poin yang masih dibawah capaian Provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir (48,99), Rokan Hilir (50,36), Rokan Hulu (52,69), Bengkalis (53,86), Kampar (56,70), Indragiri Hulu (60,88), Kepulauan Meranti (63,19) dan Kuantan Singingi (64,78).

1.3. Kesehatan

- Kualitas layanan rujukan skala Pprovinsi yang belum optimal (ketersediaan tempat tidur layanan intensif seprovinsi riau 64,37%, dan rumah sakit pemerintah provinsi 74,87%)
- Masih tingginya prevalensi balita stunting di Provinsi Riau 17,00%, khususnya di Indragiri Hilir (28,5%), Rokan Hulu (22%) dan Siak (22%)
- Masih tingginya jumlah kematian ibu dari fase nifas sebesar 42% dari 114 kematian ibu tahun 2022
- Rendahnya Treatment Coverage (TC) TBC Provinsi Riau sebesar 42,8% dari target nasional 80% tahun 2022
- Peningkatan kasus HIV dari 570 kasus tahun 2021 menjadi 835 kasus tahun 2022
- Masih rendahnya deteksi dini penyakit tidak menular (cakupan layanan hipertensi 59,55%)
- Daerah yang belum mencapai cakupan UHC (Universal Health Coverage) di Kab. Rohul dan Kab. Rohil

1.4. Kesenjangan Gender

- Tingginya indeks IKG tahun 2022 diatas Provinsi Riau (0,47) di Kabupaten Pelalawan (0,64), Indragiri Hulu (0,62), Rokan Hulu (0,59), Kuantan Singingi (0,58), Indragiri Hilir (0,58), Siak (0,54), Kampar (0,53), Rokan Hilir (0,52) dan Kepulauan Meranti (0,5)

2. Peningkatan Tata Kelola

2.1. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

- Masih rendahnya pemenuhan pengembangan kompetensi tahunan ASN 20 JP

- Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 baru mencapai 11,79% atau 84 pejabat
- Pegawai yang mengikuti diklat fungsional hanya 3% tahun 2023 atau 446 orang ASN
- Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN tahun 2022 68,33 poin
- Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau pada domain tata kelola SPBE (2,4) dan domain manajemen SPBE (1,36)
- Masih adanya 2 (dua) Kabupaten yang memiliki desa dengan pelayanan low signal dan blankspot tahun 2022 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 42,79% dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 33,66%.
- Masih rendahnya kapasitas layanan dan pengelolaan bandwidth di Provinsi Riau tahun 2023 hanya sebesar 1200 Mbps
- Kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2018 – 2022 baru berkisar antara 42,86% – 53,94%. karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset

3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan

3.1. Pemenuhan Infrastruktur

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Provinsi Riau baru mencapai sebesar 65,44% atau sepanjang 1.762,87 Km pada tahun 2023 dengan kondisi permukaan jalan tanah/belum tembus yang terbesar pada Kabupaten Indragiri hilir (136,62 Km) dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan (52,88 Km) sehingga konektifitas antar daerah belum maksimal.
- Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 1.638 kecelakaan. Hal tersebut mengindikasikan masih terbatasnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan
- Belum optimalnya layanan integrasi antar moda (Angkutan Udara, Laut dan Darat) di Provinsi Riau

3.2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,88 poin dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 50,00 poin Provinsi Riau tahun 2022
- Rata-rata kondisi TPA kabupaten/kota masih beroperasi secara open dumping dan daya tampung TPA perkotaan sudah terlampaui (data TPA Provinsi Riau dari bid 3)
- Upaya penurunan emisi gas rumah kaca belum optimal (rata-rata pertahun 1,5%)
- Bencana banjir di Provinsi Riau (curah hujan didaerah hulu lebih dari 200 mm/detik, menyebabkan elevasi muka air waduk PLTA Koto Panjang naik sehingga dilakukan pembukaan pintu air sebanyak 5 pintu setinggi 80 cm, pertemuan tiga sungai (sungai kampar, kampar kiri dan kampar kanan), pengaruh pasang surut air laut. Sehingga terjadi luapan air yang menyebabkan banjir)
- Kondisi lahan di Provinsi Riau didominasi tanah gambut sebesar 55,14% berpotensi sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan
- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat rendah (26,14% Tahun 2023), dan masih tingginya pemanfaatan energi fosil dalam pemenuhan energi di Provinsi Riau sebesar 73,86% (minyak bumi 28,93%, gas bumi 15,04% dan batubara 29,90%)

4. Penguatan Ekonomi

4.1. Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)

- Masih tingginya ketergantungan beras Provinsi Riau dari daerah luar dimana rasio produksi beras terhadap konsumsi baru 0,26
- Turunnya produksi padi sawah di Provinsi Riau tahun 2022 menjadi 213.557 ton
- Masih rendahnya kondisi jaringan irigasibaik (39,45%)
- Rasio produksi sayuran terhadap konsumsi masih rendah di Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 0,28.

4.2. Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)

- Terdapatnya dua kabupaten dengan nilai investasi PMDN yang masih rendah tahun 2022 yaitu Kabupaten Kuantan Singingi (564 M) dan Kepulauan Meranti (217 M)
- Rendahnya investasi PMDN pada komoditi karet (Rp. 165,23 M), kelapa (176 Jt) dan perikanan (1,51 M)
- 3. Masih kurangnya hilirisasi produk unggulan (Kelapa Sawit, kelapa, karet)
- Rata-rata pertumbuhan produktifitas perkebunan rakyat masih rendah (kelapa sawit sebesar 0,84%, Kelapa -13,13%, karet 3,09%) per tahun.
- Belum Optimalnya perkembangan SIKIM di Provinsi Riau (3 SIKIM yang beroperasi)
- Belum beroperasinya secara optimal 3 (tiga) kawasan industri di Provinsi Riau (kawasan industri duma, kawasan industri tanjung buton dan kawasan industri tenayan raya)

4.3. Penguatan Ekonomi Masyarakat

- Pertumbuhan jumlah koperasi tidak sejalan dengan jumlah koperasi aktif (jumlah koperasi 5.871 dan jumlah koperasi aktif 3.166)
- Masih rendahnya Jumlah pelaku UKM yang bermitra dengan pengusaha menengah/besar (4,27% tahun 2023)
- Masih belum tercukupi produksi ikan terhadap konsumsi pada tahun 2022 di Provinsi Riau dimana rasio produksi terhadap konsumsi baru mencapai 0,89. Sedangkan kabupaten/kota rasio terendah terdapat pada Kota Dumai (0,12), Kabupaten Siak (0,17) dan Kota Pekanbaru (0,21).
- Masih rendahnya status indeks Desa Membangun (IDM) mandiri 600 desa dari 1.591 desa (37,71% tahun 2023)
- Masih rendahnya BUMDes Maju (efektivitas penggunaan modal usaha BUMDes belum sesuai dengan potensi Desa 315)
- Masih rendahnya dalam penetapan kawasan pedesaan (Kab. Kampar, Kab. Kep. Meranti, Kab. Bengkalis, Kab. Siak)
- Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2023 mencapai 4,23%, Kabupaten yang tingkat TPT nya masih tinggi Bengkalis

7,09, Pekanbaru 6,20, Siak 5,82, Kepulauan Meranti 5,17, Dumai 5,15 dan Rokan Hilir 4,42.

- Masih rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Riau di sektor informal (bukan penerima upah) baru mencapai 23,37%, Dari 1.090.925 pekerja di sektor informal untuk kabupaten/kota yang capaiannya rendah yaitu Kampar 38,63%, Inhu 43,29%, Inhil 31,63%, Rohul 26,18%, Rohil 31,56%, Kuansing 38%, Kep.Meranti 4,94%, Siak 51,24%
- Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja (mayoritas tamatan SD sebanyak 906.104 jiwa (30,18%) dari total penduduk yang bekerja 3.002.334 jiwa
- Terbatasnya kesempatan kerja bagi disabilitas dari total jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP 31.367 baru 30 perusahaan yang mempekerjakan disabilitas dengan jumlah disabilitas yang bekerja di perusahaan sebanyak 36 pekerja disabilitas

4.4. Pariwisata Berbudaya Melayu

- Belum Optimalnya akses dan prasarana Objek wisata budaya baik wisata alam, budaya dan buatan
- Pelaku usaha ekonomi kreatif tahun 2023 di Provinsi Riau masih didominasi pada sektor kuliner sebesar 45,5%
- Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekspresi (25,39%) dan warisan budaya melayu (51,75 %) tahun 2022
- Masih rendahnya penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tahun 2022 (0,44%) dan penetapan cagar budaya tahun 2022 (1,26%).

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didaya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Provinsi Riau 5 (lima) tahun terakhir, dapat disimpulkan sebagai berikut.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Permasalahan pembangunan dari isu strategis daerah di Provinsi Riau sebagai berikut :

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Prasarana Dasar Relatif Rendah
 - Belum berfungsinya secara optimal SPAM Regional durolis (44,8% dari target sambungan rumah tangga) dan SPAM regional Pekanbaru - Kampar (57,1% dari target sambungan rumah tangga)
 - Pemenuhan akses air minum layak masih rendah tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hulu (73,31), Pelalawan (82,81), Kuantan Singingi (83,02), Rokan Hilir (86,56), Indragiri Hilir (88,76)
 - Keluarga beresiko stunting yang tidak mempunyai sumber air minum layak 140.744 KK (PK 2023)
 - Masih rendahnya sarana prasarana permukiman bagi disabilitas
 - Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dan tempat pembuangan akhir tinja, pada tahun 2023 di bawah 60% adalah Kabupaten Indragiri Hilir 51,31% dan Kabupaten Meranti 53,26%,
 - Keluarga beresiko stunting yang tidak mempunyai jamban yang layak 137.069 KK (PK 2023)
 - Rasio elektrifikasi tahun 2023 di Kabupaten Pelalawan (83,14), Rokan Hilir (86,95), Kepulauan Meranti (88,12)
 - Rata-rata APK SMA/MA terendah pada Kabupaten Indragiri Hilir (70,86 poin), Kepulauan Meranti (76,48 poin), dan Rokan Hilir (76,88 poin)
 - APS usia 4-18 tahun penyandang disabilitas (56,75 poin realisasi tahun 2023)
 - Persentase sertifikasi guru SMA (39,7%), SMK (29,7%) dan SLB (24,9%) masih rendah
 - Literasi SMA (69,23), SMK (65,94) dan numerasi SMA (58,64), SMK (55,81).
 - Minat baca masyarakat yang diukur dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Riau 2023 sebesar 66,88 poin yang masih dibawah capaian Provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir (48,99), Rokan Hilir (50,36), Rokan Hulu (52,69), Bengkalis (53,86), Kampar (56,70), Indragiri Hulu (60,88), Kepulauan Meranti (63,19) dan Kuantan Singingi (64,78).

- Kualitas layanan rujukan skala Pprovinsi yang belum optimal (ketersediaan tempat tidur layanan intensif seprovinsi riau 64,37%, dan rumah sakit pemerintah provinsi 74,87%)
 - Masih tingginya prevalensi balita stunting di Provinsi Riau 17,00%, khususnya di Indragiri Hilir (28,5%), Rokan Hulu (22%) dan Siak (22%)
 - Masih tingginya jumlah kematian ibu dari fase nifas sebesar 42% dari 114 kematian ibu tahun 2022
 - Rendahnya Treatment Coverage (TC) TBC Provinsi Riau sebesar 42,8% dari target nasional 80% tahun 2022
 - Peningkatan kasus HIV dari 570 kasus tahun 2021 menjadi 835 kasus tahun 2022
 - Masih rendahnya deteksi dini penyakit tidak menular (cakupan layanan hipertensi 59,55%)
 - Daerah yang belum mencapai cakupan UHC (Universal Health Coverage) di Kab. Rohil dan Kab. Rohil
- 2) Tingginya kesenjangan di Kabupaten/Kota dalam hal akses dan partisipasi di Bidang Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan dan Politik
- Tingginya indeks IKG tahun 2022 diatas Provinsi Riau (0,47) di Kabupaten Pelalawan (0,64), Indragiri Hulu (0,62), Rokan Hulu (0,59), Kuantan Singingi (0,58), Indragiri Hilir (0,58), Siak (0,54), Kampar (0,53), Rokan Hilir (0,52) dan Kapulauan Meranti (0,5)
- 3) Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Penataan Reformasi Birokrasi berbasis Digital
- Masih rendahnya pemenuhan pengembangan kompetensi tahunan ASN 20 JP
 - Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 baru mencapai 11,79% atau 84 pejabat
 - Pegawai yang mengikuti diklat fungsional hanya 3% tahun 2023 atau 446 orang ASN
 - Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN tahun 2022 68,33 poin

- Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau pada domain tata kelola SPBE (2,4) dan domain manajemen SPBE (1,36)
 - Masih adanya 2 (dua) Kabupaten yang memiliki desa dengan pelayanan low signal dan blankspot tahun 2022 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 42,79% dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 33,66%.
 - Masih rendahnya kapasitas layanan dan pengelolaan bandwidth di Provinsi Riau tahun 2023 hanya sebesar 1200 Mbps
 - Kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2018 – 2022 baru berkisar antara 42,86% – 53,94%. karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset
- 4) Layanan Infrastruktur dan Penunjang Serta Konektivitas Masih Terbatas :
- Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Provinsi Riau baru mencapai sebesar 65,44% atau sepanjang 1.762,87 Km pada tahun 2023 dengan kondisi permukaan jalan tanah/belum tembus yang terbesar pada Kabupaten Indragiri hilir (136,62 Km) dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan (52,88 Km) sehingga konektifitas antar daerah belum maksimal.
 - Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 1.638 kecelakaan. Hal tersebut mengindikasikan masih terbatasnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan
 - Belum optimalnya layanan integrasi antar moda (Angkutan Udara, Laut dan Darat) di Provinsi Riau
- 5) Kualitas Lingkungan Hidup Rendah dengan Resiko Bencana Masih Tinggi :
- Masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,88 poin dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 50,00 poin Provinsi Riau tahun 2022
 - Rata-rata kondisi TPA kabupaten/kota masih beroperasi secara open dumping dan daya tampung TPA perkotaan sudah terlampaui (data TPA Provinsi Riau dari bid 3)
 - Upaya penurunan emisi gas rumah kaca belum optimal (rata-rata pertahun 1,5%)

- Bencana banjir di Provinsi Riau (curah hujan didaerah hulu lebih dari 200 mm/detik, menyebabkan elevasi muka air waduk PLTA Koto Panjang naik sehingga dilakukan pembukaan pintu air sebanyak 5 pintu setinggi 80 cm, pertemuan tiga sungai (sungai kampar, kampar kiri dan kampar kanan), pengaruh pasang surut air laut. Sehingga terjadi luapan air yang menyebabkan banjir)
- Kondisi lahan di Provinsi Riau didominasi tanah gambut sebesar 55,14% berpotensi sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan
- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat rendah (26,14% Tahun 2023), dan masih tingginya pemanfaatan energi fosil dalam pemenuhan energi di Provinsi Riau sebesar 73,86% (minyak bumi 28,93%, gas bumi 15,04% dan batubara 29,90%)

6) Nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan Pertanian relatif rendah :

- Masih tingginya ketergantungan beras Provinsi Riau dari daerah luar dimana rasio produksi beras terhadap konsumsi baru 0,26
- Turunnya produksi padi sawah di Provinsi Riau tahun 2022 menjadi 213.557 ton
- Masih rendahnya kondisi jaringan irigasibaik (39,45%)
- Rasio produksi sayuran terhadap konsumsi masih rendah di Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 0,28.
- Terdapatnya dua kabupaten dengan nilai investasi PMDN yang masih rendah tahun 2022 yaitu Kabupaten Kuantan Singingi (564 M) dan Kepulauan Meranti (217 M)
- Rendahnya investasi PMDN pada komoditi karet (Rp. 165,23 M), kelapa (176 Jt) dan perikanan (1,51 M)
- Masih kurangnya hilirisasi produk unggulan (Kelapa Sawit, kelapa, karet)
- Rata-rata pertumbuhan produktifitas perkebunan rakyat masih rendah (kelapa sawit sebesar 0,84%, Kelapa -13,13%, karet 3,09%) per tahun.
- Belum optimalnya perkembangan SIKIM di Provinsi Riau (3 SIKIM yang beroperasi)
- Belum beroperasinya secara optimal 3 (tiga) kawasan industri di Provinsi Riau (kawasan industri dumai, kawasan industri tanjung buton dan kawasan industri tenayan raya)

- Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun (IDM) mandiri 600 desa dari 1.591 desa (37,71% tahun 2023)
- Masih rendahnya BUMDes Maju (efektivitas penggunaan modal usaha BUMDes belum sesuai dengan potensi Desa 315)
- Masih rendahnya dalam penetapan kawasan pedesaan (Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak)
- Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2023 mencapai 4,23%, Kabupaten yang tingkat TPTnya masih tinggi Bengkalis 7,09, Pekanbaru 6,20, Siak 5,82, Kepulauan Meranti 5,17, Dumai 5,15 dan Rokan Hilir 4,42.
- Masih rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Riau di sektor informal (bukan penerima upah) baru mencapai 23,37%. Dari 1.090.925 pekerja di sektor informal untuk kabupaten/kota yang capaiannya rendah yaitu Kampar 38,63%, Inhu 43,29%, Inhil 31,63%, Rohul 26,18%, Rohil 31,56%, Kuansing 38%, Kep. Meranti 4,94%, Siak 51,24%
- Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja (mayoritas tamatan SD sebanyak 906.104 jiwa (30,18%) dari total penduduk yang bekerja 3.002.334 jiwa
- Terbatasnya kesempatan kerja bagi disabilitas dari total jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP 31.367 baru 30 perusahaan yang mempekerjakan disabilitas dengan jumlah disabilitas yang bekerja di perusahaan sebanyak 36 pekerja disabilitas

7) Kurangnya Daya Tarik Wisata Berbasis Budaya Melayu :

- Belum Optimalnya akses dan prasarana Objek wisata budaya baik wisata alam, budaya dan buatan
- Pelaku usaha ekonomi kreatif tahun 2023 di Provinsi Riau masih didominasi pada sektor kuliner sebesar 45,5%
- Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekspresi (25,39%) dan warisan budaya melayu (51,75 %) tahun 2022
- Masih rendahnya penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tahun 2022 (0,44%) dan penetapan cagar budaya tahun 2022 (1,26%).

2.3.3 Aspek Geografi

Permasalahan pembangunan terhadap geografi (ruang) di Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan fisiografi Provinsi Riau pada umumnya jenis tanahnya berbukit dan bergelombang sehingga sulit untuk ditanami tanaman pangan dan hortikultura, yang mana Provinsi Riau merencanakan untuk kemandirian pangan untuk mengurangi ketergantungan dengan provinsi lain.
- 2) Penggunaan lahan di Provinsi Riau didominasi oleh sub sektor perkebunan (30,34%), yang menjanjikan akan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya angka kemiskinan masih didominasi penduduk pedesaan yang bekerja pada sektor pertanian khususnya perkebunan.
- 3) Provinsi Riau memiliki empat sungai besar, yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri. Wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir bermuara di pantai timur yang mengakibatkan daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan genangan air. Disamping itu empat sungai besar di Provinsi Riau belum sepenuhnya dijadikan sebagai sumber air baku perpipaan dan sumber air irigasi.

2.3.4. Aspek Demografi

Permasalahan pembangunan dari aspek demografi di Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1) Tidak meratanya kepadatan penduduk pada kabupaten/kota se Provinsi Riau, dimana Kota Pekanbaru kepadatannya mencapai 1.610,84 jiwa/km², merupakan kepadatan tertinggi dan sangat signifikan perbedaannya bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan kepadatan terkecil berada pada Kabupaten Pelalawan sebesar 32,48 jiwa/ km². Kepadatan penduduk yang tidak merata berdampak pada ketersediaan pangan, kebutuhan lahan tempat tinggal, ketersediaan air bersih, faktor lingkungan, dan sebagainya.
- 2) Tidak meratanya penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Dimana penduduk umur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha utama di Provinsi Riau didominasi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, pada tahun 2023 persentase penduduk yang bekerja sebesar 38,60%, sehingga perlu pemerataan sektor

usaha lain agar penduduk pencari kerja akan lebih mudah.

2.3.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan utama pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah:

- 1) Ketidakmerataan kontribusi 17 sektor dalam PDRB Provinsi Riau. Kontribusi pertumbuhan sektoral dalam PDRB didominasi oleh sektor Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; tahun 2022 berkontribusi sebesar 75,48%. Perlu meningkatkan sektor lain agar terjadi pemerataan.
- 2) Masih lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau per tahun. Pertumbuhan ekonomi Riau masih dibawah pertumbuhan nasional, walaupun perekonomian Riau berkontribusi sebesar 5,81% terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau terbesar diluar Pulau Jawa.
- 3) Masih tingginya inflasi di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 6,81%, hal ini disebabkan karena transportasi yang disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak.
- 4) Persoalan penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang mana dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan penurunan nilai tukar petani serta ketimpangan anatar kota dan desa.
- 5) Masih tingginya persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 6,68 persen masih diatas persentase penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota.
- 6) Kemiskinan ekstrem yang menjadi perhatian terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022.
- 7) Komponen dalam pembentukan IPM sangat berpengaruh terhadap capaian IPM di kabupaten/kota, salah satunya pengeluaran perkapita dalam pembentukan IPM masih rendahnya nilai di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir. Umur harapan hidup di kabupaten/kota yang terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- 8) Masih rendahnya pertumbuhan rasio penduduk yang bekerja (-6,07% pertahun dari tahun 2019-2023).

2.3.6. Aspek Pelayanan Umum

2.3.6.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- a) Perkembangan APK SMP/MTs masih rendah dari tahun 2018/2019 hingga tahun 2022/2023. Pada tahun 2022/2023 APK SMP/MTs terendah terdapat pada Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 95,1 poin, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 95,91 poin, dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 96,47 poin.
- b) Rata-rata APK SMA/MA kabupaten/kota se-Provinsi Riau masih relatif rendah pada tahun 2022/2023 APK terendah pada Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 70,86 poin, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 76,48 poin, dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 76,88 poin.
- c) Perkembangan APM SMP/MTs masih rendah dari tahun 2018/2019 hingga tahun 2022/2023. Pada tahun 2022/2023 APM SMP/MTs terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 71,74 poin, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 73,38 poin, dan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 74,54 poin.
- d) Rata-rata APM SMA/MA kabupaten/kota se-Provinsi Riau pada tahun 2022/2023 masih relatif rendah diantaranya Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 50,41 poin, Kepulauan Meranti sebesar 53,32 poin, dan Rokan Hilir sebesar 54,57 poin.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a) Masih adanya kabupaten yang harapan hidupnya rendah dibandingkan dengan provinsi yaitu pada tahun 2022 Kabupaten Meranti sebesar 68,09 Tahun, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 68,31 Tahun dan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 68,87 Tahun.
- b) Masih kurangnya fasilitas kesehatan di Provinsi Riau dimana rasio antara jumlah penduduk dengan puskesmas sebesar 1:30.000.
- c) Masih terdapatnya 5 (lima) Kabupaten status balita wasting berdasarkan BB/TB yang berada di atas Provinsi Riau pada tahun 2022 yaitu Bengkalis sebesar 10,1 %, Siak sebesar 6,3%, Kuantan Singingi sebesar 4,7%, Indragiri Hulu sebesar 3,8% dan Indragiri Hilir sebesar 2,9 %.

- d) Masih terdapatnya 5 (lima) Kabupaten dengan prevalensi balita stunting yang berada di atas Provinsi Riau pada tahun 2022 yaitu Indragiri Hilir sebesar 28,5 %, Rokan Hulu dan Siak sebesar 22 %, Kuantan Singingi sebesar 17,8 % dan Kepulauan Meranti sebesar 17,5%.
- e) Masih tingginya jumlah kematian ibu dari fase nifas sebesar 42 % pada tahun 2022.
- f) Belum tercapainya target nasional sebesar 80 % dari kasus Tuberculosis (TBC) untuk Provinsi Riau yang baru mencapai 41,0 %.
- g) Meningkatnya kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 835 kasus.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan

- 1) Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Provinsi Riau baru mencapai sebesar 64,94% atau sepanjang 1.818,153 Km pada tahun 2022 dengan kondisi permukaan jalan tanah/belum tembus yang terbesar pada Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 84,69% dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebesar 76,48% sehingga konektifitas antar daerah belum maksimal.
- 2) Masih adanya indeks aksesibilitas sangat rendah dan rendah di Provinsi Riau, pada tahun 2022 indeks aksesibilitas yang sangat rendah berada pada Kabupaten Indragiri Hilir (0,13) dan Kabupaten Pelalawan (0,11) serta 8 (delapan) kabupaten lainnya dengan kondisi rendah.

b) Sumber Daya Air

- 1) Daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau terdapat di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu dalam kondisi rusak. Demikian juga dengan kondisi daerah irigasi rawa yang tersebar pada 6 Kabupaten dalam kondisi sedang dan rusak.
- 2) Masih tingginya abrasi pantai di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti baru tertangani 0,28%.

c) Air Bersih dan Air Minum

- 1) Persentase rumah tangga dalam pemenuhan sumber air minum bersih masih rendah pada tahun 2022 terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti baru mencapai 5,54 % dan Kabupaten Indragiri Hilir 30,41%.
- 2) Persentase rumah tangga dalam pemenuhan sumber air minum dari perpipaan (air leding) baru mencapai 2,72% di Provinsi Riau tahun 2022 dan kondisi ini turun 0,94% dibandingkan dengan tahun 2021.

d) Air Limbah

Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dan tempat pembuangan akhir tinja, pada tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai sebesar 51,31% dan Kabupaten Meranti sebesar 53,26%.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- a) Masih rendahnya persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 71,53%. Pertumbuhan angka indikator ini berfluktuasi dari tahun 2019 s/d 2023.
- b) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi. Dari luasan 249,27 Ha Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, baru tertangani seluas 103,07 Ha

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah kejadian unjuk rasa di Provinsi Riau tahun 2023 didominasi terkait politik dan hukum mencapai 27 kasus atau sebesar 56,25%.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- a) Masih rendahnya persentase PPKS yang tertangani baru mencapai 36,60%.

2.3.6.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- a) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2023 mencapai 4,23%.

- b) Belum optimalnya pendataan tenaga kerja asing sehingga mempengaruhi jumlah tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan di Provinsi Riau, data dari tahun 2019 (549 orang) sampai dengan tahun 2023 (204 orang) menurun.
- c) Masih rendahnya pencari kerja yang ditempatkan baru sebesar 22,47% di Provinsi Riau pada tahun 2023.
- d) Masih rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Riau baru mencapai 27,15%.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Masih adanya 5 (lima) Kabupaten dengan nilai IPG dibawah nilai IPG Provinsi Riau tahun 2022 yaitu Kabupaten Rokan Hulu (82,44 poin), Kabupaten Indragiri Hilir (82,74 poin), Kabupaten Rokan Hilir (85,13 poin), Kabupaten Indragiri Hulu (86,73 poin) dan Kepulauan Meranti (86,97 poin).
- b) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembentuk komponen IPM pada tahun 2022 baru mencapai 69,10%, sedangkan partisipasi laki-laki 77,89%.
- c) Nilai IDG seluruh Kabupaten/kota masih dibawah nilai IDG Provinsi Riau pada tahun 2022.
- d) Persentase keterlibatan perempuan diparlemen, tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan Provinsi Riau tahun 2022 masih rendah baru mencapai 28,03%, sedangkan kabupaten yang paling rendah adalah Siak yaitu 20,01%.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a) Masih tingginya ketergantungan beras dan jagung Provinsi Riau dari daerah luar dimana rasio produksi beras dan jagung tahun 2022, sedangkan konsumsi (0,26 beras dan 0,19 jagung).
- b) Rasio produksi sayuran terhadap konsumsi masih rendah di Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 0,28. Demikian juga dengan kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang berkisar 0,04 sampai dengan 0,67.

4) **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Konflik dan sengketa pertanahan di Provinsi Riau dinominasi oleh sengketa dan konflik lahan kepemilikan masyarakat dengan perusahaan perkebunan (HGU) sebesar 10 konflik.

5) **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

- a) Masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,88 poin dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 50,00 poin Provinsi Riau tahun 2022.
- b) Masih adanya 3 Kabupaten yang persentase cakupan pelayanan persampahan yang sangat rendah pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (10%), Kabupaten Kepulauan Merantu (15%) dan Kabupaten Rokan hulu (25%).

6) **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a) Perkembangan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa di Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan sebesar -0,17%.
- b) Masih tingginya klasifikasi BUMDes di Provinsi Riau tahun 2023 dengan klasifikasi dasar dan tumbuh yaitu 58,9%.

7) **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

- a) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 1.638 kecelakaan. Hal tersebut mengindikasikan masih terbatasnya pemasangan rambu-rambu.
- b) Belum optimalnya layanan integrasi antar moda (Angkutan Udara, Laut dan Darat) di Provinsi Riau.

8) **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

- a) Masih adanya 2 (dua) Kabupaten yang memiliki desa dengan pelayanan *low signal* dan *blankspot* tahun 2022 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 42,79% dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 33,66%.
- b) Masih rendahnya kapasitas layanan dan pengelolaan *bandwidth* di Provinsi Riau tahun 2023 hanya sebesar 1200 Mbps.

9) **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Menurunnya persentase jumlah koperasi aktif yang ada di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 54,26%.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- a) Belum optimalnya data sarana dan prasarana perkabupaten/kota yang menunjang kebudayaan di Provinsi Riau.
- b) Masih rendahnya penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tahun 2022 (0,44%) dan penetapan cagar budaya tahun 2022 (1,26%).

2.3.6.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Masih belum tercukupi produksi ikan terhadap konsumsi pada tahun 2022 di Provinsi Riau dimana rasio produksi terhadap konsumsi baru mencapai 0,89. Sedangkan kabupaten/kota rasio terendah terdapat pada Kota Dumai (0,12), Kabupaten Siak (0,17) dan Kota Pekanbaru (0,21).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a) Pelaku usaha ekonomi kreatif tahun 2023 di Provinsi Riau masih didominasi pada sektor kuliner sebesar 45,5%.
- b) Objek wisata di kabupaten/kota se-Provinsi Riau masih membutuhkan peningkatan akses dan prasarana wisata baik wisata alam, budaya dan buatan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a) Turunnya produksi padi sawah di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 3.901,90 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021.
- b) Perkembangan produksi karet di Provinsi Riau cenderung menurun setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -2,36%.
- c) Banyaknya Tanaman Tua Rusak (TTR) pada komoditas kelapa yang tidak sebanding dengan pelaksanaan peremajaan kelapa dan terjadinya degradasi area kelapa mencapai 30% hingga tahun 2020.
- d) Perkembangan produksi sagu di Provinsi Riau cenderung menurun dari tahun 2018 – 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -18,17%.
- e) Rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia tahun 2022 paling rendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 0,20 dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,22.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Masih terdapatnya lahan sangat kritis tahun 2022 di Provinsi Riau sebesar 37,22% atau 261.139 Ha, rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang baru tertangani baru mencapai 0,43% atau 3.055,50 Ha.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Masih rendahnya rasio elektrifikasi tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hilir (77,41%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (80,39%).
- b) Rasio desa berlistrik yang bersumber dari non PLN pada tahun 2022 masih tinggi pada Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 20,62% dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 16,10%.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tingginya kenaikan impor dari tahun 2018-2022 baik migas maupun non migas dengan rata-rata kenaikan 22,54%, didominasi dari hasil non migas yaitu hasil pertanian (volume 46.754,27 ribu Kg) dan hasil industri (3.593.871,68 ribu Kg).

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- a) Belum beroperasinya secara optimal 3(tiga) kawasan industri di Provinsi Riau (Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kawasan Industri Tenayan Raya).
- b) Masih terbatasnya Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang beroperasi pada tahun 2022 baru 3 (tiga) SIKIM.

2.3.6.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 68,01 sehingga perlu dilakukan peningkatan nilai untuk menggambarkan pemerintah profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.
2. Masih banyak kabupaten/kota hingga tahun 2022 memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi yang bernilai CC atau di bawah 70.

2.3.6.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Sinergitas antar dokumen perencanaan pembangunan belum optimal. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik terhadap pusat maupun kabupaten/kota sangat

diperlukan dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan secara bersama-sama, sinergi dokumen perencanaan dapat dilakukan dengan penyelarasan. Di sisi lain dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antar wilayah.

2. Keuangan

Semakin rendahnya kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2018 – 2022 berkisar antara 42,86% – 53,94%. Untuk masa yang akan datang, kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dimana diharapkan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus semakin besar terhadap total pendapatan daerah Provinsi Riau.

3. Kepegawaian

Masih terdapatnya ASN yang terlibat kasus korupsi dan cenderung mengalami peningkatan tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) kasus atau mengalami kenaikan sebesar 22,22% dibandingkan dengan tahun 2021.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pemasalahan kepegawaian di Provinsi Riau saat ini adalah menyangkut pada masih belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 baru mencapai 11,79% atau 84 pejabat dan masih sedikitnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional baru mencapai 3% tahun 2023 atau 446 orang ASN. Padahal pelatihan tersebut berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pegawai.

5. Penelitian dan Pengembangan

Masih sedikitnya penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2022 hanya sebanyak 6 judul, bahkan pada tahun 2019 dan 2020 karena tidak ada melakukan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, hal yang dapat dicermati adalah tidak adanya konsistensi jumlah per bidang penelitian. Sebaiknya penelitian dilakukan secara konsisten dengan melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan sumberdaya serta prospek yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau ke depan.

2.3.6.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Masih rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI (81,71%) dan Inspektorat Provinsi Riau (78,09%) tahun 2023 pada semester I.

2.3.6.7 Unsur Pemerintahan Umum

Skor Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 73,64 dengan kategori sedang, perlu peningkatan pada aspek kesetaraan (70,53) dan aspek kapasitas lembaga demokrasi (66,69).

2.3.7 Aspek Daya Saing

1. Terdapat 3 (tiga) kabupaten yang pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita berdasarkan PDRB Harga Berlaku dengan nilai rendah tahun 2022 dibandingkan dengan Provinsi yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti (38,94 Juta Rp/Kapita), Kabupaten Pelalawan (42,34 Juta Rp/Kapita) dan Kabupaten Indragiri Hulu (42,95 Juta Rp/Kapita).
2. Belum optimalnya perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) pada sektor tanaman pangan (90,60) dan peternakan (97,00) pada tahun 2022 selama lima tahun terakhir.
3. Persentase penduduk bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Riau tahun 2023 masih didominasi oleh tamatan SD sebesar 30,18%.
4. Masih tingginya rasio ketergantungan usia non produktif dibandingkan dengan usia produktif pada tahun 2023 sebesar 46,03% artinya setiap 100 jiwa usia produktif menanggung 46,03 jiwa usia non produktif.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi baik kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global tahun 2024 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Riau tahun 2024. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025.

Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2025 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2023, awal tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 di Riau. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun, ditengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui

beberapa negara peers seperti Malaysia (3,77%) dan Korea Selatan (1,36%), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti AS (2,5%), Perancis (0,9%) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0,3%).

Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 mempunyai tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan yaitu :

- PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
- PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
- PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
- PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri
- PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
- PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
- PN 8 : Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk

Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur

Sasaran pembangunan nasional yang hendak dicapai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025

Uraian	Realiasi 2023	2024 Outlook	Target 2025
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,05	5,3 - 5,7	5,3 - 5,6
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	6,5 - 7,5	7,0 - 8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 - 5,7	4,5 - 5,0
Rasio Gini (nilai)	0,388	0,374 - 0,377	0,379 - 0,382
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	-	0,56
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	34,09	-	38,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2025 memiliki tema **“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”**. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada:
 - Pemenuhan Prasarana dasar
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Kesetaraan Gender
2. Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
 - Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada :
 - Pemenuhan Infrastruktur
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada :
 - Pertanian
 - Hilirisasi SDA
 - Penguatan Ekonomi masyarakat
 - Pariwisata Berbudaya Melayu

Selain itu juga mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

3.1.1.1. PDRB menurut Lapangan Usaha

PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB Provinsi Riau menggambarkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi setiap tahunnya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor. Dari struktur PDRB Riau sepuluh tahun terakhir terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penggalian dan pertambangan dengan total kontribusi sebesar lebih kurang 75 %. Secara spasial PDRB Riau tahun 2023 merupakan peringkat keenam secara nasional dan peringkat kedua diluar pulau jawa setelah Sumatera Utara.

Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB 2022 – 2023 dan target 2024 - 2025 Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024-2025 Provinsi Riau

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	Realisasi 2022		Realisasi 2023		Target 2024		Target 2025	
	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (R)	2,82	12,24	3,23	6,66	2,3 – 2,6	5,3 - 6,4	3,2 - 3,4	5,2 - 7,9

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	Realisasi 2022		Realisasi 2023		Target 2024		Target 2025	
	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
Pertambangan dan Penggalian (R)	1,36	36,37	2,52	(9,82)	(0,6) – (1,5)	0,2 - 1,3	2,8 - 3,0	9,2 - 19,9
Industri Pengolahan / Manufacturing (R)	4,73	14,84	3,63	4,62	4,2 – 5,1	18,0 - 19,9	4,1 - 4,2	8,2 - 14,7
Pengadaan Listrik dan Gas (E)	14,34	18,36	1,45	6,90	11,7 – 13,2	12,4 - 16,4	3,9 - 4,3	5,9 - 9,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (R)	4,49	6,06	5,52	9,33	3,7 – 4,1	3,8 - 6,3	3,4 - 3,7	5,8 - 9,8
Konstruksi (R)	4,76	12,52	9,17	17,00	3,9 – 4,4	6,2 - 9,3	5,2 - 5,6	8,6 - 14,4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (R)	11,90	16,98	6,12	8,47	9,7 – 11,0	10,7 - 14,4	5,3 - 5,8	11,9 - 22,8
Transportasi dan Pergudangan (R)	18,58	29,51	8,31	16,35	15,1 – 17,1	17,6 - 22,6	4,1 - 4,4	8,0 - 14,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (E)	10,89	13,65	4,22	6,69	8,9 – 10,0	9,7 - 13,2	5,0 - 5,5	9,4 - 16,6
Informasi dan Komunikasi (E)	6,83	8,90	7,67	8,79	5,6 – 6,3	6,0 - 8,8	7,3 - 7,9	11,0 - 17,4
Jasa Keuangan dan Asuransi (E)	4,96	14,95	4,07	6,00	4,0 – 4,6	7,1 - 10,4	5,0 - 5,4	8,5 - 14,4
Real Estat (R)	5,48	9,16	3,94	6,74	4,5 – 5,1	5,3 - 8,2	4,7 - 5,1	9,0 - 16,1
Jasa Perusahaan	12,80	17,16	6,58	10,20	10,4 – 11,8	11,2 - 15,0	3,3 - 3,6	7,2 - 13,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,98	7,07	5,40	6,82	4,9 – 5,5	5,2 - 7,9	1,6 - 6,9	6,4 - 19,9
Jasa Pendidikan	3,92	5,39	3,76	5,07	3,2 – 3,6	3,6 - 6,1	3,8 - 4,2	5,9- 9,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,48	4,56	6,97	9,89	2,0 - 2,3	2,6 - 4,9	4,0 - 4,4	6,2 - 9,9
Jasa lainnya	12,93	14,81	6,26	8,01	10,5 – 11,9	11,0 - 14,6	4,4 - 4,7	7,7 - 13,4

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB tahun 2022 hingga 2023 sangat bervariasi ada sektor yang mengalami kenaikan dan juga sektor yang mengalami penurunan. Pada tahun 2023 PDRB ADHK sektor yang mengalami kenaikan cukup besar adalah Konstruksi naik sebesar 4,41 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 1,16 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,03 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan ini akibat mulai pulihnya ekonomi Riau dimana masih adanya pembangunan jalan tol bangkinang - pangkalan produski dan harga minyak yang stabil. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yang cukup signifikan adalah sektor pengadaan listrik dan gas turun sebesar 12,89 persen, transportasi dan pergudangan turun sebesar 10,27 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum turun sebesar 6,67 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022. Demikian juga dengan target tahun 2024 dan 2025 ada sektor yang ditargetkan naik dan ada sektor mengalami penurunan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan sektor-sektor yang mengalami kontraksi dan mempertahankan serta meningkatkan sektor sektor lainnya. Sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha dari PDRB ADHK adalah sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,3 - 7,9 persen; sektor konstruksi tumbuh sebesar 5,2 - 5,6 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 5,0 - 5,5 persen.

3.1.1.2. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran 3 (tiga) tahun terakhir Riau terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi lebih dari sepertiga total PDRB Provinsi Riau, yaitu sekitar 34,94 persen pada tahun 2023. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan

mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Komponen lain yang berkontribusi besar adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB menurut pengeluaran Provinsi Riau dari tahun 2022 hingga 2023 rata-rata mengalami penurunan, tahun 2023 PDRB ADHK komponen yang mengalami penurunan signifikan yaitu Impor dan ekspor. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik dan juga penurunan permintaan eksternal. Target pertumbuhan tahun 2025 didominasi dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,7 - 6,2 persen dan konsumsi LNPRRT tumbuh sebesar 5,3 - 5,7 persen. Sumber peningkatan ini bersumber dari pengembangan industri hilir yang didukung oleh Kawasan industri yang terpadu, meningkatkan dukungan infrastruktur dan kemudahan berusaha. Secara rinci perkembangan realisasi dan target PDRB ADHK dan ADHB menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Menurut
Pengeluaran Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024-2025 Provinsi Riau

PDRB BERDASARKAN PENGELUARAN	Realisasi 2022		Realisasi 2023		Target 2024		Target 2025	
	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
Konsumsi Rumah Tangga	4,71	10,59	4,30	8,32	3,82 - 4,32	7,7 - 8,3	4,7 - 5,1	7,9 - 8,4
Konsumsi LNPRRT	4,61	10,06	8,90	13,82	6,69 - 7,21	15,8 - 16,5	5,3 - 5,7	8,9 - 9,3
Konsumsi Pemerintah	3,75	7,79	7,94	10,23	2,29 - 5,01	0,7 - 3,3	1,6 - 7,1	3,2 - 8,8
Pembentukan Modal Tetap bruto	5,87	11,83	4,98	6,52	2,96 - 3,35	6,9 - 7,7	5,7 - 6,2	7,2 - 7,7
Ekspor Barang dan Jasa	2,28	17,67	(1,61)	(13,40)	0,51 - 0,72	(0,1) - 1,2	(1,7) - (0,7)	2,3 - 3,3
Impor Barang dan Jasa	78,44	90,04	(11,91)	(7,16)	2,85 - 4,07	(17,2) - (13,7)	(1,9) - (1,1)	3,2 - 4,0

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Indikator makro pembangunan daerah lainnya yang diukur untuk mendukung kinerja pembangunan daerah terkait dengan PDRB dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini. Target indikator makro lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Target Indikator Makro Terkait PDRB Provinsi Riau Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2025
1	PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	183,85 – 203,88
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	27,59
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	4,36
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Poin	0,54
5	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	32,2 – 33,6
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	32,21 – 33,6

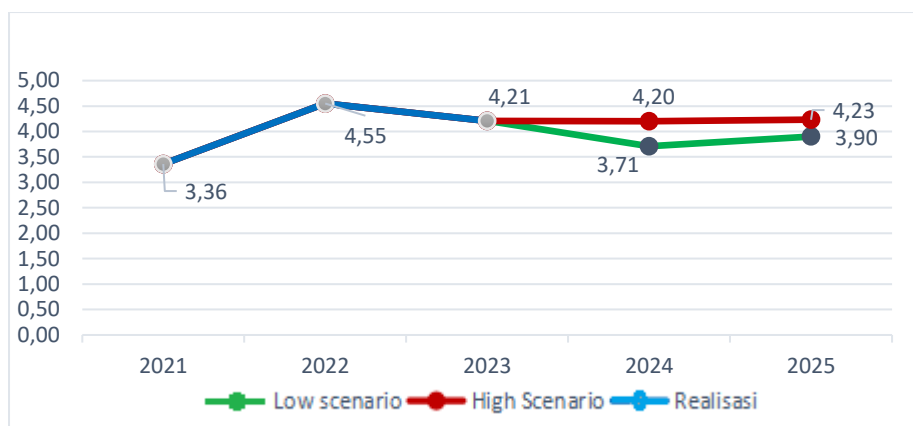
Sumber : Proyeksi KEMD Riau

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2021-2023 berfluktuatif cenderung meningkat, dimana tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan pada angka 4,55 persen, capaian ini merupakan capaian tertinggi pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kemudian tahun 2023 mengalami sedikit penurunan pada angka 4,21 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2023 menurut lapangan usaha ditopang oleh Industri pengolahan sebesar 1,17 persen, pertanian sebesar 0,88 persen. Peningkatan secara sektor terjadi pada meningkatnya volume dan nilai ekspor luar negeri komoditas migas, bubur kertas/pulp dan kertas/karton (sektor industri pengolahan). Meningkatnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit dan produksi kehutanan (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan). Meningkatnya produksi minyak mentah dan produksi batubara (sektor pertambangan). Meningkatnya jumlah kendaraan baru dan terkendalnya tingkat inflasi (sektor perdagangan). Meningkatnya reallisasi pengadaan semen, indeks nilai konstruksi tumbuh positif dan masih berjalannya proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) (sektor konstruksi). Sedangkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Riau tahun 2023 menurut pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 1,51 persen dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,49 persen. Sumber pertumbuhan secara komponen terjadi pada meningkatnya Nilai Tukar Petani sehingga daya beli masyarakat meningkat (komponen konsumsi rumah tangga). Meningkatnya aktivitas LNPRRT terkait persiapan PILPRES tahun 2024 (komponen konsumsi LNPRRT). Meningkatnya belanja pegawai APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta

meningkatnya belanja barang/jasa dan bantuan sosial APBN (komponen konsumsi pemerintah). Menurunnya impor barang modal terutama mesin/pesawat mekanik (komponen PMTB). Menurunnya volume dan nilai ekspor luar negeri komoditas lemak dan minyak hewan serta berbagai produk kimia, meningkatnya volume dan nilai ekspor migas (komponen ekspor luar negeri).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Riau dari tahun 2021 - 2023 dan target tahun 2024 - 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Data BPS Riau dan Proyeksi KEMD Riau

Gambar 3.1
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Riau Tahun 2021- 2025

Target pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan dengan menggunakan metoda *Financial Police Programme* (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025
Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,36	4,55	4,21	3,71 - 4,20	3,90 - 4,23

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang ditargetkan berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3,71 - 4,20 persen dan tahun 2025 sebesar 3,90 - 4,23 persen. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2025

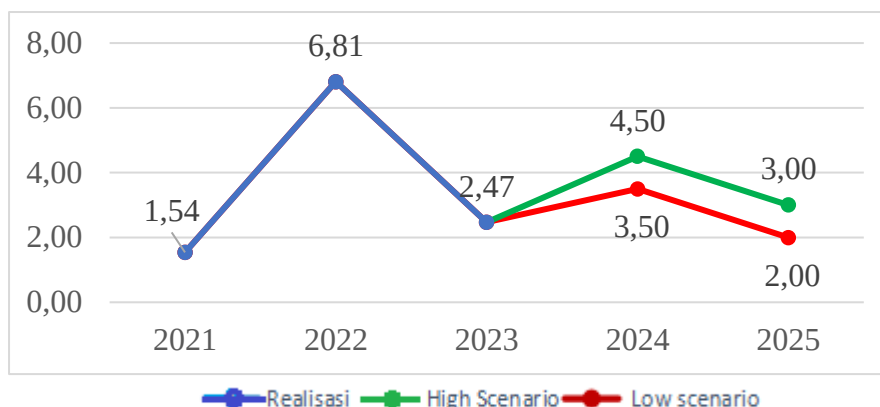
adalah masih tingginya daya beli masyarakat akan meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat. Meningkatnya investasi juga terus tumbuh dengan adanya pengembangan Kawasan Industri dan pembangunan infrastruktur jalan tol. Pengembangan hilirisasi bioindustri pada Kawasan strategis industri Medan-Dumai-Pekanbaru Lanjutan pembangunan Tol Trans Sumatera Kisaran-Dumai, Pekanbaru-Padang dan Pekanbaru-Jambi. Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan pelabuhan Dumai. Beroperasinya blok Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan dan pengembangan kilang Pertamina (RDMP) Dumai untuk meningkatkan produksi minyak.

3.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10%-30% setahun, berat antara 30%-100% setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi di Provinsi Riau Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan trend fluktuasi yang sangat signifikan. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,81% namun turun kembali ditahun 2023 sebesar 2,47 persen. Inflasi tahunan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau akibat kenaikan ongkos distribusi produk. Adapun Komoditas dominan penyumbanginflasi Riau disebabkan karena: Kenaikan BBM akibat kebijakan pemerintah masih berimbas kepada kenaikan tarif angkutan & ongkos distribusi barang; Kenaikan harga beras disebabkan preferensi masyarakat Riau dengan beras premium daripada beras Bulog; dan Kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan kebijakan kenaikan cukai secara bertahap. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi tahunan, antara lain bensin, beras,

rokok kretek filter, angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, nasi dengan lauk, mobil, bakso siap santap, sewa rumah, dan lainnya.



Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Gambar 3.2
Grafik Perkembangan dan Target Inflasi Provinsi Riau
Tahun 2021-2025

Target laju inflasi Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan, tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,0 - 3,0 persen, yang dipengaruhi ekspektasi inflasi yang menurun, tekanan *imported inflation* yang terkendali, dan pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan. Terkendalnya inflasi sebagai hasil dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID, memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pengendalian inflasi, termasuk menyambut periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Secara rinci perkembangan capaian dan target inflasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Laju Inflasi Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024 – 2025 Provinsi Riau

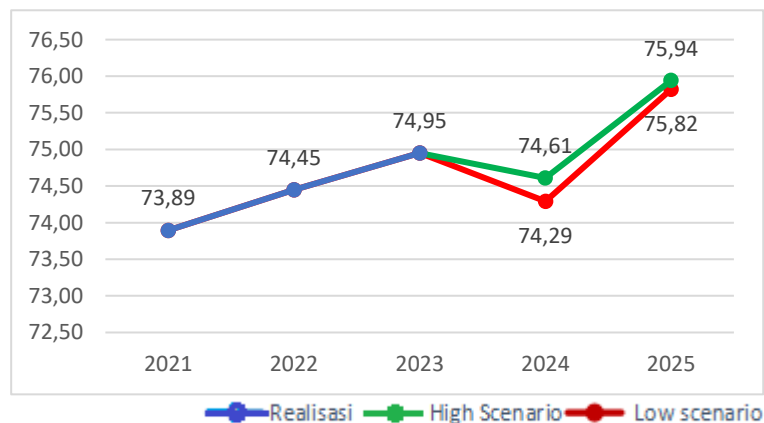
Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Inflasi (%)	1,54	6,81	2,47	3,5 - 4,5	2,0 – 3,0

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kinerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Ada 3 (tiga) dimensi dalam pengukuran IPM, yaitu : a) Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH); b) Dimensi Pengetahuan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS 7 th+) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25 th+); c) Dimensi Standar Hidup Layak diukur dengan Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan. Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Provinsi Riau terus mengalami kemajuan. IPM provinsi Riau rata-rata tumbuh sebesar 0,71% pertahun dan meningkat dari level sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$) menjadi tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) sejak tahun 2014.

IPM Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,50 point atau 0,67 persen dibandingkan tahun 2022 karena terjadinya peningkatan seluruh komponen pembentuk IPM baik umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada grafik dibawah menggambarkan perkembangan dan target IPM Provinsi Riau. Capaian IPM Provinsi Riau Tahun 2023 lebih tinggi dari IPM Nasional (74,39 poin) dan merupakan peringkat 7 (tujuh) dari 38 Provinsi dan peringkat 2 (dua) dari 10 Provinsi di Sumatera.



Sumber :Data BPS Riau dan proyeksi Riau

Gambar 3.3

Grafik Perkembangan dan Target IPM Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Target IPM Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan IPM Riau tahun 2024 sebesar 74,61 – 74,29 poin dan tahun 2025 sebesar 75,82 - 75,94 poin, hal ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun

2023, dari sisi kesehatan bayi yang lahir tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup 0,38 tahun lebih lama dibandingkan bayi yang lahir pada tahun 2023. Dari sisi Pendidikan pada Tahun 2025 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,54 tahun atau hampir setara dengan menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Secara rinci perkembangan realisasi dan target IPM dengan indikator pembentuk IPM Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

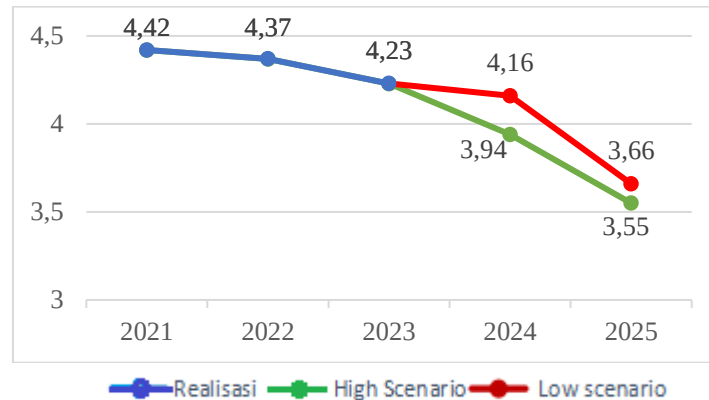
Tabel. 3.7
Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 –2023 dan Target 2024-2025
Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,89	74,45	74,95	74,29 – 74,61	75,82 - 75,94
Angka Harapan Hidup (AHH)	71,67	71,95	74,18	72,29 – 72,34	74,56
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,19	9,22	9,32	9,40 – 9,45	9,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,28	13,29	13,30	13,44 – 13,60	13,54
Pengeluaran per Kapita	10.736	11.158	11.890	11.428 – 11.515	11.820

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yang sudah, mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Provinsi Riau telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Perkembangan TPT Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami perbaikan, dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sebesar 0,05 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan terus menurun 0,14 persen tahun 2023. Hal ini disebabkan karena banyaknya investasi yang terus meningkat masuk ke Riau sehingga berdampak kepada peluang kerja dan kesempatan kerja serta penduduk usia kerja.



Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Gambar 3.4

Grafik Perkembangan dan Target TPT Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 3,94 - 4,16 persen sedangkan tahun 2025 sebesar 3,91 – 4,05 persen mengalami perbaikan 0,18 – 0,32 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini diprediksikan semakin membaiknya perekonomian Riau berdampak terhadap penurunan angka pengangguran dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk rata pertumbuhannya 1,76 persen pertahun maka bertambahnya penduduk usia kerja, adanya penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha dan UMKM. Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi banyak penduduk banyak melakukan usaha sendiri atau secara online sehingga menciptakan peluang kerja secara mandiri. Secara rinci proyeksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.8

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024-2025 Provinsi Riau

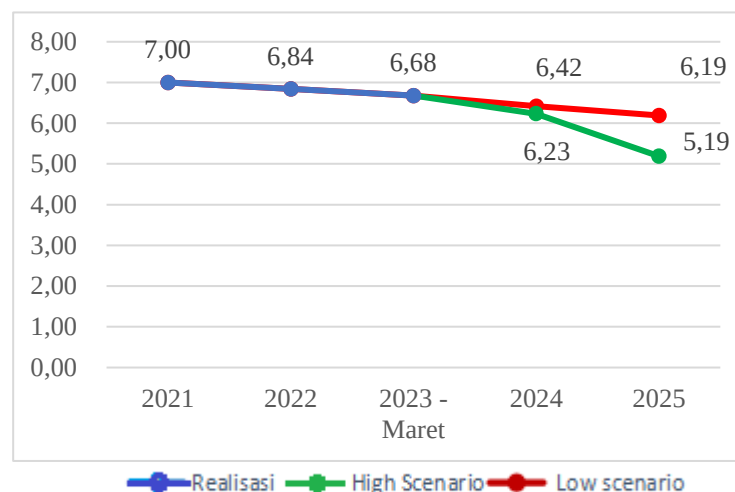
Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,42	4,37	4,23	3,94 - 4,16	3,55 – 3,66

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

3.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan (setara 2.100 kkal per kapita per hari), garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau dari Tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami penurunan setiap tahunnya artinya kondisinya membaik, dimana pada bulan maret tahun 2023, persentase penduduk miskin sebesar 6,68 persen, mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian Provinsi Riau ini lebih baik dari capaian nasional (9,36 persen). Komoditi makanan dengan kontribusi terbesar dalam garis kemiskinan di Riau adalah beras sedangkan komoditi bukan makanan adalah perumahan, dapat disimpulkan peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan. perkembangan secara rinci perkembangan tingkat kemiskinan Riau dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Gambar 3.5
Grafik Perkembangan dan Target Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau
Tahun 2021-2025

Persentase penduduk miskin Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan persentase penduduk miskin Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 6,23 - 6,42 persen dan tahun 2025 sebesar 5,19 - 6,19 persen, diasumsikan akan mengalami perbaikan atau turun sebesar 0,23 - 1,04 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023, karena diprediksi kondisi perekonomian Riau semakin membaik. kebijakan

penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan pengurangan beban masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan sosial/masyarakat dan pengurangan kantong kemiskinan melalui program rumah layak huni, sanitasi dan lain-lain. Secara rinci perkembangan dan proyeksi jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2023 dan
Target Tahun 2024 – 2025 Provinsi Riau

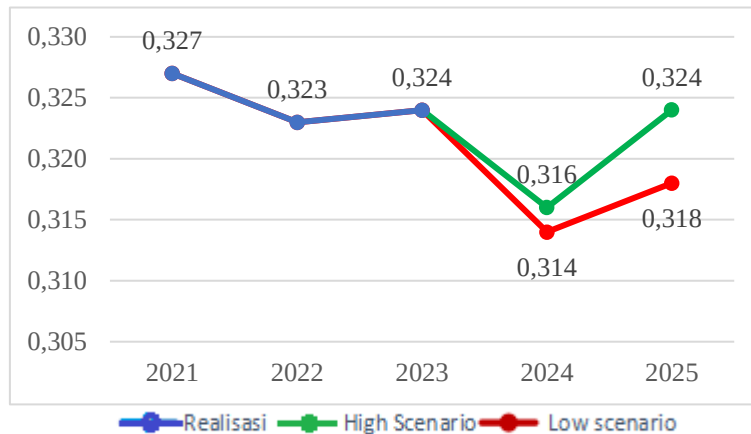
Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 - Maret	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	500.810	493.130	485.660	418.900 - 431.900	377.332 – 436.716
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,00	6,84	6,68	6,23 – 6,42	5,19 - 6,19

Sumber : Data BPS Riau dan Proyeksi KEMD Riau

3.1.7. Gini Rasio

Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Selama periode 2021-2023, angka gini rasio berkisar antara 0,324-0,327 dengan tren berfluktuatif, dimana tahun 2022 mengalami penurunan 0,004 dan menaik tahun 2023 sebesar 0,001 atau sebesar 0,324, capaian ini lebih baik bila dibandingkan capaian nasional sebesar 0,388, artinya bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata, walaupun gini ratio perkotaan lebih tinggi dibandingkan gini rasio perdesaan. Pergerakan kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi yang padat karya dan pembangunan infrastruktur.



Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan dan Target Gini Rasio Provinsi Riau
Tahun 2021-2025

Gini Rasio Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan Gini Rasio Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 0,314 - 0,316 dan tahun 2025 sebesar 0,318 - 0,324. Capaian ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak relatif lebih merata sehingga dapat dikatakan kualitas pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat makin membaik. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (*self services development*). Rincian perkembangan realisasi tahun 2021 - 2023 dan target tahun 2024 – 2025 Gini Rasio Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Gini Rasio Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024 - 2025 Provinsi Riau

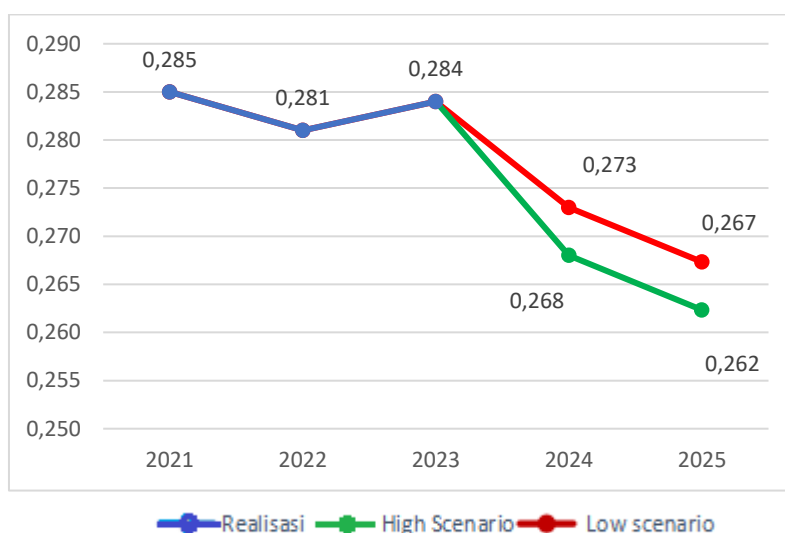
Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Gini Rasio	0,327	0,323	0,324	0,314 - 0,316	0,318-0,324

Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

3.1.8. Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi (Williamson dalam Akita

and Kataoka, 2003): Indeks Williamson digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kabupaten dan Indeks Ketimpangan Williamson kota. Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Perkembangan Indek Ketimpangan Williamson Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami fluktuasi dimana nilai terus menurun dari 0,285 turun menjadi 0,284, hal ini diindikasikan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau mulai merata dan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang merata dan tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah.



Sumber : Data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Gambar 3.7
Grafik Perkembangan dan Target Indeks Ketimpangan Williamson
Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Target Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025 diprediksi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 karena PDRB masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau juga mengalami peningkatan. Rincian perkembangan realisasi tahun 2021 - 2023 dan target tahun 2024 - 2025 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Indeks Ketimpangan Williamson tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024 - 2025
Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Ketimpangan Williamson	0,285	0,281	0,284	0,268 - 0,273	0,262 - 0,267

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

3.1.9. Indikator Makro Lainnya

Tujuan pembangunan daerah dapat diukur dari indikator utama pembangunan yang merupakan alat ukur untuk melihat capaian dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Target Indikator makro lainnya tahun 2025 yang merupakan hasil penyelarasan indikator makro di pusat dengan daerah, dimana indikator ini menggambarkan karakteristik daerah yang mencerminkan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tahun 2025 Provinsi Riau

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2025
1	Indeks Modal Manusia	Poin	0,56
2	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Poin	32,87
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK		20
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	38,05
5	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	29
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	45,70
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	16.000
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	-	-
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	6,1
10	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Poin	8,27
11	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Poin	70

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2025
12	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	4,11
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,06
14	Indeks Integritas Nasional	Poin	74,52
15	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	Poin	73,80 - 76,86
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Poin	0,46 – 0,48
17	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	73,50 – 73,51
18	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,44
19	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1.500
20	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Poin	11,07

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Secara teknis tentang keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya.

Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya :

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah.
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota.

Upaya Provinsi Riau tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Dan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

(1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Pemutakhiran database pajak dan retribusi daerah melalui upaya permohonan akses terhadap Nomor Induk Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
3. Menerapkan aplikasi penerimaan secara elektronik (*online system*) serta penerapan transaksi digital;
4. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;
5. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*online system*) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;

6. Optimalisasi penerapan e-Samsat melalui Integrasi dengan Samsat *On-Line* Nasional, Pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan Telkomsel T-cash serta penambahan *multichannel bank*;
7. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat transaksi antar jemput antar kampung (Samsat Tanjak), dan samsat Payment Point bekerjasama dengan Bank Riau Kepri;
8. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
9. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah;
10. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
11. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self assessment;
12. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja;
13. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi;
14. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah;
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan;
16. Mengoptimalkan penerimaan yang dapat meningkatkan DBH SDA.

(2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4

tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

2. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara realtime;
4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah;
6. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Kepri;
7. Pembentukan BUMD baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan umum;
8. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam Rancangan Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya pasal 11 ayat 3 dengan menambahkan satu point sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui seperti sektor kehutanan dengan Sumber Daya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor perikanan seperti budidaya perikanan. Dan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perkebunan, disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Sarana Prasarana di UPT/UP;

2. Penambahan Samsat *Drive Thru*;
3. Penambahan armada samsat keliling;
4. Penggunaan Layanan SMS *Blast* dan SMS *Gateway*;
5. Optimalisasi tilang elektronik termasuk terhadap kendaraan penunggak pajak;
6. Penambahan Unit Pelayanan (UP)/ Samsat Pembantu Baru
7. Samsat *payment point*;
8. Operasional “SIGNAL”
9. Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I yaitu dengan :
 - Untuk tidak melakukan tunda salur DBH Tahun berjalan dan melunasi kurang bayar tahun sebelumnya untuk menjaga kontinuitas likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga dapat mengganggu pembangunan yang telah dianggarkan;
 - Untuk melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil khususnya sektor minyak dan gas bumi yang transparan dengan memaparkan perhitungan factor pengurang.
10. Mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih awal mengeluarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangann R.I tentang alokasi DBH sebagai dasar perhitungan penyusunan APBD.

Realisasi pendapatan Provinsi Riau dari Tahun Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,55 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini bertambahnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Proyeksi pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2025 sebesar Rp. 9,89 Triliun mengalami penurunan sebesar - 1,62 persen bila dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024. Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5,58 Triliun atau sebesar 56,46 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 4,30 Triliun atau sebesar 43,45 persen, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 9,07 Milyar atau sebesar 0,09 persen. Lebih tingginya proporsi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan Provinsi Riau sudah masuk level kemandirian fiskal artinya mampu menggali potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan. Proyeksi Pendapatan tahun 2025 turun -1,62 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024,

penurunan bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Untuk lebih rincinya realisasi dan proyeksi pendapatan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2022-2026
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	8,818,669.76	10,013,836.85	10,061,898.80	9,898,939.63	9,174,884.54
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,696,769.08	5,895,372.60	5,984,937.54	5,588,957.49	5,207,842.92
4.1.01	Pajak Daerah	4,054,918.90	4,412,366.45	4,382,173.08	3,818,903.39	3,907,861.69
4.1.02	Retribusi Daerah	16,684.96	17,097.91	25,970.36	14,120.89	584,640.05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101,607.15	948,660.38	1,097,539.78	1,171,912.50	691,417.06
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	523,558.07	517,247.85	479,254.33	584,020.70	23,924.11
4.2	Pendapatan Transfer	4,113,106.48	4,109,386.21	4,069,181.21	4,300,904.10	3,964,184.48
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,113,106.48	4,109,386.21	4,069,181.21	4,100,904.10	3,964,184.48
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	8,794.20	9,078.04	7,780.04	9,078.04	2,857.14
4.3.01	Pendapatan Hibah	8,794.20	9,078.04	7,780.04	9,078.04	2,857.14

Sumber: BPKAD Prov. Riau, Bapenda Prov. Riau.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Struktur Belanja Daerah tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- 3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

B. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi:

- 1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor,

dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- 3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
- 6) Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

- 1) Belanja bagi hasil.
- 2) Belanja bantuan keuangan.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026, urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
2. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;

3. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah termasuk upaya percepatan pengurangan kemiskinan;
4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
5. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
6. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM);
7. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
8. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;
9. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
 - 1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - 2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15,53 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2022, belanja modal menempati porsi terbesar sebesar 38,08 persen, diikuti belanja bantuan keuangan 34,92 persen dan belanja bagi hasil sebesar 25,08 persen.

Pada tahun 2025 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau diproyeksikan sebesar Rp. 10,34 Triliun mengalami penurunan sebesar -6,15 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Komposisi belanja tahun 2025 sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar 26,15 persen (Rp.2,70 Triliun), Belanja barang dan Jasa sebesar 34,43 persen (Rp. 3,56

Triliun) merupakan belanja paling besar, Belanja Hibah sebesar 3,85 persen (Rp. 397,77 Milyar), Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,19 persen (Rp. 19,59 Milyar), Belanja Modal sebesar 17,33 persen (Rp. 1,79 Triliun), Belanja Tidak Terduga sebesar 0,48 persen (Rp. 50,00 Milyar), Belanja Transfer Kepada Kabupaten/Kota sebesar 17,57 persen (Rp. 1,81 Triliun). Belanja Pemerintah Provinsi Riau memprioritas alokasi kepada program yang secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah. Untuk mewujudkan empat prioritas pembangunan tersebut. maka program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi prioritas dapat ditingkatkan anggarannya sehingga fokus pembangunan pada tahun 2025 dapat tercapai. Proyeksi belanja tahun 2025 turun -6,15 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan terjadi pada belanja modal dan belanja transfer. Secara rinci realisasi tahun 2022 – 2023 dan proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 – 2026 dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 – 2026
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA	9,102,467.42	10,515,653.05	11,020,380.66	10,342,843.60	9,424,884.54
5,1	Belanja Operasi	5,501,708.10	5,786,839.07	6,513,647.37	6,683,634.36	6,507,865.03
5.1.01	Belanja Pegawai	2,318,631.23	2,549,818.68	2,945,575.35	2,705,073.40	2,943,084.63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,826,881.50	2,811,226.35	2,956,052.13	3,561,192.49	3,312,297.50
5.1.03	Belanja Hibah	314,456.06	390,363.36	567,889.71	397,778.22	208,901.63
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	41,739.31	35,430.67	44,130.18	19,590.23	43,581.27
5,2	Belanja Modal	1,508,534.41	2,082,952.35	2,211,686.32	1,792,430.63	1,320,286.42
5,3	Belanja Tidak Terduga	9,830.85	249.78	40,075.75	50,000.00	50,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9,830.85	249.78	40,075.75	50,000.00	50,000.00
5,4	Belanja Transfer	2,082,394.06	2,645,611.86	2,254,971.22	1,816,778.60	1,546,733.08
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,665,840.18	2,083,597.55	1,794,967.84	1,255,038.35	1,184,743.58
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	416,553.88	562,014.31	460,003.38	561,740.24	361,989.50

Sumber: BPKAD Prov. Riau dan Bapenda Provinsi Riau

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Pada Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -41,54 persen yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp. 984,05 Milyar sedangkan pada tahun 2024 penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Riau memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 443,90 Milyar. Dan tidak mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan (penyertaan modal), sehingga netto pembiayaan sebesar Rp. 443,90 Milyar. Rincian realisasi dan proyeksi pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Riau 2022 – 2026
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	984,056.60	575,261.04	958,481.86	443,903.96	250,000.00
1.1.	Penggunaan SILPA	983,965.01	575,258.94	958,481.86	443,903.96	250,000.00
1.2.	Pencairan Dana Cadangan					

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.3.	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat					
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya					
1.5.	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank					
1.6.	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank					
1.7.	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)					
1.8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	91.58	2.10			
1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya					
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen					
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan					
2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah					
2.3.	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat					
2.4.	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya					
2.5.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank					
2.6.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank					
2.7.	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)					
2.8.	Pemberian Pinjaman Daerah					
2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya					

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

3.2.4. Peta Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran

kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk :

- Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
- Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
- Pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah;

- d. Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/ atau
- e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi kapasitas fiskal Provinsi Riau Tahun 2023 mengalami peningkatan bilang dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan proyeksi tahun 2024 - 2026 mengalami penurunan. Rasio kapasitas fiskal tahun 2022 dan 2025 dikelompok pada kategori sangat tinggi (2,46 dan 2,36), tahun 2023 dan 2024 dikelompok pada kategori tinggi (2,34 dan 2,13) sedangkan tahun 2026 dikelompokan pada kategori sedang (1,8) secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Kapasitas Fiskal Provinsi Riau 2022 – 2026
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,696,769.08	5,895,372.60	5,984,937.54	5,588,957.50	5,207,842.92
2	Pendapatan Transfer	4,113,106.48	4,109,386.21	4,069,181.21	4,300,904.10	3,964,184.48
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8,794.20	9,078.04	7,780.04	9,078.04	2,857.14
4	Belanja Pegawai	2,318,631.23	2,549,818.68	2,945,575.35	2,705,073.41	2,943,084.63
5	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Belanja Bagi Hasil	1,665,840.18	2,083,597.55	1,794,967.84	1,255,038.36	1,184,743.58
7	Penerimaan Pembiayaan	984,056.60	575,261.04	958,481.86	443,903.97	250,000.00
8	Pengeluaran Pembiayaan	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KAPASITAS FISKAL = (1+2+3+7) - (4+5+6+8)		5,693,254.95	5,955,681.66	6,279,837.47	6,382,731.84	5,297,056.32
RASIO KAPASITAS FISKAL		2.46	2.34	2.13	2.36	1.8

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Riau berakhir pada tahun 2024.

Selanjutnya tahun 2025 juga merupakan tahun pertama pertahapan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang sedang disusun saat ini. Pembangunan Riau dalam RPD Tahun 2025-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan Riau yang semakin maju dan sejahtera melalui pemerataan infrastruktur untuk penguatan ekonomi daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025 – 2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi. Sedangkan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan sejumlah Agenda Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1) AP 1 : Transformasi Sosial

Transformasi sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar, Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial.

2) AP 2 : Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi ditempuh melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3) AP 3 : Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kapasitas ASN, regulasi efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4) AP 4 : Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5) AP 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025-2026, juga mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2025.

Tujuan pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam RPD Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
2. Meningkatkan pembangunan budaya melayu
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur
4. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2025
					TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur >25tahun	Tahun	9,5
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,54
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,56
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,37
		Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	77,11
2.	Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Melayu	Meningkatnya Ketahanan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	Persen	54,54
		Meningkatnya Ekspresi dan Warisan Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	47,69
			Nilai Warisan Budaya	Nilai	57,40

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2025
					TARGET
3.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara Pertahun	Persen	1,79
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum	Persen	100
			Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	100
		Meningkatnya Akses Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	Persen	95,68
4.	Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,41
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	17,94
5.	Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dan Inklusif	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan	PDRB perkapita	Dalam juta Rupiah	160,97
			Gini Rasio	Poin	0,318-0,324
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	167,52
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Juta Rupiah	188,62

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2025
					TARGET
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,37
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Poin	0,8289
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,05
		Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara	Milyar/Rupiah	26.947,14
6.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN Yang Profesional	Nilai Survey Penilaian Integritas	Persen	66,07
			Nilai Survey Indeks BerAKHLAK	Persen	60,90
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	86,15
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Digital Yang Lincuh Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,06
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Digital Yang Lincuh Kolaboratif, dan Akuntabel	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai	73,03
			Capaian Akutabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP

Sumber : RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026

4.1.3 Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

Dalam mempercepat pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Riau perlu bersinergi dengan pembangunan nasional dan kabupaten/kota. Adapun salah satu strategi untuk mendorong keberhasilan pembangunan daerah yaitu dengan menyelaraskan tema, prioritas dan arah kebijakan nasional dengan Provinsi Riau. Maka dirumuskan Tema Prioritas Pembangunan daerah dan arah kebijakan Provinsi Riau sebagai mana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.2
Keselarasan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan antara Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2025

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI RIAU
Tema	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi
Prioritas	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas Sdm
	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi
	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI RIAU
	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi
	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	
	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Peningkatan Tata Kelola
	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	

Sumber : Bappedalitbang Provinsi Riau (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keselarasan tema antara RKP dengan RKPD sudah selaras yang difokuskan pada penguatan ekonomi. Demikian juga dengan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan. Dengan arti kata bahwa Provinsi Riau juga berkontribusi mewujudkan pembangunan secara nasional menuju Indonesia Emas.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran pembangunan tahun 2025 target indikator pembangunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.3
Sandingan Indikator Makro RKP Dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RKP 2025	TARGET 2025	
			RPD	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	3,67	3,90 - 4,23
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	4,05	3,55 – 3,66
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	6,51	5,19 - 6,19
4	Gini Rasio (Poin)	0,379 – 0,382	0,303	0,318-0,324
5	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,56	-	0,56
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6	17,94	20

Sumber : Bappedalitbang Provinsi Riau (diolah)

4.2. Prioritas Pembangunan

4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran (Pokir) disampaikan oleh DPRD Provinsi Riau yang merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokir juga diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokir ini juga sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025 yang disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang). Jumlah usulan Pokir yang masuk sebanyak 2.715 usulan dengan usulan diakomodir sebanyak 741 usulan yang akan dimasukkan didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.4
Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Provinsi Riau
Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	USULAN DIAKOMODIR
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2.156	650
2	Dinas Pendidikan	167	36
3	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	74	1
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	69	5
5	Dinas Pariwisata	55	22
6	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	31	4
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	24	2
8	Dinas Kesehatan	19	0
9	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	18	4
10	Badan Pendapatan Daerah	15	0
11	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	14	6
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	13	0
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10	1
14	Dinas Perhubungan	9	7
15	Dinas Kebudayaan	11	1

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	USULAN DIAKOMODIR
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9	1
17	Dinas Perkebunan	7	0
18	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	6	1
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	0
20	Dinas Sosial	3	0
JUMLAH		2.715	741

Sumber : Bappedalitbang Provinsi Riau

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat disamping dari hasil evaluasi pembangunan, permasalahan daerah dan isu strategis yang diidentifikasi serta keselarasan dengan pembangunan nasional. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 mempedomani tema dan prioritas kebijakan RKP tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2025 **“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi”** untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan sub tema dan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) sub tema antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM;
 - a) Pemenuhan Prasarana Dasar;
 - b) Pendidikan;
 - c) Kesehatan;
 - d) Kesetaraan Gender;
2. Peningkatan Tata Kelola;
 - a) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;

3. Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan;

- a) Pemenuhan Infrastruktur;
- b) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

4. Penguatan Ekonomi;

- a) Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe);
- b) Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan);
- c) Penguatan Ekonomi Masyarakat;
- d) Pariwisata Berbudaya Melayu.

Dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Provinsi Riau tahun 2025, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Program Prioritas yang mendukung secara langsung terhadap hal sebagaimana dimaksud. Adapun Program dan pagu pendanaan yang dibutuhkan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Daftar Prioritas, Program Prioritas disertai Pagu Pendanaan dan
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2025

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN KUALITAS SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Belum berfungsi secara optimal SPAM Regional durolis (44,8% dari target sambungan rumah tangga) dan SPAM regional Pekanbaru - Kampar (57,1% dari target sambungan rumah tangga)	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Prasarana Dasar Relatif Rendah	Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional	Fasilitasi peningkatan jumlah sambungan rumah tangga di Kabupaten/ Kota yang termasuk SPAM regional serta optimalisasi <i>idle capacity</i>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan	440 Liter / Detik	199,999,685		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan	440 liter/detik	199,999,685		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
											Permukiman Dan Pertanahan
						Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	12 Kabupaten/Kota	199,999,685	12 Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Pemenuhan akses air minum layak masih rendah tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hulu (73,31), Pelalawan (82,81), Kuantan Singingi (83,02) , Rokan Hilir (86,56), Indragiri		Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Optimalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana SPAM Regional						

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		Hilir (88,76)									
		Keluarga beresiko stunting yang tidak mempunyai sumber air minum layak 140.744 KK (PK 2023)			Penyusunan rencana pembangunan penyediaan air minum Provinsi Riau						
		Masih rendahnya sarana prasarana permukiman bagi disabilitas			Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) khususnya penyediaan sarana air minum						
		Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama		Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik	Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik di Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penyediaan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	100 Persen	1,500,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		dan tempat pembuangan akhir tinja, pada tahun 2023 di bawah 60% adalah Kabupaten Indragiri Hilir 51,31% dan Kabupaten Meranti 53,26%									
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1,500,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dok	1,500,000,000	Indragiri Hulu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
											Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Keluarga beresiko stunting yang tidak mempunyai jamban yang layak 137.069 KK (PK 2023)									
		Rasio elektrifikasi tahun 2023 di Kabupaten Pelalawan (83,14), Rokan Hilir(86,95), Kepulauan Meranti (88,12)		Peningkatan akses dan infrastruktur Energi	Pembangunan jaringan listrik desa belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik	100 persen	22,223,411,160		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
						Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 laporan	431,695,495		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 laporan	431,695,495	12 Kabupaten/ Kota	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
						Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1021 unit	21,791,715,665		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
						Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 dokumen	339,082,630	12 Kabupaten/ Kota	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
						Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang,	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan	1 dokumen	124,486,300	Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH I)	Perdesaan pada Cabang Dinas Wilayah I				
						Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH II)	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada Cabang Dinas Wilayah II	1 dokumen	124,487,595	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Kuantan Singingi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
						Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH III)	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada Cabang Dinas Wilayah III	1 dokumen	124,487,565	Kab. Siak, Kab. Pelalawan dan Kab. Kep. Meranti	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
						Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang,	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan	1 dokumen	124,487,859	Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Perdesaan pada Cabang Dinas Wilayah IV				
						Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1021 unit	20,954,683,71 ⁶	12 Kabupaten/ Kota	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Pendidikan	Rata-rata APK SMA/MA terendah pada Indragiri Hilir (70,86 poin), Kepulauan Meranti (76,48 poin), dan Rokan Hilir (76,88 poin)		Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	Pembangunan USB dan RKB	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	82,45 persen	55,477,830,92 ³		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,45 persen	28,580,999,61 ³		Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	9,999,999,653	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	27 Ruang	18,580,999,960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,46 persen	21,864,577,550		Dinas Pendidikan
						Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	13,015,456,550	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	23 Ruang	8,849,121,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B	58,04 Persen	5,032,253,760		Dinas Pendidikan
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	5,032,253,760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										, Semua Kel/Desa	
					Pemenuhan Operasional Sekolah Menengah, Khusus dan Sekolah Terbuka	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	82,45 persen	961,022,282,575		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,45 persen	608,187,518,108		Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4234 Peserta didik	5,745,099,662	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	469 Satuan Pendidikan	269,113,748,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	446 Orang	290,245,985,976	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	459 Satuan Pendidikan	43,082,684,470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,46 persen	327,076,499,317		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	312 Satuan Pendidikan	172,224,712,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	312 Orang	135,708,900,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	19,142,887,317	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B	58,04 Persen	25,758,265,150		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	94 Satuan Pendidikan	16,268,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										, Semua Kel/Desa	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	100 Orang	5,411,220,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	4,079,045,150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		APS usia 4-18 tahun penyandang disabilitas (56,75 poin realisasi tahun 2023)			Rehab ruang kelas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	82,45 persen	20,768,399,654		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,45 persen	12,464,207,218		Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	47 Ruang	12,464,207,218	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,46 persen	6,498,740,686		Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	19 Ruang	6,498,740,686	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B	58,04 Persen	1,805,451,750		Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	10 Ruang	1,805,451,750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
				Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)	Pemagangan dan sertifikasi calon lulusan SMK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	82,45 persen	19,142,887,317		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,46 persen	19,142,887,317		Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	19,142,887,317	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
				Penyelenggaraan pendidikan inklusif	Advokasi Pendidikan Inklusi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	82,45 persen	646,623,112		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,45 persen	249,999,865		Dinas Pendidikan
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	24 Kegiatan	249,999,865	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,46 persen	219,999,512		Dinas Pendidikan
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	24 Kegiatan	219,999,512	Semua Kota/Kab, Semua	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Kecamatan , Semua Kel/Desa	
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B	58,04 Persen	176,623,735		Dinas Pendidikan
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	24 Kegiatan	176,623,735	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		Persentase sertifikasi guru SMA (39,7%), SMK (29,7%) dan SLB (24,9%) masih rendah		Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Pelatihan guru dan tenaga pendidik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	82,45 persen	11,462,350,065		Dinas Pendidikan
					Pelatihan sertifikasi guru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,45 persen	6,230,163,953		Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	825 Orang	6,230,163,953	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Sekolah Menengah Atas	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			, Semua Kel/Desa	
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,46 persen	3,851,719,452		Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2017 Orang	3,851,719,452	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Khusus		58,04 Persen	1,380,466,660		Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	216 Orang	1,380,466,660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		Literasi SMA (69,23), SMK (65,94) dan numerasi SMA (58,64),		Peningkatan Literasi masyarakat	Akreditasi pustaka tingkat provinsi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi	30 Pustaka	1,130,956,766		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		SMK (55,81)									
		Minat baca masyarakat yang diukur dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Riau 2023 sebesar 66,88 poin yang masih dibawah capaian Provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir (48,99), Rokan Hilir (50,36), Rokan Hulu (52,69),				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Perpustakaan Khusus yang dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	1,130,956,766		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		Bengkalis (53,86), Kampar (56,70), Indragiri Hulu (60,88), Kepulauan Meranti (63,19) dan Kuantan Singingi (64,78)									
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	139,999,992	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	30,507,953	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
						Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan	10 Layanan	404,217,713	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
							Melalui Peningkatan Koleksi				
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	456,239,977	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
						Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	99,991,131	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				Menumbuhkan embangkan pengamalan kehidupan beragama	Pemberian Beasiswa Hafidz al-quran	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan	100 Persen	3,744,500,000		Sekretariat Daerah
						Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen	98,499,960,594		Sekretariat Daerah
						Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	98,499,960,594	Dalam provinsi Riau	Sekretariat Daerah
					Peningkatan toleransi antar umat beragama	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	80 Persen	6,460,803,595		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						KARAKTER KEBANGSAAN					
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	6,460,803,595		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	7,999,680	Kota Pekanbaru	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	4,999,825	Kota Pekanbaru	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	250 Orang	2,162,761,876	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	117,962,607	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	180,539,870	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	1 Dokumen	169,529,329	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya Purnapaskibraka Duta Pancasila	36 Orang	30,161,276	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	4,600,000	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Terlaksananya Penugasan Paskibraka	1 Dokumen	1,080,859,916	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	25,310,110	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	26,079,125	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	36 Orang	2,649,999,981	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
											Politik Provinsi Riau
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	3,15 Nilai	189,382,410		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3 Nilai	316,509,759		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	505,892,169		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	37,373,399	Kota Pekanbaru	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	1 Dokumen	279,136,360	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	2,019,070,114	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	76,265,179	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	113,117,231	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Timdu PKS Kab/Kota yang melaksanakan RAD secara efektif	66,67 Persen	4,002,927,034		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	4,002,927,034		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penanganan Konflik Sosial					
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	4,999,847	Kota Pekanbaru	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5,070,488	Kota Pekanbaru	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penanganan Konflik di Daerah					
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	1,075,934,063	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	770,242,623	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penanganan Konflik di Daerah					
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	280,938,096	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,865,741,917	Provinsi Riau	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
	Kesehatan	Kualitas layanan rujukan skala Pprovinsi yang belum optimal (ketersediaan)		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan	Peningkatan sarana prasarana rumah sakit rujukan Provinsi Riau	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	3.100.000 Jiwa 86% 1,26 Per 1000	358,961,130,228.		

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		tempat tidur layanan intensif seprovinsi riau 64,37%, dan rumah sakit pemerintah provinsi 74,87%)					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Penduduk			
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	93 Persen	92,448,866,615		Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	410 Unit	38,454,537,645	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi, Rsud	Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi, Rsud Arifin Achmad

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Arifin Achmad	
						Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2857 Unit	15,000,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi, Rsud Arifin Achmad	Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan, Upt. Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan, Rsud Petala Bumi, Rsj Tampan
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	17 Paket	14,568,546,437	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi, Rsud Arifin Achmad	Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan, Upt. Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan, Rsud Petala Bumi, Rsud Arifin Achmad
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Dokumen	744,228,425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, R	Upt. Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Minuman ke Fasilitas Kesehatan				umah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi,Rsud Arifin Achmad	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	236 Unit	13,311,356,200	Rsud Petala Bum, ,Rumah Sakit Jiwa Tampani	Rsud Petala Bumi,Rumah Sakit Jiwa Tampan,Rsud Arifin Achmad
						Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1477 Unit	4,637,265,908	Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi,Rsud Arifin Achmad	Rsud Arifin Achmad,Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
						Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	12 Unit	5,382,932,000	Rsud Arifin Ahmad, ,Rumah Sakit Jiwa Tampani	Rsud Arifin Achmad, Rs Jiwa Tampan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	350,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan	100 Persen	1,768,543,399		Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit	1,768,543,399	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi, Rsud Arifin Achmad	Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan, Dinas Kesehatan, Rsud Petala Bumi, Rs Jiwa Tampan
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	100 Persen	1,310,969,616		

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	1,310,969,616	Pekanbaru	Rsud Arifin Achmad
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	263,432,750,598	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	10.584 Orang	855,110,601	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3 dokumen	799,999,700	Provinsi Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
		Masih tingginya prevalensi balita stunting di Provinsi Riau 17,00%, khususnya di Indragiri		Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	Peningkatan kualitas SDM kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	750,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		Hilir (28,5%), Rokan Hulu (22%) dan Siak (22%)									
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	635,149,971	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan, Rs Jiwa Tampan, Rsud Arifin Ahmad
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	2,788,929,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dan Rsud Petala Bumi, Rsud Arifin Achmad	Dinas Kesehatan, Rsud Petala Bumi, Rs Jiwa Tampan
						Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
		Masih tingginya jumlah			Dukungan layanan jaminan	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	925,000,000	Semua Kota/Kab, Semua	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		kematian ibu dari fase nifas sebesar 42% dari 114 kematian ibu tahun 2022			kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Kesehatan Ibu dan Anak				Kecamatan , Semua Kel/Desa	
						Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 orang	915,700,114	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Upt. Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan
		Rendahnya Treatment Coverage (TC) TBC Provinsi Riau sebesar 42,8% dari target nasional 80% tahun 2022				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	174,153,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kasus HIV dari 570 kasus tahun 2021 menjadi				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	634 orang	276,252,525	Provinsi Riau	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		835 kasus tahun 2022									
		Masih rendahnya deteksi dini penyakit tidak menular (cakupan layanan hipertensi 59,55%)				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 Dokumen	833,431,687	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
		Daerah yang belum mencapai cakupan UHC (Universal Health Coverage) di Kab. Rohul dan Kab. Rohil				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	254,329,024,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	100 Persen 76 Persen	9,201,860,538	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	12 Kab/Kota	8,609,585,868	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen	8,609,585,868	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	249,999,772	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	249,999,772	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jenis UKBM yang dibina	4 UKBM	342,274,898	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	4 Dokumen	342,274,898	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
	Kesetaraan Gender	Tingginya indeks IKG tahun 2022 diatas Provinsi Riau (0,47) di Kabupaten Pelalawan (0,64), Indragiri Hulu (0,62), Rokan Hulu (0,59), Kuantan Singingi (0,58), Indragiri	Tingginya kesenjangan di Kabupaten/Kota dalam hal akses dan partisipasi di Bidang Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan dan Politik	Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Peningkatan kualitas layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	10 Persen	1,868,561,887		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		Hilir (0,58), Siak (0,54), Kampar (0,53), Rokan Hilir (0,52) dan Kepulauan Meranti (0,5)									
						Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG)	75 Persen	593,562,284		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	2 Laporan	129,999,971	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	463,562,313	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Politik	20 Organisasi	224,999,776		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	50 Orang	124,999,937	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum,	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang di advokasi dan didampingi dalam peningkatan partisipasi	20 Lembaga	99,999,839	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang diadvokasi dan didampingi	20 Lembaga	1,049,999,827		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	9 Lembaga	1,049,999,827	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	82.13 Indeks	124,999,672		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang menyediakan Layanan Komprehensif yang dibangun	8 Lembaga	124,999,672		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	8 Perangkat Daerah	84,999,876	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	39,999,796	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Provinsi Riau	1 Dokumen	64,942,314		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
											Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang tersedia	1 Dokumen	64,942,314		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	64,942,314	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	100 Persen	923,639,470		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang berperan Aktif terhadap Pencegahan TPPO dan KDRT di Provinsi Riau	13 Lembaga	265,499,585		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	165,499,652	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	31 Perangkat Daerah	99,999,933	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan Masyarakat	45 Orang	400,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	45 Orang	400,000,000	12 Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang mendapatkan Pembinaan	13 Lembaga	258,139,885		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	60 Orang	158,139,914	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	99,999,971	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen	598,360,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan	95 Orang	598,360,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 Orang	350,000,000	12 Kabupaten / Kota Se Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	55 Layanan	248,360,000	12 Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang mangalami Peningkatan Capaian Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak	50.77 Persen	790,498,893		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Jumlah Lembaga PHA pada Lembaga yang berperan aktif dan berfungsi	20 Lembaga	181,626,165		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Kewenangan Provinsi					Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif	20 Perangkat Daerah	181,626,165	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dilakukan pembinaan	11 Lembaga	608,872,728		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	6 Kegiatan	288,872,846	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	6 Kegiatan	319,999,882	Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL PRIORITAS PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN KUALITAS SDM									1,480,822,857,057		
PENINGKATAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Masih rendahnya pemenuhan pengembangan kompetensi tahunan ASN 20 JP	Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Penataan Reformasi Birokrasi berbasis Digital	Peningkatan Profesionalisme ASN	Peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100	7,366,151,255		Badan Kepegawaian Daerah
						Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	100	5,753,452,022		Badan Kepegawaian Daerah
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	2,394,186,930		Badan Kepegawaian Daerah

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	865,462,244		Badan Kepegawaian Daerah
						Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7	894,992,840		Badan Kepegawaian Daerah
						Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	55	770,133,358		Badan Kepegawaian Daerah
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN Yang Mengikuti Pelatihan	98 Persen	7,718,627,972		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	1040 Orang	3,536,289,595		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	1 Dokumen	119,016,766	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	1 Dokumen	60,849,118	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1540 Orang	3,193,146,246	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan	1 Dokumen	163,277,465	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pelaporan Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaporan Pengembangan Kompetensi				
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	80 Nilai	3,897,365,913		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi	1 Dokumen	65,036,106	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional					
						Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	45,410,913	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	60 Orang	137,438,260	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	740,223,137	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	1 Dokumen	105,998,824	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	62,677,118	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	670 Orang	2,577,495,811	Kota Pekanbaru,	Badan Pengembangan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Sail, Cinta Raja	Sumber Daya Manusia
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	163,085,744	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	60 orang	284,972,464		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	30 Orang	99,972,696	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	30 Orang	114,999,770	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	1 laporan	69,999,998	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 Persen	1,270,000,000		Inspektorat
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	100 Persen	1,270,000,000		Inspektorat
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-	77 Orang	1,270,000,000		Inspektorat

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 baru mencapai 11,79% atau 84 pejabat		Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	Peningkatan akreditasi layanan pelatihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	100 Persen	6,967,275,856		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	4 Jenis Barang	5,951,155,202		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang diadakan	8 Paket	652,986,696	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	243,652,006	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	4,519,083,000	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	535,433,500	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7 Jenis Barang	1,016,120,654		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	120 Unit	56,000,000	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	323 Unit	191,619,750	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	4 Unit	180,000,000	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	4 Unit	420,113,623	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	1 Unit	168,387,281	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pegawai yang mengikuti diklat fungsional hanya 3% tahun		Penataan manajemen ASN	Penyusunan talent pool ASN	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1 Dokumen	828,676,650	Pekanbaru	Badan Kepegawaian Daerah

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		2023 atau 446 orang ASN									
		Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN tahun 2022 68,33 poin		Peningkatan pelayanan publik inklusi	Peningkatan SDM, Sarana Prasarana, dan kepatuhan SOP	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	728,738,829		Badan Kepegawaian Daerah
						Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	728,738,829	Pekanbaru	Badan Kepegawaian Daerah
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	100	323,960,946		Badan Kepegawaian Daerah
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	99,980,256	Pekanbaru	Badan Kepegawaian Daerah
						Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 orang	223,980,690	Pekanbaru	Badan Kepegawaian Daerah
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0.03	1,529,000,000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	100 Persen	1,529,000,000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha	350,000,000	12 Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	79,000,000	12 Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	1,100,000,000	12 Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang tersedia	100 Persen	150,000,000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	100 Persen	150,000,000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	150,000,000	12 Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau pada domain tata		Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau	Peningkatan kolaborasi pelaksanaan SPBE	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	559,999,458		Badan Kepegawaian Daerah

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		kelola SPBE (2,4) dan domain manajemen SPBE (1,36)									
						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	344,999,786	Pekanbaru	Badan Kepegawaian Daerah
						Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	214,999,672	Pekanbaru	Badan Kepegawaian Daerah
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Domain Layanan SPBE Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3,05 Indeks 87.5 persen	6,539,978,530.00		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau	4 dokumen	6,539,978,530		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi	1 Dokumen	74,999,775	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
							perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				
						Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	74,999,650	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	70,000,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	74,999,475	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
		Masih adanya 2 (dua) Kabupaten yang memiliki desa dengan pelayanan low signal dan blankspot tahun 2022 yaitu Kabupaten Indragiri			Percepatan arsitektur dan peta rencana SPBE	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	74,999,770	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		Hilir sebesar 42,79% dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 33,66%.									
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 Aplikasi	199,999,655	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	74,999,855	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	70,000,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	6 Aplikasi	100,000,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi dan Fasilitasi	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di	13 unit	74,999,975	Pekanbaru	Dinas Komunikasi,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				Informatika Dan Statistik
						Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	1 kabupaten / kota	599,993,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	75,000,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	75,000,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
					Peningkatan infrastruktur SPBE	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	32 Perangkat Daerah	2,499,992,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	74,999,695	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	74,995,680	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						kolaborasi penyelenggaraan SPBE					
						Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	250,000,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	37 perangkat daerah	2,000,000,000	Pekanbaru	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
		Kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2018 – 2022 baru berkisar antara 42,86% – 53,94%. karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan manajemen data pembangunan						

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		at dalam memenuhi kewajiban perpajakannya									
		5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset			Peningkatan perencanaan, penatausahaan, pengawasan pengelolaan barang milik daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,204,999,590		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau
						Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,204,999,590		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Laporan	224,999,760	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	874,999,985	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	104,999,845	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau
TOTAL PRIORITAS PENINGKATAN TATA KELOLA									32,746,033,203		
PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	Pemenuhan Infrastruktur	1. jalan mantap di Provinsi Riau baru mencapai sebesar 65,44% atau sepanjang 1.762,87 Km pada tahun 2023 dengan kondisi permukaan jalan tanah/belum tembus yang terbesar pada Kabupaten Indragiri hilir (136,62 Km) dan	Layanan Infrastruktur dan Penunjang Serta Konektivitas Masih Terbatas	Meningkatkan kemandirian jalan	Pemeliharaan dan peningkatan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen	337,162,037,871		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		diikuti oleh Kabupaten Pelalawan (52,88 Km) sehingga konektivitas antar daerah belum maksimal									
						Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	32,57 Km	337,162,037,871		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	50,12 KM	123,284,348,720	Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Rokan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Hulu, Pekanbaru	
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	52,33 KM	149,953,149,551	Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuansing, rokan Hulu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	3,53 Km	28,534,512,250	Ruas Jalan Air Molek - Simpang Japura	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0.37 Jembatan	35,390,027,350	Indragiri Hilir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		2. Masih tingginya angka		Mengembangkan sistem jaringan	Penyiapan RC (Readiness)						

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		kecelakaan lalu lintas di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 1.638 kecelakaan. Hal tersebut mengindikasikan masih terbatasnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan		transportasi yang terintegrasi	Criteria) Jalan dan jembatan						
		3. Belum optimalnya layanan integrasi antar moda (Angkutan Udara, Laut dan Darat) di Provinsi Riau			Penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	47,27 %	22,089,915,000		Dinas Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang tersedia,	1708 Unit	11,520,000,000		Dinas Perhubungan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Jalan di Jalan Provinsi	terehabilitasi dan terpelihara				
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1461 Unit	11,070,000,000	12 Kab/Kota	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	500 Unit	450,000,000	12 Kab/Kota	Dinas Perhubungan
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	15 Laporan	2,919,975,000		Dinas Perhubungan
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	7 Laporan	1,650,000,000	12 Kab/Kota	Dinas Perhubungan
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	1,269,975,000	12 Kab/Kota	Dinas Perhubungan
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	6,599,940,000		Dinas Perhubungan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	6,599,940,000	Kabupaten Siak	Dinas Perhubungan
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	600,000,000		Dinas Perhubungan
						Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	600,000,000	Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan	Dinas Perhubungan
						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	450,000,000		Dinas Perhubungan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	450,000,000	12 Kab/Kota	Dinas Perhubungan
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Pelayaran	81,70 %	6,984,143,250		Dinas Perhubungan
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun dan terpelihara	1 Unit	1,970,000,000		Dinas Perhubungan
						Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	0 Unit	200,000,000	Pelabuhan Mengkapa n Kab. Siak	Dinas Perhubungan
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1,770,000,000	Pelabuhan Mengkapa n Kab. Siak	Dinas Perhubungan
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terbangun dan terpelihara	3 Unit	5,014,143,250		Dinas Perhubungan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	14 Unit	455,905,450	Pelabuhan Kp. Balak Kab. Kep. Meranti dan Pelabuhan Tj. Kapal kab. Bengkalis	Dinas Perhubungan
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPT. Pengelolaan Perhubungan Wilayah I)	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Unit	2,549,997,800	Pelabuhan Tj. Kapal kab. Bengkalis	Dinas Perhubungan
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPT. Pengelolaan Perhubungan Wilayah II)	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	2 Unit	2,008,240,000	Pelabuhan Mengkapan Kab. Siak dan Pelabuhan Kp. Balak Kab. Kep. Meranti	Dinas Perhubungan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,88 poin dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 50,00 poin Provinsi Riau tahun 2022	Kualitas Lingkungan Hidup Rendah dengan Resiko Bencana Masih Tinggi	Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	Pemantauan dan pengawasan kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	17.86%	629,516,565		Dlhk
						Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	629,516,565		Dlhk
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	45 Lokasi	291,275,565	1. Wilayah Sungai Reteih (Singai Gangsal: 22 titik) 2. Wilayah Sungai Bengkalis Meranti	Dlhk

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										(Sungai Kembang Luar dan Sungai Suir: 10 Titik) 3. Laut Kota Dumai (3 Titik) 4. Laut Kabupaten Bengkalis (3 Titik) 5. Laut Kabupaten Inhil (4 titik) 6. Laut Pulau Rupat (3 titik)	
						Sub Kegiatan : Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit	338,241,000	Alat pemantau kualitas udara (AQMS) yang berada di 2 titik di Kabupaten Siak: 1. Kantor Camat Siak 2. Kantor Camat	Dlhc

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Tualang Perawang	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Izin Lingkungan	10 Persen	130,173,050		Dlhk
						Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	130,173,050		Dlhk
						Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan usaha	130,173,050	12 Kabupaten/ Kota	Dlhk

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Lingkungan Hidup					
		2. Rata-rata kondisi TPA kabupaten/kota masih beroperasi secara open dumping dan daya tampung TPA perkotaan sudah terlampaui (data TPA Provinsi Riau dari bid 3)			Rehabilitasi lahan kritis	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	17.86%	172,979,490		Dlhc
						Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	172,979,490		Dlhc
						Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	172,979,490	12 Kabupaten/ Kota	Dlhc

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					
		3. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca belum optimal (rata-rata pertahun 1,5%)			Peningkatan vegetasi tutupan lahan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100%	1,574,610,019		Dlhc
						Kegiatan : Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengawasan peredaran benih dan sertifikasi sumber benih	100%	1,574,610,019		Dlhc
						Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit berkualitas yang tersedia untuk rehabilitasi Lahan	67.000 Batang	1,574,610,019	12 Kabupaten/ Kota	Dlhc
		4. Bencana banjir di Provinsi Riau (curah hujan didaerah hulu lebih dari 200 mm/detik, menyebabkan elevasi			Penanganan mitigasi, darurat dan pasca bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air	45,21 Persen 13953,47 Ha	33,260,424,130		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		muka air waduk PLTA Koto Panjang naik sehingga dilakukan pembukaa n pintu air sebanyak 5 pintu setinggi 80 cm, pertemuan tiga sungai (sungai kampar, kampar kiri dan kampar kanan), pengaruh pasang surut air laut. Sehingga terjadi luapan air yang menyebabkan banjir)									

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola	6386 Km	33,260,424,130		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,599 KM	6,993,006,525	WS Sungai Reteh, WS Bengkalis Meranti	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	204.74 KM	26,267,417,605	WS Sungai Reteh, WS Bengkalis Meranti	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		5. Kondisi lahan di Provinsi Riau didomina			Fasilitasi pengelolaan sampah regional dan Kab/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Hutan	100%	235,523,500		Dlhk

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		si tanah gambut sebesar 55,14% berpotensi sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan									
						Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 laporan	235,523,500		Dlhk
						Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pengulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 laporan	235,523,500	12 Kabupaten/ Kota (Wilayah kerja 13 UPT KPH se Provinsi Riau)	Dlhk
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Persampahan Regional	100 Persen	1,199,999,370		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penyediaan sarana persampahan regional		1,199,999,370		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12 Kabupaten/Kota	199,999,685	12 Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	999,999,685		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		6. Pemanfaatan energi baru dan terbaruka		Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Bauran Energi	31,22 persen	10,777,675,615		Dinas Esdm Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		n (EBT) masih sangat rendah (26,14% Tahun 2023), dan masih tingginya pemanfaatan energi fosil dalam pemenuhan energi di Provinsi Riau sebesar 73,86% (minyak bumi 28,93%, gas bumi 15,04% dan batubara 29,90%)		berketahanan iklim	Surya (PJUTS), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop, Solar Home System (SHS)						
						Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi	5 laporan	349,996,945		Dinas Esdm Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
							bahan bakar biomassa dan biogas)				
						Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	5 laporan	149,999,820	Seluruh Kabupaten/ Kota kecuali Kota Pekanbaru	Dinas Esdm Provinsi Riau
						Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Cabang Dinas Wilayah I)	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) pada Cabang Dinas Wilayah I	5 laporan	49,999,330	Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu	Dinas Esdm Provinsi Riau
						Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Cabang Dinas Wilayah II)	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) pada Cabang Dinas Wilayah II	1 laporan	49,999,795	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Kuantan Singingi	Dinas Esdm Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Cabang Dinas Wilayah III)	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) pada Cabang Dinas Wilayah III	1 laporan	50,000,000	Kab. Siak, Kab. Pelalawan dan Kab. Kep. Meranti	Dinas Esdm Provinsi Riau
						Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Cabang Dinas Wilayah IV)	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) pada Cabang Dinas Wilayah IV	1 laporan	49,998,000	Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis	Dinas Esdm Provinsi Riau
						Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	56 unit	10,280,179,370		Dinas Esdm Provinsi Riau
						Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	1 unit	99,999,690	Kab. Pelalawan	Dinas Esdm Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	138 unit	10,080,179,830	Kab.Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru	Dinas Esdm Provinsi Riau
						Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	3 unit	99,999,850	12 Kabupaten/ Kota	Dinas Esdm Provinsi Riau
				Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau	Fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan EBT	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Laporan	47,499,710		Dinas Esdm Provinsi Riau
						Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	47,499,710	Kota Pekanbaru	Dinas Esdm Provinsi Riau
						Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	2	99,999,590		Dinas Esdm Provinsi Riau
						Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	49,999,910	Kota Pekanbaru	Dinas Esdm Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 Laporan	49,999,680	Kota Pekanbaru	Dinas Esdm Provinsi Riau
TOTAL PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN									414,216,997,860		
PENGUATAN EKONOMI	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabai)	1. Masih tingginya ketergantungan beras Provinsi Riau dari daerah luar dimana rasio produksi beras terhadap konsumsi baru 0,26	Nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan Pertanian relatif rendah	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	90.29 Poin	2,734,544,484		
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	7 Dokumen	1,413,383,912		
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	733,139,680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	202,635,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	78,732,796	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	228,857,672	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	48,762,312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	81,995,520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	39,260,932	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1 Laporan	975,000,000		
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	20 Ton	975,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	4 Dokumen	346,160,572		
						Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	190,169,464	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	102,031,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	1 Laporan	35,952,760	Semua Kota/Kab, Semua	Dinas Pangan, Tanaman

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pangan Dan Hortikultura
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	18,007,348	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Wilayah Rawan Pangan	11 Kecamatan	229,088,752		
						Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	1 Laporan	115,562,680		
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	115,562,680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	1 Laporan	113,526,072		
						Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	113,526,072	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar	80 Persen	1,193,700,706		
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81 Dokumen	1,193,700,706		
						Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	80 Sertifikat	443,740,017	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	749,960,689	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		2. Turunnya produksi padi sawah di Provinsi Riau tahun 2022 menjadi 213.557 ton			Peningkatan indeks pertanaman padi melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4,20 Ton/Ha	43,551,710,260		

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7100 Ha	36,049,710,600		
						Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	36,049,710,600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	2 Laporan	7,501,999,660		
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 Laporan	7,501,999,660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4,20 Ton/Ha	1,349,941,540		

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pangan dan Hortikultura)					
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	7100 Ha	1,299,986,540		
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	500 Sertifikat	249,988,540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 Laporan	1,049,998,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	1 Laporan	49,955,000		
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	49,955,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang Ditingkatkan Kompetensinya	3 Persen	4,996,511,863		
						Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya	225 Orang	849,995,000		
						Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	24 Unit	199,995,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	225 Orang	650,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Dikembangkan Kompetensinya	379 Kelompok	3,896,516,863		
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	379 Kelompok	3,896,516,863	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan	4 Unit	250,000,000		

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	2 Unit	150,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	100,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura	76 Persen	3,966,444,809		Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian	2600 Ha	3,966,444,809		Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2500 Ha	3,466,499,809	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha	499,945,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Hortikultura, dan Perkebunan				, Semua Kel/Desa	
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air	45,21 Persen 13953,47 Ha	47,356,159,555		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9,9783 Km	47,356,159,555		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.5 KM	11,999,999,870	Kampar, Kuansing, Rokan Hulu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	24.3 KM	7,114,086,845	Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak,	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Meranti, Indragiri Hulu	Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	797.8 KM	8,424,999,885	Kampar, Kuansing, Rokan Hulu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1371.9 KM	17,317,073,075	Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak, Meranti, Indragiri Hulu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	2,499,999,880		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		3. Masih rendahnya kondisi jaringan irigasi baik (39,45%)			Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura (cabe dan durian)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	55846 Ha	38,349,998,865		Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		4. Rasio produksi sayuran terhadap konsumsi masih rendah di Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 0,28				Penataan Prasarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian	10900 Ha	38,349,998,865		Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	3,349,999,410	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	34,999,999,455	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4,20 Ton/Ha	43,551,710,260		Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7100 Ha	36,049,710,600		Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	36,049,710,600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman	7100 Ha	7,501,999,660		
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 Laporan	7,501,999,660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	Hilirisasi SDA (Perkebunan:	1. Terdapatnya dua kabupaten		1. Peningkatan iklim dan promosi	Peningkatan promosi digital dan kemudahan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	6 Dokumen	2,012,940,580		Dpmptsp Prov Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
	kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	dengan nilai investasi PMDN yang masih rendah tahun 2022 yaitu Kabupaten Kuantan Singingi (564 M) dan Kepulauan Meranti (217 M)		investasi	berinvestasi	PENANAMAN MODAL					
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas /Insentif dibidang Penanaman Modal	3 Dokumen	850,713,000		Dpmptsp Prov Riau
						Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	570,713,000	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
		2. Rendahnya		Peningkatkan nilai tambah dan	Peningkatan kompetensi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	60 T	1,324,482,000		Dpmptsp Prov Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		investasi PMDN pada komoditi karet (Rp. 165,23 M), kelapa (176 Jt) dan perikanan (1,51 M)		kualitas produk industri	pelaku usaha, pemodalan dan pemasaran	PENANAMAN MODAL	berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan				
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha	100 Persen	1,324,482,000		Dpmptsp Prov Riau
						Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	55 Kegiatan usaha	609,561,000	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan usaha	88,911,000	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Bimbingan Teknis kepada Para Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 Pelaku Usaha	626,010,000	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
		3. Masih kurangnya hilirisasi produk unggulan (Kelapa Sawit, kelapa, karet)		Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan)	Peremajaan perkebunan kelapa sawit, kelapa dan karet dengan benih unggul bersertifikat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan	8,630,387	7,771,105,394	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)	75 Ha	1,861,188,254	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen perkebunan	1 Laporan	1,461,188,254	- KT. Sumber Jaya Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur Kota Dumai - KT. Abdi Buana Tani Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Kapur Kota Dumai - KT. Bersatu Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur Kota Dumai - KT. Bantan Jaya Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai - KT. Sukabumi II Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai - KT. Maju Bersama Desa Pasar Baru Kec. Pangean Kab.	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Kuantan Singingi - KT. Jaya Makmur Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi - KT. Sinar Unggul Tani Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur Kota Dumai - KT. Utama Jaya Desa Koto Mesjid Kec. XII Koto Kampar Kab. Kampar - KT. Silam Makmur Desa Silam Makmur Kec. Kuok Kab.	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Kampar - KT. Pondok Kuning Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar - UPPB Al Ikhlas Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis - UPPB Anugrah Utama Jangkang Desa Jangkang Kec Bantan Kab. Bengkalis - UPPB Bangkit Bersama Desa Bantan Timur Kec Bantan Kab.	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Bengkalis - UPPB Sidodadi Makmur Desa Pematang Pudu Kec Mandau Kab. Bengkalis	
						Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolah hasil perkebunan	1 Laporan	400,000,000	-Kelompok Tani Flamboyan Desa teluk Buntal Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti (Solar Dryer, Mesin Pengupas Kulit Kopi Kering (Huller)Me sin Pengupas Kulit Kopi Basah (Pulper) - Kab. Indragiri Hilir	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah bibit perkebunan	147,750	5,909,917,140	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	40,000	150,000,000	12 Kota/Kabupaten Provinsi Riau	Dinas Perkebunan
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 laporan	3,067,917,140	#Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Seluas 450 Ha# - KT. Hidup Subur, Desa Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko, Kab Rokan Hilir (30 Ha) - KT. Mekar Jaya, Desa Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko, Kab Rokan	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Hilir (30 Ha) - KT. Tari Rintis, Desa Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko, Kab Rokan Hilir (30 Ha) - KT. Karya Bersama, Desa Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko, Kab Rokan Hilir (30 Ha) - KT. Segantang Padi, Desa Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko, Kab Rokan Hilir (30 Ha)	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										- KT. Tanjung Senekip, Desa Teluk Pambang, Kec. Bantan, Kab Bengkalis (50 Ha) - KT. Sungai Guntung, Desa Teluk Pambang, Kec. Bantan, Kab Bengkalis (50 Ha) - KT. Pusada, Desa Simpang Ayam, Kec. Bantan, Kab Bengkalis (30 Ha) - KT. Mandiri, Desa Pambang Baru, Kec. Bantan,	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Kab Bengkalis (50 Ha) - KT. Berkat Bersama, Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab Bengkalis (90 Ha) #Diversifikasi Tanaman Perkebunan seluas 120 Ha# - KT. Mekar Jaya, Desa Bantan Tengah, Kec. Bantan, Kab.Bengk alis (36 Ha) - KT. Sumber Rejeki, Desa Bantan Tengah, Kec.	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Bantan, Kab. Bengkalis (10 Ha) - KT. Sumber Rejeki II, Desa Bantan Tengah, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis (10 Ha) - KT. Sena Lestari, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis (24 Ha) - KT. Sena Jaya, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis (20 Ha) - KT. Bangun Jaya, Desa Sungai	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis (20 Ha) #Intensifikasi Tanaman Perkebunan Seluas 200 Ha# - KT. Maju Basamo, Desa Kopa, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (152 Ha)/Tanaman Karet - KT. Tunas Muda, Desa Ranah Singkuong, Kec. Kampar, Kabupaten Kampar (48	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Ha)/Tanaman Karet	
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 laporan	2,692,000,000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan	12,79 Kg/Ha	7,786,200,000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang ditanam	550 Ha	7,786,200,000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	8 Dokumen	4,070,000,000	- KT. Bukit Batu Pela Desa Koto Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi - KT. Sidodadi Desa Beringin	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Jaya Kec. Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi - KT. Juaro Bertuah Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	6 Dokumen	2,006,200,000	- KT. Bina Jaya Desa Sialang Panjang Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri hilir - KT. Indah Jadi Desa Seberang Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil - KT. Indah Jaya	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Desa Seberang Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil - KT. Tunas Harapan Kota Dumai - KT. Tuah Karya Desa Nipah Sendanu Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti - Desa Kelebuk Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1,460,000,000	- KT. Tunas Harapan Desa Seberang tembilahan	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										selatan Kec. Tembilahan Kab. Inhil - KT. Gemah Ripah Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab.Inhil - Kelompok Tani Rahmat illahi desa Tanjung Rambutan Kec Kampar Kab.Kampar - Kelompok Tani Pondok Kuning F desa Simp Petai Kec Rumbio Jaya Kab. Kampar - Kelompok Sepakat	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										desa Sungai Pinang Kec Benai Kab. Kuansing - KT. Karya Makmur Desa Air Molek I Kec. Pasir penyu Kab. Inhu - KT. Mawar Mandiri Desa Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu - KT. Rimbun Jaya Desa Desa Muara Basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis - KT. Permata Indah Kelurahan Terkul	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Kec. Rupa Kab. Bengkalis - KT. Lestari Sako Makmur Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuansing - KT. Langsat Jaya Desa Sungai Langsat Kec. Pangean Kab. Kuansing - KT. Raih Kemenangan Desa Muara Dua Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis - KT. Pesisir Melayu Desa Muara Dua Kec. Siak Kecil	

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Kab.Bengkalis	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	200 Ha	100,000,000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	0.4 Persen	879,999,940	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas lahan yang dikendalikan	100 Ha	879,999,940	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	275,000,000	Kabupaten Indragiri Hilir	Dinas Perkebunan
						Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	604,999,940	- KTPA Desa Kelemantan Barat, Kec. Bengkalis,	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Hortikultura, dan Perkebunan				Kabupaten Bengkalis - KTPA Desa Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - KTPA Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan - KTPA Kel. Bangsal Aceh, Kec. Singai Sembilan, Kota Dumai	
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	76,81 Persen	400,000,000		Dinas Perkebunan
						Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan	13 perusahaan	400,000,000		Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	12 Laporan	400,000,000	12 Kota/Kabupaten Provinsi Riau	Dinas Perkebunan
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	2,34 Persen	798,733,231		Dinas Perkebunan
						Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya	80 Orang	224,999,885		Dinas Perkebunan
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	224,999,885	Kota Pekanbaru	Dinas Perkebunan
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi	2 Kelompok	414,999,876		Dinas Perkebunan
						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	164,999,876	Dumai	Dinas Perkebunan
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	250,000,000	Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Bengkalis	Dinas Perkebunan
						Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen	2 Unit	158,733,470	Kota Pekanbaru	Dinas Perkebunan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2 Unit	158,733,470	Provinsi Riau	Dinas Perkebunan
		4. Rata-rata pertumbuhan produktivitas perkebunan rakyat masih rendah (kelapa sawit sebesar 0,84%, Kelapa - 13,13%, karet 3,09%) per tahun									
		5. Belum Optimalnya perkembangan SIKIM di Provinsi Riau (3 SIKIM yang beroperasi)		Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri	Membangun kemitraan dengan perusahaan menengah/ besar						

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	200,000,000	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
						Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	80,000,000	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	1,162,227,580		Dpmptsp Prov Riau
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	650,000,085	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
						Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	12 Daerah	162,227,495	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	350,000,000	12 Kabupaten/Kota	Dpmptsp Prov Riau
		6. Belum beroperasi secara optimal 3 (tiga) kawasan				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	10-30 Persen	950,000,000		Dpmptsp Prov Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		industri di Provinsi Riau (kawasan industri duma, kawasan industri tanjung buton dan kawasan industri tenayan raya)									
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Moda	9 Dokumen	950,000,000		Dpmpstsp Prov Riau
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	950,000,000	luar Provinsi , 12 Kabupaten/Kota	Dpmpstsp Prov Riau
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian target pembangunan industri pada dokumen perencanaan industri	91.67	3,068,275,287	Provinsi Riau	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana	14 dokumen	3,068,275,287		Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembangunan Industri Provinsi	Pembangunan Industri Provinsi				Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	99,999,810		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	679,399,451		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau Dan Upt Industri Logam
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	1,645,867,170		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1 dokumen	382,225,000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Sumber Daya Industri	Pembangunan Sumber Daya Industri				Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Upt Industri Logam Dan Upt. Industri Pangan, Olahan Dan Kemasan
						Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	70,999,960		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahann industri	1 Laporan	63,184,169		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diawasi	1 dokumen	126,599,727		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase izin Usaha Industri	100	269,245,679	Provinsi Riau	Dinas Perindustrian,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						IZIN USAHA INDUSTRI					Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	2 dokumen	269,245,679		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 dokumen	200,245,864		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	1 dokumen	68,999,815		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				Menengah Provinsi Riau
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/Kota se-Provinsi Riau	100	303,953,827	Provinsi Riau	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3 dokumen	303,953,827		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	107,954,346		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 dokumen	99,999,833		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	95,999,648		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
	Penguatan Ekonomi Masyarakat	1. Pertumbuhan jumlah koperasi tidak sejalan dengan jumlah koperasi aktif (jumlah koperasi 5.871 dan jumlah koperasi aktif 3.166)		Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			4,784,771,450		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	1006 orang	4,784,771,450	12 Kab/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	1006 orang	4,784,771,450		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Daerah ProvinsiPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1006 Orang	4,784,771,450		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Upt. Pelatihan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi	100	538,528,637		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	50 Unit Usaha	538,528,637		Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif, Bernilai tambah, memiliki akses pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	50 Unit Usaha	315,299,410		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	40 Keluarga	223,229,227		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif		982,554,335		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	320 Unit Usaha	982,554,335		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 Unit Usaha	732,559,943		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	50 orang	149,994,392		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					Provinsi Riau (Upt. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah)
						Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	20 Unit Usaha	100,000,000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Meningkatkan Skala Usahanya	100	1,011,198,997		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	30 Orang	1,011,198,997		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas	300 Unit Usaha	891,198,997		Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Upt. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
						Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	30 Orang	120,000,000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau
		2. Masih belum tercukupi produksi ikan terhadap konsumsi pada tahun 2022 di Provinsi Riau dimana rasio produksi		Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Pengembangan pakan mandiri dan menjamin benih yang berkualitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	6,479,823,760		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		terhadap konsumsi baru mencapai 0,89. Sedangkan kabupaten/kota rasio terendah terdapat pada Kota Dumai (0,12), Kabupaten Siak (0,17) dan Kota Pekanbaru (0,21).									
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2 Kelompok	150,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	150,000,000	Kuansing, Inhu & Kampar	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul	3.150 Ton	600,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	600,000,000	Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Siak, Dumai, Rohil, Bengkalis & Meranti	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran	13.3 Persen	1,950,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3 Laporan	150,000,000	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan	1,800,000,000	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	170 ST	3,779,823,760		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4100 Ekor	3,779,823,760	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	1,652,843,208		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	20 Persen	1,652,843,208		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	900 Ha	249,940,104	Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar & Rohul	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengendalian dan Pemanfaatan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan	6 Unit	952,903,104	Kuansing, Inhu,	Dinas Peternakan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Prasarana Pascapanen Peternakan	yang dikendalikan dan dimanfaatkan			Pelalawan, Kampar, Bengkalis & Meranti	Dan Kesehatan Hewan
						Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit	450,000,000	Rokan Hilir	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			5,250,591,960		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
							Persentase angka kematian ternak	2.1 Persen			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
							Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan	20 Persen			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	20 Persen	3,874,127,880		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
						Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	230,471,640	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	3,643,656,240	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	976,516,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	99,996,000	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	876,520,000	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohul, Rohil	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan	14 Wilayah	399,948,080		Dinas Peternakan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar				Dan Kesehatan Hewan
						Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	35 Laporan	249,966,312	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	112 Orang	149,981,768	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok yang membentuk korporasi	15 Persen	2,669,998,720		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	50 Kelompok	2,089,493,400		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok	2,089,493,400	12 Kab/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	60 Kelompok	580,505,320		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	580,505,320	Kuansing, Inhu, Kampar	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
									3,699,963,752		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	2,699,964,252		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	62.000 Dosis	2,299,998,250		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Laporan	2,299,998,250	Pekanbaru	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	6 Ekor	399,966,002		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6 Ekor	399,966,002	Pekanbaru	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	999,999,500		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	76 Persen	999,999,500		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	999,999,500	Pekanbaru	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
									3,750,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	350,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	78 Persen	350,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	200,000,000	Pekanbaru	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Pekanbaru	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak	2.15 Persen	3,400,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	2,000,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	2,000,000,000	Pekanbaru	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	30 Unit	1,400,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300 Dokumen	1,400,000,000	Pekanbaru	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
									7,908,748,210		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	4,518,748,210		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	20 Ekor	4,518,748,210		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan	4,518,748,210	Kampar, Siak Hulu	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	3,390,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	65 Persen	3,390,000,000		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	18 Unit	3,390,000,000	Kampar, Siak Hulu	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,		132712,51 Ton	2,600,000,000		Dinas Kelautan Perikanan
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat,		5 kawasan	2,600,000,000		Dinas Kelautan Perikanan
						Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88 Unit	2,600,000,000	kabupaten Kota Se Provinsi Riau	Dinas Kelautan Perikanan
		1. 'Masih rendahnya status indeks Desa Membangun (IDM) mandiri 600 desa dari 1.591 desa (37,71% tahun 2023)		Peningkatan kompetensi aparatur desa	Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Kurang Berkembang	1,8 Persen	3,401,812,073		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	96 Persen	3,401,812,073		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,989,181,552	10 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	40 Orang	285,946,237	10 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 Orang	126,684,284	10 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		2. 'Masih rendahnya BUMDes Maju (efektivitas penggunaan modal usaha BUMDes belum sesuai dengan potensi Desa 315)		Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa	Pengembangan BUMDes/ Ma	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Partisipasi LKD Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Des	50 Persen	172,999,886		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus LKD yang kompeten	4,2 Persen	172,999,886		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	1 Dokumen	172,999,886	10 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			561,940,280,420		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			561,940,280,420		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
						Analisis dan Penyaluran Bantuan Keuangan			561,940,280,420		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		3. 'Masih rendahnya dalam penetapan kawasan pedesaan (Kab. Kampar, Kab. Kep. Meranti, Kab. Bengkalis, Kab. Siak)		Peningkatan kerjasama antar desa	Pengembangan kawasan pedesaan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerja Sama	100 Persen	234,631,593		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama desa yang difasilitasi	5 PKS	234,631,593		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Desa, Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	121,088,603	10 Kabupaten	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Desa, Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
						Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	113,542,990	10 Kabupaten	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Desa, Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
		1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2023 mencapai		Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan yang bersertifikasi sesuai kebutuhan dengan potensi daerah						

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		4,23%, Kabupaten yang tingkat TPT nya masih tinggi Bengkulu 7,09, Pekanbaru 6,20, Siak 5,82, Kepulauan Meranti 5,17, Dumai 5,15 dan Rokan Hilir 4,42.									
		2. Masih rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Riau di sektor informal (bukan penerima upah) baru mencapai 23,37%.,Dari		Penambahan lapangan pekerjaan	Pemagangan, jobfair dan padat karya produktif						

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		1.090.925 pekerja di sektor informal untuk kabupaten/ kota yang capaiannya rendah yaitu Kampar 38,63%, Inhu 43,29%, Inhil 31,63%, Rohul 26,18%, Rohil 31,56%, Kuansing 38%, Kep.Meranti 4,94%, Siak 51,24%									
		3. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja (mayoritas tamatan SD sebanyak 906.104		Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	Peningkatan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan						

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		jiwa (30,18%) dari total penduduk yang bekerja 3.002.334 jiwa									
		4. Terbatasnya kesempatan kerja bagi disabilitas dari total jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP 31.367 baru 30 perusahaan yang mempekerjakan disabilitas dengan jumlah disabilitas yang bekerja di perusahaan sebanyak									

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		36 pekerja disabilitas									
	Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Belum Optimalnya akses dan prasarana Objek wisata budaya baik wisata alam, budaya dan buatan	Kurang nya Daya Tarik Wisata Berbasis Budaya Melayu	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Pengembangan promosi pariwisata berbasis digital	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	5 Persen	8,929,343,333		
						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	23 Kali	8,929,343,333		Dinas Pariwisata
						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	955,500,000	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Meranti, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab.	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, DKI Jakarta	
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	17 Kegiatan	7,973,843,333	Provinsi Riau	Dinas Pariwisata
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen	923,443,759,491		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	32,57 Km	923,443,759,491		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	50,12 KM	468,236,688,760	Siak, Kampar, Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	52,33 KM	455,207,070,731	Pelalawan, Rokan Hulu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		2. Pelaku usaha ekonomi kreatif tahun 2023 di Provinsi Riau masih didominasi pada sektor kuliner sebesar 45,5%			Pembangunan prasarana penunjang destinasi wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Pariwisata Kategori Maju	3 Destinasi	2,417,499,657		

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	1 Destinasi	150,000,000		Dinas Pariwisata
						Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Lokasi	100,000,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan	50,000,000	Kab. Rokan Hulu, Kab. Bengkalis, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai, Kab. Indragiri Hilir	Dinas Pariwisata
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat	3 KSP/K PPP	2,267,499,657		Dinas Pariwisata
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	1,967,499,657	Kab. Siak, Kab. Rokan Hulu, Kab. Bengkalis	Dinas Pariwisata
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	24 Orang	300,000,000	Yogyakarta	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
					Peningkatan peran serta masyarakat melalui Kelompok sadar Wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM kepariwisataan ditingkatkan kualitasnya	269 Orang	1,610,190,000		
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Dokumen	1,610,190,000		Dinas Pariwisata
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	70 Orang	320,000,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	210,000,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	134 Orang	1,032,190,000	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Meranti, Kab. Kuantan	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kota Dumai, Kab. Pelalawan	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6 Laporan	48,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kab. Meranti, Kab. Bengkalis, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir	Dinas Pariwisata
					Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berorientasi pasar nasional/internasional	40 Pelaku	1,527,411,405		

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana kota kreatif yang disediakan	1 Kota	149,500,000		Dinas Pariwisata
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan	149,500,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional	40 Pelaku	1,377,911,405		
						Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1 Dokumen	1,377,911,405		Dinas Pariwisata
						Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	199,235,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	2 Promosi	849,491,405	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	10 Unit	329,185,000	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab.	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
										Meranti, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kota Dumai, Kab. Pelalawan	
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	10 Persen	6,430,376,000		
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Dokumen	2,904,620,000		Dinas Pariwisata
						Pendampingan Penciptaan Produk Kreatif (Inkubasi)	Jumlah produk kreatif	3 Produk	492,900,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	75 Orang	2,411,720,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang	3,525,756,000		Dinas Pariwisata
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75 Orang	3,177,316,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	75 Orang	348,440,000	Kota Pekanbaru	Dinas Pariwisata
		Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekspresi (25,39%) dan warisan budaya melayu (51,75 %) tahun 2022		Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Penyelenggaraan event budaya melayu	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	96 Data OPK	4,642,778,091		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,24 %	3,103,989,042		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	4 Objek	1,526,056,054	Bengkalis, Dumai, Inhu, Inhil, Kampar, Rohul, Rohil, Pelalawan, Siak	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	1,077,932,988	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	500,000,000	UPT. Taman Budaya Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,24 %	1,538,789,049		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1,165,414,208	Bengkalis, Kampar, Kuansing, Pelalawan, Rohil, Rohul, Siak	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	373,374,841	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					
						PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	2.21 %	285,729,919		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan Kesenian	100%	285,729,919		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	150,000,000	Pekanbaru, Jakarta	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	135,729,919	12 Kab/ Kota	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		Masih rendahnya penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tahun 2022 (0,44%)			Penetapan warisan Budaya tak benda (WBTB) dan cagar budaya (CB)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah yang dibina	50 Objek	459,056,387		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
		dan penetapan cagar budaya tahun 2022 (1,26%).									
						Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	12 Kab/Kota	459,056,387		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10 Orang	99,999,972	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	126,768,415	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	232,288,000	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	146 Objek	2,736,958,449		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	5%	436,958,744		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	150,000,000	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	286,958,744	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Prioritas	Sub Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Kebijakan	Fokus Pembangunan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Detail Lokasi	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	2 Objek	2,299,999,705		Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	1,100,000,000	Pekanbaru, Kampar	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	800,000,000	Pekanbaru, Kampar	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	200,000,000	Pekanbaru	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	199,999,705	Pekanbaru, Jakarta	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
TOTAL PENGUATAN EKONOMI									1,773,784,508,170		
TOTAL									3,701,570,396,290		

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan mendukung prioritas provinsi dan menjadi bagian kabupaten/kota dalam menyusun RKPD tahun 2025. Pada bab ini, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan mendukung prioritas dan sasaran provinsi yang disertai dengan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

5.1 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025

Kinerja pembangunan daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota se Provinsi Riau. Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan hasil sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antar pemerintah daerah Provinsi Riau dengan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Riau, maka telah ditetapkan target kinerja pembangunan daerah tahun 2025 yang direpresentasikan melalui indikator makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Rasio.

Secara umum, capaian indikator makro pembangunan pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun demikian, kemajuan pembangunan di 12 kabupaten/kota yang ditunjukkan oleh setiap indikator mengindikasikan adanya disparitas pembangunan antar daerah. Dalam kebijakan perencanaan pembangunan

tahunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan tahun 2025.

5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dari tahun 2021-2025 maka pemerintah Provinsi Riau berusaha membuat program prioritas yang akan dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program prioritas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dari akumulasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Riau telah melakukan estimasi terhadap target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota. Penargetan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota telah mempertimbangkan aspek-aspek pembentuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yaitu diperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi ekonomi, investasi terus tumbuh dengan adanya pengembangan kawasan industri dan pembangunan infrastruktur jalan tol, beroperasinya investasi swasta sesuai dengan potensi daerah, percepatan investasi swasta-pemerintah melalui deregulasi peraturan, perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan, percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi, dan perbaikan iklim tenaga kerja untuk menarik minat investor melakukan investasi di kabupaten/kota. Disamping itu terjaganya permintaan terhadap komoditas unggulan Riau dan tren harga komoditas yang relatif tinggi turut mendorong investor untuk melakukan ekspansi terutama meningkatkan kapasitas produksi. Target pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kuantan Singingi	3,75	4,75	2,87	5,02 – 5,50	3,69-3,89
2	Indragiri Hulu	4,26	4,63	4,39	4,45 – 4,65	3,85-4,07
3	Indragiri Hilir	4,41	5,25	3,17	5,05	4,03-4,25
4	Pelalawan	4,07	4,39	4,69	4,50 – 5,20	3,67-3,87
5	Siak	2,31	3,78	4,35	3,56 – 3,91	2,87-3,02
6	Kampar	3,45	4,83	4,22	4,5 - 5,08	3,66-3,86
7	Rokan Hulu	4,98	5,02	4,12	5,04-5,50	3,80-4,01
8	Bengkalis	0,51	2,22	2,77	1,23 – 2,05	1,72-1,79
9	Rokan Hilir	1,63	2,64	2,83	2,87 – 3,11	2,18-2,28
10	Kep Meranti	2,56	3,17	4,81	3,46 – 4,01	2,75-2,89
11	Pekanbaru	5,24	6,78	6,06	6,78-7,30	4,79-5,14
12	Dumai	5,98	6,36	6,05	6,23-6,79	4,78-5,06
	Provinsi Riau	3,36	4,55	4,21	3,71 – 4,20	3,82 – 4,23

Sumber : BPS Provinsi Riau dan Proyeksi KEMD, 2024

5.1.2 Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan rakyat dari aspek ekonomi kabupaten/kota diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Penargetan penurunan tingkat kemiskinan kabupaten kota telah mempertimbangkan peningkatan produksi barang dan jasa serta menjaga kestabilan dan penurunan tingkat inflasi sehingga diharapkan tidak terjadi peningkatan nilai garis kemiskinan di Kabupaten/Kota. Dalam menurunkan jumlah penduduk miskin perlu didukung oleh kondisi perekonomian yang membaik dan tingkat inflasi yang dijaga rendah, serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Faktor utama yang langsung mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan adalah daya beli masyarakat (*purchasing power*). Provinsi Riau belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri sebagian besar dipasok dari provinsi lain, untuk itu perlu menjaga distribusi barang yang mempengaruhi inflasi. Inflasi yang rendah dapat menjaga daya beli masyarakat miskin terutama terhadap komoditas pangan seperti beras yang berkontribusi besar pada Garis Kemiskinan. Dalam enam tahun terakhir, inflasi pada komponen makanan selalu lebih tinggi dari komponen nonmakanan. Berikut target penurunan tingkat kemiskinan kabupaten kota selama tahun 2021-2025.

Tabel 5.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/Kota	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kuantan Singingi	8,97	8,24	8,07	7,58 – 8,03	5,51-5,37
2	Indragiri Hulu	6,18	6,14	6,06	5,27 – 5,56	5,61-5,37
3	Indragiri Hilir	6,18	5,98	5,64	5,47	5,85-5,78
4	Pelalawan	9,63	8,97	8,15	7,50 – 8,00	7,44-7,01
5	Siak	5,18	5,07	5,23	4,86 – 4,93	5,13-5,10
6	Kampar	7,82	7,12	7,04	6,89 – 7,19	7,00-6,67
7	Rokan Hulu	10,40	9,95	9,72	9,27-9,44	9,68-9,31
8	Bengkalis	6,64	6,32	6,31	5,91 – 6,18	5,78-5,69
9	Rokan Hilir	7,18	6,73	7,07	5,44 – 6,03	6,81-6,69
10	Kep Meranti	25,68	23,84	22,98	20,55 – 21,44	21,93-21,00
11	Pekanbaru	2,83	3,06	3,16	2,68-2,98	2,89-2,37
12	Dumai	3,42	3,20	3,21	2,93-3,07	2,70-2,48
	Provinsi Riau	7,00	6,84	4,55	6,23 – 6,42	6,42 – 6,51

Sumber : BPS Provinsi Riau dan Proyeksi KEMD,2024

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Selain pertumbuhan ekonomi, investasi masih menjadi harapan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di wilayah kabupaten/kota dan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha diantaranya melalui harmonisasi peraturan terkait perizinan, fasilitasi kemudahan berinvestasi, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi.

Untuk mendorong percepatan penurunan angka pengangguran di kabupaten kota melalui pengembangan potensi ekonomi wilayah, dengan penciptaan nilai tambah produk unggulan wilayah dan membuka lapangan pekerjaan dengan cara berinvestasi pada sektor rill, membuka peluang bagi masyarakat sebagai wirausaha, Percepatan pembangunan konektivitas untuk melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, dan listrik; Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mencetak tenaga kerja

berkualitas yang terlatih dan terdidik; Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Target penurunan angka pengangguran kabupaten kota selama tahun 2021-2025 dapat dilihat dan diuraikan pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kuantan Singingi	2,06	2,66	2,49	2,19 – 2,28	2,35-2,28
2	Indragiri Hulu	3,32	2,53	2,47	2,21 – 2,52	2,41-2,29
3	Indragiri Hilir	2,66	1,50	1,71	1,44	4,20-3,21
4	Pelalawan	2,34	2,73	2,26	2,13 – 2,33	2,11-1,98
5	Siak	4,34	6,11	5,82	4,00 – 4,50	6,01-5,34
6	Kampar	4,27	3,62	3,38	3,02 – 3,46	3,37-3,02
7	Rokan Hulu	2,25	3,62	3,45	2,90-3,57	3,35-2,89
8	Bengkalis	6,63	7,18	7,09	6,62 – 6,80	6,59-6,05
9	Rokan Hilir	3,25	4,55	4,42	4,00 – 4,15	4,22-4,10
10	Kep Meranti	4,43	5,50	5,17	5,01 – 5,19	4,03-3,56
11	Pekanbaru	8,29	6,40	6,20	5,76-6,25	5,98-5,74
12	Dumai	6,29	5,38	5,15	4,89-5,27	4,61-4,30
	Provinsi Riau	6,32	4,42	4,23	3,92-4,13	3,91 – 4,05

Sumber : BPS Provinsi Riau dan Proyeksi KEMD, 2024

5.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dari IPM ini dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Selain itu tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif serta menggambarkan pendapatan masyarakat pada

suatu wilayah. Penargetan terhadap peningkatan IPM kabupaten kota diharapkan dapat memacu peningkatan capaian IPM Provinsi Riau. Selain itu IPM juga akan sangat menentukan capaian penargetan indikator kesejahteraan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan. Selanjutnya IPM juga menjadi tolak ukur indikator kesejahteraan sosial yang akan dipengaruhi adalah perkembangan penurunan angka pengangguran selama periode penargetan.

Tabel 5.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kuantan Singingi	70,60	71,09	73,35	71,79 – 72,27	73,77-73,92
2	Indragiri Hulu	70,01	70,46	72,28	70,95 – 71,39	72,63-72,49
3	Indragiri Hilir	66,63	67,37	69,64	67,79	69,94-69,83
4	Pelalawan	72,08	72,93	74,69	73,51 – 74,18	75,62-75,77
5	Siak	73,98	74,50	75,97	74,58 – 75,86	75,98-75,93
6	Kampar	73,02	73,84	75,59	74,73 – 74,92	76,00-76,13
7	Rokan Hulu	69,67	70,31	72,28	70,74-71,60	72,80-72,99
8	Bengkalis	73,58	74,38	75,96	74,90 – 75,05	76,23-76,42
9	Rokan Hilir	69,34	70,10	71,98	71,01 – 71,34	72,87-73,02
10	Kep Meranti	65,70	66,52	68,96	67,38 – 67,57	69,45-69,57
11	Pekanbaru	81,58	82,06	83,67	82,65-82,80	84,07-84,19
12	Dumai	74,75	75,26	76,45	75,69-75,99	77,60-77,77
	Provinsi Riau	72,94	73,52	74,95	74,29 – 74,61	75,82 – 75,94

Sumber : BPS Provinsi Riau dan Proyeksi KEMD, 2024

5.1.5 Gini Rasio

Gini Rasio menggambarkan ketimpangan pendapatan / kesenjangan pendapatan masyarakat Provinsi Riau. Gini Rasio tahun 2022 sebesar 0,326 turun dari tahun 2021 sebesar 0,327. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sudah semakin kecil (baik). Adapun sinergi proyeksi antara Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5
Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2021 – 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi		Target		
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kuantan Singingi	0,264	0,281	0,248	0,235 – 0,251	0,249-0,246
2	Indragiri Hulu	0,305	0,268	0,292 – 0,278	0,267 – 0,283	0,242-0,238
3	Indragiri Hilir	0,297	0,296	0,31	0,286	0,292-0,289
4	Pelalawan	0,294	0,282	0,284	0,250 – 0,272	0,274-0,269
5	Siak	0,295	0,290	0,262	0,239 – 0,255	0,284-0,280
6	Kampar	0,281	0,311	0,328-0,319	0,192 – 0,202	0,304-0,299
7	Rokan Hulu	0,296	0,268	0,278	0,243-0,253	0,266-0,261
8	Bengkalis	0,273	0,265	0,268-0,278	0,241 – 0,263	0,244-0,241
9	Rokan Hilir	0,257	0,285	0,337	0,243 – 0,253	0,280-0,276
10	Kep Meranti	0,278	0,266	-	0,235 – 0,243	0,231-0,228
11	Pekanbaru	0,391	0,397	0,385	0,358-0,379	0,409-0,406
12	Dumai	0,345	0,324	0,36	0,314-0,34	0,323-0,319
	Provinsi Riau	0,327	0,326	0,319-0,328	0,308 - 0,316	0,298 - 0,303

Sumber : BPS Provinsi Riau dan Proyeksi KEMD, 2024

5.2 Prioritas Pembangunan Provinsi yang didukung oleh Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan tahun 2025. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan dengan mempedomani prioritas dan arah kebijakan pembangunan provinsi untuk pencapaian prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga kinerja kabupaten/kota dan provinsi sangat dibutuhkan untuk pencapaian kinerja pemerintah pusat. Terkait hal ini kabupaten/kota dan provinsi dituntut untuk melakukan sinergi kebijakan, baik terhadap prioritas, sasaran maupun arah kebijakan maupun target kinerja penyelenggaraan

pemerintahan. Berdasarkan prioritas, sasaran, arah kebijakan dan fokus kebijakan pembangunan yang disertai target kinerja, yang telah ditetapkan Provinsi Riau dalam upaya pencapaian Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau tahun 2025-2026 dan target nasional, yang harus didukung dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota, seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Selanjutnya prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 sebagai berikut.

1. Prioritas I : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada:
 - Pemenuhan Prasarana dasar
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Kesetaraan Gender
2. Prioritas II : Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
 - Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
3. Prioritas III : Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada :
 - Pemenuhan Infrastruktur
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Prioritas IV : Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada :
 - Pertanian
 - Hilirisasi SDA
 - Penguatan Ekonomi masyarakat
 - Pariwisata Berbudaya Melayu

Dari masing -masing prioritas dan fokus pembangunan diatas, dijabarkan ke dalam bentuk prioritas, sasaran, arah kebijakan, fokus kebijakan dan target kinerja Provinsi Riau yang disinkronkan dengan kebijakan kabupaten/kota, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5.6
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Kuansing

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	Meningkatkan ketersediaan air minum	- Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional	PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya infrastruktur permukiman	Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU (%)	76.8	- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman - Meningkatkan akses air minum - Menyedia air minum yang berkualitas	- Pembangunan/pemeliharaan drainase - Pembangunan prasarana dan sarana umum
						Membangun sarana prasarana sanitasi	- Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman		Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	76.63	- Meningkatkan akses air minum - Menyedia air minum yang berkualitas	- pembangunan sarana air bersih
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik		Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	88.45	- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	- Pembangunan/pemeliharaan drainase
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi		Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik (%)	92.85	- Meningkatkan pengelolaan fungsi irigasi jaringan irigasi - Meningkatkan konservasi sungai, danau dan rawa	- Pembangunan/pemeliharaan fungsi irigasi - Meningkatkan konservasi sumber daya air - Pembangunan turap penahan tebing dan sungai

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus - Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri) - Penyelenggaraan pendidikan inklusif						
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54		- Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik						
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat	- Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama						
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	- Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)						
		Kesetaraan Gender		Indeks ketimpangan	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan	- Peningkatan perencanaan dan						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya kesetaraan gender	gender (poin)		peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan						
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Profesionalisme ASN - Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan						
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN						
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi						
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Opini BPK RI (Predikat) - Nilai AKIP (poin) - Skor LPPD (skor)	- WTP - 73,12 - 3,00	- Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan - Menyusun dan menerapkan Sistem akuntabilitas kinerja - Meningkatkan	- Peningkatan indeks reformasi birokrasi - Peningkatan akuntabilitas kinerja - Meningkatkan tata kelola pemerintahan - Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												kualitas manajemen kearsipan - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah - Meningkatkan kemitraan pembangunan	
						- Meningkatkan kualitas pengawasan daerah			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	- Indeks SPBE (Poin) - Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	- 3,40 - 82,13	- Meningkatkan penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik - Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi pelayanan publik	- Peningkatan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan akses pelayanan publik berbasis teknologi informasi
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah							
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan							

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Tahun (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemandirian jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi		Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal (%)	6	- Meningkatkan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	- Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan - Peningkatan pengelolaan terminal - Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim - Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim						
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura : durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	KEMANDIRIAN EKONOMI	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi	- PDRB ADHB (Rp Milyar) - Gini Ratio (point)	- 40.004.328,00 - 0,270	- Meningkatkan produksi pertanian - Meningkatkan hilirisasi industri berbasis pertanian - Meningkatkan produksi perikanan - Meningkatkan Jumlah produk UMKM dan IKM - Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata - Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata daerah - Meningkatkan produk ekonomi kreatif - Menjamin ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas - Meningkatkan daya tarik investasi	- Peningkatan produksi padi - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian - Peningkatan produk hilirisasi pertanian - Meningkatkan pembinaan pelaku usaha UMKM dan IKM - Meningkatkan pengelolaan pariwisata - Meningkatkan sarana dan prasaran pendukung pariwisata - Meningkatkan ketersediaan pangan lokal - Meningkatkan realisasi investasi
		Hilirisasi SDA	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan	188,62		1. Peningkatan iklim dan promosi investasi						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		(Perkebunan : kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)		n Modal Tetap Bruto (juta rupiah)		Memperbaiki iklim dan promosi investasi	2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri						
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM		Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	- Persentase penduduk miskin (%) - Tingkat pengangguran terbuka (%)	- (5,81-6,16) - (1,69-2)	- Meningkatkan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin - Meningkatkan pengelolaan BUMDes - Meningkatkan pengelolaan wisata desa dan pelaku usaha ekonomi kreatif - Meningkatkan kualitas tenaga kerja	- Peningkatan akses ekonomi masyarakat miskin - Peningkatan ekonomi pedesaan - Meningkatkan partisipasi angkatan kerja
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya						
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52								
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat	- Peningkatan kompetensi aparatur desa						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa						
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa						
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan						
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja							
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda							
				Tingkat Penganggura	4,05								

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				n Terbuka (persen)									
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu						
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu						
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal							
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.7
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Indragiri Hilir

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Targ et	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan	Indeks Infrastruktur	65.71	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menuju Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan publik dan perumahan	Peningkatan layanan air minum, sanitasi/ persampahan perkotaan.
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik						Pembangunan rumah layak huni dan penuntasan kawasan kumuh serta Relokasi kawasan kumuh
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi						
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0.583	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Targ et	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan n kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)					didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar	
						- Meningkatkan n implementasi Literasi masyarakat	- Penyelenggaraan pendidikan inklusif						
							Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik						
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54		- Peningkatan Literasi masyarakat						Pembentukan Unit kelompok belajar informal (PKBM)
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan n pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	- Menumbuhkemban gkan pengamalan kehidupan beragama						
						- Meningkatkan n toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama							
						- Meningkatkan n ketentraman di masyarakat							
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Meningkat nya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0.754	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan	Akses layanan pendidikan dan kesehatan
							- Peningkatan gerakan masyarakat sehat (GERMAS)						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Targ et	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (point)	0,37	- Meningkatkan a kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembanguna	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)						
						- Meningkatkan n kualitas	- Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan						
						keluarga serta perlindungan perempuan dan anak							
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (point)	66,07	- Meningkatkan n profesionalisme ASN	- Peningkatan Profesionalisme ASN	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah				
						- Meningkatkan n kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan						
				Nilai survei indeks berakhlak (point)	60,90	- Meningkatkan n Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN						
				Nilai survei kepuasan masyarakat (point)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi						
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (point)	3,06	- Meningkatkan n kualitas pengelolaan keuangan dan aset	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84,55	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek/diklat
						- Meningkatkan n akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Targ et	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kualitas pengawasan daerah							
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah				Indeks Integritas	83.35	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan							
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Tahun (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemandirian jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan	Indeks Infrastruktur	65.71	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menuju Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan publik dan perumahan	- Penyelenggaraan pelabuhan daerah, transportasi sungai/laut dan penyeberangan -Peningkatan jalan dan jembatan Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP) dan konektivitas terhadap pusat pemerintahan dan layanan publik
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						mitigasi perubahan iklim - Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati							
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,87	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan	-Perbaikan sarana prasarana sektor pertanian dan implementasi lahan sawah yang dilindungi -Percepatan pelepasan perkebunan yang berada dalam kawasan
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri			LPE Kategori Industri Pengolahan	5,6		
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM			Indeks Pengeluaran	0,718		

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya					pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM	n masyarakat melalui pengembangan UMKM
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52								- Bantuan sosial tunai untuk kemiskinan Ekstrem
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat	- Peningkatan kompetensi aparatur desa						
						- Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa						
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa						
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan						
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Targ et	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja							
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda							
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05								
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenities pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Pengembangan potensi agroindustri daerah				Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif melalui intensitas penyelenggaraan event
			2. Meningkatnya ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu						
			3. Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal							
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.8
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kota Dumai

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum	- Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	75.51	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman	Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
						- Membangun sarana prasarana sanitasi	- Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman					Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman	Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik					Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman	Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
												Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan (Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain)	Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
									Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan aturan	60	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menja ga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
												Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari	
												Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	
			Meningkatnya akses ketenagalistri kan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	0,718-0,721	Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas
						- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)					Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang	
						- Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Penyelenggaraan pendidikan inklusif					Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah	
							Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik					Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah	
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54		- Peningkatan Literasi masyarakat					Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat	- Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama						
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	- Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	0,791-0,792	- Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat - Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis	- Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan					- Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat - Meningkatkan kualitas lingkungan sehat - Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
									Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	0,770-0,773	Menjamin distribusi bahan pokok	Peningkatan daya Beli Masyarakat
												Meningkatkan Pendapatan masyarakat	
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN	- Peningkatan Profesionalisme ASN	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah					
						- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan						
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN						
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,87	Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau			Indeks Layanan SPBE	2,96	Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	
						- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah					Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral	Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kualitas pengawasan daerah						Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana	Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah			Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	WTP	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien	Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	B	Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	
												Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal	
												Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan	
												Meningkatkan pengelolaan asset daerah	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
												Mengoptimalkan pendapatan daerah	
												Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												pendapatan daerah	
										Indeks Manajemen Resiko	3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Tahun (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemantapan jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi					Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim - Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,18	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari Peningkatan
			2. Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
							2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
										Cakupan pelayanan persampahan	71,4		
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	75,12	Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan	Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah
										Ketersediaan Pangan Utama	41,03	Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk	
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri						
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM		Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	31,78-32,00	Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan	Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan	
										Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	56,28-57,53	Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus	
										PDRB perkapita ADHK	94,30-94,94	Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan	
										PDRB perkapita ADHB	166,98-170,68	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM	Peningkatan Produktivitas masyarakat
												Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan	
												Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha	
												Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi	Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha
												Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah	
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	0,340-0,320	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin	Peningkatan perlindungan sosial
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52							Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial	
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungisian sosial masyarakat - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Peningkatan kompetensi aparatur desa - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa					Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah	Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa					Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai	
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan					Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal	
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja							
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan kemandirian dan							

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						kepeloporan pemuda							
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05					Tingkat Pengangguran Terbuka	5,20-4,70		
										Tingkat kemiskinan	2,93-3,06		
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu						
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Meningkatnya kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan	27,5	Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas	Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian,						Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat	
						dan pengakuan atas seni dan budaya lokal						Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu	
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.9
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Siak

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (%)	87,97	Membangun atau meningkatkan sistem penyediaan air bersih untuk memastikan akses yang merata.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
										Meningkatnya Sarana dan prasarana jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	53,37	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat, hasil perkebunan dan pertanian.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitas peningkatan pelayanan air limbah domestik				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	97,77	Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pengembangan infrastruktur permukiman yang layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
											Angka Stunting	12,79		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
														Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi							
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan akses ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	Meningkatkan kualitas SDM yang berdayasaing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	- Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun (tahun)		9,75	Meningkatkan akses masyarakat, termasuk anak-anak dari kelompok rentan, terhadap pendidikan yang berkualitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri) - Penyelenggaraan pendidikan inklusif - Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54		- Peningkatan Literasi masyarakat				- Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,84		Peningkatan Literasi masyarakat
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama	- Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama	Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang agamis, unggul, sehat dan cerdas	Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Keurukunan Umat Beragama (indeks)	77,07	Menggalakkan kampanye pencegahan korupsi, Narkoba, Judi, Penyimpangan Prilaku anak dan penyeludupan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan ketentraman di masyarakat								
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	71,3		
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (point)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan			Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	88,87		
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak	Nilai survei penilaian integrasi (point)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN	- Peningkatan Profesionalisme ASN	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah					

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Berbasis Digital	k dengan ASN yang profesional			- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	amanah melalui penerapan E-Governm ent						
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN							
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi							
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	Membangun forum konsultasi publik sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam pengambilan kebijakan	Kegiatan penataan organisasi
											Indeks SPBE	3,02		

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai AKIP	BB	Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan pemerintah	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan					Opini BPK terhadap LKD	WTP	Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Tahun (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemantapan jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/ barang melalui terminal/dermaga/ bandara tahun (%)	25%	Mengembangkan sistem transportasi umum yang efisien dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.	Penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

[illegible]

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
														Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Sampah
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau							
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatkannya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdayasaing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, Usaha UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor produktif lainnya	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya usaha mikro	Penumbuhan usaha mikro baru (Orang)	950	Mendorong penumbuhan UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Hilirisasi SDA (Perkebuan)	Meningkatkannya	Nilai Pembentukan Modal	188,62	Memperbaiki iklim dan	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi							

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		nan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikana n)	investasi daerah	Tetap Bruto (juta rupiah)		promosi investasi	2. Peningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri							
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,9 7	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM			Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	27	Mendorong penumbuhan UMKM	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya			Menurunnya Ketimpangan	Indeks Gini (%)	0 - 0,4		

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						Retribusi Daerah								
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52									
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial - Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM - Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan - Memperkuat	- Peningkatan kompetensi aparatur desa - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa - Peningkatan kerjasama antar desa - Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - Penambahan lapangan pekerjaan							

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						pemerintahan desa								
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja - Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja - Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05			Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian,	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3-4		

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
								industri, Usaha UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor produktif lainnya						
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26,947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenities pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, Usaha UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor produktif lainnya.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	250000		
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan Budaya Melayu.	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)	90		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROVINSI								KABUPATEN SIAK						
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
														Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
										Meningkatnya Benda/kawasan cagar budaya yang dilakukan restorasi	Persentase Benda/kawasan Cagar Budaya yang dilakukan restorasi	70		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal								
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4									

Tabel 5.10
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hilir

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	73.04	Kolaborasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas keluarga sejahtera	Fasilitas Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas keluarga sejahtera
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitas peningkatan pelayanan air limbah domestik				Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)	8.5	Kolaborasi peningkatan program-program kesejahteraan sosial melalui pelayanan dasar sosial yang terpadu	Fasilitas Kolaborasi peningkatan program-program kesejahteraan sosial melalui pelayanan dasar sosial yang terpadu
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi				Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.4	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pendayagunaan teknologi tepat guna	Peningkatan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
													dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis	ramah lingkungan serta optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus				Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71.5		
						- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5		
						- Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Penyelenggaraan pendidikan inklusif							
							Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik							
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54		- Peningkatan Literasi masyarakat							

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat	- Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama	2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur pembangunan yang merata	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	79.3	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdayasaung dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis	pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdayasaung, meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.83	optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis	
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan			Meningkatnya kapasitas dan kualitas pertanian daerah	PDRB per Kapita	152.7		
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN	- Peningkatan Profesionalisme ASN				Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.68	Peningkatan infrastruktur dasar yang handal dan	Percepatan Peningkatan infrastruktur, Fasilitasi

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Berbasis Digital	dengan ASN yang profesional			- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan						menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dengan penciptaan industri baru untuk meningkatkan kesempatan kerja	Tenaga Kerja Handal, dan Fasilitas Industri Baru
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN			Meningkatnya hilirisasi dalam penguatan kinerja industri kerakyatan	Kontribusi PDRB Industri Kategori Pengolahan	23,47		
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi			Menguatnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau			Terwujudnya kondisi ekonomi masyarakat yang memiliki kualitas hidup tinggi	Indeks Gini	0,278		
						- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah							
						- Meningkatkan kualitas pengawasan daerah								

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah				Terwujudnya kehidupan layak masyarakat yang sejahtera dan merata	Tingkat Kemiskinan	6.66		
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan								
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Pertahun (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemandapan jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa	Regulasi dan Tata Kelola Berintegrasi dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi		Reformasi birokrasi menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan Good and Clean Governance serta Layanan Berbasis E-Government	Regulasi dan Tata Kelola Berintegrasi dan Adaptif
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	4	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Yang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	64.57	Mendorong kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip green ekosistem, meningkatkan kewaspadaa	

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati			Berkelanjutan				n terhadap risiko kebencanaan melalui adaptasi baru terhadap lingkungan	
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim			Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	149,95		
							2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau							
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan							
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi							
							2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri							
							3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan)							
							4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri							

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM							
				2. Gini Rasio (point)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya							
				3. Nilai tukar petani (point)	167,52									
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat	- Peningkatan kompetensi aparatur desa							
						- Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa							
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa							

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja							
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan							
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja								
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja								
						- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda								
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05									
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu							

PROVINSI								NO	KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan		Prioritas	Sasaran	Indikator	Targget	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			2. Meningkatnya ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu							
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian,								
						dan pengakuan								
						budaya lokal								
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4									

Tabel 5.11
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
N o	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan akses air minum	- Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional	Peningkatan Pemenuhan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum/Bersih	74	Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih	Pemenuhan Akses Air Minum Perpipaan
						- Membangun sarana prasarana sanitasi	- Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	91.3	Membangun sarana prasarana sanitasi	Penyediaan Air Minum Layak Penyediaan Layanan Sanitasi Layak
										Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100	Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
										Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	16.41	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
									Persentase Perumahan dan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasana Sarana dan Utilitas umum)	59	Meningkatkan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus - Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri) - Penyelenggaraan pendidikan inklusif - Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan / Peningkatan Akses Dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	b. Rata-rata Lama Sekolah	8.5	Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas
												Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru	Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Pemerataan Tenaga Guru
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54	- Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Peningkatan Literasi masyarakat			a. Angka Harapan Lama Sekolah	12.98	Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	Peningkatan Literasi masyarakat
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	- Menumbuhkan membangun pengamalan kehidupan beragama	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka Kejadian Konflik SARA	0	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan dan Pengamalan dalam Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat		Adat Dan Budaya Daerah				Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Kerukunan	Peningkatan Toleransi, Kerjasama dan Kesetaraan Antar Umat Beragama
													Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
												Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ideologi Pancasila
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan / Peningkatan Akses Dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72.03	Meningkatkan Keluarga sejahtera	Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
												Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
												Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita dan Angka Kesakitan (morbiditas)
												Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan	Peningkatan Peran Pemuda Dalam Prestasi Olahraga

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												Pengelolaan Kepemudaan dan Olahraga	
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57.5	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	100		
										Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	1		Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Penyediaan Layanan Pengaduan dan Perlindungan
										Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	92.5		
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Profesionalisme ASN - Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	82.5	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA								
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan			
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN									
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan dalam Penerapan SOP Pelayanan Publik			
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah - Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah					Meningkatnya penerapan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.5	Meningkatkan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03		- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah					Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100	Meningkatkan kualitas manajemen birokrasi secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP		- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyeleng					Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah	Peningkatan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						garaan pemerintahan							
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Tahun (Persen)	1,79	- Memanfaatkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemandirian jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Peningkatan Pemenuhan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara tahun	11.5	Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya	Peningkatan Akses Jalan dan Jembatan
												Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan, Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor
									Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara	Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik	76.89	Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Gedung Pemerintah
									Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	74	Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir	Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Penanganan Abrasi/Banjir
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan	Peningkatan Pemenuhan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	59.67	Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan	Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Air
										Peningkatan Indeks Kualitas Udara	87.64		Peningkatan Pengendalian Kualitas Udara

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	mitigasi perubahan iklim	Ruang Dan Berwawasan Lingkungan		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40.55		Peningkatan Pengendalian Kualitas Tutupan Lahan
						- Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati							Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
													Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah (B3)
												Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
												Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana	Peningkatan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana
												Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan non Kebakaran
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						berketahanan iklim	2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	75.15	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan	Peningkatan Ketersediaan Keamanan dan Kualitas Bahan Pangan
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Miliar Rupiah)	5189.41	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	Peningkatan Promosi Investasi
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya	a. Nilai PDRB ADHB (dalam miliar)	40.921.0	Meningkatkan/Mempertahankan produksi pertanian/perkebunan dan perikanan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			kesenjangan pendapatan			dan perikanan - Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	kesenjangan pendapatan				
				2. Gini Rasio (poin)	0,303					b. Indeks Gini	0.276		Peningkatan Produksi Perikanan
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52					c. PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	51.23	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal	Fasilitasi Dalam Pengembangan Produk IKM dan UMKM Lokal
												Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian dan Pelaku Usaha
										d. Persentase Pertumbuhan PAD	14.84	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Peningkatan Sumber-sumber Potensi Pendapatan Baru
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsi-an sosial masyarakat	- Peningkatan kompetensi aparatur desa		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	9.89	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan melalui perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin pasca pandemi
						- Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan	- Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa					Perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin pasca pandemi covid-19	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Peningkatan kerjasama antar desa						
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM						Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha ekonomi desa	Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing BUMDes Dalam Memperkuat Ekonomi Desa
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan							
						- Memperkuat pemerintahan desa							
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05	- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	4,24	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan Keterampilan, Kompetensi dan Produktivitas Pencari Kerja
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja	- Penambahan lapangan pekerjaan						
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kemandirian dan kepemimpinan pemuda							
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenities pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan daya tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1,166,667	Meningkatkan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Secara Berkelanjutan
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah	Meningkatkan Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terkelola, dimanfaatkan, berkembang dan terbina	45	Meningkatkan Pengelolaan, Pengembangan, Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Peningkatan Pengelolaan, Pengembangan, Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal							
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.12
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Indragiri Hulu

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi Baik (%)	93.41	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana air minum layak	1.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2.Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitas peningkatan pelayanan air limbah domestik	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi Baik (%)	93.41	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sanitasi	1.Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 2.Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat'
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi						
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus - Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)	Peningkatan SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 7-15 tahun (tahun)	9.49	Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan	1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan SMP 2.Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 5.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Penyelenggaraan pendidikan inklusif Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Peningkatan Literasi masyarakat						
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54					Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.42	Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan SMP 2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat	- Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama						
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	Peningkatan SDM	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.85	Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana non alam atau pandemi	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 2. Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan						
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Profesionalisme ASN - Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan						
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN						
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi						
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
N o	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah						
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah							
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggara n pemerintahan							
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Tahunan (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemantapan jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	43.62	Memantapkan infrastruktur jalan	1.Pemeliharaan Berkala Jalan 2.Rekonstruksi Jalan 3.Pembangunan Jembatan 4.Pemeliharaan Berkala Jembatan
						Meningkatnya Pelayanan Transportasi			Persentase Peningkatan Pergerakan Orang dan Barang melalui Terminal/Dermaga	7.2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 2.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	Pengembangan / Pengelolaan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	89.93	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1.Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara 2.Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati			Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	41.2	Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Peningkatan Pembangunan Pertanian	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	PDRB ADHK Sektor Pertanian (milyar rupiah)	10,577.06	Meningkatkan dukungan sarana produksi pertanian	1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 3. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Peningkatan Pembangunan Pertanian	Meningkatnya Kesempatan Kerja Sektor Pertanian	Pekerja Sektor Pertanian (Orang)	98,709	Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan pelaku sektor pertanian dan perikanan	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya						
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52								
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Peningkatan kompetensi aparatur desa - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa						
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM - Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kerjasama antar desa - Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kemandirian ekonomi	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (%)	3.76	Meningkatkan produksi hasil industri dan UMKM	1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan						
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja		Pengembangan Ekonomi Kreatif	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,46 - 2,24 %	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	1.Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 2.Perluasan Kesempatan Kerja
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda							
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05								
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Mengembangkan destinasi wisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	80,526	Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata	1.Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 3.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
N o	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan promosi dan atraksi wisata							
			2. Meningkatnya ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu						
			3. Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal		Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya	Jumlah Kekayaan Budaya yang dilindungi (Unit)	35	Meningkatkan Pengelolaan Kelestarian dan pengembangan Kekayaan Budaya	1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 3. Pelindungan Cagar Budaya
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.13
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Kampar

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur ≥ 25 tahun (Tahun).	9,63 Tahun	Menciptakan jejaring pendidikan pengembangan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pibidangan keilmuan yang terkait dengan karakteristik global pendidikan masa depan sebagai kelanjutan wajib belajar pendidikan dasar dan 12 tahun tahun	
										Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,14 Tahun		
									Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,19 Tahun	Memasyarakatkan budaya hidup sehat melalui pendidikan kesehatan disekolah; keluarga berencana mengatur usia perkawinan dan jarak kelahiran; kesehatan reproduksi; Meningkatkan kesehatan ibu dan anak usia dibawah lima tahun; Melaksanakan kesehatan keluarga melalui senam sehat, makanan sehat dan menu sehat; Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan tata cara pengolahan sampah	
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi		Menurunnya Tingkat kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	6,89-7,19%	Perencanaan pendidikan menengah dan tinggi yang terpadu dengan ketenagakerjaan, pengendalian pertumbuhan penduduk dan	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						seluruh wilayah						penciptaan lapangan kerja sehingga terciptanya keseimbangan antara lulusan Lembaga Pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia	
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus - Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri) - Penyelenggaraan pendidikan inklusif - Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Peningkatan Literasi masyarakat		Menurunnya TPT	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,71-2,95%	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54								
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	- Menumbuhkan pengamalan kehidupan beragama						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat							
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)						
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (point)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Profesionalisme ASN - Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62.5	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi	
				Nilai survei indeks berakhlak (point)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN			Opini BPK	WTP		
				Nilai survei kepuasan masyarakat (point)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi			Nilai SAKIP	Nilai BB		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (point)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1		

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah				Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	C		
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan							
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga / Bandara Pertahun (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	1. Meningkatkan kemantapan jalan 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Meningkatkan Kualitas L.H Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Terkendalinya dan lestariannya lingkungan hidup	Penurunan emisi GRK terhadap baseline	34,102.87	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati							
			2. Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	24.67%	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet,	Meningkatkan investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri			Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	29.18%	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		sagu; Perikanan)					3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri						
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	0.96%	Meningkatkan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya		Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	3.83%	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52				Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	Produksi Padi (Ton)	29.126,81		
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana	- Peningkatan kompetensi aparaturnya desa - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa			Rasio Ketersediaan	22.48%	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial							
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM - Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kerjasama antar desa - Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja		Meningkatnya Kontribusi sector unggulan	Kunjungan wisata	1.2	Meningkatkan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan			Lama kunjungan Wisata	7.64	Meningkatkan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja							
						- Meningkatkan perlindungan							

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						n dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda							
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05								
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenities pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu		Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kampar Yang Agamis	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	12	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara	
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12		
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal				Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11		
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.14
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan
Kabupaten Bengkalis

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
N o	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni.	98.11	Fasilitasi penyediaan; serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat	
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik						
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi						
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus - Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10.85	Mengupayakan kesinambungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan berprestasi	

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Penyelenggaraan pendidikan inklusif						
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54		Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Peningkatan Literasi masyarakat					Meningkakan Cakupan Peserta Pendidikan Paket	
										Harapan Lama Sekolah		Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai minimal cakupan peserta didik.	Pengembangan Pendidikan Menengah Pertama dan Lanjutan/Kejuruan
										Angka Kelulusan	100%	Fasilitasi cakupan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.	
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat	- Menumbuhkan gkan pengamalan kehidupan beragama						
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Prima	Usia Harapan Hidup	72.03	Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat.	
							- Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)						

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												Mengoptimalkan keterjangkauan akses layanan kesehatan rujukan	Fungsionalisasi RS Pratama Rupa
													Kesiapan RS Pratama Bukit Batu (Lahan, kajian dan Amdal).
									Meningkatnya kualitas Penanganan Stunting	Prevalensi Stunting	12	Pencegahan Stunting Secara Dini Melalui Peningkatan Pangan Sehat dan Gizi Masyarakat Khususnya di Masa Pra Nikah Dan Hamil serta Balita Dan Anak Usia Sekolah	
												Penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan pusat kesehatan berbasis masyarakat	
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	92	Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat	
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN	- Peningkatan Profesionalisme ASN	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A	Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah	

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Berbasis Digital	dengan ASN yang profesional			- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah	Penyelenggaraan pemerintah			daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan	
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan	
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi						
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	2.3	Menyedaikan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi	
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah							
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan							
3	Pemerataan Infrastruktur Yang	Pemenuhan	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan	1. Meningkatkan kemandapan jalan	Penyediaan Infrastruktur dan	Tersedianya infrastruktur jalan	Panjang Jalan Poros dan jembatan pada	33,125 KM	Fasilitasi peningkatan kualitas jalan	Rencana Pembangunan Jembatan P.

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
	Berkelanjutan	Infrastruktur		Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Pertahun (Persen)		- Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Penataan Kawasan yang Berkelanjutan	wilayah dalam kondisi baik	wilayah perbatasan dalam kondisi baik (Km)		(jembatan) strategis pada kluster kawasan yang bersumber dari anggaran non APBD	Sumatera - P.Bengkalis
										Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	61.44%	Mengembangkan jaringan jalan poros, jembatan dan penataan drainase pada wilayah kecamatan dan perdesaan.	Rencana Pembangunan Jembatan Dumai - P.Rupat
													Peningkatan Konektivitas Air Putih (P.Bengkalis) - P.Merbau
													Optimalisasi roro Dumai - P. Rupat
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim - Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim		Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	71.29	Menata kawasan permukiman perkotaan kecil dan permukiman kumuh	
												Mengupayakan penyediaan serta pengelolaan	

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan	
												Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga	
												Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup	
												Kemitraan pengembangan potensi kawasan perbatasan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup	
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	Pertumbuhan Agregat Sektoral di Luar Migas	2.75%	Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan	

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri					Memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan	Keberlanjutan status KEK P. Bengkalis dan Rencana Pembangunan infrastruktur pendukung KEK
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM		Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi	Pendapatan Perkapita Penduduk	203.21	Meningkatkan struktur sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dan kelurahan	Pengembangan KIBB (Kawasan Industri Buruk Bakul)
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya			Gini Ratio	0.276	Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat	Pembangunan PLBN P. Rupert
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52					Angka Kemiskinan	5.69%	Menjamin ketersediaan Pangan bagi masyarakat	
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan	- Peningkatan kompetensi aparatur desa - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa						

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial							
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa - Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - Penambahan lapangan pekerjaan - Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan							
						- Memperkuat pemerintahan desa							
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja							
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja							
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda							
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05								
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu		Terwujudnya nilai-nilai agamadan budaya melayu	PersetasePemajuan KebudayaanMelayu	100%	Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi	Pemantapan KSPN Pulau Rupat terkoneksi

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)		- Meningkatkan promosi dan atraksi wisata						informasi pendukung pengembangan promosi wisata pantai, kuliner warisan budaya lokal	dengan rencana konektivitas Dumai - P. Rupert - Malaka
			2. Meningkatnya ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu					Mengembangkan dan mengimplemantasikan model tata kelola potensi wisata terpadu	
			3. Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal						Melaksanakan pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap bangunan dan benda cagar budaya (BCB) bersitus kebudayaan melayu	
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.15
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Pelalawan

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum	- Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar kepada masyarakat	Rasio Permukiman Layak Huni	87.5	Percepatan penurunan permukiman kumuh	- Mengurangi angka rumah tidak layak huni - Peningkatan Drainase Perkotaan
						- Membangun sarana prasarana sanitasi	- Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman					Kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih	Peningkatan Infrastruktur Sanitasi dan Air bersih Perkotaan dan Pedesaan
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitas peningkatan pelayanan air limbah domestik						
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi						
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	Peningkatan Kualitas SDM	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Berkeadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	65.78	Meningkatkan Akses Pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan masyarakat
						- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)					Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pemberian Beasiswa Pendidikan
						- Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Penyelenggaraan pendidikan inklusif						
							Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik						
				Harapan lama	13,54		- Peningkatan Literasi masyarakat			Indeks Pembangunan	68	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Peningkatan Pelayanan dan Sosialisasi

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				sekolah (tahun)						Literasi Masyarakat			Keperustakaan Daerah;
													Digitalisasi Buku Bacaan
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	- Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama		Terwujudnya Masyarakat yang Agamis dan Berakhlak Mulia	Tingkat Pertumbuhan Rasio Keterisian Rumah Ibadah	0.5	Meningkatkan kenyamanan dalam pengamalan agama dalam kehidupan	Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan Bantuan operasional dan aktivitas keagamaan
						- Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama							Insentif Tokoh Agama (Imam, Gharim, Pendeta, dan lainnya)
						- Meningkatkan ketentraman di masyarakat							Program Jumat Berkah (Pengajian/khataman Al- Quran setiap minggu di setiap Desa)
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan		Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	80.15	Meningkatkan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan dan penanganan krisis Kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan
													2. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasana Kesehatan
													3. Meningkatkan pelayanan Kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	- Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)						Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)
						- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)		Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	89.79	Meningkatkan Keteraan Gender	Peningkatan Peran serta Perempuan dalam Berorganisasi

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		dan Kesetaraan Gender				Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)
													Pengembangan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga
													Perlindungan terhadap perempuan dan Anak
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Profesionalisme ASN - Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah				
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN						
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi			Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Meningkatkan pelayanan masyarakat	Penigkatan Akses dan waktu Pelayanan publik
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah						
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah				Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja	72.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	Penyediaan Data Terintegrasi Basis Perencanaan dan Pembangunan (One Big Data)

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
													Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, dan evaluasi kinerja.
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Pertama (Persen)	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan	1. Meningkatkan kemandapan jalan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar kepada masyarakat	Peningkatan Indeks Konektivitas Wilayah	2.5	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan dasar
						- Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi						Peningkatan Infrastruktur penunjang perekonomian
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim		Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.5	Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
						- Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati							Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan persampahan dan kebakaran hutan
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim						
							2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Penguatan Ekonomi Unggulan Daerah					
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri		Meningkatnya kualitas investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	12.5	Meningkatkan Iklim Investasi baik PMDN maupun PMA	Peningkatan Pelayanan Perizinan Kemudahan Investasi
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM		Meningkatnya kualitas dan daya saing produk unggulan daerah serta pengembangan desa mandiri	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,87	Meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat;	Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
													Pemasaran produk pertanian
													Pengembangan SDM Petani
										Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		Meningkatkan Produksi Industri Kecil dan Menengah	Penguatan industri berbasis ekonomi kerakyatan.
												Meningkatkan dan menumbuhkembangkan pengusaha pemula	Peningkatan jumlah pengusaha UMKM pemula dan Scale Up UMKM
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Penurunan Indeks Gini			
										Indeks Pengeluaran			
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52								

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat	- Peningkatan kompetensi aparatur desa			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	10%	Meningkatkan kemandirian Desa	Pemasaran produk pertanian
						- Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa						Pengembangan SDM Petani
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa						Peningkatan Ststus Desa Mandiri
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan						
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja							
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja							
						- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda							

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
No	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05				Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00-2,13	Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan kesempatan masyarakat lokal dalam job fair
												Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal	Peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan
												Meningkatkan kewirausaha muda	pasar dunia kerja di Kabupaten Pelalawan
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Pajak Restoran, Hiburan, Hotel Rp. Juta	13,000	Meningkatkan daya Tarik wisata Meningkatkan promosi pariwisata	Peningkatan Citra, Branding dan pemasaran destinasi wisata (Pelalawan Menawan dan Berkawan)
												Mengembangkan ekonomi kreatif penunjang wisata	Pengembangan Produk Kreatif
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu		Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	0,63	Memajukan budaya melayu khususnya budaya tak benda	Pelestarian budaya lokal
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal							Peningkatan penggunaan adat melayu dalam kegiatan bermasyarakat
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Tabel 5.16
Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kota Pekanbaru

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)		- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Peningkatan Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	15,6 - 15,66	Meningkatkan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas dan pemerataan peserta didik dan tenaga pendidik
										2. Rata-rata Lama Sekolah	12,08 - 12,13		Peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif ditingkat PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama
									2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
									3. Meningkatnya Standar Hidup Layak	4. Pengeluaran Per Kapita	Rp. 14.872.839	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitas peningkatan pelayanan air limbah domestik						Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	- Peningkatan akses dan infrastruktur Energi					- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus - Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri) - Penyelenggaraan pendidikan inklusif - Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Peningkatan Literasi masyarakat					- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja - Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan kesempatan kerja - Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja - Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54								
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentrangan di masyarakat	- Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)						
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembanguna - Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan						
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	- Peningkatan Profesionalisme ASN - Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	88,46	- Meningkatkan profesionalisme ASN	Peningkatan Kapasitas ASN
										Nilai SPBE	3,81	- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan penerapan SOP Pelayanan
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	71,2	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Penataan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru dan Perangkat Daerah

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi			Nilai LPPD	4 (Tinggi)	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah					- Meningkatkan kualitas pengawasan daerah - Meningkatkan kualitas perencanaan daerah - Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kapasitas APIP Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	- Meningkatkan kualitas perencanaan daerah							
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan							
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan	1. Meningkatkan kemantapan jalan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	1. Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	Jalan Dalam Kondisi Mantap	74,36%	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan Kemantapan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
				Bandara Pertahun (Persen)		- Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi			Keterjangkauan Layanan Angkutan	81%		Peningkatan Operasional Angkutan Publik
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim		2. Meningkatnya Akses Air Bersih	Cakupan Rumah Tangga Pelayanan Air Bersih Perpipaan	38.250 SR		Peningkatan layanan air bersih melalui sistem perpipaan
						- Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati			3. Meningkatnya Sanitasi Yang Layak	Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	7.000 SR		Peningkatan sanitasi limbah melalui sistem perpipaan
			2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Luas Areal Kawasan Kumuh	87,76 Ha		Penurunan luasan areal kawasan kumuh
							2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau			Rasio Perumahan yang difasilitasi PSU	16%		Peningkatan perumahan yang difasilitasi PSU
										Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	92,31%		Peningkatan Rumah Tangga yang layak huni dan terjangkau
									5. Menurunnya Titik Genangan	Jumlah Titik Genangan yang tertangani	60 Titik		Penurunan titik genangan
									6. Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	Luasan RTH Publik di wilayah Perkotaan	5,68%		Peningkatan luasan RTH Publik di Perkotaan

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
													Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya kerahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Peningkatan Pembangunan Ekonomi	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Gini Rasio	0,379 - 0,389	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan iklim dan promosi investasi
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	1. Peningkatan iklim dan promosi investasi			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	21,91%		Penyediaan insentif pembiayaan bagi UMKM
							2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri			Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	Rp. 2.080 Milyar		Peningkatan kapasitas pelaku UMKM
							3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan)		2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	90,56		Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan kepada Poktan
							4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri		3. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional	PMDN = 2,82 T PMA = 2,23 T		
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM						
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya						
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52								

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungisian sosial masyarakat - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Peningkatan kompetensi aparatur desa - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa						
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa						
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan						
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
						- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja							

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
						- Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja		Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Meningkatnya ketahanan budaya	Persentase budaya melayu yang direvitalisasi	15%	Peningkatan Pengembangan Budaya Melayu Peningkatan Pelestarian Objek Budaya Melayu	Peningkatan pelestarian Budaya Melayu
					- Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda								
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05								
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu						
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu						
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal							
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Berdasarkan tabel Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan kabupaten/kota diatas, Kabupaten Kepulauan Meranti belum menyampaikan hasil Sinergi Kebijakan dengan Provinsi Riau hingga penetapan RKPD Provinsi Riau tahun 2025. Hal ini dikarenakan kabupaten tersebut belum dapat menentukan prioritas dan target, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5.3 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Pengembangan suatu wilayah harus melihat kondisi internal dan mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor internal meliputi pola-pola pengembangan SDM, informasi pasar, sumberdaa investasi, kebijakan investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kelembagaan lokal dan tata kelola pemerintahan serta kerjasama dan kemitraan. Faktor eksternal meliputi ketimpangan wilayah dan pengembangan kapasitas otonomi daerah serta perdagangan bebas. Permasalahan daerah saat ini masih terdapat ketimpangan pembangunan wilayah yang sangat besar antara perkotaan dan pedesaan. Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Riau maka dilakukan melalui pembangunan secara merata diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal provinsi dan kabupaten/kota secara holistik dalam kondisi terkini sehingga menghasilkan kebijakan dan keterpaduan program dan kegiatan prioritas antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maka dilakukan kesepakatan Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/kota se- Provinsi Riau Tahun 2025. Kesepakatan Indikator Makro ini memiliki arti penting serta mengandung momentum yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan tahun pertama dan sebagai perkuatan fondasi transformasi pembangunan menuju Riau Maju Serta penentuan kebijakan kewilayahan untuk merumuskan prioritas, fokus dan lokus pembangunan tahun 2025 serta di implementasikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pelaksanaan kesepakatan Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota se- Provinsi Riau Tahun 2025 ini menjadi harapan dapat memberikan arah yang jelas dan komprehensif bagi pembangunan disemua tingkatan pemerintahan serta

mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan Rakortekrenbang 2025 ini menyusun 31 (tiga puluh satu) indikator makro pembangunan sebagai berikut :

Tabel 5.17
Sinergitas Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR MAKRO	KABUPATEN/KOTA												
		KUANSING	INHU	INHIL	PELALAWAN	SIAK	KAMPAR	ROHUL	BENGKALIS	ROHIL	KEP. MERANTI	PEKANBARU	DUMAI	PROVINSI
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,69 – 3,89	4,4 – 4,68	4,6 – 4,89	4,45 – 4,73	3,5 – 4,00	4,18 – 4,45	4,34 – 4,63	2,08 – 2,15	2,63 – 2,83	4,81 – 5,00	6,30- 6,54	5,46 – 5,82	3,90 – 4,23
2	PDRB per Kapita (Rp Juta)	159,87 – 162,47	128,72 – 140,00	**	**	236,25 – 271,45	146,67 – 157,91	107,65 – 114,79	**	152,7 – 158,23	142,04 – 151,11	171,024 – 182,32	**	183,85 – 203,88
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	27,15 – 27,50	28,5 – 29,0	24,25 – 26,45	49,69 -50,00	38,19 – 44,78	23,93 – 25,09	26,44 – 27,61	17 - 18	20,52 – 20,76	23,49 – 23,95	21,5 – 21,65	66,11 – 69,11	27,59
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,22 – 7,41	5,36 – 5,62	5,07 – 5,21	6,94 - 7,66	4,52 - 4,79	6,14 - 6,67	9,2 - 9,36	5,63 - 5,78	6,7 - 7,00	19,31 – 20,74	2,46-2,71	2,96 – 3,04	5,19 – 6,19
5	Rasio Gini (indeks)	0,249 – 0,246	0,23 – 0,24	0,263 - 0,270	0,252 - 0,260	0,300 - 0,325	0,273 - 0,304	0,232 - 0,242	0,265 - 0,270	0,278 - 0,316	0,244 – 0,257	0,373 – 0,387	0,32 – 0,34	0,379 – 0,382
6	Kontribusi PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota (%)	4,98	5,12	8,8	**	10,68	10,64	5,17	15,83 - 17,00	9,5	2,55	15,09	4,85	4,36
7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,23 – 0,25	0,71 – 0,76	0,43 - 0,44	0,16 - 0,25	0,05 - 0,05	0,08 - 0,09	0,25 - 0,27	0,28	0,26	0,29	1,75 - 2,0	0,71	0,54
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,00 – 41,66	36,31 – 36,56	23,1 – 23,22	17,65 – 18,02	24,86 – 25,07	34,14 – 34,37	22,7 – 23,34	20,63 – 20,84	11,44	22,99 – 23,99	80,44 – 86,2	41,06 – 41,82	32,21 – 33,6
9	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0 - 0	0,4 – 0,51	**	**	49,03 - 50,00	**	**	60	0,04030 - 0,03939	**	0,1 - 0,2	**	22,2 - 24,0
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,28 – 0,32	0,14 – 0,18	0,12	**	0,15 - 0,18	0,25-0,27	0,20 -0,21	0,065-0,070	0,18	0,07 - 0,10	0,58 - 0,60	1,01 - 1,12	0,46 – 0,48
11	Tingkat Inflasi (%)	2,55 – 3,00	2 - 3	2 - 3	2,5 - 3,0	2-3	2,5-3,5	2,5-3	3	2,30 - 2,50	2,27 - 3,00	2 - 3	2,9 - 3	2,0 – 3,0
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,28 – 2,35	2,13 – 2,46	1,38 – 1,56	2,0 -2,20	54-	3,02 - 3,37	2,95-3,2	6,7 - 6,8	3,82 - 4,14	4,49 – 4,87	5,2 – 5,42	4,7 - 5,1	3,55 – 3,66
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,81 – 47,55	48,93 – 50,68	37,88 – 38,21	46,5 – 47,75	44,16 – 47,00	37,24 – 37,32	44,75 – 45,70	42,56 – 42,75	45	47,09 – 47,14	54,82 – 55,15	45,7 – 47,16	45,70
14	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	21	38	44	41	15	32	41	13	17	39	39	41	20

NO	INDIKATOR MAKRO	KABUPATEN/KOTA												
		KUANSING	INHU	INHIL	PELALAWAN	SIAK	KAMPAR	ROHUL	BENGKALIS	ROHIL	KEP. MERANTI	PEKANBARU	DUMAI	PROVINSI
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	38-40	38,05 – 45,00*	20	60	38-40	22,75	36,6	57,8	**	5,5	62 - 63,58	55	38,05
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	1000*	263,46	*g	0,2	5*	**	0,05	4,38*	0,45	0,3	8*	**	16.000
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	3,00	2,4	2,5	3,01 - 3,06	3,26	3	3,29	2,61	3,25	3,81	3,45	3,06
18	Indeks Ketimpangan Gender	0,50	0,56	0,55	0,46	0,45-0,50	0,47	0,58	0,44	0,48	0,45	0,08 -0, 1	0,4	0,44
19	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	595,15*	962,39	402,26	587,08	716,03*	999,86	546,3	4800	593,72	560	2.212	2876,21	1.500
20	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	12,49	11,05	8,38	9,7 - 10,5	9,5	**	7,98 – 8,05	10,99 – 11,51	11,36	14,69	10,49	11,16	11,07
21	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	16,65*	10,93*	**	15,65	16,88*	40,76	16,49	41,49	51,52	16,48	18,19*	17,52	32,87
22	Indeks Modal Manusia	0,56*	0,56*	0,56	0,56	0,56*	0,56	0,56	0,56	**	0,56*	0,56*	0,56	0,56
23	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,8 - 2,0*	1 - 2*	**	04-May	1,8 - 2,0*	2,37	1	5 - 6	1 - 2	1-2*	1 - 2*	0,5	29
24	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	7,92*	**	**	**
25	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,3*	**	**	**	**	**	**	**	**	4,6*	**	**	6,1
26	Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi	**	**	**	**	**	**	**	**	**	8,27*	**	**	8,27
27	Indeks Reformasi Hukum	60	50-55	**	50 - 55	60	65	60 - 65	55 -60	55,9	60	60-70	**	70
28	Indeks Pelayanan Publik	4,13	3,5	**	**	3,5	**	**	3,89	3,70	3,5 - 4,00	4	**	4,11
29	Indeks Integritas Nasional	74,52	73	83,35	**	74,52	**	**	**	73,02	72,25	74	**	74,52
30	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	**	**	73,80 – 76,86	73,80 – 76,86	**	**	**	73,80 – 76,86	**	73,80 – 76,86*	**	73,80 – 76,86	73,80 – 76,86
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	**	**	73,50 – 73,51	73,50 – 73,51	**	**	**	73,50 – 73,51	**	73,50 – 73,51*	**	73,50 – 73,51	73,50 – 73,51

Sumber: Hasil Pembahasan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2025

Keterangan : * angka sementara yang dihitung Provinsi

** dihitung ulang

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Selain hal tersebut Penyusunan RKPD 2025 memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial) dan politis yang antara lain memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.

1. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan disajikan pada tabel 6.1 berikut ini.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						2.748.709.249.355,00							2.908.494.527.317,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.748.709.249.355,00							2.908.494.527.317,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.748.709.249.355,00							2.908.494.527.317,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan	100 Persen			100 Persen	1.499.194.760.970,00						100 Persen	1.565.318.426.050,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen			7 dokumen	5.526.490.667,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	7 dokumen	5.765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			3 Dokumen	3.888.745.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Dokumen	3.967.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			4 Laporan	1.637.744.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4 Laporan	1.798.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	1.466.919.102.581,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	1.530.932.862.642,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31394 Orang/ Bulan			15697 Orang/ Bulan	1.466.919.102.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	15697 Orang/ Bulan	1.530.932.862.642,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen			100 Persen	336.199.854,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	369.819.917,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	336.199.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Laporan	369.819.917,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	6.577.719.977,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	7.232.121.129,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket			9 Paket	209.997.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	9 Paket	219.998.363,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Paket			54 Paket	3.066.816.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	54 Paket	3.373.507.788,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2600 Paket			1300 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1300 Paket	440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			17 Paket	794.947.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Paket	874.499.778,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920 Laporan			460 Laporan	2.105.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	460 Laporan	2.324.115.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Disediakan	56 Unit			26 Unit	1.034.840.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	29 Unit	1.138.357.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	52 Unit			26 Unit	1.034.840.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	26 Unit	1.138.357.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani	804 Orang			404 Orang	9.979.995.613,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	404 Orang	10.827.996.210,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	2.897.060.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	12 Laporan	2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	440 Laporan			220 Laporan	7.082.935.189,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	220 Laporan	8.227.996.210,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara	100 Persen			100 Persen	5.298.491.478,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	5.530.349.152,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit			17 Unit	268.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Unit	295.196.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit			17 Unit	230.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Unit	405.341.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit			45 Unit	299.830.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	45 Unit	329.813.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			15 Unit	4.499.991.478,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	15 Unit	4.499.999.152,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan BLUD	100 Persen			100 Persen	3.521.920.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	3.521.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	42 Unit Kerja			21 Unit Kerja	3.521.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	21 Unit Kerja	3.521.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS			77,40 APS 20,37 APS 79,00 Persen	1.218.904.474.743,00						80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS	1.315.526.101.267,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,95 Perse n 82,95 perse n			82,45 persen	728.995.005.647,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	82,95 Perse n 82,95 perse n	760.736.164.697,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit			2 Unit	9.999.999.653,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Unit	10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang			1 Ruang	584.099.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4 Ruang	2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			3 Ruang	1.768.424.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Ruang	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang			1 Ruang	988.694.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit			1 Unit	1.499.124.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Unit	1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	38 Unit			23 Unit	6.688.344.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	20 Unit	6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	42 Ruang			47 Ruang	12.464.207.218,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	8.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang			7 Ruang	1.429.875.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	8 Ruang	2.780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang			1 Ruang	198.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULTURASISMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Ruang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			5 Ruang	5.888.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Ruang	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	212 Paket			36 Paket	4.005.247.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	99 Paket	11.937.776.590,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	15 Paket			4 Paket	489.154.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Paket	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	240 Paket			78 Paket	21.680.499.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	120 Paket	31.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600 Peserta didik			4800 Peserta didik	5.745.099.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	300 Peserta didik	5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2392 Peserta Didik			1164 Peserta Didik	9.075.788.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1196 Peserta Didik	9.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9746 Orang			825 Orang	6.230.163.953,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4873 Orang	7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	918 Satuan Pendidikan			459 Satuan Pendidikan	2.489.666.837,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	459 Satuan Pendidikan	3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	892 Satuan Pendidikan			469 Satuan Pendidikan	269.113.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	446 Satuan Pendidikan	269.113.748.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	892 Orang			446 Orang	290.245.985.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	446 Orang	308.007.579.627,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	140 Orang			60 Orang	349.999.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	80 Orang	704.376.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen			1 Dokumen	199.999.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48 Kegiatan			24 Kegiatan	249.999.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	24 Kegiatan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit			4 Unit	1.992.244.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	6 Unit	2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Unit			2 Unit	644.579.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Unit	675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Unit			1 Unit	1.499.999.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7 Ruang			13 Ruang	10.574.071.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Ruang	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			3 Ruang	1.055.400.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keseimbangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Ruang	1.080.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	107 Ruang			51 Ruang	18.580.999.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keseimbangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	57 Ruang	30.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	3 Unit			1 Unit	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Unit	360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	918 Satuan Pendidikan			459 Satuan Pendidikan	43.082.684.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	459 Satuan Pendidikan	43.127.684.480,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,66 Perse n 88,66 perse n			88,46 persen	434.490.929.297,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	88,66 Perse n 88,66 perse n	494.382.330.225,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit			1 Unit	13.015.456.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Unit	13.023.211.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	13 Ruang			1 Ruang	859.590.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang			2 Ruang	3.776.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Ruang	12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	30 Ruang			6 Ruang	3.509.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keseimbangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	15 Ruang	12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang			1 Ruang	557.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keseimbangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Ruang	2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit			1 Unit	1.544.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Unit	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit			25 Unit	11.139.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	20 Unit	6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	20 Ruang			2 Ruang	886.665.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Ruang	2.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	8 Ruang			1 Ruang	724.546.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4 Ruang	1.440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	273 Paket			31 Paket	12.842.968.163,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	124 Paket	20.615.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket			28 Paket	19.348.126.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Paket	6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	672 Peserta Didik			311 Peserta Didik	4.871.734.877,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	336 Peserta Didik	4.905.448.907,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4034 Orang			2017 Orang	3.851.719.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2017 Orang	4.342.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	622 Satuan Pendidikan			311 Satuan Pendidikan	3.998.799.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	311 Satuan Pendidikan	40.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	596 Satuan Pendidikan			312 Satuan Pendidikan	172.224.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	298 Satuan Pendidikan	172.224.712.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	596 Orang			312 Orang	135.708.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	298 Orang	139.666.905.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang			20 Orang	59.999.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	20 Orang	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen			1 Dokumen	199.999.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48 Kegiatan			24 Kegiatan	219.999.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	24 Kegiatan	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	14 Unit			9 Unit	3.940.162.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	7 Unit	1.573.846.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang			1 Ruang	704.824.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Ruang	2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	71 Ruang			23 Ruang	8.849.121.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	38 Ruang	20.261.372.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit			6 Unit	1.662.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	44 Ruang			19 Ruang	6.498.740.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	2.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Unit			2 Unit	2.174.367.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Unit	2.689.727.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	600 Satuan Pendidikan			2 Satuan Pendidikan	19.142.887.317,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	300 Satuan Pendidikan	19.185.107.358,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Unit			5 Unit	1.821.648.950,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Unit	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	6 Ruang			1 Ruang	356.931.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B	58,14 Persen 58,14 Persen			58,04 Persen	55.418.539.799,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	58,14 Persen 58,14 Persen	60.407.606.345,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	6 Unit			1 Unit	5.032.253.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Unit	12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit			4 Unit	5.665.578.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	7 Unit	5.665.578.155,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	34 Unit			7 Unit	4.948.480.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Unit	3.910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	106 Paket			16 Paket	2.237.033.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	53 Paket	2.668.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	942 Peserta Didik			402 Peserta Didik	2.216.057.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	471 Peserta Didik	2.216.058.190,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3668 Orang			216 Orang	1.380.466.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1834 Orang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98 Satuan Pendidikan			50 Satuan Pendidikan	3.020.954.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	49 Satuan Pendidikan	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	94 Satuan Pendidikan			50 Satuan Pendidikan	16.268.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	47 Satuan Pendidikan	16.268.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	94 Orang			100 Orang	5.411.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	47 Orang	5.603.346.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen			1 Dokumen	199.999.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48 Kegiatan			24 Kegiatan	176.623.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	24 Kegiatan	176.624.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit			3 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	94 Satuan Pendidikan			11 Satuan Pendidikan	4.079.045.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	47 Satuan Pendidikan	4.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit			3 Unit	1.477.373.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	10 Ruang			10 Ruang	1.805.451.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau	95,00 Persen			95,00 Persen	610.015.136,00						95,00 Persen	650.000.000,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan pada satuan pendidikan menengah	1 Dokumen			1 Dokumen	610.015.136,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	240 Orang			120 Orang	610.015.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	120 Orang	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	75,00 Poin			75,00 Poin	28.499.999.664,00						75,00 Poin	25.500.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	80 Sekolah			75 Sekolah	28.499.999.664,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	80 Sekolah	25.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen			1 Dokumen	27.999.999.841,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	25.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan			1 Laporan	499.999.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Laporan	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Mengajukan Perizinan Terlayani	100,00 Persen			100,00 Persen	1.499.998.842,00						100,00 Persen	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	80 Sekolah			40 Sekolah	599.999.334,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	40 Sekolah	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen			1 Dokumen	299.999.667,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen			1 Dokumen	299.999.667,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	20 Sekolah			10 Sekolah	899.999.508,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Sekolah	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						4.556.113.021,00							4.625.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan	100 Persen			100 Persen	608.769.570,00						100 Persen	600.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	307.922.906,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	298.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Paket			10 Paket	69.922.951,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	54 Paket	60.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2600 Paket			100 Paket	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1300 Paket	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			17 Paket	14.999.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Paket	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920 Laporan			30 Laporan	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	460 Laporan	185.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani	804 Orang			404 Orang	213.108.664,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	404 Orang	214.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			10 Laporan	29.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	12 Laporan	30.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	440 Laporan			10 Laporan	183.143.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	220 Laporan	184.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara	100 Persen			100 Persen	87.738.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	88.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit			1 Unit	37.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Unit	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	15 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS			20,37 APS 77,40 APS 79,00 Persen	3.947.343.451,00						80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS	4.025.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,95 Perse n 82,95 perse n			82,45 persen	1.972.613.926,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	82,95 Perse n 82,95 perse n	2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	42 Ruang			3 Ruang	499.488.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang			1 Ruang	199.125.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	8 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2392 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.997.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1196 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9746 Orang			300 Orang	499.877.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4873 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	918 Satuan Pendidikan			165 Satuan Pendidikan	74.998.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	459 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			1 Ruang	199.125.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,66 Perse n 88,66 perse n			88,46 persen	1.974.729.525,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	88,66 Perse n 88,66 perse n	2.025.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	20 Ruang			1 Ruang	199.875.750,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	8 Ruang			1 Ruang	199.990.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	672 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.984.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	336 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4034 Orang			300 Orang	499.989.303,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2017 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	622 Satuan Pendidikan			165 Satuan Pendidikan	74.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	311 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>	44 Ruang			3 Ruang	499.998.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	550.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II						4.509.856.356,00							4.575.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.509.856.356,00							4.575.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						4.509.856.356,00							4.575.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan</i>	100 Persen			100 Persen	559.873.008,00						100 Persen	550.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	295.118.905,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	298.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	108 Paket			10 Paket	69.999.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	54 Paket	60.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2600 Paket			100 Paket	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1300 Paket	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			17 Paket	14.999.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Paket	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920 Laporan			25 Laporan	172.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	460 Laporan	185.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani	804 Orang			404 Orang	226.762.999,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	404 Orang	214.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			10 Laporan	39.999.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	12 Laporan	30.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	440 Laporan			10 Laporan	186.763.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	220 Laporan	184.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara	100 Persen			100 Persen	37.991.104,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit			1 Unit	37.991.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Unit	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	80,00 Persen 80,00 Persen 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS			20,37 APS 77,40 APS 79,00 Persen	3.949.983.348,00						80,00 Persen 80,00 Persen 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS	4.025.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,95 Perse n 82,95 perse n			82,45 persen	1.974.992.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	82,95 Perse n 82,95 perse n	2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	42 Ruang			4 Ruang	499.998.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang			1 Ruang	199.999.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	8 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2392 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.998.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1196 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9746 Orang			300 Orang	499.998.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4873 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	918 Satuan Pendidikan			220 Satuan Pendidikan	74.997.652,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	459 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			1 Ruang	199.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,66 Persen 88,66 persen			88,46 persen	1.974.990.948,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	88,66 Persen 88,66 persen	2.025.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	20 Ruang			1 Ruang	199.998.126,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	8 Ruang			1 Ruang	199.997.963,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	672 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.999.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	336 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4034 Orang			300 Orang	499.998.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2017 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						4.605.182.013,00							4.625.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan	100 Persen			100 Persen	655.408.715,00						100 Persen	600.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	307.877.715,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	298.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Paket			10 Paket	69.997.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	54 Paket	60.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2600 Paket			100 Paket	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1300 Paket	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			17 Paket	14.999.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Paket	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920 Laporan			30 Laporan	184.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	460 Laporan	185.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani	804 Orang			404 Orang	222.171.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	404 Orang	214.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			10 Laporan	39.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	12 Laporan	30.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	440 Laporan			10 Laporan	182.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	220 Laporan	184.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara	100 Persen			100 Persen	125.360.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	88.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit			1 Unit	35.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Unit	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			1 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	15 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun	80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS			79,00 Persen 20,37 APS 77,40 APS	3.949.773.298,00						80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS	4.025.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,95 Perse n 82,95 perse n			82,45 persen	1.974.934.589,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	82,95 Perse n 82,95 perse n	2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	42 Ruang			3 Ruang	499.993.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	18 Ruang			1 Ruang	199.990.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	8 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2392 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.986.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1196 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9746 Orang			300 Orang	499.991.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4873 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	918 Satuan Pendidikan			328 Satuan Pendidikan	74.981.185,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	459 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			1 Ruang	199.990.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,66 Perse n 88,66 perse n			88,46 persen 88,46 Persen	1.974.838.709,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	88,66 Perse n 88,66 perse n	2.025.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	20 Ruang			1 Ruang	199.990.750,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	8 Ruang			1 Ruang	199.990.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	672 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.986.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	336 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4034 Orang			300 Orang	499.999.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2017 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	622 Satuan Pendidikan			328 Satuan Pendidikan	74.981.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	311 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	44 Ruang			3 Ruang	499.889.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	550.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV						4.559.741.377,00							4.575.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.559.741.377,00							4.575.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						4.559.741.377,00							4.575.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan	100 Persen			100 Persen	609.795.170,00						100 Persen	550.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	321.993.870,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Dokumen	298.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Paket			10 Paket	69.999.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	54 Paket	60.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2600 Paket			100 Paket	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1300 Paket	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			17 Paket	28.999.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Paket	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920 Laporan			30 Laporan	184.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	460 Laporan	185.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani	804 Orang			404 Orang	247.814.780,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	404 Orang	214.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			10 Laporan	62.998.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	12 Laporan	30.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	440 Laporan			10 Laporan	184.816.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	220 Laporan	184.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara	100 Persen			100 Persen	39.986.520,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	100 Persen	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit			1 Unit	39.986.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	17 Unit	38.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS			77,40 APS 79,00 Persen 20,37 APS	3.949.946.207,00						80,00 Perse n 80,00 Perse n 20,39 APS 20,39 APS 77,50 APS 77,50 APS	4.025.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	82,95 Perse n 82,95 perse n			82,45 persen	1.974.977.920,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	82,95 Perse n 82,95 perse n	2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	42 Ruang			3 Ruang	499.998.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang			1 Ruang	199.992.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	8 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2392 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.999.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1196 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9746 Orang			300 Orang	499.999.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4873 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	918 Satuan Pendidikan			156 Satuan Pendidikan	74.993.701,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	459 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			1 Ruang	199.993.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	3 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,66 Persen 88,66 persen			88,46 persen	1.974.968.287,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	88,66 Persen 88,66 persen	2.025.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	20 Ruang			1 Ruang	199.992.870,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	8 Ruang			1 Ruang	199.993.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	4 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	672 Peserta Didik			55 Peserta Didik	499.996.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	336 Peserta Didik	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4034 Orang			300 Orang	499.999.349,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2017 Orang	500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	622 Satuan Pendidikan			156 Satuan Pendidikan	74.994.553,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	311 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	44 Ruang			3 Ruang	499.991.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	22 Ruang	550.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
		DINAS KESEHATAN						542.366.284.066,00							341.686.118.646,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						542.366.284.066,00							341.686.118.646,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						542.366.284.066,00							341.686.118.646,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	263.032.290.312,00						100 Persen 100 Persen	70.051.632.646,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	570.669.100,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Lintas Sektor	4 Dokumen	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			2 Dokumen	259.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Lintas Sektor	2 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			2 Laporan	310.749.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Lintas Sektor	2 Laporan	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	1 Laporan			1 Laporan	248.162.341.883,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1 Laporan	49.594.751.045,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54524 Orang/ Bulan			4200 Orang/ Bulan	248.162.341.883,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Riau	27892 Orang/ Bulan	49.594.751.045,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	3 Laporan			3 Laporan	31.680.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	3 Laporan	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	31.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			2 Jenis	210.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	2 Jenis	231.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	632 Paket			300 Paket	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	332 Paket	231.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	8 Jenis			8 Jenis	3.016.055.115,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	8 Jenis	4.434.818.279,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket			1 Paket	171.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	4 Paket	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			6 Paket	1.199.999.549,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	18 Paket	1.304.365.587,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	28 Paket			3 Paket	616.357.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	14 Paket	750.712.505,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	36 Paket			12 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	18 Paket	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	93.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1 Dokumen	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	367 Laporan			2 Laporan	734.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	187 Laporan	1.634.740.187,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi</i>	3 Jenis			4 Jenis	746.059.674,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	3 Jenis	1.020.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	344.827.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1 Paket	345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	248 Unit			20 Unit	87.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	95 Unit	375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	134 Unit			20 Unit	314.232.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	66 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	4 Jenis			2 Jenis	6.234.194.524,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	2 Jenis	7.945.058.538,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80 Laporan			12 Laporan	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	40 Laporan	2.182.239.671,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1286 Laporan			4 Laporan	4.584.194.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	685 Laporan	5.762.818.867,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	6 Jenis			6 Jenis	4.061.290.016,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	6 Jenis	6.026.004.784,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	74 Unit			9 Unit	307.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	37 Unit	332.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit			20 Unit	607.010.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	53 Unit	349.989.130,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2836 Unit			578 Unit	791.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1424 Unit	1.077.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit			5 Unit	2.355.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	6 Unit	4.266.375.654,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Orang 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk			3100000 Jiwa 1,26 Per 1000 Penduduk 86 Persen	265.721.430.899,00						3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Orang 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk	256.107.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	85 Persen			80 Persen	350.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	85 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan			1 Layanan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	1 Layanan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	263.291.817.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	253.712.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	22226 Orang			10584 Orang	855.110.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	11642 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50000 Orang			25000 Orang	855.274.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	25000 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	4 Dokumen			2 Dokumen	925.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	975.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	4 Dokumen			2 Dokumen	220.189.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen			4 Dokumen	635.149.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	4 Dokumen	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	138.124.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	36 Dokumen			7 Dokumen	656.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	18 Dokumen	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	22 Dokumen			1 Dokumen	76.309.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	11 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	104.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	30 Dokumen			15 Dokumen	833.431.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	15 Dokumen	905.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	342.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	950 Orang			450 Orang	149.999.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	500 Orang	170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen			1 Dokumen	254.329.024.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	244.384.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen			2 Dokumen	285.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	408.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	26 Dokumen			13 Dokumen	229.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	13 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	6 Dokumen			3 Dokumen	915.700.114,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	3 Dokumen	1.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen			1 Dokumen	166.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	13 Unit			6 Unit	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	7 Unit	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	2 Dokumen			1 Dokumen	174.153.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	100 Persen			100 Persen	1.278.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	100 Persen	1.465.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	64 Dokumen			9 Dokumen	1.278.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	47 Dokumen	1.465.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan	100 Persen			100 Persen	801.613.399,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	100 Persen	930.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	166 Unit			83 Unit	275.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	83 Unit	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	134 Unit			25 Unit	196.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	72 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit			12 Unit	330.143.399,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	15 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	76 Persen			76 Persen	3.985.703.012,00						76 Persen	5.615.536.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK.	13 Dokumen			13 Dokumen	3.337.017.292,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	13 Dokumen	4.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	881 Orang			143 Orang	3.337.017.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	443 Orang	4.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	100 Persen			100 Persen	648.685.720,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	100 Persen	815.536.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	7718 Orang			250 Orang	478.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	4200 Orang	645.536.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen			1 Dokumen	169.999.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	6 Dokumen	170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes dan Makan minuman yang Memenuhi Standar	93 Persen			93 Persen	424.999.305,00						93 Persen	425.000.000,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang lolos verifikasi sesuai syarat perijinan	100 Persen			100 Persen	299.999.647,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan, PBF, PAK, UKOT dan Kelompok Masyarakat	100 Persen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	264 Sarana			131 Sarana	299.999.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan, PBF, PAK, UKOT dan Kelompok Masyarakat	133 Sarana	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes dan makanan minuman yang memenuhi standar Persentase sarana UKOT yang lulus verifikasi lapangan sesuai syarat operasional	100 Persen 94 Persen			93 Persen 100 Persen	124.999.658,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan, UKOT dan Kelompok Masyarakat	100 Persen 94 Persen	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	21 Sarana			10 Sarana	124.999.658,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan, UKOT dan Kelompok Masyarakat	11 Sarana	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	100 Persen 77 Persen 77 Persen 100 Persen			100 Persen 76 Persen	9.201.860.538,00						100 Persen 77 Persen 77 Persen 100 Persen	9.486.950.000,00		
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	12 Kab/Kota			12 Kab/Kota	8.609.585.868,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lintas Sektor dan Kelompok Masyarakat	12 Kab/Kota	9.036.950.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi															
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen			2 Dokumen	8.609.585.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lintas Sektor dan Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	9.036.950.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	12 Kab/Kota			12 Kab/Kota	249.999.772,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	12 Kab/Kota	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen			2 Dokumen	249.999.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jenis UKBM yang dibina	4 UKBM			4 UKBM	342.274.898,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	4 UKBM	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	8 Dokumen			4 Dokumen	342.274.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	4 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD							640.135.403.215,00						676.951.677.624,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						640.135.403.215,00							676.951.677.624,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						640.135.403.215,00							676.951.677.624,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	566.610.416.053,00						100 Persen 100 Persen	560.461.654.613,00	
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	3 Laporan			2 Laporan	29.999.924,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	3 Laporan	75.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	29.999.924,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	2 Dokumen	75.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			2 Jenis	1.092.106.800,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	2 Jenis	1.092.490.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	632 Paket			2 Paket	1.092.106.800,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	332 Paket	1.092.490.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	8 Jenis			5 Jenis	2.636.630.695,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	8 Jenis	2.784.157.995,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket			1 Paket	281.151.260,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	4 Paket	309.266.600,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	28 Paket			8 Paket	1.459.461.280,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	14 Paket	1.245.407.800,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	36 Paket			1 Paket	361.217.535,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	18 Paket	566.787.595,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	116.720.620,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Paket	230.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	367 Laporan			68 Laporan	418.080.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	187 Laporan	432.696.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi</i>	3 Jenis			2 Jenis	15.621.272.445,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	3 Jenis	1.245.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	248 Unit			105 Unit	13.654.578.150,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	95 Unit	1.000.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	134 Unit			26 Unit	1.966.694.295,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	66 Unit	245.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	4 Jenis			2 Jenis	48.310.671.389,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	2 Jenis	48.595.676.618,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80 Laporan			1 Laporan	13.000.671.418,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	40 Laporan	13.285.676.618,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1286 Laporan			8 Laporan	35.309.999.971,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	685 Laporan	35.310.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	6 Jenis			5 Jenis	18.919.734.800,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	6 Jenis	6.669.330.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	74 Unit			13 Unit	462.980.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	37 Unit	475.500.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit			11 Unit	413.300.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	53 Unit	646.680.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2836 Unit			141 Unit	2.142.046.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1424 Unit	501.600.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit			8 Unit	11.635.858.800,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	8 Unit	780.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1178 Unit			2313 Unit	4.265.550.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	589 Unit	4.265.550.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD	100 Persen			100 Persen	480.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen	500.000.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	70 Unit Kerja			21 Unit Kerja	480.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	70 Unit Kerja	500.000.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7056 Unit			2857 Unit	15.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	3538 Unit	15.000.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	17 Unit			10 Unit	1.135.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	5 Unit	23.000.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	49 Paket			17 Paket	4.597.488.100,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	24 Paket	4.799.117.100,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	315.131.311,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	315.131.311,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22 Dokumen			2 Dokumen	315.131.311,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	11 Dokumen	315.131.311,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	100 Persen			100 Persen	1.310.969.616,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen	1.800.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	64 Dokumen			12 Dokumen	1.310.969.616,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	47 Dokumen	1.800.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan	100 Persen			100 Persen	449.999.693,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen	280.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	134 Unit			20 Unit	449.999.693,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	72 Unit	280.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80 Persen			80 Persen	4.567.496.597,00						80 Persen	5.493.155.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	100 Persen			100 Persen	4.567.496.597,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen	5.493.155.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	7718 Orang			2870 Orang	4.567.496.597,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	4200 Orang	5.493.155.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
		UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN						73.523.061.068,00							162.733.214.866,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						73.523.061.068,00							162.733.214.866,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						73.523.061.068,00							162.733.214.866,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	53.359.430.952,00						100 Persen 100 Persen	48.142.887.914,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			2 Jenis	326.900.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	2 Jenis	715.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	632 Paket			1 Paket	326.900.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	332 Paket	715.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	8 Jenis			8 Jenis	2.481.389.158,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	8 Jenis	2.995.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket			1 Paket	100.030.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	4 Paket	165.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			9 Paket	1.228.319.789,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	18 Paket	1.450.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket			3 Paket	649.988.499,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Administrasi Perkantoran	14 Paket	665.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			2 Paket	49.150.180,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	18 Paket	110.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367 Laporan			267 Laporan	453.900.690,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	187 Laporan	605.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	3 Jenis			4 Jenis	7.851.294.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	3 Jenis	0,00	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	7.851.294.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	0 Unit	0,00	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	4 Jenis			2 Jenis	9.012.813.380,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	2 Jenis	10.510.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80 Laporan			12 Laporan	2.274.650.900,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	40 Laporan	2.650.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1286 Laporan			3 Laporan	6.738.162.480,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	685 Laporan	7.860.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	6 Jenis			6 Jenis	1.217.146.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	6 Jenis	1.453.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	74 Unit			9 Unit	310.501.500,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	37 Unit	363.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit			9 Unit	255.500.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	53 Unit	300.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2836 Unit			502 Unit	651.145.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Administrasi Perkantoran	1424 Unit	790.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD	100 Persen			100 Persen	32.469.887.914,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen	32.469.887.914,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	70 Unit Kerja			16 Unit Kerja	32.469.887.914,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	70 Unit Kerja	32.469.887.914,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7056 Unit			40 Unit	420.000.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	3538 Unit	660.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	17 Unit			2 Unit	4.247.932.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	5 Unit	78.455.523.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	2.306.223.158,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.490.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36 Dokumen			3 Dokumen	1.129.992.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	18 Dokumen	1.500.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22 Dokumen			2 Dokumen	249.978.928,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	11 Dokumen	275.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen			3 Dokumen	799.999.700,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	2 Dokumen	550.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis</i>	950 Orang			184 Orang	126.252.530,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	500 Orang	165.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan</i>	100 Persen			85 Persen 100 Persen	1.128.400.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	100 Persen	635.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>	30 Unit			16 Unit	1.128.400.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	15 Unit	635.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</i>	80 Persen			80 Persen	3.566.876.050,00						80 Persen	3.899.803.952,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK.</i>	13 Dokumen			13 Dokumen	2.695.276.320,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	13 Dokumen	2.964.803.952,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	881 Orang			80 Orang	2.695.276.320,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	443 Orang	2.964.803.952,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi</i>	100 Persen			100 Persen	871.599.730,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	100 Persen	935.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>	7718 Orang			277 Orang	871.599.730,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	4200 Orang	935.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
		UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI						83.404.353.894,00							89.302.574.431,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						83.404.353.894,00							89.302.574.431,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						83.404.353.894,00							89.302.574.431,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan</i>	100 Persen			100 Persen	38.696.798.085,00						100 Persen	36.729.605.691,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi</i>	8 Jenis			8 Jenis	2.583.745.956,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	8 Jenis	3.043.335.482,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket			1 Paket	104.468.701,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	4 Paket	114.950.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	36 Paket			5 Paket	768.317.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	18 Paket	845.148.700,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	28 Paket			3 Paket	737.911.910,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	14 Paket	1.000.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			3 Paket	528.619.345,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	18 Paket	552.066.142,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367 Laporan			60 Laporan	444.429.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	187 Laporan	531.170.640,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	3 Jenis			4 Jenis	545.750.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	3 Jenis	677.150.500,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	134 Unit			105 Unit	545.750.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	66 Unit	677.150.500,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	4 Jenis			2 Jenis	8.478.255.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	2 Jenis	5.323.890.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80 Laporan			12 Laporan	1.389.777.200,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	40 Laporan	2.117.500.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1286 Laporan			588 Laporan	7.088.478.600,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	685 Laporan	3.206.390.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	6 Jenis			6 Jenis	889.246.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	6 Jenis	1.485.429.880,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	74 Unit			5 Unit	197.000.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	37 Unit	376.063.160,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	106 Unit			6 Unit	176.100.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	53 Unit	541.465.320,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2836 Unit			350 Unit	516.146.500,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	1424 Unit	567.901.400,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase layanan BLUD</i>	100 Persen			100 Persen	26.199.799.829,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	100 Persen	26.199.799.829,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	70 Unit Kerja			20 Unit Kerja	26.199.799.829,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	70 Unit Kerja	26.199.799.829,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Propinsi	3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Ora ng 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk			3100000 Jiwa 0 Orang 0 Persen 86 Persen 3100000 Jiwa 800000 Orang 1,26 Per 1000 Penduduk 0 Per 1000 Penduduk 86 %	38.610.955.809,00						3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Ora ng 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Jiwa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk	40.573.670.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	85 Persen			80 Persen	37.383.018.809,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	85 Persen	39.143.970.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	481 Unit			1 Unit	4.260.059.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	240 Unit	7.833.370.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1278 Unit			112 Unit	30.922.960.037,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	773 Unit	28.945.600.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7056 Unit			265 Unit	1.850.000.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	3538 Unit	1.965.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	49 Paket			3 Paket	349.999.772,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	24 Paket	400.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.002.937.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.079.700.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	36 Dokumen			8 Dokumen	1.002.937.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	18 Dokumen	1.079.700.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan</i>	100 Persen			85 Persen 100 Persen	225.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	100 Persen	350.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>	30 Unit			1 Unit	225.000.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	15 Unit	350.000.000,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</i>	80 Persen			80 Persen	6.096.600.000,00						80 Persen	11.999.298.740,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK.</i>	13 Dokumen			13 Dokumen	4.494.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	13 Dokumen	9.702.159.830,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	881 Orang			102 Orang	4.494.000.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	443 Orang	9.702.159.830,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi</i>	100 Persen			100 Persen	1.602.600.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	100 Persen	2.297.138.910,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>	7718 Orang			163 Orang	1.602.600.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	4200 Orang	2.297.138.910,00	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
		UPT. BALAI PELATIHAN KESEHATAN						771.999.178,00							972.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						771.999.178,00							972.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						771.999.178,00							972.500.000,00	
1.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</i>	76 Persen			76 Persen	771.999.178,00						76 Persen	972.500.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi</i>	100 Persen			100 Persen	771.999.178,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Kesehatan Provinsi Riau dan Kab/Kota	100 Persen	972.500.000,00	UPT. BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>	7718 Orang			90 Orang	499.999.668,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Kesehatan Provinsi Riau dan Kab/Kota	4200 Orang	670.000.000,00	UPT. BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen			3 Dokumen	271.999.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Kesehatan Provinsi Riau dan Kab/Kota	6 Dokumen	302.500.000,00	UPT. BALAI PELATIHAN KESEHATAN
		UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN						3.567.954.250,00							4.250.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.567.954.250,00							4.250.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.567.954.250,00							4.250.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Ora ng 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk			1,26 Per 1000 Penduduk 86 Persen 3100000 Jiwa	3.185.000.000,00						3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Ora ng 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk	3.800.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	85 Persen			80 Persen	3.100.000.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	85 Persen	3.700.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1278 Unit			3 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	773 Unit	600.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7056 Unit			102 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	3538 Unit	700.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	49 Paket			2 Paket	2.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	24 Paket	2.400.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan	100 Persen			100 Persen	85.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	100 Persen	100.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit			1 Unit	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	15 Unit	100.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	76 Persen			76 Persen	382.954.250,00						76 Persen	450.000.000,00		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	100 Persen			100 Persen	382.954.250,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Kesehatan Provinsi Riau dan Kab/Kota	100 Persen	450.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan															
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	7718 Orang			60 Orang	382.954.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Kesehatan Provinsi Riau dan Kab/Kota	4200 Orang	450.000.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	
		UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN							8.669.126.207,00							9.295.631.850,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.669.126.207,00							9.295.631.850,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						8.669.126.207,00							9.295.631.850,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	109.410.000,00						100 Persen 100 Persen	122.400.000,00	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	6 Jenis			6 Jenis	109.410.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN	6 Jenis	122.400.000,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2836 Unit			91 Unit	109.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN	1424 Unit	122.400.000,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Ora ng 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk			3100000 Jiwa 86 Persen 1,26 Per 1000 Penduduk	8.559.716.207,00						3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 % 1,27 Per 1000 Penduduk 88 Persen 750000 Ora ng 1,27 Per 1000 Penduduk 3150000 Ji wa 88 Persen 1,27 Per 1000 Penduduk	9.173.231.850,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	85 Persen			80 Persen	8.361.960.590,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	85 Persen	8.915.981.850,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7056 Unit			20 Unit	96.673.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	3538 Unit	275.000.000,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	24 Dokumen			12 Dokumen	744.228.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	12 Dokumen	778.056.990,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	49 Paket			2 Paket	7.521.058.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	24 Paket	7.862.924.860,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	197.755.617,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	257.250.000,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	6 Dokumen			100 Dokumen	197.755.617,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Masyarakat	3 Dokumen	257.250.000,00	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						1.735.062.234.091,00							715.381.839.984,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.734.300.027.091,00							714.781.839.984,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.495.563.304.831,00							691.539.220.189,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100 Persen			100 Persen	105.760.828.960,00						100 Persen	107.452.820.119,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	4 Dokumen 4 Dokumen			2 Dokumen	199.999.928,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2 Dokumen 2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	149.999.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			1 Laporan	49.999.988,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	940 Orang 940 Orang			470 Orang	78.242.436.598,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	470 Orang 470 Orang	80.767.820.119,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan			1 Laporan	226.214.665,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	940 Orang 940 Orang			470 Orang	350.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	470 Orang 470 Orang	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Paket	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang disediakan	100 Paket			0 Paket	5.566.421.006,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	5.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket			31 Paket	385.796.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	110.00 Paket	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			109 Paket	1.980.697.276,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			500 Paket	1.399.985.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			16 Paket	449.999.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			140 Laporan	1.249.943.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	1.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.770,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Paket			13 Paket	1.710.192.051,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	2.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			47 Unit	1.410.203.591,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	299.988.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2 Unit	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	14.737.969.712,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	15.385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan			1 Laporan	32.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			44 Laporan	4.205.653.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	4.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	10.500.315.792,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	11.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	4.727.595.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	2.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			49 Unit	1.261.420.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			544 Unit	1.850.175.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	1.316.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2 Unit	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air	14.333,28 Ha 47,75 Perse n			45,21 Persen 13.953,47 Ha	103.004.578.734,00						14.333,28 Ha 47,75 Perse n	107.803.076.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola	86.59 Km 0 Km			63.86 Km	55.498.419.204,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	63.86 Km 0 Km	44.231.003.579,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.40 KM			0,599 KM	6.993.006.525,00	Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Seberida	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	0.20 KM	6.993.006.993,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	125.00 KM			204,74 KM	26.267.417.605,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirousah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	62.5 KM	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,2 KM			0,585 KM	2.999.999.895,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirousah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	0,60 KM	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	149.999.660,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	4 Lembaga			3 Lembaga	499.999.965,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	4 Lembaga	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.5 KM			0,24 KM	10.587.996.364,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	0.25 KM	10.587.996.586,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	10 Dokumen			7 Dokumen	1.999.999.775,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	4 Dokumen			2 Dokumen	499.999.790,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	3 Dokumen			2 Dokumen	1.999.999.955,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	6 Dokumen			4 Dokumen	3.499.999.670,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	WS Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Km 1,053.83 Km			997.83 Km	47.506.159.530,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	DI dan DIR Kewenangan Provinsi	0 Km 1,053.83 Km	63.572.073.171,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	11.43 KM			4.5 KM	11.999.999.870,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	DI dan DIR Kewenangan Provinsi	5.714 KM	12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	184 KM			24.3 KM	7.114.086.845,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	DI dan DIR Kewenangan Provinsi	92 KM	23.180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2650.00 KM			797.8 KM	8.424.999.885,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	DI dan DIR Kewenangan Provinsi	1,325 KM	8.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	5000 KM			1371.9 KM	17.317.073.075,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	DI dan DIR Kewenangan Provinsi	2500 KM	17.317.073.171,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	10 Dokumen			7 Dokumen	2.499.999.880,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	DI dan DIR Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa														
			Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	26 DI			11 DI	149.999.975,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	DI dan DIR Kewenangan Provinsi	13 DI	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan	440 Liter/Detik			440 Liter/Detik	9.199.999.540,00						440 Liter/Detik	17.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan</i>	440 liter/detik 440 liter/detik			440 liter/detik	9.199.999.540,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	440 liter/detik 440 liter/detik	17.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	12 Kabupaten/Kota			12 Kabupaten/Kota	199.999.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>	4 Dokumen			3 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	2 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi</i>	4 Unit			2 Unit	6.999.999.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	2 Unit	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Persampahan Regional</i>	100 Persen			100 Persen	1.399.999.370,00						100 Persen	1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penyediaan sarana persampahan regional	100 % 100 %			100 %	1.399.999.370,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	100 % 100 %	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12 Kabupaten/Kota			12 Kabupaten/Kota	199.999.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	4 Kabupaten/ Kota			2 Kabupaten/ Kota	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	2 Kabupaten/ Kota	1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	999.999.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	0 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penyediaan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	100 Persen			100 Persen	1.699.999.685,00						100 Persen	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Dokumen 3 Dokumen			1 Dokumen	1.699.999.685,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	1 Dokumen 2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12 Kabupate n/Kota			12 Kabupate n/Kota	199.999.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	12 Kabupate n/Kota	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	3.199.999.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Strategis Yang Dibangun Dan Dipelihara	100 Persen			100 Persen	175.594.999.875,00						100 Persen	3.000.000.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan strategis yang dibangun dan dipelihara	7 Bangunan Gedung 7 Bangunan Gedung			5 Bangunan Gedung	175.594.999.875,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen			3 Dokumen	122.950.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	6 Bangunan Gedung			2 Bangunan Gedung	52.644.999.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	1 Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan Strategis Yang Ditata	100 Persen			100 Persen	21.199.999.325,00						100 Persen	6.400.000.000,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	4 Kawasan 2 Kawasan			1 Kawasan	21.199.999.325,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	3 Kawasan 1 Kawasan	6.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan			1 Kawasan	19.999.999.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	1 Kawasan	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	999.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	1 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	12 kabupate n/kota			12 kabupate n/kota	199.999.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	12 kabupate n/kota	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen			69,27 Persen	1.068.458.577.711,00						69,27 Persen	440.788.323.320,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	384.02 Km 64.72 Km			32.57 Km	1.068.458.577.711,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	144.53 Km 32.15 Km	440.788.323.320,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan			4 Jembatan	31.286.013.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	1 Jembatan	31.286.015.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	30.50 KM			50.12 KM	468.236.688.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	15.75 KM	174.410.404.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan			0.37 Jembatan	35.390.027.350,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	1 Jembatan	52.486.015.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	3 KM			3.53 KM	67.534.512.250,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	1.50 KM	29.862.015.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	7 Dokumen			5 Dokumen	5.859.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	4.009.190.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	31.22 KM			52.33 KM	455.207.070.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	14.90 KM	143.970.293.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	3 Orang			2 Orang	28.994.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	0 Orang	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	390 Orang			480 Orang	1.049.849.741,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	210 Orang	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga			5 Lembaga	255.921.655,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataaa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	5 Lembaga	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	390 Orang			240 Orang	360.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataaa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	210 Orang	315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	18 Dokumen 18 Dokumen			9 Dokumen	149.999.863,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	9 Dokumen 9 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	18 Dokumen			9 Dokumen	149.999.863,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	9 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau	83.33 % 83.33 %			58.33 %	549.559.727,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	83.33 % 83.33 %	950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	27 Paket Pekerjaan			12 Paket Pekerjaan	99.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	15 Paket Pekerjaan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	27 Bangunan Konstruksi			12 Bangunan Konstruksi	49.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	15 Bangunan Konstruksi	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	27 Lembaga			12 Lembaga	249.999.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	15 Lembaga	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	125 Badan Usaha			50 Badan Usaha	149.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tenaga Kerja Konstruksi	75 Badan Usaha	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Urusan Penataan ruang Yang Terasilitasi	100 Persen			100 Persen	3.649.996.840,00						100 Persen	2.500.000.000,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang	102 Dokume n			100 %	699.999.400,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	49 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	2 Dokumen			2 Dokumen	49.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	0 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	2 Publikasi			1 Publikasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Publikasi	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perda RTRW Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	249.999.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	0 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	49.999.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	0 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	96 Orang			48 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	48 Orang	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	62 Dokumen			20 Dokumen	1.693.000.950,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	31 Dokumen	1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 Orang			58 Orang	336.839.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	15 Orang	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen			1 Dokumen	94.249.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	2 Laporan			1 Laporan	61.911.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	4 Dokumen			1 Dokumen	99.999.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0010	Penyusunan Peta Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data SHP Peta Dasar	6 Peta			3 Peta	899.999.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	3 Peta	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	12 Berita Acara			6 Berita Acara	99.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	6 Berita Acara	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	6 Dokumen			6 Dokumen	99.999.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	3 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Provinsi	10 Dokumen			5 Dokumen	680.504.160,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	5 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan			1 Laporan	139.999.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen			1 Dokumen	340.504.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	199.999.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi</i>	28 Dokumen			1 Dokumen	576.492.330,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	14 Dokumen	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2 Kasus			1 Kasus	34.543.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Kasus	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen			1 Dokumen	141.949.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan			1 Laporan	48.499.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang														
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen			1 Dokumen	51.499.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						238.736.722.260,00							23.242.619.795,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan RLH Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah	100 Persen			100 Persen	10.106.839.460,00						100 Persen	5.606.839.795,00	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Yang Disediakan dan Jumlah Rumah Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Di fasilitasi	100 Unit Rumah 150 Unit			50 Unit Rumah	10.106.839.460,00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	50 Unit Rumah 75 Unit	5.606.839.795,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun</i>	50 Unit Rumah			80 Unit Rumah	8.499.999.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	25 Unit Rumah	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>	50 Unit Rumah			11 Unit Rumah	1.606.839.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	25 Unit Rumah	3.106.839.795,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani</i>	166,21 Ha			166,21 Ha	17.882.944.000,00						166,21 Ha	9.635.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	31.42 Ha 31.42 Ha			22.32 Ha	17.882.944.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	9.10 Ha 9.1 Ha	9.635.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	31,42 Ha			22.32 Ha	17.882.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	9,10 Ha	9.635.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	210.746.938.800,00						-	8.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman	16 Lokasi 16 Lokasi			16 Lokasi	210.746.938.800,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Permukiman Provinsi Riau	16 Lokasi 16 Lokasi	8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	16 Lokasi			16 Lokasi	210.746.938.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Permukiman Provinsi Riau	16 Lokasi	8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						762.207.000,00							600.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						762.207.000,00							600.000.000,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase penatausahaan pertanahan	100 Persen			100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	<i>Persentase Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</i>	100 % 100 %			100 %	200.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	100 % 100 %	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan Lintas Kabupaten/Kota Yang Termediasi</i>	100 Persen			100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	100 % 100 %			100 %	200.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	100 % 100 %	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	2 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	<i>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Terfasilitasi</i>	100 Persen			100 Persen	362.207.000,00						100 Persen	200.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100 Persen			100 Persen	2.488.500.730,00						100 Persen	2.588.500.730,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang disediakan	100 Paket			0 Paket	812.429.514,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	812.429.514,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket			2 Paket	4.875.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	110.00 Paket	4.875.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			44 Paket	37.104.514,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	37.104.514,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			912 Paket	44.160.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	44.160.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			2 Paket	62.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	62.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			440 Laporan	664.290.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	664.290.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	25 Paket			0 Unit	161.024.400,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	91.024.400,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			180 Unit	161.024.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	91.024.400,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	1.058.766.816,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	1.058.766.816,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			324 Laporan	34.224.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	34.224.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			324 Laporan	1.024.542.816,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	1.024.542.816,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	456.280.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	626.280.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			15 Unit	256.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	356.280.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	170.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	100.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya	1,850.96 Km			1,850.96 Km	34.315.000.000,00						1,850.96 Km	11.940.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	384.02 Km 64.72 Km			32.57 Km	34.315.000.000,00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	144.53 Km 32.15 Km	11.940.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan			2 Jembatan	400.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	6.00 Jembatan	900.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	85.00 Jembatan			5 Jembatan	2.510.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	46.00 Jembatan	3.250.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100 Persen			100 Persen	2.473.485.049,00						100 Persen	3.384.044.817,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang disediakan	100 Paket			0 Paket	611.013.369,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	1.275.443.369,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket			3 Paket	13.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	110.00 Paket	13.750.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			65 Paket	111.983.369,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	111.983.369,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			12 Paket	44.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	44.160.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			2 Paket	26.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	87.500.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			250 Laporan	414.870.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	1.018.050.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	25 Paket			0 Unit	58.365.632,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	91.024.400,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			6 Unit	58.365.632,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	91.024.400,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	1.170.456.048,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	1.368.318.768,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	123.714.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	123.714.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	1.046.742.048,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataaa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	1.244.604.768,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	633.650.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	649.258.280,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			18 Unit	464.730.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	501.840.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			44 Unit	48.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	27.418.280,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			1 Unit	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	120.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen			69,27 Persen	25.449.139.768,00						69,27 Persen	6.715.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	384.02 Km 64.72 Km			32.57 Km	25.449.139.768,00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	144.53 Km 32.15 Km	6.715.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	85.00 Jembatan			3 Jembatan	500.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	46.00 Jembatan	1.300.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14.15 KM			2.5 KM	11.250.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	6.85 KM	3.600.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	208.15 KM			124.54 KM	13.699.139.768,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	105.53 KM	1.815.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
		UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III						16.535.892.672,00							17.600.824.119,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.535.892.672,00							17.600.824.119,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						16.535.892.672,00							17.600.824.119,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100 Persen			100 Persen	1.529.570.399,00						100 Persen	1.903.016.355,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah paket administrasi umum yang disediakan</i>	100 Paket			0 Paket	345.471.755,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	345.471.755,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	220 Paket			1 Paket	1.400.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	110.00 Paket	1.400.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			35 Paket	71.258.255,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	71.258.255,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			150 Paket	7.920.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	7.920.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			10 Paket	9.318.500,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	9.318.500,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			70 Laporan	255.575.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	255.575.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	25 Paket			0 Unit	181.098.100,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	181.098.100,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			209 Unit	181.098.100,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	181.098.100,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	539.180.544,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	763.286.500,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			24 Laporan	29.080.800,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	36.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	510.099.744,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	727.286.500,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	463.820.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	613.160.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			13 Unit	368.660.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	215.040.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			10 Unit	9.160.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	191.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			1 Unit	86.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	207.120.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen			69,27 Persen	15.006.322.273,00						69,27 Persen	15.697.807.764,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	384.02 Km 64.72 Km			32.57 Km	15.006.322.273,00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	144.53 Km 32.15 Km	15.697.807.764,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan			1 Jembatan	700.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	6.00 Jembatan	900.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	85.00 Jembatan			1 Jembatan	700.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	46.00 Jembatan	900.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100 Persen			100 Persen	34.496.314.369,00						100 Persen	22.971.998.791,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang disediakan	100 Paket			0 Paket	590.767.346,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	590.767.346,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			30 Paket	52.769.906,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	52.769.906,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			796 Paket	35.892.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	35.892.000,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			3 Paket	5.584.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	5.584.440,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			106 Laporan	496.521.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	496.521.000,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	25 Paket			0 Unit	26.249.442.328,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	14.725.126.750,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	14 Unit			18 Unit	25.612.392.328,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6 Unit	14.088.076.750,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			75 Unit	637.050.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	637.050.000,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	1.528.535.695,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	1.528.535.695,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			24 Laporan	331.717.743,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	331.717.743,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	1.196.817.952,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	1.196.817.952,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	6.127.569.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	6.127.569.000,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			2 Unit	67.120.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	67.120.000,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			76 Unit	5.106.489.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	5.106.489.000,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			2 Unit	953.960.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	953.960.000,00	UPT. PERALATAN KONSTRUKSI
		UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						3.836.692.619,00							3.837.292.619,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.836.692.619,00							3.837.292.619,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						3.836.692.619,00							3.837.292.619,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100 Persen			100 Persen	3.836.692.619,00						100 Persen	3.837.292.619,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah paket administrasi umum yang disediakan</i>	100 Paket			0 Paket	1.016.142.575,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	1.920.438.619,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	220 Paket			9 Paket	15.664.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	110.00 Paket	15.664.180,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			81 Paket	146.650.472,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	190.014.372,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			3275 Paket	78.129.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	158.777.410,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			5 Paket	15.386.636,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	12.742.824,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	282 Paket			78 Paket	516.493.604,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	141 Paket	1.156.400.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			21 Laporan	243.817.833,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	386.839.833,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	25 Paket			0 Unit	260.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	492.360.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	80.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Paket	198.360.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			1 Unit	180.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	294.000.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	1.947.398.044,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	492.360.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	253.904.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	198.360.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	1.693.493.644,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	294.000.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	613.152.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	932.134.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			3 Unit	61.552.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	79.394.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			150 Unit	408.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	618.100.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			1 Unit	143.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	234.640.000,00	UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
		UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM						11.861.445.373,00							11.861.449.059,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.861.445.373,00							11.861.449.059,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.861.445.373,00							11.861.449.059,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100 Persen			100 Persen	3.861.445.373,00						100 Persen	3.861.449.059,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang disediakan	100 Paket			0 Paket	484.257.743,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	484.261.429,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			31 Paket	97.502.369,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	97.502.369,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			2200 Paket	39.992.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	39.992.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			8 Paket	22.112.374,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	22.116.060,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			109 Laporan	324.651.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	324.651.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	25 Paket			0 Unit	100.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	100.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			200 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	100.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	2.695.267.630,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	2.695.267.630,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			24 Laporan	226.590.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	226.590.600,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			1020 Laporan	2.468.677.030,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	2.468.677.030,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	581.920.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	581.920.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			8 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	200.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1661 Unit			25 Unit	39.470.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	39.470.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	24 Unit			3 Unit	342.450.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	342.450.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan</i>	440 Liter/Detik			440 Liter/Detik	8.000.000.000,00						440 Liter/Detik	8.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan</i>	440 liter/detik 440 liter/detik			440 liter/detik	8.000.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau	440 liter/detik 440 liter/detik	8.000.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara</i>				2 Unit	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Riau		8.000.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM
		UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV						19.316.508.690,00							11.266.508.690,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.316.508.690,00							11.266.508.690,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						19.316.508.690,00							11.266.508.690,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			65 Paket	68.997.190,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	68.997.190,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	4.600.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			2 Paket	4.045.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	4.045.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			235 Laporan	404.500.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	404.500.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	761.406.500,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	761.406.500,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	34.120.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	34.120.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	727.286.500,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	727.286.500,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	613.160.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	613.160.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			8 Unit	215.040.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	215.040.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			6 Unit	191.000.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	191.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			1 Unit	207.120.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengem bangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataaa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	207.120.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen			69,27 Persen	17.450.000.000,00						69,27 Persen	9.400.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	384.02 Km 64.72 Km			32.57 Km	17.450.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengem bangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataaa n Infrastruk tur Yang Berkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	144.53 Km 32.15 Km	9.400.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan			2 Jembatan	400.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	6.00 Jembatan	900.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	85.00 Jembatan			13 Jembatan	2.300.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	46.00 Jembatan	2.000.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			73 Paket	124.341.956,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	124.346.333,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			336 Paket	6.182.400,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	6.182.400,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			5 Paket	18.451.816,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	18.451.816,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			80 Laporan	260.340.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	260.340.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	25 Paket			0 Unit	71.333.520,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Paket	71.333.520,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,576.00 Unit			7 Unit	71.333.520,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	696.00 Unit	71.333.520,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	667.666.763,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	667.666.763,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	31.825.968,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	31.825.968,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			7 Unit	192.176.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	192.176.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			38 Unit	34.720.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	34.720.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen			69,27 Persen	16.300.560.000,00						69,27 Persen	13.660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	384.02 Km 64.72 Km			32.57 Km	16.300.560.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	144.53 Km 32.15 Km	13.660.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan			1 Jembatan	700.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	6.00 Jembatan	900.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	85.00 Jembatan			56 Jembatan	1.500.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	46.00 Jembatan	250.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14.15 KM			1 KM	1.750.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	6.85 KM	3.500.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	208.15 KM			22,13 KM	12.350.560.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	105.53 KM	9.010.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
		UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI						30.110.290.426,00							14.210.290.426,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.110.290.426,00							14.210.290.426,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						30.110.290.426,00							14.210.290.426,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>	100 Persen			100 Persen	1.729.468.642,00						100 Persen	3.110.290.426,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang disediakan	100 Paket			0 Paket	611.629.122,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Paket	1.921.027.290,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket			4 Paket	8.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	110.00 Paket	1.350.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,149.00 Paket			62 Paket	189.119.122,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	574.00 Paket	209.147.290,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,009.00 Paket			12 Paket	16.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,006.00 Paket	16.560.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6102 Paket			2 Paket	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3051 Paket	37.500.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,153.00 Laporan			70 Laporan	359.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,609.00 Laporan	307.820.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan	40 Laporan			0 Laporan	728.519.520,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19 Laporan	799.943.136,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120 Laporan	36.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan			12 Laporan	692.519.520,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.00 Laporan	763.943.136,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2,306.00 Unit			0 Unit	389.320.000,00			Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,153.00 Unit	389.320.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288 Unit			7 Unit	316.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	144.00 Unit	316.720.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1661 Unit			20 Unit	12.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	918 Unit	12.600.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			1 Unit	60.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Unit	60.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	69,27 Persen			69,27 Persen	28.380.821.784,00						69,27 Persen	11.100.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	panjang jalan yang diselenggarakan	384.02 Km 64.72 Km			32.57 Km	28.380.821.784,00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	144.53 Km 32.15 Km	11.100.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	85.00 Jembatan			3 Jembatan	600.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	46.00 Jembatan	600.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14.15 KM			1.20 KM	7.000.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	6.85 KM	6.000.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	208.15 KM			50 KM	20.780.821.784,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Ruas jalan kewenangan Provinsi	105.53 KM	4.500.000.000,00	UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						55.267.377.118,00							50.552.886.151,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						55.267.377.118,00							50.552.886.151,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						55.267.377.118,00							50.552.886.151,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	100 Persen			100 Persen	50.537.379.886,00						100 Persen	45.458.617.878,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen yang di susun oleh Satpol PP</i>	10 Dokumen			5 Dokumen	202.999.872,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	5 Dokumen	230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10 Dokumen			5 Dokumen	202.999.872,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	5 Dokumen	230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	33.596.557.751,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	1 Laporan	28.448.617.878,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang/ Bulan			170 Orang/ Bulan	33.596.557.751,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	175 Orang/ Bulan	28.448.617.878,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			1 Jenis	449.999.764,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	1 Jenis	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1020 Paket			510 Paket	449.999.764,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	510 Paket	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi	5 Jenis			5 Jenis	1.339.992.385,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	5 Jenis	1.340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket			25 Paket	29.999.939,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	25 Paket	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket			30 Paket	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	30 Paket	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50000 Paket			25000 Paket	399.999.502,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	25000 Paket	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44 Paket			22 Paket	109.999.944,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	22 Paket	110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan			75 Laporan	449.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	75 Laporan	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	1 Jenis			1 Jenis	307.851.248,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	1 Jenis	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit			35 Unit	307.851.248,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	35 Unit	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipenuhi	3 Jenis			3 Jenis	13.389.979.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	3 Jenis	13.390.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan			50 Laporan	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	50 Laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			84 Laporan	379.999.136,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	84 Laporan	380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	670 Laporan			335 Laporan	12.999.980.064,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	335 Laporan	13.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			6 Jenis	1.249.999.666,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	6 Jenis	1.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit			6 Unit	229.999.990,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	6 Unit	230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit			22 Unit	499.999.890,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	22 Unit	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit			110 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	110 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			3 Unit	199.999.786,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	3 Unit	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit			25 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	25 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit			10 Unit	120.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satpol / Banpol Pamong Praja Provinsi Riau	10 Unit	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	100 Persen			100 Persen	4.729.997.232,00						100 Persen	5.094.268.273,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 Persen			100 Persen	3.540.083.106,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	100 Persen	3.694.268.273,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen			3 Dokumen	259.999.855,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	3 Dokumen	260.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen			1 Dokumen	89.999.060,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	1 Dokumen	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	160 Unit			80 Unit	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	80 Unit	464.268.273,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	8 Dokumen			4 Dokumen	339.999.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	4 Dokumen	340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan			2 Laporan	39.999.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	2 Laporan	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Laporan			3 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	3 Laporan	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	550 laporan			250 laporan	1.560.084.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	300 laporan	1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	650 Orang			300 Orang	499.999.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	350 Orang	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase peraturan daerah provinsi dan peraturan gubenur yang ditegakkan	100 Persen			100 Persen	789.914.829,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	100 Persen	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	24 Laporan			12 Laporan	89.914.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	12 Laporan	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan			4 Laporan	499.999.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	4 Laporan	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP</i>	8 Laporan			4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	4 Laporan	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	<i>Persentase pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</i>	100 Persen			100 Persen	399.999.297,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100 Persen	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda</i>	16 Laporan			8 Laporan	249.999.656,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	8 Laporan	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS</i>	16 laporan			4 laporan	149.999.641,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	8 laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN						20.494.005.513,00							21.723.235.719,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.494.005.513,00							21.723.235.719,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						20.494.005.513,00							21.723.235.719,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanggulangan Bencana</i>	100 Persen			100 Persen	14.349.518.599,00						100 Persen	16.038.235.719,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 jenis 1 Jenis 1 Jenis			2 Jenis	200.000.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	2 jenis 1 Jenis 1 Jenis	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	5 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan 72 orang/bulan			72 orang/bulan	9.490.682.230,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	80 Orang/Bulan 80 orang/bulan	11.995.858.404,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan			72 Orang/Bulan	9.490.682.230,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	80 Orang/Bulan	11.995.858.404,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen 1 dokumen			1 dokumen	110.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	1 dokumen 1 dokumen	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	110.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	1 Dokumen	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket 3 paket			2 paket	337.459.437,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	1 paket 1 paket	63.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			2 Paket	337.459.437,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	1 Paket	63.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran	5 jenis 5 jenis			5 jenis	854.812.154,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	5 jenis 5 jenis	897.377.315,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	24.997.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	1 Paket	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	99.997.275,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	2 Paket	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	2 Paket	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	119.999.879,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	3 Paket	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			2 Laporan	459.818.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur BPBD Provinsi Riau	2 Laporan	502.377.315,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis 2 jenis			2 jenis	279.928.850,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	- jenis - jenis	280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	130.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	- Paket	130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit			12 Unit	149.928.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	- Unit	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan 3 laporan			3 laporan	1.625.995.928,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	3 laporan 3 laporan	1.652.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			1 Laporan	26.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	1 Laporan	26.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	1 Laporan	526.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	1.099.995.928,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	BPBD Provinsi Riau	1 Laporan	1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	91 unit 91 unit			91 unit	1.450.640.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung BPBD Provinsi Riau	91 unit 91 unit	839.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit			30 Unit	749.650.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung BPBD Provinsi Riau	30 Unit	539.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	69 Unit			69 Unit	221.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung BPBD Provinsi Riau	69 Unit	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit			1 Unit	479.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung BPBD Provinsi Riau	1 Unit	180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	100 Persen			100 Persen	5.454.486.914,00						100 Persen	4.845.000.000,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	<i>Jumlah Orang yang Tersedia untuk Pelayanan Informasi Rawan Kebencanaan</i>	200 orang			100 orang	264.999.740,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	100 orang	265.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	200 Orang			100 Orang	264.999.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	100 Orang	265.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8 jenis			8 jenis	2.529.701.507,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	8 jenis	2.230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	10 Kawasan			5 Kawasan	999.988.977,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	5 Kawasan	1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang			100 Orang	149.972.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	100 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	2 Dokumen			1 Dokumen	179.993.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	1 Dokumen	180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan			1 Kegiatan	249.996.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	1 Kegiatan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang			50 Orang	149.938.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	50 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	215 Keluarga			115 Keluarga	349.883.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	100 Keluarga	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen			1 Dokumen	299.948.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	1 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	200 Orang			100 Orang	149.979.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	masyarakat area rawan bencana	100 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 jenis			4 jenis	1.099.788.520,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	masyarakat korban bencana	4 jenis	1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	80 Orang			40 Orang	149.907.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	masyarakat korban bencana	40 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2000 Orang			1000 Orang	499.969.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	masyarakat korban bencana	1000 Orang	500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan			1 Laporan	299.917.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	masyarakat korban bencana	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan			1 Laporan	149.995.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	masyarakat korban bencana	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7 jenis			7 jenis	1.559.997.147,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	7 jenis	1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	410.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	1 Kegiatan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga			10 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	10 Lembaga	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang			50 Orang	199.997.321,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	50 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	249.999.826,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	12 kabupate n/kota			12 kabupate n/kota	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur BPBD kab/ kota dan BPBD Prov	12 kabupate n/kota	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	690.000.000,00						100 Persen	840.000.000,00	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Jenis Penyelenggaran Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	4 jenis			4 jenis	540.000.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur DAMKAR seprovinsi Riau	4 jenis	540.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur DAMKAR seprovinsi Riau	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan			1 laporan	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur DAMKAR seprovinsi Riau	1 laporan	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aparatur DAMKAR seprovinsi Riau	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait</i>	120 Unit			60 Unit	90.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur DAMKAR seprovinsi Riau	60 Unit	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	1 laporan			1 laporan	150.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur DAMKAR seprovinsi Riau	1 laporan	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aparatur DAMKAR seprovinsi Riau	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
		DINAS SOSIAL						63.468.285.820,00							73.462.556.966,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						63.468.285.820,00							73.462.556.966,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						63.468.285.820,00							73.462.556.966,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial</i>	100 Persen			100 Persen	32.313.819.068,00						100 Persen	33.419.851.426,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	10 Dokumen			5 Dokumen	399.950.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	5 Dokumen	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10 Dokumen			5 Dokumen	399.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	5 Dokumen	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	24.909.170.504,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	1 Laporan	27.188.292.406,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	170 Orang/ Bulan			170 Orang/ Bulan	24.909.170.504,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	170 Orang/ Bulan	27.188.292.406,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	4 Laporan			2 Laporan	39.999.320,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	2 Laporan	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	14.999.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	4 Jenis			2 Jenis	275.000.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN dan SDM Penyelenggara Kegiatan Perkantoran	2 Jenis	375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			3 Paket	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN dan SDM Penyelenggara Kegiatan Perkantoran	3 Paket	350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN dan SDM Penyelenggara Kegiatan Perkantoran	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	68 Jenis			34 Jenis	1.734.426.559,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	34 Jenis	1.587.612.820,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	306 Paket			5 Paket	34.999.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	178 Paket	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket			25 Paket	199.998.831,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	42 Paket	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket			1 Paket	19.940.889,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	8 Paket	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	64 Paket			3 Paket	264.997.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Paket	265.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			8 Paket	92.370.653,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	19 Paket	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket			5 Paket	99.999.625,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	20 Paket	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan			7 Laporan	876.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	7 Laporan	787.612.820,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen			10 Dokumen	145.743.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	10 Dokumen	200.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan	44 Jenis			23 Jenis	1.005.074.032,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	21 Jenis	950.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Paket			5 Paket	197.574.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	14 Paket	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit			5 Unit	197.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	18 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit			5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	5 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	1 Unit	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	64 Unit			10 Unit	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			6 Unit	220.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	11 Unit	225.542.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit			44 Unit	340.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Unit	349.503.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit			10 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	37 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit			120 Unit	119.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	208 Unit	122.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	9 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82 Unit			30 Unit	149.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	41 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	46 Unit			5 Unit	145.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	23 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Persentase PUB Dan UGB Yang Diselenggarakan Sesuai Standar</i>	100 Persen 100 Persen 60,47 Persen 60,47 Persen			50 Persen 100 Persen	5.029.345.385,00						100 Persen 100 Persen 60,47 Persen 60,47 Persen	33.516.757.631,00	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase PUB dan UGB yang diselenggarakan sesuai standar</i>	100 Persen			100 Persen	60.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PSKS	100 Persen	72.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PSKS	1 Dokumen	72.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	<i>Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial</i>	30.94 Persen			22.69 Persen	4.969.345.385,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PSKS	24.93 Persen	33.444.757.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	350 Orang			150 Orang	1.125.906.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PSKS	200 Orang	621.914.597,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	172 Orang			172 Orang	1.378.297.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PSKS	172 Orang	1.392.080.672,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	24 Keluarga			12 Keluarga	668.235.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PSKS	12 Keluarga	674.918.974,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	172 Lembaga			172 Lembaga	1.796.905.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PSKS	172 Lembaga	30.755.843.388,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan	100 Persen			100 Persen	748.999.898,00						100 Persen	756.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase dari capaian Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100 Persen 100 Persen			100 Persen	748.999.898,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	100 Persen 100 Persen	756.490.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1000 Orang			500 Orang	748.999.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	500 Orang	756.490.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti	100 Persen			100 Persen	19.898.910.362,00						100 Persen	730.307.909,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	100 Persen			100 Persen 100 Persen	19.898.910.362,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	100 Persen	730.307.909,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang			950 Orang	14.093.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	134.069.930,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang			100 Orang	4.502.994.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	33.103.686,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang			100 Orang	157.999.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang			100 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	3.310.368,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang			100 Orang	229.999.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	96.552.419,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang			100 Orang	95.596.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	96.552.419,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang			100 Orang	39.999.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	96.552.419,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	120 Orang			100 Orang	2.895.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	2.924.158,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang			950 Orang	373.840.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	PPKS	60 Orang	5.517.281,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal</i>	120 Orang			100 Orang	136.566.363,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	60 Orang	137.932.027,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	250.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	1 Dokumen	13.793.202,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</i>	100 Persen			100 Persen	3.167.441.948,00						100 Persen	2.706.050.000,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	<i>Persentase Anak Asuh yang menjadi Anak Angkat Kewenangan Provinsi</i>	100 Persen			100 Persen	105.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	100 Persen	106.050.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>	40 Orang			20 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	20 Orang	80.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>	10 Orang			5 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	5 Orang	25.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	<i>Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan sosial</i>	0.133 Perse n			0.044 Persen	3.062.441.948,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	0.044 Perse n	2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi</i>	1100 Keluarga			550 Keluarga	1.549.998.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	550 Keluarga	1.750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota</i>	1000 Keluarga			500 Keluarga	752.443.338,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	500 Keluarga	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	24 Unit			12 Unit	312.993.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	12 Unit	316.130.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	6000 Orang			30000 Orang	119.986.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	3000 Orang	121.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	60000 Orang			30000 Orang	54.997.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS	30000 Orang	55.550.000,00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN Yang Dipelihara Sesuai Standar	100 Persen			100 Persen	349.800.542,00						100 Persen	353.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase TMPN yang dipelihara sesuai standar	100 Persen			100 Persen	349.800.542,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	100 Persen	353.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	203.389.266,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	1 Dokumen	202.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						9.310.969.002,00							6.990.971.806,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial	100 Persen			100 Persen	1.368.185.230,00						100 Persen	1.132.900.000,00	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	68 Jenis			34 Jenis	297.184.240,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	34 Jenis	310.100.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	306 Paket			60 Paket	13.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	178 Paket	25.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket			7 Paket	99.995.408,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	42 Paket	100.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket			4 Paket	49.976.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	8 Paket	50.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	64 Paket			12 Paket	85.718.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Paket	78.500.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			12 Paket	5.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	19 Paket	6.600.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket			12 Paket	42.493.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	20 Paket	50.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan	44 Jenis			23 Jenis	469.999.790,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	21 Jenis	470.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Paket			7 Paket	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	14 Paket	120.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit			5 Unit	149.999.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	18 Unit	150.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	64 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Unit	100.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit			3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	8 Unit	100.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	24 Jenis			12 Jenis	536.541.200,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	12 Jenis	278.500.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			12 Laporan	156.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	29 Laporan	78.500.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan			12 Laporan	380.041.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	60 Laporan	200.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	92 Jenis			46 Jenis	64.460.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Jenis	74.300.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit			1 Unit	42.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Unit	45.800.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit			22 Unit	22.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	208 Unit	28.500.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti	100 Persen			100 Persen	7.942.783.772,00						100 Persen	5.858.071.806,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen			100 Persen	7.942.783.772,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Persen	5.858.071.806,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang			80 Orang	2.587.041.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Orang	3.217.860.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang			80 Orang	257.187.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Orang	300.590.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang			80 Orang	3.299.999.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Orang	700.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	180 Orang			80 Orang	5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Orang	5.459.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang			80 Orang	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Orang	21.630.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang			80 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Orang	63.860.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang			80 Orang	65.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)	100 Orang	38.110.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	85 Paket			4 Paket	99.976.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	42 Paket	100.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	64 Paket			3 Paket	59.947.605,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Paket	60.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	38 Paket			2 Paket	19.996.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	19 Paket	20.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi</i>	24 Jenis			12 Jenis	452.838.864,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	12 Jenis	264.200.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			12 Laporan	64.198.864,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	29 Laporan	64.200.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	120 Laporan			12 Laporan	388.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	60 Laporan	200.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	92 Jenis			46 Jenis	426.503.448,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Jenis	531.620.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit			1 Unit	42.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Unit	147.120.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit			58 Unit	24.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	208 Unit	24.500.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			4 Unit	99.704.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	9 Unit	100.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82 Unit			1 Unit	159.990.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	41 Unit	160.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit			4 Unit	99.809.448,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	23 Unit	100.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti	100 Persen			100 Persen	4.029.112.600,00						100 Persen	2.270.996.250,00	
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen			100 Persen	1.415.691.786,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	100 Persen	1.478.449.250,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	452.168.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	456.691.700,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	65.498.078,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	73.280.886,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	199.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	238.250.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	31.440.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	35.174.825,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	199.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	200.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	31.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	35.174.825,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	199.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	200.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	3.236.572,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>	120 Orang			60 Orang	5.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	6.106.740,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			<i>Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi</i>	120 Orang			60 Orang	199.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	60 Orang	200.000.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	27.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Gelandangan Pengemis	1 Dokumen	30.533.702,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	<i>Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti</i>	100 Persen			100 Persen	2.613.420.814,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	100 Persen	792.547.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	867.776.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	60 Orang	147.258.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	235.981.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	60 Orang	36.360.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	793.841.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	60 Orang	94.940.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	120 Orang			60 Orang	5.499.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	60 Orang	3.636.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>	120 Orang			60 Orang	64.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	60 Orang	10.100.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal</i>	120 Orang			60 Orang	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	60 Orang	151.500.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	124.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum)	1 Dokumen	25.250.000,00	UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA
		UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK						4.354.713.056,00							4.149.024.998,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.354.713.056,00							4.149.024.998,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.354.713.056,00							4.149.024.998,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial</i>	100 Persen			100 Persen	1.232.666.724,00						100 Persen	874.302.328,00	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	68 Jenis			34 Jenis	356.365.812,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	34 Jenis	313.560.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	306 Paket			60 Paket	19.908.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	178 Paket	20.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket			5 Paket	120.881.833,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	42 Paket	77.700.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	64 Paket			12 Paket	165.843.715,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Paket	165.860.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			1 Paket	29.764.294,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	19 Paket	30.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket			1 Paket	19.967.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	20 Paket	20.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	24 Jenis			12 Jenis	565.650.912,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	12 Jenis	244.826.328,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			2 Laporan	46.226.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	29 Laporan	34.826.328,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan			12 Laporan	519.424.032,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	60 Laporan	210.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	92 Jenis			46 Jenis	310.650.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Jenis	315.916.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			1 Unit	119.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	11 Unit	40.916.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit			20 Unit	9.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	37 Unit	25.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit			95 Unit	32.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	208 Unit	70.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			2 Unit	29.550.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	9 Unit	40.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82 Unit			8 Unit	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	41 Unit	40.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit			2 Unit	99.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	23 Unit	100.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti	100 Persen			100 Persen	3.122.046.332,00						100 Persen	3.274.722.670,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen			100 Persen	3.122.046.332,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	100 Persen	3.274.722.670,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang			50 Orang	313.684.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	277.750.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang			50 Orang	1.241.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	1.289.062.670,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>	100 Orang			50 Orang	271.266.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	236.340.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>	100 Orang			50 Orang	89.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	808.000.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>	100 Orang			50 Orang	81.996.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	82.820.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>	100 Orang			50 Orang	131.494.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	79.790.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>	100 Orang			50 Orang	34.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	35.350.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi</i>	100 Orang			50 Orang	6.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	50 Orang	7.070.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	317.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Anak Terlantar di dalam Panti)	1 Dokumen	21.210.000,00	UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK
		UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS						5.314.546.466,00							4.564.259.748,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.314.546.466,00							4.564.259.748,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.314.546.466,00							4.564.259.748,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial</i>	100 Persen			100 Persen	1.671.221.041,00						100 Persen	1.046.700.000,00	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	68 Jenis			34 Jenis	88.383.374,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	34 Jenis	448.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	306 Paket			1 Paket	6.931.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	178 Paket	98.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	85 Paket			1 Paket	23.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	42 Paket	150.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	64 Paket			1 Paket	52.951.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Paket	150.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	40 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	20 Paket	50.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan</i>	44 Jenis			23 Jenis	400.019.178,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	21 Jenis	50.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	28 Paket			1 Paket	261.165.652,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	14 Paket	25.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	38 Unit			5 Unit	138.853.526,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	18 Unit	25.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi</i>	24 Jenis			12 Jenis	866.532.389,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	12 Jenis	345.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			1 Laporan	314.231.916,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	29 Laporan	100.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	120 Laporan			12 Laporan	552.300.473,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	60 Laporan	245.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	92 Jenis			46 Jenis	316.286.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Jenis	203.700.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	22 Unit			1 Unit	71.620.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	11 Unit	42.500.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	75 Unit			3 Unit	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	37 Unit	120.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit			3 Unit	24.680.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	208 Unit	30.900.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit			10 Unit	199.986.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	23 Unit	10.300.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti	100 Persen			100 Persen	3.643.325.425,00						100 Persen	3.517.559.748,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen			100 Persen	3.643.325.425,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	100 Persen	3.517.559.748,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	1.548.872.938,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	1.304.923.042,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	282.023.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	282.023.664,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	294.735.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	466.490.012,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	31.826.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	50.500.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	203.387.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	324.499.861,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	160.261.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	511.220.755,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	427.495.559,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	264.802.414,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	5.050.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	5.050.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	88.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	101.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang			60 Orang	99.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	90 Orang	101.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Dokumen			1 Dokumen	496.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Daksa Terlantar)	1 Dokumen	101.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
		UPT. BINA LARAS						5.359.095.821,00							5.146.390.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.359.095.821,00							5.146.390.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.359.095.821,00							5.146.390.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial	100 Persen			100 Persen	1.313.576.713,00						100 Persen	918.500.000,00	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	68 Jenis			34 Jenis	293.338.541,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	34 Jenis	220.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	306 Paket			1 Paket	23.431.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	178 Paket	20.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	85 Paket			1 Paket	203.643.231,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	42 Paket	100.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	64 Paket			1 Paket	61.193.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	32 Paket	50.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	40 Paket			1 Paket	5.070.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	20 Paket	50.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan</i>	44 Jenis			23 Jenis	155.094.264,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	21 Jenis	70.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	28 Paket			1 Paket	91.040.738,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	14 Paket	20.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	38 Unit			5 Unit	64.053.526,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	18 Unit	50.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi</i>	24 Jenis			12 Jenis	575.417.808,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	12 Jenis	336.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			1 Laporan	223.608.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	29 Laporan	50.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	120 Laporan			12 Laporan	351.809.568,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	60 Laporan	286.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	92 Jenis			46 Jenis	289.726.100,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	46 Jenis	292.500.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	22 Unit			1 Unit	38.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	11 Unit	42.500.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	75 Unit			5 Unit	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	37 Unit	50.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	416 Unit			2 Unit	21.680.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	208 Unit	100.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	18 Unit			2 Unit	199.986.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Fasilitas Pelayanan Sosial	9 Unit	100.000.000,00	UPT. BINA LARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti	100 Persen			100 Persen	4.045.519.108,00						100 Persen	4.227.890.000,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyanggah Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen			100 Persen	4.045.519.108,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	100 Persen	4.227.890.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang			70 Orang	1.810.760.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	90 Orang	1.919.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang			70 Orang	127.335.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	90 Orang	151.500.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang			70 Orang	496.167.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	90 Orang	300.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	180 Orang			70 Orang	72.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	90 Orang	101.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	180 Orang			70 Orang	277.147.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	90 Orang	505.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang			70 Orang	768.330.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	90 Orang	707.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	180 Orang			70 Orang	121.893.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	90 Orang	202.000.000,00	UPT. BINA LARAS
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	77.733.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PPKS (Disabilitas Mental Terlantar)	1 Dokumen	80.800.000,00	UPT. BINA LARAS
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						51.768.626.624,00							61.880.006.888,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						51.420.584.834,00							61.531.964.888,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						51.420.584.834,00							61.531.964.888,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>	100 Persen			100 Persen	31.634.127.868,00						100 Persen	41.652.391.584,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen			4 Dokumen	224.957.104,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Disnakertrans	4 Dokumen	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen			4 Dokumen	224.957.104,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Disnakertrans	4 Dokumen	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)</i>	2 Laporan			1 Laporan	23.124.159.063,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Disnakertrans	1 Laporan	32.972.273.657,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	360 Orang/ Bulan			180 Orang/ Bulan	23.124.159.063,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Disnakertrans	180 Orang/ Bulan	32.972.273.657,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi (Jenis)</i>	2 Jenis			1 Jenis	210.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Disnakertrans	1 Jenis	420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	560 Paket			140 Paket	210.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	280 Paket	420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10 Jenis			5 Jenis	2.119.868.291,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	5 Jenis	1.677.966.503,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket			25 Paket	87.974.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	25 Paket	87.974.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			10 Paket	373.070.588,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	18 Paket	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	528.826.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	6 Paket	259.992.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	70 Paket			25 Paket	129.999.753,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	35 Paket	129.999.753,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	999.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	2 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Jenis)	6 Jenis			3 Jenis	276.448.848,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	3 Jenis	210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	76.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	2 Paket	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	456 Unit			10 Unit	199.948.848,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	250 Unit	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	8 Jenis			4 Jenis	4.099.424.562,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	4 Jenis	4.207.151.424,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	1.234.924.562,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	2 Laporan	1.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	2.859.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	2 Laporan	2.882.151.424,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	12 Jenis			6 Jenis	1.579.270.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	6 Jenis	1.940.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit			5 Unit	264.150.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	8 Unit	280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit			4 Unit	75.120.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	8 Unit	160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit			125 Unit	400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	225 Unit	400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit			1 Unit	240.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN Disnakertrans	3 Unit	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit			2 Unit	400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Disnakertrans	4 Unit	400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN Disnakertrans	6 Unit	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	98 Persen			98 Persen	599.994.043,00						98 Persen	600.000.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	96 Persen			95 Persen	599.994.043,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang menangani Ketenagakerjaan dan Perusahaan	96 Persen	600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen			1 Dokumen	199.994.593,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keseimbangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang menangani Ketenagakerjaan dan Perusahaan	0 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	60 Orang			30 Orang	149.999.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keseimbangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang menangani Ketenagakerjaan dan Perusahaan	30 Orang	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	150 Orang			60 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang menangani Ketenagakerjaan dan Perusahaan	90 Orang	450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi	26 Persen 163,02 Juta/ Jiwa			161,32 Juta/Jiwa 24 Persen	3.200.018.354,00						26 Persen 163,02 Juta/ Jiwa	3.288.761.129,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta yang meningkat kompetennya	2968 Orang			1384 Orang	2.797.069.729,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Pencari Kerja	1584 Orang	2.885.812.504,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	524 Orang			262 Orang	2.697.069.729,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Pencari Kerja	262 Orang	2.785.812.504,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas														
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	12 Kesepakatan			3 Kesepakatan	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Pencari Kerja	6 Kesepakatan	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang diakreditasi (Perusahaan)	40 Lembaga			15 Lembaga	114.205.850,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja	20 Lembaga	114.205.850,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	40 LPK			15 LPK	114.205.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja	20 LPK	114.205.850,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas (Perusahaan)	30 Perusaha an			10 Perusahaan	186.158.565,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	15 Perusaha an	186.158.565,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan			10 Perusahaan	186.158.565,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	15 Perusahaan	186.158.565,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi (kabupaten/kota)	12 Kab/Kota			12 Kab/Kota	102.584.210,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan BPS	12 Kab/Kota	102.584.210,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	102.584.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan BPS	1 Dokumen	102.584.210,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	45 Persen			45 Persen	3.516.678.480,00						45 Persen	3.516.730.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal (Persentase)	50 Persen			45 Persen	2.339.014.694,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan	50 Persen	2.339.015.214,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	52 Orang			50 Orang	177.410.385,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan	26 Orang	177.410.385,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	240 Orang			120 Orang	99.801.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan	120 Orang	99.801.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2600 Orang			1300 Orang	323.997.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan	1300 Orang	323.997.570,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	40 Orang			20 Orang	87.805.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan	20 Orang	87.805.954,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang			150 Orang	1.549.999.285,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan	150 Orang	1.549.999.805,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	40 Orang			20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan	20 Orang	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang terlayani mengurus Izin Penempatan Tenaga Kerja (Lembaga)	25 Lembaga			10 Lembaga	299.999.904,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	15 Lembaga	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	20 Lembaga			10 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	10 Lembaga	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga			10 Lembaga	149.999.904,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	10 Lembaga	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan informasi pasar tenaga kerja (Persentase)	50 Persen			45 Persen	399.948.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan dan Pencari Kerja	50 Persen	400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	10000 Orang			5000 Orang	199.948.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan dan Pencari Kerja	5000 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1800 Orang			900 Orang	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan dan Pencari Kerja	900 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlindungi (Orang)	170 Orang			50 Orang	373.229.927,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan	100 Orang	373.229.927,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang			50 Orang	82.818.692,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan	50 Orang	82.818.692,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik														
			Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	4 Perusahaan			2 Perusahaan	24.925.829,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan	2 Perusahaan	24.925.829,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	100 Orang			50 Orang	110.433.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan	50 Orang	110.433.650,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	100 Orang			50 Orang	155.051.756,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan	50 Orang	155.051.756,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data RPTKA yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2 Dokumen			1 Dokumen	104.485.755,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan dan Tenaga Kerja AsingJumlah	1 Dokumen	104.485.755,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	100 Orang			50 Orang	104.485.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan dan Tenaga Kerja AsingJumlah	50 Orang	104.485.755,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	12 Persen			12 Persen	10.040.001.874,00						12 Persen	10.044.317.064,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Persentase)	15 Persen			12 Persen	378.794.794,00			Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	15 Persen	378.807.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan			250 Perusahaan	223.433.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	250 Perusahaan	223.434.720,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	60 Perusahaan			30 Perusahaan	76.065.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	30 Perusahaan	76.065.860,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	2 Laporan			1 Laporan	79.295.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	1 Laporan	79.307.295,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persentase)	15 Persen			12 Persen	1.299.099.545,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	15 Persen	1.303.400.880,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara			5 Perkara	550.877.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	5 Perkara	550.877.105,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara			50 Perkara	90.632.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	50 Perkara	90.633.070,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2000 Asosiasi dan Serikat Pekerja			1000 Asosiasi dan Serikat Pekerja	83.958.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	1000 Asosiasi dan Serikat Pekerja	83.959.135,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	24 Lembaga			12 Lembaga	421.197.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	12 Lembaga	421.197.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	120 Perusahaan			60 Perusahaan	152.433.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	60 Perusahaan	156.733.590,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Dokumen Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Dokumen)	4 Dokumen			2 Dokumen	8.362.107.535,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	2 Dokumen	8.362.108.309,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP	2 Surat Keputusan			1 Surat Keputusan	361.969.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	1 Surat Keputusan	361.969.465,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penetapan UMK	2 Surat Keputusan			1 Surat Keputusan	81.642.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	1 Surat Keputusan	81.642.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	77000 Orang			38500 Orang	7.918.495.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pengusaha dan Pekerja	38500 Orang	7.918.495.944,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	40 Persen			40 Persen	2.429.764.215,00						40 Persen	2.429.764.215,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan (%)	50 Persen			40 Persen	2.429.764.215,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	50 Persen	2.429.764.215,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	4600 Perusahaan			2300 Perusahaan	1.795.381.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perusahaan	2300 Perusahaan	1.795.381.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Yang Direncanakan	3 Kawasan			3 Kawasan	348.041.790,00						3 Kawasan	348.042.000,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang direncanakan	6 Kawasan			3 Kawasan	348.041.790,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Transmigran	3 Kawasan	348.042.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	6 Kawasan Transmigrasi			3 Kawasan Transmigrasi	348.041.790,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Transmigran	3 Kawasan Transmigrasi	348.042.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPT. LATIHAN KERJA						7.130.643.675,00							7.211.545.548,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.130.643.675,00							7.211.545.548,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7.130.643.675,00							7.211.545.548,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100 Persen			100 Persen	5.601.172.781,00						100 Persen	5.959.754.776,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10 Jenis			5 Jenis	259.561.281,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	5 Jenis	346.884.551,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			2 Paket	119.994.349,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	18 Paket	120.000.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	46.244.463,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	6 Paket	46.245.948,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	70 Paket			6 Paket	11.986.469,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	35 Paket	11.986.496,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	81.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	2 Laporan	168.652.107,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Jenis)	6 Jenis			3 Jenis	2.787.998.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	3 Jenis	3.057.932.225,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	49.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	2 Paket	50.000.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	456 Unit			49 Unit	318.548.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	250 Unit	629.992.225,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	19.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	2 Unit	20.000.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	2.200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	2 Unit	2.200.000.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			3 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	3 Unit	157.940.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	8 Jenis			4 Jenis	1.855.878.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	4 Jenis	1.857.078.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	48.438.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	2 Laporan	48.438.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	1.807.440.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	2 Laporan	1.808.640.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)</i>	12 Jenis			6 Jenis	697.735.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	6 Jenis	697.860.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	450 Unit			100 Unit	191.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	225 Unit	191.350.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	21 Unit			2 Unit	199.875.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	3 Unit	200.000.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8 Unit			2 Unit	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	4 Unit	150.000.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit			3 Unit	156.510.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN UPTLK Disnakertrans	6 Unit	156.510.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</i>	26 Persen 163,02 Juta/ Jiwa			24 Persen 161,32 Juta/Jiwa	1.529.470.894,00						26 Persen 163,02 Juta/ Jiwa	1.251.790.772,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta yang meningkat kompetennya	2968 Orang			1384 Orang	1.529.470.894,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Pencari Kerja	1584 Orang	1.251.790.772,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	524 Orang			144 Orang	1.429.730.517,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Pencari Kerja	262 Orang	1.151.790.772,00	UPT. LATIHAN KERJA
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	12 Kesepakatan			3 Kesepakatan	99.740.377,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Pencari Kerja	6 Kesepakatan	100.000.000,00	UPT. LATIHAN KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							23.015.435.883,00						25.611.121.731,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.015.435.883,00							25.611.121.731,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						21.486.378.197,00							24.026.578.489,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	100 Persen			100 Persen	18.113.880.238,00						100 Persen	21.772.438.489,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen			1 Dokumen	120.006.795,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	1 Dokumen 1 Dokumen	132.743.282,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	120.006.795,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	1 Dokumen	132.743.282,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	40 Laporan 40 Laporan			20 Laporan	14.713.705.716,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	20 Laporan 20 Laporan	18.398.905.425,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2616 Orang/ Bulan			1296 Orang/ Bulan	14.713.705.716,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	1320 Orang/ Bulan	18.398.905.425,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5 Jenis Layanan 5 Jenis Layanan			5 Jenis Layanan	1.481.787.909,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	5 Jenis Layanan 5 Jenis Layanan	1.452.341.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			6 Paket	19.994.956,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	6 Paket	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket			9 Paket	653.845.982,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	9 Paket	622.425.412,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	193.557.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	2 Paket	203.577.568,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	79.337.851,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	2 Paket	79.338.262,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan			140 Laporan	535.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	140 Laporan	525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis 4 Jenis			4 Jenis	1.223.473.018,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	4 Jenis 4 Jenis	1.198.448.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan			25 Laporan	265.000.004,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	25 Laporan	275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	958.473.014,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	12 Laporan	923.448.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7 Jenis 7 Jenis			7 Jenis	574.906.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	7 Jenis 7 Jenis	590.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit			8 Unit	235.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	8 Unit	235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			6 Unit	74.996.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	6 Unit	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128 Unit			64 Unit	90.008.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	64 Unit	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	174.902.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	DP3AP2KB Provinsi Riau dan UPT PPA Provinsi Riau	1 Unit	190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	10 Persen			10 Persen	1.868.418.044,00						10 Persen	750.000.000,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG)	80 Persen			75 Persen	593.562.023,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	80 Persen	380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	4 Laporan			2 Laporan	129.999.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	2 Laporan	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	2 Dokumen			1 Dokumen	463.562.313,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Politik	20 Organisasi			20 Organisasi	224.856.194,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Masyarakat, Perempuan Pelaku Industri Rumah Tangga, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga dan Perempuan Kader Partai Politik	20 Organisasi	270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Orang			50 Orang	124.856.355,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Masyarakat, Perempuan Pelaku Industri Rumah Tangga, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga dan Perempuan Kader Partai Politik	50 Orang	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20 Lembaga			20 Lembaga	99.999.839,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Masyarakat, Perempuan Pelaku Industri Rumah Tangga, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga dan Perempuan Kader Partai Politik	20 Lembaga	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang diadvokasi dan didampingi	20 Lembaga			20 Lembaga	1.049.999.827,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Profesi/Akademisi	20 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	9 Lembaga			9 Lembaga	1.049.999.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Profesi/Akademisi	9 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen			100 Persen	523.639.470,00						100 Persen	523.640.000,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang berperan Aktif terhadap Pencegahan TPPO dan KDRT di Provinsi Riau	13 Lembaga			13 Lembaga	265.499.585,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Siswa/siswi, tenaga pendidik, Lembaga Masyarakat, OPD terkait perlindungan perempuan dan anak, Relawan SAPA dan Anggota GT PP TPPO	13 Lembaga	265.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	165.499.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Siswa/siswi, tenaga pendidik, Lembaga Masyarakat, OPD terkait perlindungan perempuan dan anak, Relawan SAPA dan Anggota GT PP TPPO	1 Dokumen	165.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	31 Perangkat Daerah			31 Perangkat Daerah	99.999.933,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Siswa/siswi, tenaga pendidik, Lembaga Masyarakat, OPD terkait perlindungan perempuan dan anak, Relawan SAPA dan Anggota GT PP TPPO	31 Perangkat Daerah	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang mendapatkan Pembinaan	13 Lembaga			13 Lembaga	258.139.885,00			Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Instansi Vertikal dan OPD terkait, SDM UPT Kab. Kota dan Tenaga Pendidik yang mempunyai Murid Disabilitas	13 Lembaga	258.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Orang			60 Orang	158.139.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Instansi Vertikal dan OPD terkait, SDM UPT Kab. Kota dan Tenaga Pendidik yang mempunyai Murid Disabilitas	60 Orang	158.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang			50 Orang	99.999.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Instansi Vertikal dan OPD terkait, SDM UPT Kab. Kota dan Tenaga Pendidik yang mempunyai Murid Disabilitas	50 Orang	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	82.13 Indeks			82.13 Indeks	124.999.338,00						82.13 Indeks	125.000.000,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang menyediakan Layanan Komprehensif yang dibina	8 Lembaga			8 Lembaga	124.999.338,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Pemerintah, Ormas, Kader dan Masyarakat	8 Lembaga	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	8 Perangkat Daerah			8 Perangkat Daerah	84.999.557,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Pemerintah, Ormas, Kader dan Masyarakat	8 Perangkat Daerah	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	39.999.781,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Pemerintah, Ormas, Kader dan Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Provinsi Riau	1 Dokumen			1 Dokumen	64.942.314,00						1 Dokumen	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang tersedia</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	64.942.314,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Pemerintah, Ormas, Kader dan Masyarakat	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	64.942.314,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Pemerintah, Ormas, Kader dan Masyarakat	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Persentase Kabupaten/Kota yang mangalami Peningkatan Capaian Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak</i>	50.77 Persen			50.77 Persen	790.498.793,00						50.77 Persen	790.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga PHA pada Lembaga yang berperan aktif dan berfungsi	20 Lembaga			20 Lembaga	181.626.165,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perangkat Daerah, Lembaga/Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Anak Provinsi Riau	20 Lembaga	120.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20 perangkat daerah			20 perangkat daerah	181.626.165,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perangkat Daerah, Lembaga/Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Anak Provinsi Riau	20 perangkat daerah	120.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dilakukan pembinaan	11 Lembaga			11 Lembaga	608.872.628,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD dan Lembaga terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Anak, Forum Anak dan Fasilitator Forum Anak	11 Lembaga	670.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	13 Kegiatan			6 Kegiatan	288.872.676,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD dan Lembaga terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Anak, Forum Anak dan Fasilitator Forum Anak	7 Kegiatan	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	12 Kegiatan			6 Kegiatan	319.999.952,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD dan Lembaga terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Anak, Forum Anak dan Fasilitator Forum Anak	6 Kegiatan	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1.529.057.686,00							1.584.543.242,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun GDPK 5 (lima) Pilar	91.67 Persen			91.67 Persen	306.606.405,00						91.67 Persen	306.607.000,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 Dokumen			1 Dokumen	306.606.405,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD KB, Mitra Kerja, Pengelola Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, dan SSK	1 Dokumen	306.607.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	2 Laporan			1 Laporan	100.254.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD KB, Mitra Kerja, Pengelola Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, dan SSK	1 Laporan	100.255.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain														
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	2 Daerah			12 Daerah	99.999.851,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD KB, Mitra Kerja, Pengelola Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, dan SSK	1 Daerah	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 Laporan			1 Laporan	106.351.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD KB, Mitra Kerja, Pengelola Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, dan SSK	1 Laporan	106.352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,3 Persen			20,3 Persen	289.814.509,00						20,3 Persen	320.298.445,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen			1 Dokumen	186.329.046,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Mitra Kerja (Media Massa dan Organisasi)	1 Dokumen	216.812.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	2 Laporan			1 Laporan	72.475.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Mitra Kerja (Media Massa dan Organisasi)	1 Laporan	102.958.245,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 Daerah			1 Daerah	113.853.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Mitra Kerja (Media Massa dan Organisasi)	1 Daerah	113.854.235,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB yang diberdayakan	7 Organisasi			7 Organisasi	103.485.463,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD. KB Kabupaten Kota, Mitra Kerja Terkait dan Stake Holder (IBI, PPNI, PERSAGI, PLKB,PKB, BKKBN)	7 Organisasi	103.485.965,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	7 Organisasi			7 Organisasi	103.485.463,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD. KB Kabupaten Kota, Mitra Kerja Terkait dan Stake Holder (IBI, PPNI, PERSAGI, PLKB,PKB, BKKBN)	7 Organisasi	103.485.965,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga yang Melaksanakan pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan karakter	107957 Keluarga			107957 Keluarga	932.636.772,00						107957 Keluarga	957.637.797,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Desain Program Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen			1 Dokumen	814.998.992,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD Kab/Kota, Pengelola Poktan, Organisasi, Mitra Kerja, Masyarakat, TPPS Se Provinsi Riau dan Generasi Remaja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	840.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen			1 Dokumen	114.999.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD Kab/Kota, Pengelola Poktan, Organisasi, Mitra Kerja, Masyarakat, TPPS Se Provinsi Riau dan Generasi Remaja	1 Dokumen	115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	8 Dokumen			4 Dokumen	599.999.889,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD Kab/Kota, Pengelola Poktan, Organisasi, Mitra Kerja, Masyarakat, TPPS Se Provinsi Riau dan Generasi Remaja	4 Dokumen	625.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)														
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	13 Kelompok			13 Kelompok	99.999.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	OPD Kab/Kota, Pengelola Poktan, Organisasi, Mitra Kerja, Masyarakat, TPPS Se Provinsi Riau dan Generasi Remaja	13 Kelompok	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						998.360.000,00							1.078.360.000,00	
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen			100 Persen	400.000.000,00						100 Persen	430.000.000,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan Masyarakat	95 Orang			45 Orang	400.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perempuan korban kekerasan	50 Orang	430.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	95 Orang			45 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perempuan korban kekerasan	50 Orang	430.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen			100 Persen	598.360.000,00						100 Persen	648.360.000,00	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan	195 Orang			95 Orang	598.360.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Anak Korban Tindak Kekerasan	100 Orang	648.360.000,00	UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2.963.633.236,00							2.449.755.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	90.29 Poin			90.29 Poin	2.734.544.484,00						90.29 Poin	1.854.405.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14 Dokumen			7 Dokumen	1.413.383.912,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	7 Dokumen	1.082.655.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2 Dokumen			1 Dokumen	733.139.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Dokumen	503.842.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2 Laporan			1 Laporan	202.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Laporan	220.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	2 Laporan			1 Laporan	78.732.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Laporan	82.687.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	2 Laporan			1 Laporan	228.857.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Laporan	110.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	48.762.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Dokumen	55.125.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	81.995.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Laporan	55.125.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen			1 Dokumen	39.260.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Dokumen	55.125.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	975.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	330.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	45 Ton			20 Ton	975.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	25 Ton	330.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	8 Dokumen			4 Dokumen	346.160.572,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	4 Dokumen	441.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen			1 Dokumen	190.169.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	220.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan			1 Laporan	102.031.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	110.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 Laporan			1 Laporan	35.952.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	55.125.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	18.007.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	55.125.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Wilayah Rawan Pangan	11 Kecamatan			11 Kecamatan	229.088.752,00						11 Kecamatan	595.350.000,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	2 Laporan			1 Laporan	115.562.680,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	297.675.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen			1 Dokumen	115.562.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	297.675.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	2 Laporan			1 Laporan	113.526.072,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	297.675.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	113.526.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	297.675.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						131.512.811.040,00							213.998.550.665,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						131.512.811.040,00							213.998.550.665,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 Persen			100 Persen	49.611.101.915,00						100 Persen	56.928.763.710,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			1 Laporan	315.500.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	1 Laporan	121.275.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	14 Dokumen			1 Dokumen	315.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	7 Dokumen	121.275.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	100 Persen			100 Persen	40.257.882.420,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	48.402.363.710,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	300 Orang/ Bulan			300 Orang/ Bulan	40.257.882.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	300 Orang/ Bulan	48.402.363.710,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen			100 Persen	109.873.636,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	115.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	99.960.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	1 Laporan	105.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			1 Laporan	9.913.636,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	7 Laporan	10.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	69.987.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	100 Persen	52.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen			1 Dokumen	69.987.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	1 Dokumen	52.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	1.484.070.770,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	1.453.375.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	34.997.084,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	36.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	174.993.225,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	183.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	275.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	5 Paket	236.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	84.999.806,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	5 Paket	89.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	904.081.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	1 Laporan	896.875.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	9.999.655,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	1 Dokumen	10.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	649.765.396,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	315.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	99.917.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	1 Paket	105.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit			10 Unit	99.950.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	18 Unit	105.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	449.898.236,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	1 Unit	105.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	5.069.999.192,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	5.323.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	1 Laporan	21.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	1.299.999.192,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	1 Laporan	1.365.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan			1 Laporan	3.750.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	5 Laporan	3.937.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	1.654.023.501,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	100 Persen	1.145.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit			6 Unit	244.530.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	6 Unit	257.250.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit			67 Unit	274.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	74 Unit	183.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit			20 Unit	9.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	20 Unit	10.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit			105 Unit	124.907.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	237 Unit	78.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	999.996.001,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN		615.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	4.20 Ton/Ha			4.20 Ton/Ha	43.551.710.260,00						4.20 Ton/Ha	30.202.286.955,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	14200 Ha			7100 Ha	36.049.710.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	7100 Ha	24.052.286.955,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan			1 Laporan	36.049.710.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Laporan	24.052.286.955,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman</i>	14200 Ha			7100 Ha	7.501.999.660,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	7100 Ha	6.150.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>	8 laporan			2 laporan	7.501.999.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	4 laporan	6.150.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	38.349.998.865,00						-	126.867.500.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	21200 Ha			-	38.349.998.865,00			-	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	10300 Ha	126.867.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	3.349.999.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Dokumen	3.433.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	34.999.999.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	1 Dokumen	123.433.750.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						1.784.366.794,00							733.062.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.784.366.794,00							733.062.500,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.784.366.794,00							733.062.500,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 Persen			100 Persen	590.666.088,00						100 Persen	319.625.000,00	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	69.859.491,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	42.000.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	19.988.728,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	19.970.729,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	19.984.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	9.916.034,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	49.736.644,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	10.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit			2 Unit	49.736.644,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	18 Unit	10.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	176.604.953,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	189.000.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan			1 Laporan	176.604.953,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Laporan	189.000.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	294.465.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	78.125.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit			1 Unit	39.560.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	74 Unit	42.000.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit			14 Unit	29.930.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	237 Unit	10.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	224.975.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN		25.625.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar	80 Persen			80 Persen	1.193.700.706,00						80 Persen	413.437.500,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	167 Dokume n			81 Dokumen	1.193.700.706,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani, Pelaku Usaha Pertanian	86 Dokumen	413.437.500,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			<i>Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	165 Sertifikat			80 Sertifikat	443.740.017,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani, Pelaku Usaha Pertanian	85 Sertifikat	360.937.500,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	749.960.689,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani, Pelaku Usaha Pertanian	1 Dokumen	52.500.000,00	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN						5.666.511.863,00							6.119.250.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.666.511.863,00							6.119.250.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						5.666.511.863,00							6.119.250.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</i>	100 Persen			100 Persen	670.000.000,00						100 Persen	586.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	100.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	42.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	60.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	35.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN	100 Persen	10.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	36 Unit			2 Unit	35.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN	18 Unit	10.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	400.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	420.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan			1 Laporan	400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Laporan	420.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	135.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	114.250.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit			1 Unit	40.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	74 Unit	42.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit			28 Unit	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	237 Unit	21.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN		51.250.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kompetensinya	3 Persen			3 Persen	4.996.511.863,00						3 Persen	5.532.500.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya	465 Orang			225 Orang	849.995.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	240 Orang	630.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	48 Unit			24 Unit	199.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	24 Unit	210.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>	465 Orang			225 Orang	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	240 Orang	420.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penerapan Penyuluhan Pertanian</i>	777 Kelomp ok			379 Kelompok	3.896.516.863,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	398 Kelomp ok	4.587.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>	777 Kelompok			379 Kelompok	3.896.516.863,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	398 Kelompok	4.587.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan	8 Unit			4 Unit	250.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	4 Unit	315.000.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi	4 Unit			2 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	2 Unit	157.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	4 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	2 Unit	157.500.000,00	UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
		UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						4.258.953.655,00							3.228.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.258.953.655,00							3.228.750.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.258.953.655,00							3.228.750.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 Persen			100 Persen	2.909.012.115,00						100 Persen	1.888.750.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	49.985.475,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	42.000.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	9.999.990,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	9.991.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	19.998.031,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	9.996.374,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	9.879.840,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	10.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit			2 Unit	9.879.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	18 Unit	10.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	1.549.935.200,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	1.627.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan			1 Laporan	1.549.935.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Laporan	1.627.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	1.299.211.600,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	208.750.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit			4 Unit	119.880.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	74 Unit	126.000.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	237 Unit			40 Unit	29.992.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	237 Unit	31.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.149.339.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN		51.250.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura</i>	4.20 Ton/Ha			4.20 Ton/Ha	1.349.941.540,00						4.20 Ton/Ha	1.340.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman</i>	14200 Ha			7100 Ha	1.299.986.540,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani	7100 Ha	1.287.500.000,00	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 Persen			100 Persen	951.216.054,00						100 Persen	623.500.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	191.663.093,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	100 Persen	42.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	9.999.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	29.998.473,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	141.668.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	9.997.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkata n Tata Kelola	ASN	5 Paket	10.500.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	99.250.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	100 Persen	10.500.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	36 Unit			2 Unit	99.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	18 Unit	10.500.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	374.972.961,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN	100 Persen	393.750.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	10 Laporan			1 Laporan	374.972.961,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN	5 Laporan	393.750.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	285.330.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	100 Persen	177.250.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit			1 Unit	89.450.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	74 Unit	42.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit			50 Unit	146.060.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN	237 Unit	84.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.820.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola	ASN		51.250.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Luas Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Luas Serangan OPT Dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura	76 Persen			76 Persen	3.966.444.809,00						76 Persen	3.707.358.222,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian	5200 Ha			2600 Ha	3.966.444.809,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	2600 Ha	3.707.358.222,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5000 Ha			2500 Ha	3.466.499.809,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	2500 Ha	3.182.358.222,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	200 Ha			100 Ha	499.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	100 Ha	525.000.000,00	UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						108.072.275.153,00							129.222.475.012,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						103.880.369.300,00							125.245.037.269,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						103.880.369.300,00							125.245.037.269,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	100.098.952.575,00						100 Persen	122.630.233.714,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	633.785.213,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	470.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	250.508.768,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	3 Dokumen	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			1 Laporan	183.276.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	30 Laporan			14 Laporan	92.392.414.541,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	15 Laporan	116.585.233.714,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1570 Orang/ Bulan			770 Orang/ Bulan	92.242.414.746,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	800 Orang/ Bulan	116.435.233.714,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Laporan			14 Laporan	149.999.795,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	14 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	14 Laporan			7 Laporan	291.999.675,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	7 Laporan	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			7 Dokumen	142.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			7 Laporan	149.999.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	7 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	215.124.197,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	45.124.832,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Paket	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen			1 Dokumen	169.999.365,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	1.518.136.407,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	1.330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	29.998.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	399.865.007,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	326.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	96.204.310,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			100 Laporan	623.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	42.178.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	4.404.832.542,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	3.295.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			3 Laporan	866.128.824,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	720.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	100.680.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	3.438.023.718,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	2.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			10 Unit	642.660.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	41.730.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			10 Unit	401.430.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	199.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan	100 Persen			100 Persen	219.537.000,00						100 Persen	100.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Provinsi Riau	2 Dokumen			1 Dokumen	27.968.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, Masyarakat, NGO	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	27.968.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, Masyarakat, NGO	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS Revisi RTRWP Riau yang disusun dan dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen			1 Dokumen	191.569.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, OPD Terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS														
			Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	2 Dokumen			1 Dokumen	191.569.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, OPD Terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	17,86 Persen			17,86 Persen	1.218.565.526,00						17,86 Persen	755.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Dokumen			1 Dokumen	1.122.496.116,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	605.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen			1 Dokumen	172.979.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	2 laporan			1 laporan	111.550.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 laporan	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	62 Lokasi			45 Lokasi	291.275.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	36 Lokasi	90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	6 Kegiatan			4 Kegiatan	88.450.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	3 Kegiatan	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	119.999.795,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan</i>	8 Unit			2 Unit	338.241.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	4 Unit	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Laporan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	4 Laporan			2 Laporan	96.069.410,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, OPD Terkait, Masyarakat	2 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	96.069.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, OPD Terkait, Masyarakat	2 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase Pembangunan Tanaman Kehati Provinsi</i>	10 Persen			10 Persen	495.148.000,00						10 Persen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Taman Kehati yang dikelola di Provinsi Riau	4 Unit			1 Unit	495.148.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, Masyarakat	2 Unit	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	395.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	2 Unit			1 Unit	100.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Provinsi Riau, Masyarakat	1 Unit	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 Yang Dikelola	100 Persen			100 Persen	149.111.000,00						100 Persen	200.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen fasilitasi persetujuan/izin pengumpulan Limbah B3 dan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	2 Dokumen			1 Dokumen	149.111.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			1 Dokumen	102.897.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen			1 Dokumen	46.213.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Izin Lingkungan	10 Persen			10 Persen	224.242.071,00						10 Persen	200.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	224.242.071,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang			10 Orang	94.069.021,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	5 Orang	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha			15 Badan Usaha	130.173.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	15 Badan Usaha	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen			100 Persen	74.274.585,00						100 Persen	23.489.706,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 Dokumen			1 Dokumen	74.274.585,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	23.489.706,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen			1 Dokumen	74.274.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	23.489.706,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari LH/Pameran LH	100 Persen			100 Persen	525.753.243,00						100 Persen	340.106.952,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	525.753.243,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Dokumen	340.106.952,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen			1 Dokumen	242.320.501,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	450 Orang			200 Orang	185.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	250 Orang	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	30 Keluarga			100 Keluarga	98.080.742,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	20 Keluarga	40.106.952,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kota Bersih di Provinsi Riau	100 Persen			100 Persen	528.981.940,00						100 Persen	400.000.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	24 Entitas			12 Entitas	528.981.940,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Kab/Kota Se Provinsi Riau, Sekolah Adiwiyata, Masyarakat, Penggiat/Pemerhati Lingkungan	12 Entitas	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	24 Entitas			12 Entitas	528.981.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Kab/Kota Se Provinsi Riau, Sekolah Adiwiyata, Masyarakat, Penggiat/Pemerhati Lingkungan	12 Entitas	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	259.088.000,00						100 Persen	96.206.897,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan yang ditangani	2 Dokumen			1 Dokumen	259.088.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	96.206.897,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	125 Pengaduan			40 Pengaduan	259.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	75 Pengaduan	96.206.897,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30 Persen			30 Persen	86.715.360,00						30 Persen	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penanganan Sampah</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	86.715.360,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	86.715.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.191.905.853,00							3.977.437.743,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						4.191.905.853,00							3.977.437.743,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	<i>Persentase Fasilitasi Pengelolaan Hutan</i>	100 Persen			100 Persen	3.621.906.801,00						100 Persen	3.152.437.743,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	1.152.592.730,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPT KPH, Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	1.152.592.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPT KPH, Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen			1 Dokumen	600.579.838,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen			1 Dokumen	299.999.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen			1 Dokumen	300.579.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	254 Ha			20 Ha	750.184.085,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Masyarakat	127 Ha	377.437.743,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen			1 Dokumen	99.997.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Masyarakat	1 Dokumen	31.859.436,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	4 Ha			2 Ha	69.999.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Masyarakat	2 Ha	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	84 Ha			5 Ha	220.191.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Masyarakat	42 Ha	63.718.871,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Masyarakat	1 Laporan	31.859.436,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	30 Ha			27 Ha	109.995.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Masyarakat	20 Ha	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	1.118.550.148,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	875.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen			1 Dokumen	571.373.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	1 Dokumen	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	235.523.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			150000 Ha	205.147.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi			3 Operasi	106.505.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	5 Operasi	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	314.999.502,00						100 Persen	175.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompok			3 Kelompok	314.999.502,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompok	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			3 Kelompok	99.999.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit			1 Unit	87.499.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Unit	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			100 Hektar	127.499.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis	1 Persen			1 Persen	254.999.550,00						1 Persen	650.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS	2 Dokumen			1 Dokumen	254.999.550,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, NGO, OPD Terkait	1 Dokumen	650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang			50 Orang	49.999.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, NGO, OPD Terkait	50 Orang	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga			1 Lembaga	29.999.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, NGO, OPD Terkait	1 Lembaga	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	2 Dokumen			1 Dokumen	174.999.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, NGO, OPD Terkait	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN						2.380.095.367,00							1.346.262.318,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.380.095.367,00							1.346.262.318,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2.380.095.367,00							1.346.262.318,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	974.474.130,00						100 Persen	524.862.318,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	295.572.935,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	214.862.318,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	4.663.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	30.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	245.355.220,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	75.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	20.902.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	25.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	5.345.925,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	10.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			5 Laporan	19.306.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	74.862.318,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 unit			1 unit	163.900.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 unit	50.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	163.900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	479.641.195,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	210.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			1 Laporan	229.459.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	100.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	13.520.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	236.661.395,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	100.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	35.360.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	50.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	35.360.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup</i>	17,86 Persen			17,86 Persen	1.405.621.237,00						17,86 Persen	821.400.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	<i>Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	1.405.621.237,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	821.400.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	1.405.621.237,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat, Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan	1 Dokumen	821.400.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
		UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						1.388.732.965,00							1.354.929.244,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						318.289.663,00							415.005.026,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						318.289.663,00							415.005.026,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</i>	100 Persen			100 Persen	318.289.663,00						100 Persen	415.005.026,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	70.012.677,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	99.359.640,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	2.219.454,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.490.079,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	37.541.401,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	4.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.647.322,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	5.445.822,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.085.484,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			17 Laporan	20.706.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	40.136.755,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 unit			1 unit	12.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 unit	94.447.761,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	94.447.761,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	199.966.986,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	171.197.625,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	7.580.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	8.392.909,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	192.386.986,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	162.804.716,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	75 Unit			1 Unit	36.310.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	50.000.000,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	20 Unit			1 Unit	36.310.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.070.443.302,00							939.924.218,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.070.443.302,00							939.924.218,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	<i>Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan</i>	100 Persen			100 Persen	150.819.393,00						100 Persen	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	150.819.393,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	75.000.000,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	150.819.393,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	75.000.000,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	919.623.909,00						100 Persen	864.924.218,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			47 Kelompok	919.623.909,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	864.924.218,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			47 Kelompok	579.396.340,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	769.000.000,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	100 Orang			20 Orang	276.534.179,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Orang	47.962.109,00	UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	4.435.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.753.210,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	84.759.346,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	8.196.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	2.851.926,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	3.125.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	3.327.247,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			6 Laporan	34.680.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	44.033.734,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	234.469.732,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	238.154.063,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	9.460.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	225.009.732,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	228.154.063,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	75 Unit			2 Unit	254.420.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	100.000.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			2 Unit	86.420.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	168.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.721.357.539,00							1.392.921.804,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.721.357.539,00							1.392.921.804,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	1.721.357.539,00						100 Persen	1.392.921.804,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengawasan peredaran benih dan sertifikasi sumber benih	100 Persen			100 Persen	1.721.357.539,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pengada dan Pengedar Benih/Bibit tanaman Kehutanan, Masyarakat	100 Persen	1.392.921.804,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat			10 Sertifikat	69.999.788,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pengada dan Pengedar Benih/Bibit tanaman Kehutanan, Masyarakat	10 Sertifikat	24.213.171,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit														
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	20 Sertifikat			5 Sertifikat	15.810.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pengada dan Pengedar Benih/Bibit tanaman Kehutanan, Masyarakat	10 Sertifikat	15.929.718,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	118750 Batang			67000 Batang	1.574.610.019,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pengada dan Pengedar Benih/Bibit tanaman Kehutanan, Masyarakat	59375 Batang	1.348.000.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan														
			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	6 Kali			7 Kali	60.937.732,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pengada dan Pengedar Benih/Bibit tanaman Kehutanan, Masyarakat	3 Kali	4.778.915,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA						2.117.960.152,00							1.635.586.797,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.419.766.092,00							1.148.902.904,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.419.766.092,00							1.148.902.904,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	1.419.766.092,00						100 Persen	1.148.902.904,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	85.291.620,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	130.085.730,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	10.145.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.408.587,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	60.542.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	34 Paket			1 Paket	1.224.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	1.322.576,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan			8 Laporan	13.380.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	79.354.567,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	915.854.472,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	860.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			1 Laporan	124.298.472,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	8.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	782.956.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	750.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	418.620.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	158.817.174,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			40 Unit	213.120.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	4 Unit			10 Unit	6.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	2 Unit	8.817.174,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit			1 Unit	197.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						698.194.060,00							486.683.893,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						698.194.060,00							486.683.893,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	<i>Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan</i>	100 Persen			100 Persen	249.198.802,00						100 Persen	163.683.893,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	49.199.990,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	49.199.990,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	199.998.812,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	113.683.893,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>	30 Laporan			1 Laporan	99.999.471,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	49.965.022,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>	4444150 Ha			123745 Ha	99.999.341,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	63.718.871,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	<i>Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan</i>	1,6 Persen			1,6 Persen	361.188.468,00						1,6 Persen	223.000.000,00	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	<i>Persentase pengelolaan tahura SSH</i>	40 Persen			20 Persen	361.188.468,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Tahura SSH	20 Persen	223.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi														
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	2 Permohonan			1 Permohonan	78.105.713,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Tahura SSH	1 Permohonan	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi														
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	12 Desa			6 Desa	99.871.225,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Tahura SSH	6 Desa	98.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi														
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	20 Ha			20 Ha	183.211.530,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Tahura SSH	10 Ha	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	87.806.790,00						100 Persen	100.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	87.806.790,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	47.376.935,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	1.600.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.204.868,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	82.496.707,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	6.210.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	1.515.480,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.268.472,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			9 Laporan	86.325.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	66.070.650,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 unit			1 unit	472.990.172,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 unit	108.731.385,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	72.990.172,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	14.568.835,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	94.162.550,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	147.719.659,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	148.060.044,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			2 Laporan	26.831.659,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	25.805.595,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	120.888.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	122.254.449,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			13 Unit	54.160.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2 Dokumen			1 Dokumen	72.325.065,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	20.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						912.998.541,00							522.789.152,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						912.998.541,00							522.789.152,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	575.999.134,00						100 Persen	272.789.152,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.845,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.845,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.645,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	47.789.152,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen			1 Dokumen	49.999.935,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	31.859.435,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen			1 Dokumen	49.999.710,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	15.929.717,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	375.999.644,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	175.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	137.999.754,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			305000 Ha	237.999.890,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan	1,6 Persen			1,6 Persen	98.000.000,00						1,6 Persen	150.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat	26 Laporan			1 Laporan	98.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	13 Laporan	150.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang			25 Orang	98.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	25 Orang	150.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	238.999.407,00						100 Persen	100.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	238.999.407,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	97.999.685,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	140.999.722,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS						1.201.954.015,00							782.312.153,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						754.590.284,00							434.523.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						754.590.284,00							434.523.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	754.590.284,00						100 Persen	434.523.000,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	257.851.210,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	138.436.670,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	2.850.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.490.079,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	152.909.401,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	7.175.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.647.322,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	9.236.809,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	8.299.269,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			20 Laporan	85.680.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	231.719.074,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	196.086.330,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			2 Laporan	33.156.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	30.772.788,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	4.750.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	193.813.074,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	155.313.542,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						447.363.731,00							347.789.153,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	260.941.000,00						100 Persen	247.789.153,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	32.431.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	32.431.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	30 Laporan			1 Laporan	228.510.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	197.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>	30 Laporan			1 Laporan	126.450.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>	4444150 Ha			5000 Ha	102.060.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	150.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	186.422.731,00						100 Persen	100.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	186.422.731,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	105.542.731,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	80.880.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU						1.172.420.685,00							875.025.668,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						556.218.196,00							504.447.362,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						556.218.196,00							504.447.362,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	556.218.196,00						100 Persen	504.447.362,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	173.383.216,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	233.892.386,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	70.336.226,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	150.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	9.200.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	8.549.505,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	15.480.990,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	9.111.343,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan			6 Laporan	78.366.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	66.231.538,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	218.264.980,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	170.554.976,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			3 Laporan	44.868.980,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	47.503.605,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	17.780.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	155.616.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	113.051.371,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	164.570.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	61.570.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	103.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						616.202.489,00							370.578.306,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						616.202.489,00							370.578.306,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	354.034.804,00						100 Persen	220.578.306,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	97.406.798,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	97.406.798,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	256.628.006,00			-	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	170.578.306,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	119.797.035,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			12000 Ha	136.830.971,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	95.578.306,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan	1,6 Persen			1,6 Persen	96.380.410,00						1,6 Persen	50.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat	26 Laporan			1 Laporan	96.380.410,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	13 Laporan	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang			25 Orang	96.380.410,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	25 Orang	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	165.787.275,00						100 Persen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	165.787.275,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	76.127.940,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	89.659.335,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN							1.136.151.707,00						594.121.990,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						555.658.707,00							348.543.684,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						555.658.707,00							348.543.684,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	555.658.707,00						100 Persen	348.543.684,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	313.136.115,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	137.238.713,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	1.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.422.737,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	34 Paket			1 Paket	192.915.965,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	34 Paket			1 Paket	6.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	10.104.720,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	34 Paket			1 Paket	7.702.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.422.737,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan			7 Laporan	103.868.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	66.288.519,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	131.322.592,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	161.304.971,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			3 Laporan	25.064.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	38.196.620,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	11.290.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	94.968.592,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	113.108.351,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			2 Unit	111.200.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			2 Unit	111.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						580.493.000,00							245.578.306,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						580.493.000,00							245.578.306,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	366.238.000,00						100 Persen	145.578.306,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	76.788.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	76.788.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	289.450.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	95.578.306,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	151.820.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			6000 Ha	137.630.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	214.255.000,00						100 Persen	100.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompok			2 Kelompok	214.255.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompok	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	100.175.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	114.080.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU						1.185.941.744,00							1.050.203.812,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						508.102.777,00							537.066.070,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						508.102.777,00							537.066.070,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	508.102.777,00						100 Persen	537.066.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	77.918.145,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	135.847.421,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	4.140.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.149.828,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	38.210.145,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	34 Paket			1 Paket	11.808.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	10.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan			1 Laporan	23.760.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	70.697.593,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	218.004.632,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	301.218.649,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			1 Laporan	39.962.184,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	56.651.643,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	13.040.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	165.002.448,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	234.567.006,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						677.838.967,00							513.137.742,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	331.486.940,00						100 Persen	177.437.742,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	151.487.285,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	151.487.285,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	30 Laporan			1 Laporan	179.999.655,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	127.437.742,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>	30 Laporan			1 Laporan	89.999.685,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	63.718.871,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>	4444150 Ha			203702 Ha	89.999.970,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	63.718.871,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	346.352.027,00						100 Persen	335.700.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			10 Kelompok	346.352.027,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	335.700.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			10 Kelompok	100.564.765,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			1463 Hektar	245.787.262,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	260.700.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI						1.093.145.095,00							818.031.688,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						615.673.605,00							531.523.664,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						615.673.605,00							531.523.664,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	615.673.605,00						100 Persen	531.523.664,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	130.659.265,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	140.306.361,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	62.405.304,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	9.200.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	9.919.532,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	3.059.961,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	14.601.515,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan			40 Laporan	55.994.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	70.785.314,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	2 unit			1 unit	194.360.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit			1 Unit	194.360.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	4 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	145.544.340,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	191.217.303,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			1 Laporan	31.655.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	35.202.241,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	8.040.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	15.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	105.849.340,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	141.015.062,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	145.110.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	150.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	36.060.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			2 Unit	54.050.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	55.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						477.471.490,00							286.508.024,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						477.471.490,00							286.508.024,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	267.600.000,00						100 Persen	161.508.024,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	72.600.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	72.600.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	195.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	111.508.024,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	98.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			10000 Ha	97.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	63.718.871,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	209.871.490,00						100 Persen	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	209.871.490,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	125.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	65.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit			3 Unit	74.247.820,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Unit	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	70.623.670,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK						1.066.308.115,00							740.725.010,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						311.968.115,00							429.413.277,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						311.968.115,00							429.413.277,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	311.968.115,00						100 Persen	429.413.277,00	
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	11.200.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Dokumen	28.647.465,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	11.200.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Paket	28.647.465,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	71.967.569,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	83.727.886,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	1.300.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.237.549,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	30.645.109,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	7.308.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	9.919.532,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	6.054.460,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.287.306,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan			1 Laporan	26.660.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	19.283.499,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	161.900.546,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	217.037.926,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			2 Laporan	32.400.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	19.283.499,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	8.020.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	9.919.532,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	121.480.546,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	187.834.895,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	66.900.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	40.900.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			16 Unit	26.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						754.340.000,00							311.311.733,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						754.340.000,00							311.311.733,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	411.140.000,00						100 Persen	161.311.733,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	90.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	321.140.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	111.311.733,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>	30 Laporan			1 Laporan	171.140.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	47.592.862,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>	4444150 Ha			536820 Ha	150.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	63.718.871,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	<i>Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan</i>	1,6 Persen			1,6 Persen	150.000.000,00						1,6 Persen	50.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	<i>Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat</i>	26 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	13 Laporan	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan</i>	50 Orang			25 Orang	150.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	25 Orang	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	<i>Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</i>	100 Persen			100 Persen	193.200.000,00						100 Persen	100.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	<i>Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan</i>	90 Kelompo k			2 Kelompok	193.200.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	60.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	133.200.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR						1.354.418.118,00							977.842.732,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						600.445.383,00							682.264.426,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						600.445.383,00							682.264.426,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	600.445.383,00						100 Persen	682.264.426,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	68.112.181,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	136.074.529,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	4.813.516,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	4.727.803,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	7.234.684,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	5.400.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	7.564.484,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	1.775.981,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	3.782.242,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			14 Laporan	48.888.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 unit			1 unit	5.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	364.963.217,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	348.911.867,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			1 Laporan	64.599.941,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	75.644.849,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	21.620.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	8.510.045,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	278.743.276,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	264.756.973,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	162.369.985,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	147.278.030,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	36.060.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			1 Unit	44.210.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	47.278.030,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	82.099.985,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						753.972.735,00							295.578.306,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						753.972.735,00							295.578.306,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	521.477.635,00						100 Persen	195.578.306,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	25.503.080,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	25.503.080,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen			1 Dokumen	195.738.315,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen			1 Dokumen	195.738.315,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	300.236.240,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	95.578.306,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			486037 Ha	150.236.240,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	232.495.100,00						100 Persen	100.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompok			11 Kelompok	232.495.100,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompok	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			11 Kelompok	95.560.100,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	136.935.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI						1.494.837.473,00							993.169.316,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						754.647.931,00							513.289.405,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						754.647.931,00							513.289.405,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	754.647.931,00						100 Persen	513.289.405,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	300.227.487,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	130.549.172,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	2.150.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.274.586,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	225.863.446,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	4.836.041,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.274.586,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			1 Laporan	67.378.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	187.360.444,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	282.740.233,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			1 Laporan	34.171.024,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	38.048.469,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	16.530.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	10.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	136.659.420,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	234.691.764,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						740.189.542,00							479.879.911,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	300.549.768,00						100 Persen	167.879.911,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	92.179.962,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	92.179.962,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	30 Laporan			1 Laporan	208.369.806,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	117.879.911,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>	30 Laporan			1 Laporan	91.409.824,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	38.231.322,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>	4444150 Ha			1200 Ha	116.959.982,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	79.648.589,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	<i>Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan</i>	1,6 Persen			1,6 Persen	91.959.958,00						1,6 Persen	50.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	<i>Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat</i>	26 Laporan			1 Laporan	91.959.958,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	13 Laporan	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan</i>	50 Orang			25 Orang	91.959.958,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	25 Orang	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	<i>Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</i>	100 Persen			100 Persen	347.679.816,00						100 Persen	262.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	347.679.816,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	262.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	99.999.971,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit			1 Unit	74.899.954,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Unit	93.500.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	2.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	3.991.762,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	124.891.197,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	150.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	4.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	3.353.080,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	5.267.328,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	2.395.057,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			5 Laporan	43.296.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	39.917.623,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	134.272.930,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	142.484.012,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	14 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	7 Laporan	3.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			2 Laporan	35.944.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	39.563.710,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	7.230.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	4.375.758,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	89.598.930,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	95.544.544,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	149.360.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	131.054.624,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	1.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			1 Unit	37.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	31.054.624,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	110.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						695.998.428,00							621.403.522,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						695.998.428,00							621.403.522,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	410.465.202,00						100 Persen	359.403.522,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	71.527.500,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	71.527.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen			1 Dokumen	58.017.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen			1 Dokumen	58.017.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	280.920.702,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	259.403.522,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	124.401.882,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			10000 Ha	93.889.410,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	84.403.522,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi			10 Operasi	62.629.410,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	5 Operasi	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	285.533.226,00						100 Persen	262.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	285.533.226,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	262.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	139.484.244,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit			1 Unit	60.605.490,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	1 Unit	93.500.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			1050 Hektar	85.443.492,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	93.500.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI						1.455.262.093,00							674.159.431,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						855.262.093,00							428.581.125,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						855.262.093,00							428.581.125,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	855.262.093,00						100 Persen	428.581.125,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	239.067.901,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	141.981.386,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	2.280.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.660.462,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	146.367.095,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	5.520.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.660.462,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	3.226.806,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.660.462,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			12 Laporan	81.674.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	95.572.192,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	139.168.265,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	58 Laporan			3 Laporan	21.223.200,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	33.507.803,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	6.010.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	5.660.462,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan			1 Laporan	68.338.992,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit			1 Unit	520.622.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	35 Unit	147.431.474,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			1 Unit	36.060.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			1 Unit	43.960.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	10 Unit	47.431.474,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	440.602.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						600.000.000,00							245.578.306,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						600.000.000,00							245.578.306,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	400.000.000,00						100 Persen	145.578.306,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	95.578.306,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan			1 Laporan	133.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	4444150 Ha			10000 Ha	217.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100 Persen			100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	100.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompok			3 Kelompok	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompok	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			3 Kelompok	120.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			1000 Hektar	80.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
		UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI						1.379.318.843,00							680.179.060,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						657.699.261,00							368.671.036,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						657.699.261,00							368.671.036,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100 Persen			100 Persen	657.699.261,00						100 Persen	368.671.036,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	136 Paket			4 Paket	194.181.513,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	68 Paket	127.360.210,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	81.141.703,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	45.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	16.096.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	9.973.999,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	10.018.810,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Paket	5.292.016,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			7 Laporan	86.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	25 Laporan	67.094.195,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	145.517.748,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	1 Laporan	141.310.826,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58 Laporan			2 Laporan	35.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	29 Laporan	34.233.164,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	5.330.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	7.077.662,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan			1 Laporan	105.187.748,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau	17 Laporan	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						721.619.582,00							311.508.024,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan	100 Persen			100 Persen	371.701.583,00						100 Persen	161.508.024,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	71.749.661,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen			1 Dokumen	71.749.661,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	OPD DLHK Provinsi Riau, UPT KPH	1 Dokumen	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	30 Laporan			1 Laporan	299.951.922,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	111.508.024,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>	30 Laporan			1 Laporan	148.591.334,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	15 Laporan	63.718.871,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>	4444150 Ha			10 Ha	151.360.588,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kawasan Hutan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Masyarakat	2224725 Ha	47.789.153,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	<i>Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan</i>	1,6 Persen			1,6 Persen	69.999.966,00						1,6 Persen	50.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	<i>Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat</i>	26 Laporan			1 Laporan	69.999.966,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	13 Laporan	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan</i>	50 Orang			25 Orang	69.999.966,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	25 Orang	50.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	<i>Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</i>	100 Persen			100 Persen	279.918.033,00						100 Persen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan	90 Kelompo k			2 Kelompok	279.918.033,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	50 Kelompo k	100.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	27 Kelompok			2 Kelompok	190.010.214,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	15 Kelompok	75.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial															
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	9100 Hektar			50 Hektar	89.907.819,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat	5050 Hektar	25.000.000,00	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						28.529.449.278,00							32.913.944.527,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.529.449.278,00							32.913.944.527,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.054.309.460,00							1.654.314.464,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase IKM kabupaten/kota sangat baik terkait pendaftaran penduduk	58,3 Persen			58,3 Persen	1.054.804.457,00						58,3 Persen	654.805.914,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	persentase tertib pelayanan pendaftaran penduduk	80 persen			77 persen	297.053.818,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	80 persen	297.054.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	2 Dokumen			1 Dokumen	49.999.650,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	4 Dokumen			2 Dokumen	99.999.669,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	12 Dokumen			12 Dokumen	147.054.499,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	12 Dokumen	147.054.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan pendaftaran kependudukan	100 persen			100 persen	589.525.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	100 persen	189.525.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan			1 Laporan	131.599.646,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	131.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan			1 Laporan	457.925.554,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	57.925.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	100 persen			100 persen	168.225.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	100 persen	168.225.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan			1 Laporan	110.299.917,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	110.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan			1 Laporan	57.925.522,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	57.925.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase IKM Kabupaten/Kota Sangat Baik Terkait Pencatatan Sipil	50 Persen			50 Persen	388.176.016,00						50 Persen	388.176.894,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase tertib pelayanan pencatatan sipil	100 persen			100 persen	174.999.578,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	100 persen	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	2 Dokumen			1 Dokumen	49.999.865,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	2 Laporan			1 Laporan	124.999.713,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	<i>Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pencatatan Sipil</i>	100 persen			100 persen	49.999.884,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	100 persen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</i>	2 Laporan			1 Laporan	49.999.884,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase konsultasi yang di fasilitasi	100 persen			100 persen	163.176.554,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	100 persen	163.176.894,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan			1 Laporan	94.999.429,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	94.999.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan			1 Laporan	68.177.125,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	68.177.184,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah pengguna data base kependudukan	31,25 Persen			31,25 Persen	361.329.167,00						31,25 Persen	361.331.656,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase data kependudukan yang valid dan akuntabel	86 persen			85 persen	159.643.058,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	86 persen	159.645.128,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4 Dokumen			2 Dokumen	49.960.798,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	2 Dokumen	49.962.868,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	12 Dokumen			10 Dokumen	109.682.260,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	12 Dokumen	109.682.260,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase pembinaan dan pengawasan kabupaten kota terkait PIAK	100 persen			100 persen	201.686.109,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	100 persen	201.686.528,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan			1 Laporan	111.699.760,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Sialangmunggu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	1 Laporan	111.699.880,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	132 Orang			60 Orang	89.986.349,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	60 Orang	89.986.648,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun	3 Dokumen			3 Dokumen	249.999.820,00						3 Dokumen	250.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya profil kependudukan	100 persen			100 persen	249.999.820,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	100 persen	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	6 Dokumen			3 Dokumen	249.999.820,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kab/Kota	3 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						26.475.139.818,00							31.259.630.063,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Persen			100 Persen	18.272.809.255,00						100 Persen	22.881.939.889,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			2 Dokumen	154.999.875,00			-	-	ASN	2 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			2 Dokumen	154.999.875,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2 Laporan			-	13.998.831.580,00			-	-	-	1 Laporan	18.425.886.208,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 Orang/ Bulan			110 Orang/ Bulan	13.998.831.580,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	115 Orang/ Bulan	18.425.886.208,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			1 Jenis	150.000.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Jenis	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	12 Jenis			6 Jenis	1.203.487.882,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	6 Jenis	1.293.783.957,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	49.992.950,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	2 Paket	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	199.938.600,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	159.999.820,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	44.992.620,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	34.992.892,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			2 Laporan	713.571.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	788.783.957,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis			3 Jenis	499.656.654,00			-	-	ASN	3 Jenis	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	99.848.954,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2 Paket	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit			15 Unit	199.807.700,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit			6 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	8 Unit	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	8 Jenis			4 Jenis	1.580.275.264,00			-	-	-	4 Jenis	1.686.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	9.999.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	11.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	275.299.768,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	310.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	44.990.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	1.249.986.496,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	1.310.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	10 Jenis			5 Jenis	685.558.000,00			-	-	ASN	5 Jenis	665.569.724,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	14 Unit			7 Unit	262.890.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	7 Unit	236.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	8 Unit			4 Unit	91.610.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	4 Unit	91.994.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	88 Unit			44 Unit	35.092.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	44 Unit	40.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit			3 Unit	99.809.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	3 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit			2 Unit	196.157.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2 Unit	196.365.674,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	<i>Persentase Penataan Desa / Desa Adat Yang Difasilitasi</i>	100 Persen			100 Persen	202.376.429,00						100 Persen	129.876.429,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	<i>Persentase penataan desa/desa adat yang diusulkan kabupaten</i>	100 persen			100 persen	202.376.429,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	100 persen	129.876.429,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	202.376.429,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	1 Dokumen	129.876.429,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	<i>Persentase Fasilitasi Kerja Sama</i>	100 Persen			100 Persen	234.631.593,00						100 Persen	234.632.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Perjanjian Kerja Sama desa yang difasilitasi</i>	15 PKS			5 PKS	234.631.593,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kabupaten	10 PKS	234.632.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	121.088.603,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kabupaten	1 Dokumen	121.088.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			<i>jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	113.542.990,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kabupaten	1 Dokumen	113.543.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Kurang Berkembang</i>	1,8 Persen			1,8 Persen	6.203.391.887,00						1,8 Persen	6.508.391.995,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	97 persen			96 persen	6.203.391.887,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	97 persen	6.508.391.995,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	2 Dokumen			1 Dokumen	96.188.677,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	1 Dokumen	46.188.677,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen			1 Dokumen	2.989.181.552,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	1 Dokumen	3.489.181.552,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen			2 Dokumen	605.508.066,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	2 Dokumen	605.508.066,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2 Dokumen			1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	80 Orang			40 Orang	285.946.237,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	40 Orang	135.946.237,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	80 Orang			40 Orang	126.684.284,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	40 Orang	126.684.284,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	2 Dokumen			1 Dokumen	1.152.916.998,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kab/Kota	1 Dokumen	1.152.916.998,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Laporan			1 Laporan	410.827.200,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	BUMDes dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Laporan	410.827.219,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga			50 Keluarga	99.999.635,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	BUMDes dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	50 Keluarga	99.999.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			50 Keluarga	99.999.635,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	BUMDes dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	50 Keluarga	99.999.841,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS PERHUBUNGAN							57.900.051.446,00							55.746.763.672,80	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						57.900.051.446,00							55.746.763.672,80		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						57.900.051.446,00							55.746.763.672,80		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan	100 Persen			100 Persen	26.465.396.651,00						100 Persen	27.985.400.755,00		
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen			9 Dokumen	199.980.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	8 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen			6 Dokumen	149.990.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	6 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan			3 Laporan	49.990.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	135 Orang/ Bulan			135 Orang/ Bulan	19.197.916.157,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	135 Orang/ Bulan	21.361.839.963,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	139 Orang/ Bulan			135 Orang/ Bulan	19.197.916.157,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	139 Orang/ Bulan	21.361.839.963,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	5 Dokumen			3 Dokumen	479.993.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	2 Dokumen	380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3 Laporan			2 Laporan	449.993.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	1 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	9 Paket			5 Paket	253.995.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	4 Paket	140.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			2 Paket	253.995.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	4 Paket	140.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	32260 Paket			42234 Paket	1.492.943.341,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	32260 Paket	1.492.975.294,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	106 Paket			20 Paket	63.536.185,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	53 Paket	63.537.177,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	264 Paket			33 Paket	113.119.846,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	132 Paket	113.122.573,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	82998 Paket			11447 Paket	297.624.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	41499 Paket	297.624.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	64 Paket			7 Paket	154.265.310,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	32 Paket	154.265.544,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584 Laporan			150 Laporan	864.398.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	292 Laporan	864.426.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185 Unit			115 Unit	824.268.068,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	61 Unit	493.236.687,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Paket			6 Paket	193.350.348,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	24 Paket	63.361.687,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 Unit			34 Unit	450.917.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	36 Unit	249.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	180.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	1 Unit	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 Laporan			47 Laporan	2.660.308.585,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	47 Laporan	2.660.318.811,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			1 Laporan	16.450.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	3 Laporan	16.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22 Laporan			2 Laporan	535.600.442,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	14 Laporan	535.610.592,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	2.108.258.143,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	36 Laporan	2.108.258.219,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	230 Unit			246 Unit	1.355.992.500,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	230 Unit	1.256.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit			27 Unit	725.230.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	35 Unit	725.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	384 Unit			157 Unit	130.762.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	192 Unit	130.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit			1 Unit	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	3 Unit	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>	47,27 Persen			47,27 Persen	27.248.751.345,00						47,27 Persen	15.981.362.917,80	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	1.199.999.830,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	399.999.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			<i>Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>	1 Laporan			1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0 Laporan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang tersedia, terehabilitasi dan terpelihara</i>	3347 Unit			1961 Unit	13.278.905.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jalan	1639 Unit	10.741.362.917,80	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>	2346 Unit			1461 Unit	12.828.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jalan	1138 Unit	10.291.362.917,80	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>	500 Unit			500 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jalan	500 Unit	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	1 Unit			1 Unit	6.599.940.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Terminal	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			<i>Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	1 Unit			1 Unit	6.599.940.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Terminal	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	26 Laporan			15 Laporan	3.319.907.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jalan	11 Laporan	2.690.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	12 Laporan			7 Laporan	1.649.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jalan	5 Laporan	1.080.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>	4 Laporan			2 Laporan	1.269.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jalan	2 Laporan	1.370.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	10 Laporan			6 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jalan	4 Laporan	240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	40 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jalan	20 Laporan	140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														
			<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	40 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jalan	20 Laporan	140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	8 Laporan			5 Laporan	1.199.999.835,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	4 Laporan	2.110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	6 Laporan			3 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	3 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan			1 Laporan	99.999.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)														
			Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	1 Unit			0 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	1 Unit	365.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)														
			Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	24 Dokumen			1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	12 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	7 Lokasi			2 Lokasi	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	5 Lokasi	1.035.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang dan Barang	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang dan Barang	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	600.000.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Perrkotaan	1 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Perrkotaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	450.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Antarkota	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Antarkota	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	149.999.680,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	149.999.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Angkutan Orang	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Pelayaran	81,70 Persen			81,70 Persen	4.185.903.450,00						81,70 Persen	11.780.000.000,00	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koorrdinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	16 Laporan			8 Laporan	100.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	8 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenganan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	16 Laporan			8 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	8 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	1.300.000.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	2 Dokumen	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	1.300.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	2 Dokumen	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun dan terpelihara</i>	4 Unit			1 Unit	2.329.998.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	4 Unit	10.380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara</i>	4 Unit			1 Unit	1.770.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	4 Unit	2.270.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	16 Laporan			8 Laporan	359.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	8 Laporan	360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia</i>	1 Unit			0 Unit	200.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	1 Unit	7.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terbangun dan terpelihara</i>	3 Unit			3 Unit	455.905.450,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	3 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia</i>	18 Unit			14 Unit	455.905.450,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I						4.999.523.983,00							3.967.166.835,20	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.999.523.983,00							3.967.166.835,20	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.999.523.983,00							3.967.166.835,20	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan	100 Persen			100 Persen	2.449.526.183,00						100 Persen	2.467.166.835,20	
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			5 Paket	59.942.450,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	4 Paket	59.983.991,20	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			1 Paket	59.942.450,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	4 Paket	59.983.991,20	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	32260 Paket			42234 Paket	937.775.735,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	32260 Paket	937.966.364,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	106 Paket			13 Paket	16.734.400,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	53 Paket	16.735.200,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	264 Paket			38 Paket	78.502.785,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	132 Paket	78.509.574,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	82998 Paket			11365 Paket	362.570.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	41499 Paket	362.576.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	64 Paket			9 Paket	23.885.550,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	32 Paket	23.885.590,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584 Laporan			112 Laporan	456.083.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	292 Laporan	456.260.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185 Unit			115 Unit	154.755.588,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	61 Unit	201.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Paket			6 Paket	99.802.560,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	24 Paket	100.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 Unit			6 Unit	54.953.028,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	36 Unit	101.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 Laporan			47 Laporan	1.209.562.410,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	47 Laporan	1.179.566.480,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			1 Laporan	4.690.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	3 Laporan	4.690.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22 Laporan			3 Laporan	117.998.160,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	14 Laporan	118.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	1.086.874.250,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	36 Laporan	1.056.876.480,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	230 Unit			246 Unit	87.490.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	230 Unit	88.150.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit			4 Unit	76.450.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	35 Unit	77.110.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	384 Unit			16 Unit	11.040.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	192 Unit	11.040.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Pelayaran	81,70 Persen			81,70 Persen	2.549.997.800,00						81,70 Persen	1.500.000.000,00	
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terbangun dan terpelihara	3 Unit			3 Unit	2.549.997.800,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	3 Unit	1.500.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	3 Unit			1 Unit	2.549.997.800,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	3 Unit	1.500.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
		UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II						4.964.062.069,00							5.270.409.830,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.964.062.069,00							5.270.409.830,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.964.062.069,00							5.270.409.830,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan	100 Persen			100 Persen	2.955.822.069,00						100 Persen	2.909.169.830,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			5 Paket	74.979.930,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	4 Paket	74.979.989,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			2 Paket	74.979.930,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	4 Paket	74.979.989,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	32260 Paket			42234 Paket	1.052.707.513,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	32260 Paket	1.022.714.213,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	106 Paket			20 Paket	33.882.604,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	53 Paket	33.884.856,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	264 Paket			62 Paket	73.462.375,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	132 Paket	73.466.539,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	82998 Paket			19205 Paket	559.600.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	41499 Paket	529.600.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	64 Paket			15 Paket	73.822.534,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	32 Paket	73.822.818,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584 Laporan			30 Laporan	311.940.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	292 Laporan	311.940.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185 Unit			115 Unit	603.698.210,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	61 Unit	87.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Paket			50 Paket	433.769.350,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	24 Paket	35.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 Unit			11 Unit	169.928.860,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	36 Unit	52.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 Laporan			47 Laporan	1.052.179.416,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	47 Laporan	1.552.206.128,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	3 Laporan	3.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22 Laporan			3 Laporan	157.599.416,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	14 Laporan	657.600.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	891.080.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	36 Laporan	891.106.128,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	230 Unit			246 Unit	172.257.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	230 Unit	172.269.500,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit			4 Unit	77.110.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	35 Unit	77.110.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	384 Unit			37 Unit	95.147.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau	192 Unit	95.159.500,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Pelayaran</i>	81,70 Persen			81,70 Persen	2.008.240.000,00						81,70 Persen	2.361.240.000,00	
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terbangun dan terpelihara</i>	3 Unit			3 Unit	2.008.240.000,00			-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	3 Unit	2.361.240.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan</i>	3 Unit			2 Unit	2.008.240.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pengguna Jasa Pelabuhan	3 Unit	2.361.240.000,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						58.151.322.272,00							49.763.818.142,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						58.151.322.272,00							49.763.818.142,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						53.436.323.497,00							43.963.818.142,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang komunikasi, informatika dan statistik</i>	100 Persen			100 Persen	28.844.295.929,00						100 Persen	29.758.818.142,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	11 dokumen			11 dokumen	199.980.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	11 dokumen	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen			4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	14 Laporan			7 Laporan	149.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	7 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	1 dokumen			1 dokumen	18.839.613.561,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen	18.839.613.561,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100 Orang/ Bulan			100 Orang/ Bulan	18.839.613.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	100 Orang/ Bulan	18.839.613.561,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	1 laporan			1 laporan	150.000.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>	200 paket			100 paket	70.000.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	100 paket	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket			100 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	100 Paket	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	31 paket			27 paket	1.635.572.502,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tersusunnya Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	31 paket	1.480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	49.999.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tersusunnya Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	2 Paket	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket			20 Paket	785.747.229,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tersusunnya Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	25 Paket	580.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tersusunnya Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	2 Paket	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	99.999.953,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tersusunnya Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	2 Paket	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	449.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tersusunnya Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan			1 laporan	299.559.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 laporan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	299.559.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Paket	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 jenis			4 jenis	6.395.292.266,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	4 jenis	7.369.204.581,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	4.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	6.375.292.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	7.349.204.581,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	162 unit			165 unit	1.254.278.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	162 unit	1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit			18 Unit	354.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	18 Unit	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit			142 Unit	149.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	142 Unit	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	499.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	2 Unit	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	2 Unit	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah	81.5 Nilai			81.5 Nilai	17.982.049.173,00						81.5 Nilai	8.630.000.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	4 dokumen			1 dokumen	17.982.049.173,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	1 dokumen	8.630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	8 Laporan			4 Laporan	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	4 Laporan	3.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik	8 Konten			4 Konten	749.999.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	4 Konten	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang			50 Orang	250.139.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	50 Orang	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	39.39 Persentase			15.15 Persentase	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	24.24 Persentase	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase			100 Persentase	6.273.051.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	100 Persentase	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	490.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	1 Dokumen	700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	40 Laporan			1 Laporan	2.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	40 Laporan	1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas			1 Komunitas	3.975.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	1 Komunitas	2.275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan			30 Permohonan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	30 Permohonan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2 Rekomend asi			1 Rekomend asi	74.999.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	1 Rekomend asi	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media			2 Media	1.268.859.091,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah & Masyarakat	1 Media	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Layanan SPBE Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	89.5 persen			3,05 Indeks 87.5 persen	6.609.978.395,00						89.5 persen	5.575.000.000,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Hasil Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau	3 unit			1 unit	70.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 unit	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau	8 dokumen			4 dokumen	6.539.978.395,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	4 dokumen	5.475.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	74.999.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 Aplikasi			9 Aplikasi	199.999.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	9 Aplikasi	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen			1 Dokumen	74.999.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	6 Aplikasi			6 Aplikasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	6 Aplikasi	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	13 unit			13 unit	74.999.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	13 unit	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	1 kabupaten/kota			1 kabupaten/kota	599.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 kabupaten/kota	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi			1 Aplikasi	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Aplikasi	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan			2 Layanan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	2 Layanan	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	74.999.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen			1 Dokumen	74.999.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis														
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2 Dokumen			1 Dokumen	74.999.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	32 Perangkat Daerah			37 Perangkat Daerah	2.499.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi			4 Aplikasi	74.999.695,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	4 Aplikasi	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen			1 Dokumen	74.995.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	32 perangkat daerah			37 perangkat daerah	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	32 perangkat daerah	2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						864.998.775,00							550.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Indeks Pembangunan Statistik</i>	2.16 indeks			2.16 indeks	864.998.775,00						2.16 indeks	550.000.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen data statistik sektoral dilingkup daerah provinsi</i>	2 dokumen			1 dokumen	864.998.775,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>	200 Orang			100 Orang	264.999.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	100 Orang	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>	90 Persentase			90 Persentase	99.999.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	90 Persentase	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>	100 Persentase			100 Persentase	149.999.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	100 Persentase	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik</i>	6 Dokumen			3 Dokumen	99.999.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen			1 Dokumen	249.999.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						3.850.000.000,00							5.250.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	80 persen			80 persen	3.850.000.000,00						80 persen	5.250.000.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	4 dokumen			2 dokumen	3.700.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	2 dokumen	5.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan			1 Laporan	2.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 Perangkat Daerah			37 Perangkat Daerah	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Organisasi Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	32 Perangkat Daerah			-	150.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	32 Perangkat Daerah	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	32 Perangkat Daerah			37 Perangkat Daerah	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	32 Perangkat Daerah	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						26.351.620.361,00							29.230.089.373,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.351.620.361,00							29.230.089.373,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						26.351.620.361,00							29.230.089.373,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal	100 Persen			100 Persen	20.385.197.781,00						100 Persen	25.020.607.373,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen 6 Dokumen			3 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP Provinsi Riau	3 Dokumen 3 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP Provinsi Riau	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP Provinsi Riau	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	24 Laporan 12 Laporan			12 Laporan	15.859.876.536,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP Provinsi Riau	12 Laporan 12 Laporan	20.277.013.865,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan			110 Orang/ Bulan	15.859.876.536,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP Provinsi Riau	110 Orang/ Bulan	20.277.013.865,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	6 Dokumen 6 Dokumen			3 Dokumen	99.988.709,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Aset DPMPTSP Provinsi Riau	3 Dokumen 3 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	49.994.126,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Aset DPMPTSP Provinsi Riau	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	49.994.583,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Aset DPMPTSP Provinsi Riau	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen 100 Persen			100 Persen	101.500.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	100 Persen 100 Persen	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	101.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	2 Paket	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen 100 Persen			100 Persen	2.049.998.936,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	100 Persen 100 Persen	1.795.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			10 Paket	750.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	10 Paket	630.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	1 Paket	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	199.998.936,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPSTP PROVINSI RIAU	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPSTP PROVINSI RIAU	1 Laporan	750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.602.763.600,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPSTP PROVINSI RIAU	100 Persen 100 Persen	1.957.523.508,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	62.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	1 Laporan	62.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	1.525.483.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	ASN DPMPTSP PROVINSI RIAU	1 Laporan	1.880.243.508,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jenis Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	571.070.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen	571.070.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit			11 Unit	414.630.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP Provinsi Riau	11 Unit	414.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			5 Unit	55.390.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP Provinsi Riau	5 Unit	55.390.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	101.050.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP Provinsi Riau	6 Unit	101.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	6 Dokumen			6 Dokumen	2.012.940.580,00						6 Dokumen	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	5 Dokumen			3 Dokumen	850.713.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			1 Dokumen	570.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	- Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen			1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	<i>Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi</i>	5 Dokumen			3 Dokumen	1.162.227.580,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	12 Kabupaten/Kota	2 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	650.000.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	12 Kabupaten/Kota	- Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>	12 Daerah			12 Daerah	162.227.495,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	12 Kabupaten/Kota	12 Daerah	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-FASILITAS I PENANAMAN MODAL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	10-30 Persen			10-30 Persen	950.000.000,00						10-30 Persen	700.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	15 Dokumen			9 Dokumen	950.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	7 Dokumen	700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	14 Dokumen			7 Dokumen	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	7 Dokumen	700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0.03 Indeks			0.03 Indeks	1.529.000.000,00						0.03 Indeks	1.485.000.000,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan konsultasi Perizinan Berbasis Resiko	100 Persen			100 Persen	1.529.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Tata Kelola	Masyarakat dan Pelaku Usaha	100 Persen	1.485.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	300 Pelaku Usaha			150 Pelaku Usaha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Tata Kelola	Masyarakat dan Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	100 Pelaku Usaha			50 Pelaku Usaha	79.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Tata Kelola	Masyarakat dan Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</i>	750 Kegiatan Usaha			350 Kegiatan Usaha	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Tata Kelola	Masyarakat dan Pelaku Usaha	400 Kegiatan Usaha	1.100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Berdasarkan Izin Prinsip Yang Diterbitkan</i>	60 Triliun Rupiah			60 Triliun Rupiah	1.324.482.000,00						60 Triliun Rupiah	1.224.482.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal</i>	100 Persen			100 Persen	1.324.482.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	100 Persen	1.224.482.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	115 Kegiatan usaha			55 Kegiatan usaha	609.561.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-FASILITAS I PENANAMAN MODAL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	60 Kegiatan usaha	609.561.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	20 Kegiatan usaha			10 Kegiatan usaha	88.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	10 Kegiatan usaha	88.911.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	930 Pelaku Usaha			450 Pelaku Usaha	626.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-FASILITAS I PENANAMAN MODAL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha	480 Pelaku Usaha	526.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	100 Persen			100 Persen	150.000.000,00						100 Persen	150.000.000,00		
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	100 Persen			100 Persen	150.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Tata Kelola	Stakeholder	100 Persen	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Tata Kelola	Stakeholder	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							150.565.894.094,00							108.107.997.843,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						150.565.894.094,00							108.107.997.843,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						150.565.894.094,00							108.107.997.843,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	100 Persen			100 Persen	29.184.773.995,00						100 Persen	26.782.978.086,00		
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan/Dokumen			2 Laporan/Dokumen	153.999.922,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perencanaan Perangkat daerah	3 Laporan/Dokumen	186.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			3 Dokumen	153.999.922,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Perencanaan Perangkat daerah	3 Dokumen	186.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Perangkat daerah Yang Dipenuhi	24 Laporan			12 Laporan	17.198.647.704,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Keuangan Perangkat daerah	12 Laporan	15.233.608.086,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan			88 Orang/ Bulan	17.198.647.704,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Keuangan Perangkat daerah	92 Orang/ Bulan	15.233.608.086,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan			1 Laporan	63.000.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	1 Laporan	64.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	63.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	1 Paket	64.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi (Jenis Layanan)	10 Jenis Layanan			5 Jenis Layanan	2.971.684.120,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	5 Jenis Layanan	2.094.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	65.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	114.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket			2 Paket	1.095.744.334,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	2 Paket	550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	440.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	420.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	129.999.786,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	90 Laporan			45 Laporan	1.240.940.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	45 Laporan	900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan</i>	10 Jenis Barang			5 Jenis Barang	804.930.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah	5 Jenis Barang	546.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit			10 Unit	804.930.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah	10 Unit	546.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	22 Jenis			11 Jenis	6.495.926.249,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kinerja Perangkat daerah	11 Jenis	6.940.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	44 Laporan			22 Laporan	2.743.498.497,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kinerja Perangkat daerah	22 Laporan	2.790.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	3.752.427.752,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Kinerja Perangkat daerah	12 Laporan	4.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	10 Jenis			5 Jenis	1.496.586.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah	5 Jenis	1.718.770.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			1 Unit	41.550.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah	1 Unit	41.730.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit			9 Unit	324.540.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah	9 Unit	324.540.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit			70 Unit	180.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah	70 Unit	192.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	949.996.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah		1.160.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Yang Dibina	360 Orang			360 Orang	3.649.365.194,00						360 Orang	2.850.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan	825 Orang			360 Orang	3.449.365.314,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemuda	465 Orang	2.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	350 Orang			150 Orang	499.999.938,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemuda	200 Orang	650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 Unit			1 Unit	849.367.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemuda	1 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang			10 Orang	249.999.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemuda	10 Orang	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	149.999.906,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemuda	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase			100 Persentase	799.999.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemuda	100 Persentase	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	25 Orang			10 Orang	149.999.273,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemuda	15 Orang	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 Orang			120 Orang	749.999.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Pemuda	150 Orang	450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Diberdayakan dan Dikembangkan	2 Organisasi			1 Organisasi	199.999.880,00			Memperku a t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	20 Organisasi			10 Organisasi	199.999.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Kepemudaan	10 Organisasi	700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Potensial Yang Dibina	364 Orang			364 Orang	115.181.761.359,00						364 Orang	74.975.019.757,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Cabang yang Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	58 Cabang Olahraga			29 Cabang Olahraga	25.696.545.835,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pembinaan Olahraga	29 Cabang Olahraga	7.925.019.757,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen			1 Dokumen	399.999.739,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pembinaan Olahraga	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	28 Unit			14 Unit	25.296.546.096,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pembinaan Olahraga	14 Unit	7.725.019.757,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	19 Kejuaraan			8 Kejuaraan	7.347.867.414,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Penyelenggaraan Kejuaraan	11 Kejuaraan	18.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	340 Orang			205 Orang	5.217.867.606,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Penyelenggaraan Kejuaraan	135 Orang	3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan			5 Kegiatan	2.129.999.808,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Penyelenggaraan Kejuaraan	2 Kegiatan	15.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet yang dibina per tahun	704 Orang			352 Orang	46.957.419.426,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Olahraga Prestasi	352 Orang	5.250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	160 Orang			80 Orang	199.999.651,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Olahraga Prestasi	80 Orang	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang			695 Orang	40.399.999.512,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Olahraga Prestasi	30 Orang	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda			1 Pelatda	5.107.420.611,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Olahraga Prestasi	1 Pelatda	3.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	199.999.740,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Olahraga Prestasi	1 Dokumen	750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	10 Orang			30 Orang	1.049.999.912,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Olahraga Prestasi	5 Orang	700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Induk Organisasi Olahraga Tingkat Provinsi yang dibina	6 Organisasi			3 Organisasi	35.179.928.684,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Olahraga	3 Organisasi	43.800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	6 Dokumen			3 Dokumen	34.999.999.903,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Olahraga	3 Dokumen	43.600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	179.928.781,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Olahraga	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda Yang Dibina Menjadi Kader Pramuka	100 Orang			100 Orang	2.549.993.546,00						100 Orang	3.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi yang dibina	2 Organisasi			1 Organisasi	2.549.993.546,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi	1 Organisasi	3.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Organisasi			1 Organisasi	2.099.998.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi	1 Organisasi	3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						35.468.646.177,00							36.653.019.385,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan	100 Persen			100 Persen	22.844.123.535,00						100 Persen	22.924.308.991,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen			5 Dokumen	254.669.050,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	5 Dokumen	254.669.110,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			5 Dokumen	254.669.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	5 Dokumen	254.669.110,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	24 Laporan			12 Laporan	13.980.843.189,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN Dinas Kebudayaan	12 Laporan	15.875.281.228,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/ Bulan			80 Orang/ Bulan	13.980.843.189,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN Dinas Kebudayaan	80 Orang/ Bulan	15.875.281.228,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			1 Jenis	48.000.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebuadyaan	1 Jenis	48.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket			80 Paket	48.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebuadyaan	80 Paket	48.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi</i>	10 Jenis Layanan			5 Jenis Layanan	952.200.504,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	5 Jenis Layanan	752.667.512,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	16 Paket			8 Paket	54.665.110,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	8 Paket	54.669.110,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	32 Paket			16 Paket	378.099.144,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	16 Paket	178.492.124,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	8000 Paket			3211 Paket	85.950.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	4000 Paket	86.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	16 Paket			8 Paket	102.256.250,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	8 Paket	102.256.278,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	70 Laporan			35 Laporan	331.230.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	35 Laporan	331.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis Barang			3 Jenis Barang	210.292.616,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	3 Jenis Barang	713.230.211,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit			8 Unit	102.292.616,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	50 Unit	505.230.211,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	108.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	1 Unit	208.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	4 Jenis			2 Jenis	4.583.038.176,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Honorer dan THL Dinas Kebudayaan	2 Jenis	4.683.052.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	523.879.556,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Honorer dan THL Dinas Kebudayaan	12 Laporan	423.880.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	4.059.158.620,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Tenaga Honorer dan THL Dinas Kebudayaan	12 Laporan	4.259.172.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			3 Jenis	2.815.080.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	3 Jenis	597.408.550,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit			8 Unit	127.050.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	9 Unit	106.861.760,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			1 Unit	37.560.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	1 Unit	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit			130 Unit	94.110.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	100 Unit	94.150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	2.556.360.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2 Unit	346.396.790,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan	96 Data OPK			96 Data OPK	9.142.778.091,00						96 Data OPK	9.246.964.958,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27 Persen			2,24 Persen	2.603.989.042,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	2,27 Persen	2.777.911.727,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	11 Objek			10 Objek	1.526.056.054,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	11 Objek	1.497.386.722,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1400 Orang			500 Orang	1.077.932.988,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	700 Orang	1.280.525.005,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,27 Persen			2,24 Persen	1.538.789.049,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	2,27 Persen	1.469.053.231,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 Objek			10 Objek	1.165.414.208,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	11 Objek	1.165.414.499,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	24 Sertifikat			12 Sertifikat	373.374.841,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	12 Sertifikat	303.638.732,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	2 Lembaga			1 Lembaga	5.000.000.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Adat Provinsi, Lembaga Adat Kab/ Kota, Masyarakat Adat dan Pelaku Seni	1 Lembaga	5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek			1 Objek	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Adat Provinsi, Lembaga Adat Kab/ Kota, Masyarakat Adat dan Pelaku Seni	1 Objek	5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	2,21 Persen			2,21 Persen	285.729.919,00						2,21 Persen	1.285.729.919,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian	100 Persen			100 Persen	285.729.919,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni, Lembaga Kesenian	100 Persen	1.285.729.919,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	20 Sertifikat			10 Sertifikat	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni, Lembaga Kesenian	10 Sertifikat	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga			12 Lembaga	135.729.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni, Lembaga Kesenian	12 Lembaga	1.135.729.919,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Yang Dibina	50 Objek			50 Objek	459.056.387,00						50 Objek	459.056.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	24 Kab/ Kota			12 Kab/ Kota	459.056.387,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	12 Kab/ Kota	459.056.773,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang			10 Orang	99.999.972,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	20 Orang	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen			1 Dokumen	126.768.415,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Dokumen	156.768.773,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen			1 Dokumen	232.288.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Dokumen	152.288.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi	146 Objek			146 Objek	2.736.958.245,00						146 Objek	2.736.958.744,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	10 Persen			5 Persen	436.958.540,00			Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	5 Persen	436.958.744,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40 Objek			20 Objek	149.999.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	20 Objek	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30 Objek			15 Objek	286.958.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	15 Objek	286.958.744,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	4 Objek			2 Objek	2.299.999.705,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	2 Objek	2.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2 Objek			1 Objek	1.100.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Objek	1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek			1 Objek	800.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Objek	800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>	2 Objek			1 Objek	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Objek	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	20 Orang			10 Orang	199.999.705,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	10 Orang	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA						5.649.927.510,00							5.800.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.649.927.510,00							5.800.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.649.927.510,00							5.800.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan</i>	96 Data OPK			96 Data OPK	2.500.000.000,00						96 Data OPK	2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27 Persen			2,24 Persen	2.500.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	2,27 Persen	2.500.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	11 Objek			4 Objek	1.500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	11 Objek	1.500.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1400 Orang			200 Orang	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	700 Orang	500.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit			1 Unit	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	500.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum	85 Poin			85 Poin	3.149.927.510,00						85 Poin	3.300.000.000,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum	A Nilai			B Nilai	3.149.927.510,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	A Nilai	3.300.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	10 Unit			5 Unit	750.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	5 Unit	750.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang			5 Orang	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	5 Orang	150.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Unit			1 Unit	1.549.999.700,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	1.600.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	250.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi</i>	2 Unit			1 Unit	499.927.810,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	550.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						30.466.230.861,00							32.686.398.344,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.466.230.861,00							32.686.398.344,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						29.915.941.931,00							31.766.656.686,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100 Persen			100 Persen	28.605.015.333,00						100 Persen	30.765.638.209,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen			3 Dokumen	52.207.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen			3 Dokumen	52.207.700,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	18.173.416.354,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Laporan	21.315.844.626,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	232 Orang/ Bulan			116 Orang/ Bulan	18.173.416.354,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	116 Orang/ Bulan	21.315.844.626,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	8 Layanan			4 Layanan	1.370.712.603,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	4 Layanan	1.322.118.455,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	68.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	68.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	408.614.088,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	199.392.455,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	230.834.955,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	199.999.560,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	463.264.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Laporan	599.726.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	36 Jenis Barang			18 Jenis Barang	349.755.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	18 Jenis Barang	625.137.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	99.755.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit			10 Unit	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	10 Unit	525.137.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	6 Jenis			3 Jenis	4.872.963.676,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3 Jenis	4.391.448.128,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan			5 Laporan	2.241.448.116,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	5 Laporan	1.741.448.128,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	2.631.515.560,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	12 Laporan	2.650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8 Jenis			4 Jenis	3.785.960.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	4 Jenis	3.036.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			1 Unit	47.790.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Unit	47.790.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit			7 Unit	188.300.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	12 Unit	188.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit			47 Unit	299.870.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	38 Unit	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	3.250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Unit	2.650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi	30 Pustaka			30 Pustaka	1.220.955.472,00						30 Pustaka	941.018.477,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan	63 Perpusta kaan			30 Perpustak aan	1.130.956.749,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	33 Perpusta kaan	841.018.477,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	48 Perpustak aan			24 Perpustak aan	139.999.992,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	24 Perpustak aan	140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang			50 Orang	30.507.953,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	50 Orang	44.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	20 Layanan			10 Layanan	404.217.713,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	10 Layanan	135.738.477,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	7500 Eksemplar			4000 Eksemplar	456.239.960,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3500 Eksemplar	421.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan			1 Perpustakaan	99.991.131,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Perpustakaan	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen			100 Persen	89.998.723,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	100 Persen	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	4 Orang			2 Orang	49.999.721,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Orang	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	4 Orang			2 Orang	39.999.002,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Orang	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi	100 Persen			100 Persen	89.971.126,00						100 Persen	60.000.000,00	
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Yang Di Terbitkan	4 Paket			2 Paket	39.985.430,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Paket	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1300 Entry			650 Entry	19.992.715,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	650 Entry	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	500 Naskah			250 Naskah	19.992.715,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	250 Naskah	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Yang Dilestarikan	4 Naskah			2 Naskah	49.985.696,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Naskah	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	85 Eksemplar			60 Eksemplar	49.985.696,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	25 Eksemplar	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						550.288.930,00							919.741.658,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik	100 Persen			100 Persen	550.288.930,00						100 Persen	919.741.658,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis Provinsi Yang Dikelola	100 Persen			100 Persen	39.699.927,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	100 Persen	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	5500 Arsip			2500 Arsip	39.699.927,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	3000 Arsip	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis Daerah Provinsi Yang Dikelola	100 Persen			100 Persen	269.050.830,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	100 Persen	285.097.568,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	1200 Arsip			600 Arsip	269.050.830,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	600 Arsip	285.097.568,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip SIKN Tingkat Provinsi	15,99 Persen			8,30 Persen	241.538.173,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	15,99 Persen	564.644.090,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	6250 Pengguna			3250 Pengguna	21.006.532,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	3500 Pengguna	112.333.677,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	220.531.641,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Kearsipan Daerah dan OPD	1 Laporan	452.310.413,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						39.521.084.563,00							40.580.634.202,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						39.521.084.563,00							40.580.634.202,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						39.521.084.563,00							40.580.634.202,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen			100 persen	28.737.237.011,00						100 persen	30.352.614.262,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan			5 Laporan	21.717.440.567,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Laporan	24.717.817.818,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/ Bulan			143 Orang/ Bulan	21.717.440.567,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	143 Orang/ Bulan	24.717.817.818,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	1 Laporan			6 Jenis	350.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	1 Laporan	378.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Dokumen	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan			14 Laporan	70.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	14 Laporan	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			14 Laporan	80.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	14 Laporan	88.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis			6 Jenis	1.816.766.873,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	6 Jenis	1.396.766.873,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	90.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Paket	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	235.002.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	235.002.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37 Paket			15 Paket	103.300.873,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	37 Paket	103.300.873,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	260 Laporan			155 Laporan	1.138.464.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	260 Laporan	738.464.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	11 Dokumen			11 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	11 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</i>	2 Jenis			2 Jenis	160.494.125,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	160.494.125,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	66 Unit			14 Unit	135.494.125,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	22 Unit	135.494.125,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit			3 Unit	25.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	3 Unit	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Jenis			2 Jenis	3.547.549.151,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	3.147.549.151,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			4 Laporan	2.169.992.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	4 Laporan	1.769.992.995,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	99 Laporan			44 Laporan	1.377.556.156,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	99 Laporan	1.377.556.156,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</i>	27 Jenis			27 Jenis	994.986.295,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	27 Jenis	401.986.295,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	44 Unit			27 Unit	267.166.295,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	44 Unit	167.166.295,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	308 Unit			278 Unit	153.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	308 Unit	135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit			1 Unit	574.820.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	86 Unit	99.820.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil Yang Di Kelola	280.624 Ha			280.624 Ha	450.132.217,00						280.624 Ha	914.338.068,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola	224147,71 Ha			18.539,1 Ha	450.132.217,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	205601,64 Ha	914.338.068,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	201491,72 Ha			144633,73 Ha	250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	201491,72 Ha	650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	19 Ha			3 Ha	200.132.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	6 Ha	264.338.068,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	140000 Ton			140000 Ton	5.824.143.813,00						140000 Ton	5.842.652.454,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	3 Wilayah			3 Wilayah	3.451.561.170,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	3 Wilayah	3.925.995.811,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	4 Unit			1 Unit	373.296.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	2 Unit	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	5691 Unit			1760 Unit	2.898.264.342,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	1522 Unit	3.425.995.811,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan</i>	4 Wilayah			4 Wilayah	2.159.550.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	4 Wilayah	1.680.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	218.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	1 Dokumen	180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0	172 Unit			1545 0	1.940.630.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	45 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	180 Izin			170 izin	213.032.643,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	180 Izin	236.656.643,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			100 Persentase	137.307.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	100 Persentase	85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen			1 Dokumen	75.724.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	1 Dokumen	151.656.643,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	132712,51 Ton			132712,51 Ton	3.589.505.105,00						132712,51 Ton	2.506.663.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Izin			5 Izin	20.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	5 Izin	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	<i>Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan</i>	6 Izin			3 Izin	10.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	3 Izin	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan</i>	2 Rekomendasi			1 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	1 Rekomendasi	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah</i>	3 Kawasan			100 Rekomendasi	70.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	3 Kawasan	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200 Rekomendasi			250 Rekomendasi	70.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	100 Rekomendasi	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan	3 Kawasan			5 Kawasan	285.663.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	3 Kawasan	296.663.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	59.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya	200 Orang			90 Orang	125.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	90 Orang	125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia</i>	20 Unit			10 Unit	101.663.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	10 Unit	101.663.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	<i>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</i>	5 Kawasan			5 Kawasan	3.203.842.105,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	5 Kawasan	2.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	28 Unit			88 Unit	2.600.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	12 Unit	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	9 Unit			5 Unit	603.842.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	3 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 Kasus			7 Kasus	119.999.999,00						7 Kasus	240.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	270 Pelaku Usaha			245 Pelaku Usaha	20.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	270 Pelaku Usaha	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah														
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	4 Forum			2 Forum	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	2 Forum	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	umlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diterawasi	80 Dokumen			40 Pelaku Usaha	99.999.999,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	40 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Dokumen			10 Pelaku Usaha	39.999.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	10 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	62 Dokumen			20 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	20 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan	29845,28 Ton			29845,28 Ton	800.066.418,00						29845,28 Ton	724.366.418,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan	12 Izin			6 Izin	50.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan	6 Izin	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri														
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	12 Rekomendasi			6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan	6 Rekomendasi	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	8 Unit			4 Unit	750.066.418,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan	4 Unit	674.366.418,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	21 Kegiatan			2 Kegiatan	691.866.418,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan	10 Kegiatan	616.866.418,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Kegiatan			1 Kegiatan	58.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan	4 Kegiatan	57.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I						775.098.566,00							636.438.654,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						775.098.566,00							636.438.654,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						775.098.566,00							636.438.654,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen			100 Persen	378.342.766,00						100 Persen	231.438.654,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis			6 Jenis	145.555.906,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	6 Jenis	91.321.094,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			9 Paket	43.823.906,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	23.084.900,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			16 Paket	10.032.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	10.040.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	37 Paket			11 Paket	2.770.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	37 Paket	1.736.194,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan			31 Laporan	88.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	260 Laporan	56.460.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis			2 Jenis	207.514.560,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	106.170.240,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99 Laporan			7 Laporan	207.514.560,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	99 Laporan	106.170.240,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	27 Jenis			3 Jenis	25.272.300,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	27 Jenis	33.947.320,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit			2 Unit	15.332.300,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	44 Unit	23.947.320,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit			13 Unit	9.940.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	86 Unit	10.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
2.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 kasus			7 kasus	396.755.800,00						7 kasus	405.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	270 Pelaku Usaha			80 Pelaku Usaha	396.755.800,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	270 Pelaku Usaha	405.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha			5 Pelaku Usaha	16.760.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	15 Pelaku Usaha	30.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	120 Pelaku Usaha			30 Pelaku Usaha	352.595.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	60 Pelaku Usaha	345.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	30 Pelaku Usaha			8 Pelaku Usaha	27.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	15 Pelaku Usaha	30.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH
		UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II						1.061.304.620,00							677.778.528,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.061.304.620,00							677.778.528,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.061.304.620,00							677.778.528,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100 Persen			100 Persen	474.179.467,00						100 Persen	302.778.528,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</i>	6 Jenis			6 Jenis	223.948.427,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	6 Jenis	116.165.896,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket			6 Paket	113.561.087,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	70.618.140,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket			5 Paket	17.664.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	7.728.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	37 Paket			2 Paket	6.023.340,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	37 Paket	2.599.756,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	260 Laporan			12 Laporan	86.700.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	260 Laporan	35.220.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Jenis			2 Jenis	208.721.040,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	118.717.632,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	99 Laporan			5 Laporan	208.721.040,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	99 Laporan	118.717.632,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	27 Jenis			3 Jenis	41.510.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	27 Jenis	67.895.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	44 Unit			2 Unit	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	44 Unit	17.895.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	308 Unit			3 Unit	19.510.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	308 Unit	50.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
2.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani</i>	7 Kasus			7 Kasus	587.125.153,00						7 Kasus	375.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	<i>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</i>	270 Pelaku Usaha			80 Pelaku Usaha	587.125.153,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	270 Pelaku Usaha	375.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	30 Pelaku Usaha			10 Pelaku Usaha	47.790.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	15 Pelaku Usaha	30.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	120 Pelaku Usaha			180 Pelaku Usaha	539.335.153,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	60 Pelaku Usaha	345.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II
		UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III						1.043.840.652,00						819.246.089,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.043.840.652,00							819.246.089,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.043.840.652,00							819.246.089,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrtasi Perkantoran	100 Persen			100 Persen	447.968.652,00						100 Persen	390.245.609,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis			6 Jenis	71.701.896,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	6 Jenis	58.751.896,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			6 Paket	20.357.774,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	20.357.774,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	7.728.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	7.728.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	37 Paket			5 Paket	2.031.122,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	37 Paket	2.031.122,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan			10 Laporan	41.585.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	260 Laporan	28.635.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis			2 Jenis	58.440.700,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	58.374.433,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	66 Unit			8 Unit	58.440.700,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	22 Unit	58.374.433,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis			3 Jenis	231.515.456,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	176.869.968,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	99 Laporan			8 Laporan	231.515.456,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	99 Laporan	176.869.968,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	27 Jenis			3 Jenis	86.310.600,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	27 Jenis	96.249.312,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	44 Unit			1 Unit	21.310.600,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	44 Unit	11.249.312,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	308 Unit			3 Unit	60.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	308 Unit	80.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	86 Unit			9 Unit	5.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	86 Unit	5.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
2.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani</i>	7 Kasus			7 Kasus	595.872.000,00						7 Kasus	429.000.480,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	<i>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</i>	270 Pelaku Usaha			85 Pelaku Usaha	595.872.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	270 Pelaku Usaha	429.000.480,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	30 Pelaku Usaha			8 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	15 Pelaku Usaha	30.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	120 Pelaku Usaha			75 Pelaku Usaha	535.872.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	60 Pelaku Usaha	369.000.480,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	30 Pelaku Usaha			5 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	15 Pelaku Usaha	30.000.000,00	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III
		UPT. BUDIDAYA PERIKANAN						3.973.043.001,00							2.881.299.099,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.973.043.001,00							2.881.299.099,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.973.043.001,00							2.881.299.099,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100 Persen			100 Persen	1.304.681.989,00						100 Persen	1.032.822.852,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</i>	6 Jenis			4 Jenis	145.098.189,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	6 Jenis	145.098.189,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket			6 Paket	42.710.794,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	42.710.794,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket			6 Paket	12.387.395,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	12.387.395,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	37 Paket			6 Paket	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	37 Paket	12.000.000,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	260 Laporan			28 Laporan	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	260 Laporan	78.000.000,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	2 Jenis			3 Jenis	982.308.480,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	702.490.663,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	99 Laporan			18 Laporan	982.308.480,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	99 Laporan	702.490.663,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	27 Jenis			3 Jenis	177.275.320,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	27 Jenis	185.234.000,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	44 Unit			3 Unit	102.275.320,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	44 Unit	105.234.000,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	308 Unit			15 Unit	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	308 Unit	80.000.000,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</i>	132712,51 Ton			132712,51 Ton	2.668.361.012,00						132712,51 Ton	1.848.476.247,00	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	<i>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</i>	5 Kawasan			5 Kawasan	2.668.361.012,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	5 Kawasan	1.848.476.247,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	28 Unit			8 Unit	2.668.361.012,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan	12 Unit	1.848.476.247,00	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN
		UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						592.546.998,00							682.946.442,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						592.546.998,00							682.946.442,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						592.546.998,00							682.946.442,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100 Persen			100 Persen	388.448.416,00						100 Persen	394.436.312,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</i>	6 Jenis			6 Jenis	39.862.064,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	6 Jenis	28.672.064,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket			5 Paket	9.972.206,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	5 Paket	9.972.206,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	37 Paket			4 Paket	2.139.858,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	37 Paket	2.139.858,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan			4 Laporan	27.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	260 Laporan	16.560.000,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis			2 Jenis	289.412.514,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	2 Jenis	289.740.410,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99 Laporan			10 Laporan	289.412.514,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	99 Laporan	289.740.410,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	27 Jenis			3 Jenis	59.173.838,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	27 Jenis	76.023.838,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit			3 Unit	21.023.838,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	44 Unit	21.023.838,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	308 Unit			3 Unit	13.150.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	308 Unit	50.000.000,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit			9 Unit	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	86 Unit	5.000.000,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan	29845,28 Ton			29845,28 Ton	204.098.582,00						29845,28 Ton	288.510.130,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan	8 Unit			4 Unit	204.098.582,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan	4 Unit	288.510.130,00	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99 Laporan			1 Laporan	432.852.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	99 Laporan	384.867.120,00	UPT. PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	27 Jenis			3 Jenis	369.378.649,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	27 Jenis	305.381.142,00	UPT. PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit			3 Unit	73.440.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	44 Unit	49.381.142,00	UPT. PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	308 Unit			5 Unit	147.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	308 Unit	250.000.000,00	UPT. PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit			1 Unit	148.088.649,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	86 Unit	6.000.000,00	UPT. PELABUHAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	140000 Ton			140000 Ton	200.000.000,00						140000 Ton	15.715.227.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	1 Unit	15.715.227.000,00	UPT. PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	1 Unit	15.715.227.000,00	UPT. PELABUHAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						46.610.773.577,00							41.659.778.508,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						46.610.773.577,00							41.659.778.508,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						46.610.773.577,00							41.659.778.508,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pariwisata	100 Persen			100 Persen	25.495.453.182,00						100 Persen	26.192.428.508,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	10 Dokumen			4 Dokumen	34.999.145,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen			2 Dokumen	19.999.690,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5 Laporan			2 Laporan	14.999.455,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	18.549.655.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	19.214.031.547,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	231 Orang/ Bulan			207 Orang/ Bulan	18.549.655.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	116 Orang/ Bulan	19.214.031.547,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	4 Laporan			2 Laporan	34.999.370,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan			2 Laporan	34.999.370,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>	2 Layanan			1 Layanan	70.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	1 Layanan	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	70.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Jenis Layanan			10 Jenis Layanan	1.482.396.374,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	10 Jenis Layanan	1.458.576.961,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	45.397.757,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	49.026.157,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	216.276.985,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	210.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			3 Paket	349.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	349.600.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	109.981.832,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	99.981.832,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	761.139.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	749.968.972,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	102 Unit			50 Unit	259.997.904,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	52 Unit	222.340.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	102 Unit			26 Unit	259.997.904,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	52 Unit	222.340.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	12 Laporan			6 Laporan	4.321.405.389,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	6 Laporan	4.567.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4 Laporan			1 Laporan	6.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	7.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			3 Laporan	510.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	5 Laporan	510.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	3.805.405.389,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	4.050.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	397 Unit			200 Unit	742.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	197 Unit	585.480.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	14 Unit			7 Unit	268.190.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	7 Unit	234.630.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	12 Unit			6 Unit	90.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	6 Unit	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	367 Unit			125 Unit	133.810.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	182 Unit	125.850.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit			1 Unit	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kategori Maju</i>	3 Destinasi			3 Destinasi	2.417.499.657,00						3 Destinasi	2.720.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	2 Destinasi			1 Destinasi	150.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Daya tarik wisata dan pengelola	1 Destinasi	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi			1 Lokasi	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Daya tarik wisata dan pengelola	1 Lokasi	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Daya tarik wisata dan pengelola	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat	5 KSPP/KPPP			3 KSPP/KPPP	2.267.499.657,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Destinasi pariwisata dan pengelola	2 KSPP/KPPP	2.570.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit			3 Unit	1.967.499.657,00	Kab. Bengkalis, Siak Kecil, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Destinasi pariwisata dan pengelola	2 Unit	2.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	48 Orang			24 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Destinasi pariwisata dan pengelola	24 Orang	320.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	5 Persen			5 Persen	8.929.343.333,00						5 Persen	7.927.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	46 Kali			23 Kali	8.929.343.333,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Destinasi, event pariwisata, pemerintah, masyarakat dan stakeholder	23 Kali	7.927.350.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen			6 Dokumen	955.500.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Destinasi, event pariwisata, pemerintah, masyarakat dan stakeholder	6 Dokumen	976.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	34 Kegiatan			9 Kegiatan	7.973.843.333,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutk n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Destinasi, event pariwisata, pemerintah, masyarakat dan stakeholder	17 Kegiatan	6.950.850.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional	40 Pelaku			40 Pelaku	1.377.911.405,00						40 Pelaku	1.200.000.000,00	
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	2 Dokumen			1 Dokumen	1.377.911.405,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	199.235.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif														
			Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	4 Promosi			2 Promosi	849.491.405,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif	2 Promosi	600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	20 Unit			10 Unit	329.185.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif	10 Unit	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Kepariwisataan Ditingkatkan Kualitasnya Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	538 Orang 30 Persen			269 Orang 10 Persen	8.390.566.000,00						269 Orang 20 Persen	3.620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	2 Dokumen			1 Dokumen	4.864.810.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	1 Dokumen	2.910.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	140 Orang			70 Orang	320.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	70 Orang	320.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan			1 Laporan	210.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	1 Laporan	230.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)														
			Jumlah produk kreatif	6 Produk			3 Produk	492.900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	3 Produk	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	268 Orang			134 Orang	1.032.190.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	134 Orang	1.102.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	80 Orang			80 Orang	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	40 Orang	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	155 Orang			230 Orang	2.411.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	80 Orang	360.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Laporan			6 Laporan	48.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif	6 Laporan	48.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	305 Orang			150 Orang	3.525.756.000,00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif	155 Orang	710.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	155 Orang			315 Orang	3.177.316.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif	80 Orang	360.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	150 Orang			75 Orang	348.440.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif	75 Orang	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		UPT. BANDAR SENI ALI HAJI						3.419.840.000,00							3.603.080.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.419.840.000,00							3.603.080.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.419.840.000,00							3.603.080.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pariwisata</i>	100 Persen			100 Persen	3.270.340.000,00						100 Persen	3.453.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	20 Jenis Layanan			10 Jenis Layanan	198.640.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	10 Jenis Layanan	216.880.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket			1 Paket	50.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	53.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket			2 Paket	50.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	53.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			2 Paket	31.960.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	35.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket			1 Paket	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	30.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan			1 Laporan	45.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	45.880.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	102 Unit			50 Unit	200.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	52 Unit	185.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	102 Unit			24 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	52 Unit	185.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	12 Laporan			6 Laporan	2.453.200.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	6 Laporan	2.591.700.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	1.700.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan			2 Laporan	326.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	5 Laporan	330.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	2.125.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	2.260.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	397 Unit			200 Unit	418.500.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	197 Unit	460.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	367 Unit			60 Unit	105.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	182 Unit	110.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	313.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	350.000.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
2.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional	40 Pelaku			40 Pelaku	149.500.000,00						40 Pelaku	149.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana kota kreatif yang disediakan	2 Kota			1 Kota	149.500.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif	1 Kota	149.500.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 Laporan			1 Laporan	149.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif	1 Laporan	149.500.000,00	UPT. BANDAR SENI ALI HAJI
		DINAS PERKEBUNAN						38.935.515.097,00							40.956.088.716,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						38.935.515.097,00							40.956.088.716,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						38.935.515.097,00							40.956.088.716,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan	100 Persen			100 Persen	24.141.476.532,00						100 Persen	26.191.726.792,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen			14 Dokumen	165.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	14 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen			14 Dokumen	165.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	14 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	206 Orang			103 Orang	17.052.660.759,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	103 Orang	19.636.737.292,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	206 Orang/ Bulan			103 Orang/ Bulan	17.052.660.759,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	103 Orang/ Bulan	19.636.737.292,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	14 Laporan			7 Laporan	70.801.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	7 Laporan	70.801.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			7 Laporan	70.801.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	7 Laporan	70.801.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	308 Paket			100 Persen	72.100.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	154 Paket	130.438.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	308 Paket			103 Paket	72.100.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	154 Paket	130.438.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	10 Jenis			5 Jenis	3.022.551.059,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	5 Jenis	1.700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket			15 Paket	266.907.500,00	Kota Pekanbaru, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	15 Paket	224.246.378,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket			29 Paket	679.485.858,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	29 Paket	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	302.293.335,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	3 Paket	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	56 Paket			28 Paket	169.355.183,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	28 Paket	125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	250 Laporan			260 Laporan	1.604.509.183,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	125 Laporan	700.753.622,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	56 Unit			28 Unit	347.300.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	28 Unit	830.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	56 Unit			28 Unit	347.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	28 Unit	830.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Laporan			3 Laporan	2.523.034.829,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	3 Laporan	2.663.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	13.750.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	1 Laporan	13.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	489.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	12 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1848 Laporan			924 Laporan	2.020.004.829,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	924 Laporan	2.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	70 Unit			35 Unit	888.028.385,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	35 Unit	910.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit			13 Unit	546.300.885,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	13 Unit	460.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit			18 Unit	65.670.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	15 Unit	115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit			7 Unit	276.057.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	7 Unit	335.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	11.256.369 Ton			11.256.369 Ton	4.929.105.394,00						11.256.369 Ton	5.283.307.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas Lahan yang di Fasilitas (Pupuk, Pestisida dan Alsintan)	150 Laporan 150 Ha			75 Ha	1.861.188.254,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun dan Pengecer Pupuk Bersubsidi	75 Laporan 75 Ha	2.083.307.080,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	2 laporan			1 laporan	1.461.188.254,00	Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Mandau, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Bathin Solapan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Kuok, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Pangean, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun dan Pengecer Pupuk Bersubsidi	1 laporan	1.583.307.080,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	2 laporan			1 laporan	400.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun dan Pengecer Pupuk Bersubsidi	1 laporan	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah Bibit Perkebunan</i>	295500 Bibit 295.500 bibit			147.750 bibit	3.067.917.140,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun Komoditi Perkebunan	147750 Bibit 147.750 bibit	3.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>	4 laporan			1 laporan	3.067.917.140,00	Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Kampar, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun Komoditi Perkebunan	2 laporan	3.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan</i>	12,79 Kg/Ha			12,79 Kg/Ha	7.786.200.000,00						12,79 Kg/Ha	7.031.054.844,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Luas Kebun yang Ditanam</i>	1100 Ha 1.100 Ha			550 Ha	7.786.200.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	550 Ha 550 Ha	7.031.054.844,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	16 Dokumen			6 Dokumen	4.070.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Cerenti, Koto Cerenti Kab. Kuantan Singingi, Sentajo Raya, Beringin Jaya Kab. Rokan Hulu, Rambah, Menaming	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	8 Dokumen	3.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	12 Dokumen			6 Dokumen	2.006.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Bengkalis, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	6 Dokumen	2.010.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan			1 Laporan	1.460.000.000,00	Kab. Bengkalis, Rupat, Terkul Kab. Bengkalis, Siak Kecil, Muara Dua Kab. Bengkalis, Pinggir, Muara Basung Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekan Arba Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Kampar, Tanjung Rambutan Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Simpang Petai Kab. Kuantan Singingi, Benai, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Pangean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	3 Laporan	1.471.054.844,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	400 Ha			200 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	200 Ha	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana</i>	0,40 Persen			0,40 Persen	879.999.940,00						0,40 Persen	880.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	<i>Luas Lahan yang di Kendalikan</i>	200 Ha 200 Ha			100 Ha	879.999.940,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Komoditi Perkebunan	100 Ha 100 Ha	880.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	400 Ha			200 Ha	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Komoditi Perkebunan	200 Ha	275.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	100 Ha			50 Ha	604.999.940,00	Kab. Bengkalis, Bengkalis, Kelemantan Barat Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir Kab. Pelalawan, Pangkalan Lesung, Tanjung Kuyo Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Komoditi Perkebunan	50 Ha	605.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	<i>Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin</i>	76,81 Persen			76,81 Persen	400.000.000,00						76,81 Persen	440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi Penerapan Izin Usaha Perkebunan	26 Perusahaan 26 Perusahaan			13 Perusahaan	400.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Perusahaan Perkebunan	13 Perusaha an 13 Perusaha an	440.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	26 Laporan			12 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Perusahaan Perkebunan	13 Laporan	440.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2,34 Persen			2,34 Persen	798.733.231,00						2,34 Persen	1.130.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan Kompetensinya	160 Orang 160 Orang			80 Orang	224.999.885,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	80 Orang 80 Orang	225.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang			50 Orang	224.999.885,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	75 Orang	225.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi</i>	4 Kelompok 4 Kelompok Tani			2 Kelompok	414.999.876,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	2 Kelompok 2 Kelompok Tani	415.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	164.999.876,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	1 Dokumen	165.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>	24 Kelompok			6 Kelompok	250.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	12 Kelompok	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Jumlah korporasi yang mendapat pembinaan manajemen</i>	4 Koorporasi 4 Unit			2 Unit	158.733.470,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Kopi, Petani Karet, Petani Sawit	2 Koorporasi 2 Unit	490.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	4 Unit			2 Unit	158.733.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Kopi, Petani Karet, Petani Sawit	2 Unit	490.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN						2.692.000.000,00							2.450.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.692.000.000,00							2.450.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.692.000.000,00							2.450.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan</i>	11.256.369 Ton			11.256.369 Ton	2.692.000.000,00						11.256.369 Ton	2.450.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah Bibit Perkebunan</i>	295500 Bibit 295.500 bibit			147.750 bibit	2.692.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	147750 Bibit 147.750 bibit	2.450.000.000,00	UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>	4 laporan			1 laporan	2.692.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	2 laporan	2.450.000.000,00	UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
		UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN						150.000.000,00							165.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						150.000.000,00							165.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						150.000.000,00							165.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan</i>	11.256.369 Ton			11.256.369 Ton	150.000.000,00						11.256.369 Ton	165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah Bibit Perkebunan</i>	295500 Bibit 295.500 bibit			147.750 bibit	150.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penangkar Benih Komoditi Perkebunan	147750 Bibit 147.750 bibit	165.000.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>	80.000 Sertifikat			40.000 Sertifikat	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penangkar Benih Komoditi Perkebunan	40.000 Sertifikat	165.000.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							46.079.732.794,00						45.202.595.855,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						46.079.732.794,00							45.202.595.855,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						46.079.732.794,00							45.202.595.855,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen			100 Persen	30.026.475.146,00						100 Persen	28.124.076.776,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	24 Dokumen			12 Dokumen	149.989.569,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen			4 Dokumen	149.989.569,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	10 Laporan			5 Laporan	23.132.311.767,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Laporan	21.329.620.022,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.940 Orang/ Bulan			1440 Orang/ Bulan	23.132.311.767,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1.500 Orang/ Bulan	21.329.620.022,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	14 Laporan			7 Laporan	249.975.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	7 Laporan	250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	249.975.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan			6 Jenis Layanan	1.439.362.746,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	6 Jenis Layanan	1.439.456.754,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	99.999.499,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	329.456.594,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Paket	329.456.754,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	199.933.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Paket	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	159.999.953,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Paket	160.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			12 Laporan	649.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12 Laporan	650.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis			4 Jenis	3.904.991.064,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	4 Jenis	3.905.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan			1 Laporan	4.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48 Laporan			12 Laporan	1.099.999.064,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	24 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	3 Laporan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan			12 Laporan	2.700.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	48 Laporan	2.700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			6 Jenis	1.149.845.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	6 Jenis	1.050.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	49.930.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit			19 Unit	749.915.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	16 Unit	750.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			18 Unit	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	50 Unit	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	31 Unit	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	3 Persen			3 Persen	6.479.823.760,00						3 Persen	7.905.000.000,00	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	4 Kelompok			2 Kelompok	150.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu	4 Kelompok	125.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan														
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu	1 Laporan	125.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	13.396 Ton			3150 Ton	600.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Bank Pakan/Produksi Pakan/Budidaya Sapi Potong, Kambing, Domba	7.492 Ton	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	26 laporan			1 laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Bank Pakan/Produksi Pakan/Budidaya Sapi Potong, Kambing, Domba	13 laporan	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13.40 Perse n			13.30 Persen	1.950.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	13.40 Perse n	1.950.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	6 Laporan			3 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	3 Laporan	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	26 laporan			1 laporan	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	13 laporan	1.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	342 ST			182 ST	3.779.823.760,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	166 ST	5.230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	10222 Ekor			5.132 Ekor	3.779.823.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	5116 Ekor	5.230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	12 Persen			12 Persen	1.652.843.208,00						12 Persen	1.500.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)</i>	22 Persen			20 Persen	1.652.843.208,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	22 Persen	1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			<i>Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan</i>	1800 Ha			900 Ha	249.940.104,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	900 Ha	250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	8 Unit			6 Unit	952.903.104,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	3 Unit	800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan														
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	2 Unit			1 Unit	450.000.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	1 Unit	450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak	2,1 Persen 20 Persen			10 Persen 2,15 Persen	5.250.591.960,00						2,1 Persen 10 Persen	5.003.519.079,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)</i>	20 Persen			10 Persen	3.874.127.880,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Ternak Masyarakat	10 Persen	3.753.519.079,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			<i>Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan</i>	12 Wilayah			12 Wilayah	230.471.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Ternak Masyarakat	12 Wilayah	253.519.079,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	72 Laporan			36 Laporan	3.643.656.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Ternak Masyarakat	36 Laporan	3.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	90 Persen			90 Persen	976.516.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha	90 Persen	800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan			1 Laporan	99.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	120 Laporan			60 Laporan	876.520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha	60 Laporan	700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar	29 Wilayah			14 Wilayah	399.948.080,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha Bersertifikasi	15 Wilayah	450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	74 Laporan			35 Laporan	249.966.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha Bersertifikasi	39 Laporan	300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan														
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	200 Orang			112 Orang	149.981.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha Bersertifikasi	100 Orang	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	15 Persen			15 Persen	2.669.998.720,00						15 Persen	2.670.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)</i>	100 Kelomp ok			50 Kelompok	2.089.493.400,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	50 Kelompo k	2.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>	661 Kelompok			661 Kelompok	2.089.493.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	661 Kelompok	2.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis</i>	120 Kelomp ok			60 Kelompok	580.505.320,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak/Gapoktan (Korporasi Pernakan)	60 Kelompo k	670.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	2 Unit			2 Unit	580.505.320,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak/Gapoktan (Korporasi Peternakan)	1 Unit	670.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK						4.026.958.768,00							4.027.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.026.958.768,00							4.027.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.026.958.768,00							4.027.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen			100 Persen	326.995.016,00						100 Persen	327.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	6 Jenis Layanan			1 Jenis Layanan	27.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	6 Jenis Layanan	27.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			1 Paket	27.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	5 Paket	27.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	4 Jenis			1 Jenis	299.995.016,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	4 Jenis	300.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	96 Laporan			12 Laporan	299.995.016,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	48 Laporan	300.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen			3 Persen	2.699.964.252,00						3 Persen	2.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI	13.396 Ton			62000 Dosis	2.299.998.250,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	7.492 Ton	2.300.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	26 laporan			12 laporan	2.299.998.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	13 laporan	2.300.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Sapi Bull yang diadakan	342 ST			6 Ekor	399.966.002,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	166 ST	400.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	10222 Ekor			6 Ekor	399.966.002,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	5116 Ekor	400.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	12 Persen			12 Persen	999.999.500,00						12 Persen	1.000.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	22 Persen			76 Persen	999.999.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	22 Persen	1.000.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	37 Unit			5 Unit	999.999.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	19 Unit	1.000.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN						6.366.809.290,00							6.357.007.520,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.366.809.290,00							6.357.007.520,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.366.809.290,00							6.357.007.520,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen			100 Persen	2.616.809.290,00						100 Persen	2.167.007.520,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan			3 Jenis Layanan	678.748.586,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	6 Jenis Layanan	346.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	592.929.086,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	5 Paket	300.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	68.828.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	5 Paket	29.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	16.991.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Paket	17.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang			3 Jenis Barang	1.084.597.270,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Jenis Barang	1.000.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	44 Unit			7 Unit	393.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	22 Unit	600.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Unit	100.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit			3 Unit	591.317.270,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	5 Unit	300.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	4 Jenis			2 Jenis	469.411.859,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	4 Jenis	461.007.520,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan			1 Laporan	34.990.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Laporan	50.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	96 Laporan			12 Laporan	434.421.859,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	48 Laporan	411.007.520,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			3 Jenis	384.051.575,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	6 Jenis	360.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			13 Unit	14.950.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	50 Unit	35.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Unit	200.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit			2 Unit	169.101.575,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	31 Unit	125.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	12 Persen			12 Persen	350.000.000,00						12 Persen	790.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana UPT	22 Persen			78 Persen	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	22 Persen	790.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	4 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	2 Unit	190.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	37 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	19 Unit	600.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak	2,1 Persen 20 Persen			10 Persen 2,15 Persen	3.400.000.000,00						2,1 Persen 10 Persen	3.400.000.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)	20 Persen			10 Persen	2.000.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	10 Persen	2.000.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	5 Paket	50.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	167.828.300,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	3 Paket	185.595.392,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang			1 Jenis Barang	195.600.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	3 Jenis Barang	150.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	28.790.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	3 Laporan	31.691.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan			12 Laporan	434.798.352,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkn Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	48 Laporan	500.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			1 Jenis	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	6 Jenis	110.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	50 Unit			17 Unit	100.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	50 Unit	110.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen			3 Persen	4.518.748.210,00						3 Persen	1.700.000.000,00	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Bibit Ternak yang ber SKLB di UPT</i>	13.40 Perse n			20 Ekor	4.518.748.210,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	13.40 Perse n	1.700.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	26 laporan			12 laporan	4.518.748.210,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	13 laporan	1.700.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	12 Persen			12 Persen	3.390.000.000,00						12 Persen	1.500.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)</i>	22 Persen			65 Persen	3.390.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	22 Persen	1.500.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	37 Unit			12 Unit	3.390.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	19 Unit	1.500.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						62.100.408.875,00							63.021.802.330,97	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						62.100.408.875,00							63.021.802.330,97	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						62.100.408.875,00							63.021.802.330,97	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	100 Persen			100 Persen	28.738.762.274,00						100 Persen	36.306.830.613,04	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	24 Dokumen			12 Dokumen	200.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	12 Dokumen	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	24 Dokumen			12 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	12 Dokumen	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang / Bulan			180 Orang / Bulan	22.489.974.875,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	180 Orang / Bulan	29.981.275.724,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/ Bulan			180 Orang/ Bulan	22.489.974.875,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	180 Orang/ Bulan	29.981.275.724,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	76.390.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Aset Dinas ESDM Provinsi Riau	1 Laporan	78.131.692,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	76.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Aset Dinas ESDM Provinsi Riau		78.131.692,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	345 Paket			165 Paket	115.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	180 Paket	115.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	345 Paket			165 Paket	115.500.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	180 Paket	115.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	146 Paket			73 Paket	2.528.680.090,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	73 Paket	2.577.411.188,81	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			12 Paket	197.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	20 Paket	201.491.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket			20 Paket	413.198.689,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	24 Paket	422.620.479,28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	373.010.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	8 Paket	381.517.819,14	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42 Paket			5 Paket	245.542.401,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	21 Paket	251.141.290,39	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			1 Laporan	1.299.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	5 Laporan	1.320.640.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan			16 Laporan	2.219.577.161,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	16 Laporan	2.270.185.744,86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan			1 Laporan	6.500.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	5 Laporan	6.648.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan			1 Laporan	539.079.336,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	5 Laporan	551.370.344,86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	1.673.997.825,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	6 Laporan	1.712.167.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1064 Unit			532 Unit	1.108.640.148,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	532 Unit	1.134.326.263,37	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			7 Unit	291.650.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	11 Unit	298.657.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			5 Unit	255.510.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	5 Unit	261.386.768,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	938 Unit			358 Unit	161.480.148,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	469 Unit	165.161.895,37	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit			4 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	20 Unit	204.560.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit			6 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Dinas ESDM Provinsi Riau	14 Unit	204.560.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pengelolaan Kegeologian	100 Persen			100 Persen	523.776.790,00						100 Persen	535.719.320,16	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	199.746.495,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Laporan	204.300.924,76	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah pada Daerah Provinsi</i>	2 Laporan			1 Laporan	199.746.495,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Laporan	204.300.924,76	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	2 Laporan			1 Laporan	324.030.295,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Laporan	331.418.395,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	2 Laporan			1 Laporan	324.030.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Laporan	331.418.395,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina	88 Persen			88 Persen	534.729.480,00						88 Persen	546.921.610,93	
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	2 Laporan			1 Laporan	434.729.695,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Laporan	444.641.610,93	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	2 Laporan			1 Laporan	434.729.695,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Laporan	444.641.610,93	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan hasil Pengawasan	2 Laporan			1 Laporan	99.999.785,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Laporan	102.280.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	1 Dokumen	102.280.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Bauran Energi</i>	31,22 Persen			31,22 Persen	10.577.678.490,00						31,22 Persen	6.653.363.000,00	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	10 Laporan			5 Laporan	149.999.820,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	153.420.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	10 Laporan			1 Laporan	149.999.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	153.420.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	112 Unit			141 Unit	10.280.179.370,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat	56 Unit	6.341.360.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	2 Unit			1 Unit	99.999.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat	1 Unit	102.280.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	100 unit			138 unit	10.080.179.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat	50 unit	6.136.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara</i>	10 unit			3 unit	99.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat	5 unit	102.280.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</i>	2 Laporan			1 Laporan	47.499.710,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung Pemerintah dan OPD	1 Laporan	48.583.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi</i>	2 Laporan			1 Laporan	47.499.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Gedung Pemerintah dan OPD	1 Laporan	48.583.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	<i>Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi</i>	4 Laporan			2 Laporan	99.999.590,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 Laporan	110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</i>	2 laporan			1 laporan	49.999.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 laporan	55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat</i>	2 laporan			1 laporan	49.999.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 laporan	55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2042 Unit			1021 Unit	20.954.683.716,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat	1021 Unit	18.377.182.130,55	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH I						565.780.705,00							578.893.063,37	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						565.780.705,00							578.893.063,37	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						565.780.705,00							578.893.063,37	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100 Persen			100 Persen	336.845.145,00						100 Persen	344.735.421,18	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	146 Paket			73 Paket	104.975.739,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	73 Paket	107.507.019,40	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			2 Paket	2.496.867,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	20 Paket	2.557.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket			1 Paket	19.999.145,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	24 Paket	20.456.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	8 Paket	10.228.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42 Paket			4 Paket	5.999.727,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	21 Paket	6.136.800,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			1 Laporan	66.480.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	5 Laporan	68.129.219,40	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan			16 Laporan	135.069.406,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	16 Laporan	138.159.993,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	5 Laporan	511.400,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			1 Laporan	18.176.980,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	5 Laporan	18.594.673,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	116.392.426,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	6 Laporan	119.053.920,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1064 Unit			532 Unit	96.800.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	532 Unit	99.068.408,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			1 Unit	35.360.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	11 Unit	36.166.208,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	938 Unit			20 Unit	11.440.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	469 Unit	11.762.200,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit			4 Unit	25.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	20 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit			2 Unit	25.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah I	14 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina	88 Persen			88 Persen	54.449.930,00						88 Persen	55.691.460,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	8 Laporan			4 Laporan	54.449.930,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8 Laporan			1 Laporan	54.449.930,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Bauran Energi	31,22 Persen			31,22 Persen	49.999.330,00						31,22 Persen	51.140.000,00	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	10 Laporan			5 Laporan	49.999.330,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	10 Laporan			1 Laporan	49.999.330,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%)	100 Persen			100 Persen	124.486.300,00						100 Persen	127.326.182,19	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			2 Paket	2.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	20 Paket	2.557.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket			1 Paket	19.999.923,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	24 Paket	20.456.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	8 Paket	10.228.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42 Paket			4 Paket	5.999.675,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	21 Paket	6.136.800,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			1 Laporan	68.485.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	5 Laporan	70.170.311,92	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan			16 Laporan	107.075.450,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	16 Laporan	109.521.593,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	5 Laporan	511.400,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			1 Laporan	19.380.166,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	5 Laporan	19.822.033,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	87.195.284,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	6 Laporan	89.188.160,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1064 Unit			532 Unit	104.860.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	532 Unit	107.250.808,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			1 Unit	35.360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	11 Unit	36.166.208,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	938 Unit			37 Unit	19.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	469 Unit	19.944.600,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit			4 Unit	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	20 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit			2 Unit	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah II	14 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina	88 Persen			88 Persen	54.449.900,00						88 Persen	55.691.460,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	8 Laporan			4 Laporan	54.449.900,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8 Laporan			1 Laporan	54.449.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Bauran Energi	31,22 Persen			31,22 Persen	49.999.795,00						31,22 Persen	51.140.000,00	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	10 Laporan			5 Laporan	49.999.795,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	10 Laporan			1 Laporan	49.999.795,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%)	100 Persen			100 Persen	124.487.595,00						100 Persen	127.326.182,19	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	2042 Unit			1021 Unit	124.487.595,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat	1021 Unit	127.326.182,19	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	10 Dokumen			1 Dokumen	124.487.595,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat	5 Dokumen	127.326.182,19	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH III						548.834.036,00							561.644.655,20	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						548.834.036,00							561.644.655,20	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						548.834.036,00							561.644.655,20	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	100 Persen			100 Persen	319.896.756,00						100 Persen	327.487.013,01	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	146 Paket			73 Paket	108.457.722,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	73 Paket	111.226.011,23	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			2 Paket	2.500.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	20 Paket	2.557.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket			1 Paket	19.999.732,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	24 Paket	20.456.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			1 Paket	9.998.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	8 Paket	10.228.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42 Paket			4 Paket	5.999.990,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	21 Paket	6.136.800,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			1 Laporan	69.960.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	5 Laporan	71.848.211,23	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan			16 Laporan	105.079.034,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	16 Laporan	107.475.993,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	5 Laporan	511.400,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan			1 Laporan	18.180.166,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	5 Laporan	18.594.673,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	86.398.868,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	6 Laporan	88.369.920,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1064 Unit			532 Unit	106.360.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	532 Unit	108.785.008,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			1 Unit	35.360.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	11 Unit	36.166.208,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	938 Unit			40 Unit	21.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	469 Unit	21.478.800,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit			4 Unit	25.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	20 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit			2 Unit	25.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah III	14 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Dibina</i>	88 Persen			88 Persen	54.449.715,00						88 Persen	55.691.460,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)</i>	8 Laporan			4 Laporan	54.449.715,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	8 Laporan			1 Laporan	54.449.715,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Bauran Energi</i>	31,22 Persen			31,22 Persen	50.000.000,00						31,22 Persen	51.140.000,00	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	10 Laporan			5 Laporan	50.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	10 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	<i>Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%)</i>	100 Persen			100 Persen	124.487.565,00						100 Persen	127.326.182,19	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	2042 Unit			1021 Unit	124.487.565,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat	1021 Unit	127.326.182,19	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	10 Dokumen			1 Dokumen	124.487.565,00	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Masyarakat	5 Dokumen	127.326.182,19	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV						504.165.335,00							515.724.181,57	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						504.165.335,00							515.724.181,57	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						504.165.335,00							515.724.181,57	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	100 Persen			100 Persen	275.229.885,00						100 Persen	281.566.539,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	146 Paket			73 Paket	105.992.826,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	73 Paket	108.467.697,60	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			2 Paket	2.500.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	20 Paket	2.557.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket			1 Paket	19.998.091,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	24 Paket	20.456.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	8 Paket	10.228.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42 Paket			4 Paket	5.999.735,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	21 Paket	6.136.800,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			1 Laporan	67.495.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	5 Laporan	69.089.897,60	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan			16 Laporan	75.877.059,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	16 Laporan	77.610.233,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	5 Laporan	511.400,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			1 Laporan	18.179.916,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	5 Laporan	18.594.673,78	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	57.197.143,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	6 Laporan	58.504.160,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1064 Unit			532 Unit	93.360.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	532 Unit	95.488.608,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			1 Unit	35.360.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	11 Unit	36.166.208,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	938 Unit			14 Unit	8.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	469 Unit	8.182.400,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit			4 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	20 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	28 Unit			2 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Cabang Dinas Wilayah IV	14 Unit	25.570.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Dibina</i>	88 Persen			88 Persen	54.449.910,00						88 Persen	55.691.460,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)</i>	8 Laporan			4 Laporan	54.449.910,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	8 Laporan			1 Laporan	54.449.910,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pelaku Usaha	4 Laporan	55.691.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Bauran Energi</i>	31,22 Persen			31,22 Persen	49.998.000,00						31,22 Persen	51.140.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	10 Laporan			5 Laporan	49.998.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	10 Laporan			1 Laporan	49.998.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Pelaku Usaha	5 Laporan	51.140.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%)	100 Persen			100 Persen	124.487.540,00						100 Persen	127.326.182,19	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2042 Unit			1021 Unit	124.487.540,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat	1021 Unit	127.326.182,19	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10 Dokumen			1 Dokumen	124.487.540,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat	5 Dokumen	127.326.182,19	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
		UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN						489.999.664,00							501.172.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						489.999.664,00							501.172.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						489.999.664,00							501.172.000,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administarsi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100 Persen			100 Persen	489.999.664,00						100 Persen	501.172.000,00	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan			16 Laporan	369.999.664,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	16 Laporan	378.436.000,00	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	369.999.664,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	6 Laporan	378.436.000,00	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1064 Unit			532 Unit	120.000.000,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	532 Unit	122.736.000,00	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	938 Unit			13 Unit	120.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	469 Unit	122.736.000,00	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						55.019.914.556,00							58.270.338.162,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.963.461.785,00							2.258.249.008,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						1.963.461.785,00							2.258.249.008,00	
1.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provisi	14,29 Persen			14,29 Persen	178.133.648,00						14,29 Persen	187.543.553,00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Unit Usaha			5 Unit Usaha	84.828.519,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	5 Unit Usaha	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10 Unit Usaha			5 Unit Usaha	84.828.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	5 Unit Usaha	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Unit Usaha			5 Unit Usaha	93.305.129,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	5 Unit Usaha	97.543.553,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10 Unit Usaha			5 Unit Usaha	93.305.129,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	5 Unit Usaha	97.543.553,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	6,94 Persen			6,94 Persen	183.487.999,00						6,94 Persen	207.000.000,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	24 Unit Usaha			12 Unit Usaha	183.487.999,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 Unit Usaha	207.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	24 Unit Usaha			12 Unit Usaha	183.487.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 Unit Usaha	207.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	100 Persen			100 Persen	110.751.558,00						100 Persen	289.216.770,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24 Unit Usaha			12 Unit Usaha	110.751.558,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 Unit Usaha	289.216.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha			12 Unit Usaha	110.751.558,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 Unit Usaha	289.216.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi	100 Persen			100 Persen	538.528.637,00						100 Persen	367.856.622,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Unit Usaha			50 Unit Usaha	538.528.637,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	50 Unit Usaha	367.856.622,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha			50 Unit Usaha	315.299.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	50 Unit Usaha	217.856.622,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	80 Keluarga			40 Keluarga	223.229.227,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	40 Keluarga	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Yang Berdaya Saing Dan Produktif	100 Persen			100 Persen	832.559.943,00						100 Persen	1.086.632.063,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	440 Unit Usaha			320 Unit Usaha	832.559.943,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	320 Unit Usaha	1.086.632.063,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	400 Unit Usaha			200 Unit Usaha	732.559.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	200 Unit Usaha	886.632.063,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	40 Unit Usaha			20 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	20 Unit Usaha	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	100 Persen			100 Persen	120.000.000,00						100 Persen	120.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	100 Persen			100 Persen	120.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	100 Persen	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			Wirausaha yang Difasilitasi	60 Orang			30 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	30 Orang	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						53.056.452.771,00							56.012.089.154,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.864.993.261,00							3.764.290.604,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Tertib Usaha	100 Persen			100 Persen	116.292.094,00						100 Persen	120.910.506,00	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	2 Dokumen			1 Dokumen	38.122.801,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	40.550.031,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			1 Dokumen	38.122.801,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	40.550.031,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya	2 Dokumen			1 Dokumen	38.169.770,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	40.360.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			1 Dokumen	38.169.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	40.360.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	20000 Dokumen			10000 Dokumen	39.999.523,00			Melanjutk an Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	10000 Doku men	39.999.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	20000 Dokumen			10000 Dokumen	39.999.523,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	10000 Dokumen	39.999.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	100 Persen			100 Persen	132.433.887,00						100 Persen	138.003.973,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<i>Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</i>	100 Orang			50 Orang	132.433.887,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	50 Orang	138.003.973,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas														
			<i>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi</i>	100 Orang			50 Orang	132.433.887,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	50 Orang	138.003.973,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Disparitas Harga Sesuai HET Dan Harga Acuan</i>	3 Persen			3 Persen	2.156.017.279,00						3 Persen	1.827.583.429,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	2 Laporan			1 Laporan	110.501.736,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	156.542.488,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	2 Laporan			1 Laporan	110.501.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	156.542.488,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan			2 Laporan	1.938.748.019,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	2 Laporan	1.408.748.019,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	2 Laporan			1 Laporan	109.961.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	179.961.236,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	1.828.786.783,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	1.228.786.783,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	4 Laporan			2 Laporan	106.767.524,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	2 Laporan	262.292.922,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan			1 Laporan	55.569.301,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	159.024.697,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	2 Laporan			1 Laporan	51.198.223,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	103.268.225,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	14 Persen			14 Persen	177.214.632,00						14 Persen	182.684.754,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	124 Pelaku Usaha			62 Pelaku Usaha	177.214.632,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	62 Pelaku Usaha	182.684.754,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	124 Pelaku Usaha			62 Pelaku Usaha	177.214.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	62 Pelaku Usaha	182.684.754,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	80 Indeks			80 Indeks	1.016.888.971,00						80 Indeks	1.192.097.595,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	100 Persen			100 Persen	662.823.692,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	100 Persen	721.674.292,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK			3 BPSK	612.133.917,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	3 BPSK	618.170.624,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	5 LPKSM			5 LPKSM	50.689.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	5 LPKSM	103.503.668,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan			1 Laporan	354.065.279,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	470.423.303,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan			1 Laporan	354.065.279,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	470.423.303,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	22 Persen			22 Persen	266.146.398,00						22 Persen	303.010.347,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang dipromosikan	24 UMKM			12 UMKM	149.223.729,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 UMKM	155.169.549,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	24 UMKM			12 UMKM	149.223.729,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 UMKM	155.169.549,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran	24 UMKM			12 UMKM	116.922.669,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 UMKM	147.840.798,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	24 UMKM			12 UMKM	116.922.669,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	12 UMKM	147.840.798,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						49.191.459.510,00							52.247.798.550,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan	100 Persen			100 Persen	45.932.209.717,00						100 Persen	48.775.444.353,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	782.775.027,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	8 Dokumen	910.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen			7 Dokumen	119.999.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	7 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	662.775.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	1 Laporan	710.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2424 Orang			2424 Orang	32.327.968.094,00			-	Penguatan Ekonomi	ASN	2424 Orang	37.001.562.009,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2424 Orang/ Bulan			2424 Orang/ Bulan	32.327.968.094,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi	ASN	2424 Orang/ Bulan	37.001.562.009,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	183.492.970,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	1 Laporan	173.009.837,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	183.492.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	1 Laporan	173.009.837,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	100 Persen			100 Persen	188.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	636.156.640,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket			0 Paket	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	1 Paket	618.156.640,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4 Orang			2 Orang	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	2 Orang	18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	1.831.344.347,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	1.764.979.437,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket			2 Paket	177.999.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	13 Paket	197.999.117,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Paket	520.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket			2 Paket	254.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	11 Paket	194.999.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	978.345.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	1 Laporan	851.980.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	3.249.994.289,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	1.450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	449.996.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	2 Unit	950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	2.799.997.799,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	2 Unit	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Laporan			14 Laporan	3.755.501.370,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	14 Laporan	4.309.238.560,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	216.746.332,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Laporan	770.483.522,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	3.538.755.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Laporan	3.538.755.038,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	3.613.133.620,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	2.530.497.870,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	24 Unit			7 Unit	316.998.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	12 Unit	316.998.580,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	10 Unit			5 Unit	323.499.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	5 Unit	323.499.290,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	88 Unit			5 Unit	59.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	44 Unit	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit			3 Unit	2.412.705.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	3 Unit	1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	50 Unit			25 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	25 Unit	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri</i>	91,67 Persen			91,67 Persen	2.686.050.287,00						91,67 Persen	2.786.815.954,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	28 Dokumen			14 Dokumen	2.686.050.287,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	14 Dokumen	2.786.815.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	679.399.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	2 Dokumen	1.030.189.336,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	1.645.867.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	1.231.842.380,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	70.999.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			<i>Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri</i>	2 Laporan			1 Laporan	63.184.169,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	123.184.238,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi														
			<i>- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	126.599.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	226.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Persentase Izin Usaha Industri</i>	100 Persen			100 Persen	269.245.679,00						100 Persen	281.583.715,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	4 Dokumen			2 Dokumen	269.245.679,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	2 Dokumen	281.583.715,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen			1 Dokumen	200.245.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	212.583.715,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	68.999.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Masyarakat		69.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/Kota se-Provinsi Riau	100 Persen			100 Persen	303.953.827,00						100 Persen	403.954.528,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	6 Dokumen			3 Dokumen	303.953.827,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	3 Dokumen	403.954.528,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen			1 Dokumen	107.954.346,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	107.954.689,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	2 Dokumen			1 Dokumen	99.999.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	95.999.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	95.999.839,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPT. INDUSTRI LOGAM						1.052.225.000,00							1.450.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.052.225.000,00							1.450.000.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.052.225.000,00							1.450.000.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan</i>	100 Persen			100 Persen	270.000.000,00						100 Persen	450.000.000,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	66.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	66.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	26 Paket			3 Paket	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	13 Paket	42.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Paket	15.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	22 Paket			1 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	11 Paket	9.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	28 Laporan			14 Laporan	120.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	14 Laporan	300.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Laporan	300.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	84.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	84.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	24 Unit			1 Unit	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	12 Unit	34.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	88 Unit			7 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	44 Unit	50.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri</i>	91,67 Persen			91,67 Persen	782.225.000,00						91,67 Persen	1.000.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	28 Dokumen			14 Dokumen	782.225.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	14 Dokumen	1.000.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	14 Dokumen			6 Dokumen	382.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	7 Dokumen	500.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	2 Dokumen	500.000.000,00	UPT. INDUSTRI LOGAM
		UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN						1.099.105.614,00							2.425.035.386,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.099.105.614,00							2.425.035.386,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.099.105.614,00							2.425.035.386,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan	100 Persen			100 Persen	271.730.108,00						100 Persen	480.000.000,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	65.942.608,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	66.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket			2 Paket	41.996.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	13 Paket	42.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	14.945.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Paket	15.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket			2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	11 Paket	9.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Laporan			14 Laporan	120.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	14 Laporan	300.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Laporan	300.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	85.787.500,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	114.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			1 Unit	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	12 Unit	34.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN	
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit			12 Unit	51.787.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	44 Unit	80.000.000,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN	
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri	91,67 Persen			91,67 Persen	827.375.506,00						91,67 Persen	1.945.035.386,00		
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	28 Dokumen			14 Dokumen	827.375.506,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	14 Dokumen	1.945.035.386,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN	
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	14 Dokumen			1 Dokumen	827.375.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	7 Dokumen	1.945.035.386,00	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN	
		UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG							969.125.800,00							1.095.939.800,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						969.125.800,00							1.095.939.800,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						699.125.800,00							715.939.800,00		
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	80 Indeks			80 Indeks	699.125.800,00						80 Indeks	715.939.800,00		
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	100 Persen			100 Persen	699.125.800,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	100 Persen	715.939.800,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>	2000 Sertifikat			1000 Sertifikat	135.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1000 Sertifikat	145.852.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>	1300 laporan			650 laporan	305.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	650 laporan	312.444.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	144 Produk			72 Produk	77.794.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	72 Produk	77.794.800,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi														
			<i>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan</i>	160 Sertifikat			80 Sertifikat	179.849.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	80 Sertifikat	179.849.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						270.000.000,00							380.000.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan	100 Persen			100 Persen	270.000.000,00						100 Persen	380.000.000,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	66.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	66.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket			2 Paket	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	13 Paket	42.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Paket	15.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket			2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	11 Paket	9.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Laporan			14 Laporan	120.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	14 Laporan	200.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Laporan	200.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	84.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	114.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			1 Unit	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	12 Unit	34.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	88 Unit			7 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	44 Unit	80.000.000,00	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						5.042.482.450,00							5.154.839.640,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.784.771.450,00							4.616.683.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4.784.771.450,00							4.616.683.000,00	
1.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</i>	1006 Orang			1006 Orang	4.784.771.450,00						1006 Orang	4.616.683.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian</i>	2012 Orang			1006 Orang	4.784.771.450,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1006 Orang	4.616.683.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	2012 Orang			1006 Orang	4.784.771.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-PK2UKM	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	1006 Orang	4.616.683.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						257.711.000,00							538.156.640,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						257.711.000,00							538.156.640,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan</i>	100 Persen			100 Persen	257.711.000,00						100 Persen	538.156.640,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	66.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	66.000.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	26 Paket			2 Paket	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	13 Paket	42.000.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Paket	15.000.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	22 Paket			2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	11 Paket	9.000.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	28 Laporan			14 Laporan	158.151.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	14 Laporan	438.156.640,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Laporan	200.000.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	38.151.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	1 Laporan	238.156.640,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	33.560.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	34.000.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	24 Unit			1 Unit	33.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	12 Unit	34.000.000,00	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						1.497.290.610,00							900.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.228.188.916,00							500.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						1.228.188.916,00							500.000.000,00	
1.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase Peningkatan UMKM Yang Berdaya Saing Dan Produktif</i>	100 Persen			100 Persen	336.989.919,00						100 Persen	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	440 Unit Usaha			320 Unit Usaha	336.989.919,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	320 Unit Usaha	300.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang			50 Orang	149.994.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	50 Orang	150.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha			100 Unit Usaha	186.995.527,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	100 Unit Usaha	150.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	100 Persen			100 Persen	891.198.997,00						100 Persen	200.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	100 Persen			100 Persen	891.198.997,00			-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	100 Persen	200.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	600 Unit Usaha			300 Unit Usaha	891.198.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	Masyarakat	300 Unit Usaha	200.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						269.101.694,00							400.000.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						269.101.694,00							400.000.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan	100 Persen			100 Persen	269.101.694,00						100 Persen	400.000.000,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	65.872.494,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	66.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket			2 Paket	41.988.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	13 Paket	42.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	14.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Paket	15.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	22 Paket			2 Paket	8.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	11 Paket	9.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	28 Laporan			14 Laporan	119.729.200,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	14 Laporan	200.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	119.729.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	6 Laporan	200.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	83.500.000,00			-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	100 Persen	134.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	24 Unit			1 Unit	33.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	12 Unit	34.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	88 Unit			13 Unit	49.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DISPERINDAGKOP &UKM	44 Unit	100.000.000,00	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		SEKRETARIAT DAERAH						371.225.780.715,00							363.482.555.465,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						370.790.851.232,00							362.814.555.465,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						370.790.851.232,00							362.814.555.465,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	202.186.619.964,00						100 Persen	184.869.072.681,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen			1 Dokumen	644.800.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10 Dokumen			5 Dokumen	644.800.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan 1 LAPORAN 2 Laporan			1 LAPORAN	74.758.076.829,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan 1 LAPORAN 1 Laporan	78.512.955.746,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1090 Orang/ Bulan			545 Orang/ Bulan	74.758.076.829,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola	-	545 Orang/ Bulan	78.512.955.746,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	2 laporan 2 Laporan 2 Laporan			1 Laporan	426.500.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 laporan 1 Laporan 1 Laporan	426.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	8 Laporan			4 Laporan	426.500.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Laporan	426.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>	2 Jenis 2 Jenis 4 Jenis			2 Jenis	355.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	366.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	4 Paket			2 Paket	115.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Paket	116.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	240.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10 Jenis 10 Jenis 5 jenis			5 Jenis	14.566.612.116,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Jenis 5 Jenis 5 jenis	11.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	599.997.636,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Paket	650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket			50 Paket	2.032.849.901,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	20 Paket	2.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket			12 Paket	3.146.708.109,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Paket	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket			4 Paket	1.098.381.470,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Paket	950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8000 Laporan			3500 Laporan	7.688.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4500 Laporan	6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis 2 jenis 2 Jenis			2 Jenis	16.402.280.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Jenis 2 jenis 2 Jenis	4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	322.100.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Unit	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit			20 Unit	16.080.180.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Unit	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	3 Jenis 6 Jenis 3 jenis			3 jenis	32.180.170.522,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	3 Jenis 3 Jenis 3 jenis	28.530.012.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	24 Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	11.999.999.994,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	8.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	20.080.170.528,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	19.730.012.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	8 Jenis 4 Jenis 4 JENIS			4 Jenis	16.020.812.780,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Jenis 4 Jenis 4 JENIS	11.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	41 Unit			21 Unit	1.197.440.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	20 Unit	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	271 Unit			141 Unit	5.561.260.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	141 Unit	3.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1164 Unit			582 Unit	2.778.443.780,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	582 Unit	2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	92 Unit			46 Unit	6.483.669.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	46 Unit	5.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya	4 Orang 2 ORANG 4 Orang			2 Orang	9.150.154.327,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Orang 2 ORANG 2 Orang	17.352.654.327,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	271.154.327,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Orang/Bulan	271.154.327,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	460.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Paket	460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang			4 Orang	48.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Orang	48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang/ Bulan			2 Orang/ Bulan	8.371.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Orang/ Bulan	16.573.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang di fasilitasi	6 Jenis 3 Jenis 3 JENIS			3 Jenis	15.118.325.116,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	3 Jenis 3 Jenis 3 JENIS	9.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket			5 Paket	7.148.850.658,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Paket	4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket			5 Paket	6.425.852.458,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Paket	3.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8 Paket			4 Paket	1.543.622.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Paket	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	3 jenis 3 Jenis 6 Jenis			3 Jenis	5.871.999.975,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	3 jenis 3 Jenis 3 Jenis	5.680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	240 Dokumen			120 Dokumen	621.999.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	120 Dokumen	280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 Laporan			12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Laporan	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	24 Laporan			12 Laporan	4.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Laporan	4.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi	720 Kali 720 Kali 720 Kali			360 Kali	16.691.888.299,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	360 Kali 360 Kali 360 Kali	17.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	480 Laporan			240 Laporan	9.291.891.169,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	240 Laporan	7.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240 Laporan			120 Laporan	5.399.998.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	120 Laporan	8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	720 Laporan			360 Laporan	1.999.998.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	360 Laporan	1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik	100 Persen			100 Persen	2.053.117.012,00						100 Persen	2.356.220.982,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya	100 Persen			100 Persen	588.193.383,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	705.832.799,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	39 Dokumen			33 Dokumen	179.342.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	6 Dokumen	215.210.769,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	24 Dokumen			12 Dokumen	182.333.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Dokumen	218.799.949,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan</i>	66 Dokumen			33 Dokumen	226.518.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	33 Dokumen	271.822.081,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</i>	100 Persen			100 Persen	1.464.923.629,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	1.650.388.183,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	411.999.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	3 Dokumen	494.399.477,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	429.965.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Dokumen	515.958.598,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja</i>	2 Laporan			1 Laporan	186.838.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	129.170.338,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i>	6 Dokumen			3 Dokumen	194.454.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	3 Dokumen	220.861.157,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	5 Dokumen			1 Dokumen	241.665.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	4 Dokumen	289.998.613,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 Persen			100 Persen	5.014.032.665,00						100 Persen	4.381.004.520,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan	100 Persen			100 Persen	2.252.429.338,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	1.619.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	4 Dokumen			2 Dokumen	809.599.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Dokumen	809.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4 Dokumen			2 Dokumen	459.799.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Dokumen	459.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen			2 Dokumen	983.029.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah	100 Persen			100 Persen	1.904.703.914,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	1.904.704.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen			1 Dokumen	387.364.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	387.364.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen			1 Dokumen	413.819.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	413.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	6 Laporan			3 Laporan	1.103.519.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	3 Laporan	1.103.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	100 Persen			100 Persen	856.899.413,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	856.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen			1 Dokumen	505.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	505.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	2 Dokumen			1 Dokumen	183.919.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	183.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan			1 Laporan	167.199.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	167.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan	100 Persen			100 Persen	150.258.855.559,00						100 Persen	160.692.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual	100 Persen			100 Persen	34.456.695.010,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Tata Kelola	-	100 Persen	46.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	2 Unit			4 Unit	13.796.194.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Unit	25.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	16 Lembaga			7 Lembaga	20.660.501.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola	-	8 Lembaga	21.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen			100 Persen	114.782.160.549,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	100 Persen	113.637.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen			2 Dokumen	98.499.960.594,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	2 Dokumen	100.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen			1 Dokumen	299.999.999,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen			1 Dokumen	15.982.199.956,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	12.807.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 Persen			100 Persen	1.020.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	100 Persen	1.055.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen			1 Dokumen	362.326.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen			1 Dokumen	375.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 Dokumen			1 Dokumen	282.673.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan	100 Persen			100 Persen	3.041.346.531,00						100 Persen	2.380.678.567,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.158.170.011,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen 100 Persen	1.156.188.971,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>	220 Dokumen			100 Dokumen	422.570.437,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	120 Dokumen	423.084.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>	950 Dokumen			450 Dokumen	153.145.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	500 Dokumen	183.775.193,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya</i>	250 Dokumen			100 Dokumen	231.540.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	150 Dokumen	190.632.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	320 Dokumen			120 Dokumen	350.913.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	200 Dokumen	358.696.342,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum	100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.883.176.520,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen 100 Persen	1.224.489.596,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus			141 Kasus	1.266.888.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	20 Kasus	666.312.971,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	35 Kasus			20 Kasus	616.288.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	15 Kasus	558.176.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
6.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen			100 Persen	2.956.572.138,00						100 Persen	2.925.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen			100 Persen	899.999.902,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	100 Persen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen			1 Dokumen	599.999.964,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen			1 Dokumen	299.999.938,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 Persen			100 Persen	800.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	100 Persen	625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen			1 Dokumen	216.470.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen			1 Dokumen	383.530.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	83,33 Persen			83,33 Persen	1.256.572.236,00			-	Penguatan Ekonomi	-	83,33 Persen	1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen			1 Dokumen	326.572.236,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen			1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
7.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	100 Persen			100 Persen	2.126.260.993,00						100 Persen	2.150.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terkelolanya pengadaan barang dan jasa	100 %			100 %	599.960.319,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	149.982.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	299.999.974,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	149.977.945,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %			100 %	826.300.674,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan			1 Laporan	600.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	106.300.674,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terbinanya dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %			100 %	700.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 ASN Orang			300 Orang	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	150 ASN Orang	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
8.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan	100 Persen			100 Persen	3.154.046.370,00						100 Persen	3.060.578.715,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan	100 %			100 %	920.578.136,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	1.060.578.715,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2 Laporan			1 Laporan	373.242.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	453.242.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	2 Laporan			1 Laporan	203.245.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	253.245.770,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>	2 Laporan			1 Laporan	344.090.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan	354.090.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	100 %			100 %	2.233.468.234,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100 %	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	295.927.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	459.999.921,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	1.477.540.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						434.929.483,00							668.000.000,00	
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						434.929.483,00							668.000.000,00	
1.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	<i>Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan</i>	50 Persen			50 Persen	434.929.483,00						50 Persen	668.000.000,00	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	<i>Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama</i>	100 Persen			100 Persen	169.995.715,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100 Persen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	169.995.715,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	<i>Persentase Terselesainya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri)</i>	100 Persen			100 Persen	264.933.768,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100 Persen	498.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen			1 Dokumen	129.983.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	2 Dokumen			1 Dokumen	134.950.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	368.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						255.007.973.173,00							280.986.009.841,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						255.007.973.173,00							280.986.009.841,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						255.007.973.173,00							280.986.009.841,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen			100 Persen	107.435.885.453,00						100 Persen	126.164.497.328,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	66.210.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	2 Dokumen	66.780.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	66.210.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	2 Dokumen	66.780.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	20.676.892.975,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	27.951.494.486,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 Orang/ Bulan			200 Orang/ Bulan	20.676.892.975,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	200 Orang/ Bulan	27.951.494.486,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	6 Laporan			3 Laporan	50.837.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	3 Laporan	106.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	14.125.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	2 Dokumen	66.780.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	36.712.500,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	39.220.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			1 Jenis	140.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Jenis	140.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			2 Paket	140.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	140.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	18 Jenis			9 Jenis	6.226.482.018,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	9 Jenis	5.992.529.578,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	198.999.561,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	191.785.921,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	642.580.034,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	497.079.234,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	96.200.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	89.415.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	3.701.440.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	3.701.440.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	493.293.923,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	499.023.923,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			1 Laporan	143.760.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	143.760.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	625.511.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	545.328.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	24.697.500,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	24.697.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	14 Jenis			7 Jenis	396.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	7 Jenis	600.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			28 Unit	146.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	10 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit			190 Unit	175.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	10 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	8 Jenis			4 Jenis	20.868.261.380,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	4 Jenis	20.564.776.064,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan			1 Laporan	6.624.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	6.624.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	4.849.256.900,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	4.849.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	413.800.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	559.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	15.598.580.480,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	15.149.292.064,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	14 Jenis			7 Jenis	3.773.130.800,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	7 Jenis	3.068.580.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit			5 Unit	248.470.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	5 Unit	245.470.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	62 Unit			31 Unit	1.209.300.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	31 Unit	1.209.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	140 Unit			64 Unit	96.500.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	70 Unit	170.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	768 Unit			425 Unit	569.830.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	384 Unit	494.080.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			7 Unit	1.255.280.800,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	5 Unit	800.280.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	96 Unit			84 Unit	393.750.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	48 Unit	149.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya	130 Orang			65 Orang	50.430.513.280,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	65 Orang	60.867.901.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	130 Orang/ Bulan			65 Orang/ Bulan	48.665.564.280,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	65 Orang/ Bulan	59.102.952.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	10 Paket			5 Paket	1.374.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	5 Paket	1.374.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	130 Orang			65 Orang	390.949.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	65 Orang	390.949.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi	8 Jenis			4 Jenis	4.807.557.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	4 Jenis	6.806.435.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen			1 Dokumen	21.325.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	46.682.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	16 Laporan			8 Laporan	187.460.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	8 Laporan	187.460.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan			1 Laporan	1.958.772.500,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	2 Laporan	3.932.292.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket			4 Paket	2.640.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Paket	2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen			100 Persen	147.572.087.720,00						100 Persen	154.821.512.513,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	20 Perda			10 Perda	2.571.570.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	10 Perda	2.917.350.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	1.996.450.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	2.324.990.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen			1 Dokumen	248.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	265.240.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen			2 Dokumen	291.345.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	2 Dokumen	291.345.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	35.775.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	35.775.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Perda			3 Perda	3.589.277.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Perda	3.589.277.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen			1 Dokumen	712.583.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	712.583.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen			1 Dokumen	712.583.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	712.583.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	712.583.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	712.583.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	712.583.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	712.583.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	738.945.500,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	738.945.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	16 Jenis			8 Jenis	464.718.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	8 Jenis	464.718.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	464.718.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	464.718.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	12 Jenis			6 Jenis	17.594.432.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	6 Jenis	16.657.490.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	12 Dokumen			6 Dokumen	4.994.827.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	6 Dokumen	4.994.827.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	140 Orang			70 Orang	4.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	70 Orang	4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	16 Orang			8 Orang	720.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	8 Orang	864.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	2.257.020.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	174.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	10.950.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	37.528.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	5.611.635.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	6.586.635.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	8 Jenis			4 Jenis	82.390.668.720,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	4 Jenis	83.434.321.240,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	2 Laporan			1 Laporan	2.793.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	3.505.730.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	13.515.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	13.515.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	61.505.492.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	2 Dokumen	61.505.492.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah</i>	400 Orang			200 Orang	18.077.856.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	200 Orang	18.409.583.840,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Jenis Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	4 Jenis			2 Jenis	135.610.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	2 Jenis	135.610.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen			1 Dokumen	20.885.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	20.885.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan			1 Laporan	114.725.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	114.725.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD	10 Jenis			5 Jenis	40.825.811.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	5 Jenis	47.622.745.773,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen			1 Dokumen	29.107.371.500,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	36.141.831.773,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 Laporan			1 Laporan	49.175.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Laporan	49.175.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 Dokumen			1 Dokumen	2.891.802.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	1.505.426.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2 Dokumen			1 Dokumen	5.761.657.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	6.910.507.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen			1 Dokumen	3.015.806.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	3.015.806.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						51.713.636.010,00							54.743.539.503,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.903.637.469,00							8.576.778.840,00	
	5.01	PERENCANAAN						9.903.637.469,00							8.576.778.840,00	
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah	100 Persen			100 Persen	4.068.851.697,00						100 Persen	3.279.078.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen			100 Persen	2.882.209.620,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	100 Persen	1.991.599.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	6 Dokumen			5 Dokumen	648.162.159,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	270.332.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Dokumen			4 Dokumen	711.767.811,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	4 Dokumen	517.328.555,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>	3 Berita Acara			2 Berita Acara	224.403.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Berita Acara	96.320.805,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	68 Berita Acara			34 Berita Acara	93.115.760,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	34 Berita Acara	141.907.010,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi</i>	3 Berita Acara			2 Berita Acara	701.115.890,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Berita Acara	402.118.065,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen			2 Dokumen	503.645.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	563.592.785,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	520.583.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	100 Persen	637.479.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen			1 Dokumen	238.310.500,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	286.154.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang			100 Orang	102.461.500,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	100 Orang	139.887.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	144 Orang			72 Orang	179.811.500,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	72 Orang	211.437.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen			100 Persen	666.058.577,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	100 Persen	649.999.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan			4 Laporan	357.987.733,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	5 Laporan	349.999.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	96 Dokumen			60 Dokumen	308.070.844,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	36 Dokumen	299.999.870,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	100 Persen			100 Persen	5.834.785.772,00						100 Persen	5.297.700.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen			100 Persen	2.534.616.765,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	100 Persen	2.416.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			3 Dokumen	26.964.370,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55 Laporan			33 Laporan	129.573.990,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	22 Laporan	198.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan			11 Laporan	190.381.840,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	11 Laporan	84.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	40 Laporan			20 Laporan	659.756.350,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	20 Laporan	616.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			3 Dokumen	26.999.274,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40 Laporan			24 Laporan	215.999.705,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	16 Laporan	144.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan			8 Laporan	393.641.386,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	8 Laporan	415.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	52 Laporan			26 Laporan	891.299.850,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	26 Laporan	923.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen			100 Persen	1.730.298.109,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	100 Persen	1.622.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			3 Dokumen	26.999.880,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25 Laporan			15 Laporan	134.999.672,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	10 Laporan	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan			5 Laporan	415.124.735,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	5 Laporan	415.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	34 Laporan			17 Laporan	288.024.750,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	17 Laporan	288.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	5 Dokumen			3 Dokumen	26.999.880,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	25 Laporan			15 Laporan	134.999.707,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	10 Laporan	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10 Laporan			5 Laporan	415.124.735,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	5 Laporan	415.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	34 Laporan			17 Laporan	288.024.750,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	17 Laporan	288.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen			100 Persen	1.569.870.898,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	100 Persen	1.259.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			3 Dokumen	226.998.525,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan			12 Laporan	107.991.454,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	8 Laporan	72.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan			4 Laporan	249.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	4 Laporan	249.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	32 Laporan			16 Laporan	523.949.722,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	16 Laporan	467.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			3 Dokumen	26.999.637,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			3 Laporan	26.999.856,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Laporan	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan			2 Laporan	82.915.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	2 Laporan	83.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	28 Laporan			14 Laporan	325.016.704,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	14 Laporan	334.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X	NON URUSAN						41.809.998.541,00							46.166.760.663,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						41.809.998.541,00							46.166.760.663,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 persen			100 persen	41.809.998.541,00						100 persen	46.166.760.663,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	149.965.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			3 Dokumen	99.965.935,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	49.999.865,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	2 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	100 Persen			100 Persen	26.758.218.842,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	31.818.488.894,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	159 Orang/ Bulan			159 Orang/ Bulan	26.758.218.842,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	159 Orang/ Bulan	31.818.488.894,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	100 Persen			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	171.461.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	1 Laporan	171.461.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase peningkatan disiplin pegawai Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	183.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	184.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	183.400.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	1 Paket	184.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	2.353.663.223,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	2.313.140.706,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	104.385.980,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	1 Paket	104.386.525,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	16 Paket			8 Paket	649.287.902,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	8 Paket	687.315.861,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket			2 Paket	111.390.341,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	2 Paket	121.438.320,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	6 Laporan			3 Laporan	1.488.599.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	3 Laporan	1.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	6.118.066.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	5.308.046.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket			7 Paket	1.512.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	3 Paket	1.285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	410 Unit			193 Unit	4.606.066.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	212 Unit	4.023.046.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	4.335.067.982,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	4.527.707.063,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	30.375.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	1 Laporan	30.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	1.559.032.956,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	1 Laporan	1.662.632.956,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	2.745.660.026,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	1 Laporan	2.834.699.107,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen			100 Persen	1.811.616.694,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	100 Persen	1.693.917.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit			7 Unit	258.090.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	7 Unit	258.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			6 Unit	229.810.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	7 Unit	144.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	640 Unit			283 Unit	299.800.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	345 Unit	349.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1027 Unit			404 Unit	533.923.800,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	515 Unit	507.427.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	289.992.894,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	2 Unit	235.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Bappeda Provinsi Riau	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						203.710.849.257,00							184.636.157.308,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						203.710.849.257,00							184.636.157.308,00	
	5.02	KEUANGAN						203.710.849.257,00							184.636.157.308,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen			100 Persen	190.990.224.786,00						100 Persen	172.151.157.308,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 Dokumen			6 Dokumen	485.501.945,00			-	-	ASN	33 Dokumen	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	85.529.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	6 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 Laporan			1 Laporan	399.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	27 Laporan	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Laporan			12 Laporan 12 Laporan	132.679.624.472,00			-	-	ASN	12 Laporan	145.921.612.308,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12024 Orang/ Bulan			6012 Orang/ Bulan	132.679.624.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	6012 Orang/ Bulan	145.921.612.308,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	3 Laporan			1 Laporan	349.020.000,00			-	-	ASN	1 Laporan	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	349.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Laporan	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen			100 Persen	364.000.000,00			-	-	ASN	100 persen	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	364.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Paket	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 jenis	6.655.773.818,00			-	-	ASN	126 jenis	6.806.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	149.911.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	249.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			4 Paket	599.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			4 Paket	3.749.996.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	3.600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			1 Laporan	1.899.869.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	2.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12 jenis			3 Jenis	24.599.550.000,00			-	-	ASN	4 jenis	1.850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket			5 Paket	300.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	10 Paket	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	22.999.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Unit	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit			70 Unit	1.299.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	10 Unit	1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			3 jenis	16.129.982.551,00			-	-	ASN	63 jenis	14.730.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	6.399.987.037,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	5.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	9.699.995.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	9.700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	189 jenis			3 Jenis	9.726.772.000,00			-	-	ASN	63 jenis	1.493.545.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit			120 Unit	655.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	8709 Unit			360 Unit	743.545.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	743.545.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	51 Unit			1 Unit	8.327.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola</i>	100 Persen			100 Persen	585.000.000,00						100 Persen	585.000.000,00	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Persentase)</i>	100 persen			100 persen	585.000.000,00			-	-	ASN	100 persen	585.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9 Dokumen			3 Dokumen	585.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	3 Dokumen	585.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Angka Pendapatan Asli Daerah	4.714.861.201.145 Rupiah			4.714.861.201.145 Rupiah	12.135.624.471,00						4.714.861.201.145 Rupiah	11.900.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	76,5 %			75 %	12.135.624.471,00			-	-	ASN	76 %	11.900.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan			1 Laporan	349.993.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Laporan	350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan			1 Laporan	1.009.942.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	6 Laporan	1.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Sarana dan Prasarana			10 Sarana dan Prasarana	3.469.957.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Sarana dan Prasarana	5.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan			1 Laporan	449.992.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Laporan	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan			1 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Laporan	750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2 Dokumen			15 Dokumen	919.682.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Dokumen	650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>	10 Dokumen SSPD			30 Dokumen SSPD	969.888.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	5 Dokumen SSPD	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	3.316.174.615,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Laporan	2.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	3 Laporan			1 Laporan	299.999.621,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	3 Laporan			1 Laporan	599.994.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Laporan	600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG						640.363.286,00							631.609.262,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						640.363.286,00							631.609.262,00	
	5.02	KEUANGAN						640.363.286,00							631.609.262,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	640.363.286,00						100 Persen	631.609.262,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	376 jenis			6 jenis	265.211.873,00			-	-	ASN	126 jenis	265.428.342,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	9.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.990.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	126 Paket			2 Paket	60.000.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	60.002.578,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	29.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	29.996.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	19.999.549,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	19.999.764,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	63 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	756 Laporan			33 Laporan	140.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	140.440.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			3 jenis	285.456.213,00			-	-	ASN	63 jenis	285.460.920,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	3.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.150.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	39.812.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	39.812.160,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	242.494.053,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	242.498.760,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 jenis	89.695.200,00			-	-	ASN	63 jenis	80.720.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			3 Unit	52.525.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	43.550.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			23 Unit	22.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	22.170.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT						1.241.481.059,00							1.061.792.494,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.241.481.059,00							1.061.792.494,00	
	5.02	KEUANGAN						1.241.481.059,00							1.061.792.494,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.241.481.059,00						-	1.061.792.494,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	517.583.115,00			-	-	ASN	126 jenis	337.812.626,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.970.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	65.743.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	65.748.441,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	11.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	11.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	14.844.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	14.844.185,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	63 Dokumen			1 Dokumen	4.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	4.515.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	756 Laporan			107 Laporan	416.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	236.235.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			3 Jenis	577.066.184,00			-	-	ASN	63 jenis	588.452.108,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	113.771.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	125.149.143,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	460.294.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	460.302.965,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	146.831.760,00			-	-	ASN	63 jenis	135.527.760,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			4 Unit	85.791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	74.460.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			22 Unit	46.067.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	46.067.760,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	14.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN						1.500.691.261,00							1.496.639.341,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.500.691.261,00							1.496.639.341,00	
	5.02	KEUANGAN						1.500.691.261,00							1.496.639.341,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.500.691.261,00						-	1.496.639.341,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	504.294.900,00			-	-	ASN	126 jenis	504.375.640,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.980.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	49.954.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	49.995.735,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	10.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	9.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.999.905,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	63 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	6.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	756 Laporan			147 Laporan	423.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	423.400.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			3 Jenis	908.662.361,00			-	-	ASN	63 jenis	904.063.701,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	2.700.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	102.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	97.942.020,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	803.420.361,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	803.421.681,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	87.734.000,00			-	-	ASN	63 jenis	88.200.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			2 Unit	46.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	46.880.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			21 Unit	25.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	26.320.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	14.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA						1.117.428.828,00							1.141.076.695,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.117.428.828,00							1.141.076.695,00	
	5.02	KEUANGAN						1.117.428.828,00							1.141.076.695,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.117.428.828,00						-	1.141.076.695,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	247.296.776,00			-	-	ASN	126 jenis	247.298.225,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	24.200.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	130.362.163,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	130.363.612,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	45.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.959.613,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.959.613,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	7.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			57 Laporan	30.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	30.275.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	744.834.052,00			-	-	ASN	63 jenis	784.608.470,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	4.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	389.748.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	428.722.941,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	351.885.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	351.885.529,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	125.298.000,00			-	-	ASN	63 jenis	109.170.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			1 Unit	49.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	33.560.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			83 Unit	60.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	60.610.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA						586.247.909,00							446.675.328,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						586.247.909,00							446.675.328,00	
	5.02	KEUANGAN						586.247.909,00							446.675.328,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	586.247.909,00						-	446.675.328,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	153.127.579,00			-	-	ASN	126 jenis	163.541.998,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	10.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	85.654.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	85.669.144,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	24.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	24.010.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	8.862.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	8.862.854,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	63 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	756 Laporan			37 Laporan	19.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	30.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			2 Jenis	93.128.730,00			-	-	ASN	63 jenis	93.128.730,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	88.128.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	88.128.730,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	189 jenis			2 Jenis	339.991.600,00			-	-	ASN	63 jenis	190.004.600,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			5 Unit	289.241.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	139.254.600,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			75 Unit	50.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	50.750.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI						1.409.230.094,00							1.251.180.564,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.409.230.094,00							1.251.180.564,00	
	5.02	KEUANGAN						1.409.230.094,00							1.251.180.564,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.409.230.094,00						-	1.251.180.564,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	417.000.295,00			-	-	ASN	126 jenis	413.807.240,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	11.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	8.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	83.040.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	83.042.480,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	23.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	23.030.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	10.374.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	10.374.760,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	24.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	24.550.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			46 Laporan	264.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	264.810.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	749.774.599,00			-	-	ASN	63 jenis	602.863.324,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	10.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	227.657.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	80.740.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	512.117.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	512.123.324,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	242.455.200,00			-	-	ASN	63 jenis	234.510.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			3 Unit	57.515.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	49.530.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			81 Unit	169.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	169.980.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN						1.475.268.372,00							1.485.766.743,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.475.268.372,00							1.485.766.743,00	
	5.02	KEUANGAN						1.475.268.372,00							1.485.766.743,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.475.268.372,00						-	1.485.766.743,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	508.840.144,00			-	-	ASN	126 jenis	509.171.184,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.980.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	74.768.239,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	74.769.279,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.982.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.999.905,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	6.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			41 Laporan	403.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	403.440.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	831.811.478,00			-	-	ASN	63 jenis	841.816.459,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	4.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	99.989.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	109.990.052,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	727.821.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	727.826.407,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	134.616.750,00			-	-	ASN	63 jenis	134.779.100,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			10 Unit	96.418.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	96.480.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			22 Unit	23.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	23.299.100,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	14.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API						688.230.658,00							680.610.064,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						688.230.658,00							680.610.064,00	
	5.02	KEUANGAN						688.230.658,00							680.610.064,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	688.230.658,00						-	680.610.064,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	276.549.157,00			-	-	ASN	126 jenis	276.806.343,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.487.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.491.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	59.583.447,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	59.586.633,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	7.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	7.700.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	8.998.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	8.998.710,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	4.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			20 Laporan	191.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	191.530.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	326.879.301,00			-	-	ASN	63 jenis	326.986.721,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	2.700.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	59.840.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	59.941.231,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	264.339.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	264.345.490,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	84.802.200,00			-	-	ASN	63 jenis	76.817.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			2 Unit	44.885.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	36.900.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			31 Unit	24.917.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	24.917.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA						689.639.169,00							682.073.866,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						689.639.169,00							682.073.866,00	
	5.02	KEUANGAN						689.639.169,00							682.073.866,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	689.639.169,00						-	682.073.866,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	290.018.058,00			-	-	ASN	126 jenis	290.020.844,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	5.600.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	51.231.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	51.234.404,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.982.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	10.459.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	10.459.440,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	4.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			46 Laporan	208.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	208.745.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	290.895.911,00			-	-	ASN	63 jenis	291.313.022,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	4.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	4.400.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	70.634.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	71.015.674,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	215.861.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	215.897.348,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	108.725.200,00			-	-	ASN	63 jenis	100.740.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			4 Unit	54.865.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	46.880.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			48 Unit	38.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	38.860.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI						1.181.417.589,00							1.169.896.977,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.181.417.589,00							1.169.896.977,00	
	5.02	KEUANGAN						1.181.417.589,00							1.169.896.977,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.181.417.589,00						-	1.169.896.977,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	341.266.104,00			-	-	ASN	126 jenis	341.326.104,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	44.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	44.985.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	70.001.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	70.001.834,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.900.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	14.599.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	14.599.270,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			43 Laporan	196.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	196.840.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	710.150.485,00			-	-	ASN	63 jenis	710.150.873,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	108.829.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	108.830.172,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	596.320.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	596.320.701,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	130.001.000,00			-	-	ASN	63 jenis	118.420.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			3 Unit	39.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	36.900.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			40 Unit	35.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	26.520.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	54.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	55.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN						1.366.414.398,00							1.361.948.317,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.366.414.398,00							1.361.948.317,00	
	5.02	KEUANGAN						1.366.414.398,00							1.361.948.317,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.366.414.398,00						-	1.361.948.317,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	513.746.748,00			-	-	ASN	126 jenis	513.747.071,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.040.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	65.013.781,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	65.014.104,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	5.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	5.934.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	18.998.967,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	18.998.967,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	2.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			53 Laporan	417.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	417.760.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	725.234.650,00			-	-	ASN	63 jenis	725.241.246,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	2.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	161.993.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	162.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	561.241.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	561.241.246,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	127.433.000,00			-	-	ASN	63 jenis	122.960.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			3 Unit	49.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	46.880.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			49 Unit	62.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	61.080.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG						802.148.424,00							724.560.688,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						802.148.424,00							724.560.688,00	
	5.02	KEUANGAN						802.148.424,00							724.560.688,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	802.148.424,00						-	724.560.688,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	339.888.509,00			-	-	ASN	126 jenis	339.888.560,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.989.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.989.672,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	38.521.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	38.521.303,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.200.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	8.697.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	8.697.585,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	1.800.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			38 Laporan	276.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	276.680.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	357.601.915,00			-	-	ASN	63 jenis	282.822.128,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	46.268.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	50.895.266,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	308.333.491,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	228.926.862,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	104.658.000,00			-	-	ASN	63 jenis	101.850.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			3 Unit	49.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	46.880.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			42 Unit	39.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	39.970.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU						697.867.962,00							695.764.690,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						697.867.962,00							695.764.690,00	
	5.02	KEUANGAN						697.867.962,00							695.764.690,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	697.867.962,00						-	695.764.690,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	246.727.366,00			-	-	ASN	126 jenis	247.117.831,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.900.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	32.702.461,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	32.707.926,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	11.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	11.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.999.905,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	4.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			26 Laporan	183.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	184.010.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	358.655.396,00			-	-	ASN	63 jenis	364.146.859,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	54.492.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	59.941.231,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	301.163.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	301.205.628,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	92.485.200,00			-	-	ASN	63 jenis	84.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			4 Unit	54.865.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	46.880.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			24 Unit	22.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	22.620.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI						1.345.621.311,00							1.339.277.373,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.345.621.311,00							1.339.277.373,00	
	5.02	KEUANGAN						1.345.621.311,00							1.339.277.373,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.345.621.311,00						-	1.339.277.373,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	440.666.661,00			-	-	ASN	126 jenis	440.666.970,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.780.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	89.887.501,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	89.887.810,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	13.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	13.800.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	12.349.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	12.349.160,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	6.500.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			38 Laporan	308.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	308.350.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	760.909.650,00			-	-	ASN	63 jenis	760.910.403,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	4.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	124.703.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	124.703.736,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	632.206.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	632.206.667,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	144.045.000,00			-	-	ASN	63 jenis	137.700.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			3 Unit	64.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	59.510.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			80 Unit	64.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	63.190.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG						1.176.442.731,00							1.184.833.870,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.176.442.731,00							1.184.833.870,00	
	5.02	KEUANGAN						1.176.442.731,00							1.184.833.870,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.176.442.731,00						-	1.184.833.870,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	306.239.899,00			-	-	ASN	126 jenis	306.254.277,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	7.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	7.020.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	70.959.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	70.964.372,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.200.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.999.905,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	4.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			45 Laporan	205.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	205.070.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	669.789.232,00			-	-	ASN	63 jenis	687.722.093,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	69.171.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	76.089.086,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	595.617.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	606.633.007,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			3 Jenis	200.413.600,00			-	-	ASN	63 jenis	190.857.500,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			9 Unit	93.756.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	83.990.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			57 Unit	91.857.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	91.867.500,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	14.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG						786.605.724,00							782.534.096,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						786.605.724,00							782.534.096,00	
	5.02	KEUANGAN						786.605.724,00							782.534.096,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	786.605.724,00						-	782.534.096,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	171.646.656,00			-	-	ASN	126 jenis	171.805.619,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	2.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	2.992.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	64.244.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	64.244.169,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.140.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	15.415.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	15.449.450,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			152 Laporan	79.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	79.980.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	189 jenis			3 Jenis	544.756.418,00			-	-	ASN	63 jenis	552.978.477,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	73.399.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	80.739.855,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	756 Laporan			12 Laporan	469.356.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	469.238.622,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	189 jenis			2 Jenis	70.202.650,00			-	-	ASN	63 jenis	57.750.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			2 Unit	49.697.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	37.230.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8709 Unit			32 Unit	20.505.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	20.520.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS						645.138.849,00							565.937.117,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						645.138.849,00							565.937.117,00	
	5.02	KEUANGAN						645.138.849,00							565.937.117,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	645.138.849,00						-	565.937.117,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	263.673.718,00			-	-	ASN	126 jenis	183.186.667,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.970.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	43.985.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	29.998.762,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.988.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.999.905,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	756 Laporan			17 Laporan	189.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	123.230.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			3 Jenis	293.906.731,00			-	-	ASN	63 jenis	297.890.450,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	39.812.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	43.793.376,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	251.094.571,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	251.097.074,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	189 jenis			3 Jenis	87.558.400,00			-	-	ASN	63 jenis	84.860.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit			3 Unit	49.681.400,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	46.880.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	8709 Unit			24 Unit	22.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	22.980.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit			1 Unit	14.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	17 Unit	15.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI						567.619.183,00							560.795.830,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						567.619.183,00							560.795.830,00	
	5.02	KEUANGAN						567.619.183,00							560.795.830,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	567.619.183,00						-	560.795.830,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	122.966.978,00			-	-	ASN	126 jenis	122.985.036,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	2.633.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	2.645.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	57.119.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	57.125.036,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	23.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	11.064.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	11.065.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	3.600.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						823.083.882,00							717.668.822,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	823.083.882,00						-	717.668.822,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	376 jenis			6 Jenis	249.850.996,00			-	-	ASN	126 jenis	249.961.270,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	4.867.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.867.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket			2 Paket	59.998.306,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	59.998.580,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.996.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	63 Paket			1 Paket	9.999.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.999.690,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Laporan			26 Laporan	159.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	160.100.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			3 Jenis	503.331.486,00			-	-	ASN	63 jenis	400.607.552,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	41.998.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	26.773.329,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	458.333.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	370.834.223,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	189 jenis			2 Jenis	69.901.400,00			-	-	ASN	63 jenis	67.100.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit			4 Unit	49.681.400,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	46.880.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	8709 Unit			20 Unit	20.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	20.220.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG
		UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM						503.454.304,00							498.672.406,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						503.454.304,00							498.672.406,00	
	5.02	KEUANGAN						503.454.304,00							498.672.406,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	503.454.304,00						-	498.672.406,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	376 jenis			6 Jenis	82.433.847,00			-	-	ASN	126 jenis	82.438.611,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	6.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	6.764.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	126 Paket			2 Paket	36.845.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	42 Paket	36.848.756,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	9.982.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	9.982.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	63 Paket			1 Paket	4.243.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Paket	4.243.855,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	63 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Dokumen	5.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	756 Laporan			41 Laporan	19.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	19.600.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	189 jenis			3 Jenis	350.975.502,00			-	-	ASN	63 jenis	354.970.240,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	63 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	21 Laporan	3.000.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	39.812.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	43.793.376,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	756 Laporan			12 Laporan	308.163.342,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	252 Laporan	308.176.864,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	189 jenis			2 Jenis	70.044.955,00			-	-	ASN	63 jenis	61.263.555,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit			4 Unit	49.681.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	20 Unit	40.900.000,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	8709 Unit			18 Unit	20.363.555,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2903 Unit	20.363.555,00	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						1.906.616.582.264,00							1.637.767.628.292,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.906.616.582.264,00							1.637.767.628.292,00	
	5.02	KEUANGAN						1.906.616.582.264,00							1.637.767.628.292,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100 Persen			100 Persen	29.437.572.042,00						100 Persen	32.943.913.624,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja</i>	3 Dokumen Dokumen			3 Dokumen	124.999.764,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	3 Dokumen Dokumen	130.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen Dokumen			3 Dokumen	124.999.764,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	3 Dokumen Dokumen	130.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100% Perse n			100 Persen	20.520.577.011,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100% Perse n	23.770.268.011,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/Bulan			136 Orang/Bulan	20.520.577.011,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola	-	136 Orang/Bulan	23.770.268.011,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan Laporan			2 Laporan	24.999.910,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Laporan Laporan	27.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan Laporan			2 Laporan	24.999.910,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Laporan Laporan	27.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Disiplin ASN	100% Perse n			100 Persen	100.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100% Perse n	100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Paket	100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100% Perse n			100 Persen	2.405.465.143,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100% Perse n	2.480.879.426,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	42.010.152,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Paket	42.142.426,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	754.996.423,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Paket	755.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	289.976.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Paket	289.988.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	740.790.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-		741.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit			50 Unit	194.800.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	50 Unit	194.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	399.959.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Unit	456.466.187,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	100 Persen			100 Persen	1.874.680.536.207,00						100 Persen	1.602.439.590.668,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	100% Perse n			100 Persen	3.241.473.045,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100% Perse n	2.801.399.536,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	24 Dokumen			12 Dokumen	122.939.770,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Dokumen	125.914.238,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen			2 Dokumen	182.496.910,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Dokumen	187.525.748,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen			22 Dokumen	58.720.475,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	22 Dokumen	58.720.550,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen			22 Dokumen	36.699.095,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	22 Dokumen	36.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen			22 Dokumen	34.930.935,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	22 Dokumen	34.939.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen			22 Dokumen	79.599.750,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	22 Dokumen	79.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen			10 Dokumen	1.048.386.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	10 Dokumen	780.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen			10 Dokumen	1.130.700.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	10 Dokumen	945.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen			2 Dokumen	166.999.875,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Dokumen	168.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	220 Orang			220 Orang	379.999.735,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	220 Orang	385.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% Persen			100 Persen	927.765.471,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100% Persen	853.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	24 Laporan			12 Laporan	332.969.775,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Laporan	333.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	12 Laporan			12 Laporan	234.969.815,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Laporan	235.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24 Laporan			12 Laporan	104.844.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Laporan	105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	2 Laporan			1 Laporan	34.999.881,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24 Dokumen			12 Dokumen	114.989.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	104.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	100% Perse n			100 Persen	2.382.680.988,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100% Perse n	902.106.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	1.634.249.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	228.659.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	28 Laporan			14 Laporan	184.996.080,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	14 Laporan	185.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	4 Dokumen			2 Dokumen	285.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Dokumen	285.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	149.993.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	104.993.160,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	132 Orang			33 Orang	124.999.640,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	33 Orang	125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	100% Perse n			100 Persen	1.866.978.635.447,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100% Perse n	1.596.733.084.782,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan			1 Laporan	561.940.280.420,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	361.989.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	50.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	1.255.038.355.027,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	1.184.743.584.782,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	100% Perse n			100 Persen	249.999.480,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100% Perse n	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	249.999.480,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola</i>	100 Persen			100 Persen	2.498.474.015,00						100 Persen	2.384.124.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	100% Perse n			100 Persen	2.498.474.015,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100% Perse n	2.384.124.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	277.072.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	277.116.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	124.860.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	194.974.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	195.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	14 Laporan			7 Laporan	224.999.760,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	7 Laporan	225.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	874.999.985,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan	875.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	274.956.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan	275.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	104.999.845,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan	105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	252.005.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Dokumen	102.008.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	4 Laporan			2 Laporan	74.937.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Laporan	110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	14 Laporan			7 Laporan	94.669.125,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	7 Laporan	95.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						34.198.305.447,00							35.864.610.922,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						34.198.305.447,00							35.864.610.922,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						34.198.305.447,00							35.864.610.922,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepegawaian</i>	100 Persen			100 Persen	22.753.387.689,00						100 Persen	26.928.610.922,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	15 Dokumen			7 Dokumen	183.183.022,00			-	Peningkata n Tata Kelola	BKD Provinsi Riau	8 Dokumen	218.325.562,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	15 Dokumen			7 Dokumen	183.183.022,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	BKD Provinsi Riau	8 Dokumen	218.325.562,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	2 Laporan			1 Laporan	16.650.877.478,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Laporan	20.375.185.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan			115 Orang/ Bulan	16.650.877.478,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	118 Orang/ Bulan	20.375.185.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	4 Laporan			4 Laporan	69.498.553,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Laporan	75.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			3 Dokumen	18.999.553,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	24.840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	50.499.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Laporan	50.760.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	4 Jenis			2 Jenis	147.095.087,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Jenis	171.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	98.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	96.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			1 Dokumen	49.095.087,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	14 Jenis			7 Jenis	1.766.121.422,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	7 Jenis	1.587.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	78.944.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	102.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket			6 Paket	479.995.426,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	4 Paket	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	160.167.316,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	32.659.532,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	899.899.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Laporan	650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	114.455.568,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	4 Jenis			2 Jenis	499.996.352,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Jenis	410.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Paket			2 Paket	178.364.352,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	3 Paket	180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit			37 Unit	321.632.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	3 Unit	230.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	4 Jenis			2 Jenis	2.655.505.775,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Jenis	3.378.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	739.914.159,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	12 Laporan	824.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	1.915.591.616,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	12 Laporan	2.554.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Jenis			5 Jenis	781.110.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	5 Jenis	712.170.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			1 Unit	41.730.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Unit	41.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit			14 Unit	342.940.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	14 Unit	342.940.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	198 Unit			60 Unit	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	100 Unit	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	291 Unit			212 Unit	186.330.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	150 Unit	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	180.110.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Unit	97.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen			100 Persen	11.444.917.758,00						100 Persen	8.936.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen			100 Persen	2.504.255.010,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	100 Persen	1.981.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen			1 Dokumen	34.876.801,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen			1 Dokumen	728.738.829,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Dokumen	611.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	495.129.345,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	2 Dokumen	330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>	2 Lembaga			1 Lembaga	685.510.577,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Lembaga	600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	9 Dokumen			4 Dokumen	344.999.786,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	5 Dokumen	275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9 Dokumen			4 Dokumen	214.999.672,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	5 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	100 Persen			100 Persen	1.214.711.663,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	100 Persen	1.116.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	355.768.062,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	1 Dokumen	311.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan			1 Laporan	466.511.579,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	1 Laporan	410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			1 Dokumen	392.432.022,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	1 Dokumen	395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen			100 Persen	6.213.923.138,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	100 Persen	4.587.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	828.676.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	70.888.005,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	2.394.186.930,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen			1 Dokumen	865.462.244,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	14 Orang			7 Orang	894.992.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	7 Orang	550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	110 Orang			55 Orang	770.133.358,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	55 Orang	665.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	150 Orang			50 Orang	144.312.347,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	100 Orang	142.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2 Dokumen			1 Dokumen	245.270.764,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	100 Persen			100 Persen	1.512.027.947,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	100 Persen	1.251.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	99.980.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Dokumen	89.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>	40 Orang			20 Orang	857.434.406,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	20 Orang	550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>	2000 Orang			1000 Orang	95.735.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1000 Orang	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160 Orang			80 Orang	223.980.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	80 Orang	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan			1 Laporan	199.999.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	60 Dokumen			30 Dokumen	34.897.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	30 Dokumen	112.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA						36.901.339.068,00							38.188.029.385,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						36.901.339.068,00							38.188.029.385,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						36.901.339.068,00							38.188.029.385,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	100 Persen			100 Persen	29.182.711.331,00						100 Persen	32.170.386.885,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	2 dokumen 2 Dokumen			1 dokumen	50.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi</i>	114 Orang 2 laporan			1 laporan	18.290.652.894,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	114 Orang 1 laporan	22.306.215.811,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	220 Orang/ Bulan			126 Orang/ Bulan	18.290.652.894,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	114 Orang/ Bulan	22.306.215.811,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	2 laporan 2 laporan			1 laporan	19.999.717,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 laporan 1 laporan	20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	19.999.717,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>	2 jenis 1 jenis			1 jenis	84.700.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 jenis 1 jenis	90.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket			1 Paket	84.700.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	90.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	6 jenis 12 jenis			6 jenis	1.515.324.242,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	6 jenis 6 jenis	1.521.861.077,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket			2 Paket	109.233.590,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	110.347.775,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket			3 Paket	264.140.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	274.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	22 Paket			10 Paket	352.656.189,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	385.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket			3 Paket	84.904.343,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	86.808.302,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	4 Paket			2 Paket	107.817.120,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	60.205.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	596.573.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	605.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	8 Jenis Barang 4 Jenis Barang			4 Jenis Barang	5.951.155.202,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	4 Jenis Barang 4 Jenis Barang	5.121.948.919,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	8 Paket			3 Paket	652.986.696,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	230.468.635,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit			90 Unit	243.652.006,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	77.208.428,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit			1 Unit	4.519.083.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	4.269.271.856,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit			4 Unit	535.433.500,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	545.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	6 jenis 3 Jenis			3 Jenis	1.999.168.622,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	3 jenis 3 Jenis	1.980.551.753,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	2.275.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	3.600.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			2 Laporan	463.019.448,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	389.491.886,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			2 Laporan	1.533.874.174,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	1.587.459.867,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7 Jenis Barang 14 Jenis Barang			7 Jenis Barang	1.271.710.654,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	7 Jenis Barang 7 Jenis Barang	1.079.309.325,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit			6 Unit	218.530.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	6 Unit	273.171.600,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			1 Unit	37.060.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	42.560.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit			120 Unit	56.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	30 Unit	65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	842 Unit			323 Unit	191.619.750,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	450 Unit	112.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	180.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	170.120.678,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	420.113.623,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	265.609.623,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	168.387.281,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	150.847.424,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN Yang Mengikuti Pelatihan	98 Persen			98 Persen	7.718.627.737,00						98 Persen	6.017.642.500,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	2065 Orang 1025 Orang			1540 Orang	3.536.289.595,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1025 Orang 1025 Orang	2.429.625.507,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	119.016.766,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	121.016.982,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	60.849.118,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	65.662.215,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2065 Orang			1540 Orang	3.193.146.246,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1025 Orang	2.123.798.060,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen			1 Dokumen	163.277.465,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	119.148.250,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	80 nilai 80 Nilai			80 nilai	3.897.365.678,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	80 nilai 80 Nilai	3.268.016.993,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen			1 Dokumen	65.036.106,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	69.174.664,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	2 Dokumen			1 Dokumen	45.410.913,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	47.540.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	140 Orang			50 Orang	137.438.260,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	80 Orang	190.414.541,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	6 Laporan			3 Laporan	740.223.137,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	780.068.206,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	2 Dokumen			1 Dokumen	105.998.824,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	108.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	62.677.118,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	70.662.215,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	970 Orang			1200 Orang	2.577.495.811,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	300 Orang	1.880.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Dokumen			1 Dokumen	163.085.509,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	122.157.367,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Neger	70 Orang 130 Orang			60 Orang	284.972.464,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	70 Orang 70 Orang	320.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	62 Orang			30 Orang	99.972.696,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	32 Orang	110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	68 Orang			30 Orang	114.999.770,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	38 Orang	135.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	69.999.998,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						14.172.022.128,00							14.604.394.970,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.436.015.200,00							2.539.617.300,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.436.015.200,00							2.539.617.300,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 Persen			100 Persen	2.436.015.200,00						100 Persen	2.539.617.300,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan/ Dokumen/ Rekomendasi Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengolahan Data Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 laporan			3 laporan	519.457.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	3 laporan	556.403.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	2 Dokumen			1 Dokumen	176.424.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	194.066.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan			1 Laporan	193.033.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Laporan	212.337.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	6 dokumen			3 dokumen	550.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	3 dokumen	460.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	8 dokumen			4 dokumen	800.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	4 dokumen	900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	2 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	11 laporan 4 laporan			2 laporan	566.558.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Provinsi Riau	5 laporan 2 laporan	623.214.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan			1 Laporan	284.211.200,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Provinsi Riau	1 Laporan	312.632.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	2 Laporan			1 Laporan	282.347.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Provinsi Riau	1 Laporan	310.582.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X	NON URUSAN						11.736.006.928,00							12.064.777.670,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						11.736.006.928,00							12.064.777.670,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Riset dan Inovasi Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	11.736.006.928,00						100 Persen	12.064.777.670,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	149.999.540,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 Persen	150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			3 Dokumen	99.999.590,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	49.999.950,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	2 Laporan	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	100 persen			100 persen	7.805.932.908,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 persen	8.957.222.314,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan			50 Orang/ Bulan	7.805.932.908,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	50 Orang/ Bulan	8.957.222.314,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan displin pegawai Perangkat Daerah	100 Persen 100 persen			100 Persen	39.952.935,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 persen	28.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			1 Paket	39.952.935,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	2 Paket	28.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen 100 persen			100 persen	863.123.569,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 persen 100 persen	925.400.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			1 Paket	25.747.035,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	20 Paket	26.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86 Paket			1 Paket	249.999.782,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	43 Paket	260.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket			1 Paket	34.999.752,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	12 Paket	37.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan			1 Laporan	552.377.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	3 Laporan	602.400.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen 100 persen			100 persen	1.263.703.559,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 persen 100 persen	348.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket			5 Paket	445.941.925,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	7 Paket	154.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	196 Unit			71 Unit	817.761.634,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	98 Unit	194.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen 100 persen			100 persen	908.450.138,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 persen 100 persen	950.932.356,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	16.775.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	1 Laporan	18.452.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	311.519.188,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	2 Laporan	342.672.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	580.155.950,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	1 Laporan	589.807.856,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 persen 100 persen			100 persen	704.844.279,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 persen 100 persen	705.223.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit			2 Unit	85.550.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	2 Unit	85.569.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			2 Unit	82.650.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	2 Unit	82.654.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit			100 Unit	29.980.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	100 Unit	30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	146 Unit			100 Unit	60.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	73 Unit	60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	214.823.766,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau	2 Unit	215.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 Persen			100 Persen	665.998.992,00						100 Persen	606.000.000,00	
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	11 laporan 4 laporan			6 laporan	665.998.992,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Provinsi Riau	5 laporan 2 laporan	606.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen			2 Dokumen	209.999.392,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	Provinsi Riau	1 Dokumen	150.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Riset dan Inovasi Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	3.463.217.622,00						100 Persen	3.177.462.860,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	100 persen 100 persen			100 persen	375.073.772,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	100 persen 100 persen	375.100.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	40 Paket			15 Paket	14.992.645,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	20 Paket	15.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86 Paket			35 Paket	84.999.973,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	43 Paket	85.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket			12 Paket	54.997.281,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	12 Paket	55.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	38 Paket			15 Paket	42.490.873,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	19 Paket	42.500.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan			3 Laporan	177.593.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	3 Laporan	177.600.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen 100 persen			100 persen	761.691.604,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	100 persen 100 persen	1.150.642.860,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket			7 Paket	199.992.714,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	7 Paket	200.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	196 Unit			23 Unit	371.698.890,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	98 Unit	750.642.860,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	190.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	1 Unit	200.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen 100 persen			100 persen	1.071.714.246,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	100 persen 100 persen	1.071.720.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			2 Laporan	231.720.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	2 Laporan	231.720.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	839.994.246,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	1 Laporan	840.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	100 persen 100 persen			100 persen	1.254.738.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	100 persen 100 persen	580.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	146 Unit			94 Unit	124.950.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	73 Unit	125.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	169.938.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola	UPT Science Techno Park	2 Unit	170.000.000,00	UPT. SCIENCE TECHNO PARK
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	20 Orang			10 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN pada Badan Penghubung	10 Orang	60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	16 Jenis 16 jenis 16 Jenis			8 jenis	2.507.441.736,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	8 Jenis 8 jenis 8 Jenis	2.330.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket			1 Paket	61.449.760,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	3 Paket	70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket			3 Paket	406.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	4 Paket	160.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	8 Paket			6 Paket	79.997.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	4 Paket	85.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			5 Paket	449.999.683,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	5 Paket	450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket			2 Paket	99.999.357,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	3 Paket	100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	2 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan			1 Laporan	1.099.995.336,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	1 Laporan	1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	2 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis			3 Jenis	1.082.194.605,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan aset pada Badan Penghubung	3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis	1.220.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			4 Paket	537.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan aset pada Badan Penghubung	5 Paket	570.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	106 Unit			19 Unit	258.984.605,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan aset pada Badan Penghubung	56 Unit	550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			28 Unit	286.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan aset pada Badan Penghubung	5 Unit	100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis			3 Jenis	3.204.891.861,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis	3.236.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	16.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	1 Laporan	16.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	649.999.796,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	1 Laporan	670.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	2.538.892.065,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN, THL dan Stakeholder pada Badan Penghubung	1 Laporan	2.550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis			6 Jenis	6.434.257.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Bangunan dan Aset lainnya pada Badan Penghubung	6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis	5.645.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit			6 Unit	724.991.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Bangunan dan Aset lainnya pada Badan Penghubung	6 Unit	750.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit			23 Unit	1.250.007.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Bangunan dan Aset lainnya pada Badan Penghubung	23 Unit	1.275.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 Unit			24 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Bangunan dan Aset lainnya pada Badan Penghubung	24 Unit	60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	325 Unit			160 Unit	159.170.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Bangunan dan Aset lainnya pada Badan Penghubung	165 Unit	160.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			8 Unit	4.150.088.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Bangunan dan Aset lainnya pada Badan Penghubung	9 Unit	3.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Bangunan dan Aset lainnya pada Badan Penghubung	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Presentase Layanan Terhadap Stakeholder	100 Persen			100 Persen	3.261.778.610,00						100 Persen	3.305.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan Jumlah Jenis layanan terhadap stakeholder	246 Jenis 22 Kali			11 Kali 121 Jenis	3.261.778.610,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan seluruh Stakeholder pada Badan Penghubung	125 Jenis 11 Kali	3.305.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	16 Laporan			8 Laporan	886.120.463,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan seluruh Stakeholder pada Badan Penghubung	8 Laporan	1.180.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat</i>	8 Laporan			4 Laporan	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan seluruh Stakeholder pada Badan Penghubung	4 Laporan	975.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan</i>	8 Laporan			4 Laporan	1.000.658.147,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan seluruh Stakeholder pada Badan Penghubung	4 Laporan	950.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>	8 Laporan			4 Laporan	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN, THL dan seluruh Stakeholder pada Badan Penghubung	4 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
		INSPEKTORAT							47.342.292.662,00							56.191.704.038,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						47.342.292.662,00							56.191.704.038,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						47.342.292.662,00							56.191.704.038,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pengawasan Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pengawasan</i>	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	33.589.487.677,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	43.038.704.038,00		
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Persen 100 Persen 100 Persen 4 Dokumen			100 Persen 4 Dokumen	187.491.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen 100 Persen 4 Dokumen	130.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	187.491.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	4 Dokumen	130.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	1 Laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 1 Laporan	26.416.358.829,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	1 Laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen	36.885.050.218,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/ Bulan			155 Orang/ Bulan	26.416.358.829,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	160 Orang/ Bulan	36.885.050.218,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	100 Persen 2 Layanan 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen 2 Layanan	1.382.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 2 Layanan 100 Persen 100 Persen	914.010.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			148 Paket	112.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	2 Paket	210.510.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang			77 Orang	1.270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	78 Orang	703.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Layanan 100 Persen 100 Persen			100 Persen 6 Layanan	2.064.333.590,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	6 Layanan 100 Persen 100 Persen	2.112.153.820,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket			30 Paket	99.999.052,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	35 Paket	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket			10 Paket	299.400.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	11 Paket	130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	565.087.703,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	3 Paket	700.653.820,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	62 Paket			60 Paket	299.999.835,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	62 Paket	301.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan			50 Laporan	699.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	52 Laporan	710.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen			7 Dokumen	99.995.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	10 Dokumen	160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen 100 Persen 2 Jenis 100 Persen			-	449.382.218,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen 2 Jenis 100 Persen	335.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	149.519.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	2 Unit	170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	299.863.218,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	2 Unit	165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 3 Jenis	1.729.972.040,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	3 Jenis 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.712.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	1 Laporan	6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	425.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	1 Laporan	400.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	1.299.972.040,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	1 Laporan	1.306.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	100 Persen 100 Persen 100 Persen 3 Jenis			100 Persen 3 Jenis 100 Persen 2 Jenis	1.359.950.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen 100 Persen 3 Jenis	949.990.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	14 Unit			14 Unit	399.990.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	14 Unit	399.990.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	78 Unit			75 Unit	309.960.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	78 Unit	320.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			3 Unit	650.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	1 Unit	230.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Yang terselesaikan Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang terselesaikan</i>	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	10.212.832.201,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	9.538.000.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	9.212.839.801,00			-	Peningkata n Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	8.518.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	80 Laporan			75 Laporan	699.989.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	80 Laporan	705.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	415 Laporan			400 Laporan	7.807.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	415 Laporan	7.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan			3 Laporan	129.988.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	3 Laporan	132.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan			1 Laporan	74.990.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	1 Laporan	76.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen			4 Dokumen	499.977.801,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	4 Dokumen	505.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	999.992.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.020.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan			20 Laporan	999.992.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	25 Laporan	1.020.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase laporan hasil evaluasi Persentase Laporan Hasil Evaluasi Persentase OPD Yang Difasilitasi Persentase OPD yang difasilitasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.539.972.784,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.615.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	199.999.414,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	230.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi			2 Rekomendasi	199.999.414,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	2 Rekomendasi	230.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan yang di fasilitasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	3.339.973.370,00			-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.385.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah	749.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	36 Perangkat Daerah	765.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	36 Perangkat Daerah	510.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan			2 Kegiatan	899.999.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	2 Kegiatan	910.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah			5 Perangkat Daerah	1.190.009.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	6 Perangkat Daerah	1.200.000.000,00	INSPEKTORAT	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						46.873.886.283,00							46.477.059.212,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						46.873.886.283,00							46.477.059.212,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						46.873.886.283,00							46.477.059.212,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen			100 Persen	15.470.006.703,00						100 Persen	17.980.017.559,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen 7 Dokumen 14 Dokumen			7 Dokumen	513.068.621,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/ Kota	7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen	462.678.307,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen			7 Dokumen	513.068.621,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/ Kota	7 Dokumen	462.678.307,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	2 Laporan 4 Laporan 2 Laporan			1 Laporan	9.737.835.174,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan 4 Laporan 1 Laporan	12.299.677.924,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan			85 Orang/ Bulan	9.737.835.174,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	70 Orang/ Bulan	12.299.677.924,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan			2 Laporan	199.996.807,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	59.998.834,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan			6 Laporan	139.997.973,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	6 Laporan	140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>	4 Jenis 4 Jenis 2 Jenis			2 Jenis	149.999.356,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	4 Paket			2 Paket	125.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	24.999.356,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	9 Jenis 18 Jenis 18 Jenis			9 Jenis	1.609.036.875,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis	1.528.995.483,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	19.989.236,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	19.991.749,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket			7 Paket	319.609.686,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	7 Paket	319.657.234,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	49.993.681,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	199.995.347,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	54.999.185,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	9.999.388,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			1 Laporan	74.998.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan			110 Laporan	829.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	96 Laporan	729.346.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen			10 Dokumen	49.996.352,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	10 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12 Jenis 6 Jenis 12 Jenis			6 Jenis	833.140.646,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis	833.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			5 Paket	63.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	63.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	49.958.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	19.982.646,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	40 Unit			20 Unit	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	20 Unit	350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit			2 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	4 Jenis 8 Jenis 8 Jenis			4 Jenis	1.505.849.224,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis	1.637.755.845,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1000 Laporan			500 Laporan	9.998.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	500 Laporan	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			2 Laporan	359.998.552,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	35.855.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	35.892.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan			11 Laporan	1.099.997.672,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	11 Laporan	1.231.863.845,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	16 Jenis 16 Jenis 8 Jenis			8 Jenis	921.080.000,00			-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis	882.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit			6 Unit	257.060.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	6 Unit	218.830.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit			15 Unit	86.040.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	15 Unit	85.880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit			5 Unit	8.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			4 Unit	19.980.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	80,00 Persen			80,00 Persen	6.460.803.499,00						80,00 Persen	6.823.630.402,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	6.460.803.499,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	100 Persen 100 Persen	6.823.630.402,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	7.999.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	4.999.825,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang			250 Orang	2.162.761.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	250 Orang	2.175.587.239,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	160 Orang			80 Orang	117.962.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	80 Orang	117.962.799,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	2 Laporan			1 Laporan	180.539.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1 Laporan	180.539.894,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	169.529.329,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1 Dokumen	169.529.333,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			<i>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>	72 Orang			36 Orang	30.161.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	36 Orang	30.161.276,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	4.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1 Dokumen	4.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	1.080.859.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1 Dokumen	1.080.860.157,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			<i>Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	25.310.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1` Dokumen	25.310.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	26.079.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	1 Dokumen	26.079.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			<i>Jumlah Paskibraka</i>	72 Orang			36 Orang	2.649.999.981,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN, Tokoh Masyarakat, Ormas, FPK, Instansi Terkait, Pelajar dan Mahasiswa	36 Orang	3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik</i>	3,29 Poin			3,29 Poin	17.508.864.492,00						3,29 Poin	15.198.319.640,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	17.508.864.492,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)	100 Persen 100 Persen	15.198.319.640,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	13.095.832,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)	1 Dokumen	13.095.840,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	15.405.477,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)	1 Dokumen	15.405.514,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	800 Orang			400 Orang	17.097.574.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)	400 Orang	14.797.839.536,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang			300 Orang	195.241.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)	300 Orang	184.431.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan			1 Laporan	187.547.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)	1 Laporan	187.547.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Yang Berfungsi Sesuai Regulasi	75,50 Persen			75,50 Persen	906.322.272,00						75,50 Persen	467.510.999,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	906.322.272,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas., LSM dan Instansi Terkait	100 Persen 100 Persen	467.510.999,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	7.999.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas,, LSM dan Instansi Terkait	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	7.999.807,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas,, LSM dan Instansi Terkait	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang			100 Orang	113.200.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas,, LSM dan Instansi Terkait	100 Orang	113.200.749,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang			500 Orang	651.225.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas,, LSM dan Instansi Terkait	50 Orang	212.412.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan			1 Laporan	125.896.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas,, LSM dan Instansi Terkait	1 Laporan	125.898.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,25 Poin 3,20 Poin			3,15 Poin 3,00 Poin	2.524.962.283,00						3,25 Poin 3,20 Poin	2.555.896.550,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen			100 Persen	2.524.962.283,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar	100 Persen	2.555.896.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	37.373.399,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar	1 Dokumen	37.373.690,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	279.136.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar	1 Dokumen	329.136.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang			100 Orang	2.019.070.114,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar	100 Orang	2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang			50 Orang	76.265.179,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar	50 Orang	76.269.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	5.070.488,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing	1 Dokumen	5.070.646,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	600 Orang			300 Orang	1.075.934.063,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing	300 Orang	874.690.468,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang			200 Orang	770.242.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing	200 Orang	420.242.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan			2 Laporan	280.938.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing	6 Laporan	280.938.229,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2 Dokumen			1 Dokumen	1.865.741.917,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing	1 Dokumen	1.865.742.069,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							10.342.843.605.411,00							9.160.147.918.738,00	

Tabel 6.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan Dan Sub Perangkat Daerah Provinsi Riau

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	2,766,940,142,122	26.75%
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1,352,438,181,878	13.08%
1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1,933,630,356,242	18.70%
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	55,267,377,118	0.53%
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA	20,494,005,513	0.20%
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	92,965,797,698	0.90%
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	58,899,270,299	0.57%
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24,013,795,883	0.23%
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	151,103,937,451	1.46%
2.11.3.28.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	131,842,751,509	1.27%
2.13.2.12.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28,529,449,278	0.28%
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	67,863,637,498	0.66%
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	58,151,322,272	0.56%
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26,351,620,361	0.25%
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150,565,894,094	1.46%
2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	41,118,573,687	0.40%

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30,466,230,861	0.29%
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	48,103,401,204	0.47%
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	50,030,613,577	0.48%
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN	41,777,515,097	0.40%
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	65,507,254,658	0.63%
3.29.0.00.0.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	64,757,045,953	0.63%
3.31.3.30.2.17.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	64,680,144,030	0.63%
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	371,225,780,715	3.59%
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	255,007,973,173	2.47%
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	51,713,636,010	0.50%
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	222,955,244,250	2.16%
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,906,616,582,264	18.43%
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34,198,305,447	0.33%
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	36,901,339,068	0.36%
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	18,301,238,742	0.18%
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	26,209,008,514	0.25%
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	47,342,292,662	0.46%
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46,873,886,283	0.45%
JUMLAH		10,342,843,605,411	

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026. RKPD ini menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Dalam rangka memberikan gambaran target pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, telah disusun indikator kinerja daerah sesuai dengan aspek dan bidang urusan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian target kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian rencana pembangunan jangka pendek, yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang.

Target pencapaian kinerja, yang terdiri dari indikator-indikator makro daerah dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah tersebut sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau tahun 2025 - 2026, disajikan pada Tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tabel 7.2 tentang Target Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2025.

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Riau

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator	Realisasi dan Target Kinerja Pembangunan				
				Realisasi			Target	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas Sdm	1. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	89,76	90,07	90,47	92,63	100
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	83,64	84,06	84,58	91,22	100
		2. Meningkatnya akses ketenaga listrik	Rasio Elektrifikasi	92,54	94,93	94,98	92,81	95,68
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,19	9,22	9,32	9,35 – 9,40	9,5
			Harapan lama sekolah (tahun)	13,28	13,29	13,30	13,44-13,60	13,54
		Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	66,67	74,32	71,6	76,92	77,11
		Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup (tahun)	71,67	71,95	72,24	71,81-71,89	74,56
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,48	0,47	0,46	-	0,37
2	Peningkatan Tata Kelola	1. Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	1. Nilai survey penilaian integras (persen)	66,1	64,16	64,16*	-	66,07

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator	Realisasi dan Target Kinerja Pembangunan				
				Realisasi			Target	
				2021	2022	2023	2024	2025
			2. Nilai survey indeks berakhlak (persen)	-	60,90	60,90*	-	60,90
			3. Nilai survey kepuasan masyarakat (persen)	-	72,62	87,20	92,03	86,15
		2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang	1. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	2,55	3,01	3,01	3,56	3,06
			2. capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	68,67	70,51	70,51	71,80	73,03
			3. capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Pertahun (Persen)	16,31	1,21	1,21	0,69	1,79
		1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	70,72	72,10	72,10*	70,72	72,41
		2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	165,09	1,48	17,90*	1,10	17,94
4	Penguatan Ekonomi	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan (poin)	66,84	67,59	68,68	71,12	72,37

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator	Realisasi dan Target Kinerja Pembangunan				
				Realisasi			Target	
				2021	2022	2023	2024	2025
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	284.013	163,04	163,04*	350.582-361.978	188,62
		Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	129,85	151,25	154,52	-	160,97
			2. Gini Rasio (poin)	0,327	0,313*	0,324	0,360-0,374	0,303
			3. Nilai tukar petani (poin)	152,18	144,28	156,26	157,79	167,52
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks desa membangun (Poin)	6,3	0,7011	11,3	13,8	0,8289
			Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,42	4,37	4,23	4,16-3,94	4,05
		1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (miliar rupiah)	1950,47	25.764,43	25.764,43	1.811,08	26.947,14
		2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	20,50	27,27	27,27*	45,45	54,54

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator	Realisasi dan Target Kinerja Pembangunan				
				Realisasi			Target	
				2021	2022	2023	2024	2025
		3. Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	22,31	25,39	25,39	-	47,69
			2. Nilai warisan Budaya (nilai)	47,47	51,75	51,75	-	57,40

Tabel 7.2.
Target Capaian Kinerja Provinsi Riau Tahun 2022-2025

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
			2022	2023	2024	2025
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU					
	Rata - Rata Lama Sekolah >25	Tahun	9,24 – 9,30	9,29 – 9,35	9,35 - 9,40	9,5
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37 -13,47	13,44 - 13,53	13,44 - 13,60	13,54
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat	Persen	90,4	91,9	92,4	90,99
	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat	Persen	66,36	67,88	68	67,55
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0,74	0,73	0,7	85
	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Berakreditasi A	Persen	94,12	94,52	94,92	42,88
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun (APS)	APS	86,38	86,88	87,38	77,4
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	APS	-	-	-	20,37
	Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	Persen	86,38	86,88	87,38	79
	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	80	85	90	95
	Rasio Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	Poin	-	65	70	75

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Mengajukan Perizinan Terlayani	Persen	-	100	100	100
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU						
		Usia Harapan Hidup	Tahun	71,79	71,91	72,03	74,56
		Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	≤ 2	≤ 2	≤ 2	3,3
		Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	≤ 5	≤ 5	≤ 5	2,6
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	≤ 2	≤ 2	≤ 2	79
		Prevalensi Stunting	Persen	18,4	16	14	12,38
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan RSJ Tampan	Persen	88	89	90	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD Arifin Achmad	Persen	83	84	85	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD Petala Bumi	Persen	92	93	94	95
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	Persen	96	97	98	18
		Persentase Pencapaian Universal Health Coverage	Persen	96	97	98	98
		Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	Jiwa	750.000	800.000	850.000	3.100.000

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	Persen	55	70	85	86
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per1000 Penduduk	1,26	1,27	1,28	1,26
		Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	75	78	80	76
		Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes Dan Makan Minuman Yang Memenuhi Standar	Persen	91	92	93	93
		Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Persen	42	58	83	100
		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	65	70	75	76
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU						
		Rata-rata capaian sasaran infrastruktur	Persen	38,11	52,22	66,42	58,2
		Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	63,46	64,2	66,23	69,27
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Persen	5,74	6,29	6,63	45,21
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	-	-	-	45,21
		Persentase kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang terdistribusi	Persen	39,97	68,35	100	100
		Rasio Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi	Persen	31,91	33,46	35	33,46
		Persentase kesesuaian peruntukan ruang	Persen	-	-	-	100
		Persentase bangunan gedung dan kawasan strategis Provinsi yang berfungsi baik	Persen	-	-	-	100
		Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	63,46	64,85	66,23	69,27

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan	Liter/Detik	-	-	-	440
		Persentase Penyediaan Sarana Persampahan Regional	Persen	-	-	-	100
		Persentase Penyediaan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	-	-	-	100
		Persentase Penyediaan Sarana Drainase	Persen	-	-	-	100
		Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air	Ha	11.843,25	12.880,11	13.943,21	13.953,47
		Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Persen	-	-	-	45,21
		Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	Persen	-	-	-	33,46
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Yang Dibangun Dan Dipelihara	Persen	64	75	100	100
		Persentase Kawasan Strategis Yang Ditata	Persen	22	83	100	100
		Persentase Urusan Penataan ruang Yang Terfasilitasi	Persen	-	-	-	100
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU						
		Rata-rata target capaian layanan infrastruktur	Persen				58,2
		Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU	Persen	42,73	65,45	88,18	100
		Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh provinsi	Persen	33,29	41,3	49,34	61,86
		Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani	Ha	82,98	103	123	166,21
		Persentase Pemenuhan RLH Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah	Persen	100	100	100	100
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	-	-	-	16

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
					2022	2023	2024	2025
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU							
	Tingkat Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Poin	100	100	100	100
		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Poin	100	100	100	100
			Persentase Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN							
	Indeks Ketahanan Daerah			Poin	-	-	-	0.61
		Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah		Persen	100	100	100	100
			Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	100
			Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	-	-	-	100
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU							
	Persentase masyarakat (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya			Persen	2,45	2,65	2,75	8,52
		Persentase PPKS yang meningkat keberfungsian sosialnya		Persen	2,45	2,65	2,75	8,52
		Persentase PSKS Profesional		Persen	-	-	-	84,62
			Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Persen	18	18	18	50
			Persentase PUB Dan UGB Yang Diselenggarakan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
			Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	100	100

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti	Persen	100	100	100	100
		Persentase PPKS Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100
		Persentase TMPN Yang Dipelihara Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU						
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,63	65,81	66	66,19
		Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	94,05	94,23	94,58	96
		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	18	19	20	40
		Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	Persen	96	97	98	98
		Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi	Persen	-	20	30	24
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Jiwa	-	-	-	161,32
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	25	40	45	45
		Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	10	15	20	12
		Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	Persen	20	30	50	40
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU						
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Indeks	-	-	0,46	0,37
		Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	Persen	60	64	100	100
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Per 100.000 Wanita Usia > 18 Tahun	10,48	10,28	10,08	10,07
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Indeks	70,26	72,17	74,01	65
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	15	20	25	10
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	80	90	90	100
		Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	-	-	-	82,13
		Jumlah Dokumen Data Gender Dan Anak Di Provinsi Riau	Dokumen	1	1	1	1
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Capaian Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak	Persen	83,33	83,33	91,6	50,77
		Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	78	80	85	100
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU						
	Indeks Ketahanan Pangan		Poin	67,62	69,37	71,12	72,37
		Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persen	5	5	5	5
	Persentase Wilayah Rentan Pangan		Persen	25,44	23,07	21,30	6.39
	Skor PPH Ketersediaan		Poin	89,80	92,50	96	92.00
		Skor PPH Konsumsi	Poin	89,7	92,3	95	90,29
		Penurunan Wilayah Rawan Pangan	Kecamatan	42	39	36	11

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Pengawasan Dan Keamanan Pangan Segar	Persen	75	80	85	80
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU						
		Rata-rata target capaian layanan infrastruktur	Persen	38,11	52,22	66,42	58,2
		Persentase Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persen	55	60	65	100
		Persentase Penatausahaan Pertanahan	Persen	100	100	100	100
		Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan Lintas Kabupaten/Kota Yang Termediasi	Persen	100	100	100	100
		Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Terasilitasi	Persen	100	100	100	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,10	70,41	70,72	72,41
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	1,52	1,10	1,10	17,94
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,10	70,41	70,72	72,41
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	1,52	1,10	1,10	17,94
		Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan	Persen	-	-	100	100
		Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	17,86
		Persentase Pembangunan Tanaman Kehati Provinsi	Persen	-	-	-	10
		Persentase Limbah B3 Yang Dikelola	Persen	0,06	0,06	0,06	100
		Persentase Pengawasan Izin Lingkungan	Persen	-	-	-	10
		Persentase Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Persen	-	-	-	100

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari LH/Pameran LH	Persen	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Penilaian Kota Bersih di Provinsi Riau	Persen	-	-	-	100
		Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	100	100	100	100
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persen	26	27	28	30
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU						
		Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	Poin	8,9	11,3	13,8	40,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	82	83	86,5
		Persentase LKD Aktif	Persen	-	-	-	50
		Persentase IKM Kabupaten/kota Sangat Baik Terkait Pendaftaran Penduduk	Persen	25	33,33	50	58,3
		Persentase IKM Kabupaten/kota Sangat Baik Terkait Pencatatan Sipil	Persen	-	33,33	41,66	50
		Persentase Perangkat Daerah Pengguna Data Base Kependudukan	Persen	12,5	31,25	50	31,25
		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU						
		Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	Poin	8,9	11,3	13,8	40,8
		Persentase LKD Aktif	Persen	-	-	-	50
		Persentase Desa Cepat Berkembang	Persen	30	40	50	63
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	Persen	-	-	-	45

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Penataan Desa / Desa Adat Yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100
		Persentase Fasilitas Kerja Sama	Persen	-	-	-	100
		Persentase Desa Kurang Berkembang	Persen	-	-	-	1,8
		Persentase Partisipasi LKD Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Persen	45	50	55	50
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU						
		Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	2,21	2,19	2,1	2,25
		Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	Indeks	57	59	61	62
		Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan GDPK 5 Pilar	Persen	41,67	-	-	91,67
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	Persen	61,21	61,58	62,07	59
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyusun (Grand Design Pembangunan Kependudukan) GDPK 5 Pilar	Persen	58,33	75	100	91,67
		Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	17,27	-	-	20,3
		Jumlah Keluarga Melaksanakan Pengasuhan Dan Pendampingan Pembentukan Karakter	Keluarga	59.663	-	-	107.957
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU						
		Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Persen	34,10	36,86	40,48	44,14
		Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	34,10	36,86	40,48	32,93
		Indeks Layanan Pelayaran	Persen	44,68	-	-	55,35
		Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	27,08	27,53	27,94	32,93

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Pelayaran	Persen	41,11	46,19	53,02	55,35
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU						
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks	2,99	3,37	3,56	3,06
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	95,83	95,85	95,87	92,5
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks	2,90	3,30	3,40	3,06
		Nilai dan Kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	95,83	95,85	95,87	81,5
		Persentase Pemenuhan Indikator SPBE	Persen	88,5	89	89,5	87,5
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU						
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,60	4,90	3,71 - 4,20	3,90 - 4,23
		Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-	-	-	57,99
		Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provisi	Persen	-	-	-	14,29
		Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	-	-	-	6,94
		Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	Persen	-	-	-	100
		Persentase Peningkatan SDM Koperasi	Persen	-	-	-	100
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi	Persen	-	-	-	100
		Persentase Peningkatan UMKM Yang Berdaya Saing Dan Produktif	Persen	-	-	-	100
		Persentase UMKM Yang Meningkat Skala Usahanya	Persen	100	100	100	100
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU						

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN		Triliun Rupiah	50	51	52	60
		Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	50	51	52	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	99,48	99,50	99,52	99,55
		Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi Yang Siap Ditingkatkan Menjadi RTO	Dokumen	1	1	1	6
		Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	-	-	-	10-30
		Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Berdasarkan Izin Prinsip Yang Diterbitkan	Triliun Rupiah	50	51	52	60
		Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0,03	0,02	0,02	99,44
		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	50	55	65	100
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU						
	Jumlah Atlit yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional		Orang	91	140	86	50
	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Pembangunan		Persen	41,36	39,07	40,46	0,027
		Jumlah Atlet yang Kompetitif Di Event Tingkat Wilayah dan Nasional	Orang	215	352	214	205
	Jumlah Pemuda yang berperan aktif di masyarakat		Orang	41,36	39,07	40,46	460
	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif dalam Pembangunan		Organisasi	-	-	-	10
		Jumlah Atlet Potensial Yang Dibina	Orang	293	364	212	364
		Jumlah Pemuda Yang Dibina Menjadi Kader Pramuka	Orang	50	50	50	100
		Jumlah Pemuda Yang Dibina	Orang	728	685	711	360
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU						

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		Indeks	-	-	-	3,06
	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		Indeks	-	-	-	3,06
	Indeks Pembangunan Statistik		Poin	-	-	-	2,16
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU						
	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		Indeks	-	-	-	3,06
	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		Indeks	2,90	3,30	3,40	3,06
	Persentase Tingkat Kematangan dan Keamanan Siber		Persen	100	100	100	80
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU						
	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau		Persen	27,27	36,36	45,45	54,54
	Persentase Budaya Melayu Riau Yang Dilindungi		Persen	76,20	78,30	80,40	82,5
	Persentase Budaya Melayu Riau Yang Dikembangkan		Persen	6	8	10	12
	Nilai Warisan Budaya		Nilai	-	-	-	57,4
	Nilai Ekspresi Budaya		Nilai	-	-	-	47,69
	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan		Data OPK	66	76	86	96
	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan		Persen	2,15	2,18	2,21	2,21
	Jumlah Sejarah Yang Dibina		Objek	25	0	0	50
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi		Objek	116	131	146	146
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum		Poin	65	75	85	85
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU						
	Nilai Indeks Literasi Masyarakat		Nilai	-	-	-	71

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Pustaka	4,70	5,31	8,20	20
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi	Nilai				68
		Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi	Pustaka	39	44	68	30
		Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi	Persen	-	-	-	100
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU						
		Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	81,59	81,59	81,59	90,05
		Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Nilai	-	-	-	97,05
		Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik	Persen	60	70	80	100
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU						
		NTN, NTPi	Persen	111	112	113	105
		Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Ton	284.974,86	296.394,57	308.327,84	272.712,51
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	Persen	79,04	82,2	85,48	89,91
		Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	Persen	18	20	22	22
		Luas Kawasan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil Yang Di Kelola	Ha	5	81.554	141.508	280.624
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	147.176,8	152.105,79	157.199,87	140.000
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	121.485,31	126.344,71	131.389,52	132.712,51

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Ditangani	Kasus	20	18	16	7
		Volume Produk Hasil Olahan Perikanan	Ton	16.312,77	17.944,05	19.738,45	29.845,28
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
	DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU						
		Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara	Milyar Rupiah	877,33	1.052,80	1.315,98	26.947
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jiwa	52.816	63.379	79.223	244.611
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jiwa	3.706.958	5.205.099	6.300.920	8.985.243
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,25	2,32	2,35	2.58
		Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara	Hari	-	-	-	1.00
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kategori Maju	Destinasi	-	-	-	3
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	-	-	-	5
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional	Pelaku	-	-	-	40
		Jumlah SDM Kepariwisata Ditingkatkan Kualitasnya	Orang	832	838	528	269
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	-	-	-	10
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU						
		NTUP Sub Sektor Peternakan	Persen	101,75	102,35	103,50	101,47
		Produksi Daging	Ton	59.912	61.096	62.303	84.768,00
		Persentase peningkatan produksi hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Persen	-	5	5	5
		Persentase Status Kesehatan Hewan	Persen	95,9	96,6	97,3	98,1
		Persentase Peningkatan Populasi	Persen	1,85	1,85	1,85	3

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	Persen	5	5	27	12
		Persentase Angka Kematian Ternak	Persen	3,1	2,8	2,5	2,15
		Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan	Persen	10	10	10	10
		Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	Persen	-	3	5	15
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU							
		NTUP Hortikultura	Poin	103,5	103,6	103,7	104.00
		NTUP Tanaman Pangan	Poin				100.10
		Jumlah Produksi Cabe	Ton	17.796	19.236	20.775	22.414
		Jumlah Produksi Durian	Ton	17.154	19.257	21.477	31.878
		Jumlah Produksi Padi	Ton	255.630	313.213	373.404	250.923
		Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Ton/Ha	-	-	-	4,2
		Luas Tanam Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Ha	-	-	-	55.846
		Rasio Luas Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Luas Serangan OPT Dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	-	-	-	76
		Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	3	3	3	3
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU							
		Nilai Tukar Usaha Petani	Persen				125
		Jumlah Produksi komoditas utama perkebunan	Ton	8,630,387	8,715,738	8,822,314	11.256.369
		Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	Ton	8,630,387	8,715,738	8,822,314	11.256.369

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan	Kg/Ha	12,549	12,609	12,669	12,79
		Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana	Persen	0,1	0,1	0,2	0,4
		Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin	Persen	63,76	66,95	70,73	76,81
		Persentase SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	0,01	1,78	1,96	2,34
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,80	70,10	70,41	72,41
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	1,50	1,52	1,10	17,94
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,80	70,10	70,41	72,41
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	1,50	1,52	1,10	17,94
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan	Persen	2	5	5	1,6
		Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persen	20	20	33	100
		Persentase Fasilitasi Pengelolaan Hutan	Persen	-	-	-	100
		Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis	Persen	1	1	1	1
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU						
		Rasio Elektrifikasi	Persen	92,53	92,63	92,72	95,68
		Persentase tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Persen	51,61	54,84	80	91,31
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi pertahun	Persen	-	-	-	4
		Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik	KK	1.485.873	1.822.020	1.824.204	1985898

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi	Persen	85,71	88,89	90,00	94,61
		Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	Persen	51,61	54,84	80,00	88
		Intensitas Energi	TOE/Milyar Rupiah	8,50	8,47	8,43	8,28
		Rasio Desa Berlistrik	Persen	99,45	99,67	99,78	100
		Persentase Pemakaian Dan Pengusahaan Air Tanah Yang Melakukan Upaya Konservasi	Persen	85,71	88,89	90,00	100
		Persentase Pelaku Usaha yang Dibina	Persen	51,61	60	80	88
		Bauran Energi	Persen	26,13	27,83	28,8	31,22
3.30	URUSAN PERDAGANGAN						
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU						
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,60	4,90	3,71 - 4,20	3,90 - 4,23
		Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	Persen				3,44
		Persentase Peningkatan Tertib Usaha	Persen	0	100	100	100
		Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	0	100	100
		Persentase Disparitas Harga Sesuai HET Dan Harga Acuan	Persen	-	-	-	3
		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	-	-	-	14
		Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Poin	-	-	-	80
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	-	-	-	22
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU						
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,60	4,90	3,71 - 4,20	3,90 - 4,23
		Nilai Output Industri	Triliun Rupiah				559,39

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri	Persen	100	100	100	91,67
		Persentase Izin Usaha Industri	Persen	100	100	100	100
		Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/Kota se-Provinsi Riau	Persen	-	-	-	100
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU						
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,63	65,81	66	66,19
		Jumlah Kawasan Yang Direncanakan	Kawasan	-	-	-	3
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						
	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU						
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68	70,2	72,02	72,02
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,11	76,01	76,92	77,11
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,52 - 6,87	6,65 - 6,31	6,42-6,23	6,51
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,60	4,90	3,71 - 4,20	3,90 - 4,23
		Tingkat Inflasi	Persen	-	-	-	2.22
		Persentase penyelesaian perda sesuai program legislasi daerah	Persen	-	-	-	100
		Persentase peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis yang direvisi/dihapus	Persen	-	-	-	100
		Indeks Kelembagaan	Poin	-	-	-	75
		Capaian akuntabilitas kinerja	Nilai	70,12	71,10	71,80	73,03
		Persentase Capaian pelaksanaan pembangunan (APBD, APBN, Wilayah dan Mandatori)	Persen	-	-	-	100
		Nilai EPPD	Nilai	-	-	-	3.47

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase SPM	Persen	-	-	-	100
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	80	84	86	3
		Indeks PMK	Poin	-	-	-	63.29
		Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen	-	-	-	100
		PDB sektor strategis (pertanian, migas, industri) perkapita	Juta Rupiah	-	-	-	716.385.768
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan	Persen	100	100	100	100
		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persen	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik	Persen	60	80	90	100
		Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	40	60	80	100
		Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
		Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100	100
		Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan	Persen	100	100	100	100
4.02	SEKRETARIAT DPRD						
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU						
		Indeks Kepuasan Layanan	Poin	74	75	76	77
		Indeks Kepuasan Layanan terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Poin	-	-	-	77
		Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	92	93	100	100

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
					2022	2023	2024	2025
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN							
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	IPPN Pemda			Indeks	-	-	-	83,08
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Persen	-	-	-	90.63
		Persentase kesesuaian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah		Persen	-	-	-	87.93
		Persentase keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah		Persen	-	-	-	80
			Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah	Persen	100	100	100	100
			Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100
5.02	KEUANGAN							
	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU							
	Persentase PAD terhadap Keseluruhan Pendapatan Daerah			Persen				60
		Angka pendapatan asli daerah		Rupiah (jt)	4.385.737	4.708.328	4.744.024	5.057.433
		Rasio efektifitas pendapatan asli daerah		Persen	100	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	85	80	85	92
			Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Persen	-	-	-	100
			Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	4.385.737	4.708.328	4.744.024	5.057.433
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU							
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			Poin	-	-	-	75
		Opini BPK Terhadap LKPD Provinsi Riau		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
		Persentase kesesuaian RAPBD Kabupaten/Kota dengan peraturan lebih tinggi dan dokumen perencanaan	Persen	-	-	-	100
		Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Persen	100	100	100	100
		Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola	Persen	100	100	100	100
5.03	KEPEGAWAIAN						
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU						
		Persentase Pemenuhan Implementasi Reformasi Birokrasi Level Mikro	Persen	-	-	-	100
		Indeks Sistem Merit	Poin	246,06	255,91	266,14	333
		Persentase Pelayanan ASN Yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI RIAU						
		Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	23	24	25	18
		Persentase Pemenuhan 20 JP Perorang Pertama	Persen	-	-	-	20
		Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Nilai	84	86	88	90
		Persentase Kelulusan ASN Yang Mengikuti Pelatihan	Persen	95	96	97	98
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						
		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	-	-	3,7
		Persentase Implementasi Hasil Litbangjirap	Persen	-	-	-	100
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	-	-	61
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
					2022	2023	2024	2025
	SEKRETARIAT DAERAH							
	Indeks Reformasi Birokrasi			Poin	68	70,2	72,02	72.02
		Nilai EPPD		Nilai	-	-	-	3.47
		Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan		Persen	-	-	-	50
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG							
	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU							
	IKM terhadap pelayanan Badan Penghubung			Nilai	85	85	86	86,5
		Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder		Urusan	85	85	86	85
		Presentase Layanan Terhadap Stakeholder		Persen	-	85	86	100
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							
	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU							
	Indeks Maturitas SPIP (SPIP TERINTEGRASI)			Level	85	85	86	3,1
		Indeks Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi)		Level	3	3	3	3,1
		Level Kapabilitas APIP (IACM)		Skor	3	3	3	3.4
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		Skor				3.0
			Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100
			Persentase Laporan Hasil Evaluasi	Persen	100	100	100	100
			Persentase OPD Yang Di Fasilitas	Persen	100	100	100	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU							

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun			
				2022	2023	2024	2025
	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Poin	73,79	75,11	76,01	77,11
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		Poin	78,71	79,16	80,31	81,5
		Indeks Kerjasama Antar Umat Beragama	Poin	74,15	75,71	77,03	79,03
		Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Poin	72,50	72,83	74,15	76,15
		Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	74,50	75,00	75,50	76,5
		Persentase Pemberdayaan Ormas	Persen	-	-	-	100
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Poin	3,13	3,13	3,15	3,2
		Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Persen	-	-	-	80
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Poin	3,24	3,24	3,26	3,29
		Persentase Ormas yang Berfungsi Sesuai Regulasi	Persen	75	75	75,05	75,5
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Poin	3,1	3,1	3,12	3,15
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Poin	2,92	2,92	2,94	3
		Persentase Timdu PKS Kab/Kota Yang Melaksanakan RAD Secara Efektif	Persen	-	-	-	66,67

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 ini merupakan perwujudan perencanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau memuat rencana pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Pencapaian target pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui Forum Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, serta kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tahun 2025 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025, dan akan dijadikan pedoman sebagai:

1. Pengendalian pembangunan jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan Perencanaan Tahunan (2025);
2. Pengendalian dan evaluasi pembangunan kewilayahan di wilayah administrasi Provinsi Riau maupun bagi Kabupaten/Kota;
3. Memantau pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
4. Sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau ditahun 2025.

RKPD ini juga akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Riau serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2025 yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian.

Pj. GUBERNUR RIAU,

Ir. S. F. HARIYANTO